



Kata Pengantar

Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan amanah dari RIPK Kabupaten Cirebon yang telah disusun, dikaitkan dengan dinamika perkembangan kebijakan yang terjadi baik dari aspek tata ruang maupun aspek sektoral, sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian penetapan Kawasan Peruntukan Industri yang dapat menjadi masukan bagi arah perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon.

Sesuai dengan lingkup kegiatan, salah satu produk dari kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan adalah buku laporan pendahuluan yang pada intinya berisikan mengenai rancangan pendekatan, metodologi, dan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan.

Buku laporan pendahuluan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon. Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap kegiatan ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan	1-3
1.3 Ruang Lingkup	1-3
1.3.1 Lingkup Kegiatan	1-3
1.3.2 Lingkup Wilayah	1-4
1.4 Landasaan Hukum	1-6
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	1-6

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	2-2
2.2 Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri	2-2
2.2.1 Pembangunan Kawasan Industri	2-2
2.2.2 Infrastruktur Kawasan Industri	2-3
2.3 Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri	2-4
2.4 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035	2-5
2.5 RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038	2-8
2.5.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	2-8
2.5.2 Rencana Struktur Ruang	2-10
2.5.3 Rencana Pola Ruang	2-14
2.5.4 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	2-16

BAB 3 TINJAUAN KEBIJAKAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

3.1	Kondisi Fisik Dasar Wilayah	3-2
3.1.1	Letak Geografis dan Administrasi	3-2
3.1.2	Kondisi Topografi	3-3
3.1.3	Kondisi Morfologi Wilayah	3-5
3.1.4	Kondisi Hidrologi	3-11
3.1.5	Kondisi Air Tanah	3-13
3.1.6	Potensi Bencana Alam	3-16
3.2	Penggunaan Lahan Industri	3-20
3.2.1	Penggunaan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon	3-20
3.2.2	Updating Penggunaan Lahan Tahun 2020	3-23
3.3	Kondisi Kependudukan	3-26
3.3.1	Jumlah Penduduk	3-26
3.3.2	Kepadatan Penduduk	3-26
3.3.3	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan	3-30
3.4	Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB	3-31
3.4.1	Kondisi Sektor Industri	3-31
3.4.2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	3-32
3.5	Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri	3-33
3.5.1	Kondisi Jaringan Listrik	3-33
3.5.2	Kondisi Jaringan Air Minum	3-34
3.5.3	Kondisi Jaringan Air Limbah	3-35
3.5.4	Kondisi Jaringan Drainase	3-35
3.5.5	Kondisi Sistem Persampahan	3-35

BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1	KERANGKA PIKIR DAN PENDEKATAN	4-2
4.1.1	Kerangka Pikir Pekerjaan	4-2
4.2	Pendekatan Teknis Pekerjaan	4-4
4.2.1	Kebutuhan Pendekatan Teknis Penanganan Pekerjaan	4-4
4.2.2	Pendekatan Eksploratif dalam Pengumpulan Data	4-4
4.2.2.1	Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data & Informasi	4-4
4.2.2.2	Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi	4-4
4.2.2.3	Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi & Kajian Materi Pekerjaan	4-5
4.2.2.4	Pendekatan Preskriptif dalam Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan	4-5
4.2.3	Pendekatan Analisis dan Perencanaan	4-5
4.2.3.1	Pendekatan Perencanaan Incremental-Strategis dan Strategis - Proaktif dalam Penyusunan Masterplan	4-5
4.2.3.2	Pendekatan Partisipatif / Pelibatan Pelaku Pembangunan	4-7
4.2.3.3	Pendekatan Menyeluruh dan Terpadu	4-8
4.2.3.4	Pendekatan Analisis Ambang Batas	4-8
4.2.3.5	Pendekatan Kesesuaian Ekologi dan Sumber Daya Alam	4-8
4.3	METODOLOGI Pengerjaan	4-9
4.3.1	Permodelan Interaksi antar Bagian Wilayah	4-10
4.3.2	Model Analisis Tata Ruang	4-11
4.3.2.1	Metoda Aksesibilitas	4-11
4.3.2.2	Metoda Skoring	4-12
4.3.2.3	Model Analisis Kegiatan	4-13
4.3.2.4	Model Tingkat Kemampuan Pelayanan Fasilitas	4-13

4.3.3	Metoda Analisis SWOT	4-14
4.3.4	Metode Wawancara Semi Terstruktur	4-17
4.3.4.1	Wawancara Individu/Perorangan.....	4-17
4.3.4.2	Wawancara perorangan pilihan :	4-18
4.3.4.3	Wawancara Kelompok	4-18
4.3.5	Metodologi Penyiapan Peta	4-18
4.3.5.1	Metoda Pengolahan Peta.....	4-19
4.3.5.2	Posisi dan Sistem Koordinat	4-19
4.3.5.3	Metode dalam Menentukan Sistem Referensi Koordinat	4-19
4.3.5.4	Model Desktop Cartography	4-20
4.3.5.5	Metode Konversi Data	4-21
4.3.5.6	Metode Penskalaan	4-21
4.3.5.7	Metode Layer and Style Atributting serta Coloring Table	4-21
4.3.5.8	Metode Input Data kedalam Atribut Layer dan Style.....	4-21
4.3.5.9	Model Editing Peta.....	4-21
4.3.5.10	Model Checkplot	4-22
4.3.5.11	Model Anotasi dan Pencetakan Draft.....	4-22
4.3.6	Metode Analisis Penggunaan Lahan.....	4-22
4.3.6.1	Model Klasifikasi Lahan.....	4-23
4.3.6.2	Model Overlay (Pertampalan Peta)	4-23
4.3.6.3	Teknik Penelusuran Desa/Lokasi (Transek)	4-23
4.3.7	Metode Analisis dan Perencanaan Ruang	4-24
4.3.7.1	Analisis Daya Dukung (Carrying Capacity).....	4-24
4.3.7.2	Metode Analisis Kesesuaian Ekologi dan SDA.....	4-26
4.3.7.3	Model Analisis Penggunaan Lahan	4-26
4.3.7.4	Analisa Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan Fungsi Kawasan Industri	4-27

BAB 5 PROGRAM KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

5.1	Rencana Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	5-2
5.2	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	5-4
5.3	Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan	5-5
5.3.1	Komposisi Tim dan Kualifikasi Tenaga Ahli	5-5
5.3.2	Organisasi Pengelolaan Pekerjaan.....	5-6
5.3.3	Sistem Pelaporan	5-7

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	1-4
Tabel 2.1	Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035.....	2-6
Tabel 2.2	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)	2-6
Tabel 2.3	Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI.....	2-7
Tabel 2.4	Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon	2-11
Tabel 3.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	3-2
Tabel 3.2	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah.....	3-3
Tabel 3.3	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	3-4
Tabel 3.4	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan	3-6
Tabel 3.5	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon.....	3-12
Tabel 3.6	Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon	3-13
Tabel 3.7	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon.....	3-16
Tabel 3.8	Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.....	3-17
Tabel 3.9	Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon	3-18
Tabel 3.10	Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon Tahun 2018	3-20
Tabel 3.11	Updeting Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020	3-23
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019.....	3-27
Tabel 3.13	Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019	3-28
Tabel 3.14	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon.....	3-30
Tabel 3.15	Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	3-31
Tabel 3.16	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	3-31

Tabel 3.17	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)	3-32
Tabel 3.18	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah).....	3-33
Tabel 3.19	Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	3-33
Tabel 3.20	Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....	3-34
Tabel 4.1	Produk yang dihasilkan oleh Ikonos	4-18
Tabel 5.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Kajian KPI Kab.Cirebon).....	5-4
Tabel 5.2	Komposisi Tim dan Kualifikasi Tenaga Ahli	5-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon	1-5
Gambar 2.1	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon.....	2-13
Gambar 2.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon.....	2-15
Gambar 2.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.....	2-17
Gambar 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon.....	3-7
Gambar 3.2	Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon.....	3-8
Gambar 3.3	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon.....	3-9
Gambar 3.4	Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon.....	3-10
Gambar 3.5	Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon.....	3-14
Gambar 3.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon	3-15
Gambar 3.7	Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon	3-19
Gambar 3.8	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018.....	3-22
Gambar 3.9	Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020	3-23
Gambar 3.10	Peta Updeting Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon Tahun 2020	3-25
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon	4-3
Gambar 4.2	Keterlibatan Pelaku Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana	4-7
Gambar 4.3	Matriks SWOT.....	4-14
Gambar 4.4	Posisi Pembangunan Kawasan Dalam Metode SWOT	4-17
Gambar 4.5	Spesifikasi dari satelit Ikonos.....	4-18
Gambar 4.6	Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian & Geodetik)	4-20
Gambar 4.7	Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Toposentrik.....	4-20
Gambar 4.8	Contoh Penulisan Peta berdasarkan PP.10/2000	4-22
Gambar 4.9	Skema Proses Overlay / Pertampalan Peta	4-23
Gambar 4.10	Carrying Capacity (Atherton 1991 dan Shelby 1984).....	4-25
Gambar 4.11	Carrying Capacity Indicator.....	4-25
Gambar 4.12	Tahapan Pengolahan Data dan Analisis dalam Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.....	4-28
Gambar 5.1	Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.....	5-3
Gambar 5.2	Organisasi Pengelolaan Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.....	5-7



**LAPORAN PENDAHULUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, Kabupaten Cirebon, yang termasuk Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning sebagai gerbang timur Jawa Barat, diarahkan dengan fokus pengembangan pada sektor industri. Di WP Ciayumajakuning, Kabupaten dan Kota Cirebon memiliki peran sebagai Pusat Kawasan Nasional (PKN), untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sementara pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), wilayah Cirebon dan sekitarnya masuk sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) bersama-sama dengan Indramayu dan Majalengka, yang akan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi pada Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Jawa. Pada WPPI tersebut, Kabupaten Cirebon dan Kertajati aerocity akan menjadi zona pertumbuhan industri.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon selama ini mempunyai beberapa produk unggulan sesuai dengan Kompetensi Inti Industri Daerah, antara lain mebel dan kerajinan rotan, mebel dan kerajinan kayu, konveksi, batu alam, dan batik. Industri mebel dan kerajinan rotan selama ini menjadi primadona, dan masih tetap akan menjadi produk unggulan fokus di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur akan mampu membuka peluang yang besar bagi jenis-jenis industri lain pada masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPIK merupakan perencanaan pembangunan industri di tingkat kabupaten/kota, yang disusun dengan memperhatikan berbagai hal, antara lain rencana pembangunan industri di tingkat provinsi dan nasional, RPJPD, RTRW, potensi sumber daya industri daerah, daya dukung lingkungan, serta proyeksi penyerapan tenaga kerja dan lahan industri.

Di dalam strategi dan program pembangunan industri di Kabupaten Cirebon, dimaksudkan untuk mengintegrasikan pendekatan dan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif. Program-program indikatif tersebut diantaranya adalah program pengembangan industri unggulan, program pengembangan perwilayahan industri yang meliputi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, selanjutnya program pembangunan sumber daya industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri serta program pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) luasnya berkisar pada 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang terdiri atas KPI menengah dan besar; KPI kecil dan mikro, KPI Agro, dan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah industri dan wilayah-wilayah lain dalam suatu daerah yang dapat menyangkut kepentingan industri, maka Perda RTRW juga sudah menentukan berbagai daerah sebagai Kawasan Peruntukan dengan luas yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan peruntukannya.

Dalam perjalanannya, Perda RTRW Kabupaten Cirebon ini mengalami proses evaluasi karena adanya sejumlah perkembangan yang diakibatkan oleh dinamika pembangunan maupun arah kebijakan nasional maupun regional yang semakin mempengaruhi arah pemanfaatan ruang di wilayah

Kabupaten Cirebon. Dari sektor perindustrian sendiri terdapat perkembangan yang terjadi seiring dengan pemberlakuan peraturan/perundangan baru yang dilandasi semangat investasi sebagaimana Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta sejumlah turunannya yang sedang disiapkan hingga saat ini. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda Kabupaten Cirebon merasa perlu diadakannya upaya kajian terhadap alokasi KPI di Kabupaten Cirebon sesuai dengan amanah dari RIPK Kabupaten Cirebon yang telah disusun, dikaitkan dengan dinamika perkembangan kebijakan yang terjadi baik dari aspek tata ruang maupun aspek sektoral, sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian penetapan Kawasan Peruntukan Industri yang dapat menjadi masukan bagi arah perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon.

1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk memperoleh informasi dan materi bagi perumusan kebijakan dan informasi mengenai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Teridentifikasinya keterkaitan antara program pembangunan industri dengan penetapan KPI dan realisasi pemanfaatan ruangnya di Kabupaten Cirebon;
- b. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan terkait pengembangan pemanfaatan lahan KPI yang masih tersedia;
- c. Terrumuskannya arahan strategis bagi upaya penetapan KPI yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Cirebon.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pada pekerjaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini, secara sinergis antara kegiatan diskusi dan penyusunan substansi, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- A. Rapat Koordinasi Pengembangan Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- B. Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon):
 1. Persiapan / perumusan instrumen penelitian
 2. Pengumpulan data
 3. Analisis dan Pembahasan
 4. Penyusunan Laporan

Adapun lingkup substansi yang akan dikembangkan didalam penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi kondisi eksisting dan potensi KPI yang tersedia di Kabupaten Cirebon;
2. Analisis kesesuaian arah kebijakan / program pembangunan industri dengan lokasi dan potensi KPI yang ada;
3. Analisis kebutuhan penyesuaian penetapan KPI berdasarkan arah kebijakan dan dinamika pembangunan;
4. Perumusan rekomendasi kebijakan pembentukan kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Cirebon

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan berada di Kabupaten Cirebon. Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6° 30' 58" - 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" - 108° 50' 03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 990,36 km² (99.036 Ha), yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 km² (54 km x 1,85 km).

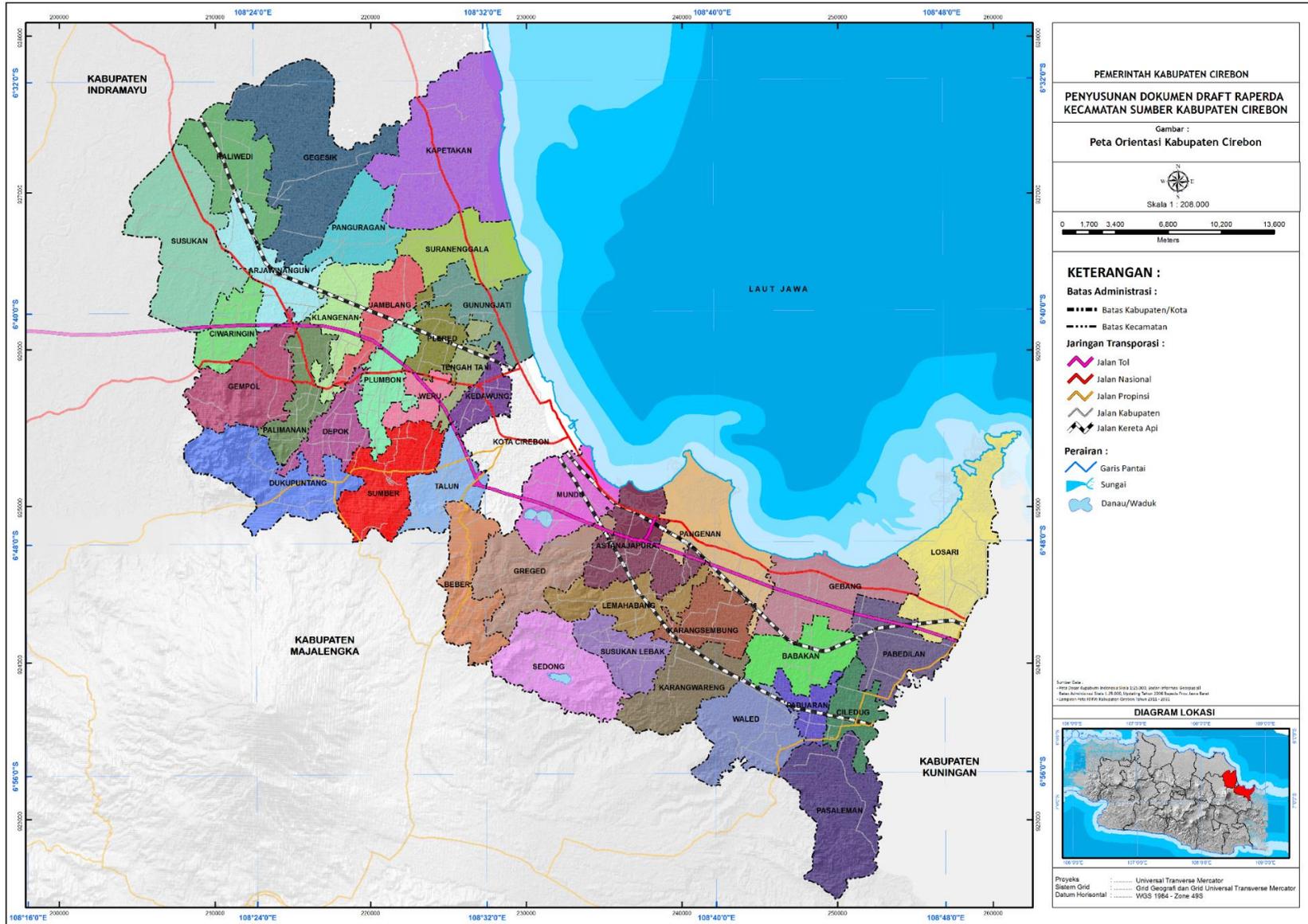
Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Pangenan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon



1.4 Landasaan Hukum

Rujukan/dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah 8 tahun 2018 mengenai Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan pendahuluan kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab sebagaimana dimaksud secara berurutan dijelaskan sebagai berikut.

01 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai penjelasan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari atas penjelasan mengenai : latar belakang pelaksanaan kegiatan; tujuan, dan sasaran pekerjaan; ruang lingkup pekerjaan; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan.

02 TINJAUAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan peraturan dan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri secara berhierarkis, mulai dari kebijakan tata ruang nasional, Provinsi, regional, dan review mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038.

02 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini berisikan mengenai profil umum wilayah Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari : administrasi wilayah, gambaran kondisi fisik dan lingkungan, gambaran kondisi sosial



kependudukan, gambaran kondisi sistem transportasi, gambaran kondisi sarana dan prasarana wilayah.

04 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, yang mencakup pemahaman mengenai kerangka pelaksanaan kegiatan, pendekatan dalam penyelesaian kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, proses analisis dalam kerangka kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon.

05 PROGRAM KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Bab ini secara umum akan membahas mengenai program kerja pelaksanaan pekerjaan yang terdiri atas beberapa tahap. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan serta organisasi pelaksana pekerjaan, yang meliputi organisasi pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan serta jadwal pelibatan tenaga ahli.



LAPORAN PENDAHULUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2

TINJAUAN PERATURAN DAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI



2.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Industri di daerah diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya, diantaranya dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi serta memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah melalui perwilayahan Industri.
5. Perwilayahan Industri dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
6. Perwilayahan Industri dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. pembangunan Kawasan Industri.

2.2 Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

2.2.1 Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk :

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Tata cara pembangunan Kawasan Industri meliputi :

- a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;

- b. Badan usaha sebagaimana dapat berbentuk :
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - Koperasi; atau
 - Perseroan Terbatas.
- c. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;
- d. Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;
- e. Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri paling sedikit memuat :
 - (1). Pemilihan Lokasi;
 - (2). Perizinan;
 - (3). Pengadaan Tanah;
 - (4). Pematangan Tanah;
 - (5). Pembangunan Infrastruktur; dan
 - (6). Pengelolaan.

2.2.2 Infrastruktur Kawasan Industri

Infrastruktur Kawasan Industri, meliputi :

- a. Infrastruktur Industri, meliputi :
 - (1). Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 - (2). Jaringan Telekomunikasi;
 - (3). Jaringan Sumber Daya Air dan Jaminan Pasokan Air Baku;
 - (4). Sanitasi;
 - (5). Jaringan Transportasi.
- b. Infrastruktur Penunjang, meliputi :
 - (1). Perumahan;
 - (2). Pendidikan dan Pelatihan;
 - (3). Penelitian dan Pengembangan;
 - (4). Kesehatan;
 - (5). Pemadam Kebakaran; dan
 - (6). Tempat Pembuangan Sampah.
- c. Infrastruktur Dasar, meliputi :
 - (1). Instalasi Pengolahan Air Baku;
 - (2). Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - (3). Saluran Drainase;
 - (4). Instalasi Penerangan Jalan; dan
 - (5). Jaringan Jalan.

2.3 Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Permenperin No. 40/2016 merupakan pengganti dari Permenperin Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, sebagai pedoman bagi pelaku usaha kawasan industri, pelaku usaha industri, Pemerintah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun Kawasan Industri.

Dalam Permenperin No. 40/2016 terdapat 4 bahasan penting mengenai konsepsi dasar, persiapan, pembangunan dan pengelolaan dalam membangun kawasan industri. Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi aparatur Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Industri. Sedangkan tujuannya adalah agar Kawasan Industri dibangun sesuai dengan tata ruang, didukung dengan infrastruktur, efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga pada gilirannya mampu menarik investasi bagi pengembangan industri dan mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri mencakup:

1. Tahap persiapan, meliputi kelayakan lokasi, penyusunan dokumen, dan pengurusan perizinan;
2. Tahap pembangunan, meliputi pembebasan lahan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED);
3. Tahap pengelolaan, mencakup kelembagaan, sistem manajemen, pelaksanaan tata tertib Kawasan Industri, pelayanan kepada tenan, pemasaran, pengembangan usaha, pengelolaan lingkungan, kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penyusunan data Kawasan Industri.

Dalam pembangunan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk Kawasan Industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan salah satu syarat bagi perizinan Kawasan Industri.

2. Ketersediaan Infrastruktur Industri

Pembangunan suatu Kawasan Industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan infrastruktur industri yang memadai. Dalam upaya mengembangkan suatu Kawasan Industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b. tersedianya sumber energi (gas, listrik, dan lain-lain) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kepastian pasokan;
- c. tersedianya sumber air sebagai air baku industri dan air minum baik yang bersumber dari air permukaan atau air tanah; dan
- d. tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data.

3. Ramah Lingkungan

Dalam pembangunan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri. Aspek efisiensi dimaksud antara lain meliputi efisiensi dalam aspek lokasi dan infrastruktur serta aspek pelayanan. Bagi tenan akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik yang dilengkapi dengan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing tenan tersebut. Sedangkan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri.

5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan suatu Kawasan Industri sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat, tindakan anarkis, dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri di dalam Kawasan Industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, Pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) untuk mendapatkan perlakuan khusus.

6. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun yaitu 2015-2035. Pelaksanaan RIPIN 2015-2035 melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam RIPIN, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam RIPIN dijabarkan juga mengenai sasaran, strategi dan tahapan pembangunan industri nasional. Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035

No	Indikator Pembangunan Industri	satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produksi industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	jumlah tenaga kerja disektor industri	Juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23	20,0
7	Nilai investasi sektor industri	Rp. Triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Dalam konteks perwilayahan, untuk mencapai percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka berdasarkan RIPIN secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Tabel 2.2 Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
I	Papua	1	Papua
II	Papua Barat	2	Papua Barat
III	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku	3	Sulawesi Utara
		4	Gorontalo
		5	Sulawesi Tengah
		6	Sulawesi Tenggara
		7	Maluku
		8	Maluku Utara
IV	Sulawesi Bagian Selatan	9	Sulawesi Barat
		10	Sulawesi Selatan
V	Kalimantan Bagian Timur	11	Kalimantan Utara
		12	Kalimantan Timur
VI	Kalimantan Bagian Barat	13	Kalimantan Barat
		14	Kalimantan Tengah
		15	Kalimantan Selatan
VII	Bali dan Nusa Tenggara	16	Bali
		17	Nusa Tenggara Barat
		18	Nusa Tenggara Timur
VIII	Sumatera Bagian Utara	19	Nanggroe Aceh Darussalam

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
		20	Sumatera Utara
		21	Sumatera Barat
		22	Riau
		23	Kep. Riau
IX	Sumatera Bagian Selatan	24	Jambi
		25	Bengkulu
		26	Bangka Belitung
		27	Sumatera Selatan
		28	Lampung
X	Jawa	29	Banten
		30	Jawa Barat
		31	DKI Jakarta
		32	DI Yogyakarta
		33	Jawa Tengah
		34	Jawa Timur

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dimana Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar pulau jawa;
4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5. Kualitas dan kuantitas sdm;
6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
7. Memiliki potensi sumber daya air industri;
8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur - Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitunb-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi	Sulawei Tengah
6	Kendari-Konawe-konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali	Sulawei Tenggara dan Sulawesi Tengah
7	Makasar-maros-Gowa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-Sambas-Bengkayang	Kalimantan Barat



No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
9	Tanah Bumbu-Kotabaru	Kalimantan Selatan
10	Samarinda-Balikpapan, dan Kutai Kartanegara- Bontang-Kutai Timur	Kalimantan Timur
11	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie-Bireun-Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli SerdangBedagai-Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin-Muaraenim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

2.5 RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

RTRW Kabupaten Cirebon telah dimutakhirkan melalui proses Peninjauan Kembali (PK) dan telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018.

2.5.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

3. Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi:
 - a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
4. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian.
6. Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.
7. Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
8. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
9. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
 - b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
10. Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.
11. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.
12. Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
13. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.
 14. Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.
 15. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 16. Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
 - b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2.5.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Selengkapnya rencana Sistem Kota di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut

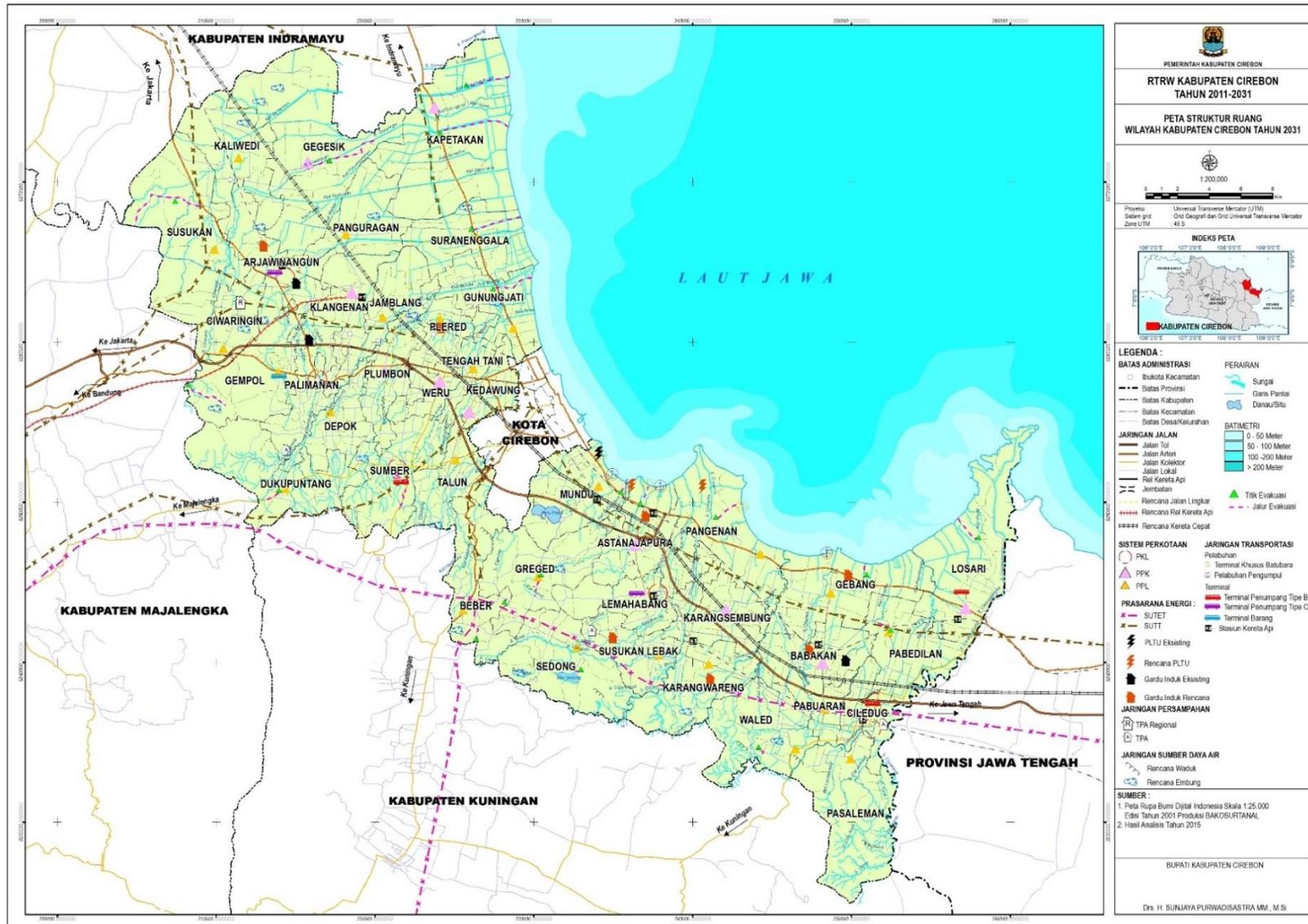
Tabel 2.4 Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon

No	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Fungsi Utama dan Penunjang
PKL CILEDUG				
1	PKL	Ciledug (Pusat)	1,325	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Losari (Sub Pusat)	3,907	Fungsi Penunjang: Perikanan, Perdagangan hasil pertanian, Industri, Pergudangan, Pelabuhan Intra Seluler, Perumahan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pariwisata, Pertambangan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Babakan	2,193	
4	PPL	Pabuaran	0,895	
5	PPL	Waled	2,846	
6	PPL	Pabedilan	2,408	
7	PPL	Gebang	3,168	
8	PPL	Pasaleman	3,211	
TOTAL LUAS PKL			19,953	
PKL LEMAH ABANG				
1	PKL	Lemahabang (Pusat)	2,149	Fungsi Utama: Industri Manufaktur
2	PKLp	Astanajapura (Sub Pusat)	2,547	Fungsi Penunjang: Industri, Pertanian, Perumahan, Pariwisata, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pertambangan, Pendidikan Kejuruan, Industri Hasil Hutan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Karangsembung	1,514	
4	PPL	Pangenan	3,054	
5	PPL	Sedong	3,102	
6	PPL	Susukan Lebak	1,874	
7	PPL	Mundu	2,558	
8	PPL	Karangwareng	2,312	
TOTAL LUAS PKL			19,110	
PKL SUMBER				
1	PKL	Sumber (Pusat)	2,565	Fungsi Utama: Pemerintahan, Perdagangan, Jasa
2	PKLp	Weru (Sub Pusat)	0,919	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pendidikan Tinggi, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perikanan Budidaya, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pertambangan, Fungsi PKN
3	PPK	Kedawung	0,958	
4	PPL	Greged	2,992	
5	PPL	Plered	1,134	
6	PPL	Tengah tani	0,897	
7	PPL	Talun	2,121	
8	PPL	Beber	2,325	
9	PPL	Gunungjati	1,7	
TOTAL LUAS PKL			15,611	
PKL PALIMANAN				
1	PKL	Palimanan (Pusat)	1,718	Fungsi Utama: Industri
2	PKLp	Plumbon (Sub Pusat)	1,819	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pariwisata, Agrowisata, Pertanian, Industri Batualam, Pertambangan, Perikanan Budidaya, Pendidikan Kejuruan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Klangenan	2,057	
4	PPL	Jamblang	1,776	
5	PPL	Gempol	3,073	
6	PPL	Depok	1,555	
7	PPL	Dukupuntang	3,64	
TOTAL LUAS PKL			15,638	
PKL ARJAWINANGUN				
1	PKL	Arjawinangun (Pusat)	2,411	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Kapetakan (Sub Pusat)	6,02	Fungsi Penunjang : Perikanan Tangkap, dan Budidaya, Agrowisata, Industri, Pendidikan Tinggi, Pelayanan Sosial-Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Gegesik	6,038	
4	PPL	Kaliwedi	2,782	
5	PPL	Susukan	5,01	
6	PPL	Panguragan	2,031	
7	PPL	Suranenggala	2,653	
8	PPL	Ciwaringin	1,779	
TOTAL LUAS PKL			28,724	
KABUPATEN CIREBON			99,036	

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Fungsi utama dan penunjang untuk PKL Sumber yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi. Dalam rencana sistem jaringan prasarana RTRW Kabupaten Cirebon terkait Kecamatan Sumber meliputi :

- Pengoptimalan jalan Kolektor Primer 2 (KP2) ruas Sumber - Majalengka, ruas Sumber - Kalitanjung, ruas Plered - Sumber dan ruas Sumber - Mandirancan.
- Peningkatan terminal penumpang Tipe-B di Kecamatan Sumber;
- Rencana jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi :
 - ✓ Sumber - Sindangjawa - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;
 - ✓ Sumber - Plered (Terminal Weru);
 - ✓ Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kramat;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat;
 - ✓ Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;
- Rencana jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Kecamatan Sumber.

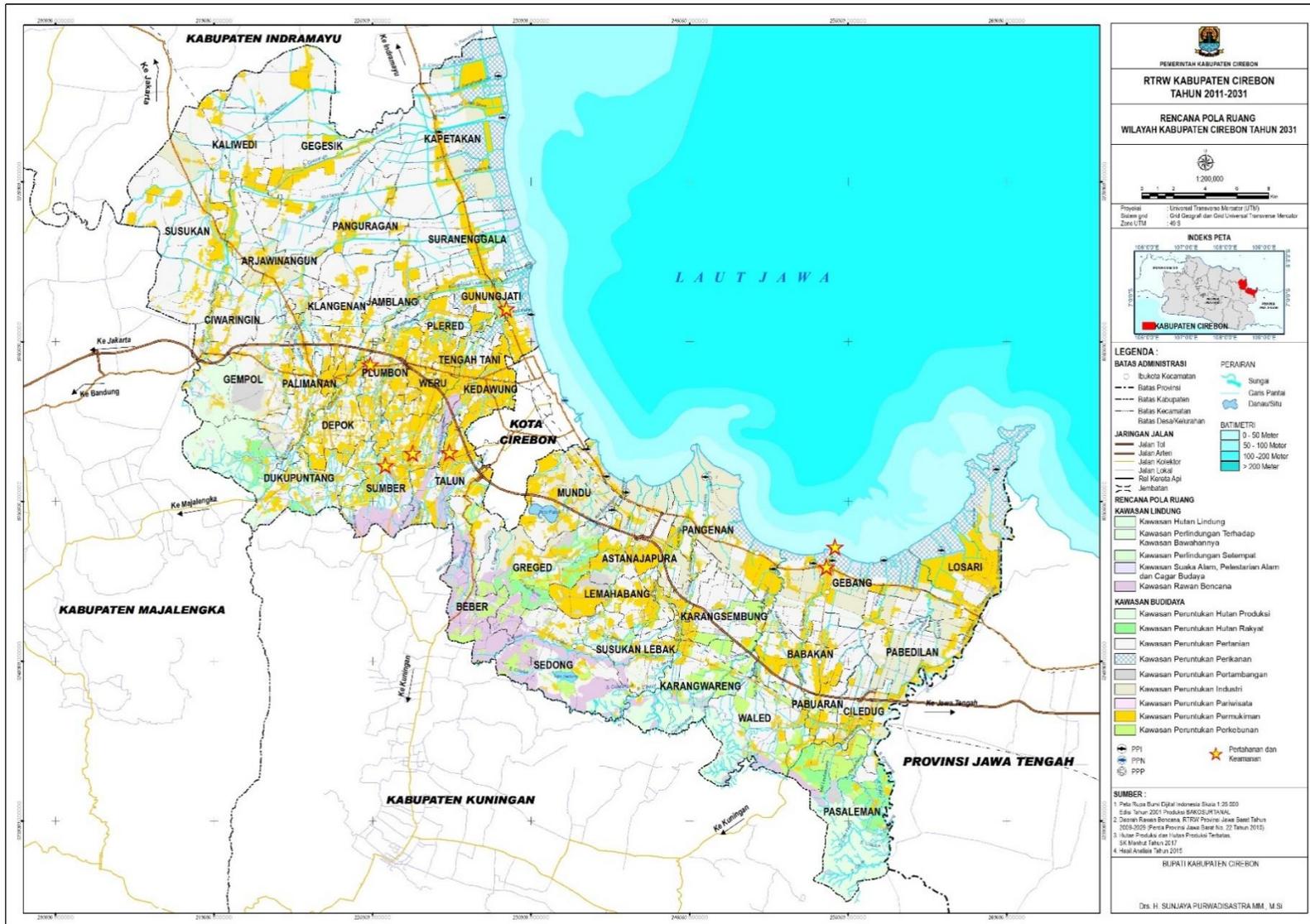


Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

2.5.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon meliputi :

- Rencana kawasan lindung meliputi :
 - ✓ Rencana kawasan sempadan sungai kurang lebih 20 (duapuluh) hektar.
 - ✓ Kawasan mata air berada di Desa Sidawangi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
 - ✓ Ruang Terbuka Hijau Publik 20% (dua perseratus) terdiri atas :
 - RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - taman kota;
 - hutan kota; dan
 - sabuk hijau (green belt)
 - RTH jalur hijau jalan terdiri atas :
 - pulau jalan dan median jalan;
 - jalur pejalan kaki; dan
 - ruang di bawah jalan layang.
 - RTH fungsi tertentu terdiri atas :
 - RTH sempadan rel kereta api;
 - jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - RTH sempadan sungai;
 - RTH sempadan pantai;
 - RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - lapangan olahraga; dan
 - pemakaman.
 - ✓ Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu di Desa Sidawangi.
 - ✓ Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.
 - ✓ Taman suaka margasatwa kera Plangon (Desa Babakan Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar).
- Rencana kawasan budidaya meliputi :
 - ✓ Hutan produksi terbatas (HPT) dikelola oleh KPH Kuningan dan KPH Majalengka, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan hutan rakyat di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman tahunan, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ kawasan permukiman perkotaan yang menjadi PKL
 - ✓ Kawasan Militer Angkatan Darat.
 - ✓ Kawasan peruntukan Pendidikan Tinggi.
 - ✓ Kawasan peruntukan rumah sakit.



Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon

2.5.4 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas: (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

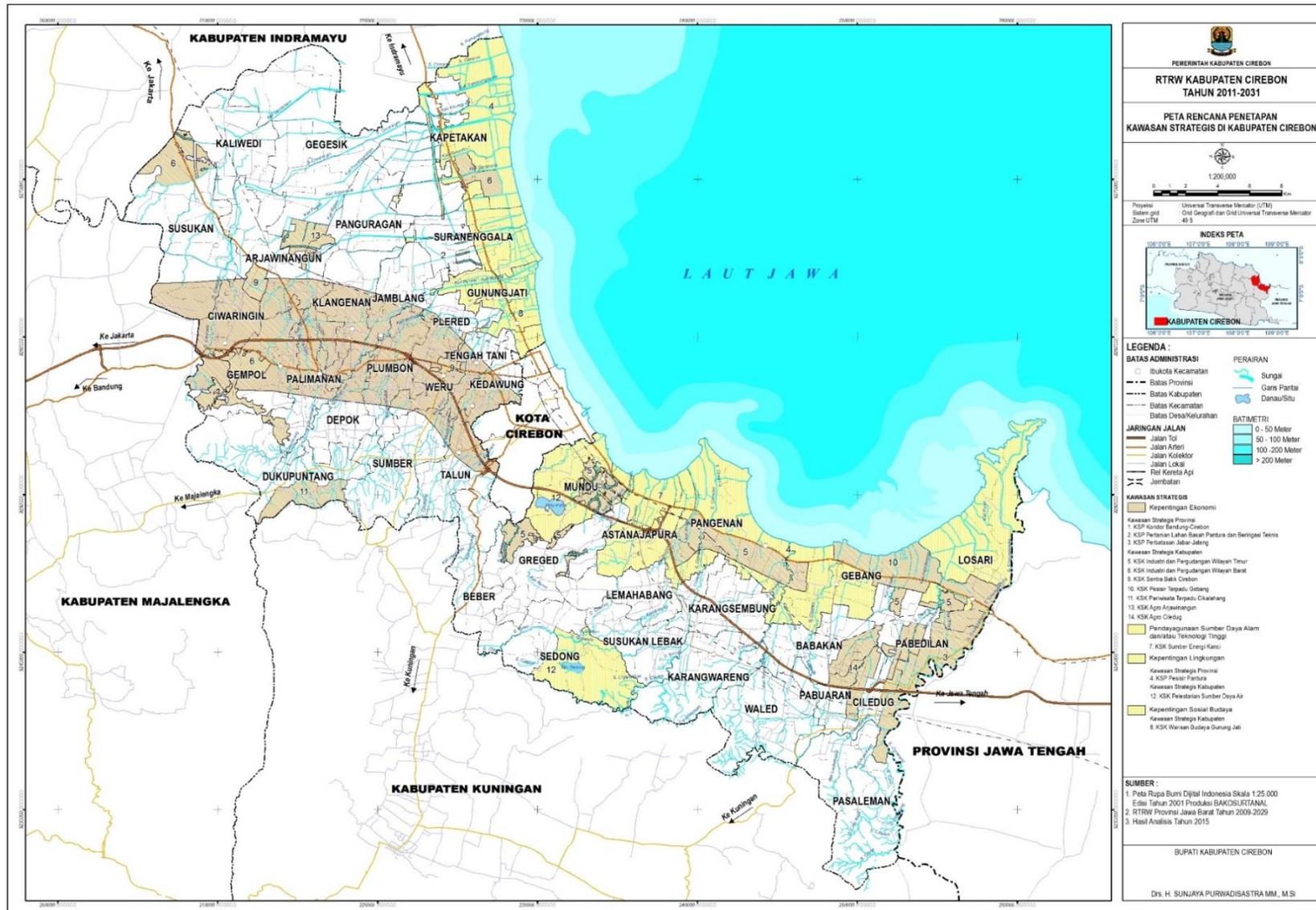
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. KSP Pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat;
2. KSP Koridor Bandung-Cirebon;
3. KSP Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah; dan
4. KSP Pesisir Pantura.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri dari:

- B.2 KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Barat, meliputi: Kecamatan Gempol; Kecamatan Susukan; Kecamatan Kaliwedi; Kecamatan Ciwaringin; dan Kecamatan Kapetakan.
 - b. KSK Industri dan Pergudangan Wilayah Timur, meliputi: Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Pangenan; Kecamatan Gebang; Kecamatan Losari; Kecamatan Pabedilan; dan Kecamatan Greged.
 - c. KSK Sentra Batik Cirebon, meliputi: Kecamatan Plered; Kecamatan Weru; dan Kecamatan Ciwaringin.
 - d. KSK Pesisir Terpadu Gebang berada di Kecamatan Gebang.
 - e. KSK Pariwisata Terpadu Cikalahang berada di Kecamatan Dukupuntang.
 - f. KSK Agro Arjawinangun, meliputi: Kecamatan Arjawinangun; Kecamatan Panguragan; dan Kecamatan Gegecik.
 - g. KSK Agro Ciledug, meliputi: Kecamatan Ciledug; Kecamatan Babakan; dan Kecamatan Pabuaran.
- B.3 KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Warisan Budaya Gunungjati.
- B.4 KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Pelestarian Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Kecamatan Susukan;
 - b. Kecamatan Mundu;
 - c. Kecamatan Sedong; dan
 - d. Kecamatan Ciledug.
 - e. KSK pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi adalah KSK Sumber Energi, meliputi: Kecamatan Mundu; Kecamatan Astanajapura; dan Kecamatan Pangenan.

Berdasarkan uraian tersebut, muatan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon, sebagian wilayah Kecamatan Sumber merupakan kawasan strategis kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon



LAPORAN PENDAHULUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3

GAMBARAN UMUM WILAYAH



3.1 Kondisi Fisik Dasar Wilayah

3.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada 6°30'58"–7°00' 24" Lintang Selatan dan 108°19'30"–108°50'03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai wilayah seluas ± 990,36 km², yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan.

Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Cirebon mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil. Berdasarkan hal tersebut maka luas perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 399.6 km² (54 km x 4 mil x 1.85 km).

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa;
- ☐ Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan;
- ☐ Sebelah Barat : kabupaten Majalengka ;
- ☐ Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Panganan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-



No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

3.1.2 Kondisi Topografi

Ketinggian di Kabupaten Cirebon terdapat 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 83.826,31 Ha;
2. Wilayah dengan ketinggian > 25-100 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 6.691,54 Ha;
3. Wilayah dengan ketinggian > 100-200 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 10.055,01 Ha;
4. Wilayah dengan ketinggian > 200-300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 5.365,78 Ha;
5. Wilayah dengan ketinggian >300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 3.264,15 Ha.

Tabel 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.654,84	133,65	102,59	0	0	2.891,08
3	Babakan	2.218,13	0	0	0	0	2.218,13
4	Beber	0	72,17	1.133,61	1.346,35	2.462,53	5.014,66
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.867,64	44,21	9,69	0	0	1.921,54
7	Depok	1.308,67	329,61	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	12,26	1.244,81	1.200,07	608,1	516,94	3.582,18
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	1.600,25	338,23	953,17	192,79	12,55	3.096,99
12	Greged	351,25	339,74	1.459,25	1.024,58	46,49	3.221,31
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,88	0	0	0	0	1.658,88
15	Kaliwedi	2.871,12	0	0	0	0	2.871,12
16	Kapetakan	6.660,36	0	0	0	0	6.660,36
17	Karangsembung	1.881,81	0	0	0	0	1.881,81
18	Karangwareng	2.082,85	1,33	649,38	0	0	2.733,56
19	Kedawung	1.117,38	0	0	0	0	1.117,38
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	2.042,44
21	Emahabang	1.162,49	390,13	706,14	6,14	0	2.264,90

No.	Kecamatan	Ketingian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	2.441,69	272,28	25,46	0	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,23	0	0	0	0	957,23
26	Palimanan	1.506,23	247,73	154,53	3,38	0	1.911,87
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,91	0	0	0	0	2.199,91
29	Pasaleman	2.409,59	906,02	168,83	0	0	3.484,44
30	Plered	1.322,93	0	0	0	0	1.322,93
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	234,71	290,2	1.373,94	1.544,48	225,63	3.668,96
33	Sumber	1.030,22	583,55	775,43	585,39	0	2.974,59
34	Suranenggala	2.574,75	0	0	0	0	2.574,75
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	626,83	396,05	781,95	0	0	1.804,83
37	Talun	657,77	654,98	560,96	54,58	0	1.928,29
38	Tengah Tani	976,18	0	0	0	0	976,18
39	Waled	2.514,81	446,84	0	0	0	2.961,65
40	Weru	911	0	0	0	0	911,00
Kabupaten Cirebon		83.826,51	6.691,53	10.055,00	5.365,79	3.264,14	109.202,97

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kemiringan lereng di Kabupaten Cirebon terdiri dari 6 (enam) kelas, yaitu: 0-3 %, >3-8 %, > 8-15 %, >15-25 %, 25-40 % dan > 40%. Dominasi kemiringan paling luas adalah 0-3 % mencapai 87.961,65 Ha, sedangkan kelas kemiringan > 40 % 91,15 Ha hanya terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Dukupuntang 1.350,25 Ha, Kecamatan Gempol 59,74 Ha dan Kecamatan Palimanan 31,41 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.512,62	378,47	0	0	0	0	2.891,09
3	Babakan	2.218,15	0	0	0	0	0	2.218,15
4	Beber	104,52	441,16	866,41	489,63	650,4	0	2.552,12
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.921,54	0	0	0	0	0	1.921,54
7	Depok	1.638,28	0	0	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	1.733,02	114,45	98,01	0	286,45	1.350,25	3.582,19
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	2.548,92	0	0	0	488,32	59,74	3.096,99
12	Greged	886,19	758,63	417,4	913,8	245,28	0	3.221,30
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,89	0	0	0	0	0	1.658,89
15	Kaliwedi	2.871,13	0	0	0	0	0	2.871,13
16	Kapetakan	6.660,37	0	0	0	0	0	6.660,37
17	Karangsembung	1.877,26	0	0	4,54	0	0	1.881,80
18	Karangwareng	1.447,92	539,37	251,42	410,57	84,26	0	2.733,54
19	Kedawung	1.073,72	0	43,65	0	0	0	1.117,37
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	0	2.042,44

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
21	Lemahabang	1.129,82	749,89	13,94	371,25	0	0	2.264,90
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	1.597,17	787,73	0	275,33	79,2	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,24	0	0	0	0	0	957,24
26	Palimanan	1.859,86	0	0	0	20,61	31,41	1.911,88
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,90	0	0	0	0	0	2.199,90
29	Pasaleman	2.805,16	0	0	570,69	108,6	0	3.484,45
30	Plered	1.322,90	0	0	0	0	0	1.322,90
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	14,06	434,47	1.478,44	598,69	917,65	0	3.443,31
33	Sumber	2.604,63	168,99	200,97	0	0	0	2.974,60
34	Suranenggala	2.574,74	0	0	0	0	0	2.574,74
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	469,41	275,64	448,47	219,88	391,43	0	1.804,83
37	Talun	688,55	812,44	264,26	104,37	58,64	0	1.928,26
38	Tengah Tani	910,88	0	65,32	0	0	0	976,2
39	Waled	2.804,04	0	0	157,6	0	0	2.961,64
40	Weru	856,03	0	55	0	0	0	911,03
Kabupaten Cirebon		87.961,65	5.461,24	4.203,29	4.116,35	3.330,84	91,15	106.514,80

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

3.1.3 Kondisi Morfologi Wilayah

Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Cirebon terdiri dari satuan morfologi dataran dan satuan morfologi pegunungan dan perbukitan. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, serta membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Sedangkan satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar atau sedikit bergelombang.

Secara lebih rinci satuan morfologi di wilayah Kabupaten Cirebon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Sub satuan morfologi datar adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar dengan kisaran kelas lereng 0-2%;
- Sub satuan morfologi datar dan sedikit bergelombang dengan kisaran kelas lereng lebih dari 2-15%;
- Sub satuan morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 15-25% dan memperlihatkan relief halus;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar lebih dari 25-40% dan memperlihatkan relief sedang;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan pegunungan terjal dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

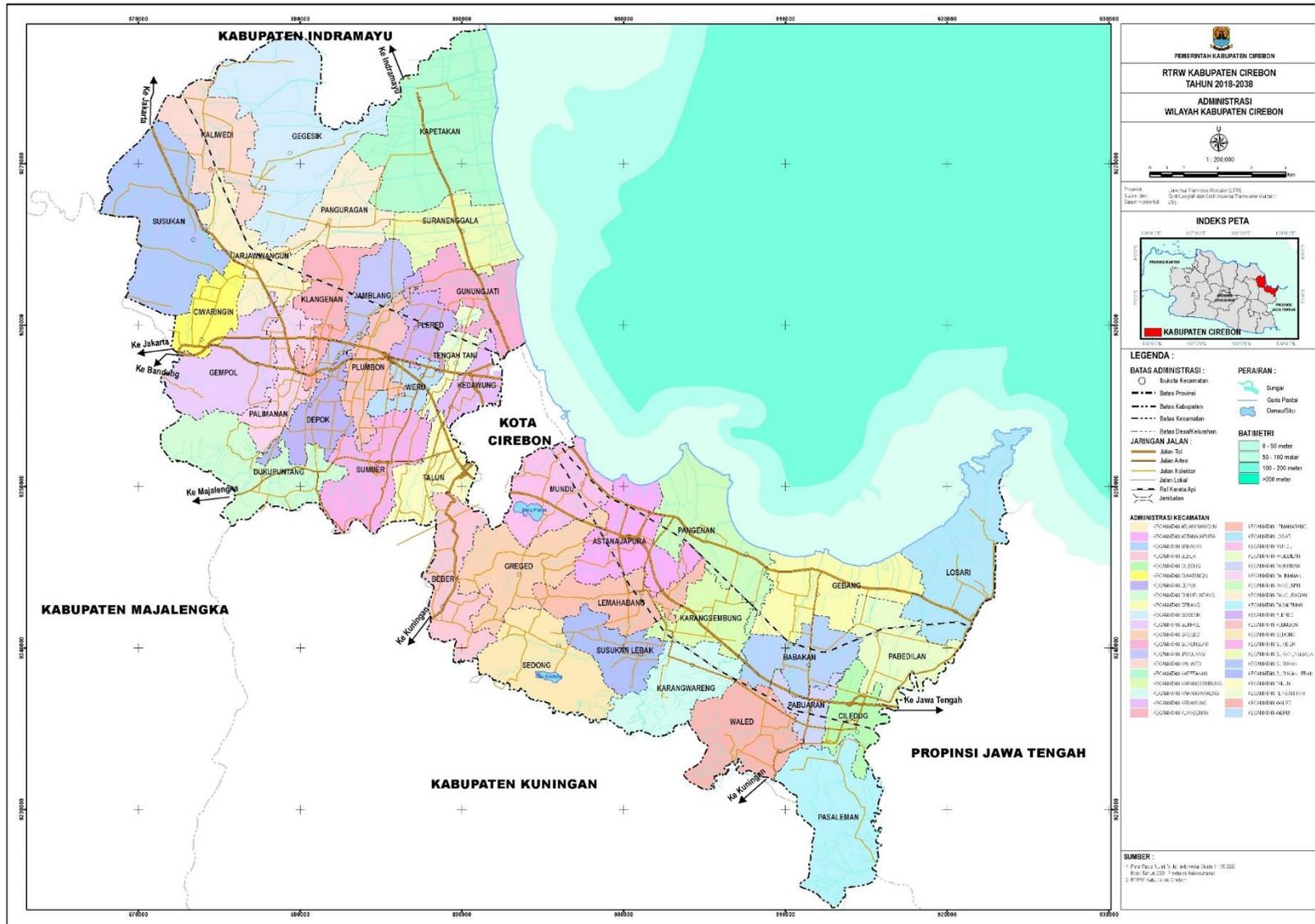
Tabel 3.4 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/Perbukitan	Datar	Gunung/Pegunungan dan Bukit	
1	Arjawinangun	0	2429	0	2.429,04
2	Astanajapura	0	2891	0	2.891,09
3	Babakan	0	2218	0	2.218,15
4	Beber	490	1412	650	2.552,12
5	Ciledug	0	1461	0	1.460,93
6	Ciwaringin	0	1922	0	1.921,54
7	Depok	0	1638	0	1.638,28
8	Dukupuntang	0	1945	1637	3.582,19
9	Gebang	0	3544	0	3.544,22
10	Gegesik	0	6410	0	6.409,90
11	Gempol	0	2549	548	3.096,99
12	Greged	914	2062	245	3.220,55
13	Gunungjati	0	2246	0	2.245,55
14	Jamblang	0	1659	0	1.658,89
15	Kaliwedi	0	2871	0	2.871,13
16	Kapetakan	0	6660	0	6.660,37
17	Karangsembung	5	1877	0	1.881,80
18	Karangwareng	411	2239	4	2.733,54
19	Kedawung	0	1117	0	1.117,37
20	Klangenan	0	2042	0	2.042,44
21	Lemahabang	371	1894	0	2.264,90
22	Losari	0	4582	0	4.582,04
23	Mundu	275	2385	79	2.739,43
24	Pabedilan	0	2533	0	2.533,41
25	Pabuaran	0	957	0	957,24
26	Palimanan	0	1860	52	1.911,88
27	Pangenan	0	3576	0	3.576,07
28	Panguragan	0	2200	0	2.199,90
29	Pasaleman	571	2805	109	3.484,45
30	Plered	0	1323	0	1.322,90
31	Plumbon	0	1903	0	1.903,34
32	Sedong	599	1927	918	3.443,31
33	Sumber	0	2975	0	2.974,60
34	Suranenggala	0	2575	0	2.574,74
35	Susukan	0	5288	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	22	1194	391	1.804,83
37	Talun	104	1765	59	1.928,26
38	Tengah Tani	0	976	0	976,2
39	Waled	158	2804	0	2.961,64
40	Weru	0	911	0	911,03
Kabupaten Cirebon		3.918,14	97.625,71	4.692,18	106.514,05

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

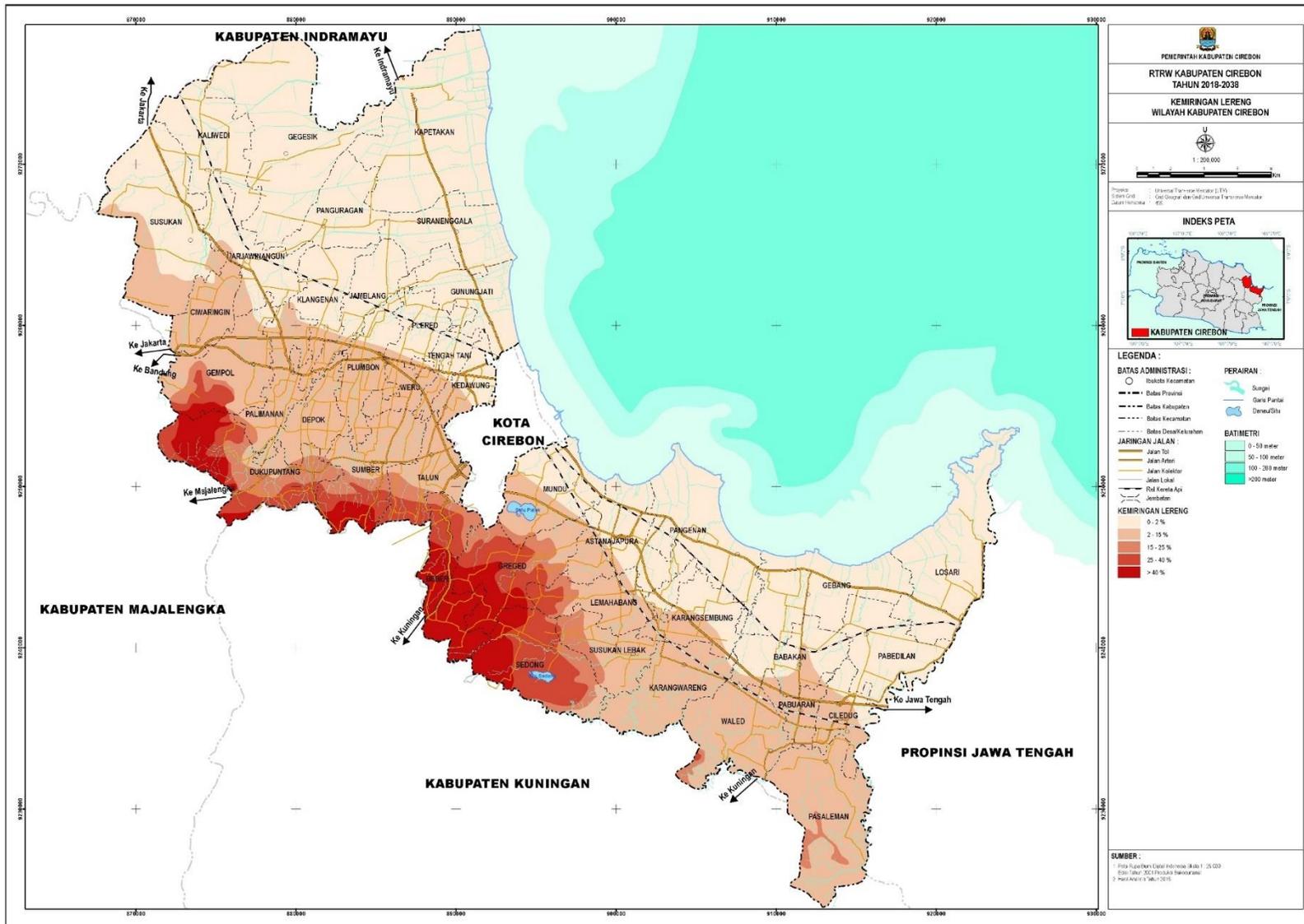


Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



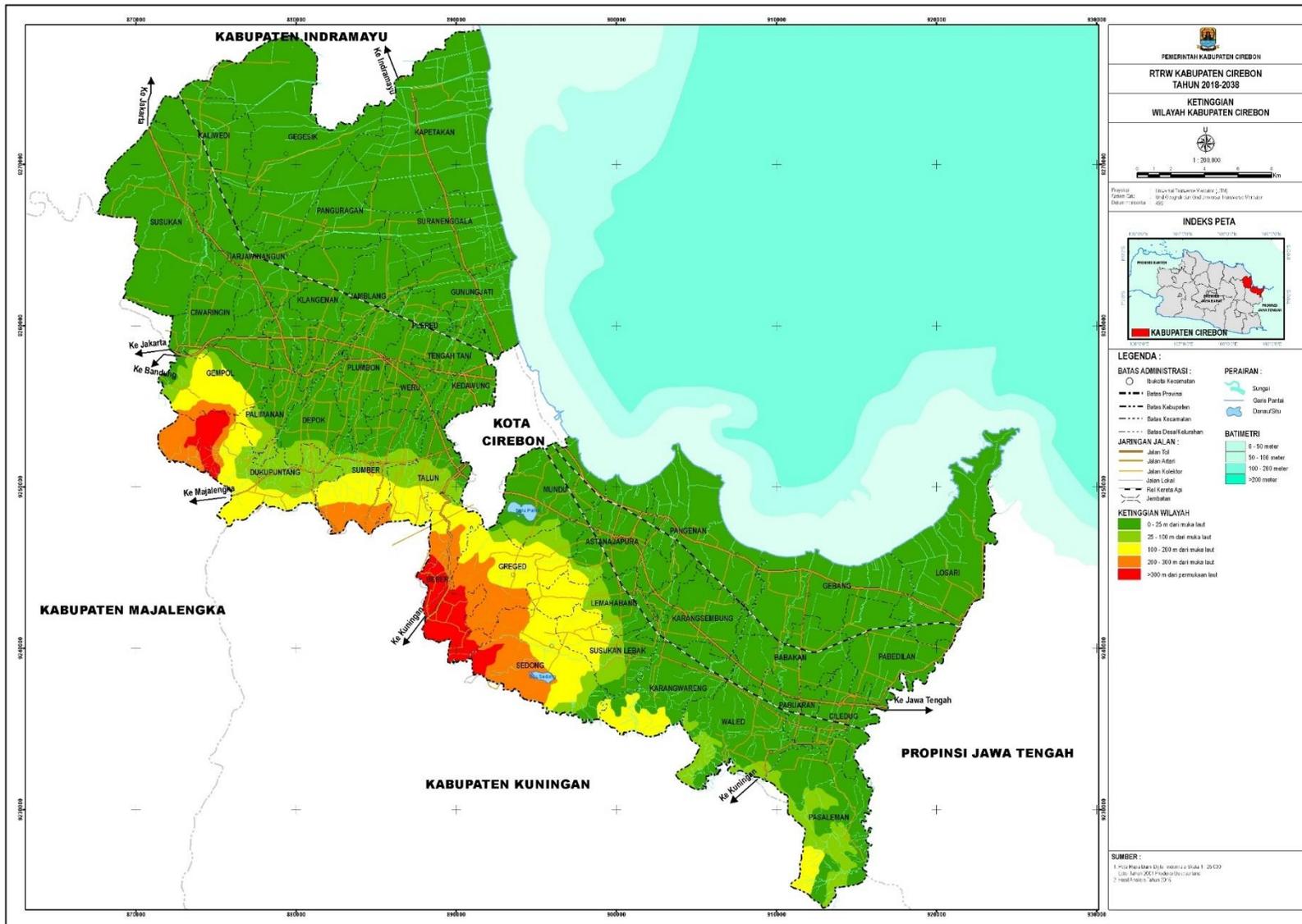


Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon



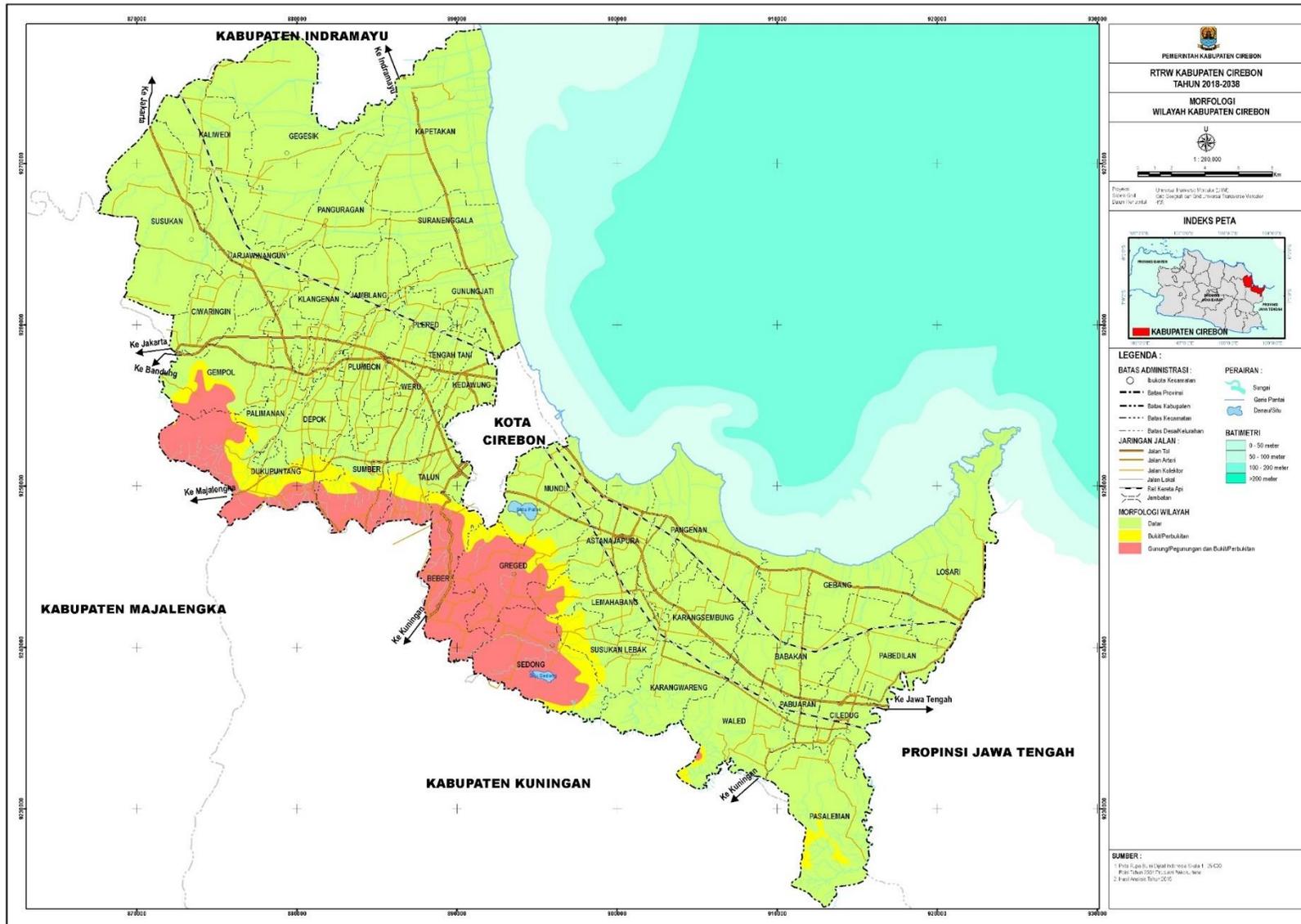


Gambar 3.3 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon





Gambar 3.4 Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon



3.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Cirebon meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Untuk wilayah sungai, Kabupaten Cirebon memiliki 1 (satu) buah Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Selain itu juga Kabupaten Cirebon memiliki 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dengan luas sebesar 1.312 Km².

DAS Cisanggarung memiliki beberapa Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam beberapa kewenangan baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pembagian wewenang DI tersebut sebagai berikut :

1. DI dengan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi: Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanisi.
2. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :
 - a. DI Rentang seluas ± 20.632 Ha;
 - b. DI Ciwaringan seluas ±1.103 Ha;
 - c. DI Seuseupan seluas ± 3.865 Ha dan
 - d. DI Cikeusik seluas ±6.903 Ha.
3. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. DI Walahar seluas ±1.292 Ha;
 - b. DI Jamblang seluas ± 2.164 Ha;
 - c. DI Cipager seluas ± 1.056 Ha;
 - d. DI Setupatok seluas ±1.408 Ha;
 - e. DI Paniis Lebak seluas ± 332 Ha;
 - f. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 - g. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 - h. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 - i. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 - j. DI Katiga seluas ± 662 Ha; dan
 - k. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha.
4. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
 - a. DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 - b. DI Soka seluas ± 282 Ha;
 - c. DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
 - d. DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 - e. DI Keputon seluas ± 446 Ha;
 - f. DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
 - g. DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
 - h. DI Agung seluas ± 711 Ha;
 - i. DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
 - j. DI Panongan seluas ± 952 Ha dan
 - k. DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

Tabel 3.5 Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13	Gunungjati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
Kabupaten Cirebon		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	106.514,18

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah danau/ situ yaitu : Setu Patok di Kecamatan Mundu seluas 175 Ha dengan kapasitas tampung 13.790.000 m³ dan Setu Sedong di Kecamatan Sedong seluas 19,67 Ha dengan kapasitas tampung 1.850.000 m³.

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 (empat puluh empat) titik yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sedangkan jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	4	1. Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2. Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3. Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4. Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
2	Palimanan	1	1. Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1. Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 2. Mata air Balonggede di Desa Cipinang 3. Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1. Mata air Bakam di Desa Greged 2. Mata air Umbar di Desa Nanggela 3. Mata air Cilengceng di Desa Nanggela 4. Mata air Mandiangin di Desa Durajaya 5. Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6. Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7. Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1. Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2. Mata air Cidahu di Desa Belawa 3. Mata air Ciloa di Desa Belawa 4. Mata air Kegambulan di Desa Belawa; 5. Mata air Cikondang di Desa Wangkelang; 6. Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang; 7. Mata air Pesantren di Desa Pasawahan; 8. Mata air Cibirung di Desa Pasawahan; 9. Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan; 10. Mata air Sindang Pancuran di Desa Sindanglaut; 11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut; 12. Mata air Cibansari di Desa Cipeujeuh; 13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon; 14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;
6	Sedong	1	1. Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1. Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem; 2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem 3. Mata air Gunung Cibulut di Desa Ciuyah 4. Mata air Balong di Desa Ciuyah 5. Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman;	2	1. Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang 2. Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1. Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1. Mata air Krandon di Desa Krandon 2. Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	3	1. Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2. Mata air Seureuh Beureun di Desa Sidawangi 3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

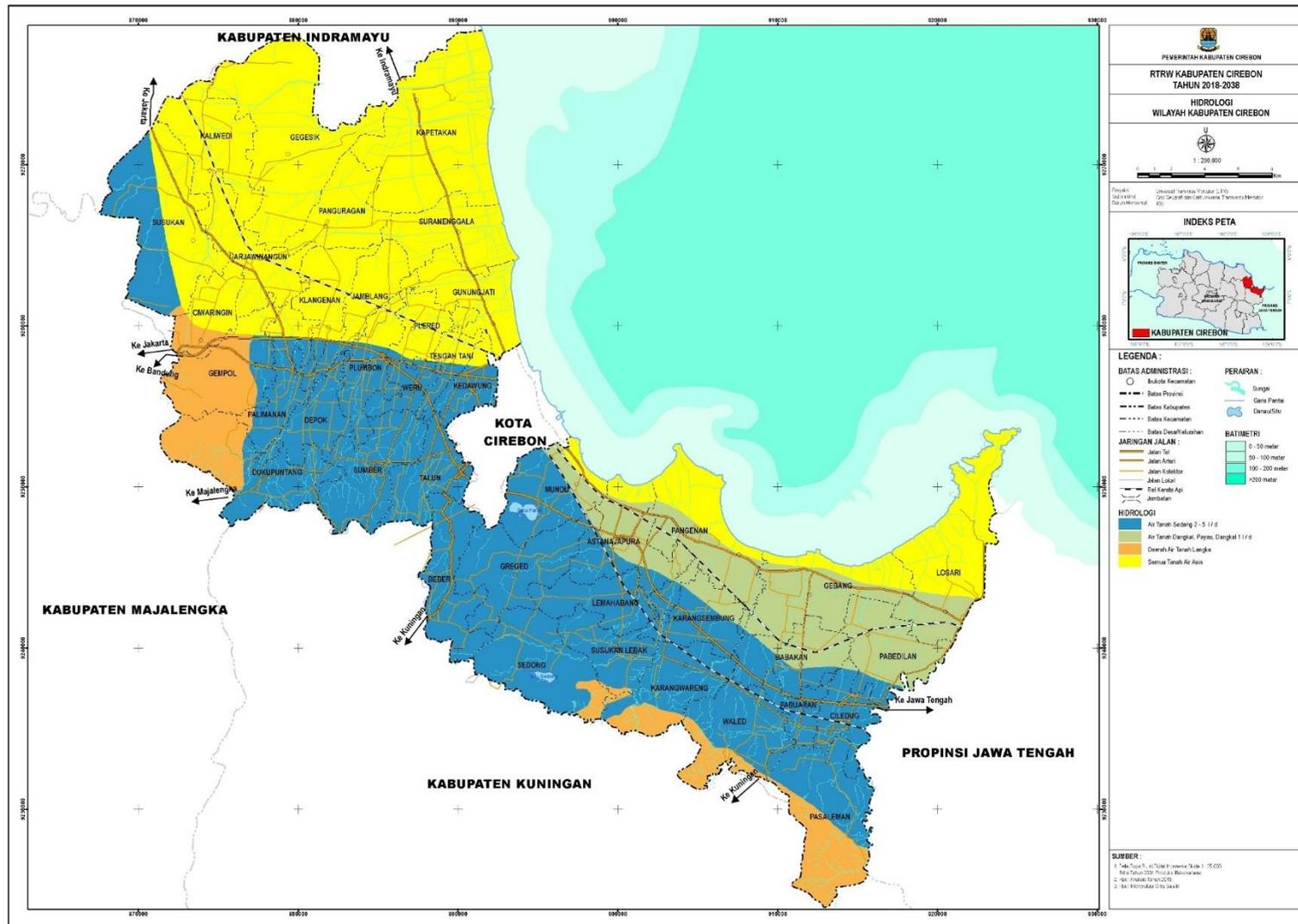
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

3.1.5 Kondisi Air Tanah

Kondisi air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) daerah/ wilayah, yaitu : daerah air tanah asin, daerah air tanah dangkal, daerah air tanah sedang, dan daerah air tanah langka.

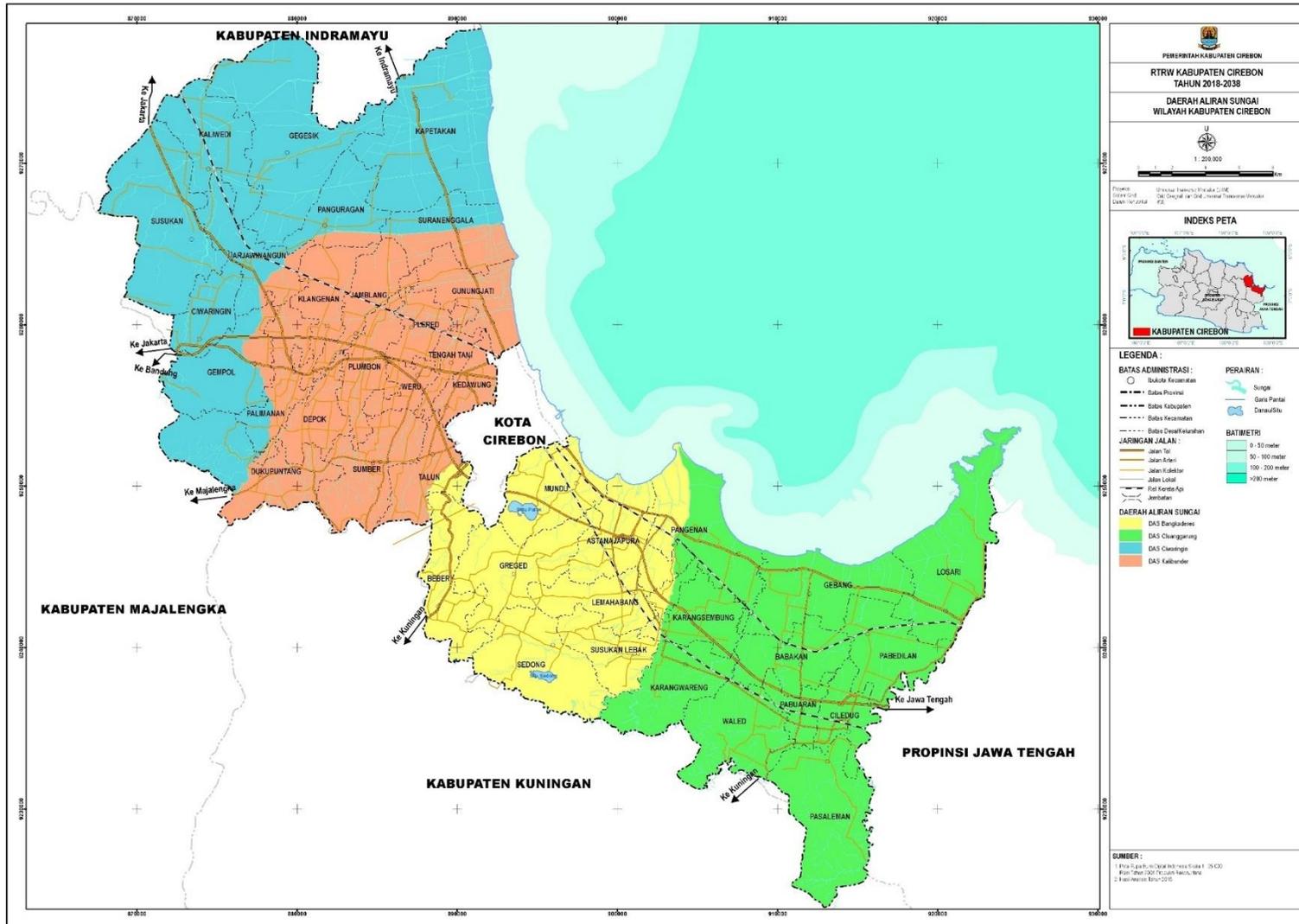


Gambar 3.5 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon





Gambar 3.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon



3.1.6 Potensi Bencana Alam

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana buatan (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8	Dukupuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27	Panganan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

1. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, antara lain: kekeringan, banjir, longsor dan angin puting beliung.

- Rawan Bencana Kekeringan, meliputi 30 kecamatan.
- Rawan Bencana Banjir, meliputi 21 kecamatan.
- Rawan Bencana Longsor, meliputi 6 kecamatan.
- Rawan Bencana Angin Puting Beliung, meliputi 7 kecamatan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1	Waled	√	-	√	-
2	Pasaleman	-	√	-	-
3	Ciledug	√	√	-	-
4	Pabuaran	-	-	-	√
5	Losari	√	√	-	√
6	Pabedilan	√	√	-	-
7	Babakan	-	√	-	-
8	Gebang	√	√	-	-
9	Karangsembung	√	-	-	√
10	Karangwareng	-	-	-	-
11	Lemahabang	√	√	-	-
12	Susukan Lebak	√	-	-	-
13	Sedong	√	-	√	-
14	Astanajapura	√	√	-	√
15	Pangenan	√	√	-	-
16	Mundu	√	√	-	-
17	Beber	√	-	√	-
18	Greged	-	-	√	-
19	Talun	-	-	-	-
20	Sumber	√	-	√	-
21	Dukupuntang	-	-	√	-
22	Palimanan	√	-	-	√
23	Plumbon	√	√	-	-
24	Depok	√	-	-	-
25	Weru	√	-	-	-
26	Plered	√	√	-	-
27	Tengah Tani	√	√	-	-
28	Kedawung	√	-	-	-
29	Gunungjati	-	√	-	-
30	Kapetakan	√	√	-	-
31	Suranenggala	√	√	-	-
32	Klangenan	√	-	-	-
33	Jamblang	-	-	-	√
34	Arjawinangun	√	√	-	-
35	Pangurangan	√	√	-	-
36	Ciwaringin	√	-	-	-
37	Gempol	-	-	-	-
38	Susukan	√	√	-	-
39	Gegesik	√	√	-	√
40	Kaliwedi	√	√	-	-

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

2. Bencana Kebakaran

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

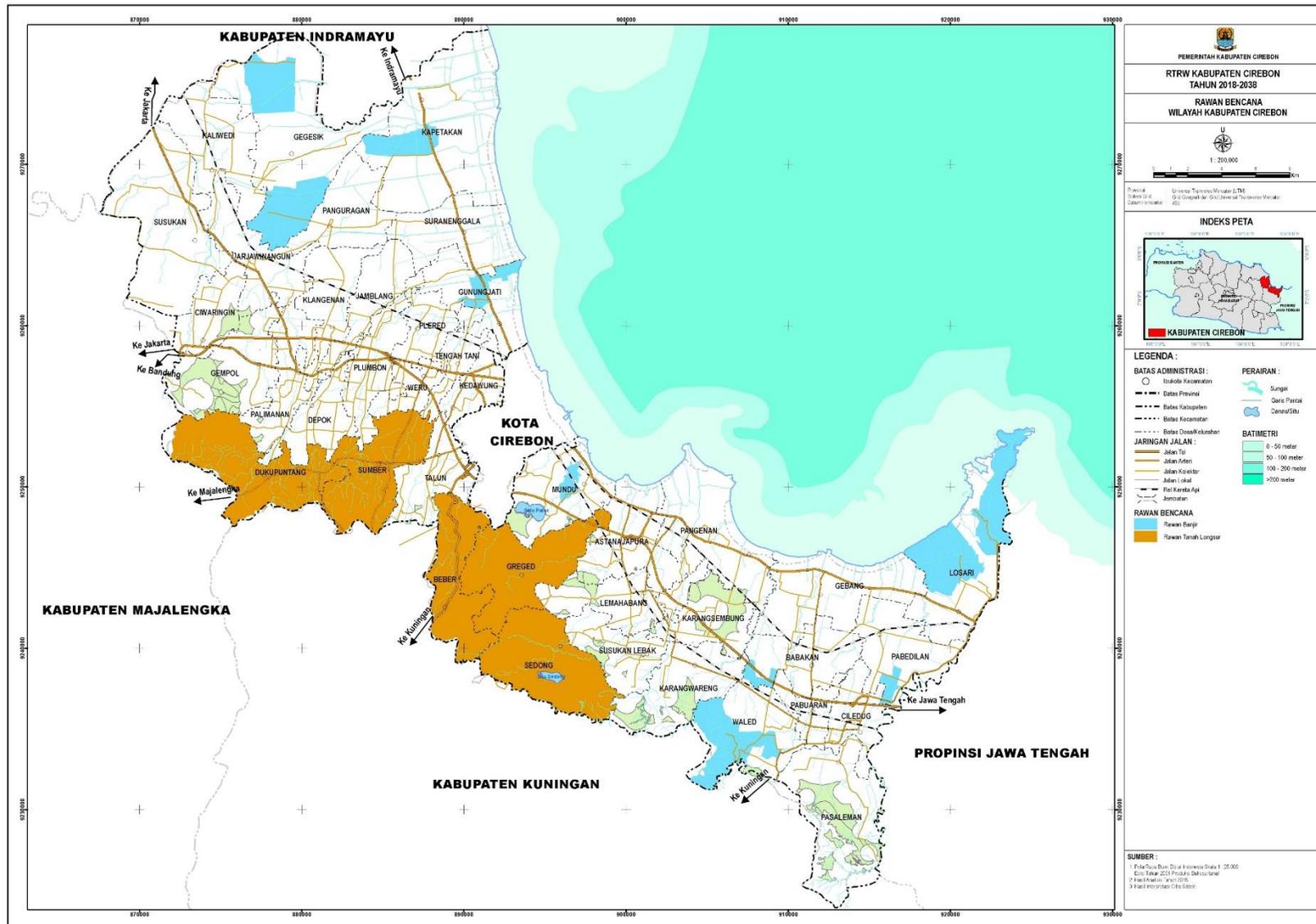
Tabel 3.9 Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 3.7 Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon



3.2 Penggunaan Lahan Industri

3.2.1 Penggunaan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon

Penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 62 klasifikasi penggunaan lahan. Total luas lahan mencapai 107.028,69 Ha. Luas lahan kawasan terbangun paling luas adalah permukiman mencapai 17.616,13 Ha, sedangkan kawasan non terbangun paling luas adalah sawah mencapai 52.850,87 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Air Danau / Situ	220.16	0.21
2	Air Empang	4.42	0.00
3	Air Penggaraman	9,432.58	8.81
4	Air Tawar Sungai	1,152.63	1.08
5	Bangunan Peribadatan Lainnya	2.94	0.00
6	Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	0.69	0.00
7	Hotel	0.23	0.00
8	Hutan Bakau	105.07	0.10
9	Hutan Rakyat	1,911.69	1.79
10	Industri Manufaktur Lainnya	653.27	0.61
11	Industri Pakan Ternak	10.67	0.01
12	Instalasi TNI (AD / AL / AU)	9.29	0.01
13	Kantor Pemerintahan Daerah	144.30	0.13
14	Kantor Pemerintahan Negara	34.25	0.03
15	Kantor PLN	0.38	0.00
16	Kantor Polisi	11.76	0.01
17	Kebun Campuran	8,311.80	7.77
18	Koridor Jalan Tol	307.03	0.29
19	Lapangan Olah Raga	68.23	0.06
20	Lembaga Pemasarakatan / Penjara	6.75	0.01
21	Padang Rumput	120.09	0.11
22	Pariwisata / Seni / Budaya / Olah Raga Lainnya	2.46	0.00
23	Pasir / Bukit Pasir Darat	18.94	0.02
24	Pelabuhan Udara Domestik	0.18	0.00
25	Pemukaman Budha	2.41	0.00
26	Pemukaman Islam	72.87	0.07
27	Pemukaman Kristiani	3.37	0.00
28	Pemukaman Pahlawan	1.64	0.00
29	Pemukaman Umum	49.19	0.05
30	Pendidikan Dasar dan Menengah	501.25	0.47
31	Pendidikan Luar Biasa dan Cacat Fisik	25.89	0.02
32	Pendidikan Militer TNI	7.98	0.01
33	Peribadatan dan Pendidikan Agama Budha	1.89	0.00
34	Peribadatan dan Pendidikan Agama Hindu	0.35	0.00
35	Peribadatan dan Pendidikan Agama Islam	66.14	0.06
36	Peribadatan dan Pendidikan Agama Kristiani	0.42	0.00
37	Perkebunan / Kebun	5,769.45	5.39
38	Permukiman dan Tempat Kegiatan	17,616.31	16.46
39	Pertambangan	417.00	0.39

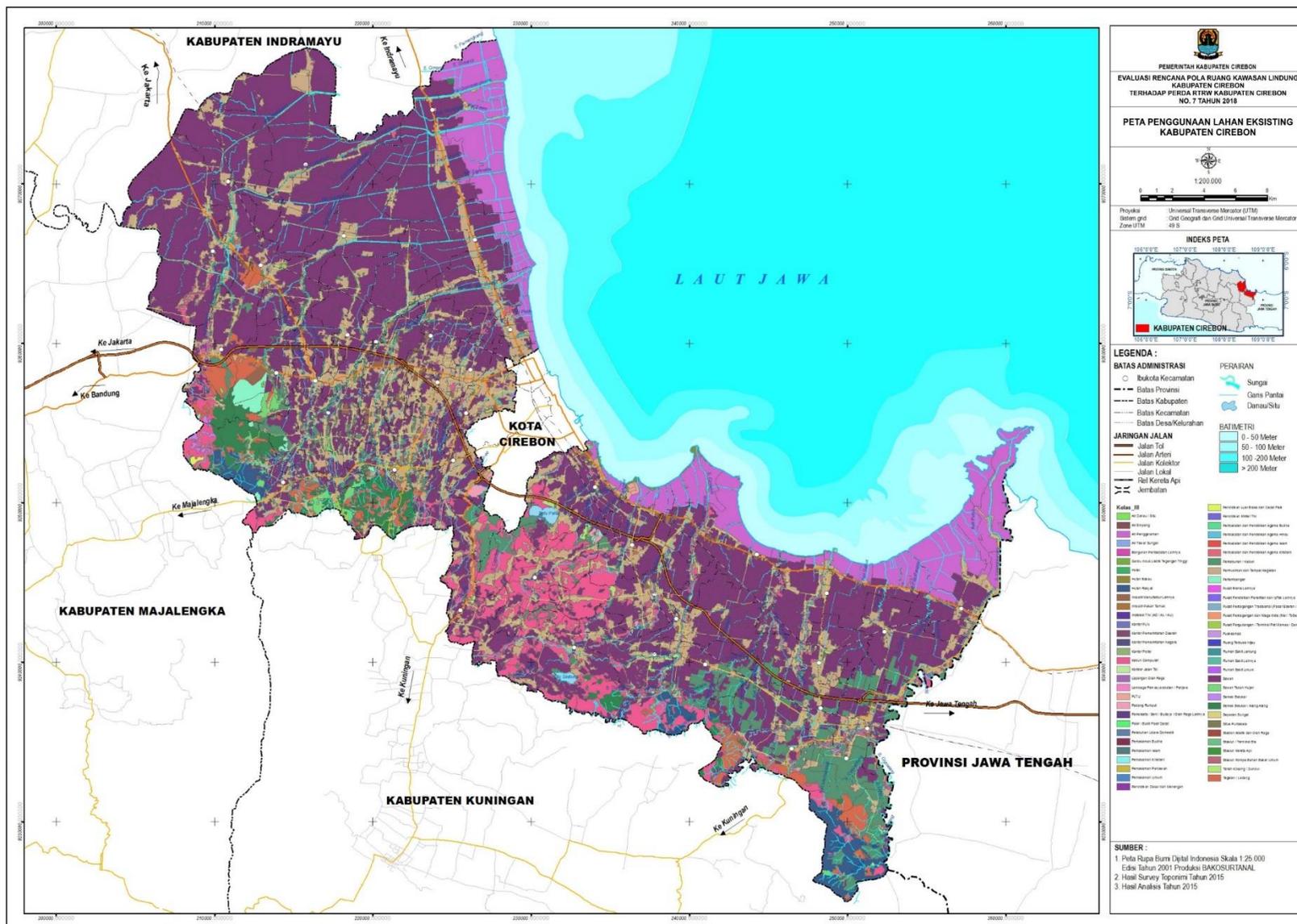


No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
40	PLTU	56.35	0.05
41	Pusat Bisnis Lainnya	15.78	0.01
42	Pusat Pendidikan Penelitian dan IpTek Lainnya	17.14	0.02
43	Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal / Toserba)	17.91	0.02
44	Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran / Grosir)	30.00	0.03
45	Pusat Pergudangan / Terminal Peti Kemas / Cargo	29.13	0.03
46	Puskesmas	18.92	0.02
47	Ruang Terbuka Hijau	0.57	0.00
48	Rumah Sakit Jantung	1.58	0.00
49	Rumah Sakit Lainnya	42.18	0.04
50	Rumah Sakit Umum	10.56	0.01
51	Sawah	52,850.87	49.38
52	Sawah Tadah Hujan	458.65	0.43
53	Semak Belukar	84.07	0.08
54	Semak Belukar / Alang Alang	2,585.90	2.42
55	Sepadan Sungai	660.27	0.62
56	Situs Purbakala	0.18	0.00
57	Stadion Atletik dan Olah Raga	2.30	0.00
58	Stasiun / Terminal Bis	4.36	0.00
59	Stasiun Kereta Api	1.79	0.00
60	Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	18.83	0.02
61	Tanah Kosong / Gundul	377.73	0.35
62	Tegalan / Ladang	2,677.63	2.50
Jumlah		107,028.69	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 3.8 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018



3.2.2 Updeting Penggunaan Lahan Tahun 2020

Sedangkan untuk updeting penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, penggunaan lahan terbagi menjadi 44 klasifikasi penggunaan lahan. Total luas lahan mencapai 106.996,93 Ha. Luas lahan terbesar adalah sawah dengan luas mencapai 52.066,98 Ha, atau sekitar 48,66% dari total luas lahan Kabupaten Cirebon.

Adapun dasar penentuan/ mekanisme Updeting Penggunaan lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan Peta Citra
2. Interpretasi Dan Pengolahan Peta Citra
3. Survey Lapangan

Peta citra yang digunakan adalah peta citra spot 6 dan spot 7 tahun 2020 yang bersumber dari LAPAN (Lembaga Penelitian Nasional).



Gambar 3.9 Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Tabel 3.11 Updeting Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bangunan Industri	941.32	0.88
2	Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	103.60	0.10
3	Bangunan Perkantoran	163.32	0.15
4	Bangunan Permukiman Desa	9,986.70	9.33
5	Bangunan Permukiman Kota	8,163.87	7.63
6	Danau Alami	33.00	0.03
7	Gardu Induk	0.69	0.00
8	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	115.51	0.11

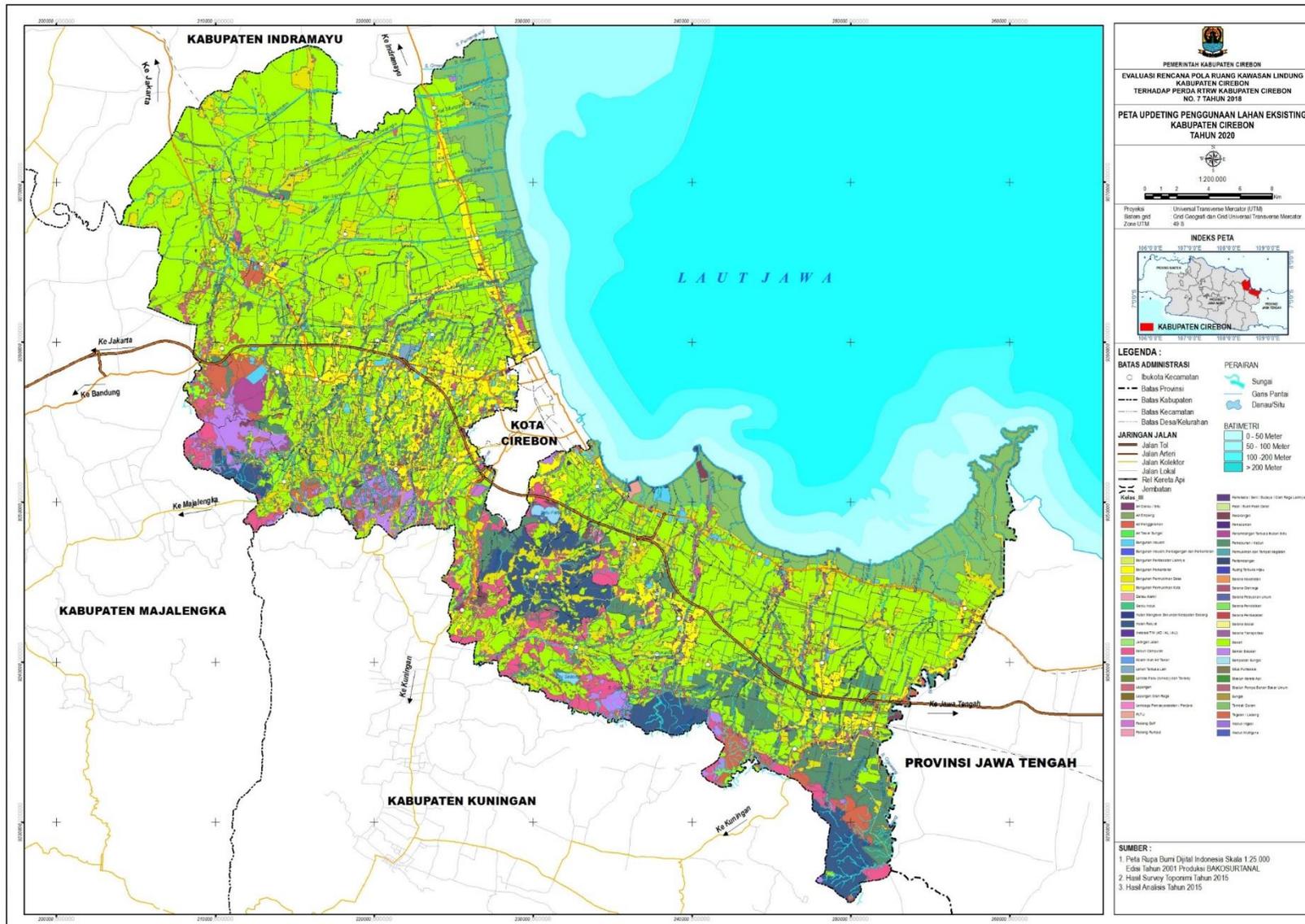


No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
9	Hutan Rakyat	4,614.06	4.31
10	Instalasi TNI (AD / AL / AU)	25.41	0.02
11	Jaringan Jalan	358.03	0.33
12	Kebun Campuran	6,278.82	5.87
13	Kolam Ikan Air Tawar	5.92	0.01
14	Lahan Terbuka Lain	150.10	0.14
15	Landas Pacu (runway) dan Taxiway	3.87	0.00
16	Lapangan	60.80	0.06
17	Lembaga Pemasyarakatan / Penjara	8.01	0.01
18	Padang Golf	63.53	0.06
19	Padang Rumput	45.64	0.04
20	Pariwisata / Seni / Budaya / Olah Raga Lainnya	2.46	0.00
21	Pekarangan	486.06	0.45
22	Pemakaman	151.37	0.14
23	Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	435.30	0.41
24	Perkebunan / Kebun	5,877.64	5.49
25	PLTU	56.65	0.05
26	Ruang Terbuka Hijau	3.91	0.00
27	Sarana Kesehatan	72.54	0.07
28	Sarana Olahraga	16.72	0.02
29	Sarana Pelayanan umum	59.87	0.06
30	Sarana Pendidikan	516.92	0.48
31	Sarana Peribadatan	70.39	0.07
32	Sarana Sosial	0.07	0.00
33	Sarana Transportasi	2.95	0.00
34	Sawah	52,066.98	48.66
35	Semak Belukar	2,830.68	2.65
36	Sempadan Sungai	5.29	0.00
37	Situs Purbakala	0.18	0.00
38	Stasiun Kereta Api	2.88	0.00
39	Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	18.57	0.02
40	Sungai	1,035.12	0.97
41	Tambak Garam	9,548.15	8.92
42	Tegalan / Ladang	2,396.45	2.24
43	Waduk Irigasi	63.52	0.06
44	Waduk Multiguna	154.10	0.14
Jumlah		106,996.93	100.00

Sumber : Peta Citra Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2020 dan Survey Lapangan Tahun 2020



Gambar 3.10 Peta Updating Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon Tahun 2020



3.3 Kondisi Kependudukan

3.3.1 Jumlah Penduduk

Selama periode 2010 - 2019 jumlah penduduk mengalami peningkatan. Tahun 2010 berjumlah 1.992.318 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2.189.785 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2019 mencapai 197.467 jiwa., dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,06%.

Jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Sumber mencapai 90.891 jiwa, hal ini menunjukkan salah satu fungsi penunjang PKL Sumber yang diarahkan menjadi kawasan perumahan yang dapat menampung jumlah penduduk yang tinggi.

Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Karangwereng dengan jumlah 28.151 jiwa, sedikitnya jumlah penduduk ini bisa menggambarkan bahwa Kecamatan Karangwereng berada di selatan yang sangat jauh, sehingga sulit menarik orang untuk berdomisili. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

3.3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon selama periode 2010 – 2019 mengalami peningkatan dari 2.012 jiwa/Km² menjadi 2.211 jiwa/Km², atau bertambah 199 jiwa/Km².

Pada tahun 2019, kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Weru dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 7.459 jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di kecamatan Paseleman dengan jumlah kepadatan 837 jiwa/Km².

Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada **Tabel 3.14** dibawah ini.



Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	52,073	52,659	51,024	51,659	51,770	52,108	50,837	52,551	54,014	54,407
2	Pasaleman	24,690	24,968	24,248	24,968	25,044	24,836	25,920	26,214	26,793	26,886
3	Ciledug	41,704	42,174	41,166	42,174	43,826	45,169	43,971	44,198	44,555	44,501
4	Pabuaran	33,321	33,696	33,045	33,696	34,479	33,804	34,777	34,775	35,445	35,558
5	Losari	53,499	54,101	53,841	54,101	56,692	59,441	57,340	57,250	59,673	60,160
6	Pabedilan	50,902	51,475	50,125	50,475	50,973	53,650	49,711	51,685	55,978	56,397
7	Babakan	61,618	62,312	61,102	62,312	63,365	67,437	64,540	64,589	68,993	69,636
8	Gebang	55,964	56,605	57,605	58,205	60,483	59,477	61,942	60,899	65,027	65,233
9	Karangsembung	33,066	34,450	34,450	35,150	36,218	36,593	34,694	35,375	36,397	36,625
10	Karangwereng	23,267	23,563	23,760	24,563	25,657	26,525	27,018	27,563	28,159	28,151
11	Iemahabang	49,186	50,751	49,231	49,751	50,354	51,078	50,822	51,616	53,214	54,116
12	Susukan Lebak	35,598	36,010	36,830	37,010	36,728	37,703	38,478	39,176	40,203	40,359
13	Sedong	36,990	37,429	38,224	39,429	37,893	39,051	37,970	39,118	40,660	40,824
14	Astanajapura	73,894	73,737	75,423	75,737	76,471	76,869	71,609	73,589	73,478	74,785
15	Panganan	42,522	42,001	42,781	43,001	38,925	40,817	42,261	42,664	44,597	44,459
16	Mundu	66,772	70,591	72,890	73,591	67,097	67,933	68,629	70,523	71,732	71,761
17	Beber	35,114	35,820	36,521	37,421	38,699	39,503	39,556	40,414	40,516	41,279
18	Greged	40,504	50,073	50,988	51,073	50,091	49,684	51,955	53,234	53,269	53,975
19	Talun	59,120	59,819	60,046	60,819	61,756	62,358	62,895	64,574	65,198	65,854
20	Sumber	80,058	80,959	81,129	82,959	84,575	85,587	86,981	88,701	89,192	90,891
21	Dukupuntang	59,684	60,356	59,856	60,356	59,893	60,309	60,255	61,629	62,656	62,951
22	Palimanan	54,990	55,609	54,108	55,609	59,368	60,169	59,871	59,783	60,899	61,600
23	Plumbon	72,599	73,416	73,012	73,416	70,498	73,560	73,849	75,229	78,259	80,062
24	Depok	56,436	57,071	56,908	57,071	58,778	57,449	60,185	61,078	62,272	63,474
25	Weru	63,498	64,213	63,983	64,213	62,825	63,536	65,229	66,597	66,909	68,546
26	Plered	49,218	50,523	50,980	51,092	48,049	48,433	49,875	51,197	52,132	53,176
27	Tengah Tani	39,931	40,381	39,962	40,381	40,609	39,385	40,620	41,529	41,884	42,590
28	Kedawung	54,552	57,245	62,245	62,245	60,344	54,748	56,172	57,060	57,980	58,687
29	Gunungjati	72,050	72,918	73,828	74,710	73,415	74,801	76,239	76,353	78,319	79,307
30	Kapetakan	51,026	51,601	51,240	51,601	47,469	47,130	51,338	52,412	56,036	57,574
31	Suranenggala	40,925	41,386	41,125	41,386	41,099	39,720	41,152	41,257	43,471	44,607
32	Klangenan	50,460	51,028	50,818	51,028	48,472	47,276	48,356	49,620	51,417	52,676



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
33	Jamblang	34,848	35,240	34,180	35,240	36,815	37,093	37,178	37,255	38,035	38,643
34	Arjawinangun	62,114	61,785	62,423	62,813	66,226	63,979	65,508	65,703	67,780	68,891
35	Panguragan	40,162	41,637	37,637	38,427	40,794	39,597	40,171	41,091	42,570	42,626
36	Ciwaringin	34,683	36,107	33,708	34,107	35,633	34,276	35,391	35,152	36,821	37,328
37	Gempol	42,784	43,266	40,986	41,266	42,115	41,566	43,190	43,638	44,831	45,757
38	Susukan	61,635	62,329	59,929	60,329	61,948	60,189	60,855	60,715	64,382	65,682
39	Gegesik	65,980	66,823	65,589	66,289	67,454	66,259	66,792	66,101	68,979	69,260
40	Kaliwedi	34,881	35,284	35,846	36,996	37,353	37,980	38,467	38,792	39,851	40,491
Jumlah		1,992,318	2,031,411	2,022,792	2,046,669	2,050,253	2,057,078	2,072,599	2,100,899	2,162,576	2,189,785

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Tabel 3.13 Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	28.46	1,830	1,850	1,793	1,815	1,819	1,831	1,786	1,846	1,898	1,912
2	Pasaleman	32.11	769	778	755	778	780	773	807	816	834	837
3	Ciledug	13.25	3,147	3,183	3,107	3,183	3,308	3,409	3,319	3,336	3,363	3,359
4	Pabuaran	8.95	3,723	3,765	3,692	3,765	3,852	3,777	3,886	3,885	3,960	3,973
5	Losari	39.07	1,369	1,385	1,378	1,385	1,451	1,521	1,468	1,465	1,527	1,540
6	Pabedilan	24.08	2,114	2,138	2,082	2,096	2,117	2,228	2,064	2,146	2,325	2,342
7	Babakan	21.93	2,810	2,841	2,786	2,841	2,889	3,075	2,943	2,945	3,146	3,175
8	Gebang	31.68	1,767	1,787	1,818	1,837	1,909	1,877	1,955	1,922	2,053	2,059
9	Karangsembung	15.14	2,184	2,275	2,275	2,322	2,392	2,417	2,292	2,337	2,404	2,419
10	Karangwereng	23.12	1,006	1,019	1,028	1,062	1,110	1,147	1,169	1,192	1,218	1,218
11	Iemahabang	21.49	2,289	2,362	2,291	2,315	2,343	2,377	2,365	2,402	2,476	2,518
12	Susukan Lebak	18.74	1,900	1,922	1,965	1,975	1,960	2,012	2,053	2,091	2,145	2,154
13	Sedong	31.02	1,192	1,207	1,232	1,271	1,222	1,259	1,224	1,261	1,311	1,316
14	Astanajapura	25.47	2,901	2,895	2,961	2,974	3,002	3,018	2,812	2,889	2,885	2,936
15	Panganan	30.54	1,392	1,375	1,401	1,408	1,275	1,337	1,384	1,397	1,460	1,456
16	Mundu	25.58	2,610	2,760	2,849	2,877	2,623	2,656	2,683	2,757	2,804	2,805
17	Beber	23.25	1,510	1,541	1,571	1,610	1,664	1,699	1,701	1,738	1,743	1,775



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Greged	29.92	1,354	1,674	1,704	1,707	1,674	1,661	1,736	1,779	1,780	1,804
19	Talun	21.21	2,787	2,820	2,831	2,867	2,912	2,940	2,965	3,045	3,074	3,105
20	Sumber	25.65	3,121	3,156	3,163	3,234	3,297	3,337	3,391	3,458	3,477	3,544
21	Dukupuntang	36.40	1,640	1,658	1,644	1,658	1,645	1,657	1,655	1,693	1,721	1,729
22	Palimanan	17.18	3,201	3,237	3,149	3,237	3,456	3,502	3,485	3,480	3,545	3,586
23	Plumbon	18.19	3,991	4,036	4,014	4,036	3,876	4,044	4,060	4,136	4,302	4,401
24	Depok	15.55	3,629	3,670	3,660	3,670	3,780	3,694	3,870	3,928	4,005	4,082
25	Weru	9.19	6,909	6,987	6,962	6,987	6,836	6,914	7,098	7,247	7,281	7,459
26	Plered	11.34	4,340	4,455	4,496	4,505	4,237	4,271	4,398	4,515	4,597	4,689
27	Tengah Tani	8.97	4,452	4,502	4,455	4,502	4,527	4,391	4,528	4,630	4,669	4,748
28	Kedawung	9.58	5,694	5,975	6,497	6,497	6,299	5,715	5,863	5,956	6,052	6,126
29	Gunungjati	20.55	3,506	3,548	3,593	3,636	3,573	3,640	3,710	3,715	3,811	3,859
30	Kapetakan	60.20	848	857	851	857	789	783	853	871	931	956
31	Suranenggala	22.98	1,781	1,801	1,790	1,801	1,788	1,728	1,791	1,795	1,892	1,941
32	Klangenan	20.57	2,453	2,481	2,470	2,481	2,356	2,298	2,351	2,412	2,500	2,561
33	Jamblang	17.76	1,962	1,984	1,925	1,984	2,073	2,089	2,093	2,098	2,142	2,176
34	Arjawinangun	24.11	2,576	2,563	2,589	2,605	2,747	2,654	2,717	2,725	2,811	2,857
35	Panguragan	20.31	1,977	2,050	1,853	1,892	2,009	1,950	1,978	2,023	2,096	2,099
36	Ciwaringin	17.79	1,950	2,030	1,895	1,917	2,003	1,927	1,989	1,976	2,070	2,098
37	Gempol	30.73	1,392	1,408	1,334	1,343	1,370	1,353	1,405	1,420	1,459	1,489
38	Susukan	50.10	1,230	1,244	1,196	1,204	1,236	1,201	1,215	1,212	1,285	1,311
39	Gegesik	60.38	1,093	1,107	1,086	1,098	1,117	1,097	1,106	1,095	1,142	1,147
40	Kaliwedi	27.82	1,254	1,268	1,288	1,330	1,343	1,365	1,383	1,394	1,432	1,455
Jumlah		990.36	2,012	2,051	2,042	2,067	2,070	2,077	2,093	2,121	2,184	2,211

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

3.3.3 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Salah satu pertimbangan untuk menentukan Kawasan Perkotaan adalah jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat tipologi Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Kawasan Metropolitan jumlah penduduk 1.000.000 Jiwa;
2. Kawasan Perkotaan Besar jumlah penduduk 500.000 jiwa;
3. Kawasan Perkotaan Sedang jumlah penduduk 100.000 - 500.000 jiwa;
4. Kawasan Perkotaan Kecil jumlah penduduk 50.000 -100.000 jiwa.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat diketahui bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk kedalam kriteria Kawasan Perkotaan terdapat 26 kecamatan dengan klasifikasi Kawasan Perkotaan Kecil.

Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan didominasi oleh penduduk perkotaan mencapai 71,20% atau mencapai 1.559.101 jiwa, sedangkan proporsi penduduk perdesaan 28,80% atau mencapai 630.684 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
1	Waled	54,407	Perkotaan Kecil
2	Pasaleman	26,886	Perdesaan
3	Ciledug	44,501	Perdesaan
4	Pabuaran	35,558	Perdesaan
5	Losari	60,160	Perkotaan Kecil
6	Pabedilan	56,397	Perkotaan Kecil
7	Babakan	69,636	Perkotaan Kecil
8	Gebang	65,233	Perkotaan Kecil
9	Karangsembung	36,625	Perdesaan
10	Karangwereng	28,151	Perdesaan
11	lemahabang	54,116	Perkotaan Kecil
12	Susukan Lebak	40,359	Perdesaan
13	Sedong	40,824	Perdesaan
14	Astanajapura	74,785	Perkotaan Kecil
15	Pangenan	44,459	Perdesaan
16	Mundu	71,761	Perkotaan Kecil
17	Beber	41,279	Perdesaan
18	Greged	53,975	Perkotaan Kecil
19	Talun	65,854	Perkotaan Kecil
20	Sumber	90,891	Perkotaan Kecil
21	Dukupuntang	62,951	Perkotaan Kecil
22	Palimanan	61,600	Perkotaan Kecil
23	Plumbon	80,062	Perkotaan Kecil
24	Depok	63,474	Perkotaan Kecil
25	Weru	68,546	Perkotaan Kecil
26	Plered	53,176	Perkotaan Kecil
27	Tengah Tani	42,590	Perdesaan
28	Kedawung	58,687	Perkotaan Kecil
29	Gunungjati	79,307	Perkotaan Kecil



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
30	Kapetakan	57,574	Perkotaan Kecil
31	Suranenggala	44,607	Perdesaan
32	Klangenan	52,676	Perkotaan Kecil
33	Jamblang	38,643	Perdesaan
34	Arjawinangun	68,891	Perkotaan Kecil
35	Panguragan	42,626	Perdesaan
36	Ciwaringin	37,328	Perdesaan
37	Gempol	45,757	Perdesaan
38	Susukan	65,682	Perkotaan Kecil
39	Gegesik	69,260	Perkotaan Kecil
40	Kaliwedi	40,491	Perdesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

3.4 Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB

3.4.1 Kondisi Sektor Industri

Jumlah perusahaan sektor industri kecil di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mencapai 5.209 unit. Untuk jenis industri di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 9 jenis komoditi unggulan, diantaranya : kerajinan rotan, meubeul kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	1,370	1,382	1,398	1,408
2	Meubeul Kayu	1,252	1,253	1,255	1,257
3	Emping Melinjo	158	166	166	166
4	Roti Dan Makanan Ringan	571	770	775	782
5	Batu Alam	344	347	347	347
6	Sandal Karet	21	22	22	22
7	Batik	565	593	593	593
8	Konveksi	610	625	626	626
9	Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8
Jumlah		4,899	5,166	5,190	5,209

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun 2018 mencapai 94.422 jiwa, dengan jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat pada sektor komoditi industri meubeul/kerajinan rotan dengan jumlah tenaga kerja 60.887 jiwa.

Tabel 3.16 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	59,712	59,763	60,455	60,887
2	Meubeul Kayu	7,552	7,558	7,570	7,582

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
3	Emping Melinjo	1,309	1,374	1,374	1,374
4	Roti Dan Makanan Ringan	6,095	7,314	8,327	8,625
5	Batu Alam	2,051	2,072	2,072	2,072
6	Sandal Karet	230	235	235	235
7	Batik	4,515	4,628	4,628	4,628
8	Konveksi	6,054	6,054	6,221	6,221
9	Kerajinan Kulit Kerang	770	780	780	780
Jumlah		90,303	91,794	93,679	94,422

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

3.4.2 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 65,544,656.80 atau naik sebesar Rp. 20,082,717.50 dari tahun 2018. Nilai PDRB ini selalu meningkat dari tahun 2015. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 33,723,897.20 atau naik sebesar Rp. 1,563,785.80 dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampe dengan tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Tabel 3.17 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,708,696.50	6,339,473.40	6,612,585.40	7,168,887.20	7,476,527.80
B	Pertambangan dan Penggalian	537,137.70	527,989.10	517,407.10	532,939.40	520,610.50
C	Industri Pengolahan	7,612,342.90	8,321,347.20	8,903,176.00	9,521,940.70	10,008,476.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,289.40	69,693.90	86,440.30	102,524.90	118,888.50
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,463.40	30,189.60	35,868.90	40,886.30	46,933.40
F	Konstruksi	4,228,249.90	4,498,753.00	4,817,135.70	5,264,542.30	5,783,085.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,839,375.70	6,146,252.80	6,608,835.20	7,067,680.60	7,592,614.70
H	Transportasi dan Pergudangan	2,835,580.90	3,131,582.60	3,432,642.20	3,751,418.10	4,175,481.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,241,906.40	1,330,941.20	1,484,463.40	1,556,478.40	1,714,274.90
J	Informasi dan Komunikasi	806,878.80	893,196.30	988,956.50	1,063,949.80	1,122,896.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,212,558.00	1,383,017.60	1,527,545.00	1,686,423.40	1,900,601.40
L	Real Estat	791,055.40	838,145.30	930,497.30	1,022,421.90	1,130,748.30
M,N	Jasa Perusahaan	267,883.30	295,546.30	329,473.70	362,649.20	444,920.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,161,579.90	1,229,691.50	1,298,859.40	1,396,795.80	1,502,244.40
P	Jasa Pendidikan	1,643,578.70	1,806,006.90	2,092,991.40	2,416,186.10	2,841,709.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	648,317.70	733,827.90	814,490.50	896,511.70	988,753.10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,114,765.80	1,265,117.70	1,437,918.10	1,609,703.50	18,175,888.30
Produk Domestik Regional Bruto		35,734,660.40	38,840,772.30	41,919,286.10	45,461,939.30	65,544,656.80

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019
(Juta Rupiah)**

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,112,437.90	4,360,550.00	4,426,987.70	4,526,469.20	4,487,076.30
B	Pertambangan dan Penggalian	429,908.50	419,365.20	420,748.60	431,174.90	416,880.00
C	Industri Pengolahan	5,689,437.00	6,020,185.20	6,325,533.60	6,651,078.70	6,754,590.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,516.10	47,424.90	51,708.80	52,999.70	56,761.30
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22,399.70	23,582.90	25,400.10	26,569.10	28,362.00
F	Konstruksi	3,361,642.10	3,527,201.20	3,679,254.60	3,936,183.80	4,181,874.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,486,817.70	4,647,956.90	4,853,022.40	5,010,804.60	5,249,185.40
H	Transportasi dan Pergudangan	2,022,859.40	2,172,361.60	2,310,399.20	2,446,409.60	2,683,458.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,009,223.10	1,049,024.00	1,129,847.30	1,160,826.30	1,225,903.60
J	Informasi dan Komunikasi	784,048.00	866,988.20	950,047.60	1,035,692.20	1,103,908.40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	967,279.00	1,061,760.20	1,113,883.10	1,192,733.10	1,297,662.90
L	Real Estat	621,763.60	649,873.80	713,116.50	775,727.30	847,610.70
M,N	Jasa Perusahaan	227,430.10	247,828.20	271,119.60	294,349.70	321,659.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831,800.80	849,610.40	853,013.30	870,708.10	903,402.40
P	Jasa Pendidikan	1,400,599.10	1,488,636.80	1,630,471.50	1,757,892.60	1,984,683.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	565,619.90	615,279.90	663,085.10	711,632.70	794,031.30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,018,473.00	1,101,682.70	1,205,666.80	1,278,859.80	1,386,847.40
Produk Domestik Regional Bruto		27,596,255.00	29,149,312.10	30,623,305.80	32,160,111.40	33,723,897.20

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.5 Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri

3.5.1 Kondisi Jaringan Listrik

Layanan dan jaringan listrik di Kabupaten Cirebon dilayani oleh PT. PLN (Persero) area Cirebon. Pelanggan PT. PLN terdiri dari 6 (enam) jenis pelanggan, yaitu: sosial, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan multiguna, total jumlah pelanggan mencapai 4.421.848. lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	KWh	Rp/KWh
1	Sosial	94.725	16.586.685	10.814.069.794
2	Rumah Tangga	4.182.804	480.096.085	288.257.577.968
3	Bisnis	112.249	54.822.386	66.347.577.968
4	Industri	7.183	534.431.901	427.131.944.876
5	Pemerintah	17.507	16.362.739	17.652.260.002
6	Multiguna	7.380	17.879.857	24.903.748.549
Jumlah		4.421.848	1.120.179.653	835.107.179.157

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2015

3.5.2 Kondisi Jaringan Air Minum

Pada tahun 2016, PDAM Kabupaten Cirebon mampu mendongkrak nilai penjualannya disamping jumlah pelanggan yang terus meningkat. Total pelanggan yang terdaftar di PDAM Kabupaten Cirebon sebanyak 38.513 pelanggan (kategori rumah tempat tinggal), dengan wilayah pelayanan sebanyak 146 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.20 Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa Terlayani	Pelanggan
1	Waled	6	555
2	Pasaleman	-	-
3	Ciledug	1	109
4	Pabuaran	2	12
5	Losari	8	258
6	Pabedilan	-	-
7	Babakan	3	34
8	Gebang	6	270
9	Karangsembung	3	10
10	Karangwereng	-	-
11	Iemahabang	1	295
12	Susukan Lebak	-	-
13	Sedong	-	-
14	Astanajapura	-	-
15	Pangenan	-	-
16	Mundu	-	-
17	Beber	6	2,155
18	Greged	1	191
19	Talun	6	2,983
20	Sumber	5	2,694
21	Dukupuntang	3	164
22	Palimanan	8	570
23	Plumbon	2	555
24	Depok	4	320
25	Weru	-	-
26	Plered	2	59
27	Tengah Tani	1	44
28	Kedawung	-	-
29	Gunungjati	14	2,404
30	Kapetakan	10	3,625
31	Suranenggala	9	1,412
32	Klangenan	3	727
33	Jamblang	4	653
34	Arjawinangun	7	5,202
35	Panguragan	9	4,895
36	Ciwaringin	5	1,193
37	Gempol	4	1,725
38	Susukan	-	-
39	Gegesik	12	4,887
40	Kaliwedi	1	512
Jumlah		146	38,513

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

3.5.3 Kondisi Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan limbah di wilayah Kabupaten Cirebon masih bercampur dengan sistem pembuangan air hujan. Dimana pembuangan air limbah biasanya disebut dengan *sistem rioolering* dan berbeda dengan sistem pembuangan air hujan yang disebut dengan sistem Drainase, sehingga penanganan sistem pembuangan air limbah di wilayah perencanaan merupakan kombinasi antara *rioolering* dengan sistem *drainase*.

3.5.4 Kondisi Jaringan Drainase

Pada umumnya sistem jaringan drainase wilayah Kabupaten Cirebon merupakan sistem drainase tercampur. Pada saat ini air limpasan hujan dan air limbah domestik masyarakat dialirkan dalam satu saluran (tercampur) dan juga sistem drainase di wilayah Kabupaten Cirebon masih mengandalkan jaringan drainase alam yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir di wilayah perencanaan.

Dengan bertambahnya luas lahan yang dipergunakan sebagai lahan untuk membangun perumahan, industri, sarana dan prasarana, maka daya serap tanah semakin berkurang untuk menahan air hujan, dimana ketinggian muka air dan debit sungai cepat terpengaruh oleh jumlah intensitas hujan.

Hal tersebut mengakibatkan daya tampung sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung aliran air yang pada akhirnya daerah-daerah rendah yang dilalui oleh aliran sungai atau aliran saluran drainase akan terkena luapan yang mengakibatkan terjadi genangan dan banjir, selain itu ada juga beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan banjir di wilayah perencanaan yaitu :

- ❑ Pendangkalan saluran akibat endapan lumpur yang berkepanjangan, sehingga akan memperkecil penampang saluran. Dari hal tersebut air yang dapat dialirkan melalui saluran menjadi berkurang, dan akibatnya air menjadi meluap keluar badan saluran akhirnya terjadilah banjir;
- ❑ Terjadi sedimentasi dan hambatan sampah pada sebagian besar saluran drainase yang ada. Sehingga aliran airnya terhambat pada musim hujan;
- ❑ Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah hulu sungai, sehingga aliran permukaan “ Run Off “ yang terjadi semuanya masuk ke sungai dan tidak dapat meresap ke dalam tanah.

3.5.5 Kondisi Sistem Persampahan

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 baru meliputi 27 Kecamatan dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari setiap Kecamatan baru terlayani kurang lebih 8%-21% yaitu lokasi yang terletak dipinggir jalan, daerah perkotaan, pasar, perusahaan, industri dan lain-lain. Daerah-daerah pelayanan persampahan meliputi Kecamatan Gegesik, Arjawinangun, Palimanan, Klagenan, Plumbon, Dukupuntang, Weru, Sumber, Astanajapura, Cirebon Utara, Gunungjati, Mundu, Lemahabang, Karangsembung, Losari, Ciledug, Babakan, Pangenan, Tengah tani, Pabuaran, Gebang, Jamblang, Gempol, Kedawung, Talun dan Depok.

Total volume timbunan sampah dan tingkat pelayanan persampahan yang baru terlayani 17,5 % - 70 % diantaranya : Perumahan, Pemukiman, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar, Industri, Hotel, Restoran, Perusahaan, Kantor dan sebagainya dan sebagainya. Pola pengelolaan sampah yang berkembang saat ini di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Sistem individual langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* dengan mendatangi sumber sampah, dimana sampah tersebut akan diangkut dengan menggunakan truk biasa atau dump truk.
2. Sistem individual tak langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak serta truk kecil dan sampah yang ada ditampung di tempat penyimpanan sementara yang berupa container kapasitas 6 m³, dan kemudian sampah yang terkumpul tersebut dipindahkan ke TPA
3. Sistem komunal yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah dan dibuang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sebagai tempat penampungannya berupa container, kemudian di buang ke TPA. Selain itu dilakukan penanganan secara langsung oleh para penghasil sampah, yaitu dengan dibakar atau ditimbun pada lahan-lahan kosong.



LAPORAN PENDAHULUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4

PENDEKATAN DAN METODOLOGI



4.1 KERANGKA PIKIR DAN PENDEKATAN

4.1.1 Kerangka Pikir Pekerjaan

Kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan kerangka logis penanganan pekerjaan yang mencakup materi studi, ruang kegiatan, dan batasan waktu. Materi studi dalam hal ini memeran peran penting karena kegiatan ini bertumpu pada kebutuhan terkait penataan ruang. Pemanfaatan ruang merupakan “turunan” dari kebijakan dan strategi penataan ruang berupa indikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan/rencana dengan muatan dasar dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- Indikasi program utama
- Perkiraan pendanaan beserta sumbernya
- Instansi/para pihak yg akan terlibat dalam pelaksanaannya
- Waktu dan tahapan pelaksanaannya yang disusun dgn memperhatikan kurun waktu perencanaan dan tahap operasionalisasinya

Dalam penanganan pekerjaan, kebutuhan pendekatan yang tepat akan mengarahkan pada output yang sesuai dengan harapan. Karenanya, pemlihan pendekatan akan bergantung pada sifat input yang akan diolah melalui suatu proses kegiatan untuk menjadi output.

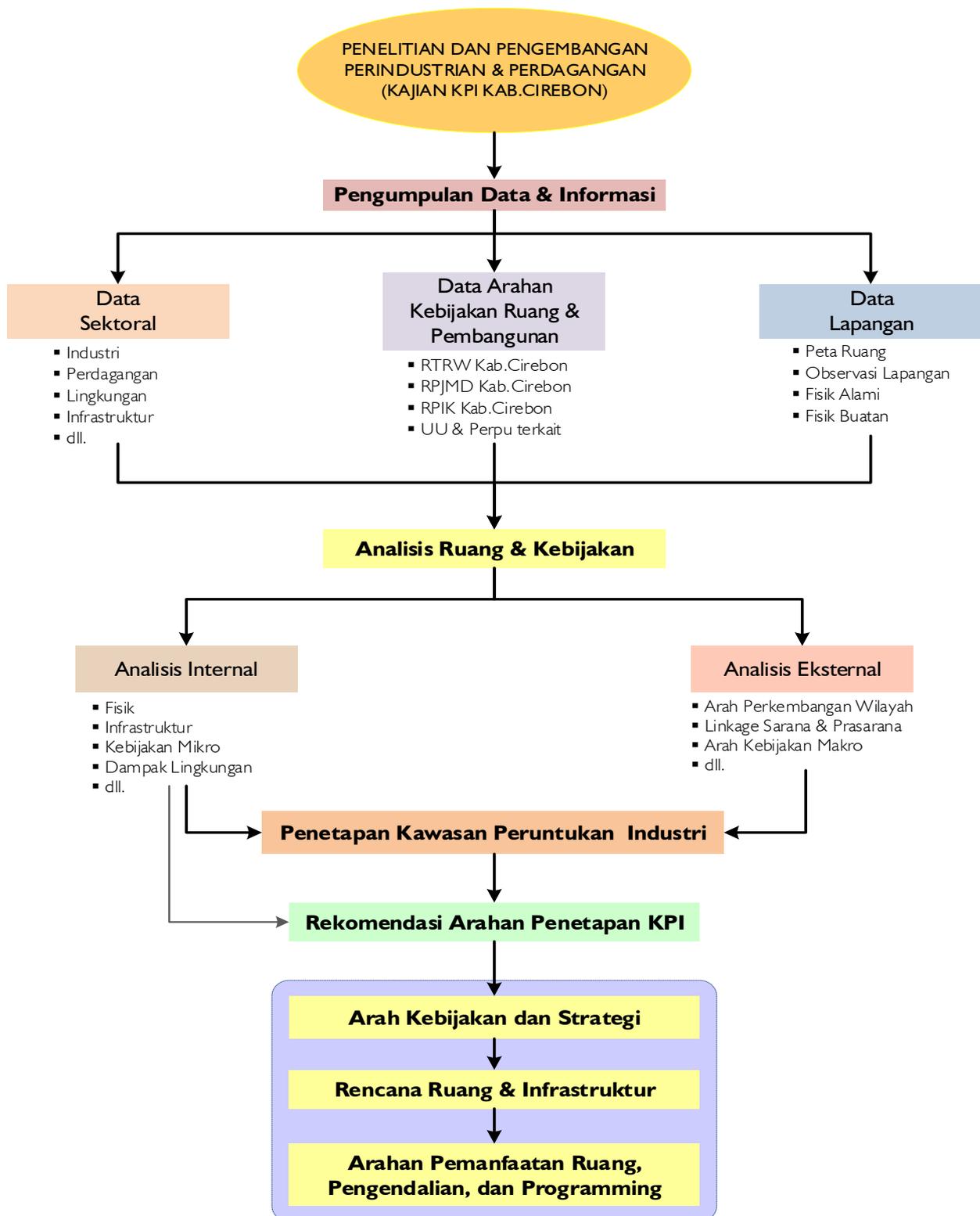
Sesuai dengan pemahaman KAK yang disarikan kedalam suatu skema latar belakang pekerjaan, terdapat tiga hal yang menjadi lingkup kebutuhan yang menyebabkan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dilakukan, adalah:

- Arah kebijakan dan potensi perindustrian di Kabupaten Cirebon, khususnya di kawasan strategis perbatasan bagian utara;
- RTRW Kabupaten Cirebon yang perlu didetilkkan dalam upaya merumuskan suatu acuan dasar pengembangan industri;
- Kebijakan terkait pengembangan perindustrian dan kawasan industri yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan perindustrian dan kawasan industri di Kabupaten Cirebon.

Kegiatan yang berlangsung dalam lingkup pekerjaan sealam 3 bulan ini diharapkan akan menghasilkan suatu keluaran yang terkait dengan produk serahan / *deliverables* berupa: Alokasi ruang kegiatan industri; Rekomendasi terkait potensi & antisipasi dampak lingkungan akibat kegiatan industri; Arahan penataan ruang untuk kawasan industri; serta Arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan industri yang dituangkan kedalam strategi pengembangan KPI. Guna menghasilkan keluaran tersebut, maka diperlukan langkah-langkah penyusunan yang mencakup persiapan – pendataan dan kajian awal – analisis perencanaan – perumusan konsep dan strategi pemanfaatan KPI.

Secara umum, rangkaian kegiatan-kegiatan di atas dapat dirumuskan kedalam kerangka pikir logis pekerjaan, sebagaimana tergambarakan melalui matriks berikut.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon



Sumber: - KAK Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
 - Analisis dan Perumusan Konsep Penanganan Kegiatan Team Konsultan

4.2 Pendekatan Teknis Pekerjaan

4.2.1 Kebutuhan Pendekatan Teknis Penanganan Pekerjaan

Beberapa pendekatan disusun berdasarkan karakteristik kegiatan dan kebutuhannya. Pendekatan-pendekatan teknis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan, dimana kerangka strategi pelaksanaan yang dijabarkan dalam metodologi teknis dan rencana kerja selanjutnya akan mengacu pada kerangka pikir dan pendekatan pekerjaan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat berbagai kegiatan yang memerlukan penanganan berbeda, sesuai dengan karakteristik kegiatan dan sasaran antara (*milestone*) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pendekatan umum yang akan digunakan dalam penanganan pekerjaan ini dikelompokkan kedalam karakteristik kebutuhan penanganan kegiatan, yaitu:

- Pendekatan terhadap kegiatan pengumpulan data & informasi
- Pendekatan terhadap kegiatan identifikasi dan analisis / kajian materi & permasalahan
- Pendekatan terhadap kegiatan perumusan konsep dan penyusunan rencana detail tata ruang dan zoning regulation

4.2.2 Pendekatan Eksploratif dalam Pengumpulan Data

Pendekatan Eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna perumusan konsep penanganan.

4.2.2.1 Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data & Informasi

Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan Eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga Eksplorasi data & informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan Eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan Eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya ataupun *stakeholder* yang terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan singkat yang memuat teori atau model penanganan kawasan pusat kota, penanganan lahan pusat kota, dan studi kasus penerapan kebijakan pengembangan kawasan pusat kota yang telah dilakukan.

Dalam pendekatan Eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber.

4.2.2.2 Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi

Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan kawasan industri yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan. Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan melalui pendalaman pemahaman terhadap lokasi pekerjaan..

Proses eksplorasi ini akan mengerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai kesesuaian suatu pola penanganan lahan industri serta kebutuhan rumusan kebijakan yang dapat mengintervensi permasalahan agar pola penanganan terpilih dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

4.2.2.3 Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi & Kajian Materi Pekerja

Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya penataan kawasan perkotaan. Untuk itu, diperlukan model pendekatan studi dokumenter yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi pekerjaan. Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen/data-data sekunder seperti:

- peraturan perundangan-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait
- laporan perencanaan kawasan industri pada wilayah lain (*best practice*)
- Teori maupun konsep-konsep penataan kawasan industri, termasuk dalam aspek pendukungnya seperti kelembagaan, pengelolaan kawasan, serta aspek pembiayaan.

4.2.2.4 Pendekatan Preskriptif dalam Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan

Pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*) merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif kebijakan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa yang akan datang. Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, diharapkan studi tidak hanya terfokus pada analisa kondisi eksisting, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi pemanfaatan suatu konsepsi penanganan atau kebijakan.

4.2.3 Pendekatan Analisis dan Perencanaan

4.2.3.1 Pendekatan Perencanaan Incremental-Strategis dan Strategis - Proaktif dalam Penyusunan Masterplan

a. Pendekatan Incremental-Strategis

Kawasan Peruntukan Industri merupakan bagian dari penataan ruang wilayah, yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kota dalam aspek keruangan. Kawasan Peruntukan Industri tersebut memuat serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan pembangunan ruang kota, yaitu membentuk wujud struktural dan pola ruang kawasan yang efektif dan efisien. Suatu produk perencanaan yang 'baik' harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan yang realistis adalah:

- Mengenalinya secara nyata masalah-masalah pembangunan kawasan industri.
- Mengenalinya secara nyata potensi yang dimiliki lokasi sasaran.
- Mengenalinya secara nyata kendala yang dihadapi kabupaten dalam proses pembangunan.
- Memahami tujuan pembangunan secara jelas dan nyata.
- Mengenalinya aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan kawasan industri.
- Mengenalinya 'aturan main' yang berlaku dalam proses pembangunan kawasan industri.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Kawasan Peruntukan Industri ini adalah Pendekatan Incremental yang lebih bersifat strategis, dimana sebagian besar kondisi-kondisi awal (pra-kondisi) dari suatu persoalan pembangunan tidak diperhatikan atau diluar kontrol. Adapun karakteristik pendekatan ini antara lain:

- Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata.
- Bersifat jangka pendek dan menengah
- Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategis
- Mempertimbangkan eksternalitas
- Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat incremental-strategis.

b. Pendekatan Strategis-Proaktif

Pendekatan strategis-proaktif merupakan bentuk kebalikan dari pendekatan incremental-strategis. Adapun yang dimaksud rencana strategis - proaktif adalah :

- Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan.
- Rencana yang melihat lingkup permasalahan secara internal maupun eksternal, dengan menyadari bahwa pengaruh faktor-faktor eksternal sangat kuat dalam membentuk pola tata ruang kawasan yang terjadi.
- Rencana yang menyadari bahwa perkiraan-perkiraan kondisi di masa yang akan datang tidak bisa lagi hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, akan tetapi sangat dimaklumi bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, faktor-faktor ketidakpastian, serta 'kejutan-kejutan' lain yang terjadi diluar perkiraan semula.
- Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arah pembangunan kawasan.
- Rencana yang berorientasi pada pelaksanaan (action)

c. Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kedua jenis pendekatan ini dapat digunakan dalam pekerjaan ini. Perbedaan penggunaannya hanya terdapat pada kesesuaian sifat pendekatan dengan karakteristik kegiatan yang sedang dilakukan. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- Dalam perumusan konsepsi dan penyusunan rencana struktur, maka pendekatan incremental-strategis perlu dikedepankan untuk dapat menghasilkan suatu konsepsi pengembangan yang sifatnya cenderung 'utopis', namun hal ini memang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan visi-misi dan tujuan pengembangan kawasan yang memiliki kecenderungan untuk mencapai suatu kondisi yang paling ideal, setidaknya sebagai sebuah target jangka panjang yang perlu diwujudkan
- Dalam penyusunan rencana pembangunan, program pentahapan, dan aspek pendukung lainnya, perlu dikedepankan pendekatan strategis-proaktif untuk dapat menghasilkan suatu produk dokumen rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan sesuai tahapan pelaksanaannya.

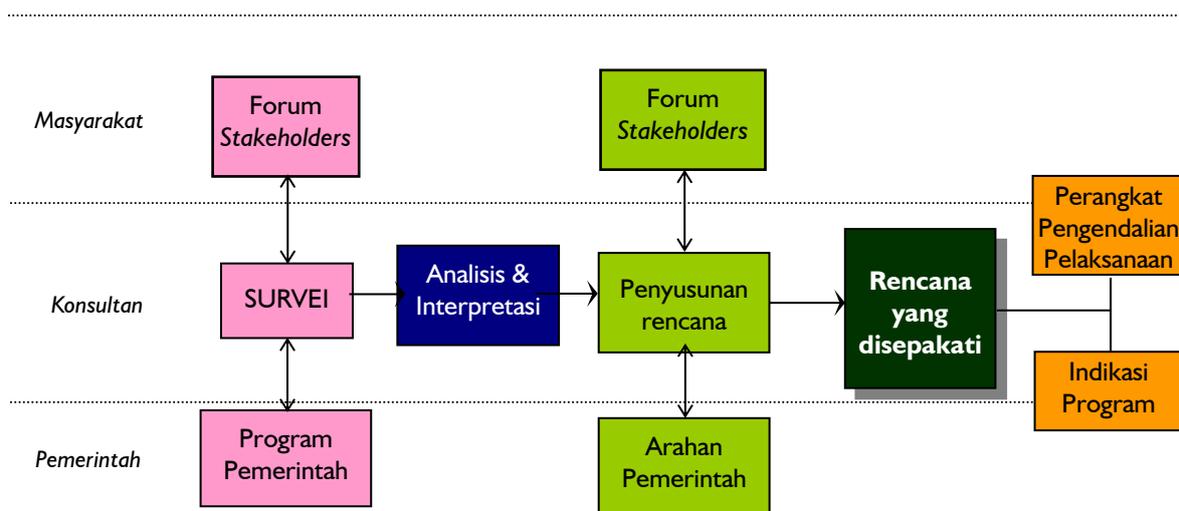
4.2.3.2 Pendekatan Partisipatif / Pelibatan Pelaku Pembangunan

Penyusunan rencana tata ruang tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sebagai pemanfaat ruang (pelaksana rencana tata ruang) dan sebagai pihak yang terkena dampak positif maupun negatif dari perencanaan ruang itu sendiri. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana ini digunakan pendekatan partisipasi pelaku pembangunan (*stakeholder approach*) untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang melalui forum diskusi pelaku pembangunan. Konsultan dalam hal ini berusaha untuk melibatkan secara aktif pelaku pembangunan yang ada dalam setiap tahapan perencanaan.

Di dalam penyusunan rencana ini masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku pembangunan (*stakeholder*) tetapi juga sebagai pemilik dari pembangunan (*shareholder*). Keterlibatan masyarakat sebagai *shareholder* dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap investor dari luar wilayah, tetapi yang diharapkan adalah kerjasama antara investor dengan masyarakat sebagai pemilik lahan di wilayah tersebut.

Pelibatan pelaku pembangunan dalam pekerjaan ini dapat digambarkan dengan diagram berikut ini.

Gambar 4.2 Keterlibatan Pelaku Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana



Dengan posisi sebagai *shareholder* diharapkan masyarakat akan benar-benar memiliki pembangunan diwilayahnya, dapat bersaing dengan penduduk pendatang, dan dengan demikian masyarakat lokal tidak tergusur dari wilayahnya.

4.2.3.3 Pendekatan Menyeluruh dan Terpadu

Merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu serta didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan wilayah/kawasan dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula kepentingan yang lebih luas, baik antar wilayah dengan daerah hinterlandnya yang terdekat maupun dengan yang lebih jauh lagi. Secara terpadu mengartikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya dipecahkan sektor per sektor saja tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar tiap-tiap sektor, di mana dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor.

4.2.3.4 Pendekatan Analisis Ambang Batas

Adalah pendekatan untuk menentukan kebijaksanaan rencana tata ruang yang didasarkan ambang batas daya dukung lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penekanan terhadap pertimbangan aspek lingkungan dilakukan karena lingkungan merupakan aspek yang sangat berkepentingan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

4.2.3.5 Pendekatan Kesesuaian Ekologi dan Sumber Daya Alam

Pada pendekatan ini akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Daerah Banjir; Perencanaan dan pengolahan daerah-daerah yang rendah pemanfaatan saluran-saluran alam secara optimal diharapkan mampu mencegah kemungkinan bahaya banjir. Saluran drainase direncanakan mengikuti arah kemiringan kontur pada titik terendah dalam kawasan menuju saluran drainase induk.
- Unit Visual dan Kapasitas Visual; Daerah yang berpotensi memiliki arah view yang bagus antara lain adalah daerah hijau hutan, daerah sepanjang aliran sungai, dan tepi pantai. Pemanfaatan daerah-daerah yang berpotensi ini diperuntukkan untuk pariwisata, permukiman menengah ke atas.
- Area dengan Visitas Tinggi; Kawasan yang memiliki visibilitas tinggi adalah kawasan yang memungkinkan untuk terlihat dari berbagai sudut (sebagai *landmark* kawasan) dapat difungsikan untuk zona magnet pusat kota.
- Topografi; Dalam suatu perencanaan perlu diperhatikan bagaimana kondisi topografi eksisting kawasan tersebut, juga guna lahan dan karakter wilayahnya.
- Potensi Angin; Potensi angin dalam perencanaan meliputi arah dan kekuatan angin untuk mendapatkan udara yang sejuk dan mengurangi kelembaban.
- Binatang/Habitat; Mengidentifikasi adanya habitat liar yang membahayakan pengembangan area permukiman.

Selain hal-hal tersebut di atas juga perlu diperhatikan kesesuaian/kelayakan kawasan itu sendiri. Untuk itu yang perlu dipertimbangkan adalah :

- Keserasaian Penggunaan Energi
Upaya identifikasi kesesuaian fungsi kawasan/wilayah dengan potensi alam yang dapat menghasilkan energi yang baik berupa angin, aliran air dan laut.

- Kesesuaian untuk Preservasi
Identifikasi yang disesuaikan dengan konsep dasar perencanaan kawasan dan kondisi kawasan yang memiliki potensi untuk di preservasi baik yang buatan maupun alam. Buatan dapat berupa kawasan bersejarah, monumen, atau peninggalan kuno. Kawasan preservasi alam dapat dipreservasi karena perlu dilindungi seperti daerah aliran sungai, hutan, tepian pantai, danau, terumbu karang, laut, atau daerah yang dianggap berbahaya seperti daerah mudah longsor, patahan geologis, daerah gunung berapi dan sebagainya.
- Kesesuaian untuk Rekreasi
Pemanfaatan lahan kawasan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai area rekreasi yang mendukung pelayanan fasilitas umum untuk penghuni sekitar maupun sebagai daya tarik wilayah seperti danau/telaga, pantai/laut, daerah sepanjang sungai, hutan, taman kota dan bukit.
- Kesesuaian untuk Hunian
Perencanaan kawasan sebagai daerah hunian, dengan mempertimbangkan beberapa aspek perencanaan antara lain dari segi aksesibilitas, kondisi topografi, kestrategisan lokasi, kondisi kontur tanah, kebisingan dan potensi alam dan buatan.

4.3 METODOLOGI Pengerjaan

Dari deskripsi pendekatan dan lingkup kegiatan analisis yang akan dilakukan berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon,, terlihat bahwa upaya perencanaan merupakan proses kegiatan yang kompleks. Oleh karena itu, perencana dituntut memiliki kemampuan analisis yang mencakup kemampuan melihat segala aspek yang terkait menurut proporsinya serta memiliki cara pandang yang luas dan menyeluruh. Namun kenyataannya harus disadari bahwa perencana merupakan bagian kecil daripada rencana tersebut, sehingga untuk melaksanakan proses perencanaan tersebut perlu penyederhanaan objek perencanaan, atau dengan kata lain perlu dilakukan permodelan.

Beberapa permodelan yang sering digunakan dalam proses penyusunan rencana antara lain model kependudukan, model perekonomian model pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, model perangkutan dan sebagainya. Dalam prakteknya, permodelan ini sering ditempuh dalam 2(dua) cara, yaitu :

- Permodelan matematis, yaitu menyatakan hubungan aspek perencanaan seperti hubungan matematis. Hal ini dilakukan apabila masalah yang akan dianalisis memiliki hubungan yang dapat diibaratkan dengan hubungan fungsi matematis. Kasus yang sering dijumpai adalah dalam analisis perkembangan penduduk, analisis ekonomi.
- Permodelan miniatur, yaitu menyederhanakan masalah dalam skala miniatur yang tetap proporsional, misalnya, maket, peta, sistem nilai. Melalui cara ini, pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi akan lebih menyeluruh, menghindari dan tidak terpaku pada hal-hal kecil atau rinci, sehingga permasalahan pokok dapat dianalisis.

Namun demikian, mengingat perencanaan memiliki dimensi waktu yang cukup panjang dan menyangkut kondisi pada masa yang akan datang dengan pertimbangan kondisi yang ada saat ini dan masa yang telah lalu, maka kelenturan analisis ini ditentukan beberapa hal pokok, seperti :

- Ketersediaan data. Makin lengkap dan rinci data yang dicatat, maka analisis pun akan memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi;
- Tujuan analisis. Tidak setiap objek pengamatan memerlukan analisis yang terinci sampai kepada hal-hal yang kecil, namun tetap tidak mengurangi faktor nilai kelengkapan data;
- Teknik analisis. Penggunaan model dan teknik analisis yang tepat akan membantu kehalusan analisis sehingga peramalan atau perkiraan yang dilakukan mendekati kondisi yang akan terjadi. Pemilihan teknik dan model analisis ini juga akan terkait dengan kedua aspek sebelumnya, yaitu ketersediaan data dan tujuan analisis.

Untuk keperluan pekerjaan ini, beberapa model analisis yang digunakan meliputi model-model analisis seperti diuraikan pada sub-bab berikut.

4.3.1 Permodelan Interaksi antar Bagian Wilayah

Pendekatan analisis wilayah selain faktor kependudukan, adalah analisis terhadap pola hubungan/interaksi antarwilayah maupun antar bagian wilayah yang satu dengan lainnya. Anggapan dasar yang digunakan adalah melihat suatu daerah sebagai suatu massa, sehingga hubungan antar daerah diasumsikan dengan hubungan antar massa, yang mana massa tersebut memiliki daya tarik, sehingga terjadi saling pengaruhi antar daerah.

Permodelan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antardaerah atau antar bagian wilayah dengan wilayah lainnya, adalah Model Gravitasi. Penerapan model ini ini dalam bidang analisis perencanaan kota adalah dengan anggapan dasar bahwa faktor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang dimiliki, mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara 2(dua) kutub magnet.

Kelemahan penerapan model ini dalam analisis wilayah, terutama terletak pada variabel yang digunakan sebagai alat ukur, dimana dalam fisika variabel yang digunakan, yaitu molekul suatu zat mempunyai sifat yang homogen, namun tidak demikian halnya dengan unsur pembentuk kota, misalnya penduduk. Namun demikian, hal ini telah dikembangkan, yaitu dengan tidak hanya memasukan variabel massa saja, tetapi juga gejala sosial sebagai faktor pembobot.

Persamaan umum model Gravitasi ini adalah :

$$T_{ij} = k \frac{P_i \bullet P_j}{P}$$

dimana :

T_{ij} = pergerakan penduduk sub-wilayah i ke sub-wilayah j

K = tetapan empiris (bobot)

P_i = pergerakan penduduk sub wilayah i

P_j = pergerakan penduduk yang berakhir di sub wilayah j

P = jumlah penduduk sub wilayah i

4.3.2 Model Analisis Tata Ruang

Analisis terhadap Tata Ruang mempunyai tujuan untuk :

- Mengukur aksesibilitas pergerakan dalam kawasan
- Mengukur rasio kebutuhan dan kondisi eksisting, pada berbagai komponen
- Mengukur tingkat kepentingan pembagian wilayah berdasarkan skala pelayanan

Beberapa metoda untuk melakukan analisis tata ruang yang biasa digunakan antara lain seperti diuraikan berikut.

4.3.2.1 Metoda Aksesibilitas

Faktor kemudahan pencapaian baik dalam hubungan keterkaitan antar bagian wilayah dalam wilayah perencanaan, ataupun antar komponen dalam bagian wilayah, sangat menentukan intensitas interaksi antar bagian wilayah maupun antar komponen pembentuk wilayah, serta struktur tata ruang yang direncanakan.

Metoda ini merupakan upaya untuk mengukur tingkat kemudahan pencapaian antar kegiatan, atau untuk mengetahui seberapa mudah suatu tempat dapat dicapai dari lokasi lainnya. Pada dasarnya model ini merupakan fungsi dari kualitas prasarana penghubung unit kegiatan yang satu dengan lainnya per satuan jarak yang harus ditempuh. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{FKT}{d}$$

dimana :

- A = Nilai aksesibilitas
 F = Fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal)
 T = Kondisi jalan (baik, sedang, buruk)
 D = Jarak antara kedua unit kegiatan

Metoda lainnya, yaitu Indeks Aksesibilitas, yang memiliki persamaan :

$$A_{ij} = \frac{E_j}{(d_{ij})} b$$

dimana :

- A_{ij} = Indeks aksesibilitas
 E_j = Ukuran aktifitas
 d_{ij} = Jarak tempuh (jarak geografi atau waktu tempuh)
 b = Parameter

Langkah selanjutnya adalah menghitung potensi pengembangan, yaitu dengan cara mengkalikan indeks aksesibilitas dengan luas kawasan yang mungkin untuk dikembangkan, yaitu :

$$D_i = A_i * H_i$$

dimana :

- D_i = potensi pengembang di kawasan i
 A_i = indeks aksesibilitas dari kawasan i
 H_i = luas kawasan yang mungkin dikembangkan di kawasan i

Potensi masing-masing kawasan dihitung dan dijumlahkan untuk memperoleh potensi seluruh kawasan. Dari potensi keseluruhan ini, maka potensi relatif masing-masing kawasan terhadap keseluruhan kawasan (wilayah) dapat diketahui, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$D_r = \frac{D_i}{iD_i}$$

dimana :

- D_r = *potensi pengembangan (relatif)*
- D_i = *potensi pengembangan di kawasan i*
- iD_i = *jumlah seluruh potensi pengembangan*

Selanjutnya untuk menentukan jumlah penduduk yang akan dialokasikan pada masing-masing kawasan yang potensial adalah dengan cara mengkalikan hasil proyeksi total penduduk untuk masa mendatang dengan D_i , yang secara matematis dapat dirumuskan :

$$P_i = P_{total} \times \frac{D_i}{iD_i}$$

dimana :

- P_i = *jumlah penduduk yang dapat dialokasikan di kawasan I*
- P_{total} = *jumlah penduduk seluruhnya*
- D_i/iD_i = *potensi relatif kawasan i*

Metoda lain yang cukup mudah penggunaannya yang hingga kini masih dipergunakan adalah Metoda Perkiraan Kebutuhan. Pada model ini, digunakan standar-standar yang dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana yang memiliki implikasi terhadap kebutuhan ruang. Beberapa standar yang digunakan antara lain mengacu pada pedoman standar lingkungan permukiman kota, pedoman standar pembangunan perumahan sederhana, peraturan geometris jalan raya dan jembatan dan lain-lain.

4.3.2.2 Metoda Skoring

Metoda ini digunakan untuk menilai tingkat layanan kota sehingga dapat ditentukan potensinya yang dapat menentukan fungsi kota. Dari hasil penilaian ini pula dapat ditentukan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa yang akan datang. Persamaan yang digunakan sangat sederhana, yaitu :

$$B_i = \frac{P_i}{P} \times 100$$

dimana :

- B_i = *Bobot dari kegiatan i*
- P_i = *Jumlah aktifitas di kota i*
- P = *Jumlah penduduk di kota i*

4.3.2.3 Model Analisis Kegiatan

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Adapun variabel yang digunakan sebagai alat ukur untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut, hasil produksi atau satuan lain yang dapat dijadikan kriteria.

Perbandingan relatif Model Location Quotient (LQ) ini dapat dinyatakan melalui persamaan matematis berikut :

$$LQ_i = \frac{S_i / N_i}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_i / N}$$

dimana :

- S_i = jumlah buruh industri i di bagian wilayah yang diamati
- S = jumlah total buruh industri di seluruh bagian wilayah
- N_i = jumlah buruh industri i di seluruh wilayah
- N = jumlah total buruh di seluruh wilayah

Struktur perumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut :

- ♦ $LQ > 1$: menyatakan sub wilayah yang diamati memiliki potensi surplus
- ♦ $LQ < 1$: menunjukkan sub wilayah yang bersangkutan memiliki kecenderungan impor dari wilayah lain
- ♦ $LQ = 1$: menunjukkan sub wilayah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu

4.3.2.4 Model Tingkat Kemampuan Pelayanan Fasilitas

Tingkat pelayanan fasilitas umum diukur dengan cara mengkaji kemampuan suatu jenis fasilitas dalam melayani kebutuhan penduduknya. Dalam hal ini, fasilitas umum yang memiliki tingkat pelayanan 100% mengandung arti bahwa fasilitas tersebut memiliki kemampuan pelayanan yang sama dengan kebutuhan penduduknya. Untuk mengetahui kelengkapan fasilitas umum suatu bagian wilayah, dihitung tingkat pelayanannya dengan menggunakan rumus :

$$TP = \frac{d_{ij} / b_j}{C_{is}} \times 100\%$$

dimana :

- TP = tingkat pelayanan fasilitas i di kawasan j
- d_{ij} = jumlah fasilitas i di kawasan j
- b_j = jumlah penduduk di kawasan j
- C_{is} = jumlah fasilitas i persatuan penduduk menurut standar penentuan fasilitas untuk kawasan

Dengan perhitungan ini, dapat diketahui tingkat pelayanan setiap fasilitas, kecuali untuk fasilitas peribadatan, dimana perbedaan terletak pada jumlah penduduk pada kawasan yang diamati, yaitu b_j diganti oleh jumlah penduduk menurut agama.

4.3.3 Metoda Analisis SWOT

Metode SWOT akan digunakan untuk merumuskan tujuan dan strategi penataan ruang. Tujuan dan strategi penataan ruang dirumuskan melalui penelaahan dan kajian mendalam terhadap faktor internal kawasan yang meliputi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) serta faktor eksternal kawasan yang meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threatment*).

Analisa SWOT pada kegiatan ini dilakukan melalui analisis interaksi faktor internal (*strength* / kekuatan dan *weakness* / kelemahan) dan eksternal (*opportunity* / peluang dan *threat* / ancaman) dengan mengalikan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari hasil perkalian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut akan diperoleh beberapa jenis strategi, antara lain : strategi SO, strategi ST, strategi WT, dan strategi OT.

Membuat strategi adalah menggabungkan elemen internal dengan elemen eksternal untuk mendapatkan alternatif yang paling menguntungkan.

1. Strategi SO (Strengths + Opportunities) ; Strategi ini yang termurah karena dengan modal sedikit dapat mendorong kekuatan yang ada.
2. Strategi ST (Strengths + Threats); Strategi ini agak mahal karena dengan modal yang paling sedikit, dapat diatasi ancaman yang sudah ada, pertimbangan yang dipakai adalah memaksimalkan utility institusi tetapi juga barhati-hati.
3. Strategi WO (Weaknesses + Opportunities); Adalah strategi pemerataan (investasi) atau pemberian subsidi (divestasi), yang agak lebih sulit karena orientasinya memihak pada kondisi yang paling lemah tetapi dimanfaatkan untuk menangkap peluang.
4. Strategi WT (Weaknesses + Threats); Strategi ini yang paling sulit karena orientasinya memihak pada yang paling lemah atau paling terancam dengan meminimalkan kerugian.

Gambar 4.3 Matriks SWOT

	STRENGTHS	WEAKNESSES
OPPORTUNITIES	STRATEGI S-O Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS	STRATEGI S-T Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Secara rinci, kajian analisis SWOT dalam perumusan tujuan dan strategi penataan ruang kota akan melalui beberapa tahapan teknis sebagai berikut.

A. SWOT Skenario Trend

Skenario pengembangan ini pada intinya merupakan kajian ilmiah secara mendalam terhadap variabel-variabel kondisi lapangan yang terdiri dari :

1. Variabel fisik alamiah,
2. Variabel tata guna lahan dan pola pemanfaatan ruang,
3. Variabel penduduk, meliputi :



- a) Perkembangan jumlah penduduk
- b) Struktur penduduk menurut :
 - Menurut jenis kelamin
 - Menurut umur
 - Menurut tingkat pendidikan
 - Menurut mata pencaharian
 - Menurut agama
 - Menurut etnis
- c) Sebaran penduduk
- d) Kepadatan penduduk
4. variabel sarana lingkungan, yang meliputi :
 - a) Jumlah dan jenis sarana Pendidikan
 - b) Jumlah dan jenis sarana kesehatan
 - c) Jumlah dan jenis sarana Pelayanan umum
 - d) Jumlah dan jenis sarana Pemerintahan
 - e) Jumlah dan jenis sarana Peribadatan
 - f) Jumlah dan jenis sarana Rekreasi dan olahraga
 - g) Jumlah dan jenis sarana perdagangan
 - h) Jumlah dan jenis sarana angkutan umum
5. Variabel sistem jaringan prasarana utilitas, yang meliputi :
 - a) Jaringan drainase
 - b) Pembuangan air hujan
 - c) Pembuangan limbah domestik
 - d) Jaringan air bersih
 - e) Jaringan listrik
 - f) Jaringan pengelolaan sampah
 - g) Jaringan telekomunikasi
 - h) Jaringan pemadam kebakaran
 - i) Jaringan pelayanan gas
6. Variabel sistem transportasi, yang meliputi :
 - a) Tipe dan kelas jalan
 - b) Pola jaringan jalan
 - c) Moda angkutan
 - d) Rute angkutan umum
 - e) Terminal
7. Variabel ekonomi, yang meliputi :
 - a) PDRB
 - b) Ekonomi Sekotral,
 - c) Pertumbuhan ekonomi
 - d) Sektor potensial dan sektor unggulan

B. SWOT Skenario Target

Skenario pengembangan ini pada intinya merupakan kajian ilmiah secara mendalam terhadap variabel-variabel Rencana Tata Ruang Wilayah, yang terdiri dari :

1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan
2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

3. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Perkotaan
4. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan
5. Rencana Sistem Jaringan Utilitas
6. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana perkotaan
7. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Legalisasi Produk Rencana

C. SWOT Skenario Moderat

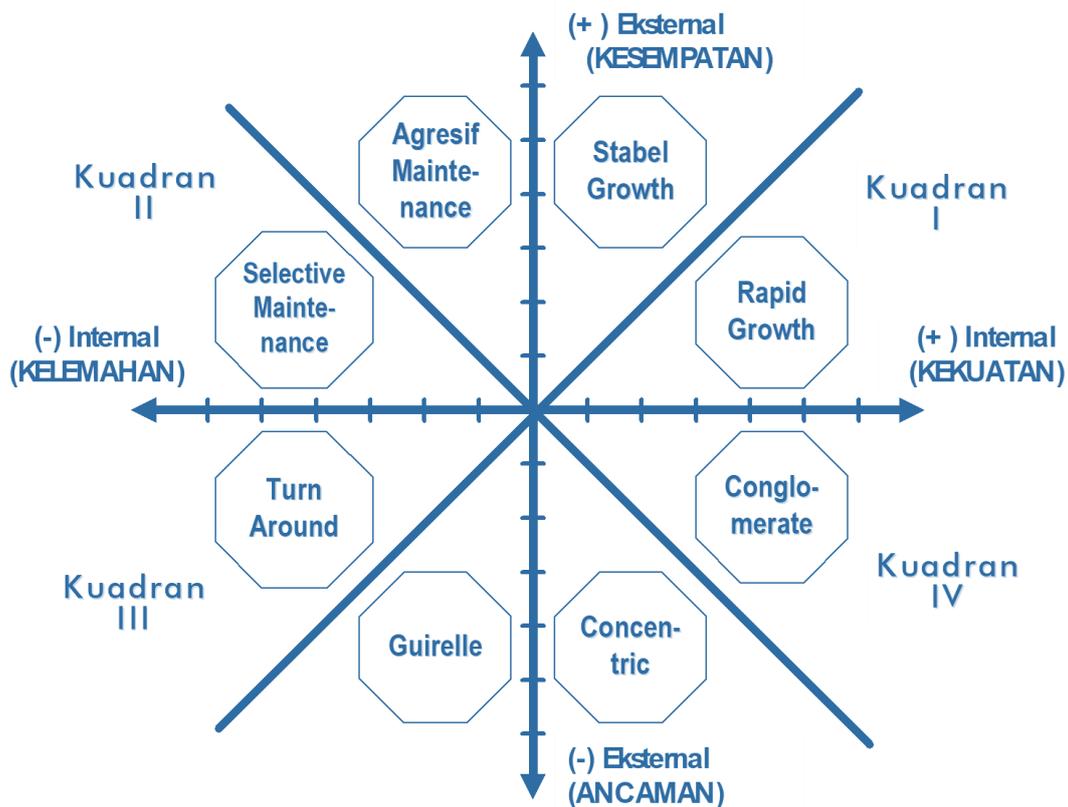
Skenario pengembangan ini pada intinya merupakan kajian ilmiah secara mendalam terhadap gabungan antara variabel kondisi lapangan dengan variabel Rencana Tata Ruang Wilayah.

D. Penentuan Posisi Pembangunan (Kuadrant) Kota Bandung

Salah satu teknik penentuan posisi pembangunan dalam metode SWOT yaitu dengan melakukan penilaian untuk mengetahui posisi obyek pada kuadran SWOT. Dari penilaian tersebut diketahui koordinat pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut :

- a. **Kwadran I (*Growth*)**, adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - 1) Ruang A dengan Rapid Growth Strategy yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat
 - 2) Ruang B dengan Stable Growth Strategy yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
- b. **Kwadran II (*Stability*)**, adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - 1) Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola obyek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.
 - 2) Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelolaan obyek adalah dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting
- c. **Kwadran III (*Survival*)**, adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - 1) Ruang E dengan Turn Around Strategy yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional obyek
 - 2) Ruang F dengan Guirelle Strategy yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman.
- d. **Kwadran IV (*Diversification*)**, adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu sebagai berikut :
 - 1) Ruang G dengan Concentric Strategy yaitu strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak
 - 2) Ruang H dengan Conglomerate Strategy yaitu strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri.

Gambar 4.4 Posisi Pembangunan Kawasan Dalam Metode SWOT



4.3.4 Metode Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah kegiatan tanya jawab sistematis dengan warga masyarakat yang dipilih. Bentuk dan proses wawancara lebih partisipatif, dengan pertanyaan-pertanyaan semi terbuka, artinya pertanyaan tidak ditentukan terlebih dahulu pilihan jawabannya, dan pertanyaannya dapat diubah dan dikembangkan berdasarkan jawaban orang yang diwawancara.

Teknik wawancara keluarga adalah teknik PRA yang dipergunakan untuk mengkaji sejumlah topik informasi mengenai aspek-aspek kehidupan masyarakat yang disusun dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini bersifat semi terbuka karena hanya merupakan bahan acuan wawancara. Artinya isi kajian bisa dirubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuk mencapai tujuan kajian

4.3.4.1 Wawancara Individu/Perorangan

Wawancara informan kunci: untuk informasi khusus, biasanya kepada orang yang punya pengalaman dan pengetahuan khusus tentang apa yang diinginkan dalam wawancara, klasifikasinya dapat:

- Orang luar yang sudah lama tinggal di lokasi tersebut
- Penduduk yang memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya
- Masyarakat lain yang terlihat menonjol dan aktif

4.3.4.2 Wawancara perorangan pilihan :

Dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk menyampaikan keadaan dirinya. Hasilnya adalah profil perorangan yang merupakan representasi dari kelompok masyarakat tertentu

4.3.4.3 Wawancara Kelompok

Dilakukan untuk membahas sejumlah topik informasi yang telah ditetapkan di dalam pedoman wawancara, tetapi dibahas dan didiskusikan di tingkat kelompok. Jika terjadi perbedaan pendapat, kelompok akan menyepakati jawaban bersama.

4.3.5 Metodologi Penyiapan Peta

Untuk keperluan perencanaan akan membutuhkan peta dasar Kawasan Pusat Kabupaten Cirebon berbasis Citra Satelit. Penyediaan Citra Satelit tersebut diperoleh melalui wahana yang antara lain Satelit IKONOS yang mengorbit pada ketinggian 681 km di atas permukaan bumi dan mempunyai dua buah sensor yang dapat mencakup areal seluas 11 km dalam sekali pemotretan.

Gambar 4.5 Spesifikasi dari satelit Ikonos

Band	Wavelength Region (μm)	Resolution (m)
1	0.45-0.52 (blue)	4
2	0.52-0.60 (green)	4
3	0.63-0.69 (red)	4
4	0.76-0.90 (near-IR)	4
PAN	0.45-0.90(PAN)	1

Tabel 4.1 Produk yang dihasilkan oleh Ikonos

Product Type	Format	Projection	Ellipsoid Datum	Media
1 metre panchromatic	GeoTIFF	UTM	WGS 84	CD-ROM
4 metre multispectral	NITF 2.0	State Plane	GRS 1980/NAD 83	8 mm tape (Exabyte)
1 metre pan-sharpened	ERDAS.lan	Albers Conical Equal Area		DAT
	BIL	Lambert Conformal Conic		
	BIP			
	Sun Raster *			

* Not available for GEO product

Dengan kecepatan rotasi mengelilingi bumi sebanyak 14 kali dalam waktu 24 jam, pemotretan akan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Data dari Ikonos dengan gelombang panchromatic beresolusi 1 meter sangat berguna untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan

4.3.5.1 Metoda Pengolahan Peta

Sejalan dengan meningkatnya kemampuan teknologi pengolahan data peta, saat ini GPS (*Global Positioning System*) banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Keunggulan sytem ini dapat dipergunakan hampir dalam segala cuaca, dapat memberikan data posisi tiga dimensi yang teliti. Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dalam hal ini kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, beberapa metode pengolahan data peta berbasis GPS sebagai berikut.

4.3.5.2 Posisi dan Sistem Koordinat

Posisi suatu titik dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif posisi suatu titik dinyatakan dengan koordinat, baik dalam ruang satu, dua, tiga, maupun empat dimensi (1D, 2D, 3D, maupun 4D). Perlu dicatat di sini bahwa koordinat tidak hanya memberikan deskripsi kuantitatif tentang posisi, tapi juga pergerakan (trayektori) suatu titik seandainya titik yang bersangkutan bergerak. Untuk menjamin adanya konsistensi dan standarisasi, perlu ada suatu sistem dalam menyatakan koordinat. Sistem ini disebut *sistem referensi koordinat*, atau secara singkat sistem koordinat, dan realisasinya umum dinamakan *kerangka referensi koordinat*.

4.3.5.3 Metode dalam Menentukan Sistem Referensi Koordinat

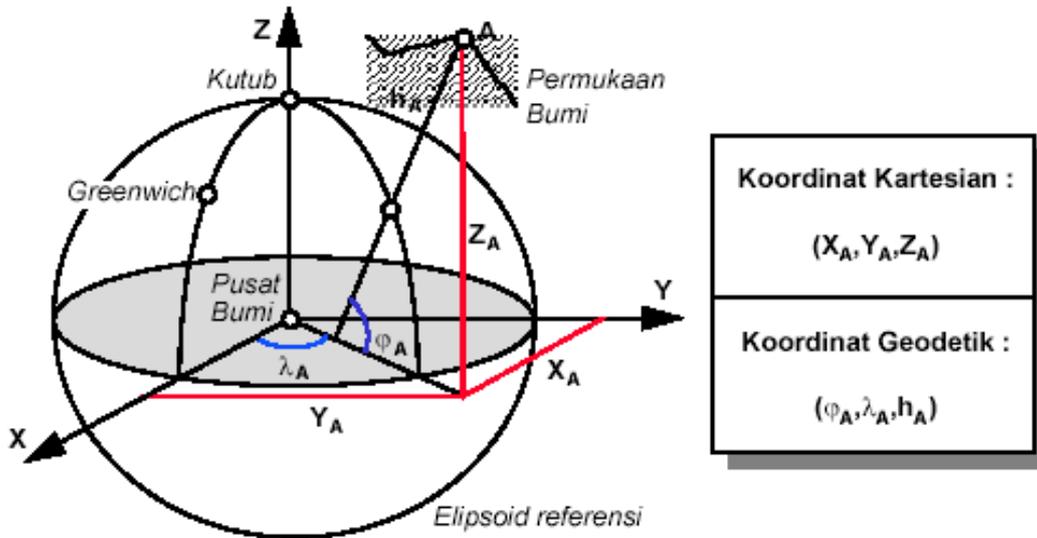
Sistem referensi koordinat adalah sistem (termasuk teori, konsep, deskripsi fisis dan geometris, serta standar dan parameter) yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Dalam bidang geodesi dan geomatika, posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat (dua-dimensi atau tigadimensi) yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat itu sendiri didefinisikan dengan menspesifikasi tiga parameter berikut, yaitu :

- lokasi titik nol dari sistem koordinat,
- orientasi dari sumbu-sumbu koordinat, dan
- besaran (kartesian, curvilinear) yang digunakan untuk mendefinisikan posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut.

Setiap parameter dari sistem koordinat tersebut dapat dispesifikasikan lebih lanjut, dan tergantung dari spesifikasi parameter yang digunakan maka dikenal beberapa jenis sistem koordinat.

Dalam penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi, titik nol dari sistem koordinat yang digunakan dapat berlokasi di titik pusat massa bumi (sistem koordinat geosentrik), maupun di salah satu titik di permukaan bumi (sistem koordinat toposentrik). Kedua sistem koordinat diilustrasikan pada berikut.

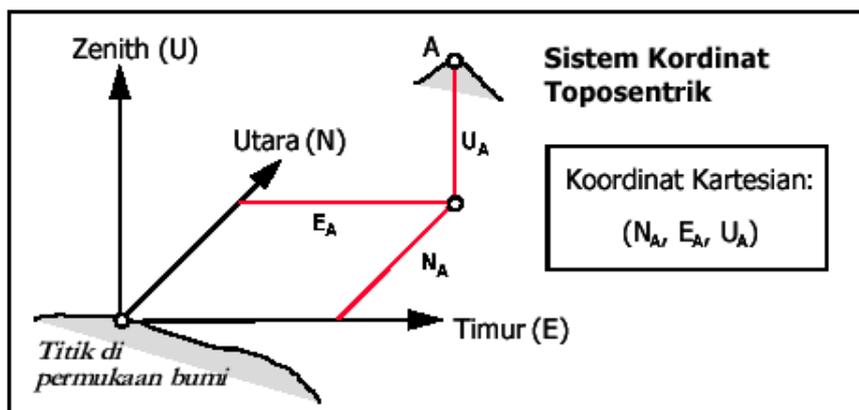
Gambar 4.6 Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian & Geodetik)



Sistem koordinat geosentrik banyak digunakan oleh metode-metode penentuan posisi ekstra-terestris yang menggunakan satelit dan benda-benda langit lainnya, baik untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan Bumi maupun posisi satelit. Sedangkan sistem koordinat toposentrik banyak digunakan oleh metode-metode penentuan posisi terestris. Dilihat dari orientasi sumbunya, ada sistem koordinat yang sumbu-sumbunya ikut berotasi dengan bumi (terikat bumi) dan ada yang tidak (terikat langit). Sistem koordinat yang terikat bumi umumnya digunakan untuk menyatakan posisi titik-titik yang berada di bumi, dan sistem yang terikat langit umumnya digunakan untuk menyatakan posisi titik dan obyek di angkasa, seperti satelit dan benda-benda langit.

Dilihat dari besaran koordinat yang digunakan, posisi suatu titik dalam sistem koordinat ada yang dinyatakan dengan besaran-besaran jarak seperti sistem koordinat Kartesian, dan ada yang dengan besaran-besaran sudut dan jarak seperti sistem pada sistem koordinat ellipsoid atau geodetik.

Gambar 4.7 Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Toposentrik



4.3.5.4 Model Desktop Cartography

Desktop cartography adalah poses penyajian peta digital menjadi sebuah peta analog/hard copy yang representatif dengan dilengkapi simbol-simbol obyek topografi dan informasi tepi sebagaimana hasil proses kartografi manual. Pada tahap desktop kartografi dilakukan dengan bantuan media perangkat lunak yang mempunyai fasilitas desktop publishing.

4.3.5.5 Metode Konversi Data

Dengan melakukan konversi data dari data format vektor GIS menjadi data format vektor grafis. Perlu diperhatikan bahwa proses konversi tidak selalu menjamin file hasil konversi bisa 100 % sama dengan aslinya. Kadang-kadang akan terjadi kesalahan (error) pada waktu proses konversi tersebut berjalan, sehingga diperlukan suatu pengamatan dan perbaikan pada file hasil dari konversi tersebut langsung pada monitornya.

4.3.5.6 Metode Penskalaan

Penskalaan dilakukan terhadap data peta hasil konversi, mengingat hasil konversi belum menghasilkan skala yang tepat.

4.3.5.7 Metode Layer and Style Atributting serta Coloring Table

Layer, Style dan warna merupakan suatu cara dari software desktop kartografi (dalam hal ini software Illustrator) untuk membantu melaksanakan proses konstruksi peta secara sistematis dan efisien, yang ditampilkan melalui icon window. Masing-masing window dapat dibuat item-item tertentu sesuai dengan keinginan dengan merujuk pada spesifikasinya. Item-item pada window layer, style dan warna tersebut dinamakan dengan atribut dan masing-masing mempunyai kegunaan dan fungsi tertentu.

4.3.5.8 Metode Input Data kedalam Atribut Layer dan Style

Data didalam file DXF/Vektor grafik hasil digitasi pada umumnya sudah diatur dengan menggunakan sistem pelayerannya tersendiri. Layer-layer ini pada proses konversi oleh software desktop kartografi akan ikut diproses dan langsung dimasukkan dalam sistem layer file konversi dengan urutannya sesuai dengan sebagaimana pembentukan dan penulisan teksnya didalam file digitasi.

4.3.5.9 Model Editing Peta

Sesuai dengan namanya, pada prinsipnya proses ini menterjemahkan detail data peta dalam bentuk simbolisasi sesuai kaidah-kaidah kartografinya dengan mengacu pada spesifikasi.

a. *Editing Teks*

Editing terhadap teks menuntut suatu pekerjaan yang harus memperhatikan kaidah-kaidah kartografi untuk penempatan posisi dan ukuran teks yang benar.

b. *Editing Simbol Titik*

Pada umumnya ada dua cara editing terhadap simbol titik yaitu :

- Apabila telah dibuat pada saat digitasi, biasanya langsung diganti simbolnya, yang dapat diambil dari simbol yang telah dibuatkan terlebih dahulu dimaster legendanya, dan ditempatkan pada posisi yang sama, kemudian simbol lama dihapus/didelete.
- Apabila belum dibuatkan, maka diambil langsung juga dari master legenda dan ditempatkan pada posisinya dengan bantuan manuskrip peta.

c. *Editing Simbol Garis*

Proses editing garis membutuhkan suatu kejelian dan kecermatan, karena unsur inilah yang paling banyak jumlahnya didalam peta seperti garis kontur, sungai, batas administrasi dan lain-lain.

d. Editing Area/Warna

Suatu area didefinisikan sebagai luasan yang dibentuk atau dibatasi dengan garis-garis yang tertutup (close area). Suatu area seringkali dibuat dengan bantuan dari berbagai detail garis, seperti suatu area sawah dibentuk dari garis deleniaasi landuse, jalan dan sungai.

Dalam melaksanakan editing area dituntut untuk memahami batasan garis-garis yang akan membentuk suatu area yang tertutup (close area). Pada umumnya data awal yang belum dibentuk dalam peta/manuskrip maupun digitalnya, suatu area akan disimbolkan dengan menggunakan kode teks.

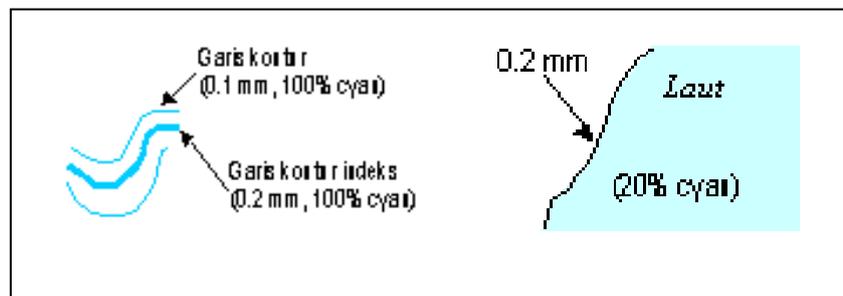
4.3.5.10 Model Checkplot

Proses checkplot dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan pada peta hasil editing yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, proses koreksi dapat dilaksanakan langsung dimonitor, namun suatu hal yang harus menjadi pegangan bahwa proses tersebut mempunyai suatu kelemahan yang susah untuk dihindari, yaitu keterbatasan luas sudut pandang penglihatan dimonitor. Keterbatasan ini menjadi kendala apabila ingin melihat peta dalam bentuk satu kesatuan yang utuh, agar dapat melihat komposisi peta secara keseluruhan.

4.3.5.11 Model Anotasi dan Pencetakan Draft

Anotasi dan pembuatan legenda dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah pemetaan yang mengacu pada PP no.10/2000 tentang ketelitian peta dalam penataan ruang. Anotasi tersebut tidak hanya dituangkan secara baik dalam bentuk cetak saja, namun juga dalam format file digital yang menjadi keluarannya.

Gambar 4.8 Contoh Penulisan Peta berdasarkan PP.10/2000



4.3.6 Metode Analisis Penggunaan Lahan

Metode analisis penggunaan lahan ini pada dasarnya merupakan analisis dasar dalam perencanaan sekaligus sebagai bagian yang paling penting di dalamnya. Dalam metode analisis penggunaan lahan ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu topografi, jumlah penduduk, biaya bangunan dan derajat pelayanan jaringan pengangkutan (Martin, B.dkk, 1996 dalam Warpani Suwardjoko, 1990). Dalam analisis penggunaan lahan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu klasifikasi lahan, overlay (pertampalan peta), dan daya hubung (akses).

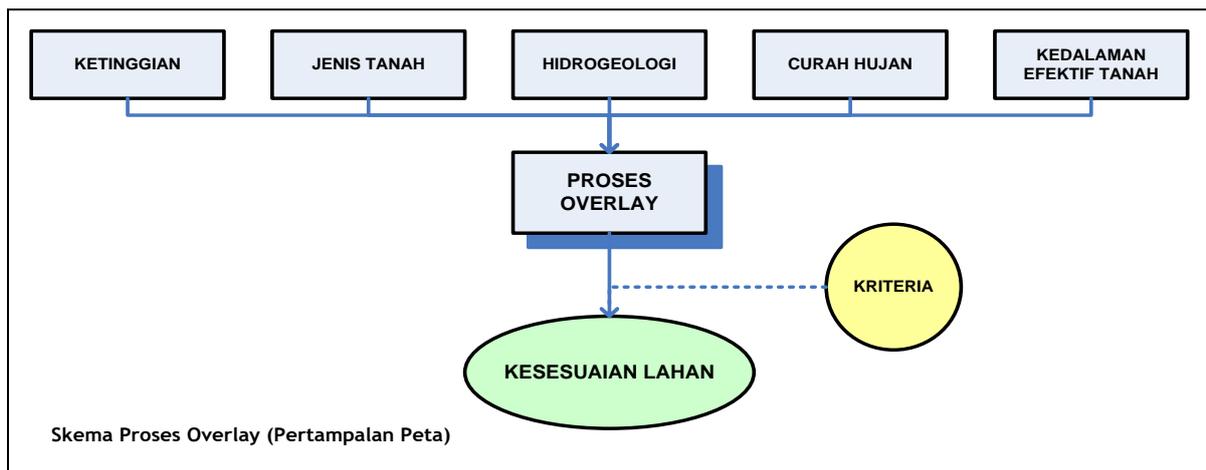
4.3.6.1 Model Klasifikasi Lahan

Model klasifikasi lahan ini pada dasarnya mengelompokkan lahan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu kriteria yang dikeluarkan oleh USDA (The United States of Agricultural) dimana mengelompokkan kemampuan lahan dalam tingkat kelas lahan menurut kemiringan lereng, yang hasilnya adalah kemampuan lahan khusus untuk pertanian. Penilaian kemiringan lereng dilakukan dengan pengelompokan dari besar sudut lereng, berdasarkan rentang-rentang yang telah ditentukan. Pengelompokan lahan ini menghasilkan 5 kelas lahan berdasarkan resiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertambah dengan semakin tingginya kelas.

4.3.6.2 Model Overlay (Pertampalan Peta)

Metodologi ini dipergunakan untuk menganalisis kesesuaian lahan berdasarkan peta kemiringan tanah, peta ketinggian, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan dan peta kedalaman efektif tanah. Keseluruhan peta yang memuat informasi geografis tersebut kemudian ditumpang tindihkan sehingga diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi lahan di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan kriteria yang ada, informasi yang sudah lengkap tersebut menjadi dasar dalam pengklasifikasian lahan sesuai dengan peruntukannya.

Gambar 4.9 Skema Proses Overlay / Pertampalan Peta



4.3.6.3 Teknik Penelusuran Desa/Lokasi (Transek)

Transek dipergunakan untuk mengamati secara langsung keadaan lingkungan dan sumber daya alam masyarakat. Transek adalah gambaran irisan muka bumi. Pada awalnya transek digunakan oleh para ahli lingkungan untuk mengenali “wilayah-wilayah ekologi” (pembagian wilayah lingkungan alam berdasarkan sifat khusus keadaannya) Transek adalah teknik PRA untuk melakukan pengamatan langsung lingkungan dan sumber daya masyarakat, dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati.

Hasil pengamatan dan lintasan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut. Transek ini dilakukan untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumberdaya alam dan permasalahannya. Informasi yang biasanya muncul antara lain:

- Bentuk dan keadaan permukaan alam (Topografi): termasuk kemiringan lahan, jenis tanah, daerah tangkapan air, sumber-sumber air

- Pemanfaatan sumberdaya tanah (Tataguna lahan): yaitu untuk wilayah permukiman, kebun, sawah, bangunan, jalan dsb
- Pemilikan sumberdaya alam: biasanya terdiri dari milik perorangan, milik adat, milik umum/desa/kelurahan, milik pemerintah.
- Transek juga bisa dilakukan untuk mengamati dan membahas topik-topik khusus, seperti pembuatan peta desa. Misalnya transek kesehatan dan kondisi lingkungan desa, transek sumber air serta irigasi, dsb

4.3.7 Metode Analisis dan Perencanaan Ruang

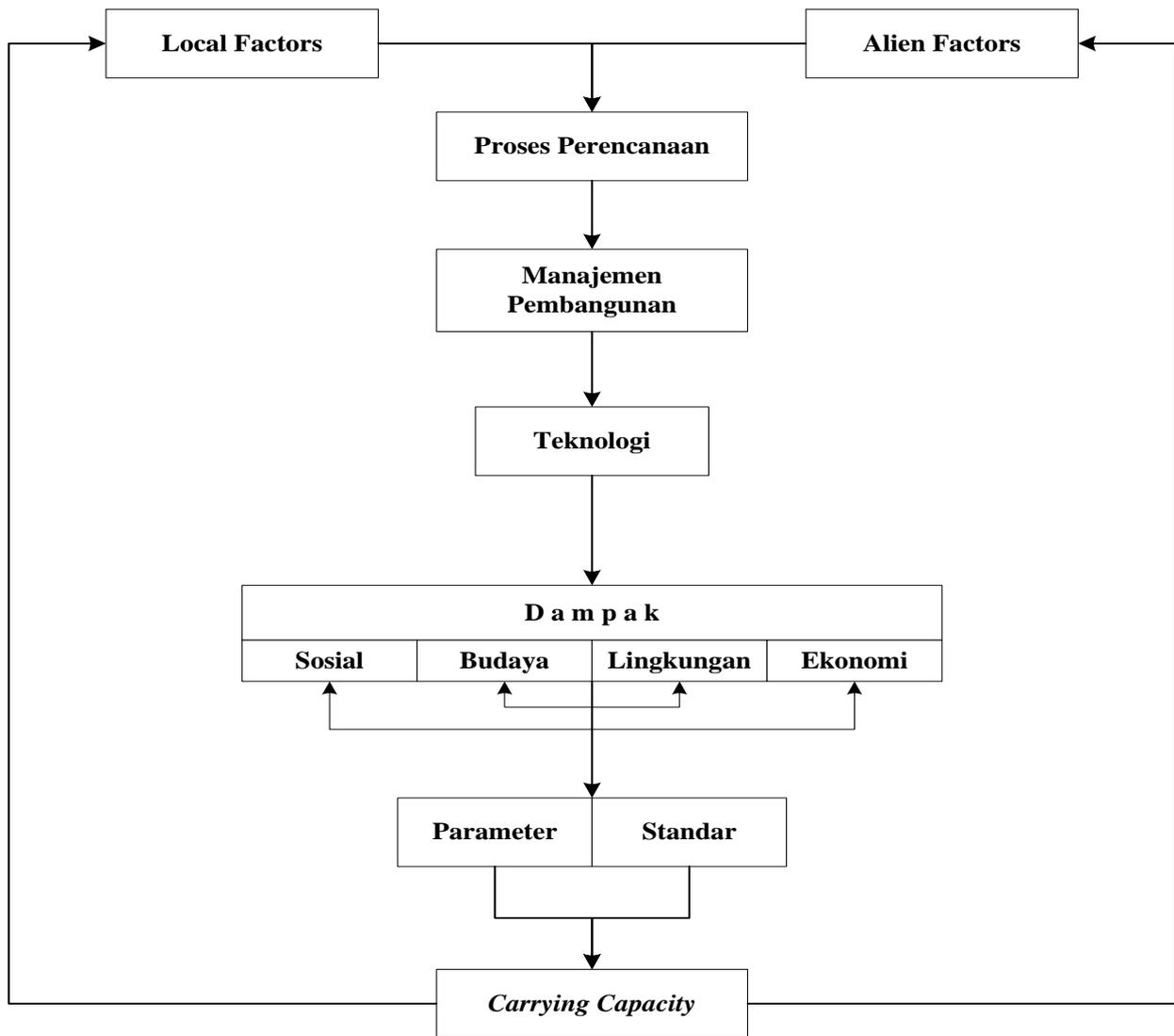
Berbagai metode analisis digunakan dalam pekerjaan ini untuk tahapan-tahapan pekerjaan terkait dengan analisis dan proses identifikasi guna menghasilkan masukan bagi kajian studi peraturan zonasi.

4.3.7.1 Analisis Daya Dukung (Carrying Capacity)

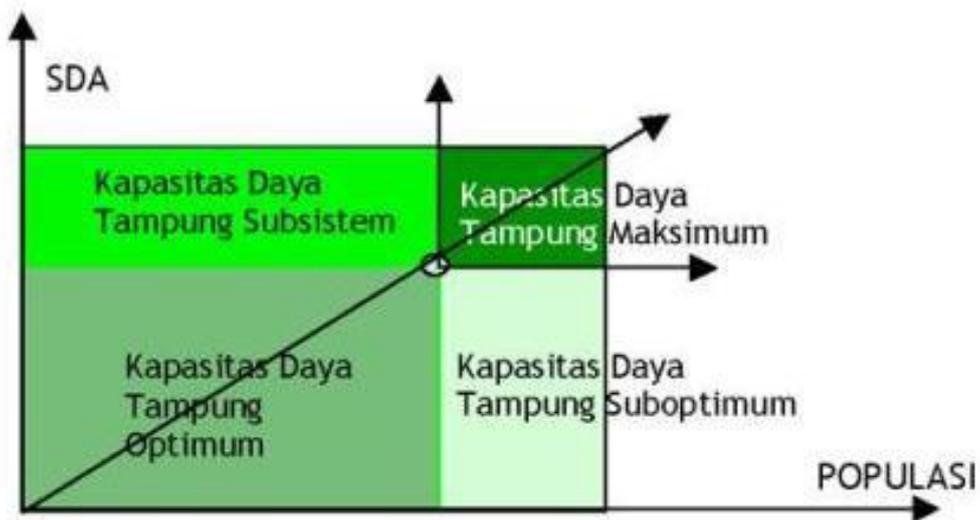
Daya dukung dapat diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik (mahluk hidup) yang terkandung di dalamnya, dengan juga memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam. Tidak ada satu angka mutlak yang dapat menunjukkan daya dukung ekosistem dalam menampung semua kegiatan manusia karena berbagai variabel yang menentukan besarnya daya dukung ekosistem tersebut sangat bervariasi dan selalu bergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Kemampuan daya dukung setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan kawasan industri secara spatial akan bermakna dan menjadi penting.

Secara umum ragam daya dukung bagi pengembangan suatu kegiatan, khususnya fungsi kegiatan kawasan industri, dapat meliputi:

- Daya dukung ekologis; yang merupakan tingkat maksimal penggunaan suatu wilayah.
- Daya dukung fisik; yang merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas.
- Daya dukung sosial; yang merupakan batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan yang akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan pengunjung.
- Daya dukung rekreasi; merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan.



Gambar 4.10 Carrying Capacity (Atherton 1991 dan Shelby 1984)



Gambar 4.11 Carrying Capacity Indicator

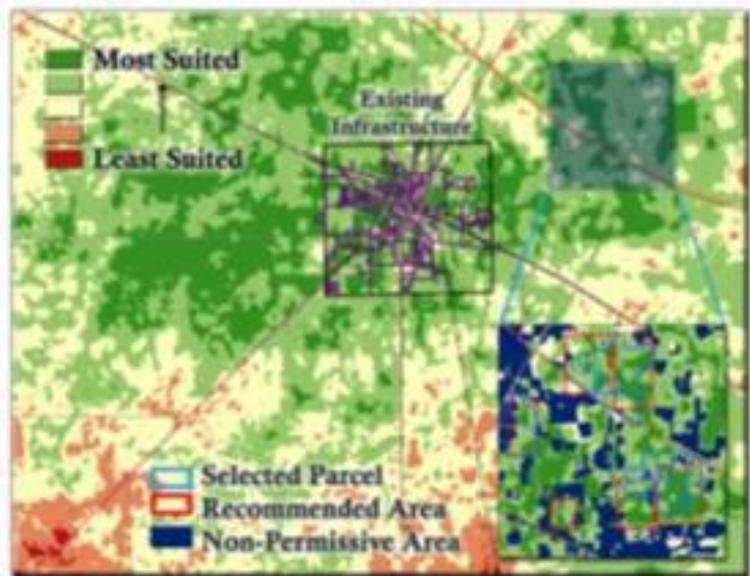
4.3.7.2 Metode Analisis Kesesuaian Ekologi dan SDA

Pada pendekatan ini akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Potensi Angin → Potensi angin dalam perencanaan meliputi arah dan kekuatan angin untuk mendapatkan udara yang sejuk dan mengurangi kelembaban.
- Binatang/Habitat → mengidentifikasi adanya habitat liar yang membahayakan pengembangan kawasan industri.
- Daerah Rawan Bencana → Perencanaan dan pengolahan daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana berdasarkan kondisi fisik maupun prasarana yang ada di wilayah perencanaan.
- Unit Visual dan Kapasitas Visual → Daerah yang berpotensi memiliki arah view yang bagus antara lain adalah daerah hijau hutan, daerah sepanjang aliran sungai.
- Area dengan Visibilitas Tinggi → Kawasan yang memiliki visibilitas tinggi adalah kawasan yang memungkinkan untuk terlihat dari berbagai sudut (*landmark* kawasan) dapat difungsikan untuk zona magnet pusat kawasan industri.
- Topografi → Dalam suatu perencanaan perlu diperhatikan bagaimana kondisi topografi eksisting wilayah tersebut, juga guna lahan dan karakter wilayahnya

4.3.7.3 Model Analisis Penggunaan Lahan

Metode analisis penggunaan lahan ini pada dasarnya merupakan analisis dasar dalam perencanaan sekaligus sebagai bagian yang paling penting di dalamnya. Dalam metode analisis penggunaan lahan ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu topografi, jumlah penduduk, biaya bangunan dan derajat pelayanan jaringan pengangkutan (Martin, B.dkk, 1996 dalam Warpani Suwardjoko, 1990). Dalam analisis penggunaan lahan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu klasifikasi lahan, overlay (pertampalan peta), dan daya hubung (akses).



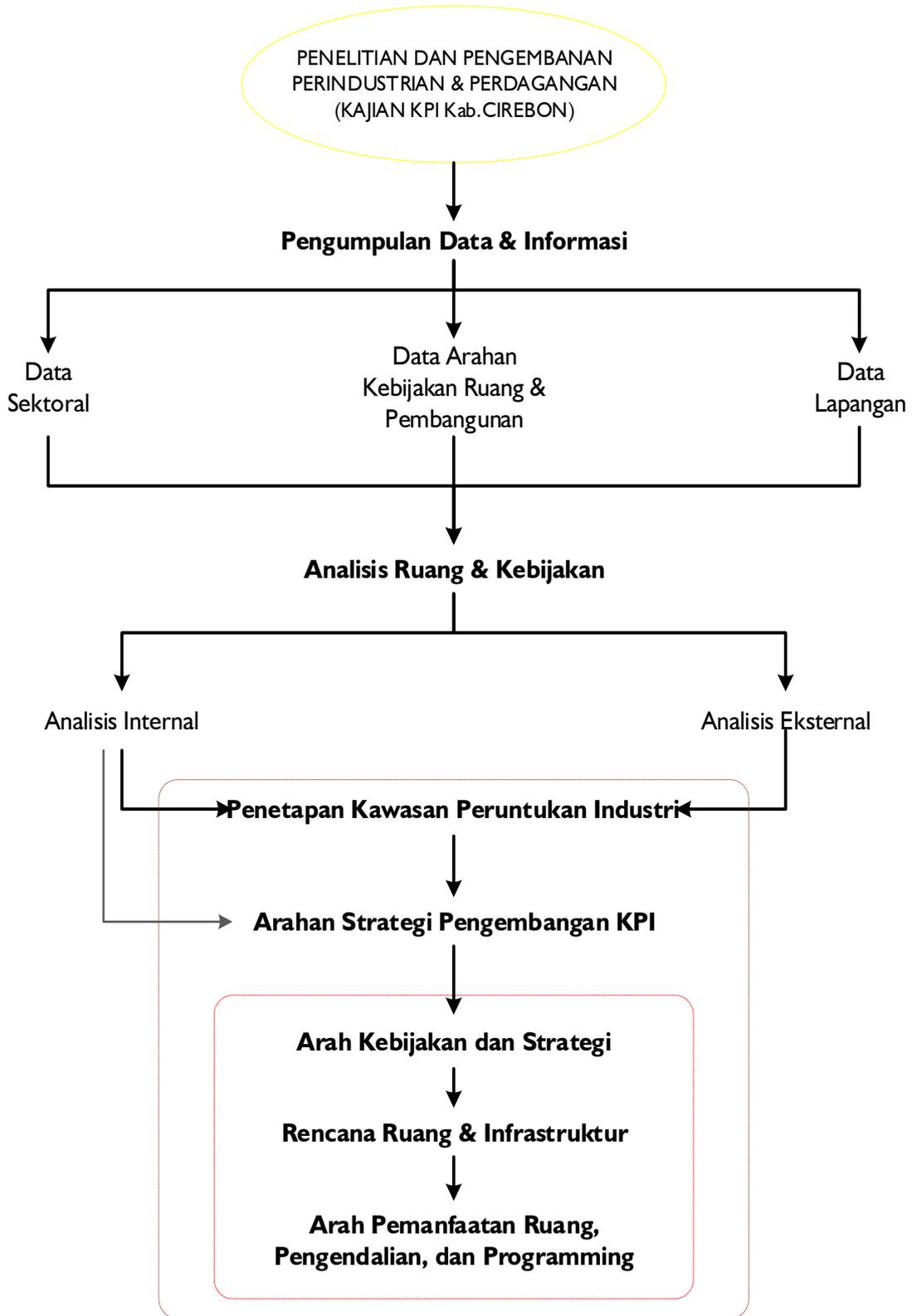
Model klasifikasi lahan ini pada dasarnya mengelompokkan lahan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu kriteria yang dikeluarkan oleh USDA (*The United States of Agricultural*) dimana mengelompokkan kemampuan lahan dalam tingkat kelas lahan menurut kemiringan lereng, yang hasilnya adalah kemampuan lahan khusus untuk pertanian. Penilaian kemiringan lereng dilakukan dengan pengelompokkan dari besar sudut lereng, berdasarkan rentang-rentang yang telah ditentukan. Pengelompokkan lahan ini menghasilkan 5 kelas lahan berdasarkan resiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertambah dengan semakin tingginya kelas.

4.3.7.4 Analisa Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan Fungsi Kawasan Industri

Analisa terhadap prasarana dan sarana pendukung fungsional kawasan industri yang akan dikembangkan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan menyangkut rumusan komponen penunjang kawasan dan elemen-elemen pembentuk kawasan industri. Kebutuhan komponen prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata perlu dipadukan dengan komponen penunjang kegiatan fungsional lainnya yang berhubungan dengan kegiatan fungsional di kawasan perencanaan.

Keterkaitan antar komponen perlu dilihat melalui pendekatan berikut:

- Standar kebutuhan komponen kegiatan, dengan pendekatan yang bersifat:
 - Deduktif atau *top-down*, berdasarkan pedoman mengenai standar kebutuhan suatu jenis komponen prasarana & sarana),
 - Induktif atau *bottom-up*, berdasarkan masukan dari stakeholder lokal mengenai kebutuhan-kebutuhan berkegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kegiatan fungsional yang akan dikembangkan, dengan pertimbangan aspek sosial (perilaku masyarakat), budaya (kebutuhan / keinginan warga), maupun ekonomi (kemampuan).
- Hubungan fungsional antar komponen kegiatan, mencakup kegiatan analisa dengan pertimbangan-pertimbangan keterkaitan antar komponen dari aspek:
 - Karakteristik kegiatan
 - Perilaku pengguna komponen
 - Teknologi yang tersedia dan dapat diserap
 - Peraturan / standar desain komponen.



Gambar 4.12 Tahapan Pengolahan Data dan Analisis dalam Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri



**LAPORAN PENDAHULUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

5

**PROGRAM KERJA DAN
MEKANISME PELAKSANAAN**



5.1 Rencana Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Program kerja memuat rencana kerja yang terdiri dari pentahapan dan pelaporan kegiatan. Program Kerja disusun sesuai dengan pertimbangan:

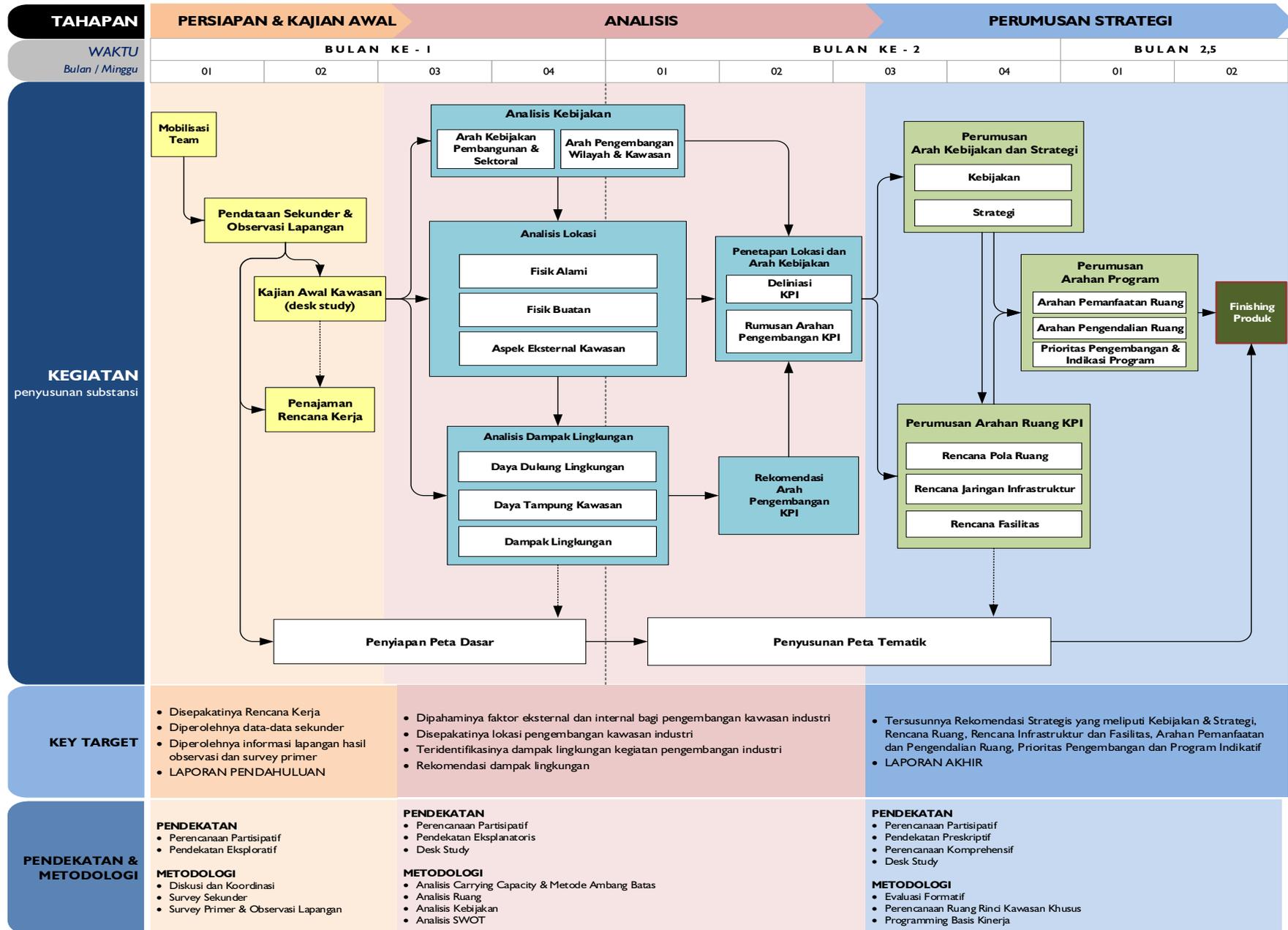
- Lingkup kegiatan dalam KAK
- Kerangka pikir studi
- Pendekatan dan Metodologi Kegiatan
- Waktu dan Keluaran dari Setiap Pentahapan Pekerjaan

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka program kerja yang disusun sinergis dengan metodologi dan pendekatan penanganan pekerjaan akan mengarahkan pada rencana pelaksanaan yang dibagi kedalam tiga tahapan utama pengerjaan, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan dan Kajian Awal
- (2) Tahap Analisis
- (3) Tahap Perumusan Rekomendasi Pengembangan KPI

Masing-masing tahapan pekerjaan tersebut memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan secara terstruktur dan adanya sasaran-sasaran antara (*milestones*) yang menjadi acuan bagi pencapaian kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di tahap berikut dari setiap pekerjaan.

Secara lebih jelas, program kerja yang terintegrasi dengan pendekatan dan metodologi pekerjaan dapat dicermati pada Bagan / Diagram Rencana Kerja dan Metodologi di halaman berikut ini, dilengkapi dengan uraian rencana kerja di halaman selanjutnya.



Gambar 5.1 Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

5.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan arahan KAK. Didalamnya termuat program kerja yang telah disesuaikan dengan kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, program kerja yang disusun sinergis dengan metodologi dan pendekatan penanganan pekerjaan akan mengarahkan pada rencana pelaksanaan yang dibagi kedalam tiga tahapan utama pengerjaan, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan dan Kajian Awal
- (2) Tahap Analisis
- (3) Tahap Perumusan Rekomendasi

Masing-masing tahapan pekerjaan tersebut memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan secara terstruktur dan adanya sasaran-sasaran antara (*milestones*) yang menjadi acuan bagi pencapaian kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di tahap berikut dari setiap pekerjaan.

Secara lebih jelas, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang terintegrasi dengan pendekatan dan metodologi pekerjaan serta Program Kerja yang telah disusun, dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Kajian KPI Kab.Cirebon)

No	Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				2,5	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	KEGIATAN KAJIAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)										
1	Tahap Persiapan & Kajian Awal										
	1. Inisiasi dan Persiapan Tim	X									
	a. Koordinasi Awal	X									
	b. Kajian Kebutuhan	X									
	2. Pengumpulan Data & Informasi	X	X								
	a. Data Sekunder	X	X								
	b. Observasi Lapangan	X	X								
	3. Kajian Awal Perencanaan	X	X								
	a. Kajian Kebijakan	X	X								
	b. Kajian NSPK Penyusunan KPI	X	X								
	c. Kajian Lokasi	X	X								
	4. Penajaman Rencana Kerja		X								
2	Tahap Analisis										
	1. Kajian Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang Kawasan			X	X	X	X				
	a. Arahan Pembangunan			X	X						
	b. Arahan Pemanfaatan Ruang			X	X	X					
	c. Kajian Studi terkait Pengembangan Industri			X	X	X	X				
	2. Analisis Internal Kawasan				X	X	X	X			
	3. Analisis Eksternal Kawasan				X	X	X	X			
	4. Analisis Dampak Lingkungan					X	X	X			
	5. Perumusan Rekomendasi Dampak Lingkungan						X	X			
	6. Perumusan Konsep Kebijakan dan Arahan Strategi Pengembangan KPI							X			



No	Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				2,5	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
3	Tahap Perumusan Rekomendasi										
	1. Perumusan Kebijakan dan Strategi							X	X	X	X
	a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan							X	X		
	b. Konsep Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan							X	X	X	
	2. Penyusunan Rekomendasi Spatial Kawasan							X	X	X	
	a. Rencana Pola Ruang							X	X		
	b. Rencana Jaringan Prasarana & Fasilitas							X	X		
	c. Arahan Prioritas Pengembangan								X	X	
	3. Penyusunan Arahan Pemanfaatan, Pengendalian, dan Program							X	X	X	
	a. Arahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang								X	X	
	b. Indikasi Program										X
	4. Finalisasi										X
B	PENYIAPAN PETA										
	1. Penyiapan Peta Dasar	X	X	X	X						
	2. Penyusunan Peta Tematik & Analisis					X	X	X	X	X	X
C	PELAPORAN & DELIVERABLES										
	1. Laporan Pendahuluan			X							
	2. Laporan Akhir									X	
	3. Softcopy Materi									X	

5.3 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan

5.3.1 Komposisi Tim dan Kualifikasi Tenaga Ahli

Mengacu pada rencana kerja yang telah disusun dan diuraikan pada bagian rencana kerja serta mempertimbangkan ketentuan dalam KAK, kegiatan **Penelitian Dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan** akan melibatkan beberapa orang keahlian, yang meliputi : 1 (satu) orang Team Leader, 2 (dua) orang tenaga ahli, 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli dan 3 (tiga) orang tenaga pendukung. Kebutuhan tenaga ahli dan kualifikasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Komposisi Tim dan Kualifikasi Tenaga Ahli

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli		
1. Ketua Tim	S1 Teknik Industri/Teknik Planologi/PWK/sarjana dari semua disiplin ilmu Pengalaman di bidang pengembangan perindustrian dan perdaganagn Minimal 4 tahun.	2,5 orang bulan
2. Ahli PWK	S1 Teknik Planologi/PWK pengalaman di bidang pengembangan perindustrian dan perdaganagn min. 2 tahun	2 orang bulan
3. Ahli Ekonomi	S1 Ekonomi pengalaman di bidang pengembangan perindustrian dan perdaganagn min. 2 tahun	1 orang bulan
Asisten Tenaga Ahli		
1. Asisten Ahli	Teknik Industri/Teknik Planologi/PWK/sarjana dari semua disiplin ilmu pengalaman di bidang pengembangan perindustrian dan perdaganagn min. 1 tahun.	2 orang bulan

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli		
Tenaga Pendukung		
1. Surveyor	SMA Sederajat	1 orang bulan
2. Operator Komputer	SMA Sederajat	2 orang bulan
3. Sekretaris	SMA Sederajat	2,5 orang bulan

5.3.2 Organisasi Pengelolaan Pekerjaan

Organisasi pengelolaan kerja pada kegiatan pada dasarnya menjelaskan garis hubungan kerja antara pemberi kerja (pengguna jasa) dengan pelaksana kerja (penyedia jasa). Kedua pihak tersebut dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan berada pada garis komando dan koordinasi yang jelas. Dalam upaya memudahkan koordinasi pelaksanaan pekerjaan kedua belah pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa (Konsultan) membentuk tim pelaksana. Pengguna jasa menunjuk pemimpin proyek dan membentuk satu tim teknis yang menangani pekerjaan ini. Begitu pula halnya dengan pihak Konsultan, dibentuk tim penyusun yang terdiri atas ketua tim, tenaga ahli, dan tenaga pendukung lainnya.



Dalam kegiatan **Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan**, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberi Tugas, dalam pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Penyusun kerangka acuan tugas dan spesifikasi teknis yang jelas sesuai dengan pekerjaan;
- Pemberi informasi yang diperlukan Tim Pekerjaan Konsultan;
- Pemberi informasi yang diperlukan Tim Pekerja Konsultan;
- Partner Konsultan dalam melakukan konsultasi, perundingan dan negoisasi yang bersifat administratif maupun teknis;
- Pemberi saran, usul dan kritik, terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan tim Konsultan apabila kurang sesuai dengan kebutuhan dan konsep yang telah ada sebelumnya.

Konsultan, berkewajiban sebagai berikut:

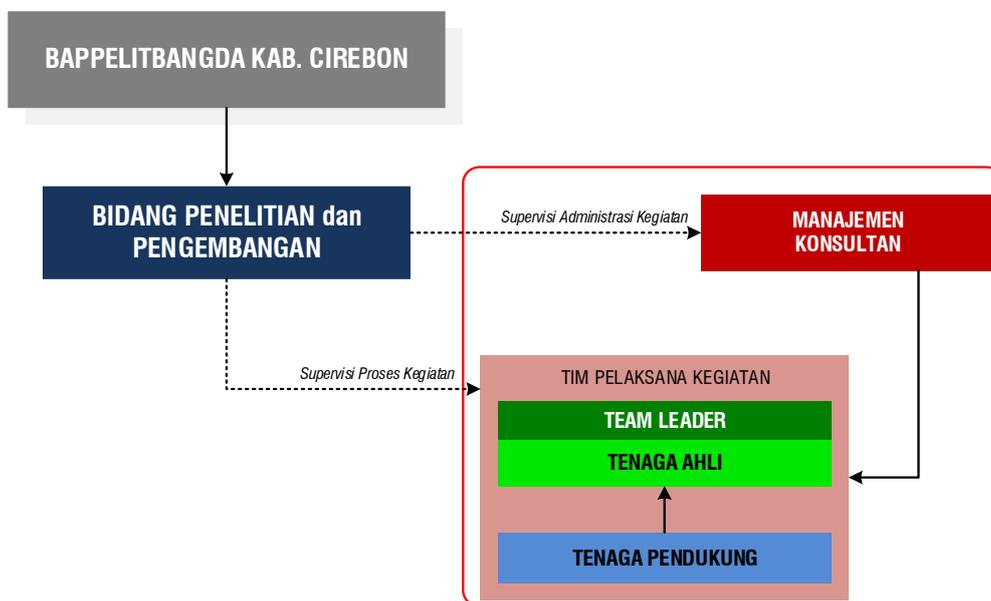
- Wajib mengikuti kebijakan/peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja;
- Wajib berkonsultasi kepada pemberi tugas atau tim teknis yang ditunjuk;
- Wajib menciptakan dan membina hubungan yang baik dengan instansi/organisasi berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tim Konsultan, terdiri dari Team Leader (TL), Tenaga ahli dan Tenaga Pendukung. Dalam struktur organisasi yang terbentuk, terdapat jalur koordinasi dan komando sebagai berikut:

- Tim Leader (TL) akan bekerja penuh mulai dari ditandatanganinya kontrak sampai berakhirnya kegiatan sesuai dengan kontrak. TL juga dibantu dengan manajemen konsultan yang bertanggung jawab terhadap pejabat pembuat komitmen beserta tim teknis yang dibentuknya dalam hal pelaksanaan pekerjaan;

- Dalam struktur organisasi Konsultan, TL juga bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pekerjaan kepada manajemen konsultan;
- Tim ahli yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan yang terkait bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya kepada TL dan bersama-sama dengan TL melakukan serangkaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati;
- Tenaga pendukung bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan studio dan pekerjaan kantor lainnya.

Organisasi pelaksanaan pekerjaan menggambarkan struktur organisasi tim dalam menangani pekerjaan. Organisasi pelaksanaan pekerjaan **Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan** dilakukan dengan dikoordinatori oleh seorang Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota selaku Team Leader, yang dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli. Team Tenaga Ahli juga didukung oleh keberadaan Tenaga Pendukung berupa Sekretaris / Administrasi dan Operator Komputer & Grafis.



Gambar 5.2 Organisasi Pengelolaan Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Selain menjelaskan distribusi kegiatan dalam tim pelaksana, organisasi pelaksanaan kegiatan ini juga menjelaskan rincian hubungan antara tim pelaksana dengan tim teknis dan pemangku kepentingan lainnya dalam tiap rincian kegiatan. Untuk memperkuat hasil yang dicapai dalam proses penyusunan, maka dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilengkapi dengan kegiatan dalam bentuk koordinasi, diskusi, dan pembahasan. Dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan ini juga melibatkan *stakeholder* lainnya, dimana perlu ada koordinasi dengan pihak ini untuk mendapatkan sumber informasi terbaru dan masukan bagi **Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan**.

5.3.3 Sistem Pelaporan

Seperti yang telah dijelaskan di dalam KAK, produk yang akan dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan, berisi tentang kerangka pikir dan metode serta rencana kerja dalam pelaksanaan. Laporan pendahuluan final diserahkan sebanyak 2 buku/eksemplar.



2. Laporan Antara, berisi tentang hasil analisis data dan keterkaitan antara program pembangunan industri dengan penetapan KPI dan realisasi pemanfaatan ruangnya di Kabupaten Cirebon, Teridentifikasi potensi dan permasalahan terkait pengembangan pemanfaatan lahan KPI yang masih tersedia. Laporan antara final diserahkan sebanyak 2 buku/eksemplar.
3. Laporan Akhir, berisi secara keseluruhan hasil kegiatan dan dilengkapi dengan rekomendasi. Laporan akhir final diserahkan sebanyak 2 buku/eksemplar.
4. Flashdisk hasil laporan sebanyak 1 buah.



KATA PENGANTAR



Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan diharapkan bisa menjadi masukan bagi proses revisi RTRW Kabupaten Cirebon terutama didalam pola ruang Kawasan Peruntukan Industri serta bisa diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon yang telah disusun sebelumnya.

Sesuai dengan lingkup kegiatan, salah satu produk dari kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan adalah buku laporan antara, yang terdiri dari muatan substansi sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kajian literatur dan peraturan perundangan tentang Kawasan Peruntukan Industri

Bab 3 Kajian kebijakan dan program pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan KPI Kabupaten Cirebon

Bab 4 Analisis perkembangan industri dan pemanfaatan ruang KPI Kabupaten Cirebon

Bab 5 Analisis potensi dan kebutuhan ruang bagi pengembangan KPI

Buku laporan antara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon. Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap kegiatan ini.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan	1-3
1.3 Ruang Lingkup	1-3
1.3.1 Lingkup Kegiatan	1-3
1.3.2 Lingkup Wilayah	1-4
1.4 Landasaan Hukum	1-6
1.5 Metodologi dan Rencana Kerja	1-6
1.5.1 Pendekatan dan Metodologi Pekerjaan	1-7
1.5.2 Rencana Kerja	1-8
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	1-10

BAB 2 KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

2.1 Pemahaman Dasar Kawasan Peruntukan Industri	2-2
2.1.1 Peristilahan Pokok dalam Perindustrian	2-2
2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah dalam Perindustrian	2-2
2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	2-4
2.3 Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terkait Pengembangan Sektor Industri di Daerah	2-5
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri	2-7

2.4.1	Pembangunan Kawasan Industri.....	2-7
2.4.2	Infrastruktur Kawasan Industri	2-8
2.5	Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri	2-8
2.6	Pengaruh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri	2-10
2.6.1	Urusan bidang Perindustrian dalam UUCK	2-10
2.6.2	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.....	2-12
2.6.3	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.....	2-12

BAB 3 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON

3.1	Kajian Program Pembangunan Industri terkait Penetapan KPI.....	3-2
3.1.1	Program Pembangunan Industri Nasional.....	3-2
3.1.2	Program Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat	3-6
3.1.3	Program Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon.....	3-7
3.1.3.1	Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon	3-8
3.1.3.2	Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota/Kabupaten.....	3-8
3.1.3.3	Pengembangan Perwilayahan Industri	3-11
3.1.3.4	Pembangunan Sumber Daya Industri	3-15
3.1.3.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3-17
3.1.3.6	Pemberdayaan Industri	3-18
3.2	Kajian Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang terkait KPI Kabupaten Cirebon.....	3-20
3.2.1	Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan 2021.....	3-20
3.2.2	Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Kawasan Rebana	3-25
3.2.2.1	Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Wilayah Ciayumajakuning	3-25
3.2.2.2	Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana.....	3-29
3.2.3	KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon.....	3-33
3.2.3.1	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang.....	3-33
3.2.3.2	Rencana Struktur Ruang	3-35
3.2.3.3	Rencana Pola Ruang.....	3-39

BAB 4 ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON

4.1	Gambaran Umum Wilayah Studi.....	4-2
4.1.1	Letak Geografis dan Administrasi	4-2
4.1.2	Kondisi Topografi	4-3
4.1.3	Kondisi Morfologi Wilayah	4-5
4.1.4	Kondisi Hidrologi	4-11
4.1.5	Kondisi Air Tanah.....	4-13
4.1.6	Potensi Bencana Alam	4-16
4.2	Kondisi Kependudukan	4-20
4.2.1	Jumlah Penduduk	4-20

4.2.2	Kepadatan Penduduk	4-20
4.2.3	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan.....	4-24
4.3	Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB	4-25
4.3.1	Kondisi Sektor Industri	4-25
4.3.2	Sumber Daya Industri.....	4-26
4.3.2.1	Sumber Daya Alam	4-26
4.3.2.2	Sumber Daya Perhutanan	4-30
4.3.2.3	Sumber Daya Air	4-30
4.3.2.4	Sumber Daya Manusia.....	4-34
4.3.2.5	Aspek Penguasaan Teknologi.....	4-38
4.3.2.6	Aspek Keuangan	4-40
4.3.3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.....	4-42
4.3.4	Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri.....	4-43
4.3.4.1	Kondisi Jaringan Listrik.....	4-43
4.3.4.2	Kondisi Jaringan Air Minum	4-44
4.3.4.3	Kondisi Jaringan Air Limbah.....	4-45
4.3.4.4	Kondisi Jaringan Drainase	4-45
4.3.4.5	Kondisi Sistem Persampahan	4-45
4.4	Perkembangan Pemanfaatan Ruang KPI di Kabupaten Cirebon	4-46
4.4.1	Kecenderungan Perkembangan Kegiatan Industri	4-46
4.4.1.1	Industri Pengolahan Ikan	4-46
4.4.1.2	Industri garam	4-47
4.4.1.3	Industri Bahan Galian Non Logam.....	4-47
4.4.1.4	Industri Rotan	4-48
4.4.1.5	Industri Pakan Ternak	4-48
4.4.1.6	Industri Tekstil.....	4-49
4.4.1.7	Industri Perawatan Kapal	4-49
4.4.1.8	Sentra Industri Kecil dan Menengah	4-49
4.4.2	Penggunaan Lahan Eksisting untuk Kegiatan Industri	4-50
4.4.3	Isu Perkembangan Lahan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon.....	4-54

BAB 5 ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI

5.1	Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan Eksisting.....	5-2
5.1.1	Simpangan Pola Ruang	5-3
5.1.2	Kompatabilitas dan Kesesuaian Pola Ruang.....	5-10
5.2	Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	5-14
5.2.1	Pendekatan Jasa Ekosistem dalam Analisis DDL	5-14
5.2.2	Hasil Analisis DDL Pembangunan KPI dalam Pendekatan Jasa Ekosistem Lingkungan.....	5-16
5.3	Catatan Progres Kegiatan.....	5-31
5.3.1	Catatan terkait Hasil Kajian Kebijakan Internal Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon	5-31
5.3.2	Catatan terkait Hasil Kajian Kebijakan Regional yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	5-31
5.3.3	Potensi Pengembangan KPI terkait Kebijakan Sektor Industri, Kebijakan Regional, dan Daya Saing Wilayah Kabupaten Cirebon	5-32
5.3.4	Kebutuhan Tindak Lanjut Kegiatan	5-32

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	1-4
Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri.....	2-5
Tabel 2.2	Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri.....	2-15
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035.....	3-4
Tabel 3.2	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)	3-4
Tabel 3.3	Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI.....	3-5
Tabel 3.4	Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi di Wilayah Kabupaten Cirebon	3-7
Tabel 3.5	Program Sektorl Pengembangan Industri Fokus	3-9
Tabel 3.6	Industri yang Didorong per Koridor	3-12
Tabel 3.7	Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	3-12
Tabel 3.8	Program Pengembangan Sentra IKM.....	3-15
Tabel 3.9	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	3-15
Tabel 3.10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri.....	3-17
Tabel 3.11	Program Pemberdayaan Industri.....	3-18
Tabel 3.12	Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.....	3-19
Tabel 3.13	Arahan Fungsi Kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster Industri di Kawasan Cirebon – Patimban – Kertajati.....	3-22
Tabel 3.14	Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi	3-23
Tabel 3.15	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah.....	3-26
Tabel 3.16	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Wilayah	3-27
Tabel 3.17	Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon	3-36
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	4-2
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah.....	4-3
Tabel 4.3	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	4-4

Tabel 4.4	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan	4-6
Tabel 4.5	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon.....	4-12
Tabel 4.6	Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon	4-13
Tabel 4.7	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon.....	4-16
Tabel 4.8	Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.....	4-17
Tabel 4.9	Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon	4-18
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019.....	4-21
Tabel 4.11	Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019	4-22
Tabel 4.12	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon.....	4-24
Tabel 4.13	Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	4-25
Tabel 4.14	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	4-26
Tabel 4.15	Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon.....	4-26
Tabel 4.16	Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Ruminansia) Kabupaten Cirebon.....	4-28
Tabel 4.17	Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Unggas) Kabupaten Cirebon	4-28
Tabel 4.18	Data Statistika Terkait Industri Pertambangan Non-Logam (Batu Alam).....	4-30
Tabel 4.19	Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon.....	4-34
Tabel 4.20	Rincian Kependudukan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon (2012-2017)	4-34
Tabel 4.21	Data Institusi Kependidikan Kabupaten Cirebon.....	4-38
Tabel 4.22	Universitas dan Sekolah Tinggi di Kabupaten Cirebon.....	4-39
Tabel 4.23	Balai Penelitian Pemerintah di Provinsi Jawa Barat	4-40
Tabel 4.24	Rincian Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon	4-41
Tabel 4.25	Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Cirebon (Proyeksi)	4-41
Tabel 4.26	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah).....	4-42
Tabel 4.27	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah).....	4-43
Tabel 4.28	Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-43
Tabel 4.29	Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....	4-44
Tabel 4.30	Sentra IKM Kab. Cirebon	4-49
Tabel 4.31	Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020	4-51
Tabel 5.1	Luas Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 Menurut Wilayah Kecamatan.....	5-3
Tabel 5.2	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020	5-4
Tabel 5.3	Simpangan Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdsarkan Wilayah Kecamatan	5-5
Tabel 5.4	Kompatabilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI.....	5-10

Tabel 5.5	Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI.....	5-12
Tabel 5.6	Sistem Klasifikasi Jasa Ekosistem.....	5-15
Tabel 5.7	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Air Bersih	5-17
Tabel 5.8	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pangan.....	5-19
Tabel 5.9	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan, Pengolahan, dan Penguraian Limbah	5-21
Tabel 5.10	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir	5-23
Tabel 5.11	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata	5-25
Tabel 5.12	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Jasa Ekosistem dengan Luasan Dominan di Kabupaten Cirebon.....	5-30
Tabel 5.13	Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Cirebon dengan Daerah Lain dan Regional Jawa Barat, 2019.....	5-32

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon	1-5
Gambar 1.2	Penjabaran Sasaran Pekerjaan sebagai Kerangka Pikir Studi yang Memperlihatkan Kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan	1-7
Gambar 1.3	Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1-9
Gambar 2.1	Ilustrasi Kawasan Peruntukan Industri	2-2
Gambar 2.2	Pola Pikir Perwilayahan Industri	2-3
Gambar 2.2	Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri	2-4
Gambar 3.1	Kedudukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dalam Skema Pembangunan Industri Nasional	3-2
Gambar 3.2	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)	3-3
Gambar 3.3	Peta Arahan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan Dokumen RPIK	3-14
Gambar 3.4	Infrastruktur Strategis Pendorong Perkembangan Kawasan Timur Jawa Barat	3-20
Gambar 3.5	Rencana Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Cirebon	3-21
Gambar 3.6	Arah Pengembangan Wilayah Metropolitan Cirebon	3-25
Gambar 3.7	Pengembangan Peran Wilayah Timur Jawa Barat	3-26
Gambar 3.8	Peta Arahan KPI Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat	3-28
Gambar 3.9	Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana	3-29
Gambar 3.10	Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan Rebana	3-30
Gambar 3.11	Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA	3-30
Gambar 3.12	Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Rebana	3-32
Gambar 3.13	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon	3-38
Gambar 3.14	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon	3-40
Gambar 3.15	Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon	3-41
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	4-7
Gambar 4.2	Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon	4-8
Gambar 4.3	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon	4-9
Gambar 4.4	Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon	4-10
Gambar 4.5	Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon	4-14
Gambar 4.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon	4-15
Gambar 4.7	Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon	4-19

Gambar 4.8	Peta Jumlah Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-27
Gambar 4.9	Peta Jumlah Pohon Mangga per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-27
Gambar 4.10	Persebaran Domba dan Kambing per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-29
Gambar 4.11	Persebaran Ayam Buras per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015	4-29
Gambar 4.12	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Cirebon	4-31
Gambar 4.13	Peta Kondisi Air Tanah di Kabupaten Cirebon.....	4-31
Gambar 4.14	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah di Zona Mundu	4-32
Gambar 4.15	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Arjawinangun	4-33
Gambar 4.16	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Plumbon.....	4-33
Gambar 4.17	Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016).....	4-36
Gambar 4.18	Capaian Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)	4-36
Gambar 4.19	Capaian Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016).....	4-37
Gambar 4.20	Capaian Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016).....	4-37
Gambar 4.21	Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (2010-2014)	4-38
Gambar 4.22	Capaian Rasio Guru Terhadap Murid (2010-2014)	4-38
Gambar 4.23	Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020	4-50
Gambar 4.24	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2020	4-52
Gambar 4.25	Peta Penmanfaatan Lahan untuk Kegiatan Industri di Kabupaten Cirebon, 2021	4-53
Gambar 4.26	Sejumlah Kegiatan Industri yang Berkembang pada wilayah KPI dan sekitarnya di salah satu Wilayah Sampel bagian Utara Kabupaten Cirebon.....	4-54
Gambar 5.1	Peta Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	5-11
Gambar 5.2	Peta Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	5-13
Gambar 5.3	Prinsip Jasa Ekosistem dalam Memberi Keuntungan pada Manusia dan Risiko Eksploitasinya (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)	5-14
Gambar 5.4	Klasifikasi Jasa Ekosistem bagi Kehidupan Manusia (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005).....	5-15
Gambar 5.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di KPI Kabupaten Cirebon	5-18
Gambar 5.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di KPI Kabupaten Cirebon	5-20
Gambar 5.7	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-22
Gambar 5.8	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-24
Gambar 5.9	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-26



**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, Kabupaten Cirebon, yang termasuk Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning sebagai gerbang timur Jawa Barat, diarahkan dengan fokus pengembangan pada sektor industri. Di WP Ciayumajakuning, Kabupaten dan Kota Cirebon memiliki peran sebagai Pusat Kawasan Nasional (PKN), untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sementara pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), wilayah Cirebon dan sekitarnya masuk sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) bersama-sama dengan Indramayu dan Majalengka, yang akan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi pada Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Jawa. Pada WPPI tersebut, Kabupaten Cirebon dan Kertajati aerocity akan menjadi zona pertumbuhan industri.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon selama ini mempunyai beberapa produk unggulan sesuai dengan Kompetensi Inti Industri Daerah, antara lain mebel dan kerajinan rotan, mebel dan kerajinan kayu, konveksi, batu alam, dan batik. Industri mebel dan kerajinan rotan selama ini menjadi primadona, dan masih tetap akan menjadi produk unggulan fokus di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur akan mampu membuka peluang yang besar bagi jenis-jenis industri lain pada masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPIK merupakan perencanaan pembangunan industri di tingkat kabupaten/kota, yang disusun dengan memperhatikan berbagai hal, antara lain rencana pembangunan industri di tingkat provinsi dan nasional, RPJPD, RTRW, potensi sumber daya industri daerah, daya dukung lingkungan, serta proyeksi penyerapan tenaga kerja dan lahan industri.

Di dalam strategi dan program pembangunan industri di Kabupaten Cirebon, dimaksudkan untuk mengintegrasikan pendekatan dan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif. Program-program indikatif tersebut diantaranya adalah program pengembangan industri unggulan, program pengembangan perwilayahan industri yang meliputi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, selanjutnya program pembangunan sumber daya industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri serta program pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) luasnya berkisar pada 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang terdiri atas KPI menengah dan besar; KPI kecil dan mikro, KPI Agro, dan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah industri dan wilayah-wilayah lain dalam suatu daerah yang dapat menyangkut kepentingan industri, maka Perda RTRW juga sudah menentukan berbagai daerah sebagai Kawasan Peruntukan dengan luas yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan peruntukannya.

Dalam perjalanannya, Perda RTRW Kabupaten Cirebon ini mengalami proses evaluasi karena adanya sejumlah perkembangan yang diakibatkan oleh dinamika pembangunan maupun arah kebijakan nasional maupun regional yang semakin mempengaruhi arah pemanfaatan ruang di wilayah

Kabupaten Cirebon. Dari sektor perindustrian sendiri terdapat perkembangan yang terjadi seiring dengan pemberlakuan peraturan/perundangan baru yang dilandasi semangat investasi sebagaimana Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta sejumlah turunannya yang sedang disiapkan hingga saat ini. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda Kabupaten Cirebon merasa perlu diadakannya upaya kajian terhadap alokasi KPI di Kabupaten Cirebon sesuai dengan amanah dari RIPK Kabupaten Cirebon yang telah disusun, dikaitkan dengan dinamika perkembangan kebijakan yang terjadi baik dari aspek tata ruang maupun aspek sektoral, sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian penetapan Kawasan Peruntukan Industri yang dapat menjadi masukan bagi arah perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon.

1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk memperoleh informasi dan materi bagi perumusan kebijakan dan informasi mengenai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Teridentifikasinya keterkaitan antara program pembangunan industri dengan penetapan KPI dan realisasi pemanfaatan ruangnya di Kabupaten Cirebon;
- b. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan terkait pengembangan pemanfaatan lahan KPI yang masih tersedia;
- c. Terrumuskannya arahan strategis bagi upaya penetapan KPI yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Cirebon.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pada pekerjaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini, secara sinergis antara kegiatan diskusi dan penyusunan substansi, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- A. Rapat Koordinasi Pengembangan Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- B. Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon):
 1. Persiapan / perumusan instrumen penelitian
 2. Pengumpulan data
 3. Analisis dan Pembahasan
 4. Penyusunan Laporan

Adapun lingkup substansi yang akan dikembangkan didalam penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi kondisi eksisting dan potensi KPI yang tersedia di Kabupaten Cirebon;
2. Analisis kesesuaian arah kebijakan / program pembangunan industri dengan lokasi dan potensi KPI yang ada;
3. Analisis kebutuhan penyesuaian penetapan KPI berdasarkan arah kebijakan dan dinamika pembangunan;
4. Perumusan rekomendasi kebijakan pembentukan kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Cirebon

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan berada di Kabupaten Cirebon. Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6° 30' 58" - 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" - 108° 50' 03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 990,36 km² (99.036 Ha), yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 km² (54 km x 1,85 km).

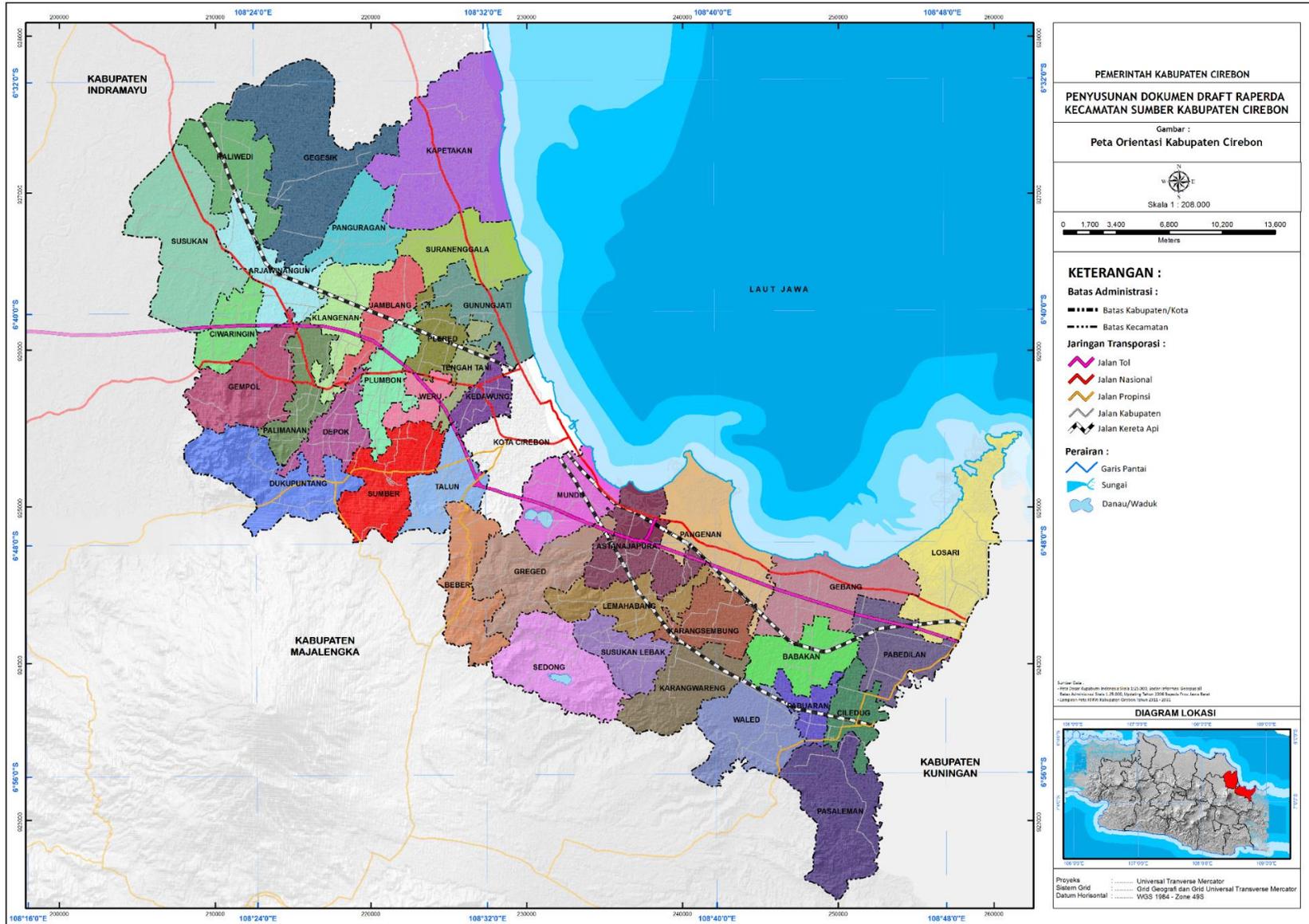
Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Pangenan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon



1.4 Landasaan Hukum

Rujukan/dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah 8 tahun 2018 mengenai Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.

1.5 Metodologi dan Rencana Kerja

Metodologi dan rencana kerja memuat rencana tahapan pelaksanaan yang dirinci kedalam lingkup pada setiap tahapan kegiatan dan didistribusikan kedalam kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Program Kerja disusun sesuai dengan pertimbangan:

- Lingkup kegiatan dalam KAK
- Kerangka pikir studi
- Pendekatan dan Metodologi Kegiatan
- Waktu dan Keluaran dari Setiap Pentahapan Pekerjaan

Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, terdapat tiga hal yang menjadi lingkup kebutuhan berkaitan dengan sasaran pekerjaan yang menjadi dasar pemikiran kebutuhan pekerjaan, yaitu:

1. Upaya untuk mengidentifikasi program pembangunan industri dan penetapan ruang KPI serta realisasi pemanfaatannya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebutuhan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon dan rekomendasi terkait lainnya.
2. Upaya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait pengembangan KPI maupun kebutuhan pemanfaatan lahan KPI, serta
3. Perumusan rekomendasi yang memuat arahan strategis dalam penetapan dan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon.

Kerangka pikir di atas dijabarkan kedalam penggambaran konseptual studi sebagaimana matriks berikut:



Gambar 1.2 Penjabaran Sasaran Pekerjaan sebagai Kerangka Pikir Studi yang Memperlihatkan Kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan

1.5.1 Pendekatan dan Metodologi Pekerjaan

Beberapa pendekatan disusun berdasarkan karakteristik kegiatan dan kebutuhannya. Pendekatan-pendekatan teknis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan, dimana kerangka strategi pelaksanaan yang dijabarkan dalam metodologi teknis dan rencana kerja selanjutnya akan mengacu pada kerangka pikir dan pendekatan pekerjaan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat berbagai kegiatan yang memerlukan penanganan berbeda, sesuai dengan karakteristik kegiatan dan sasaran antara (*milestone*) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pendekatan umum yang akan digunakan dalam penanganan pekerjaan ini dikelompokkan kedalam karakteristik kebutuhan penanganan kegiatan, yaitu:

- Pendekatan terhadap kegiatan pengumpulan data & informasi, dilakukan dengan pendekatan Eksploratif yang bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna perumusan konsep penanganan.

Adapun metode eksplorasi disesuaikan dengan kebutuhan, yang terdiri atas:

- Eksplorasi data dan informasi dalam proses Pengumpulan Data & Informasi
- Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dengan metode studi dokumenter dan metode kualitatif dengan mensintesa pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan kawasan industri yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan.
- Metode preskriptif dalam perumusan kebutuhan pengembangan kawasan, yang dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan.. Dengan metode preskriptif ini, studi tidak hanya terfokus pada analisa kondisi

eksisting, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi pemanfaatan suatu konsepsi penanganan atau kebijakan.

- Pendekatan terhadap kegiatan identifikasi dan analisis / kajian materi & permasalahan serta kebutuhan penanganan yang menjadi rekomendasi studi. Pendekatan ini dilakukan melalui:
 - Pendekatan kesesuaian ekologis, dengan metode analisis daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem. Dalam metode ini, semakin tinggi nilai jasa ekosistem akan menyebabkan semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape based proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - Pendekatan sintesa dan perumusan konsep rekomendasi melalui metode *incremental-strategis* yang memiliki karakteristik pendekatan dengan metode ini antara lain:
 - Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata.
 - Bersifat jangka pendek dan menengah
 - Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategis
 - Mempertimbangkan eksternalitas
 - Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat *incremental-strategis*.

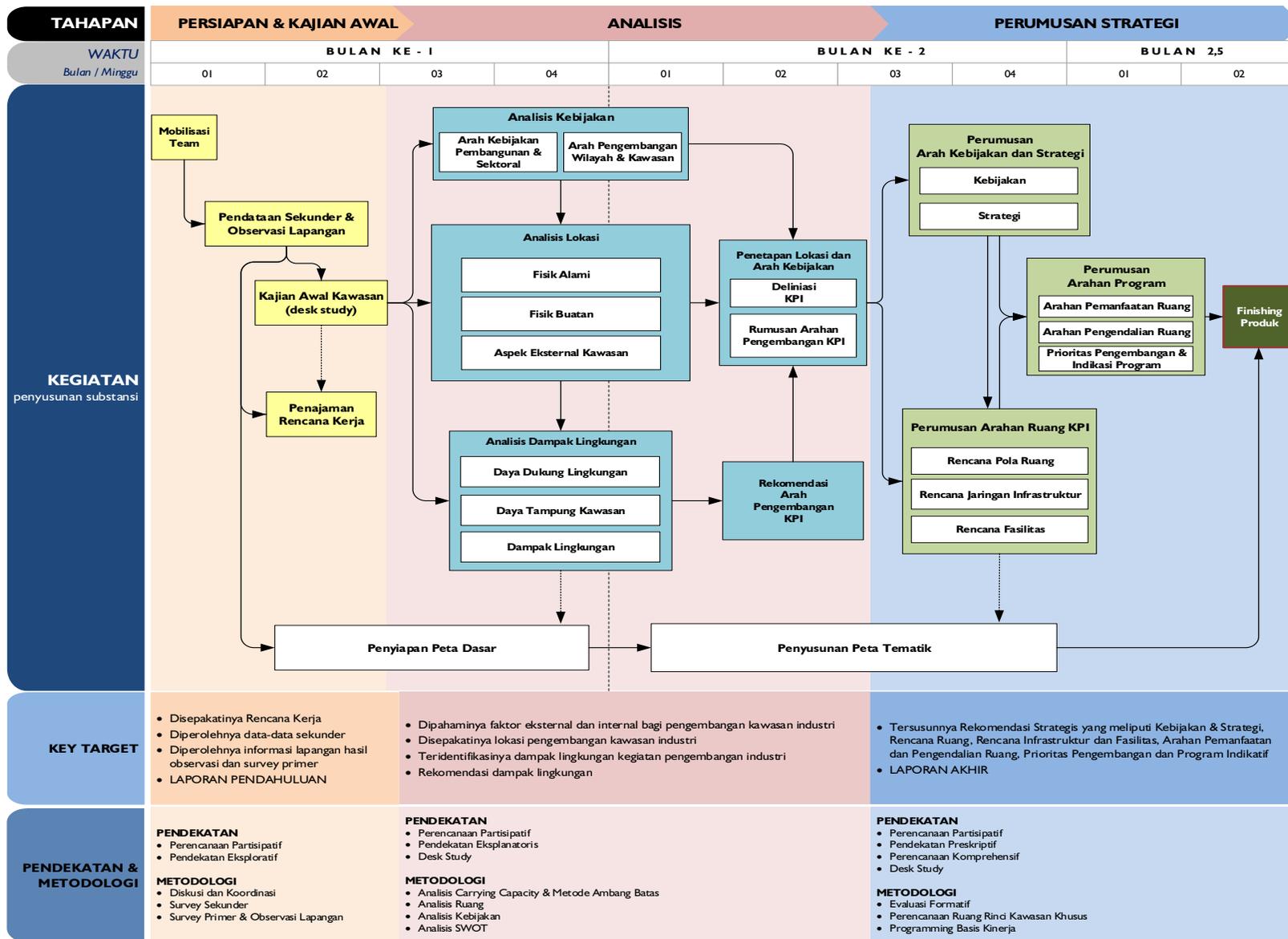
1.5.2 Rencana Kerja

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka program kerja yang disusun sinergis dengan metodologi dan pendekatan penanganan pekerjaan akan mengarahkan pada rencana pelaksanaan yang dibagi kedalam tiga tahapan utama pengerjaan, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan dan Kajian Awal
- (2) Tahap Analisis
- (3) Tahap Perumusan Rekomendasi Pengembangan KPI

Masing-masing tahapan pekerjaan tersebut memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan secara terstruktur dan adanya sasaran-sasaran antara (*milestones*) yang menjadi acuan bagi pencapaian kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di tahap berikut dari setiap pekerjaan.

Secara lebih jelas, program kerja yang terintegrasi dengan pendekatan dan metodologi pekerjaan dapat dicermati pada Bagan / Diagram Rencana Kerja dan Metodologi di halaman berikut ini.



Gambar 1.3 Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Antara kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang memuat hasil pendataan dan analisis yang dilakukan sebagai bentuk progres kegiatan. Sistematika sebagaimana dimaksud secara berurutan dijelaskan sebagai berikut.

01 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai penjelasan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari atas penjelasan mengenai : latar belakang pelaksanaan kegiatan; tujuan, dan sasaran pekerjaan; ruang lingkup pekerjaan; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan.

02 KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kajian literatur dan perundangan yang terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri, diantaranya : Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri, nomenklatur dan arahan yang terkait dengan pengembangan sektor industri, serta dinamika perkembangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang berpengaruh terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri.

03 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON

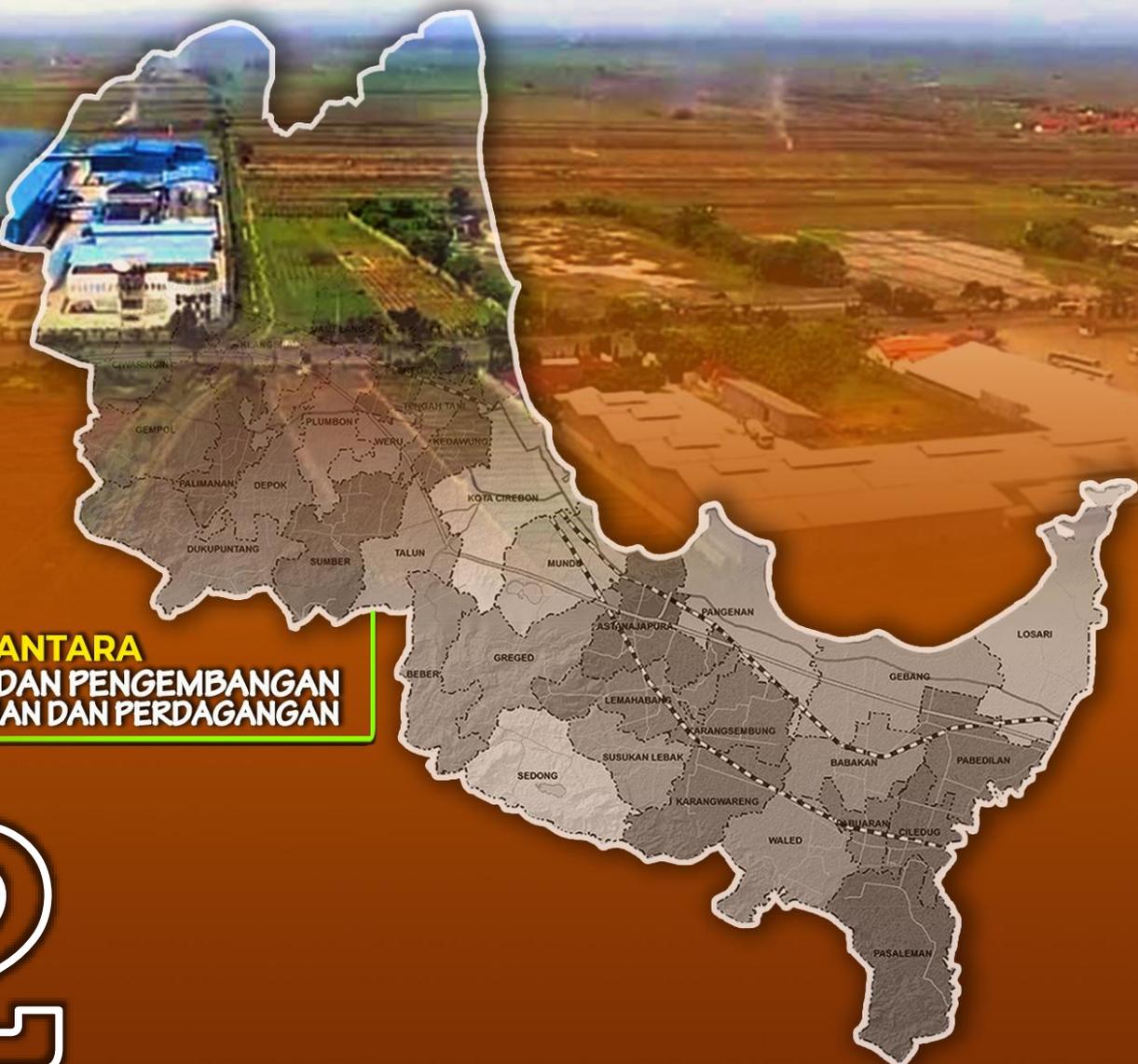
Bab ini berisikan amanat-amanat kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon serta program-program pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan KPI di Kabupaten Cirebon, baik itu di tingkat Nasional, regional (Provinsi Jawa Barat), maupun kebijakan dan program di tingkat Kabupaten Cirebon.

04 ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisikan mengenai hasil kajian terhadap Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB serta kecenderungan perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon

05 ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI

Bab ini berisikan penjelasan hasil kajian mengenai : (1) Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan eksisting, dan (2) Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.



**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

2

KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

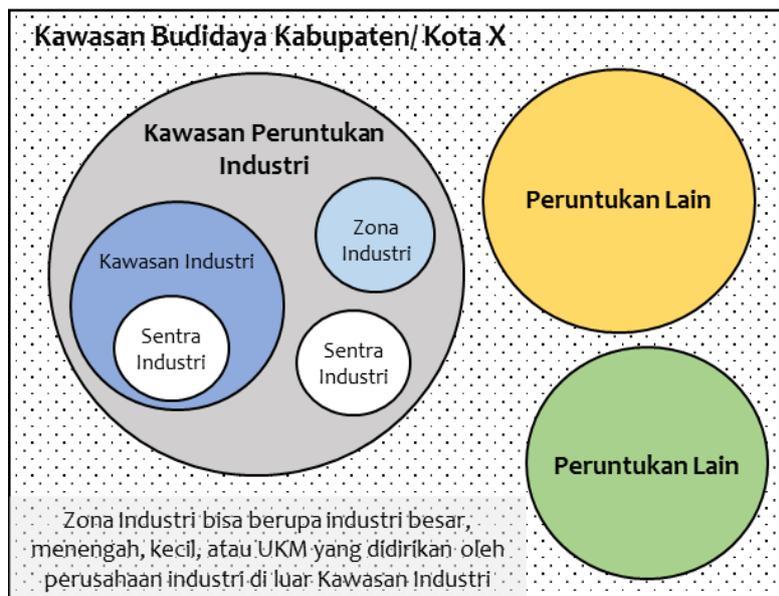


2.1 Pemahaman Dasar Kawasan Peruntukan Industri

2.1.1 Peristilahan Pokok dalam Perindustrian

Dalam memahami Kawasan Peruntukan Industri (KPI), perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu sejumlah peristilahan dan pengertian nomenklatur yang digunakan dalam bidang perindustrian. Beberapa istilah pokok yang akan sering ditemui dalam studi ini antara lain:

- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah, melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat, serta ditetapkan dengan deliniasi atau batas yang tidak terkait dengan batas secara administratif.



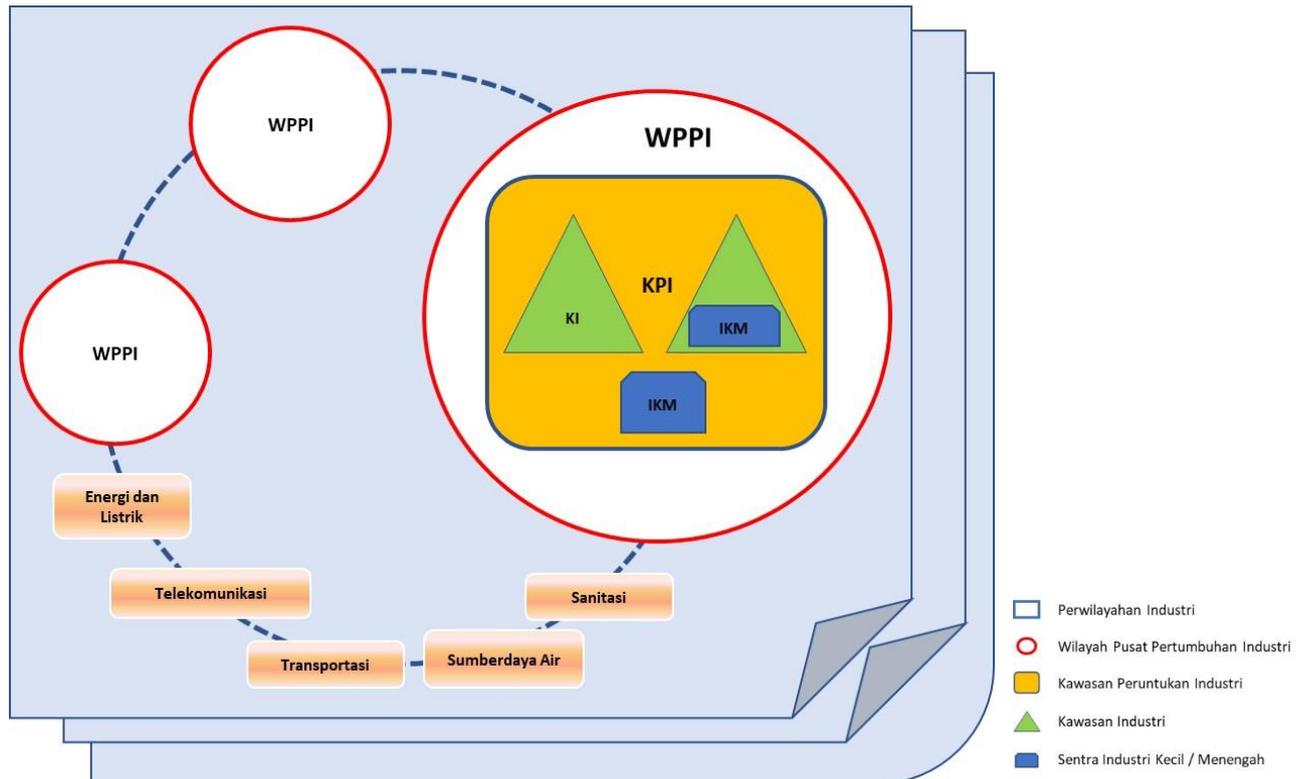
Gambar 2.1 Ilustrasi Kawasan Peruntukan Industri

2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah dalam Perindustrian

Bagi suatu wilayah, industri memiliki peran vital dan strategis bagi peningkatan ekonomi. Keberadaan industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang pada akhirnya mendorong pencapaian tujuan nasional berupa kesejahteraan masyarakat. Karenanya, sangat penting untuk mengelola industri agar bisa menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan 22 wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) yang mencakup 21 provinsi dan 86 kabupaten/kota. Penetapan tersebut didasari beberapa faktor yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan WPPI ini berbasis pada pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah, penguatan infrastruktur industri, dan

konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitar. Penetapan wilayah pengembangan industri juga sejalan dengan amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melakukan percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Salah satu kriteria dalam penetapan suatu daerah menjadi WPPI adalah keberadaan potensi sumber daya alam, sehingga masing-masing WPPI memiliki industri prioritas yang akan dikembangkan. Pemahaman mengenai pola pikir perwilayahan dalam sektor industri dapat dipahami dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Pola Pikir Perwilayahan Industri

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami adanya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dapat terdiri dari sejumlah zona kegiatan industri serta Kawasan Industri yang memiliki pengelolaan tersendiri. Perlu ditekankan bahwa industri berbeda dari kawasan industri. Kawasan industri dibentuk dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan barang industri dalam negeri serta untuk ekspor. Di Indonesia, kawasan industri dianggap perlu diadakan dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan kawasan industri dan perusahaan kawasan industri ini diatur melalui peraturan khusus demi agar industri dapat berjalan secara produktif dan efisien

Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri adalah:

- Kawasan Peruntukan Industri merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri)
- Lokasi KPI harus dinilai dari sisi infrastruktur, sumberdaya dan tenaga kerja.



Gambar 2.3 Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri

Keterangan :

IK = Industri Kecil ; IM = Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan baku khusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus

2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Studi Kawasan Peruntukan Industri ini dilakukan tidak terlepas dari kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan bidang industri yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan dilakukan agar desentralisasi pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai.

Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional. Urusan-urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke pusat melalui propinsi. Kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten/kota bagi kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang mencakup lintas kabupaten atau kota dan atau bersifat strategis propinsi cukup dibahas ditingkat propinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas propinsi dan atau bersifat kepentingan nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat nasional

Didalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 13 ayat (3), Perindustrian dikategorikan sebagai Urusan Pemerintahan Pilihan. Di dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam bidang industri, sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana induk pembangunan industri Provinsi.	Penetapan rencana induk pembangunan industri Kabupaten/Kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ industri yang berdampak besar pada lingkungan; ▪ industri minuman beralkohol; dan ▪ industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ industri yang berdampak besar pada lingkungan; ▪ industri minuman beralkohol; dan ▪ industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi.	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. d. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IUI Besar dan Izin perluasannya; dan ▪ IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas 	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IUI Kecil dan Izin Perluasannya; ▪ IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan ▪ IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

2.3 Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terkait Pengembangan Sektor Industri di Daerah

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Industri di daerah diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya, diantaranya dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi serta memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah melalui perwilayahan Industri.
5. Perwilayahan Industri dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. Peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
6. Perwilayahan Industri dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. pembangunan Kawasan Industri.

Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat di dalam Pasal 11, yaitu :

- 1) Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- 2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- 3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan serta dukung lingkungan.
- 4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Daerah dalam Bidang Industri, yang terangkum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM Industri
 - Penyusunan RPIK, RPJMD Urusan Industri, RKPDI Industri
2. Perizinan
 - Penerbitan IUI Kecil dan IUI menengah, Izin Perluasan Industri, IUKI dan Izin Perluasan IUKI
3. Pembangunan SDM Industri
 - Melakukan pemetaan kebutuhan SDM industri lokal kabupaten/kota
 - Penyelenggaraan pemagangan SMK di industri kecil dan menengah
4. Pemberdayaan Industri
 - Menetapkan IKM Unggulan berdasarkan RPIK

- Penguatan kelembagaan IKM: Bantuan dan bimbingan teknis sentra dan IKM Kabupaten/Kota
- 5. Pembangunan Sarana/Prasarana Industri (Lahan)
 - Penetapan Kawasan Peruntukan Industri berkoordinasi dengan provinsi
 - Menyediakan lahan industri untuk Kawasan Industri
- 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Pemerintah kota/kabupaten dapat melakukan penjaminan resiko atas pemanfaatan teknologi industri di daerahnya yang dikembangkan di dalam negeri
 - Melakukan pengawasan pemanfaatan teknologi industri kecil dan menengah
 - Melaksanakan fasilitasi : kerjasama litbang teknologi di bidang industri, promosi alih teknologi, lembaga litbang/perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi
- 7. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - Membina proses pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan teknologi produk unggulan Kabupaten / Kota
 - Promosi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi untuk produk unggulan
 - Konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual Industri kecil menengah
 - Fasilitasi promosi produk industri kecil dan menengah Kab/Kota melalui pameran dalam negeri Kab/Kota
- 8. Sistem Informasi Industri Nasional
 - Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi industri
 - Pemantauan dan pengawasan kepatuhan untuk perusahaan yang ijinnya dikeluarkan oleh daerah.

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

2.4.1 Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk :

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Tata cara pembangunan Kawasan Industri meliputi :

- a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;
- b. Badan usaha sebagaimana dapat berbentuk :
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - Koperasi; atau
 - Perseroan Terbatas.
- c. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;
- d. Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;

- e. Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri paling sedikit memuat :
 - (1). Pemilihan Lokasi;
 - (2). Perizinan;
 - (3). Pengadaan Tanah;
 - (4). Pematangan Tanah;
 - (5). Pembangunan Infrastruktur; dan
 - (6). Pengelolaan.

2.4.2 Infrastruktur Kawasan Industri

Infrastruktur Kawasan Industri, meliputi :

- a. Infrastruktur Industri, meliputi :
 - (1). Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 - (2). Jaringan Telekomunikasi;
 - (3). Jaringan Sumber Daya Air dan Jaminan Pasokan Air Baku;
 - (4). Sanitasi;
 - (5). Jaringan Transportasi.
- b. Infrastruktur Penunjang, meliputi :
 - (1). Perumahan;
 - (2). Pendidikan dan Pelatihan;
 - (3). Penelitian dan Pengembangan;
 - (4). Kesehatan;
 - (5). Pemadam Kebakaran; dan
 - (6). Tempat Pembuangan Sampah.
- c. Infrastruktur Dasar, meliputi :
 - (1). Instalasi Pengolahan Air Baku;
 - (2). Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - (3). Saluran Drainase;
 - (4). Instalasi Penerangan Jalan; dan
 - (5). Jaringan Jalan.

2.5 Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Permenperin No. 40/2016 merupakan pengganti dari Permenperin Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, sebagai pedoman bagi pelaku usaha kawasan industri, pelaku usaha industri, Pemerintah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun Kawasan Industri. Dalam Permenperin No. 40/2016 terdapat 4 bahasan penting mengenai konsepsi dasar, persiapan, pembangunan dan pengelolaan dalam membangun kawasan industri. Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dan panduan

bagi aparatatur Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Industri. Sedangkan tujuannya adalah agar Kawasan Industri dibangun sesuai dengan tata ruang, didukung dengan infrastruktur, efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga pada gilirannya mampu menarik investasi bagi pengembangan industri dan mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri mencakup:

1. Tahap persiapan, meliputi kelayakan lokasi, penyusunan dokumen, dan pengurusan perizinan;
2. Tahap pembangunan, meliputi pembebasan lahan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED);
3. Tahap pengelolaan, mencakup kelembagaan, sistem manajemen, pelaksanaan tata tertib Kawasan Industri, pelayanan kepada tenant, pemasaran, pengembangan usaha, pengelolaan lingkungan, kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penyusunan data Kawasan Industri.

Dalam pembangunan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk Kawasan Industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan salah satu syarat bagi perizinan Kawasan Industri.

2. Ketersediaan Infrastruktur Industri

Pembangunan suatu Kawasan Industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan infrastruktur industri yang memadai. Dalam upaya mengembangkan suatu Kawasan Industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b. tersedianya sumber energi (gas, listrik, dan lain-lain) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kepastian pasokan;
- c. tersedianya sumber air sebagai air baku industri dan air minum baik yang bersumber dari air permukaan atau air tanah; dan
- d. tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data.

3. Ramah Lingkungan

Dalam pembangunan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri. Aspek efisiensi dimaksud antara lain meliputi efisiensi dalam aspek lokasi dan infrastruktur serta aspek pelayanan. Bagi tenant akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik yang dilengkapi dengan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing tenant tersebut. Sedangkan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri.

5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan suatu Kawasan Industri sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan

berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat, tindakan anarkis, dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri di dalam Kawasan Industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, Pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) untuk mendapatkan perlakuan khusus.

6. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6 Pengaruh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Undang-Undang ini disusun menggunakan teknik Omnibus Law. Pengesahan Undang-Undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta memangkas rumitnya perizinan yang dianggap selama ini sebagai salah satu hambatan utama dalam investasi.

Omnibus Law menurut Firman Freaddy Busroh sebagai mana yang dikutip oleh Antoni Putra (2020) adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. metode penyusunan hukum Omnibus Law ini biasa digunakan negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Kanada dan Inggris. Konsep Omnibus Law merupakan jalan keluar dari tumpang tindih aturan dan ketidakpastian Hukum yang terdapat dalam produk hukum yang ada saat ini. Jika hambatan proses regulasi tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundangundangan yang sering berhenti di tengah pembahasan atau tidak sesuai dengan jadwal.

Pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan tuntutan jaman. Apalagi peraturan saat ini sangat gemuk yang mencapai 42 Ribu aturan yang terdiri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Begitu banyak peraturan menimbulkan problematika tersendiri bukan saja mengenai jumlahnya yang sangat banyak tetapi juga materi muatannya yang tumpang tindih.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui teknik Omnibus Law merupakan sebuah pembaruan yang patut diapresiasi namun bukan berarti tak terdapat kritikan di dalamnya. Kritikan bukan saja tertuju pada proses pembentukan yang terkesan sangat terburu-buru dan penuh dengan unsur politik tetapi juga materi muatan yang terkesan mementingkan investasi dan kepentingan para pengusaha saja. Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi.

2.6.1 Urusan bidang Perindustrian dalam UUCK

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah mengubah kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perizinan Industri, dimana perubahan tersebut menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dalam perizinan kegiatan industri kepada

pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut saat ini konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah *agency model* di mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hanya menjadi pelaksana kewenangan pusat. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap kesempatan pemerintah daerah dalam ikut serta melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan mengenai daerahnya. Selain itu hapusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan.

Perizinan industri sebagai kewenangan membutuhkan suatu dasar dalam pelaksanaannya. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri terdapat dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan mengenai kewenangan perindustrian daerah hanya sebatas pengaturan norma umum di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian berdasarkan kewenangan konkuren. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur khusus mengenai perindustrian menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang perindustrian. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha industri yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014. PP ini memuat tentang Perizinan, Klasifikasi Usaha dan Izin Usaha, pembagian kewenangan, tata cara penerbitan izin dan izin lainnya yang berkenaan dengan izin industri. Dalam Pasal 2 Ayat (3) kegiatan perindustrian diklasifikasikan menjadi tiga yaitu industri kecil, industri menengah, industri besar.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan Izin Usaha Industri dapat dilihat dalam Pasal 11 dan 12. Dalam Pasal 11 menerangkan bahwa Gubernur berwenang memberikan IUI besar selain yang menjadi kewenangan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 12 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada di pada Kabupaten/Kota. Selain itu baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala instansi pemerintahan di masing-masing tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan satu pintu.

Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah membawa konsekuensi baru dalam urusan pemerintah daerah konkuren khususnya mengenai kewenangan perizinan industri. Pembaharuan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut akan berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri dan beralih kepada konsep sentralisasi yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Pada Pasal 101 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat” memiliki arti bahwa hanya pemerintah pusat yang berhak dan berwenang dalam menerbitkan izin industri. Ketentuan tersebut telah menutup ruang otonomi daerah dalam perizinan industri di mana yang sebelumnya pemerintah daerah Provinsi dapat mengeluarkan izin industri besar yang bukan kewenangan menteri dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan IUI menengah dan kecil kini semuanya beralih kepada pemerintah pusat. Sebenarnya langkah penyeragaman peraturan perindustrian yang dilakukan pemerintah pusat patut diapresiasi, karena pemerintah beralih dengan diseragamkannya peraturan perizinan akan membuat Investor tertarik menanamkan modal di Indonesia yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyakbanyaknya. Namun ternyata penyeragaman hukum yang dilakukan pemerintah pusat dengan cara menarik kembali kewenangan daerah dalam perizinan malah menimbulkan permasalahan. Di satu sisi membuka lapangan pekerjaan disisi lainya mendegradasi kewenangan pemerintah daerah. Memang berdasarkan

segi ekonomi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut berbanding terbalik dalam segi otonomi daerah yang menandakan kemunduran sistem dan kembali pada konsep sentralisasi.

Selain dicabutnya kewenangan pemberian izin industri, ternyata berdasarkan perubahan Pasal 117 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap izin industri dan izin kawasan industri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Padahal secara logika pemerintah daerah sebagai pihak lebih mengetahui kondisi langsung di daerahnya seharusnya memiliki kewenangan tersebut karena berkaitan dengan kecepatan dan efisien.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan sektor perindustrian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi.
- Adanya komitmen dalam menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri melalui kemudahan penyediaan bahan baku → melalui pembatasan ekspor bahan baku, kemudahan impor bahan baku, maupun pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan serta membangun industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam
- Adanya perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan Industri melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri

2.6.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian merupakan turunan langsung dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- Industri Strategis;
- Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan
- Tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi. Adanya komitmen dalam menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri melalui kemudahan penyediaan bahan baku → melalui pembatasan ekspor bahan baku, kemudahan impor bahan baku, maupun pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan serta membangun industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam. Adanya perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan Industri melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

2.6.3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai kriteria. Dengan begitu diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia

lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak sekitar 50 persen ada di pulau Jawa-Bali. Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 Kawasan Industri (KI), total luasnya mencapai 53 ribu hektare. Langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Penetapan KPI seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI.

Dalam upaya menindaklanjuti percepatan pembangunan dan pengembangan perindustrian tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di dalam wilayahnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kriteria teknis Kawasan Peruntukan Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KPI ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri; tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berwenang menetapkan kriteria teknis KPI. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan infrastruktur Industri di dalam KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kawasan peruntukan industri diarahkan di setiap kabupaten/kota, baik berupa kawasan industri, sentra industri kecil menengah, maupun perusahaan-perusahaan industri. Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, suatu lokasi harus memiliki beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Pertama, kondisi lahan. Kawasan industri harus memperhatikan kondisi lahan dari aspek bencana, dan topografi. Pada kriteria ini, kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di atas 15 persen. Kedua, status lahan. Kawasan peruntukan industri memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek petanahan dan penataan ruang. Kawasan peruntukan industri tidak boleh berada di lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan tidak berada di kawasan lindung. Ketiga, luas lahan. Kawasan peruntukan industri memehuni ketentuan luas lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, aksesibilitas. Kawasan industri mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. Aksesibilitas ini mempertimbangkan beberapa jalur transportasi, seperti transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api. Selain itu jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama, jalur transportasi laut yang dengan dengan pelabuhan untuk wilayah pesisir, atak jalur transportasi udara. Kelima, kawasan peruntukan industri terdapat sumber air baku. Sumber air baku ini meliputi air permukaan, dan air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, dan olahan air limbah industri. Keenam, terdapat pembuangan air limbah. Kriteria ini meliputi laut, air permukaan atau aplikasi ke tanah. Selain memenuhi enam kriteria teknis, pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan, ketersediaan jaringan telekomunikasi, kepadatan permukiman dan kesesuaian dengan rencana pembangun industri daerah.

Prinsip penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, yaitu sebagai berikut :

1. Acuan penetapan KPI dalam rencana tata ruang
 - Penetapan KPI harus dijadikan acuan dalam rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR, serta RTR kawasan strategis, apabila Pemerintah menetapkan kegiatan Industri sebagai kegiatan strategis.



- Penetapan KPI memperhatikan keharmonisan peruntukan ruang (pola ruang) dengan kawasan sekitarnya dan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya.
2. Tidak berada di kawasan rawan bencana risiko tinggi
3. Kesesuaian dengan rencana pembangunan Industri
 - Dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
 - Termasuk dalam penentuan skala Industri (besar, menengah, atau kecil).
4. Kemudahan penyediaan infrastruktur Industri
 - Penetapan KPI memerlukan dukungan kemudahan penyediaan infrastruktur Industri yang memadai baik rencana maupun eksisting, antara lain: lahan industri, aksesibilitas memadai, jaringan dan sumber air sebagai air baku, tersedianya badan air penerima limbah Industri yang telah diolah, sumber energi, dan sistem dan jaringan telekomunikasi.
5. Kenyamanan, keamanan, dan kemudahan berusaha
 - Jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan
 - Jaminan kemudahan dalam berusaha juga diperlukan, seperti kemudahan dalam berinvestasi dan perizinan.
6. Kondisi Lahan (daya dukung, kerawanan bencana, topografi)
7. Status dan Pola Guna Lahan (bukan lahan adat, LP2B, maupun kawasan lindung)
8. Luas Lahan (mengacu PP No.142/2015 tentang Kawasan Industri)
 - dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan Industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau
 - dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang peruntukannya untuk Industri kecil dan Industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.
9. Aksesibilitas tinggi
 - Keberadaan sistem jaringan transportasi yang didukung dengan simpul/hub perhubungan
 - Jalur transportasi merupakan jalur regional atau jalur utama yang tidak mengganggu/terganggu pergerakan lokal
10. Sumber Air Baku (ketersediaan air permukaan, pemanfaatan jaringan air bersih PDAM atau kerjasama/fasilitasi jaringan air bersih industri, dan pemanfaatan air limbah industri/reuse)
11. Tempat Pembuangan Air Limbah
 - Sesuai dengan Permen LHK No.102/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah
 - Izin Pembuangan Air Limbah dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
 - Ada proses pengolahan dan jaringan air limbah
 - Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen kajian pembuangan air limbah
 - Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah komunal dan memperoleh pendapatan dari pengolahan air limbah tersebut.
12. Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri
 - Ketersediaan Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 - Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi;
 - Kepadatan Permukiman;
 - Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Tabel 2.2 Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri

No	Pertimbangan Lain	Keterangan
1	Jaringan energi dan kelistrikan	Alokasi KPI berdasarkan rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti dengan penyediaan jaringan energi dan listrik dengan pasokan daya dan tegangan yang stabil, serta mampu mewadahi kegiatan Industri di kawasan tersebut.
2	Jaringan telekomunikasi	Penyediaan jaringan telekomunikasi berupa sistem kabel dan nirkabel untuk distribusi produk dan pengembangan usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan KPI.
3	Kepadatan permukiman	KPI harus mempertimbangkan dampak negatif yang minimal bagi masyarakat. Untuk itu, KPI sebaiknya memiliki kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang.
4	Kesesuaian dengan rencana pembangunan industri daerah	a. Pengembangan Industri sebaiknya didasarkan pada potensi dan karakteristik daerah serta visi misi kepala daerah yang bersangkutan. b. Pemerintah Daerah perlu berpedoman pada RPIP dan RPIK dalam menentukan jenis Industri yang akan dikembangkan, termasuk dalam menentukan kemungkinan mengembangkan Industri kecil, Industri menengah, atau Industri besar. c. Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis aspek ekonomi.

Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

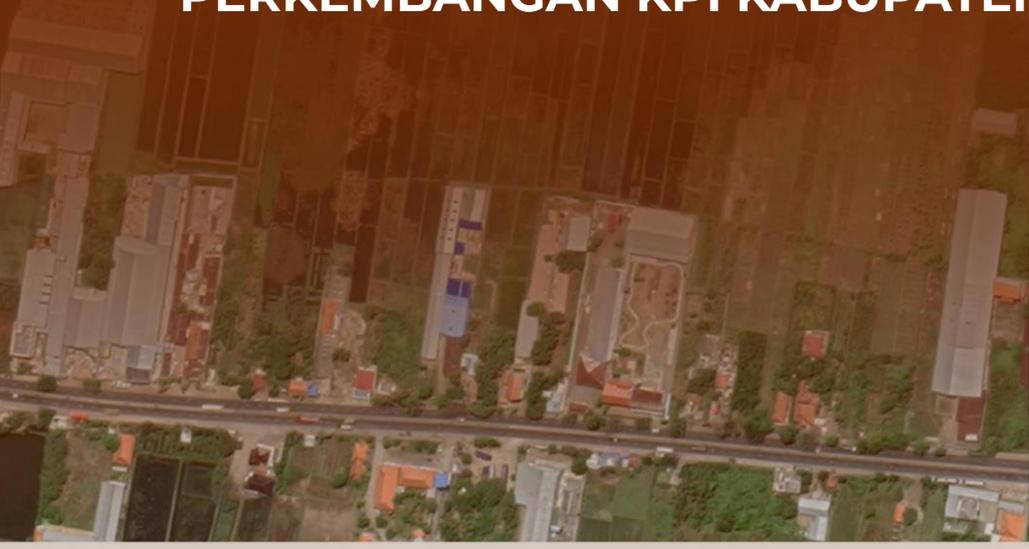
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah yang masih dalam proses penyusunan dan penetapan KPI di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. KPI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat pada saat peninjauan kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.



**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

3

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN yang DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON



3.1 Kajian Program Pembangunan Industri terkait Penetapan KPI

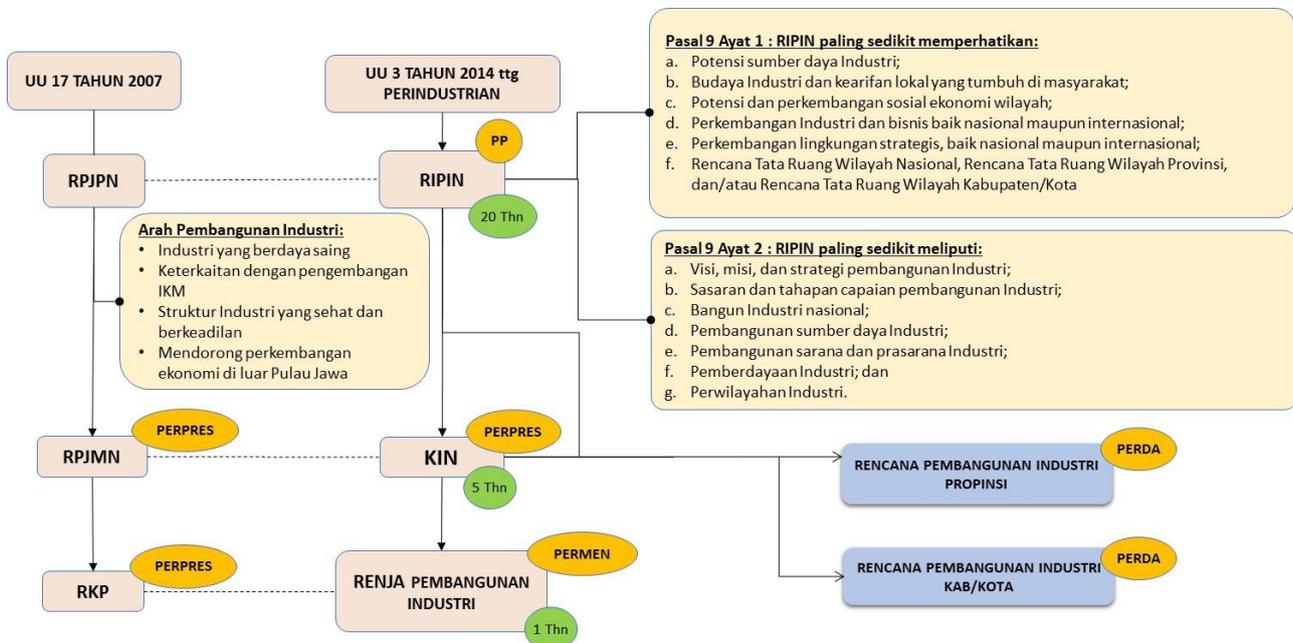
3.1.1 Program Pembangunan Industri Nasional

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

- Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam skema Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan amanat dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Secara skematis bisa dilihat pada gambar berikut ini.

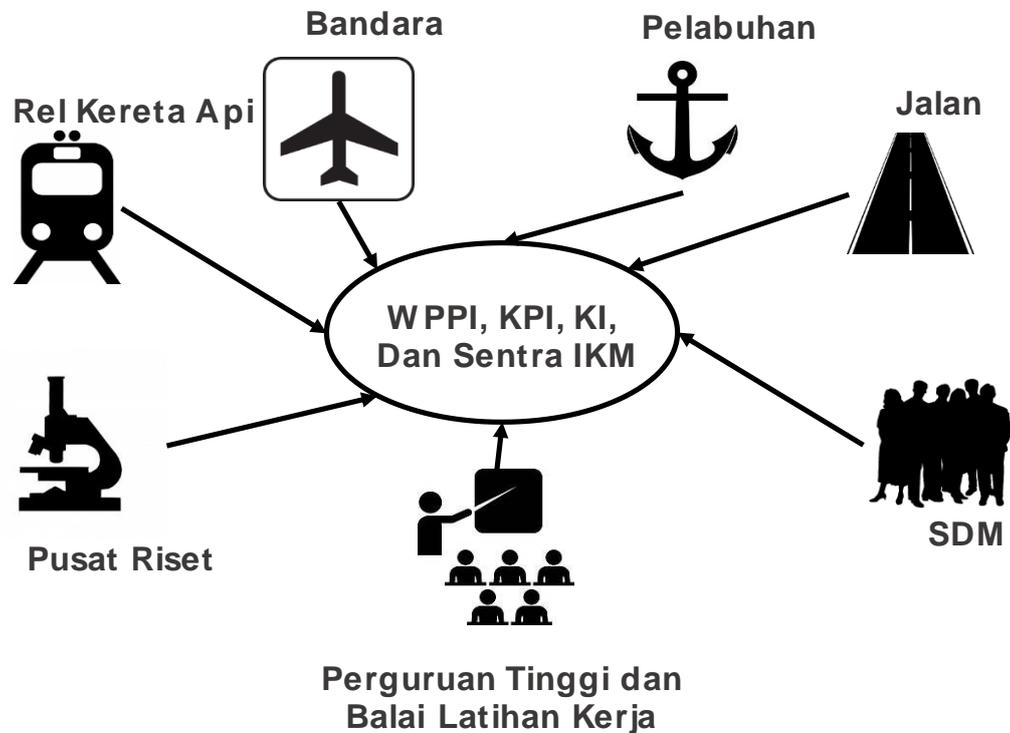


Gambar 3.1 Kedudukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dalam Skema Pembangunan Industri Nasional

Penetapan Industri Prioritas yang termasuk dalam Industri Andalan, Industri Pendukung, dan Industri Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 telah ditetapkan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah, melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat, serta ditetapkan dengan deliniasi atau batas yang tidak terkait dengan batas secara administratif.



Gambar 3.2 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun yaitu 2015-2035. Pelaksanaan RIPIN 2015-2035 melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam RIPIN, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam RIPIN dijabarkan juga mengenai sasaran, strategi dan tahapan pembangunan industri nasional. Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035

No	Indikator Pembangunan Industri	satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produksi industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	jumlah tenaga kerja disektor industri	Juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23	20,0
7	Nilai investasi sektor industri	Rp. Triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Dalam konteks perwilayahan, untuk mencapai percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka berdasarkan RIPIN secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Tabel 3.2 Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
I	Papua	1	Papua
II	Papua Barat	2	Papua Barat
III	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku	3	Sulawesi Utara
		4	Gorontalo
		5	Sulawesi Tengah
		6	Sulawesi Tenggara
		7	Maluku
		8	Maluku Utara
IV	Sulawesi Bagian Selatan	9	Sulawesi Barat
		10	Sulawesi Selatan
V	Kalimantan Bagian Timur	11	Kalimantan Utara
		12	Kalimantan Timur
VI	Kalimantan Bagian Barat	13	Kalimantan Barat
		14	Kalimantan Tengah
		15	Kalimantan Selatan
VII	Bali dan Nusa Tenggara	16	Bali
		17	Nusa Tenggara Barat
		18	Nusa Tenggara Timur
VIII	Sumatera Bagian Utara	19	Nanggroe Aceh Darussalam
		20	Sumatera Utara
		21	Sumatera Barat
		22	Riau
		23	Kep. Riau

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
IX	Sumatera Bagian Selatan	24	Jambi
		25	Bengkulu
		26	Bangka Belitung
		27	Sumatera Selatan
		28	Lampung
X	Jawa	29	Banten
		30	Jawa Barat
		31	DKI Jakarta
		32	DI Yogyakarta
		33	Jawa Tengah
		34	Jawa Timur

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dimana Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar pulau jawa;
4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5. Kualitas dan kuantitas sdm;
6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
7. Memiliki potensi sumber daya air industri;
8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur - Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitunb-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi	Sulawei Tengah
6	Kendari-Konawe-konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali	Sulawei Tenggara dan Sulawesi Tengah
7	Makasar-maros-Gowa-Takalar-Jenepono-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-Sambas-Bengkayang	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru	Kalimantan Selatan
10	Samarinda-Balikpapan, dan Kutai Kartanegara- Bontang-Kutai Timur	Kalimantan Timur
11	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara



No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie-Bireun-Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli SerdangBedagai-Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin-Muaraenim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

3.1.2 Program Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat tahun 2018 – 2038.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2 digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40% (empat puluh persen);
2. meningkatnya industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatnya peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional;
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

Dalam dokumen ini dituliskan arahan-arahan pengembangan industri di Jawa Barat, termasuk di antaranya strategi pembangunan industri Jawa Barat yaitu dengan berfokus pada penguatan penyediaan bahan baku, penguatan proses, penguatan output dan distribusi (logistik) serta penguatan faktor pendukung.

Selain itu, dalam dokumen tersebut disebutkan juga berbagai jenis industri unggulan dari daerah-daerah yang ada di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon. Industri unggulan Kabupaten Cirebon tersebut diantaranya adalah:

1. industri pengolahan ikan
2. industri furniture kayu dan rotan
3. perawatan kapal
4. suplemen pakan ternak dan aqua culture
5. komponen berbasis kayu (wood working, laminated dan finger joint)
6. industri bahan galian non logam (semen dan keramik)

Tabel 3.4 Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi di Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Keterangan
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan	Aneka olahan ikan dan hasil laut lainnya (termasuk minyak ikan, suplemen, dan pangan fungsional lainnya.)
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Furniture kayu dan rotan; • Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu
3	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan	Perawatan kapal
4	Industri Hulu Agro	Industri Pakan	Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aqua culture</i>
		Industri Barang dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated, and finger joint</i>), • serat bambu untuk tekstil, • <i>wood moulding products</i>
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Bahan Galian Non-Logam	

Sumber : Peraturan Daerah. No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2038

3.1.3 Program Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat tahun 2018 - 2038, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2039. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kabupaten Cirebon.

Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengukuhkan diri sebagai provinsi industri yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada saat ini, industri di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri di wilayah Jawa Barat bagian barat-utara serta sekitar metropolitan Bandung. Namun pada masa mendatang, berbagai faktor (UMK, lahan, regulasi, dsb.) membuat daya tarik industri di kawasan-kawasan tersebut menurun. Sementara itu, wilayah Jawa Barat timur-utara, termasuk Kabupaten Cirebon, akan muncul menjadi kekuatan industri baru yang menarik, dengan faktor sumber daya industri yang atraktif serta pembangunan infrastruktur industri yang terus dilakukan.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon selama ini mempunyai beberapa produk unggulan sesuai dengan Kompetensi Inti Industri Daerah, antara lain mebel dan kerajinan rotan, mebel dan kerajinan kayu, konveksi, batu alam, dan batik. Industri mebel dan kerajinan rotan selama ini menjadi primadona, dan masih tetap akan menjadi produk unggulan fokus di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur akan mampu membuka peluang yang besar bagi jenis-jenis industri lain pada masa mendatang.

3.1.3.1 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah dan pembangunan industri daerah, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2018-2038 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kontribusi industri pengolahan pada ekonomi Kabupaten Cirebon;
2. meningkatkan industri bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan;
3. meningkatkan peran industri dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional;
4. meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan;
5. meningkatkan nilai ekspor dan substitusi impor produk industri pengolahan.

3.1.3.2 Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota/Kabupaten

Penetapan industri unggulan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan RPIK dengan perencanaan pembangunan yang terkait, antara lain RPIP Jawa Barat, Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), dan rencana pembangunan Kabupaten Cirebon.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2016-2035 telah menetapkan sekian banyak industri sebagai industri unggulan provinsi dalam jangka panjang. Selain itu, RPIP juga telah mengalokasikan pengembangan industri-industri tersebut pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat, di mana Kabupaten Cirebon dialokasikan pengembangan industri-industri berikut:

1. Industri pengolahan ikan
2. Industri furnitur dan barang lainnya dari kayu
 - Furnitur kayu dan rotan
 - Kerajinan dengan bahan baku limbah industri
3. Industri perawatan kapal
4. Industri pakan
5. Industri barang dari kayu
 - Komponen berbasis kayu (*wood working*)
6. Industri bahan galian non-logam

Sementara itu, terdapat beberapa komoditas unggulan yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Cirebon, yaitu:

- Kerajinan/mebeler dari rotan, kayu, bambu.
- Makanan ringan (emping melinjo, kue gapit, krupuk kulit, tape ketan, dan sebagainya)
- Batu alam
- Sandal
- Batik
- Konveksi (pakaian jadi)
- Kerajinan (kulit kerang, tikar adem, ban bekas, dan sebagainya)
- Olahan tanah liat (gerabah/keramik, genteng, batu bata merah)
- Pengolahan ikan
- Garam olahan

Di antara komoditas-komoditas tersebut, mebel dan kerajinan rotan menjadi komoditas unggulan Kabupaten Cirebon dan telah ditetapkan sebagai Produk Unggulan Fokus.

Dari penetapan industri secara top-down dari RPIP Jawa Barat dan komoditas-komoditas unggulan yang menjadi potensi industri bottom-up, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan potensi pengembangan industri, maka lima sektor industri diusulkan untuk menjadi fokus pengembangan industri Kabupaten Cirebon pada 20 tahun mendatang. Kelima fokus pengembangan industri tersebut adalah:

1. **Industri furnitur dan kerajinan rotan**
2. **Industri garam olahan**
3. **Industri pendukung pertanian**
4. **Industri perawatan kapal**
5. **Industri pengolahan ikan**

Program-program sektoral yang dapat dilakukan terkait dengan fokus pengembangan industri tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Program Sektoral Pengembangan Industri Fokus

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
Industri Furnitur dan Kerajinan Rotan				
1	Ketersediaan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri rotan untuk identifikasi ketersediaan dan potensi bahan baku ▪ Kerja sama pasokan bahan baku dengan daerah penghasil rotan ▪ Memastikan regulasi larangan ekspor bahan mentah 	Menjalin kerjasama transfer teknologi pemrosesan bahan baku dengan pemasok untuk efisiensi biaya logistik.	Kerja sama pasokan bahan baku untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
2	Teknologi desain dan produksi	Peningkatan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer, termasuk eksplorasi teknologi pencetakan 3D untuk peningkatan kapabilitas desain	Penguasaan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer, termasuk teknologi pencetakan 3D untuk peningkatan kapabilitas desain	Penguasaan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer hingga menumbuhkan unit-unit usaha jasa industri yang berfokus pada desain produk rotan
3	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi potensi pemasaran produk-produk baru ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Pengembangan infrastruktur basis data pemasaran rotan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi dan pendekatan langsung pada negara-negara pasar potensial ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam hal intelijen pasar untuk prediksi tren industri rotan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi dan pendekatan langsung pada negara-negara pasar potensial ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam hal intelijen pasar untuk prediksi tren industri rotan
Industri Garam Olahan				
1	Ketersediaan bahan baku	Pemetaan kondisi dan potensi lahan industri garam olahan Mendorong regulasi untuk melindungi ketersediaan lahan berkualitas	Mendorong regulasi untuk menjaga kualitas air laut dari pencemaran	Mendorong regulasi untuk melindungi ketersediaan lahan berkualitas dan kualitas air laut dari pencemaran
2	Teknologi produksi	Adopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi hingga dapat memenuhi spesifikasi garam industri 	Penguasaan pengembangan teknologi produksi untuk mendukung industri garam olahan maju (garam industri & farmasi) dengan

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiasi pola kerja sama dengan lembaga penelitian untuk peningkatan teknologi produksi 	kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian
3	Distribusi dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi industri pengguna garam olahan ▪ Perencanaan dan pembuatan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong upaya untuk menarik industri-industri pengguna garam olahan ▪ Pembuatan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) ▪ Eksplorasi bentuk bentuk pemasaran baru untuk meningkatkan minat calon konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pengembangan kawasan terintegrasi: penghasil dan pengguna garam olahan ▪ Pembuatan dan pemeliharaan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) ▪ Eksplorasi bentuk bentuk pemasaran baru untuk meningkatkan minat calon konsumen
4	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pembentukan kelompok atau koperasi petani garam ▪ Merancang kebijakan insentif untuk meningkatkan partisipasi petani garam pada kelompok atau koperasi petani garam ▪ Mendorong kerja sama antara kelompok atau koperasi petani dengan perusahaan fintech berbasis pertanian untuk peningkatan akses permodalan ▪ Mengkaji pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri garam olahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran kelompok atau koperasi petani garam dalam kegiatan pemberian modal dan pembelian garam ▪ Peningkatan akses modal kelompok atau koperasi petani garam melalui kerjasama dengan fintech ▪ Mendorong pembentukan BUMD industri garam olahan sebagai pihak integrator kelompok atau koperasi petani garam. 	Meningkatkan kapasitas dan peran BUMD dalam hal ketersediaan bahan baku, teknologi produksi, distribusi pemasaran, pemodalana, dan stabilitas harga
Industri Pendukung Pertanian (Perawatan dan Pembuatan Alat/Mesin Pertanian)				
1	Perencanaan kebutuhan dan kapasitas	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian
2	Teknologi produksi	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan alsintan ▪ Peningkatan kemampuan rekayasa alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan pengembangan teknologi perawatan alsintan dan rekayasa pengembangan alsintan
3	Sumber daya manusia	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru
4	Pembentukan sentra IKM	Membentuk sentra IKM percontohan	Mendorong pengembangan sentra-sentra IKM pendukung pertanian di kecamatan-kecamatan	Mendorong pengembangan sentra-sentra IKM pendukung pertanian di kecamatan-kecamatan untuk menjadi sentra mandiri
Industri Perawatan Kapal				
1	Perencanaan kebutuhan dan kapasitas	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
2	Teknologi produksi	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan kapal	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan kapal	Penguasaan pengembangan teknologi perawatan kapal
3	Sumber daya manusia	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru
Industri Pengolahan Ikan				
1	Ketersediaan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama.
2	Teknologi produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - Adopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi ▪ Inisiasi pola kerja sama dengan lembaga penelitian untuk peningkatan teknologi produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan pengembangan teknologi produksi untuk mendukung industri pengolahan ikan maju dengan kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian
3	Distribusi dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi industri pengolahan ikan 	Diversifikasi produk	Diversifikasi produk

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.3 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri dari : Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sentra IKM.

A. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI)

Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) luasnya berkisar pada 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang terdiri atas KPI menengah dan besar; KPI kecil dan mikro, KPI Agro, dan Kawasan Industri.

Adapun KPI menengah dan besar meliputi kecamatan-kecamatan berikut:

1. Sususukan
2. Gempol
3. Ciwaringin
4. Arjawinangun
5. Kapetakan
6. Palimanan
7. Plumbon
8. Depok
9. Greged
10. Mundu
11. Pangenan
12. Astanajapura

13. Gebang
14. Pabedilan
15. Losari
16. Ciledug

Keduapuluh empat kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 4 buah koridor yaitu: (1) koridor wilayah utara, koridor wilayah barat, koridor wilayah tengah, dan koridor wilayah timur yang tergambar pada Gambar IV-1. Keempat koridor tersebut memiliki karakteristik dan geostrategis yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan pembangunan industri di keempat koridor tersebut akan berbeda menyesuaikan keadaan yang ada. Sebagai contoh, pembangunan industri di koridor barat harus mempertimbangkan rencana pertumbuhan industri berbasis teknologi tinggi atau elektronik di Majalengka dan kehadiran bandara BIJB. Koridor utara dan timur memiliki garis pantai yang panjang sehingga harus dimanfaatkan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan industri. Di sisi lain koridor wilayah tengah bersinggungan dengan Kota Cirebon. Dengan demikian industri yang dikembangkan di koridor tengah adalah jenis industri yang ramah lingkungan dan padat karya untuk menghindari konflik sosial. Selain itu, koridor wilayah tengah memiliki garis pantai sehingga industri pengolahan hasil laut dan garam dapat dikembangkan pada wilayah ini. Jenis industri yang didorong untuk dikembangkan pada setiap koridor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Industri yang Didorong per Koridor

Koridor	Industri yang didorong	Koridor	Industri yang didorong
Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri bahan galian non logam ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri komponen ▪ Industri tekstil ▪ Industri pakan ▪ Industri komponen 	Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri barang dari kayu
Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri garam olahan ▪ Industri pengolahan ikan ▪ Industri perkapalan 	Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri garam olahan ▪ Industri pengolahan ikan ▪ Industri perkapalan

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

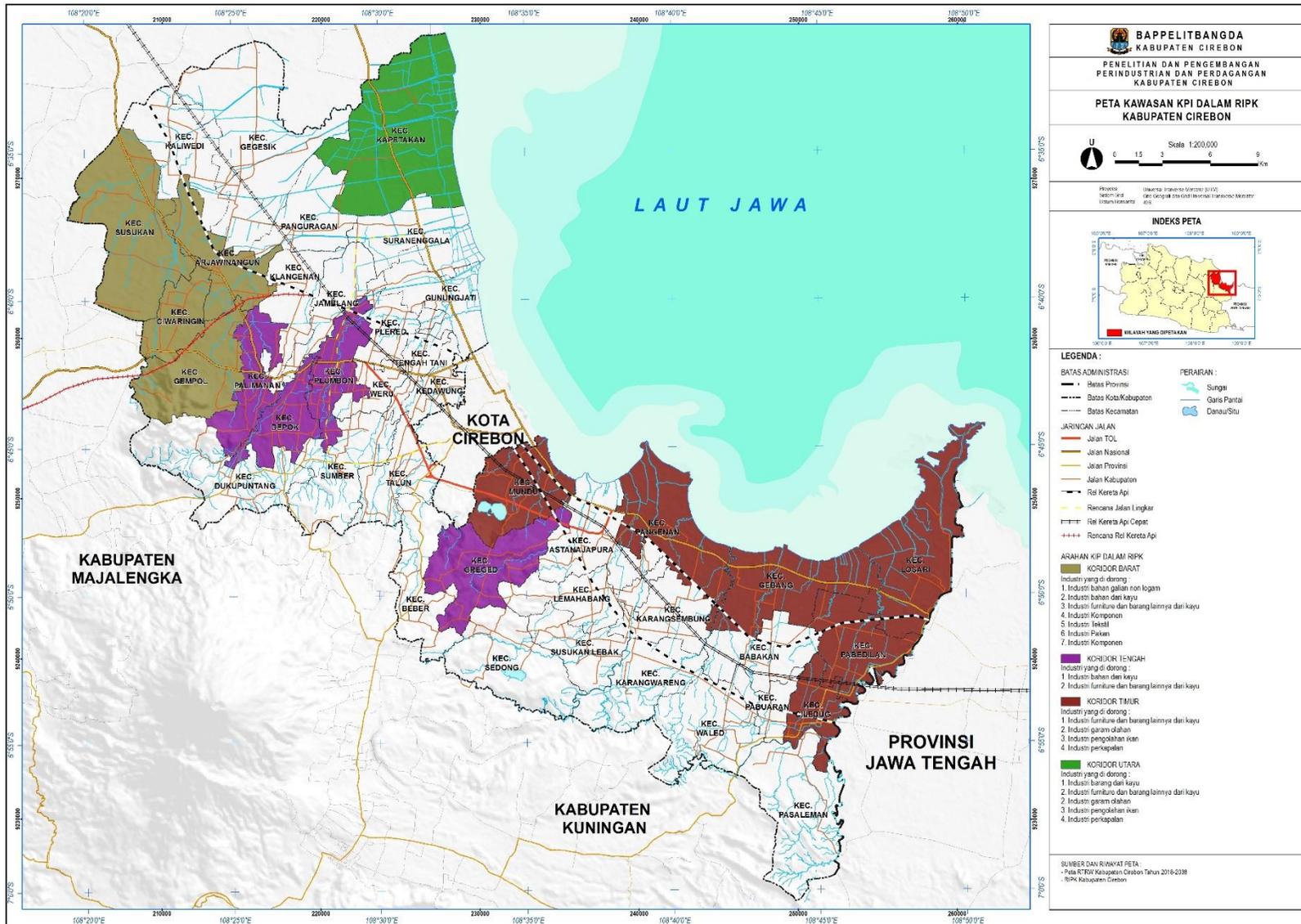
Tabel 3.7 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

No	Tema Program	Tahun		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
1	Perencanaan pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada pasokan bahan baku dan pemasaran ▪ Perencanaan pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi ▪ Perencanaan dan Pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi ▪ Perencanaan dan Pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon
2	Koordinasi perwilayahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, rencana penyediaan energi, rencana penyediaan SDM dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan dan penyediaan bahan baku industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyediaan bahan baku industri



No	Tema Program	Tahun		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
3	Pembangunan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan kawasan industri ▪ Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan investor kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung rencana pembangunan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung rencana pembangunan kawasan industri
4	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan detail pembangunan infrastruktur transportasi, energi ▪ Penanganan limbah dalam dan antar kawasan industri / kawasan peruntukan industri, ▪ Pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait, ▪ Pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait
5	Pengawasan dan Pengembangan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri
6	Promosi investasi industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing, ▪ Pembangunan brand awareness produk hasil industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038



Gambar 3.3 Peta Arahan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan Dokumen RPIK

B. Sentra IKM

Salah satu sasaran pembangunan industri adalah pengembangan minimal satu Sentra Industri Kecil dan Menengah pada setiap kecamatan. Sebagian besar program pengembangan Sentra IKM akan dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait perindustrian pada Kabupaten/Kota. Program terkait pengembangan Sentra IKM ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Program Pengembangan Sentra IKM

No	Tema Program	Tahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
1	Sentra IKM kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan ▪ Pemetaan potensi IKM kecamatan ▪ Penyusunan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur ▪ Pembangunan sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Pembinaan dan penguatan sentra
2	Sentra IKM unggulan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan sentra yang telah ada ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Penetapan sentra unggulan ▪ Pembentukan kelembagaan sentra IKM ▪ Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai kemudahan untuk pengusahan di dalam sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan penguatan sentra ▪ Penambahan kapasitas sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan pengembangan sentra IKM unggulan menjadi sentra IKM berbasis industri 4.0 (kolaborasi)
3	Sentra IKM rotan berbasis industri 4.0 (kolaborasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan ▪ Penyusunan rencana ▪ Pembentukan kelembagaan ▪ Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai kemudahan untuk pengusahan di dalam sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan tanah ▪ Pembangunan infrastruktur ▪ Pembangunan Sentra ▪ Pembinaan dan penguatan sentra ▪ Pelaksanaan program inkubator untuk pengusaha muda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Penguatan kolaborasi dengan sentra IKM berbasis industri 4.0 lainnya

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan industri perlu juga memperhatikan faktor-faktor sumber daya industri, yang mencakup sumber daya alam; sumber daya manusia industri; sumber daya teknologi, inovasi, kreativitas; serta pembiayaan. Program-program yang terkait sumber daya industri terangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Program Pengembangan Sumber Daya Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
Pengembangan Sumber Daya Alam				
1	Penentuan lokasi tepat guna suplai bahan mentah industri	Pemetaan jenis, jumlah, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Perencanaan penyediaan sumber daya alam dan penjalinan kerjasama dengan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut	Evaluasi berkala terkait rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam



No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
2	Perancangan teknologi transportasi bahan mentah industri	Kajian awal jaringan transportasi untuk distribusi sumber daya alam	Implementasi rancangan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam	Evaluasi dan perbaikan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam
3	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan	Kajian lingkungan (AMDAL) terkait sumber daya alam yang digunakan untuk setiap sektor industri unggulan	Sinkronisasi hasil kajian dengan implementasi rancangan teknologi transportasi dan penyaluran sumber daya alam	Evaluasi berkala untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				
1	Pengembangan akademi komunitas (D-1) untuk menghasilkan SDM tepat guna	Kajian antara ketersediaan dan kebutuhan kompetensi lembaga pendidikan saat ini	Penyediaan pelatih dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk lembaga pendidikan atau akademi komunitas	Evaluasi penyerapan angkatan kerja di industri dan penyesuaian kebutuhan kompetensi secara berkala
2	Pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri	Pemberian diklat untuk aparatur perindustrian dan dinas terkait, serta pelaku industri unggulan	Pemberian diklat untuk pelaku industri secara umum, termasuk diantaranya IKM	Pengawasan dan survey berkala terhadap kompetensi pelaku industri dengan kebutuhan industri terkini di pasar
Pengembangan Sumber Daya Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas				
1	Adaptasi teknologi baru melalui sinergi dan program kerjasama litbang dengan balai-balai industri dan lembaga riset	Kajian potensi teknologi baru untuk tingkatkan daya saing kompetitif industri	Melakukan implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant pada sektor industri unggulan	Implementasi pengembangan teknologi baru atau pendukung di sektor industri non-unggulan
2	Pengembangan sentra industri virtual berbasis internet	Pendataan dan validasi pelaku industri terkait, serta pembentukan sistem sentra industri virtual	Pemberian dukungan promosi, pemasaran produk inovatif, konsultasi, serta pelatihan teknologi dan desain pada sentra industri virtual	Evaluasi berkala terhadap keberjalanan sentra industri virtual, serta penyesuaian bentuk kerja sama antara pemerintah dan sentra industri virtual
Pengembangan Sumber Daya Pembiayaan				
1	Pengembangan lembaga pembiayaan industri melalui cara konvensional	Penambahan akses pembiayaan murah bagi IKM dan pelaku industri unggulan, melalui kerja sama dengan penanam modal (asing maupun lokal)	Inisiasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha Ultra-Mikro (Skema Kementerian Keuangan)	Upaya pemerataan pembiayaan industri untuk seluruh sektor, termasuk industri non-unggulan
2	Pengembangan moda pembiayaan non-konvensional berbasis financial technology (fintech)	Kajian regulasi pembiayaan non-konvensional dengan dinas terkait, seperti BKPM	Pembentukan konsep program pembiayaan non-konvensional untuk pelaku industri, serta inisiasi program secara bertahap	Evaluasi dan pengembangan moda pembiayaan non-konvensional secara menyeluruh pada sektor industri

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri mencakup aspek energi, limbah industri, transportasi, sistem informasi industri, dan infrastruktur penunjang standarisasi industri. Program-program terkait pengembangan sarana dan prasarana industri dirangkum pada tabel berikut ini

Tabel 3.10 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
Energi				
1	Pengembangan Energi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan perencanaan kebutuhan kelistrikan terkait industri Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Gardu Induk Pembangunan jaringan transmisi listrik Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan energi listrik baru dan terbarukan Pembangunan gardu induk Pembangunan jaringan transmisi listrik Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri
2	Pengembangan Energi Gas Alam	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan perencanaan kebutuhan gas alam untuk industri; Pemeliharaan jaringan gas alam industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan industri; Pembangunan stasiun pompa gas alam; Pemeliharaan jaringan gas alam industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan peruntukan industri; Pembangunan stasiun pompa gas alam; Pemeliharaan jaringan gas alam industri
Pengolahan Limbah Industri				
1	Pembangunan Sarana Pengolahan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan pengolahan limbah di dalam dan di luar kawasan industri; Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; pemeliharaan sarana pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; pemeliharaan sarana pengolahan limbah
2	Regulasi Pengolahan limbah industri	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi lingkungan hidup; Pengembangan sistem pemantauan lingkungan hidup; Penetapan peraturan mengenai lingkungan hidup; pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri
Transportasi				
1	Pembangunan infrastruktur jalan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Pemetaan kebutuhan infrastruktur jalan terkait pembangunan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Pembangunan akses jalan menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Perluasan akses jalan seiring bertambahnya volume kegiatan industri
2	Pembangunan Infrastruktur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pemetaan kebutuhan infrastruktur kereta api terkait pembangunan kawasan industri; 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri; Perluasan dan penambahan terminal peti kemas kereta api

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal peti kemas kereta api terpadu di Waruduwur 		
3	Optimalisasi Pelabuhan Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; pemetaan kebutuhan industri atas penggunaan pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan Cirebon
Sistem Informasi Industri				
1	Pengembangan Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan Industri mikro, kecil, menengah dan besar; pengembangan sistem informasi industri internal 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan kegiatan Industri secara lengkap (bahan baku, produksi, penjualan, sumber daya, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi industri Kabupaten Cirebon yang dapat diakses publik; Pemanfaatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan program pengembangan
Standarisasi Industri				
1	Pengembangan standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lab uji 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga penilaian

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.6 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri mencakup Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kerjasama internasional, pemberdayaan industri hijau, serta pemberdayaan IKM. Program pengembangan dan pemberdayaan IKM secara umum terdapat pada program yang disusun terkait industri unggulan, perwilayahan industri, sumberdaya industri, sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri yang tidak dinyatakan secara spesifik untuk industri besar. Program-program terkait pengembangan sarana dan prasarana industri dirangkum pada Tabel 3.11. Sedangkan program-program yang spesifik terkait dengan pemberdayaan IKM dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Program Pemberdayaan Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
1	Peningkatan Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan penggunaan produk Kab. Cirebon pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Kab. Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan potensi barang impor yang dapat disubstitusi oleh PDN 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi PDN substitusi barang impor
2	Kerjasama International dalam Bidang Industri	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pasar internasional produk industri Kab. Cirebon melalui keikutsertaan dalam promosi internasional Membangun jaringan kerjasama Mendukung promosi investasi global untuk pengembangan industri di Kab. Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Kab. Cirebon untuk ikut aktif Mengembangkan konsep kolaborasi industri global (Industry 4.0) 	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan dan meningkatkan kemampuan (quality, cost, delivery) industri komponen dan jasa industri di Kab. Cirebon agar mampu berkontribusi pada jaringan rantai pasok global

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
3	Pemberdayaan Industri Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung peningkatan kompetensi auditor SIH di Kab. Cirebon Penyiapan dan pelaksanaan program 3R (reduce, reuse, recycle) pada industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kab. Cirebon Pembuatan kebijakan pemberian berbagai kemudahan bagi industri yang telah memenuhi standar hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program 3R dan pelaksanaan kebijakan industri hijau pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kab. Cirebon

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

Tabel 3.12 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
1	IKM dalam sentra	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku, kompetensi kerja, permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan teknologi tepat guna, pemasaran, dan peralatan produksi bersama Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM dengan industri besar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sertifikasi, peningkatan kualitas, desain, pemasaran, dan tanggung jawab lingkungan untuk memenuhi pasar ekspor
2	IKM unggulan di luar sentra	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi berbagai kemudahan yang didapatkan di dalam sentra Mendorong IKM untuk bergabung dalam sentra iKM Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kompetensi kerja dan permodalan
3	IKM non unggulan di luar sentra	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong IKM untuk bergabung dalam sentra IKM kecamatan Pemetaan rantai nilai dari komoditi yang ada untuk program hilirisasi Perencanaan dan inisiasi hilirisasi dari komoditi pilihan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku, kompetensi kerja, permodalan Mendorong hilirisasi dari komoditi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM dengan industri besar Penguatan hilirisasi dari komoditi yang ada

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.2 Kajian Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang terkait KPI Kabupaten Cirebon

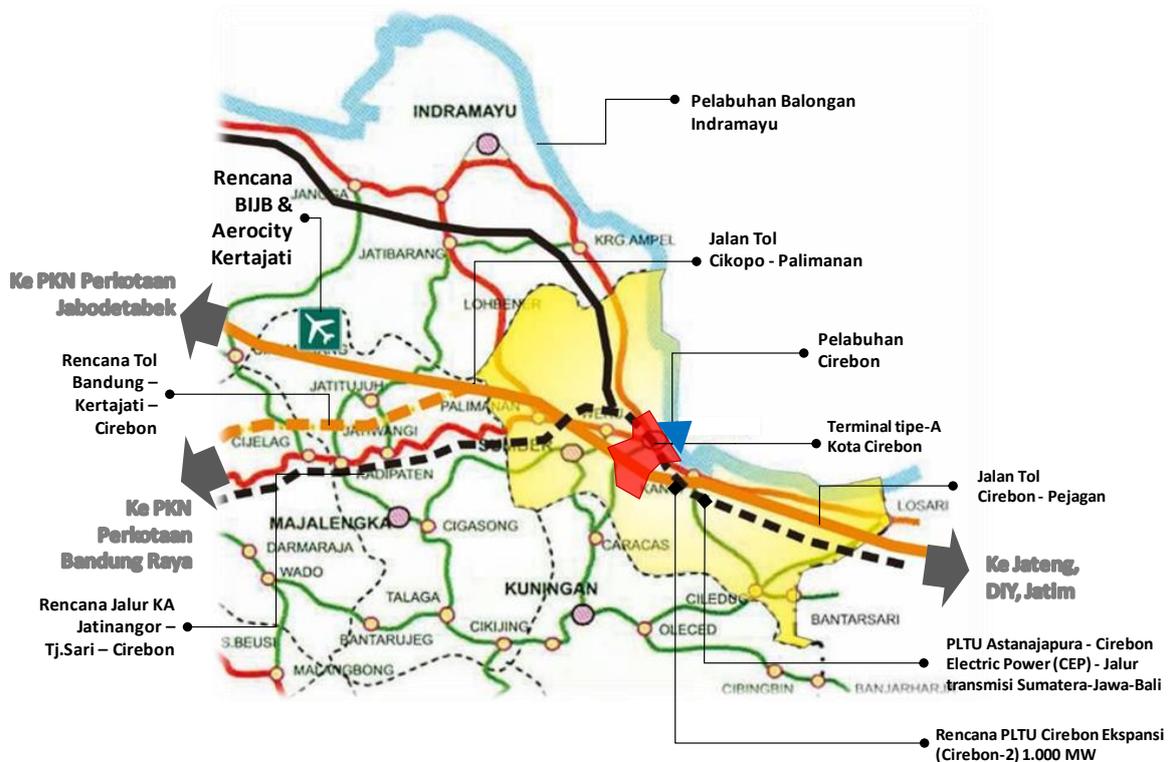
Beberapa dinamika perubahan kebijakan tata ruang wilayah yang akan berpengaruh terhadap penetapan KPI di Kabupaten Cirebon, diantaranya : (1) Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021; (2) Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Kawasan Rebana; (3) KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon

3.2.1 Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan 2021

Kebijakan yang memicu perkembangan investasi dan kegiatan perkotaan di koridor Cirebon-Patimban Kertajati Majalengka :

- ☉ Kebijakan perwilayahan industri melalui pengembangan WPPI (RIPIN 2015-2035)
- ☉ Proyek Strategis Nasional : Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol
- ☉ RTRWN : PKN Cirebon, PKW Indramayu, Kawasan Andalan Purwasuka dan Ciayumajaking
- ☉ Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Kemudahan Perijinan dan Investasi

Implikasi dari kebijakan nasional tersebut belum diantisipasi dalam konsep perubahan ruang baik struktur dan pola ruangnya



Gambar 3.4 Infrastruktur Strategis Pendorong Perkembangan Kawasan Timur Jawa Barat

Pengembangan Pelabuhan di Kabupaten Cirebon merupakan infrastruktur strategis yang menjadi salah satu pemicu perkembangan sektor industri di Kabupaten Cirebon. Rencana Pengembangan

Pelabuhan sebagai Hub Perhubungan penunjang Produksi dan Distribusi Industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, beberapa rencana pengembangan Pelabuhan yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, yaitu :

1. Pelabuhan Cirebon
 - hierarki: Pelabuhan Pengumpul (PP)
 - fungsi: angkutan laut dalam negeri; tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang; angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
2. Pelabuhan Muara Gebang, Astanajapura, Bondet, Gebangmekar, Kejawanan
 - Hierarki: Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL)
 - Fungsi : angkutan penumpang dan barang antar kabupaten/kota atau antar kecamatan; pengumpan terhadap pelabuhan pengumpul; moda transportasi untuk mendukung kehidupan masyarakat; tidak dilalui jalur laut reguler.



Gambar 3.5 Rencana Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Cirebon

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan nomor 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Berdasarkan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tahun 2021, terdapat beberapa arahan fungsi kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Kluster Industri di Kawasan Cirebon – Patimban – Kertajati, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Arahan Fungsi Kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Kluster Industri di Kawasan Cirebon - Patimban - Kertajati

KAWASAN	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	PUSAT PELAYANAN	TEMA	FUNGSI
KABUPATEN CIREBON					
KPI Cirebon	KPI	Ciledug	Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Pengembangan Kawasan Industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, pengolahan hotmix dan beton
		Lemahabang			
		Mundu			
		Greged			
		Astanajapura			
		Pangenan			
		Karangsembung			
		Gebang			
		Babakan			
		Losari			
Pabedilan					
Mertasinga	SIKM	Gunungjati	SIKM	SIKM Pangan	Olahan Kerang dan Rajungan
Trusmi Kulon	SIKM	Plered	SIKM	SIKM Sandang	Batik Tulis dan Cap
Tegalbugug	SIKM	Arjawinangun	SIKM	SIKM Sandang	Konveksi
Rawaurip	SIKM	Pangenan	SIKM	SIKM Kimia	Garam Krosok
Tegalwangi	SIKM	Weru	SIKM	SIKM Furniture	Meubel Rotan
Gempol	SIKM	Gempol	SIKM	SIKM Galian Bukan Logam	Kapur Tohor
Bobos	SIKM	Dukupuntang	SIKM	SIKM Galian Bukan Logam	Batu Alam
Sumber	Kawasan Perkotaan	Sumber	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan vokasi, kesehatan
Arjawinangun	Kawasan Perkotaan	Arjawinangun	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan
Palimanan	Kawasan Perkotaan	Palimanan	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan
Galmantro	Kawasan Perdesaan	Weru	Pusat Kaperdes - Desa Tegalwangi	Kampung Wisata Rotan	Penghasil kerajinan rotan dan meubelair
Gempol	Kawasan Perdesaan	Gempol	Pusat Kaperdes - Desa Cikeusal	Agrowisata	Penghasil komoditas utama buah-buahan dan Jamur

Sumber : Lampiran Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021

Di dalam Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tahun 2021, terdapat Rencana aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi.

Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program rencana aksi adalah :

1. Mengembangkan KPI, Kota Baru, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan
2. Mengembangkan sistem rantai logistik terintegrasi antara industri besar dan IKM

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi

NO	PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN										KEMENTERIAN/ LEMBAGA	SUMBER DANA	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Pembangunan Interchange Akses Tol Cipali (Subang KM109 - Patimban)	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
2	Pembangunan Jalan Tol Cipali - Palasah - Jatibarang	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
3	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - Aerocity	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
4	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian Perhubungan	APBN
5	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
6	Peningkatan kelas Jalan Sarengseng - Pabuaran	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
7	Peningkatan kelas Jalan Cipeundeuy - Pabuaran	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
8	Peningkatan status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional	Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang												Kementerian PUPR	APBN
9	Peningkatan Jalan Conggeang - Ujungjaya	Kec. Conggeang, Kec. Ujungjaya												Kementerian PUPR	APBN
10	Peningkatan Jalan Ujungjaya - Palasah	Kec. Ujungjaya												Kementerian PUPR	APBN
11	Peningkatan Ruas Jalan Cisumur-Nanggerang/ Kab Subang	Kab. Sumedang, Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
12	Peningkatan Jalan Burujul - Sanca	Kab. Sumedang, Kab. Indramayu												Kementerian PUPR	APBN
13	Peningkatan Jalan Lebaksiuh - Kadu	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
14	Pembangunan Ruas Jalan Cijurey-Darmawangi	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
15	Pelebaran jalan kabupaten (pusakanagara - patimban)	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
16	Peningkatan kelas Jalan Pusakanagara - Tanjung	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
17	Peningkatan kelas Jalan Kamarung - Tanjung	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
18	Pembangunan Jalan Jatitujuh - Ligung	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
19	Pelebaran Jalan Cigasong - Maja	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN



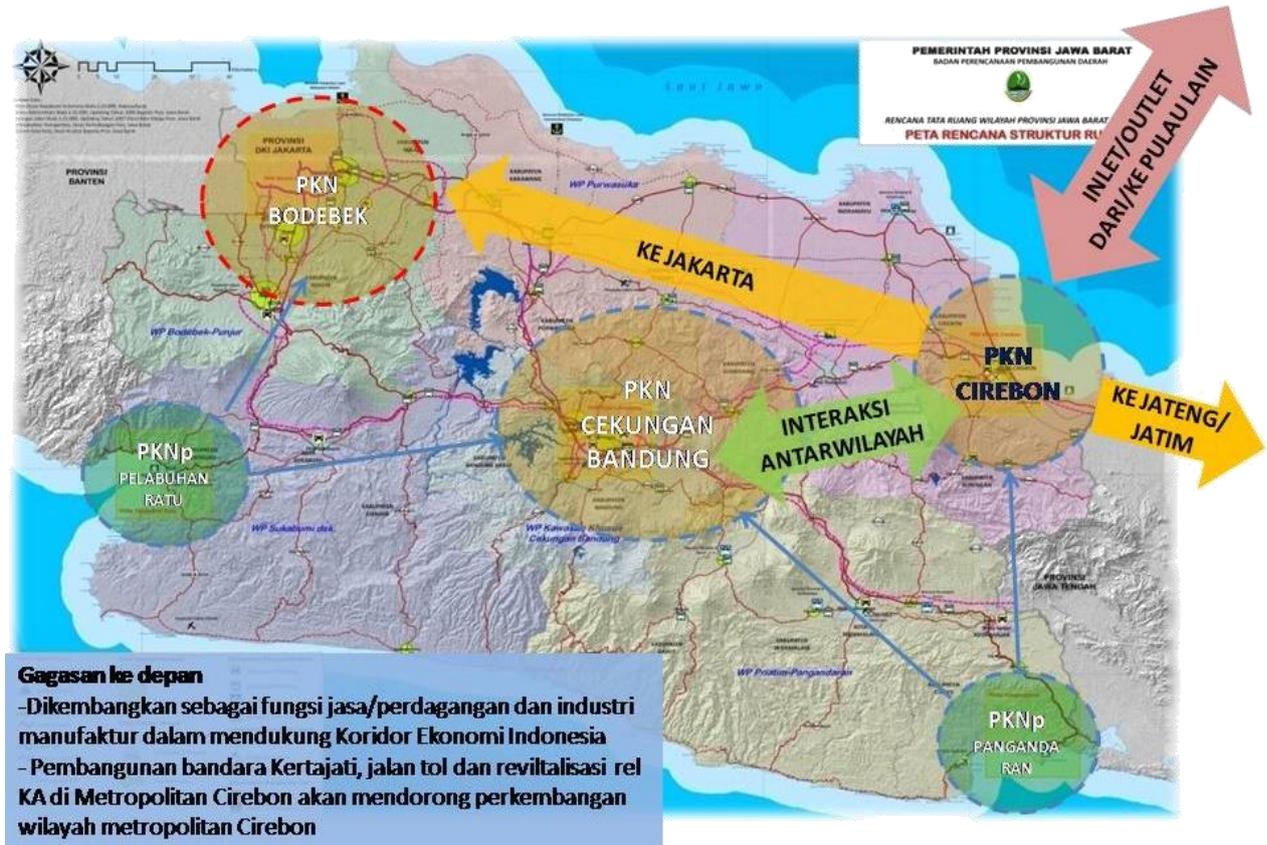
NO	PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN										KEMENTERIAN/ LEMBAGA	SUMBER DANA	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
20	Pembangunan Rel KA Rancaekek - Tanjungsari - Akses Bandara Kertajati	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
21	Reaktivasi Rel KA (Kota Cirebon - Kadipaten Kab. Majalengka)	Kab. Cirebon, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
22	Pembangunan Rel KA Subang - Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian Perhubungan	APBN
23	Pembangunan Rel KA (Jatibarang - Kertajati) Kab. Indramayu	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
24	Pembangunan Rel KA Subang-Kertajati	Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
25	Pembangunan SMK dan Sekolah Tinggi Maritim dan Logistik	Kec Pusanagara, Kab. Subang												Kemen. Pendidikan dan Kebudayaan	APBN
26	Pembangunan gardu induk Patimban, Cibogo, Sukamandi-Haurgeulis, Indramayu, Kadipaten	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
27	Pembangunan SUTT	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
28	Pembangunan pembangkit listrik	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
29	Pembangunan Rumah Susun Pekerja	13 KPI												Kementerian PUPR	APBN
30	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang.												Kementerian PUPR	APBN
31	Pembangunan waduk untuk mendukung air baku kegiatan industri	Cipunagara, Kab. Subang; Sadawarna, Kab. Subang; Kadumalik, Kab. Majalengka; Cilame; Cipanas, Kab. Sumedang												Kementerian PUPR	APBN
32	Pengembangan IPLT	13 KPI												Kementerian PUPR	APBN
33	Peningkatan Skema Pembiayaan HAKI, Modal Ventura, dan Hibah untuk industri kreatif	Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu												Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN
34	Penyelenggaraan event business meeting dan promosi Kawasan	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN

Sumber : Lampiran Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021

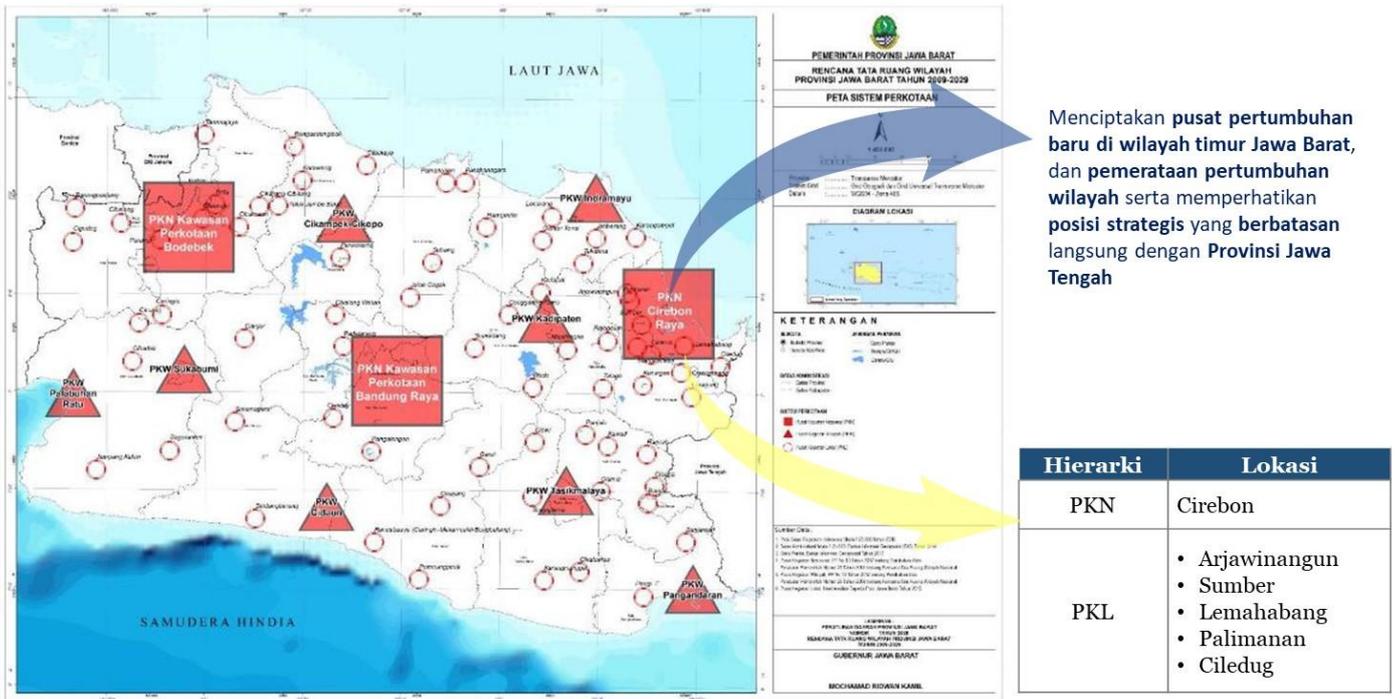
3.2.2 Revisi RTRWP dan Arah Pengembangan Kawasan Rebana

3.2.2.1 Revisi RTRWP dan Arah Pengembangan Wilayah Ciayumajakuning

Revisi RTRW membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kawasan Peruntukan Industri pada khususnya. Salah satu point penting dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon yaitu adanya upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Jawa Barat, dan pemerataan pertumbuhan wilayah serta memperhatikan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.6 Arah Pengembangan Wilayah Metropolitan Cirebon



Gambar 3.7 Pengembangan Peran Wilayah Timur Jawa Barat

Beberapa prinsip akomodasi Kawasan Peruntukan Industri di dalam Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. RTRW Provinsi Jawa Barat mengakomodir seluruh kebijakan yang berfungsi lindung maupun budidaya.
2. Rencana Pola Ruang Provinsi mengutamakan daya dukung lingkungan sebagai informasi bagi penyusun Kebijakan, dan penerapan Pembangunan yang Berkelanjutan.
3. Luas KPI pada Rencana Pola Ruang Provinsi yang clear dari fungsi lindung (Kawasan Hutan, Rawan Bencana, Resapan Air, Perlindungan Geologi, KP2B) : 86,531,6 Ha
4. Untuk deliniasi KPI yang tidak ditetapkan dalam RTRW Provinsi diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan menerapkan Ketentuan Zonasi terkait fungsi lindungnya.
5. Luas usulan KPI Kabupaten/Kota yang tumpang tindih dengan peruntukan lain:

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari dukungan infrastruktur. Beberapa arahan kebijakan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah Jawa Barat berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah

No	Jenis Prasarana / Sarana	Lokasi	Keterangan
1	Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Cirebon	
2	Jalur KA Antar Kota	Bandung – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon	
3	Jalur KA Perkotaan	Kadipaten – Cirebon	
4	Pelabuhan Sungai	Kabupaten Cirebon	Sesuai dengan Kepmenhub 432/2017 tentang RIPN
5	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten Cirebon	

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat

Pengembangan sistem jaringan transportasi mempermudah konektivitas wilayah untuk perolehan bahan baku maupun untuk distribusi hasil produksi serta menjadi Peluang pengembangan industri pengolahan dan IKM.

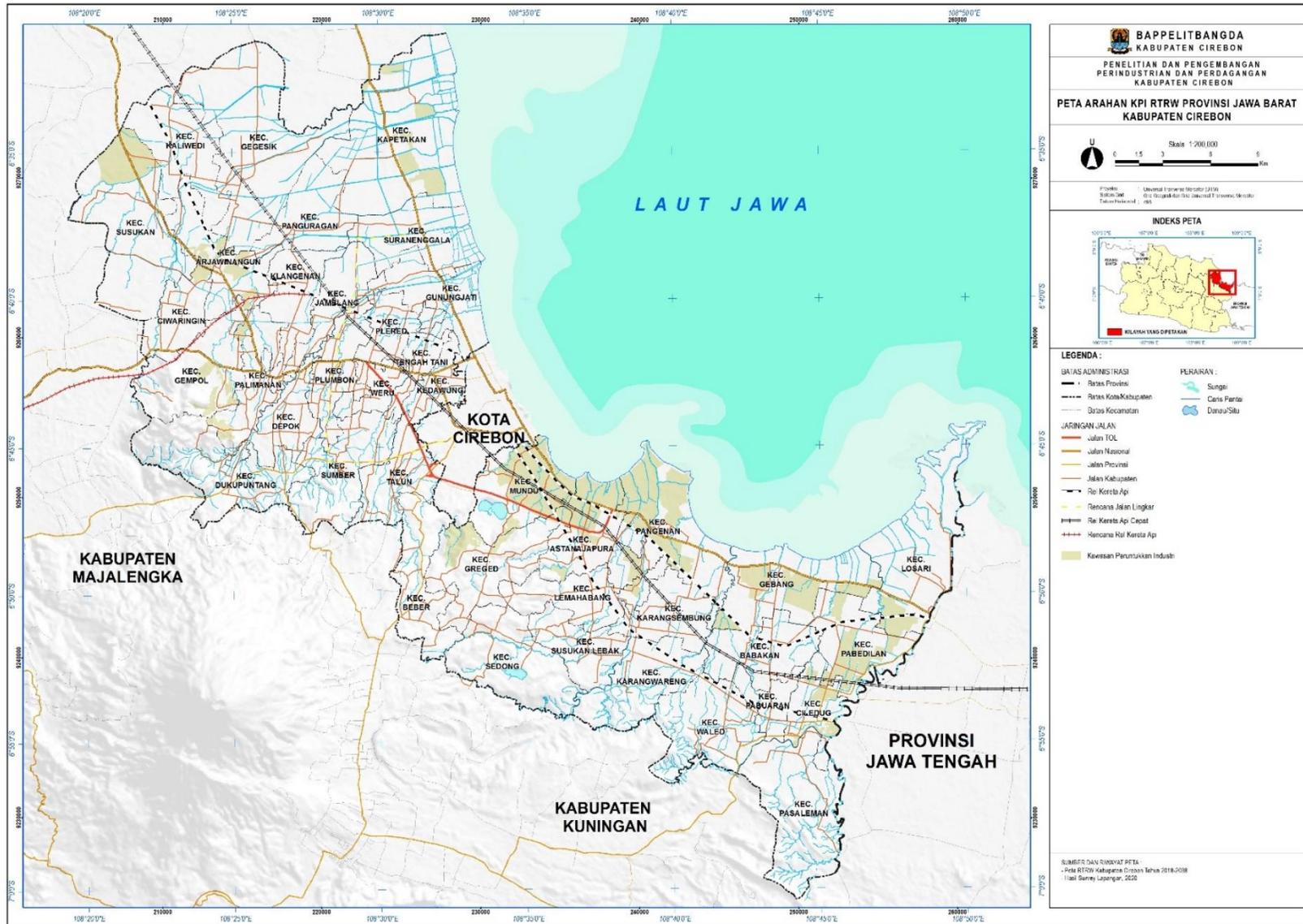
Beberapa arahan pengembangan infrastruktur wilayah lainnya berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.16 Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Wilayah

No	Sistem Infrastruktur Wilayah	Jenis Jaringan Infrastruktur	Lokasi / Keterangan
1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pipa minyak Jaringan pipa gas Sumur gas 	Kab. Cirebon
2	Pembangkit Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 	
3	Jaringan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Embung 	
		<ul style="list-style-type: none"> Air Tanah Dalam (CAT) 	<ul style="list-style-type: none"> CAT Sumber-Cirebon CAT Lintas Provinsi Tegal-Brebes
4	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede) 	Kab. Cirebon - Kab. Kuningan
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> SPALD Ciayumajakuning 	Kec. Gunungjati (PSP)
6	Sistem Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Cirebon Solid Waste Treatment Plant (PSP) Kec. Gempol dan Kec. Ciwaringin

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat

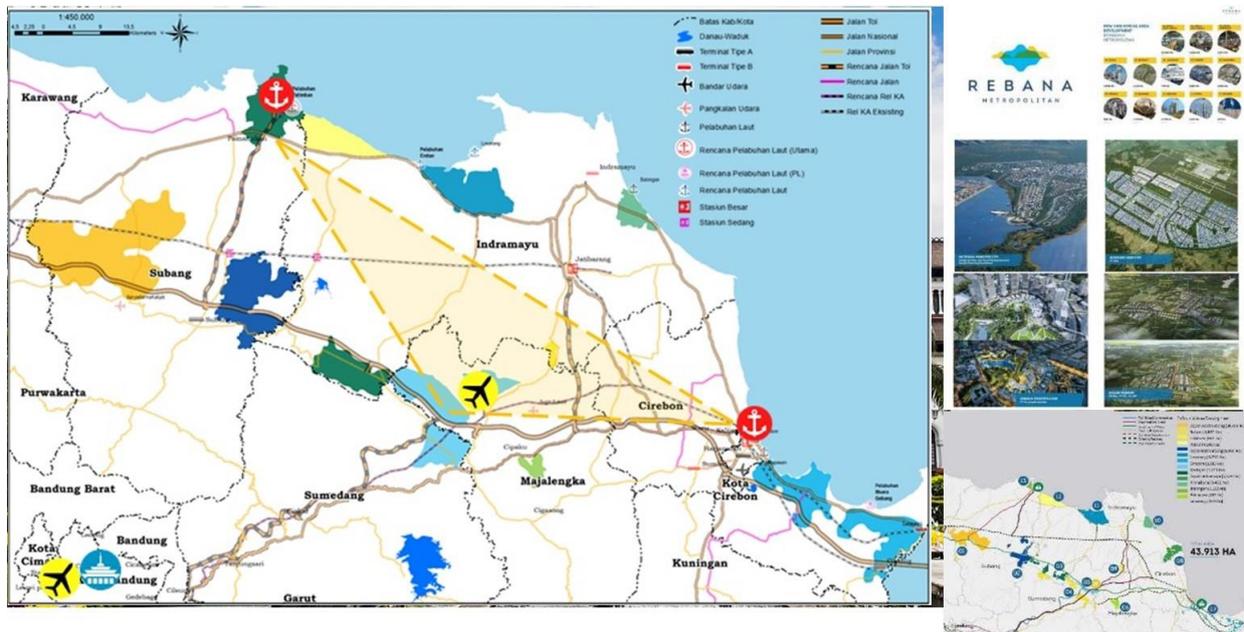
Pada peta berikut ini diperlihatkan arahan lokasi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon berdasarkan revisi RTRW Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.8 Peta Arahkan KPI Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat

3.2.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana

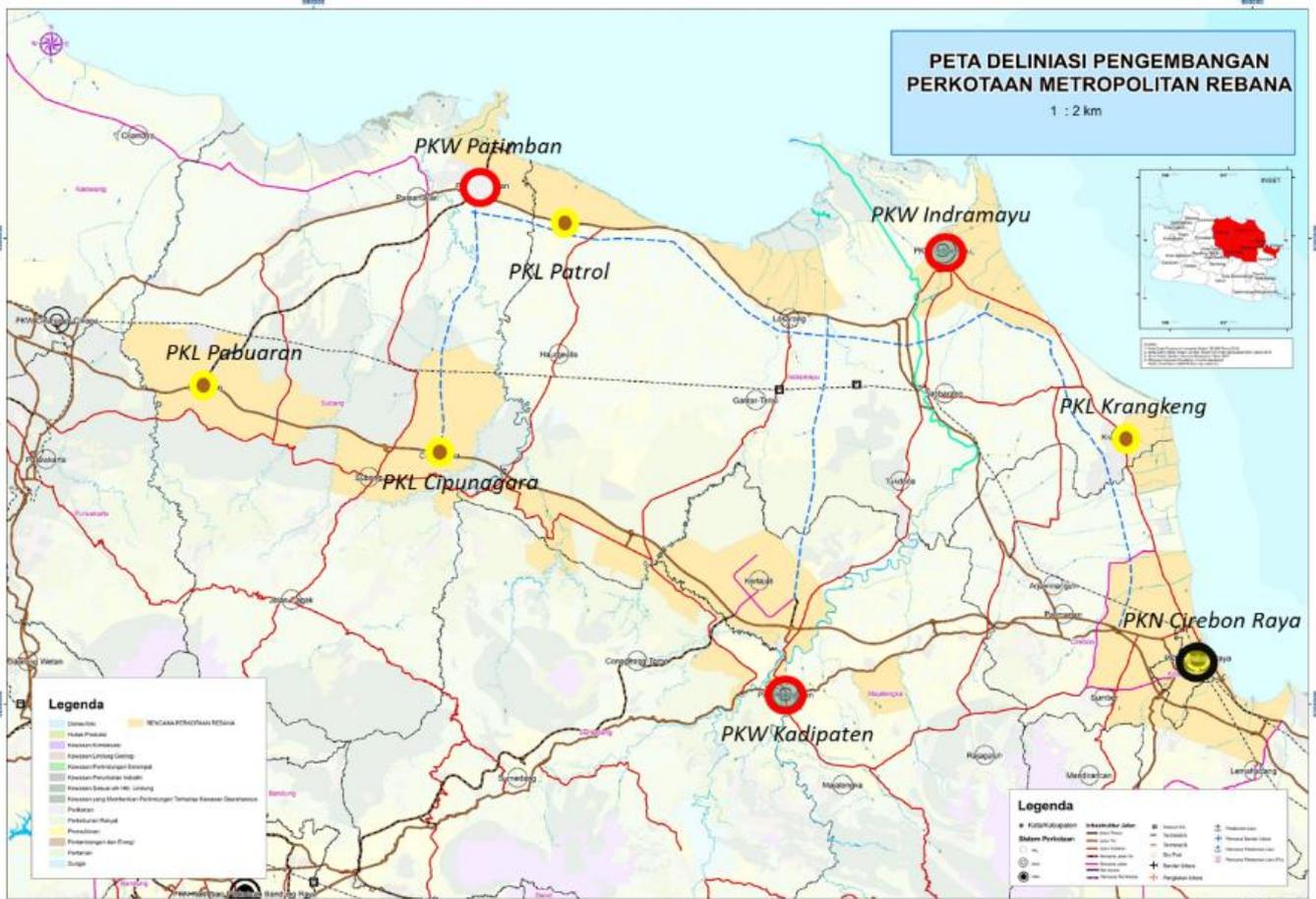
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon Patimban Kertajati, Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan pinggiran perkotaan di Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.



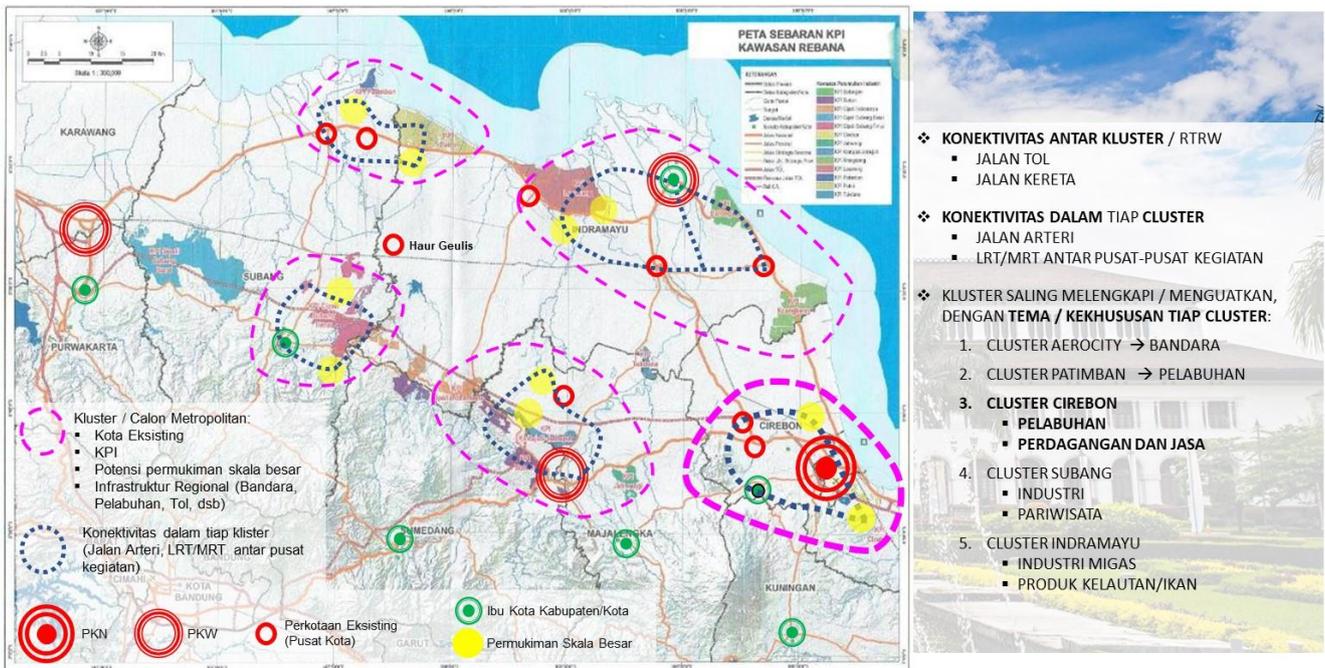
Gambar 3.9 Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun konsep pengembangan kawasan Metropolitan Rebana agar pengembangan kawasan berbasis industri tidak sporadis dan memiliki tema ecoindustry, serta menata pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ke dalam Pengembangan Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat mengadopsi Konsep *Multi-Nodal*, dimana Kota Cirebon sebagai Kota Inti (*City-centered*), Kawasan Patimban dan Kertajati sebagai Simpul Kawasan Perkotaan (*Urban-Nodes*) yang terhubung oleh infrastruktur, serta terhubung pula dengan Kawasan perkotaan lain yang koheren dan terintegrasi.”





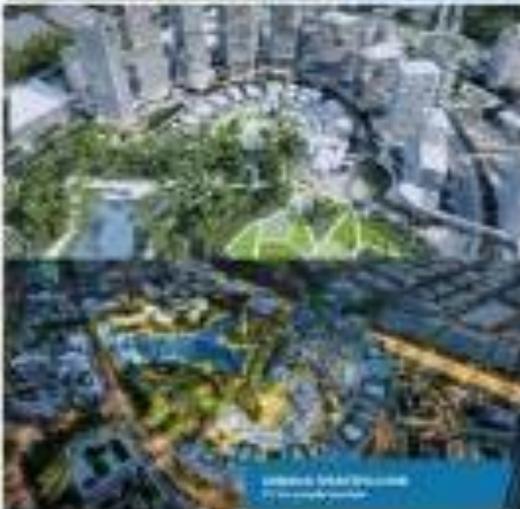
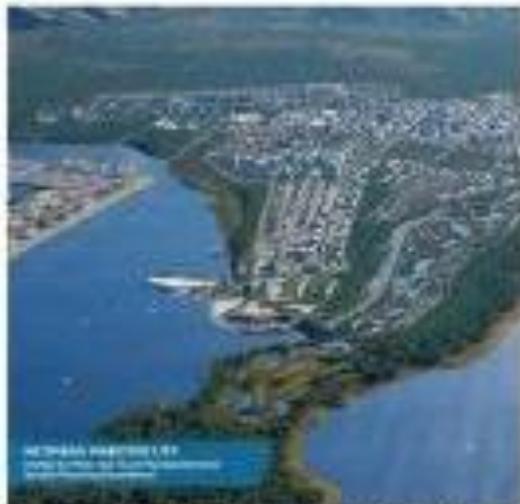
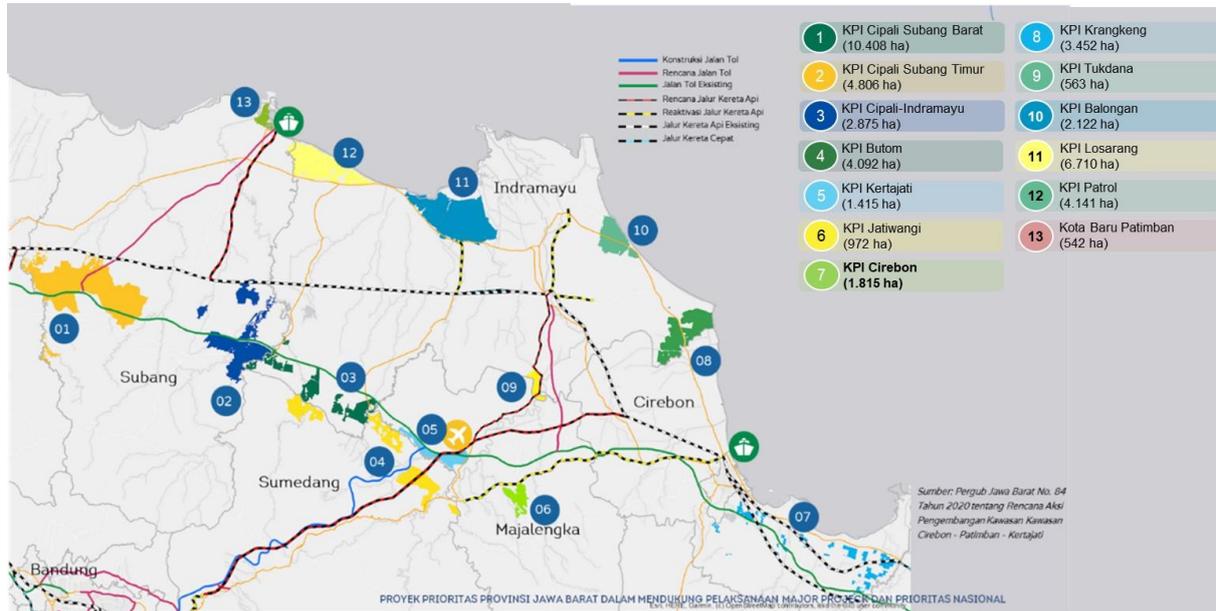
Gambar 3.10 Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan Rebana

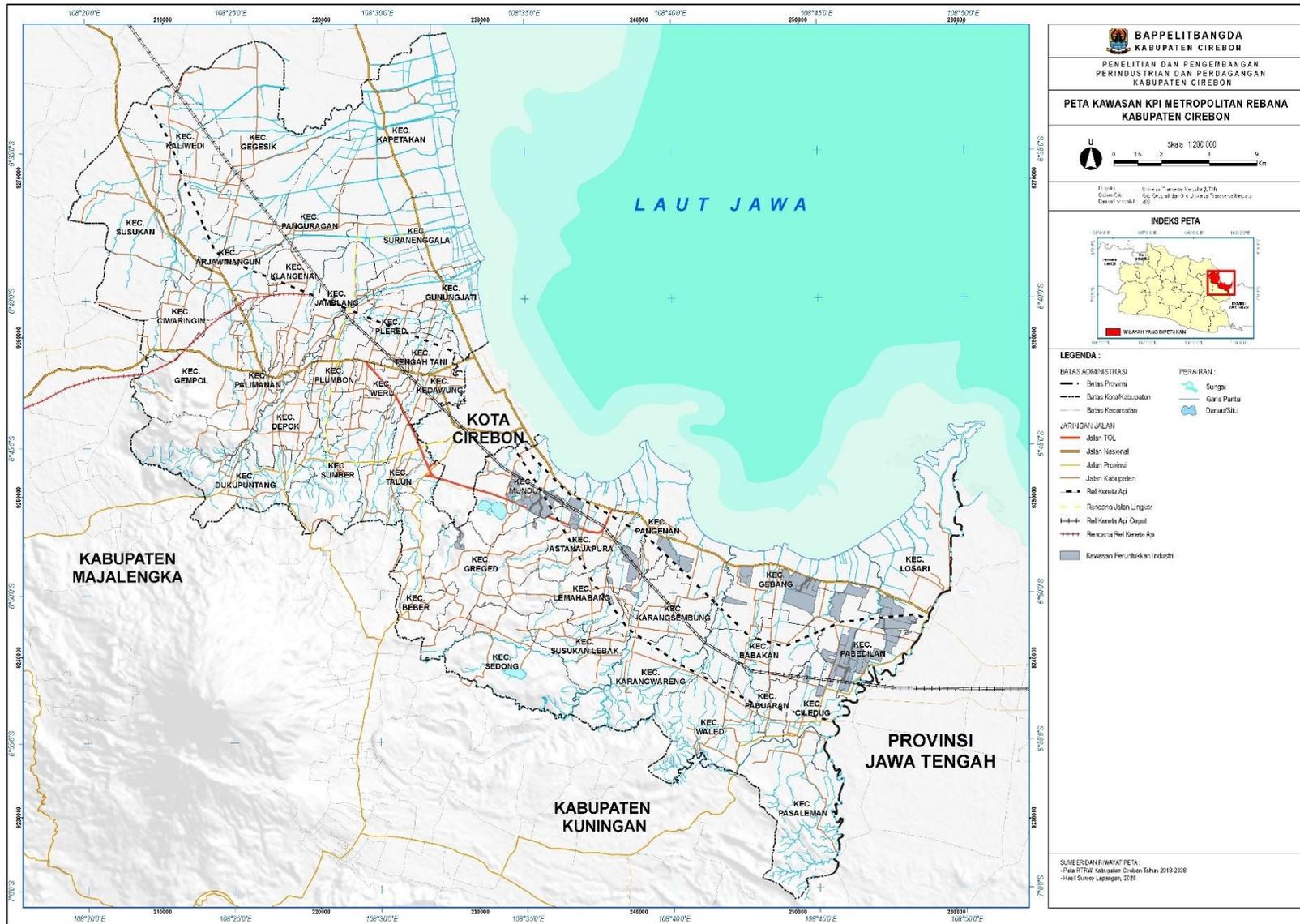


Gambar 3.11 Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA



Rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dalam Kawasan Metropolitan Rebana, dialokasikan sebesar 43.913 Ha yang tersebar di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Cirebon dengan alokasi luas sebesar 1.815 Ha.





Gambar 3.12 Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Rebana

3.2.3 KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon

RTRW Kabupaten Cirebon telah dimutakhirkan melalui proses Peninjauan Kembali (PK) dan telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018.

3.2.3.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
3. Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi:
 - a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
4. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembanaan pasca pertanian.

6. Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.
7. Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
8. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
9. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
 - b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
10. Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.
11. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.
12. Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
13. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.
14. Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.
15. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2.3.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Selengkapnya rencana Sistem Kota di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut

Tabel 3.17 Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon

No	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Fungsi Utama dan Penunjang
PKL CILEDUG				
1	PKL	Ciledug (Pusat)	1,325	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Losari (Sub Pusat)	3,907	Fungsi Penunjang: Perikanan, Perdagangan hasil pertanian, Industri, Pergudangan, Pelabuhan Intra Seluler, Perumahan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pariwisata, Pertambangan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Babakan	2,193	
4	PPL	Pabuaran	0,895	
5	PPL	Waled	2,846	
6	PPL	Pabedilan	2,408	
7	PPL	Gebang	3,168	
8	PPL	Pasaleman	3,211	
TOTAL LUAS PKL			19,953	
PKL LEMAH ABANG				
1	PKL	Lemahabang (Pusat)	2,149	Fungsi Utama: Industri Manufaktur
2	PKLp	Astanajapura (Sub Pusat)	2,547	Fungsi Penunjang: Industri, Pertanian, Perumahan, Pariwisata, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pertambangan, Pendidikan Kejuruan, Industri Hasil Hutan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Karangsembung	1,514	
4	PPL	Pangenan	3,054	
5	PPL	Sedong	3,102	
6	PPL	Susukan Lebak	1,874	
7	PPL	Mundu	2,558	
8	PPL	Karangwareng	2,312	
TOTAL LUAS PKL			19,110	
PKL SUMBER				
1	PKL	Sumber (Pusat)	2,565	Fungsi Utama: Pemerintahan, Perdagangan, Jasa
2	PKLp	Weru (Sub Pusat)	0,919	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pendidikan Tinggi, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perikanan Budidaya, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pertambangan, Fungsi PKN
3	PPK	Kedawung	0,958	
4	PPL	Greged	2,992	
5	PPL	Plered	1,134	
6	PPL	Tengah tani	0,897	
7	PPL	Talun	2,121	
8	PPL	Beber	2,325	
9	PPL	Gunungjati	1,7	
TOTAL LUAS PKL			15,611	
PKL PALIMANAN				
1	PKL	Palimanan (Pusat)	1,718	Fungsi Utama: Industri
2	PKLp	Plumbon (Sub Pusat)	1,819	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pariwisata, Agrowisata, Pertanian, Industri Batualam, Pertambangan, Perikanan Budidaya, Pendidikan Kejuruan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Klangenan	2,057	
4	PPL	Jamblang	1,776	
5	PPL	Gempol	3,073	
6	PPL	Depok	1,555	
7	PPL	Dukupuntang	3,64	
TOTAL LUAS PKL			15,638	
PKL ARJAWINANGUN				
1	PKL	Arjawinangun (Pusat)	2,411	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Kapetakan (Sub Pusat)	6,02	Fungsi Penunjang : Perikanan Tangkap, dan Budidaya, Agrowisata, Industri, Pendidikan Tinggi, Pelayanan Sosial-Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Gegesik	6,038	
4	PPL	Kaliwedi	2,782	
5	PPL	Susukan	5,01	
6	PPL	Panguragan	2,031	
7	PPL	Suranenggala	2,653	
8	PPL	Ciwaringin	1,779	
TOTAL LUAS PKL			28,724	
KABUPATEN CIREBON			99,036	

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Fungsi utama dan penunjang untuk PKL Sumber yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi. Dalam rencana sistem jaringan prasarana RTRW Kabupaten Cirebon terkait Kecamatan Sumber meliputi :

- Pengoptimalan jalan Kolektor Primer 2 (KP2) ruas Sumber - Majalengka, ruas Sumber - Kalitanjung, ruas Plered - Sumber dan ruas Sumber - Mandirancan.
- Peningkatan terminal penumpang Tipe-B di Kecamatan Sumber;
- Rencana jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi :
 - ✓ Sumber - Sindangjawa - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;
 - ✓ Sumber - Plered (Terminal Weru);
 - ✓ Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kramat;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat;
 - ✓ Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;
- Rencana jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Kecamatan Sumber.

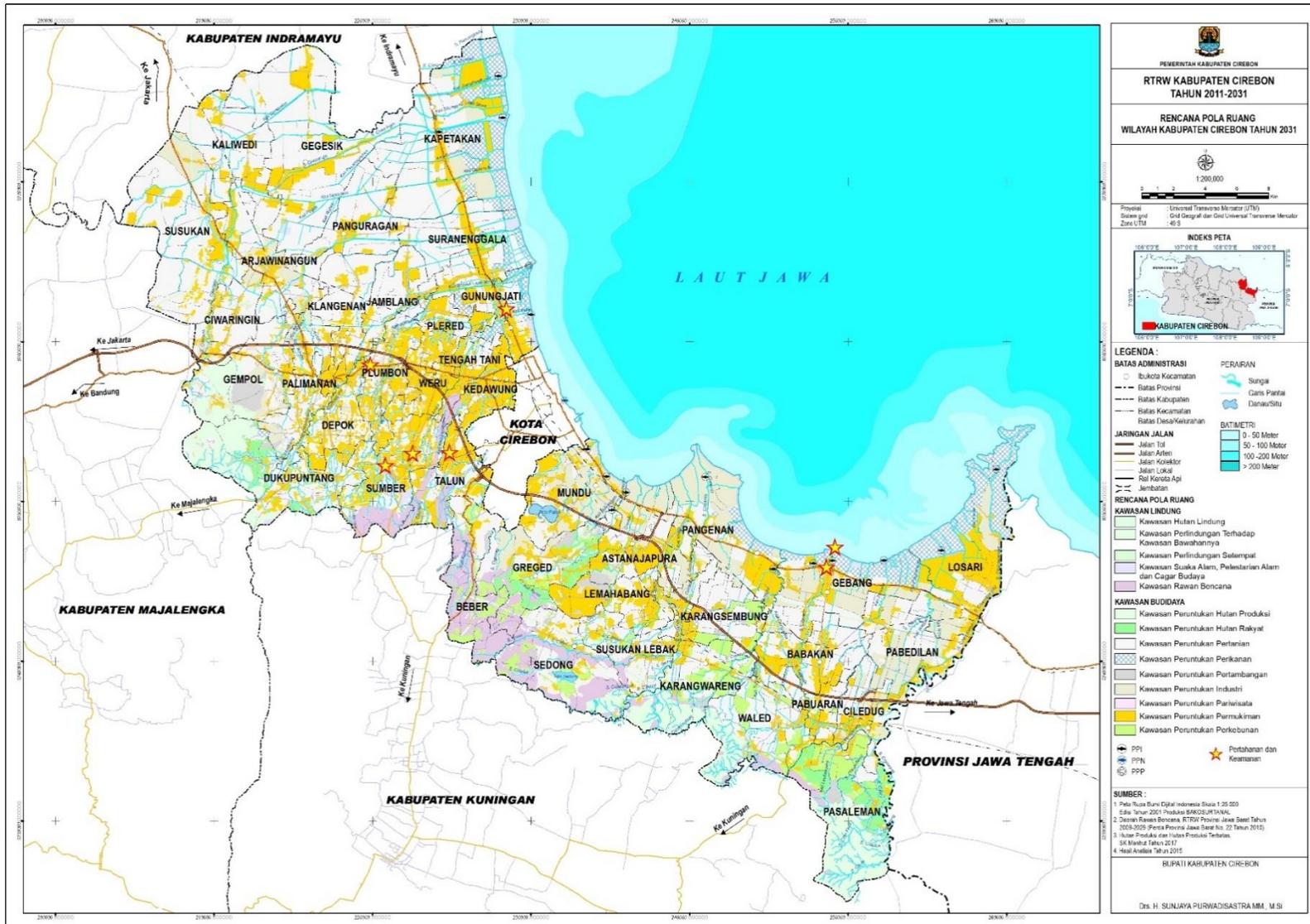


Gambar 3.13 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

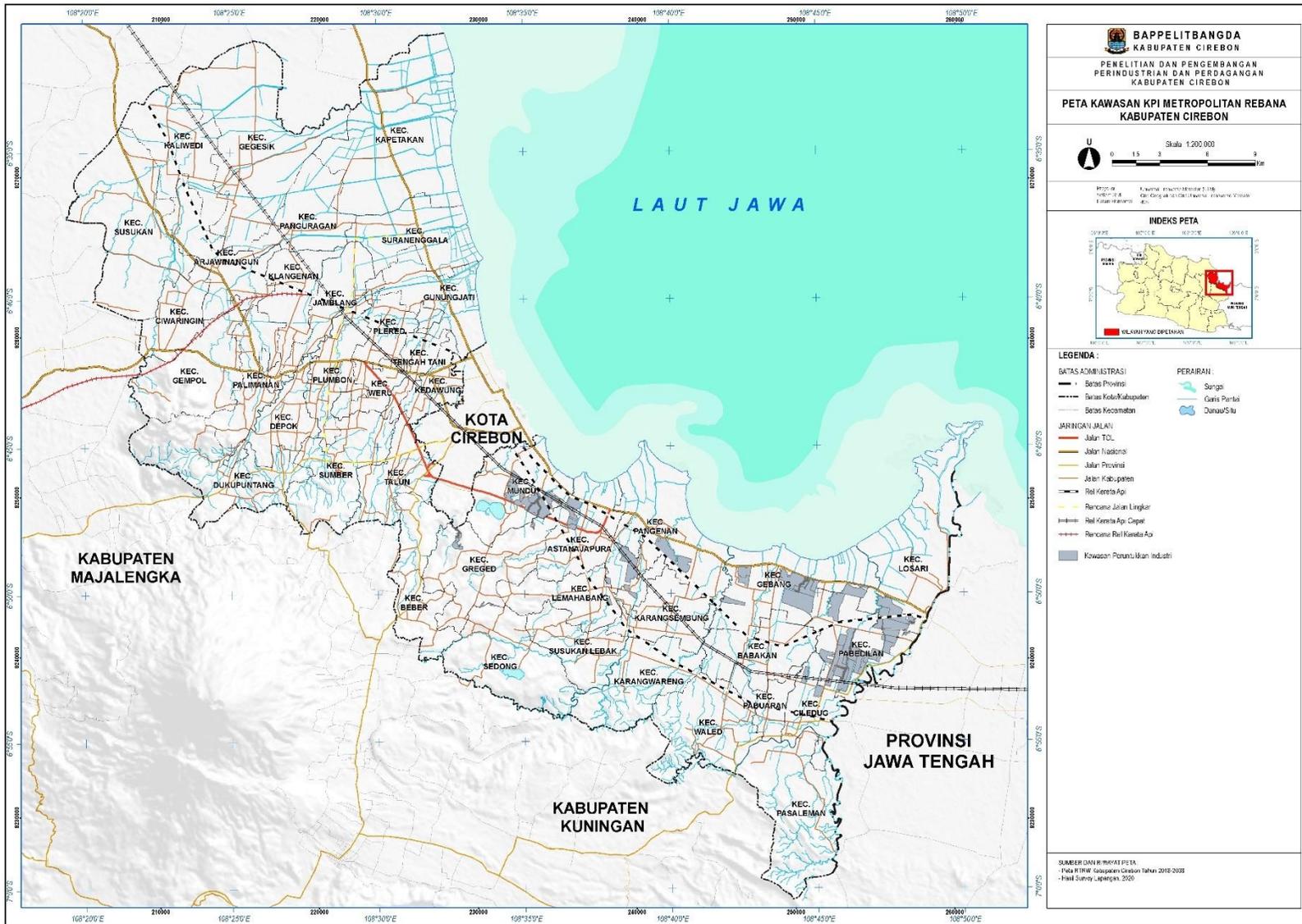
3.2.3.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon meliputi :

- Rencana kawasan lindung meliputi :
 - ✓ Rencana kawasan sempadan sungai kurang lebih 20 (duapuluh) hektar.
 - ✓ Kawasan mata air berada di Desa Sidawangi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
 - ✓ Ruang Terbuka Hijau Publik 20% (dua perseratus) terdiri atas :
 - RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - taman kota;
 - hutan kota; dan
 - sabuk hijau (green belt)
 - RTH jalur hijau jalan terdiri atas :
 - pulau jalan dan median jalan;
 - jalur pejalan kaki; dan
 - ruang di bawah jalan layang.
 - RTH fungsi tertentu terdiri atas :
 - RTH sempadan rel kereta api;
 - jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - RTH sempadan sungai;
 - RTH sempadan pantai;
 - RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - lapangan olahraga; dan
 - pemakaman.
 - ✓ Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu di Desa Sidawangi.
 - ✓ Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.
 - ✓ Taman suaka margasatwa kera Plangon (Desa Babakan Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar).
- Rencana kawasan budidaya meliputi :
 - ✓ Hutan produksi terbatas (HPT) dikelola oleh KPH Kuningan dan KPH Majalengka, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan hutan rakyat di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman tahunan, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ kawasan permukiman perkotaan yang menjadi PKL
 - ✓ Kawasan Militer Angkatan Darat.
 - ✓ Kawasan peruntukan Pendidikan Tinggi.
 - ✓ Kawasan peruntukan rumah sakit.



Gambar 3.14 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon



Gambar 3.15 Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon



**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

4

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON



4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada 6°30'58"–7°00' 24" Lintang Selatan dan 108°19'30"–108°50'03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai wilayah seluas ± 990,36 km², yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan.

Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Cirebon mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil. Berdasarkan hal tersebut maka luas perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 399.6 km² (54 km x 4 mil x 1.85 km).

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa;
- ☐ Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan;
- ☐ Sebelah Barat : kabupaten Majalengka ;
- ☐ Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Panganan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-



No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.2 Kondisi Topografi

Ketinggian di Kabupaten Cirebon terdapat 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 83.826,31 Ha;
2. Wilayah dengan ketinggian > 25-100 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 6.691,54 Ha;
3. Wilayah dengan ketinggian > 100-200 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 10.055,01 Ha;
4. Wilayah dengan ketinggian > 200-300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 5.365,78 Ha;
5. Wilayah dengan ketinggian >300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 3.264,15 Ha.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.654,84	133,65	102,59	0	0	2.891,08
3	Babakan	2.218,13	0	0	0	0	2.218,13
4	Beber	0	72,17	1.133,61	1.346,35	2.462,53	5.014,66
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.867,64	44,21	9,69	0	0	1.921,54
7	Depok	1.308,67	329,61	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	12,26	1.244,81	1.200,07	608,1	516,94	3.582,18
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	1.600,25	338,23	953,17	192,79	12,55	3.096,99
12	Greged	351,25	339,74	1.459,25	1.024,58	46,49	3.221,31
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,88	0	0	0	0	1.658,88
15	Kaliwedi	2.871,12	0	0	0	0	2.871,12
16	Kapetakan	6.660,36	0	0	0	0	6.660,36
17	Karangsembung	1.881,81	0	0	0	0	1.881,81
18	Karangwareng	2.082,85	1,33	649,38	0	0	2.733,56
19	Kedawung	1.117,38	0	0	0	0	1.117,38
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	2.042,44
21	Emahabang	1.162,49	390,13	706,14	6,14	0	2.264,90

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	2.441,69	272,28	25,46	0	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,23	0	0	0	0	957,23
26	Palimanan	1.506,23	247,73	154,53	3,38	0	1.911,87
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,91	0	0	0	0	2.199,91
29	Pasaleman	2.409,59	906,02	168,83	0	0	3.484,44
30	Plered	1.322,93	0	0	0	0	1.322,93
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	234,71	290,2	1.373,94	1.544,48	225,63	3.668,96
33	Sumber	1.030,22	583,55	775,43	585,39	0	2.974,59
34	Suranenggala	2.574,75	0	0	0	0	2.574,75
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	626,83	396,05	781,95	0	0	1.804,83
37	Talun	657,77	654,98	560,96	54,58	0	1.928,29
38	Tengah Tani	976,18	0	0	0	0	976,18
39	Waled	2.514,81	446,84	0	0	0	2.961,65
40	Weru	911	0	0	0	0	911,00
Kabupaten Cirebon		83.826,51	6.691,53	10.055,00	5.365,79	3.264,14	109.202,97

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kemiringan lereng di Kabupaten Cirebon terdiri dari 6 (enam) kelas, yaitu: 0-3 %, >3-8 %, > 8-15 %, >15-25 %, 25-40 % dan > 40%. Dominasi kemiringan paling luas adalah 0-3 % mencapai 87.961,65 Ha, sedangkan kelas kemiringan > 40 % 91,15 Ha hanya terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Dukupuntang 1.350,25 Ha, Kecamatan Gempol 59,74 Ha dan Kecamatan Palimanan 31,41 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.512,62	378,47	0	0	0	0	2.891,09
3	Babakan	2.218,15	0	0	0	0	0	2.218,15
4	Beber	104,52	441,16	866,41	489,63	650,4	0	2.552,12
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.921,54	0	0	0	0	0	1.921,54
7	Depok	1.638,28	0	0	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	1.733,02	114,45	98,01	0	286,45	1.350,25	3.582,19
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	2.548,92	0	0	0	488,32	59,74	3.096,99
12	Greged	886,19	758,63	417,4	913,8	245,28	0	3.221,30
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,89	0	0	0	0	0	1.658,89
15	Kaliwedi	2.871,13	0	0	0	0	0	2.871,13
16	Kapetakan	6.660,37	0	0	0	0	0	6.660,37
17	Karangsembung	1.877,26	0	0	4,54	0	0	1.881,80
18	Karangwareng	1.447,92	539,37	251,42	410,57	84,26	0	2.733,54
19	Kedawung	1.073,72	0	43,65	0	0	0	1.117,37
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	0	2.042,44

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
21	Lemahabang	1.129,82	749,89	13,94	371,25	0	0	2.264,90
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	1.597,17	787,73	0	275,33	79,2	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,24	0	0	0	0	0	957,24
26	Palimanan	1.859,86	0	0	0	20,61	31,41	1.911,88
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,90	0	0	0	0	0	2.199,90
29	Pasaleman	2.805,16	0	0	570,69	108,6	0	3.484,45
30	Plered	1.322,90	0	0	0	0	0	1.322,90
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	14,06	434,47	1.478,44	598,69	917,65	0	3.443,31
33	Sumber	2.604,63	168,99	200,97	0	0	0	2.974,60
34	Suranenggala	2.574,74	0	0	0	0	0	2.574,74
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	469,41	275,64	448,47	219,88	391,43	0	1.804,83
37	Talun	688,55	812,44	264,26	104,37	58,64	0	1.928,26
38	Tengah Tani	910,88	0	65,32	0	0	0	976,2
39	Waled	2.804,04	0	0	157,6	0	0	2.961,64
40	Weru	856,03	0	55	0	0	0	911,03
Kabupaten Cirebon		87.961,65	5.461,24	4.203,29	4.116,35	3.330,84	91,15	106.514,80

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.3 Kondisi Morfologi Wilayah

Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Cirebon terdiri dari satuan morfologi dataran dan satuan morfologi pegunungan dan perbukitan. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, serta membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Sedangkan satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar atau sedikit bergelombang.

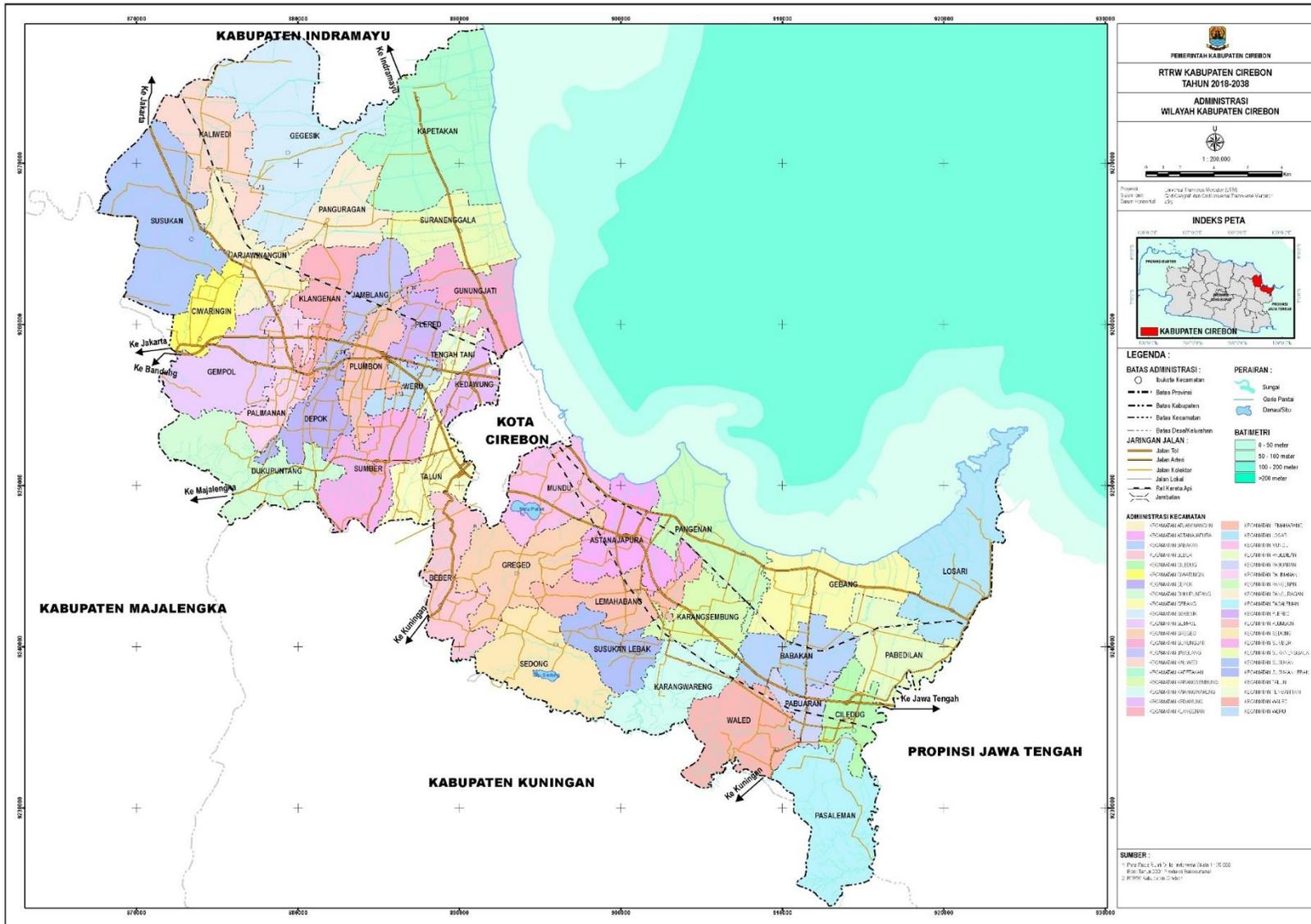
Secara lebih rinci satuan morfologi di wilayah Kabupaten Cirebon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Sub satuan morfologi datar adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar dengan kisaran kelas lereng 0-2%;
- Sub satuan morfologi datar dan sedikit bergelombang dengan kisaran kelas lereng lebih dari 2-15%;
- Sub satuan morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 15-25% dan memperlihatkan relief halus;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar lebih dari 25-40% dan memperlihatkan relief sedang;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan pegunungan terjal dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

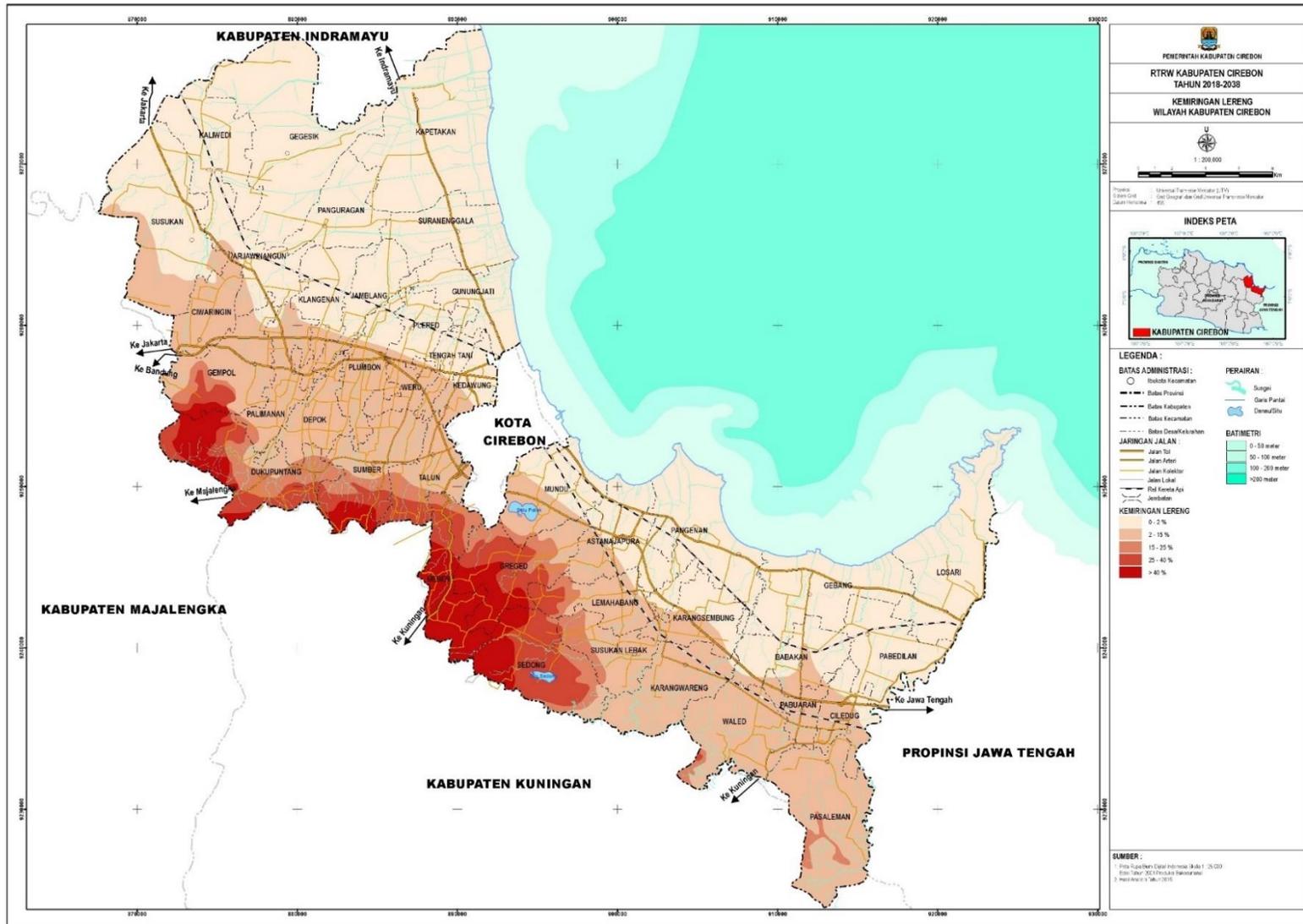
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/Perbukitan	Datar	Gunung/Pegunungan dan Bukit	
1	Arjawinangun	0	2429	0	2.429,04
2	Astanajapura	0	2891	0	2.891,09
3	Babakan	0	2218	0	2.218,15
4	Beber	490	1412	650	2.552,12
5	Ciledug	0	1461	0	1.460,93
6	Ciwaringin	0	1922	0	1.921,54
7	Depok	0	1638	0	1.638,28
8	Dukupuntang	0	1945	1637	3.582,19
9	Gebang	0	3544	0	3.544,22
10	Gegesik	0	6410	0	6.409,90
11	Gempol	0	2549	548	3.096,99
12	Greged	914	2062	245	3.220,55
13	Gunungjati	0	2246	0	2.245,55
14	Jamblang	0	1659	0	1.658,89
15	Kaliwedi	0	2871	0	2.871,13
16	Kapetakan	0	6660	0	6.660,37
17	Karangsembung	5	1877	0	1.881,80
18	Karangwareng	411	2239	4	2.733,54
19	Kedawang	0	1117	0	1.117,37
20	Klangenan	0	2042	0	2.042,44
21	Lemahabang	371	1894	0	2.264,90
22	Losari	0	4582	0	4.582,04
23	Mundu	275	2385	79	2.739,43
24	Pabedilan	0	2533	0	2.533,41
25	Pabuaran	0	957	0	957,24
26	Palimanan	0	1860	52	1.911,88
27	Pangenan	0	3576	0	3.576,07
28	Panguragan	0	2200	0	2.199,90
29	Pasaleman	571	2805	109	3.484,45
30	Plered	0	1323	0	1.322,90
31	Plumbon	0	1903	0	1.903,34
32	Sedong	599	1927	918	3.443,31
33	Sumber	0	2975	0	2.974,60
34	Suranenggala	0	2575	0	2.574,74
35	Susukan	0	5288	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	22	1194	391	1.804,83
37	Talun	104	1765	59	1.928,26
38	Tengah Tani	0	976	0	976,2
39	Waled	158	2804	0	2.961,64
40	Weru	0	911	0	911,03
Kabupaten Cirebon		3.918,14	97.625,71	4.692,18	106.514,05

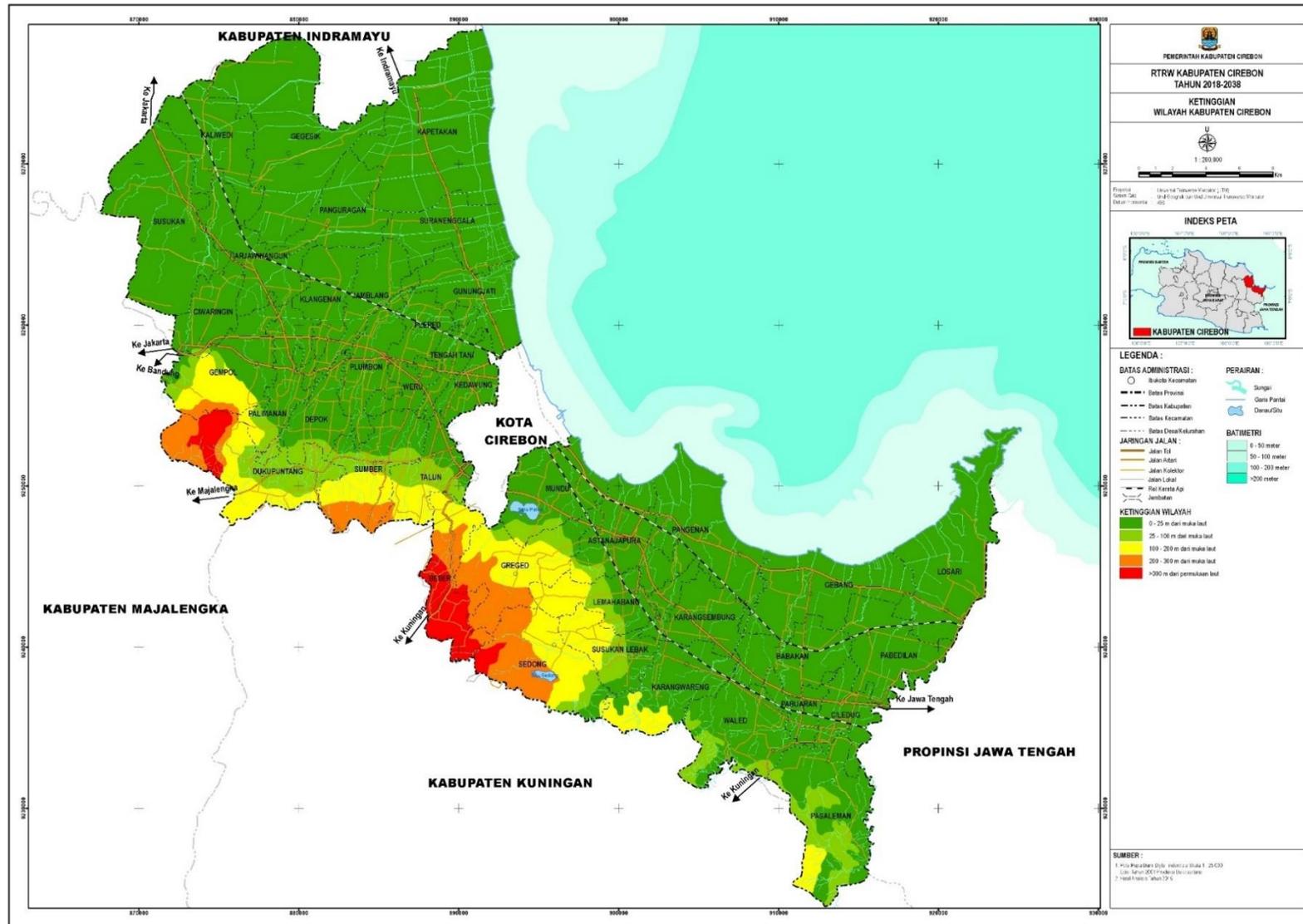
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



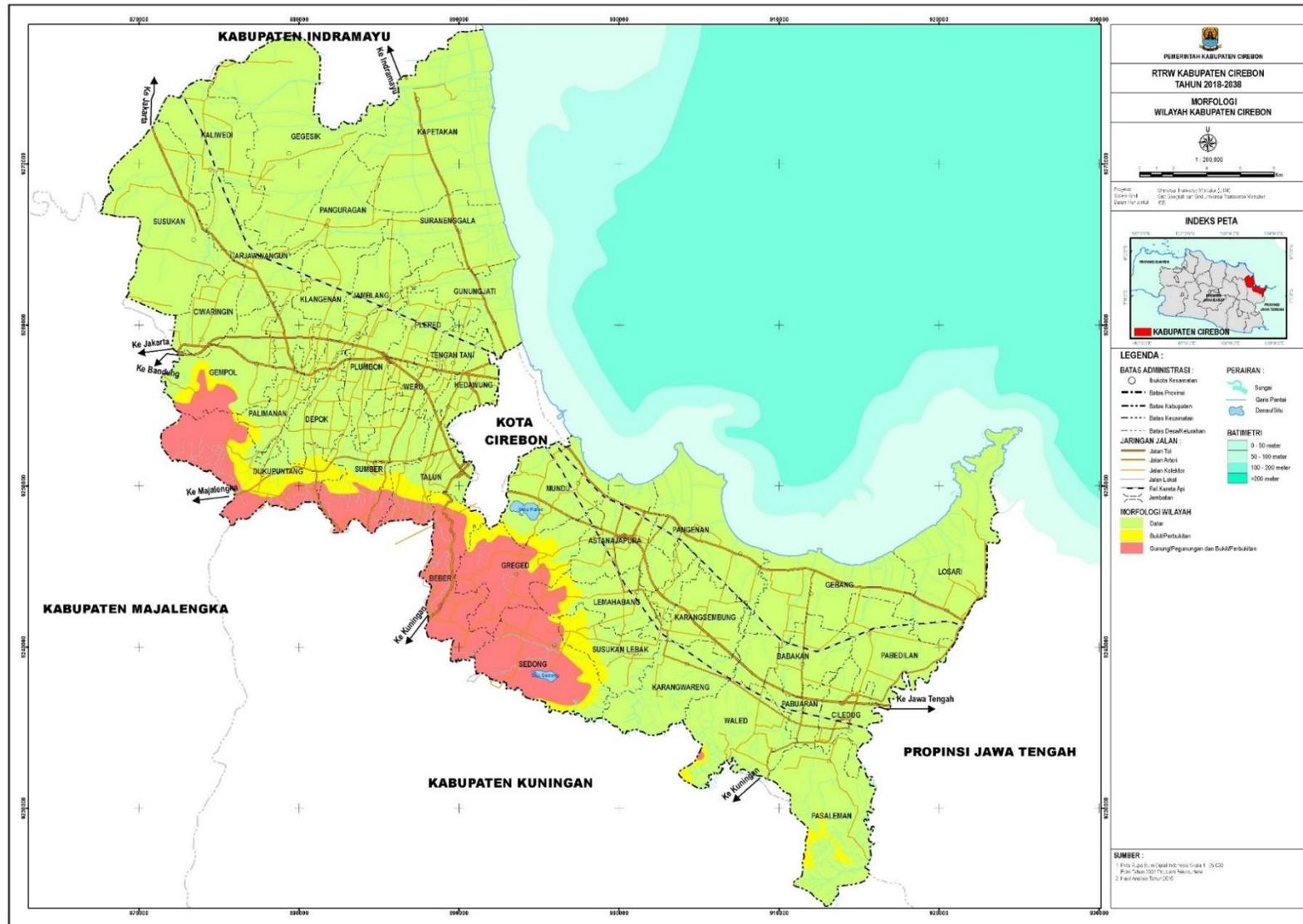
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Gambar 4.2 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.3 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.4 Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon

4.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Cirebon meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Untuk wilayah sungai, Kabupaten Cirebon memiliki 1 (satu) buah Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Selain itu juga Kabupaten Cirebon memiliki 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dengan luas sebesar 1.312 Km².

DAS Cisanggarung memiliki beberapa Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam beberapa kewenangan baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pembagian wewenang DI tersebut sebagai berikut :

1. DI dengan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi: Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanisi.
2. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :
 - a. DI Rentang seluas ± 20.632 Ha;
 - b. DI Ciwaringan seluas ±1.103 Ha;
 - c. DI Seuseupan seluas ± 3.865 Ha dan
 - d. DI Cikeusik seluas ±6.903 Ha.
3. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. DI Walahar seluas ±1.292 Ha;
 - b. DI Jamblang seluas ± 2.164 Ha;
 - c. DI Cipager seluas ± 1.056 Ha;
 - d. DI Setupatok seluas ±1.408 Ha;
 - e. DI Paniis Lebak seluas ± 332 Ha;
 - f. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 - g. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 - h. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 - i. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 - j. DI Katiga seluas ± 662 Ha; dan
 - k. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha.
4. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
 - a. DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 - b. DI Soka seluas ± 282 Ha;
 - c. DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
 - d. DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 - e. DI Keputon seluas ± 446 Ha;
 - f. DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
 - g. DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
 - h. DI Agung seluas ± 711 Ha;
 - i. DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
 - j. DI Panongan seluas ± 952 Ha dan
 - k. DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

Tabel 4.5 Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13	Gunungjati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
Kabupaten Cirebon		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	106.514,18

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah danau/ situ yaitu : Setu Patok di Kecamatan Mundu seluas 175 Ha dengan kapasitas tampung 13.790.000 m³ dan Setu Sedong di Kecamatan Sedong seluas 19,67 Ha dengan kapasitas tampung 1.850.000 m³.

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 (empat puluh empat) titik yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sedangkan jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

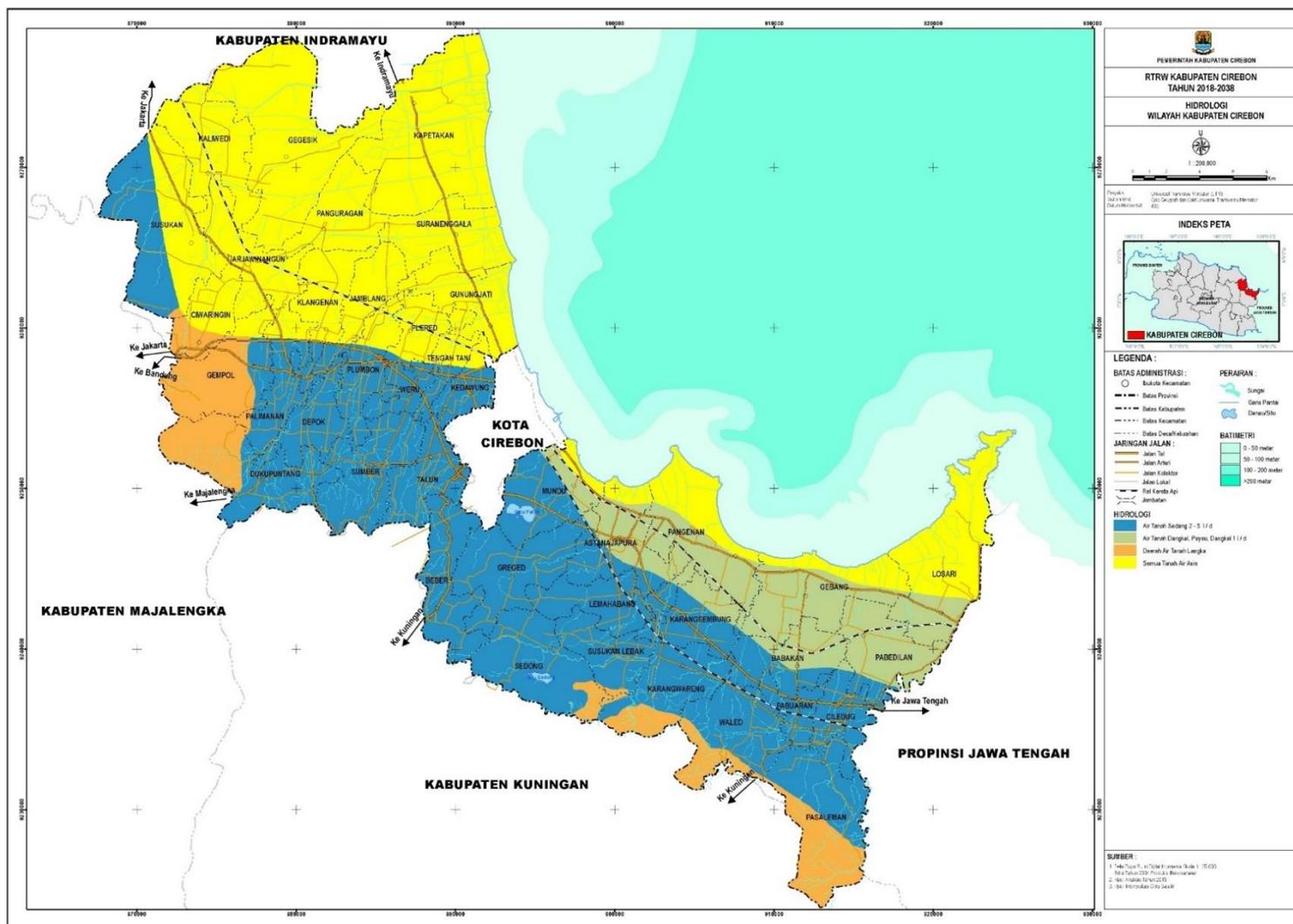
Tabel 4.6 Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	4	1. Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2. Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3. Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4. Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
2	Palimanan	1	1. Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1. Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 2. Mata air Balonggede di Desa Cipinang 3. Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1. Mata air Bakam di Desa Greged 2. Mata air Umbar di Desa Nanggela 3. Mata air Cilengceng di Desa Nanggela 4. Mata air Mandiangin di Desa Durajaya 5. Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6. Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7. Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1. Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2. Mata air Cidahu di Desa Belawa 3. Mata air Ciloa di Desa Belawa 4. Mata air Kegambulan di Desa Belawa; 5. Mata air Cikondang di Desa Wangkelang; 6. Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang; 7. Mata air Pesantren di Desa Pasawahan; 8. Mata air Cibirung di Desa Pasawahan; 9. Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan; 10. Mata air Sindang Pancuran di Desa Sindanglaut; 11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut; 12. Mata air Cibansari di Desa Cipeujeuh; 13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon; 14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;
6	Sedong	1	1. Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1. Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem; 2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem 3. Mata air Gunung Cibulut di Desa Ciuyah 4. Mata air Balong di Desa Ciuyah 5. Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman;	2	1. Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang 2. Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1. Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1. Mata air Krandon di Desa Krandon 2. Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	3	1. Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2. Mata air Seureuh Beureun di Desa Sidawangi 3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

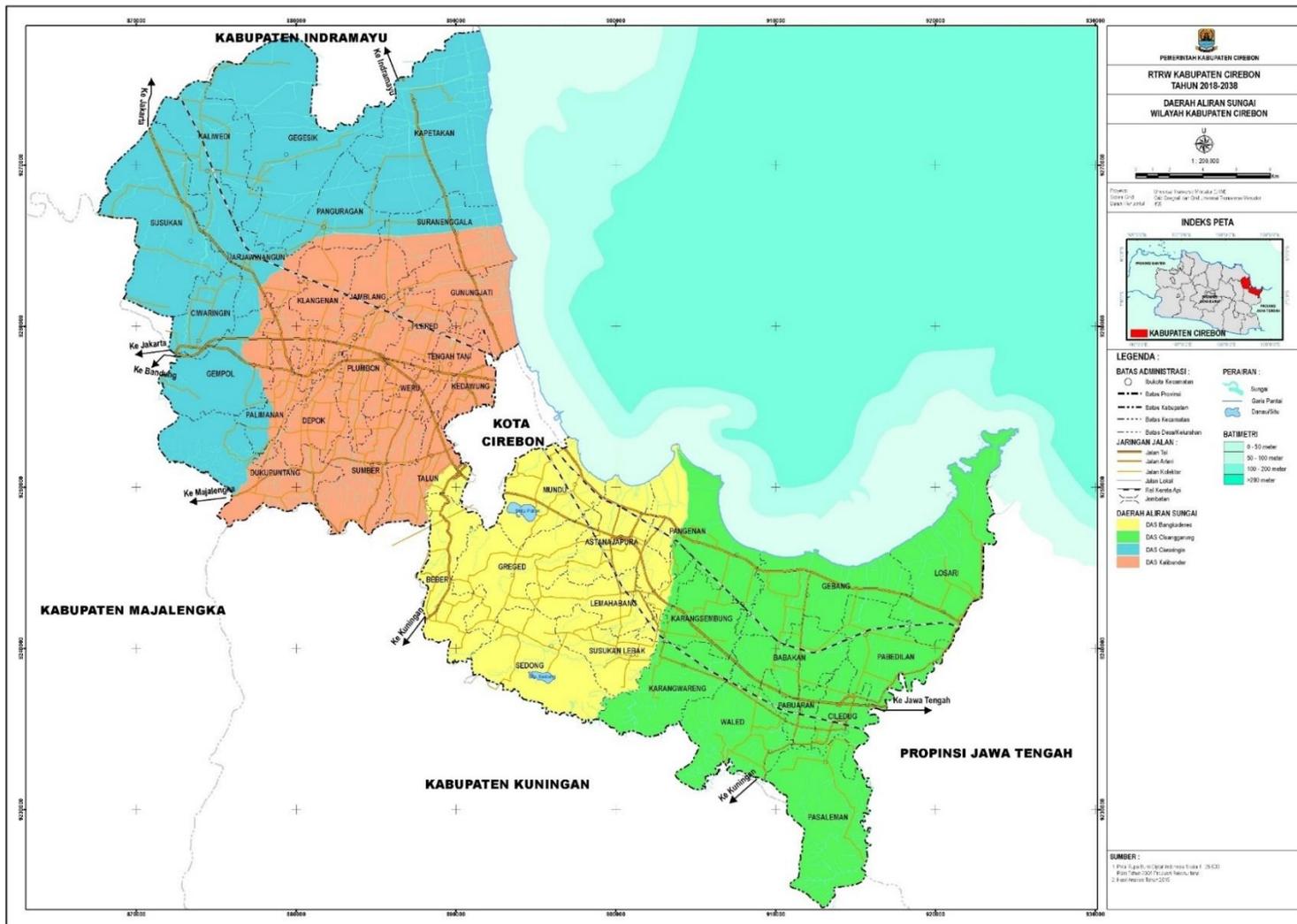
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.5 Kondisi Air Tanah

Kondisi air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) daerah/ wilayah, yaitu : daerah air tanah asin, daerah air tanah dangkal, daerah air tanah sedang, dan daerah air tanah langka.



Gambar 4.5 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon

4.1.6 Potensi Bencana Alam

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana buatan (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8	Dukupuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

1. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, antara lain: kekeringan, banjir, longsor dan angin puting beliung.

- Rawan Bencana Kekeringan, meliputi 30 kecamatan.
- Rawan Bencana Banjir, meliputi 21 kecamatan.
- Rawan Bencana Longsor, meliputi 6 kecamatan.
- Rawan Bencana Angin Puting Beliung, meliputi 7 kecamatan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1	Waled	√	-	√	-
2	Pasaleman	-	√	-	-
3	Ciledug	√	√	-	-
4	Pabuaran	-	-	-	√
5	Losari	√	√	-	√
6	Pabedilan	√	√	-	-
7	Babakan	-	√	-	-
8	Gebang	√	√	-	-
9	Karangsembung	√	-	-	√
10	Karangwareng	-	-	-	-
11	Lemahabang	√	√	-	-
12	Susukan Lebak	√	-	-	-
13	Sedong	√	-	√	-
14	Astanajapura	√	√	-	√
15	Pangenan	√	√	-	-
16	Mundu	√	√	-	-
17	Beber	√	-	√	-
18	Greged	-	-	√	-
19	Talun	-	-	-	-
20	Sumber	√	-	√	-
21	Dukupuntang	-	-	√	-
22	Palimanan	√	-	-	√
23	Plumbon	√	√	-	-
24	Depok	√	-	-	-
25	Weru	√	-	-	-
26	Plered	√	√	-	-
27	Tengah Tani	√	√	-	-
28	Kedawung	√	-	-	-
29	Gunungjati	-	√	-	-
30	Kapetakan	√	√	-	-
31	Suranenggala	√	√	-	-
32	Klangenan	√	-	-	-
33	Jamblang	-	-	-	√
34	Arjawinangun	√	√	-	-
35	Pangurangan	√	√	-	-
36	Ciwaringin	√	-	-	-
37	Gempol	-	-	-	-
38	Susukan	√	√	-	-
39	Gegesik	√	√	-	√
40	Kaliwedi	√	√	-	-

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

2. Bencana Kebakaran

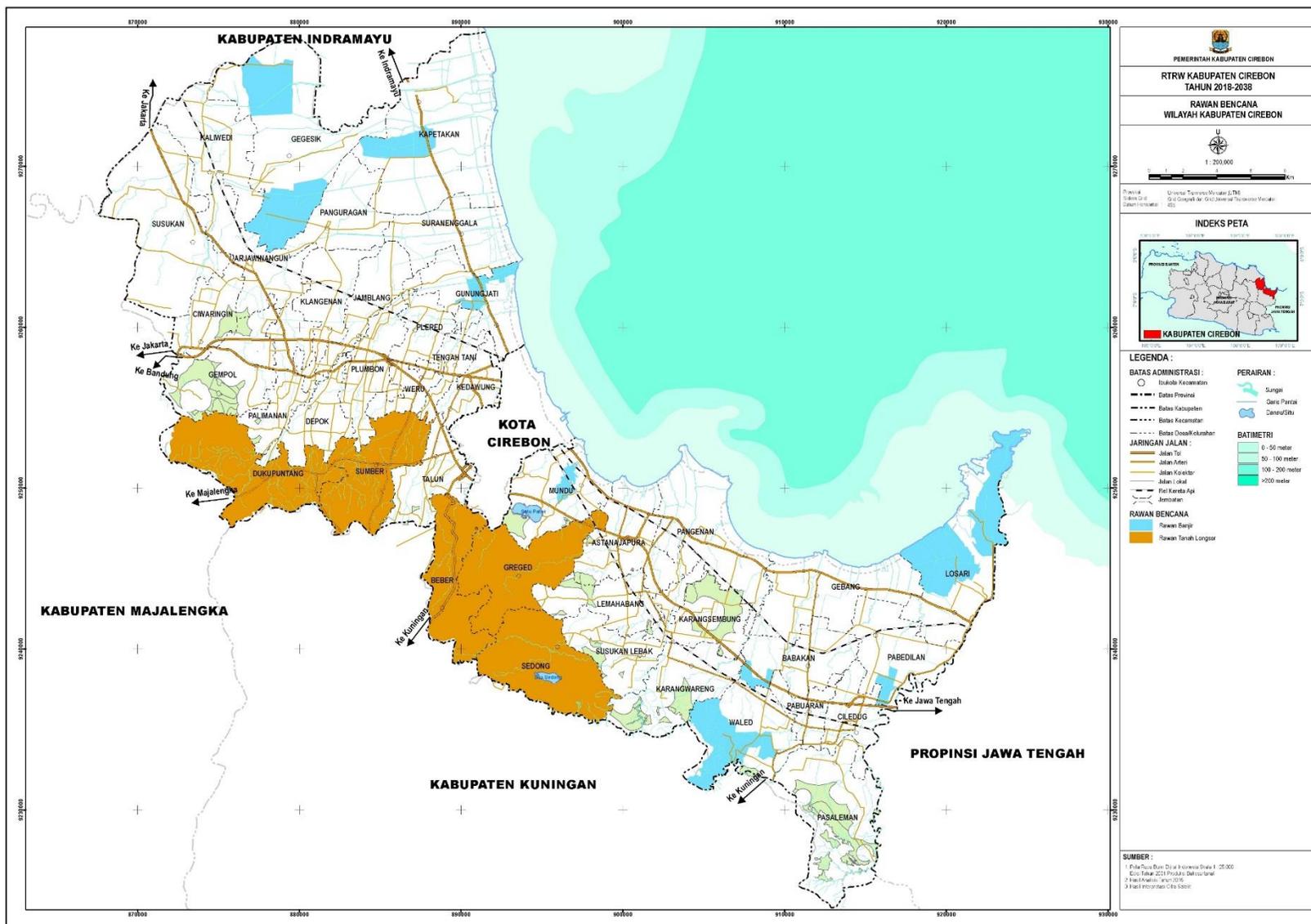
Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Gambar 4.7 Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon



4.2 Kondisi Kependudukan

4.2.1 Jumlah Penduduk

Selama periode 2010 - 2019 jumlah penduduk mengalami peningkatan. Tahun 2010 berjumlah 1.992.318 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2.189.785 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2019 mencapai 197.467 jiwa., dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,06%.

Jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Sumber mencapai 90.891 jiwa, hal ini menunjukkan salah satu fungsi penunjang PKL Sumber yang diarahkan menjadi kawasan perumahan yang dapat menampung jumlah penduduk yang tinggi.

Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Karangwereng dengan jumlah 28.151 jiwa, sedikitnya jumlah penduduk ini bisa menggambarkan bahwa Kecamatan Karangwereng berada di selatan yang sangat jauh, sehingga sulit menarik orang untuk berdomisili. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

4.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon selama periode 2010 - 2019 mengalami peningkatan dari 2.012 jiwa/Km² menjadi 2.211 jiwa/Km², atau bertambah 199 jiwa/Km².

Pada tahun 2019, kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Weru dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 7.459 jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di kecamatan Paseleman dengan jumlah kepadatan 837 jiwa/Km².

Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	52,073	52,659	51,024	51,659	51,770	52,108	50,837	52,551	54,014	54,407
2	Pasaleman	24,690	24,968	24,248	24,968	25,044	24,836	25,920	26,214	26,793	26,886
3	Ciledug	41,704	42,174	41,166	42,174	43,826	45,169	43,971	44,198	44,555	44,501
4	Pabuaran	33,321	33,696	33,045	33,696	34,479	33,804	34,777	34,775	35,445	35,558
5	Losari	53,499	54,101	53,841	54,101	56,692	59,441	57,340	57,250	59,673	60,160
6	Pabedilan	50,902	51,475	50,125	50,475	50,973	53,650	49,711	51,685	55,978	56,397
7	Babakan	61,618	62,312	61,102	62,312	63,365	67,437	64,540	64,589	68,993	69,636
8	Gebang	55,964	56,605	57,605	58,205	60,483	59,477	61,942	60,899	65,027	65,233
9	Karangsembung	33,066	34,450	34,450	35,150	36,218	36,593	34,694	35,375	36,397	36,625
10	Karangwereng	23,267	23,563	23,760	24,563	25,657	26,525	27,018	27,563	28,159	28,151
11	Iemahabang	49,186	50,751	49,231	49,751	50,354	51,078	50,822	51,616	53,214	54,116
12	Susukan Lebak	35,598	36,010	36,830	37,010	36,728	37,703	38,478	39,176	40,203	40,359
13	Sedong	36,990	37,429	38,224	39,429	37,893	39,051	37,970	39,118	40,660	40,824
14	Astanajapura	73,894	73,737	75,423	75,737	76,471	76,869	71,609	73,589	73,478	74,785
15	Pangenan	42,522	42,001	42,781	43,001	38,925	40,817	42,261	42,664	44,597	44,459
16	Mundu	66,772	70,591	72,890	73,591	67,097	67,933	68,629	70,523	71,732	71,761
17	Beber	35,114	35,820	36,521	37,421	38,699	39,503	39,556	40,414	40,516	41,279
18	Greged	40,504	50,073	50,988	51,073	50,091	49,684	51,955	53,234	53,269	53,975
19	Talun	59,120	59,819	60,046	60,819	61,756	62,358	62,895	64,574	65,198	65,854
20	Sumber	80,058	80,959	81,129	82,959	84,575	85,587	86,981	88,701	89,192	90,891
21	Dukupuntang	59,684	60,356	59,856	60,356	59,893	60,309	60,255	61,629	62,656	62,951
22	Palimanan	54,990	55,609	54,108	55,609	59,368	60,169	59,871	59,783	60,899	61,600
23	Plumbon	72,599	73,416	73,012	73,416	70,498	73,560	73,849	75,229	78,259	80,062
24	Depok	56,436	57,071	56,908	57,071	58,778	57,449	60,185	61,078	62,272	63,474
25	Weru	63,498	64,213	63,983	64,213	62,825	63,536	65,229	66,597	66,909	68,546
26	Plered	49,218	50,523	50,980	51,092	48,049	48,433	49,875	51,197	52,132	53,176
27	Tengah Tani	39,931	40,381	39,962	40,381	40,609	39,385	40,620	41,529	41,884	42,590
28	Kedawung	54,552	57,245	62,245	62,245	60,344	54,748	56,172	57,060	57,980	58,687
29	Gunungjati	72,050	72,918	73,828	74,710	73,415	74,801	76,239	76,353	78,319	79,307
30	Kapetakan	51,026	51,601	51,240	51,601	47,469	47,130	51,338	52,412	56,036	57,574
31	Suranenggala	40,925	41,386	41,125	41,386	41,099	39,720	41,152	41,257	43,471	44,607
32	Klangenan	50,460	51,028	50,818	51,028	48,472	47,276	48,356	49,620	51,417	52,676

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
33	Jamblang	34,848	35,240	34,180	35,240	36,815	37,093	37,178	37,255	38,035	38,643
34	Arjawinangun	62,114	61,785	62,423	62,813	66,226	63,979	65,508	65,703	67,780	68,891
35	Panguragan	40,162	41,637	37,637	38,427	40,794	39,597	40,171	41,091	42,570	42,626
36	Ciwaringin	34,683	36,107	33,708	34,107	35,633	34,276	35,391	35,152	36,821	37,328
37	Gempol	42,784	43,266	40,986	41,266	42,115	41,566	43,190	43,638	44,831	45,757
38	Susukan	61,635	62,329	59,929	60,329	61,948	60,189	60,855	60,715	64,382	65,682
39	Gegesik	65,980	66,823	65,589	66,289	67,454	66,259	66,792	66,101	68,979	69,260
40	Kaliwedi	34,881	35,284	35,846	36,996	37,353	37,980	38,467	38,792	39,851	40,491
Jumlah		1,992,318	2,031,411	2,022,792	2,046,669	2,050,253	2,057,078	2,072,599	2,100,899	2,162,576	2,189,785

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Tabel 4.11 Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	28.46	1,830	1,850	1,793	1,815	1,819	1,831	1,786	1,846	1,898	1,912
2	Pasaleman	32.11	769	778	755	778	780	773	807	816	834	837
3	Ciledug	13.25	3,147	3,183	3,107	3,183	3,308	3,409	3,319	3,336	3,363	3,359
4	Pabuaran	8.95	3,723	3,765	3,692	3,765	3,852	3,777	3,886	3,885	3,960	3,973
5	Losari	39.07	1,369	1,385	1,378	1,385	1,451	1,521	1,468	1,465	1,527	1,540
6	Pabedilan	24.08	2,114	2,138	2,082	2,096	2,117	2,228	2,064	2,146	2,325	2,342
7	Babakan	21.93	2,810	2,841	2,786	2,841	2,889	3,075	2,943	2,945	3,146	3,175
8	Gebang	31.68	1,767	1,787	1,818	1,837	1,909	1,877	1,955	1,922	2,053	2,059
9	Karangsembung	15.14	2,184	2,275	2,275	2,322	2,392	2,417	2,292	2,337	2,404	2,419
10	Karangwereng	23.12	1,006	1,019	1,028	1,062	1,110	1,147	1,169	1,192	1,218	1,218
11	Iemahabang	21.49	2,289	2,362	2,291	2,315	2,343	2,377	2,365	2,402	2,476	2,518
12	Susukan Lebak	18.74	1,900	1,922	1,965	1,975	1,960	2,012	2,053	2,091	2,145	2,154
13	Sedong	31.02	1,192	1,207	1,232	1,271	1,222	1,259	1,224	1,261	1,311	1,316
14	Astanajapura	25.47	2,901	2,895	2,961	2,974	3,002	3,018	2,812	2,889	2,885	2,936
15	Pangenan	30.54	1,392	1,375	1,401	1,408	1,275	1,337	1,384	1,397	1,460	1,456
16	Mundu	25.58	2,610	2,760	2,849	2,877	2,623	2,656	2,683	2,757	2,804	2,805
17	Beber	23.25	1,510	1,541	1,571	1,610	1,664	1,699	1,701	1,738	1,743	1,775

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Greged	29.92	1,354	1,674	1,704	1,707	1,674	1,661	1,736	1,779	1,780	1,804
19	Talun	21.21	2,787	2,820	2,831	2,867	2,912	2,940	2,965	3,045	3,074	3,105
20	Sumber	25.65	3,121	3,156	3,163	3,234	3,297	3,337	3,391	3,458	3,477	3,544
21	Dukupuntang	36.40	1,640	1,658	1,644	1,658	1,645	1,657	1,655	1,693	1,721	1,729
22	Palimanan	17.18	3,201	3,237	3,149	3,237	3,456	3,502	3,485	3,480	3,545	3,586
23	Plumbon	18.19	3,991	4,036	4,014	4,036	3,876	4,044	4,060	4,136	4,302	4,401
24	Depok	15.55	3,629	3,670	3,660	3,670	3,780	3,694	3,870	3,928	4,005	4,082
25	Weru	9.19	6,909	6,987	6,962	6,987	6,836	6,914	7,098	7,247	7,281	7,459
26	Plered	11.34	4,340	4,455	4,496	4,505	4,237	4,271	4,398	4,515	4,597	4,689
27	Tengah Tani	8.97	4,452	4,502	4,455	4,502	4,527	4,391	4,528	4,630	4,669	4,748
28	Kedawung	9.58	5,694	5,975	6,497	6,497	6,299	5,715	5,863	5,956	6,052	6,126
29	Gunungjati	20.55	3,506	3,548	3,593	3,636	3,573	3,640	3,710	3,715	3,811	3,859
30	Kapetakan	60.20	848	857	851	857	789	783	853	871	931	956
31	Suranenggala	22.98	1,781	1,801	1,790	1,801	1,788	1,728	1,791	1,795	1,892	1,941
32	Klangenan	20.57	2,453	2,481	2,470	2,481	2,356	2,298	2,351	2,412	2,500	2,561
33	Jamblang	17.76	1,962	1,984	1,925	1,984	2,073	2,089	2,093	2,098	2,142	2,176
34	Arjawinangun	24.11	2,576	2,563	2,589	2,605	2,747	2,654	2,717	2,725	2,811	2,857
35	Panguragan	20.31	1,977	2,050	1,853	1,892	2,009	1,950	1,978	2,023	2,096	2,099
36	Ciwaringin	17.79	1,950	2,030	1,895	1,917	2,003	1,927	1,989	1,976	2,070	2,098
37	Gempol	30.73	1,392	1,408	1,334	1,343	1,370	1,353	1,405	1,420	1,459	1,489
38	Susukan	50.10	1,230	1,244	1,196	1,204	1,236	1,201	1,215	1,212	1,285	1,311
39	Gegesik	60.38	1,093	1,107	1,086	1,098	1,117	1,097	1,106	1,095	1,142	1,147
40	Kaliwedi	27.82	1,254	1,268	1,288	1,330	1,343	1,365	1,383	1,394	1,432	1,455
Jumlah		990.36	2,012	2,051	2,042	2,067	2,070	2,077	2,093	2,121	2,184	2,211

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.2.3 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Salah satu pertimbangan untuk menentukan Kawasan Perkotaan adalah jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat tipologi Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Kawasan Metropolitan jumlah penduduk 1.000.000 Jiwa;
2. Kawasan Perkotaan Besar jumlah penduduk 500.000 jiwa;
3. Kawasan Perkotaan Sedang jumlah penduduk 100.000 - 500.000 jiwa;
4. Kawasan Perkotaan Kecil jumlah penduduk 50.000 -100.000 jiwa.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat diketahui bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk kedalam kriteria Kawasan Perkotaan terdapat 26 kecamatan dengan klasifikasi Kawasan Perkotaan Kecil.

Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan didominasi oleh penduduk perkotaan mencapai 71,20% atau mencapai 1.559.101 jiwa, sedangkan proporsi penduduk perdesaan 28,80% atau mencapai 630.684 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
1	Waled	54,407	Perkotaan Kecil
2	Pasaleman	26,886	Perdesaan
3	Ciledug	44,501	Perdesaan
4	Pabuaran	35,558	Perdesaan
5	Losari	60,160	Perkotaan Kecil
6	Pabedilan	56,397	Perkotaan Kecil
7	Babakan	69,636	Perkotaan Kecil
8	Gebang	65,233	Perkotaan Kecil
9	Karangsembung	36,625	Perdesaan
10	Karangwereng	28,151	Perdesaan
11	Iemahabang	54,116	Perkotaan Kecil
12	Susukan Lebak	40,359	Perdesaan
13	Sedong	40,824	Perdesaan
14	Astanajapura	74,785	Perkotaan Kecil
15	Pangenan	44,459	Perdesaan
16	Mundu	71,761	Perkotaan Kecil
17	Beber	41,279	Perdesaan
18	Greged	53,975	Perkotaan Kecil
19	Talun	65,854	Perkotaan Kecil
20	Sumber	90,891	Perkotaan Kecil
21	Dukupuntang	62,951	Perkotaan Kecil
22	Palimanan	61,600	Perkotaan Kecil
23	Plumbon	80,062	Perkotaan Kecil
24	Depok	63,474	Perkotaan Kecil
25	Weru	68,546	Perkotaan Kecil
26	Plered	53,176	Perkotaan Kecil
27	Tengah Tani	42,590	Perdesaan
28	Kedawung	58,687	Perkotaan Kecil
29	Gunungjati	79,307	Perkotaan Kecil



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
30	Kapetakan	57,574	Perkotaan Kecil
31	Suranenggala	44,607	Perdesaan
32	Klangenan	52,676	Perkotaan Kecil
33	Jamblang	38,643	Perdesaan
34	Arjawinangun	68,891	Perkotaan Kecil
35	Panguragan	42,626	Perdesaan
36	Ciwaringin	37,328	Perdesaan
37	Gempol	45,757	Perdesaan
38	Susukan	65,682	Perkotaan Kecil
39	Gegesik	69,260	Perkotaan Kecil
40	Kaliwedi	40,491	Perdesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.3 Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB

4.3.1 Kondisi Sektor Industri

Jumlah perusahaan sektor industri kecil di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mencapai 5.209 unit. Untuk jenis industri di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 9 jenis komoditi unggulan, diantaranya : kerajinan rotan, meubeul kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	1,370	1,382	1,398	1,408
2	Meubeul Kayu	1,252	1,253	1,255	1,257
3	Emping Melinjo	158	166	166	166
4	Roti Dan Makanan Ringan	571	770	775	782
5	Batu Alam	344	347	347	347
6	Sandal Karet	21	22	22	22
7	Batik	565	593	593	593
8	Konveksi	610	625	626	626
9	Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8
Jumlah		4,899	5,166	5,190	5,209

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun 2018 mencapai 94.422 jiwa, dengan jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat pada sektor komoditi industri meubeul/kerajinan rotan dengan jumlah tenaga kerja 60.887 jiwa.

Tabel 4.14 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	59,712	59,763	60,455	60,887
2	Meubeul Kayu	7,552	7,558	7,570	7,582
3	Emping Melinjo	1,309	1,374	1,374	1,374
4	Roti Dan Makanan Ringan	6,095	7,314	8,327	8,625
5	Batu Alam	2,051	2,072	2,072	2,072
6	Sandal Karet	230	235	235	235
7	Batik	4,515	4,628	4,628	4,628
8	Konveksi	6,054	6,054	6,221	6,221
9	Kerajinan Kulit Kerang	770	780	780	780
Jumlah		90,303	91,794	93,679	94,422

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

4.3.2 Sumber Daya Industri

4.3.2.1 Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan

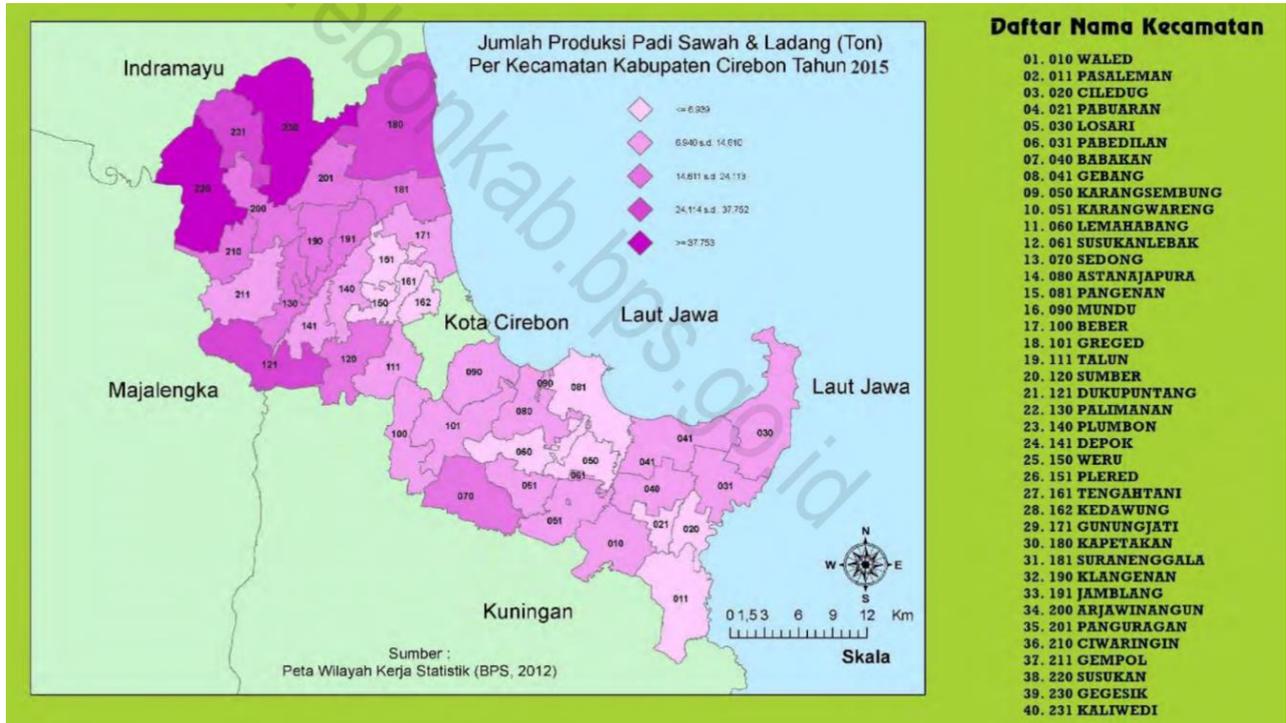
Sektor pertanian dan perkebunan yang menghasilkan tanaman pangan merupakan salah satu sumber daya kompetitif dari Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BPS Tahun 2016, sektor pertanian dan perkebunan berkontribusi pada 15% Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDBR) Kabupaten Cirebon. Sumber daya pertanian dan perkebunan meliputi tanaman bahan makanan (padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan), sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penyumbang terbesar produksi padi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi produsen padi terbesar ketiga skala nasional. Adapun komoditas pertanian dan perkebunan Kabupaten Cirebon lainnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon

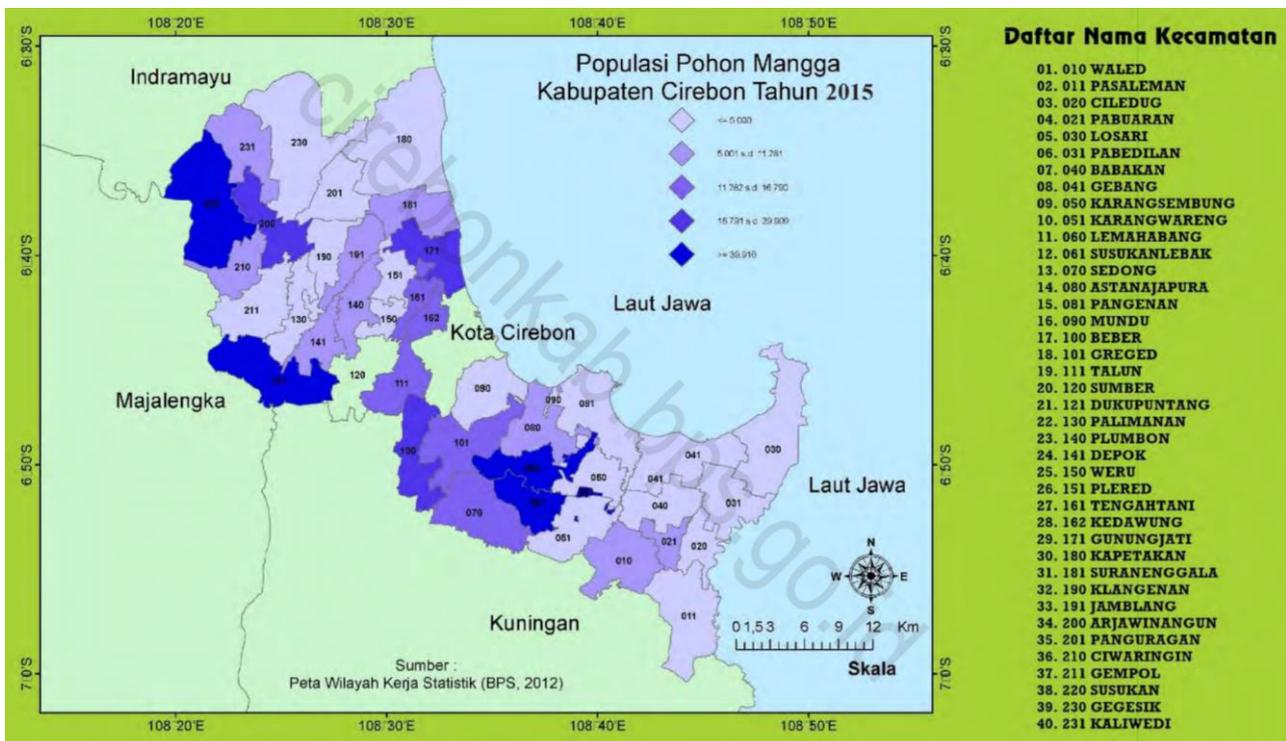
Komoditas	Potensi Luas Tanam (Ha)		Produksi Tahunan (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017*	2016	2017*	
Padi	89.104	87.058	607.65		Gegesik, Kapetakan, Susukan, Klangeran, Arjawinangun, Sumber, Ciwaringin, Dukupuntang, Palimanan, Suranenggala, Susukan, Panguragan dan Kaliwedi
Kacang Hijau	2.384	2.384	2.532		Waled, Ciwaringin, Babakan, Susukan, Arjawinangun, Gempol, Palimanan dan Pasaleman
Bawang Merah	3.669	4.141	4.048	3.837	Waled, Pabuaran, Babakan, Gebang, Pabedilan, Pangenan, Losari dan Ciledug
Cabe Besar	694	630	6.502	552	Waled, Losari, Subang, Pangenan, Gempol, Susukan, Pasaleman, Ciledug dan Pabedilan
Mangga	8.587		31.086	38.417	Sedong, Beber, Greged, Susukan Lebak, Lemahabang, Dukupuntang, dan Sumber
Jambu Biji	660		1.599		Panguragan, Ciwaringin, Gegesik, Klangeran dan Suranenggala
Tebu	4.911	4.911	23.117	23.117	Sumber, Dukupuntang, Palimanan, Susukan, Jamblang Plumbon, Klangeran dan Gempol

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan sumber daya pertanian dan perkebunan masing – masing. Persebaran per kecamatan dari beberapa komoditas tanaman pangan, yaitu padi, mangga, dan jambu biji, dapat diamati pada tiga gambar berikut:



Gambar 4.8 Peta Jumlah Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015



Gambar 4.9 Peta Jumlah Pohon Mangga per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

b. Sumber Daya Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari Kabupaten Cirebon. Ada dua jenis komoditas utama sektor peternakan Kabupaten Cirebon: hewan ruminansia berupa sapi, domba, kerbau, dan hewan unggas berupa sapi dan ayam. Ringkasan produksi komoditas peternakan ruminansia dan unggas di Kabupaten Cirebon disajikan pada dua tabel berikut:

Tabel 4.16 Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Ruminansia) Kabupaten Cirebon

Komoditas	Populasi (Ekor)		Produksi Daging (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017	2016	2017	
Sapi	3.748	7.187	3.980		Gunungjati, Mundu, Babakan, Gegesik, Waled, Karangsembung, Losari, Beber, Talun, Gempol, Sumber, Klangeran, Sedong, Dukupuntang, Pabedilan, Ciwaringin, Depok, Plumbon, Ciledug, Gebang, Karangwareng, Plered, Arjawinangun, Beber, Kapetakan
Domba	277.498	280.024	3.026		
Kerbau	3.907	3.808	33		

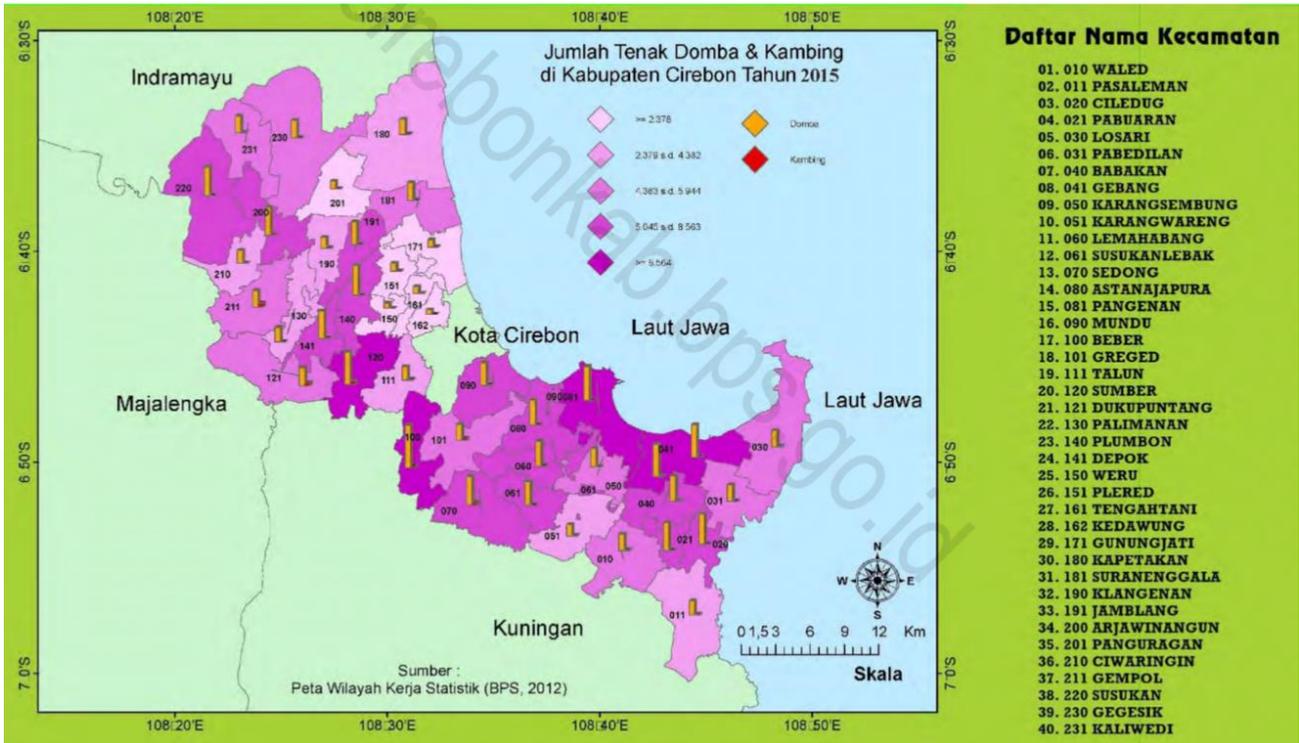
Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Tabel 4.17 Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Unggas) Kabupaten Cirebon

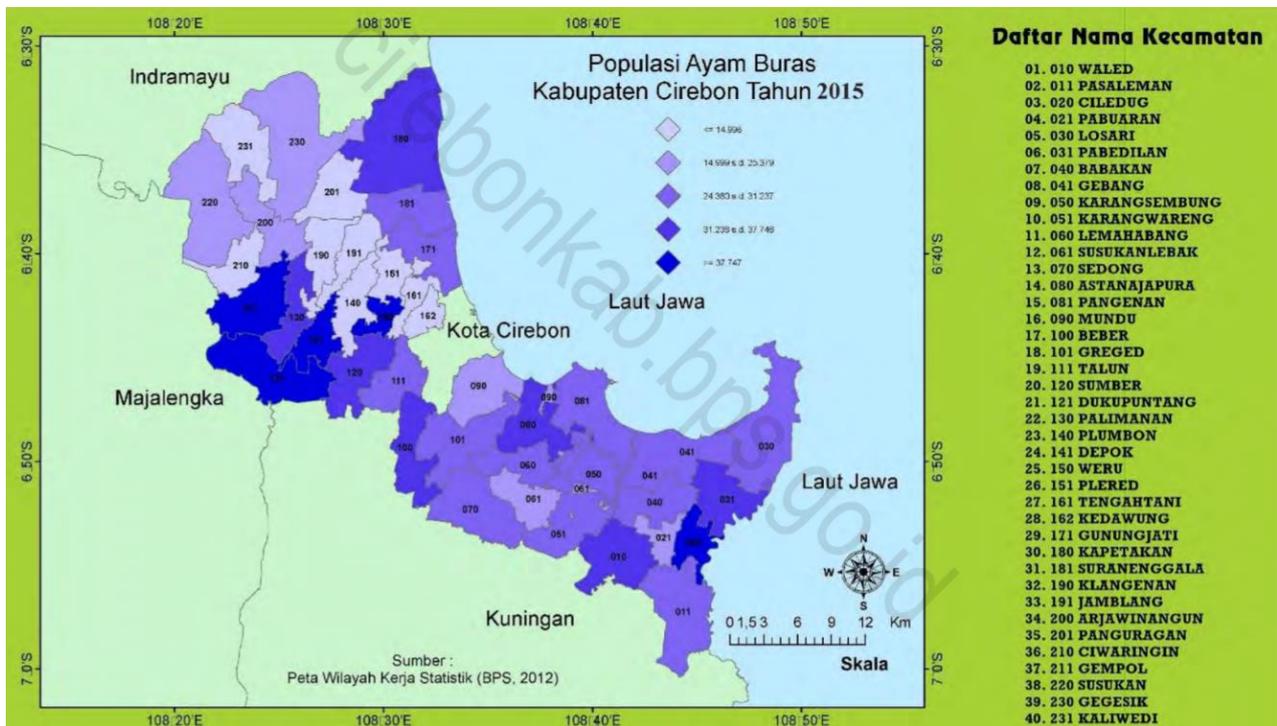
Komoditas	Populasi (Ribu Ekor)		Produksi Daging (Ton)		Produksi Telur (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Itik	436	442	273		2.851		Kecamatan Kapetakan, Gebang, Losari, Panguragan, Gunungjati, dan Susukan
Ayam Pedaging	2.374	2.385	11.438		NA		
Ayam Petelur	91	81	NA		1.007		
Ayam Buras	1.158	1.174	NA		710		

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Selain data agregat, sumber daya peternakan dapat dilihat persebarannya berdasarkan lokasi. Peta persebaran sumber daya peternakan (ruminansia dan unggas) per kecamatan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015 dapat diamati pada dua gambar berikut:



Gambar 4.10 Persebaran Domba dan Kambing per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015



Gambar 4.11 Persebaran Ayam Buras per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

c. Sumber Daya Pertambangan

Industri pertambangan di Kabupaten Cirebon didominasi oleh industri batu alam, yang merupakan industri pertambangan non-logam. Hal ini dikarenakan banyaknya pengrajin dan industri batu alam dengan skala UKM. Seiring kenaikan pertumbuhan industri properti di Indonesia, industri batu alam di wilayah Cirebon pun diprediksi ikut tumbuh. Banyaknya sumber bahan baku industri batu alam yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya turut meningkatkan daya saing sektor industri tersebut. Beberapa varian batu alam yang menjadi komoditas utama industri ini adalah batu andesit, batu palimanan, batu templek, dan batu candi.

Tabel 4.18 Data Statistika Terkait Industri Pertambangan Non-Logam (Batu Alam)

Aspek Sumber Daya	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tenaga Kerja	2.010	2.051	2.072	2.072
Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	11,2	11,2	11,3	11,3
Kapasitas Produksi (Ribu Ton)	5,1	5,1	5,2	5,2
Nilai Produksi (Milyar Rupiah)	173,6	181	182,8	182,8

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

4.3.2.2 Sumber Daya Perhutanan

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya perhutanan, berupa kayu, yang dapat menjadi pasokan untuk sektor industri mebel kayu, yang produksi tahunannya mencapai Rp 51 miliar pada tahun 2016. Sumber daya perhutanan memiliki potensi lahan tanam pada lahan kritis seluas 5.008 Ha dan lahan tumpang sari (tanaman bawah tegakan) seluas 4.280 Ha pada tahun 2015. Produksi tanaman hutan dengan jumlah 4.087 m³ terdiri dari Kayu Jati 1995 m³, Kayu Mahoni 1102 m³, dan kayu lain-lain (campuran) 969 m³. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu Kecamatan Dukupuntang, Sedong, Gempol, Waled, Pasaleman, Karangwareng, SusukanLebak, Greged, Beber, Astanajapura.

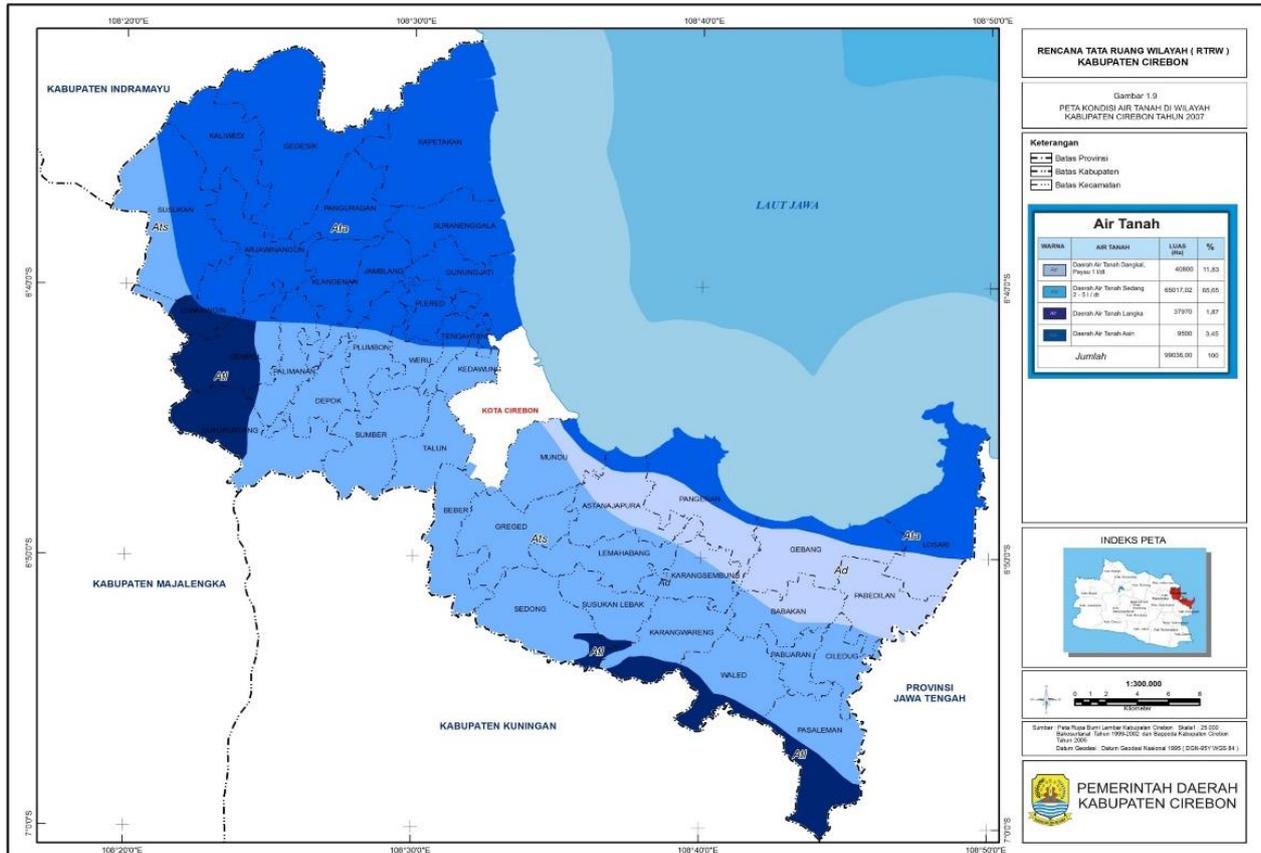
Pengembangan sumber daya perhutanan di Kabupaten Cirebon didukung oleh beberapa faktor agroklimat seperti tersedianya industri pengolahan hasil kehutanan, luasnya ketersediaan daya dukung lahan, dan meningkatnya kebutuhan bahan baku industri berbasis komoditas perhutanan. Dikarenakan faktor - faktor tersebut, harga hasil hutan kayu cenderung stabil sehingga iklim industri cukup menarik. Lalu ada pula kemungkinan diversifikasi produksi dengan komoditas lain seperti kehutanan-perkebunan dan kehutanan-tanaman pangan.

4.3.2.3 Sumber Daya Air

Sumber-sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai besar seperti Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan Sungai Jamblang. Selain itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian selatan. Sungai-sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir. Dalam menganalisa sumber daya air, kondisi air tanah seperti salinitas, ketersediaan, dan kedalaman, pun perlu diperhitungkan. Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 menunjukkan peta DAS dan kondisi air tanah di Kabupaten Cirebon.



Gambar 4.12 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Cirebon

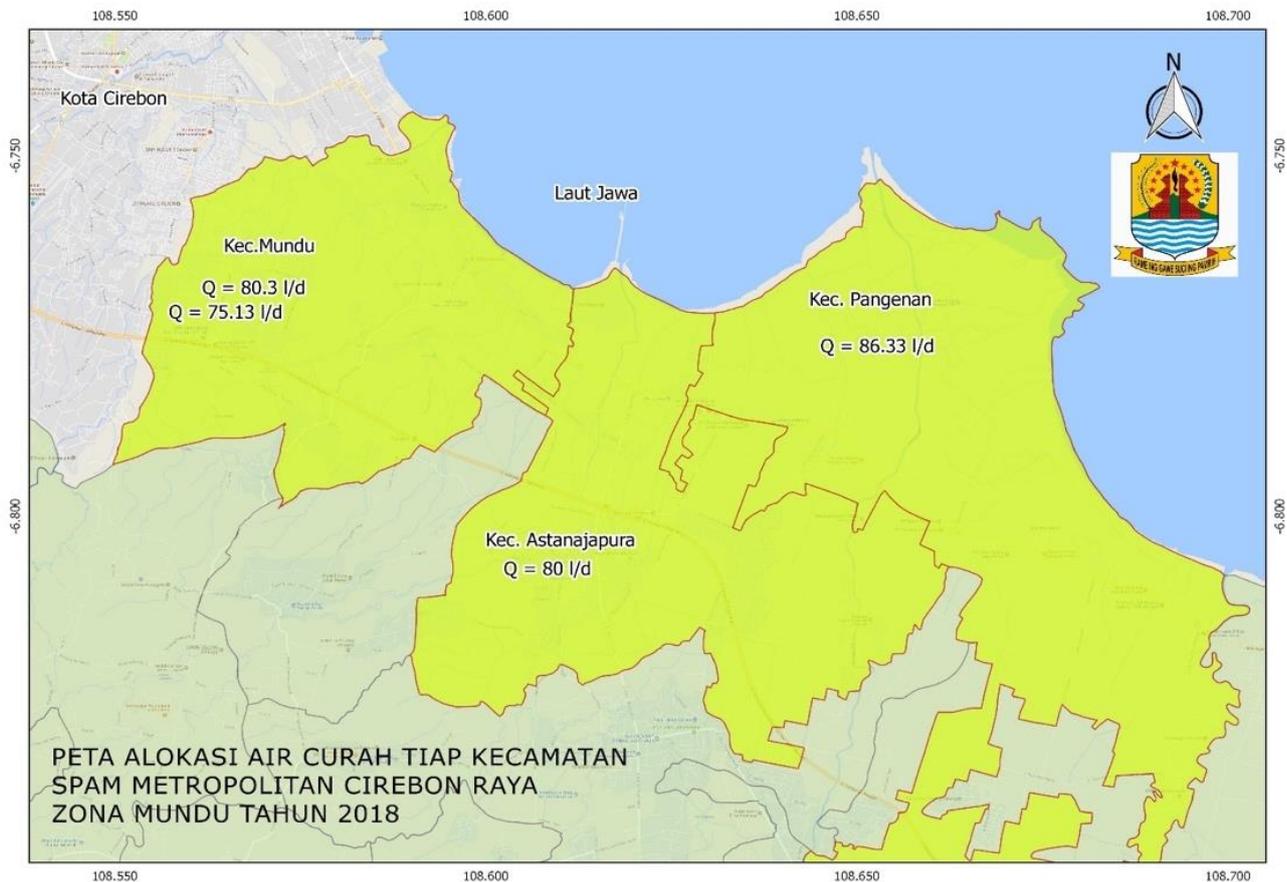


Gambar 4.13 Peta Kondisi Air Tanah di Kabupaten Cirebon

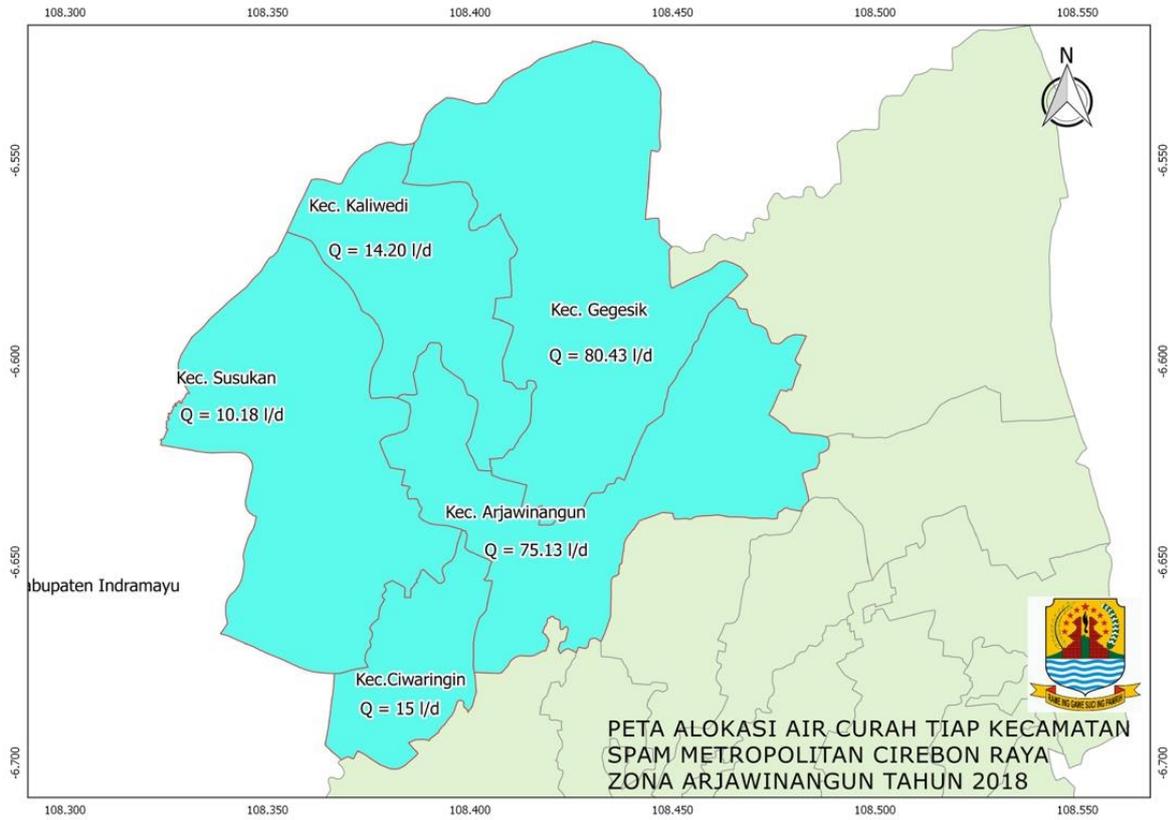
Sumber daya air disalurkan kepada warga dan pengguna melalui dua cara, yaitu PDAM dan irigasi. Pengguna PDAM adalah jenis pelanggan rumah tangga dengan persentasenya mencapai 96,37% atau sebanyak 32.254 rumah tangga. Pelanggan kedua terbanyak berjenis sosial yang mencapai 1,45% atau sebanyak 484 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit adalah dari jenis industri dengan persentase sebesar 0,01% atau sebanyak 2 pelanggan.

Pengaliran air melalui irigasi di Kabupaten Cirebon dibagi menjadi 2 jenis: teknis dan non-teknis (Sederhana). Jalur irigasi teknis, baik primer maupun sekunder, yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 70 kilometer, sedangkan yang dalam kondisi rusak ringan/berat adalah sepanjang 11 kilometer. Untuk jalur non-teknis, saluran irigasi dalam kondisi baik ada sepanjang 29 kilometer, sedangkan yang berada dalam kondisi rusak ringan/berat sepanjang 7 kilometer. Jalur irigasi di Kabupaten Cirebon diatur oleh 85 unit bangunan irigasi dan menyokong operasional sawah seluas 10.103 Hektar.

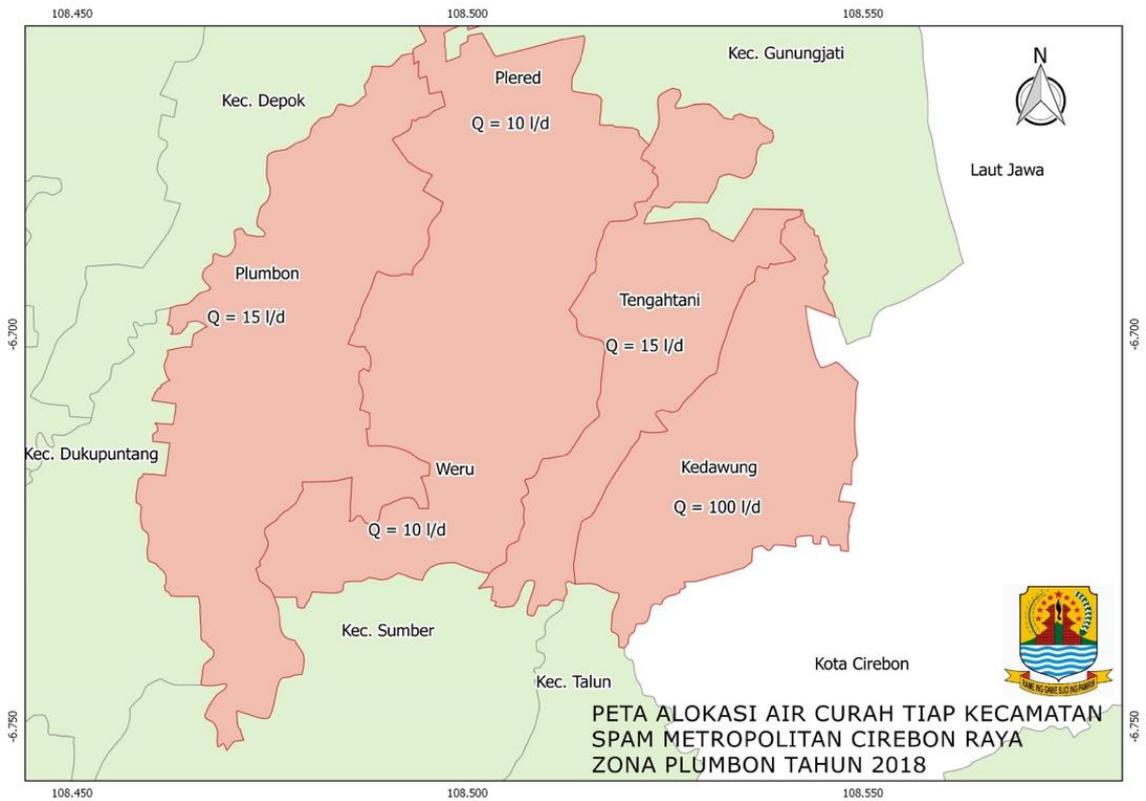
Kabupaten Cirebon sedang menyusun rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibagi menjadi 3 zonasi: Mundu, Arjawinangun, dan Plumbon. Peta ketersediaan air curah di tiap kecamatan yang dibagi per tiga zonasi SPAM tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.14 hingga Gambar 4.16.



Gambar 4.14 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah di Zona Mundu



Gambar 4.15 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Arjawinangun



Gambar 4.16 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Plumbon

Perhitungan alokasi kebutuhan air per kecamatan (dibagi per tiap zonasi), diambil dari Kajian SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Zonasi	Proyeksi Kebutuhan Air s/d 2034	Alokasi Kebutuhan Air	Total Kebutuhan per Zona
1	Mundu	Mundu	153 L/det	135 L/det	320 L/det
2	Pangenan	Mundu	89 L/det	80 L/det	
3	Astanajapura	Mundu	122 L/det	105 L/det	
4	Plumbon	Plumbon	120 L/det	105 L/det	435 L/det
5	Weru	Plumbon	111 L/det	95 L/det	
6	Plered	Plumbon	86 L/det	75 L/det	
7	Tengahtani	Plumbon	62 L/det	55 L/det	
8	Kedawung	Plumbon	118 L/det	105 L/det	
9	Arjawinangun	Arjawinangun	L/det	L/det	L/det
10	Ciwaringin	Arjawinangun	L/det	L/det	
11	Gegesik	Arjawinangun	L/det	L/det	
12	Kaliwedi	Arjawinangun	L/det	L/det	
13	Susukan	Arjawinangun	L/det	L/det	

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Berdasarkan tabel alokasi kebutuhan air dan data air curah yang tersedia, jelas bahwa pada kondisi sekarang hanya sekitar 30% kebutuhan air yang mampu dipenuhi di Kabupaten Cirebon. Untuk mengatasi isu tersebut, sedang dilakukan studi kelayakan untuk mensuplai sisa kebutuhan air dari Bendungan Jatigede, dengan debit sebesar 900 liter/detik yang akan sepenuhnya beroperasi pada tahun 2030. Kajian pemenuhan kebutuhan air dari Bendungan Jatigede ini diperlukan karena kondisi air tanah Kabupaten Cirebon sendiri dinilai kurang layak untuk konsumsi harian. Berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, air tanah di Kabupaten Cirebon masih bersifat payau sampai dengan kedalaman 150 meter. Maka dari itu, perancangan SPAM Jatigede ini diharapkan mampu menyelesaikan isu tersebut.

4.3.2.4 Sumber Daya Manusia

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 2.226.001 jiwa dengan sebaran penduduk yang tidak merata di wilayahnya. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling besar adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk 88.255 jiwa, sedangkan kecamatan yang penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk sebesar 28.501 orang. Rincian kependudukan Kabupaten Cirebon per Kecamatan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Rincian Kependudukan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon (2012-2017)

No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Waled	58.158	59.771	57.885	58.428	54.034
2.	Pasaleman	28.217	28.610	27.465	28.501	26.954
3.	Ciledug	45.644	45.735	46.454	45.508	45.445
4.	Pabuaran	37.280	37.834	38.218	35.919	35.757
5.	Losari	63.266	64.041	61.034	60.687	58.866
6.	Pabedilan	60.970	60.970	56.404	61.314	53.144



No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
7.	Babakan	76.699	73.055	69 154	72.461	66.412
8.	Gebang	64.357	65.363	63 912	65.171	62.618
9.	Karangsembung	37.786	37.538	38 105	37.962	36.373
10.	Karangwareng	31.044	30.607	29 267	30.849	28.341
11.	Lemahabang	54.979	54.678	57 114	55.046	53.073
12.	Susukan Lebak	40.804	40.804	41 026	41.719	40.282
13.	Sedong	43.760	44.465	43 397	44.626	40.222
14.	Astanajapura	79.468	79.732	84 297	79.573	75.666
15.	Pangenan	44.897	45.065	49 529	45.090	43.868
16.	Mundu	73.499	74.352	83 766	73.715	72.513
17.	Beber	41.498	43.595	40 108	41.559	41.555
18.	Greged	57.706	57.501	57 609	61.211	54.736
19.	Talun	70.219	71.019	72 709	69.409	66.397
20.	Sumber	86.062	86.605	91 181	88.255	91.204
21.	Dukupuntang	63.145	64.793	68 483	64.887	63.368
22.	Palimanan	62.873	63.420	61 894	62.282	61.470
23.	Plumbon	78.303	76.605	82 186	74.999	77.352
24.	Depok	65.533	66.734	62 992	64.474	62.802
25.	Weru	63.927	64.451	71 749	63.900	68.477
26.	Plered	56.196	56.346	57 561	51.115	52.642
27.	Tengah Tani	40.686	41.553	45 495	39.021	58.670
28.	Kedawung	66.916	67.572	70 204	56.462	42.701
29.	Gunung Jati	85.210	85.537	88 035	75.737	78.508
30.	Kapetakan	59.362	62.212	56 805	57.882	53.891
31.	Suranenggala	47.197	47.416	45 318	44.422	42.421
32.	Klangenan	52.119	50.207	56 541	54.382	51.020
33.	Jamblang	41.636	40.636	38 779	38.801	38.307
34.	Arjawinangun	70.170	71.759	70 151	63.055	67.557
35.	Panguragan	51.356	52.313	47 305	47.215	42.251
36.	Ciwaringin	40.711	41.200	43 533	34.281	36.144
37.	Gempol	47.704	47.993	48 506	46.795	44.870
38.	Susukan	75.640	77.811	68 862	69.779	62.429
39.	Gegesik	81.428	81.822	77 099	77.115	67.967
40.	Kaliwedi	43.086	44.882	39 675	42.394	39.270
Jumlah			2.289.511	2.306.602	2.245.895	2.159.577

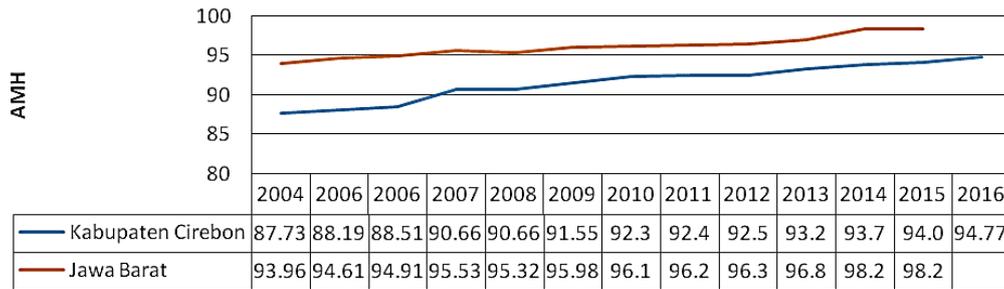
Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan kenaikan dengan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) antara tahun 2010 dan 2017 sebesar 0,98% per tahun.

Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian pendidikan, atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Merujuk pada indikator IPM, bidang pendidikan memiliki dua indikator utama yaitu Angka Melek Huruf (AMH) atau tingkat literasi dan Rata-Rata Lama Sekolah

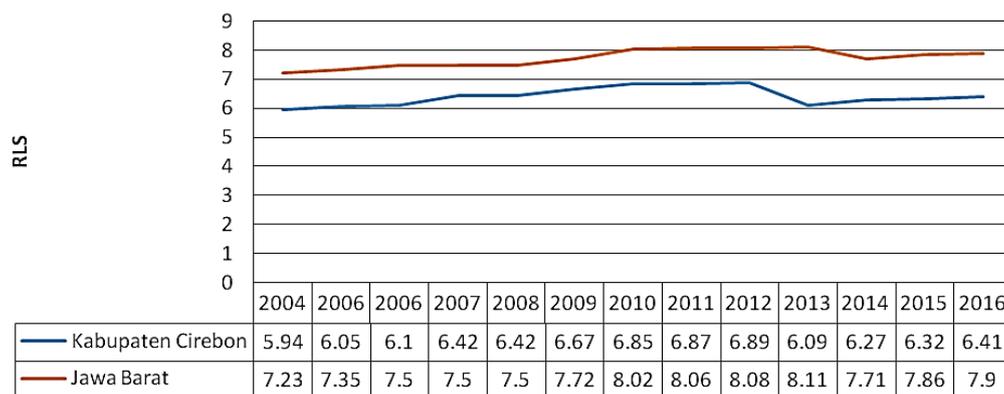
(RLS). Indikator AMH menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam mewujudkan kapasitas sumber daya manusia berkualitas. Berdasarkan data BPS pada kurun waktu tahun 2010-2016, capaian AMH masyarakat Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010, capaian AMH sebesar 87,73% dan pada tahun 2016 angkanya mencapai 94,77%. Hal ini berarti masih menyisakan 5,33% penduduk usia 15 tahun keatas yang masih berstatus buta huruf. Peningkatan capaian AMH menjadi hasil dari dukung berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada upaya pemberantasan buta huruf. Namun demikian, capaian AMH Kabupaten Cirebon masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4.17 Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)

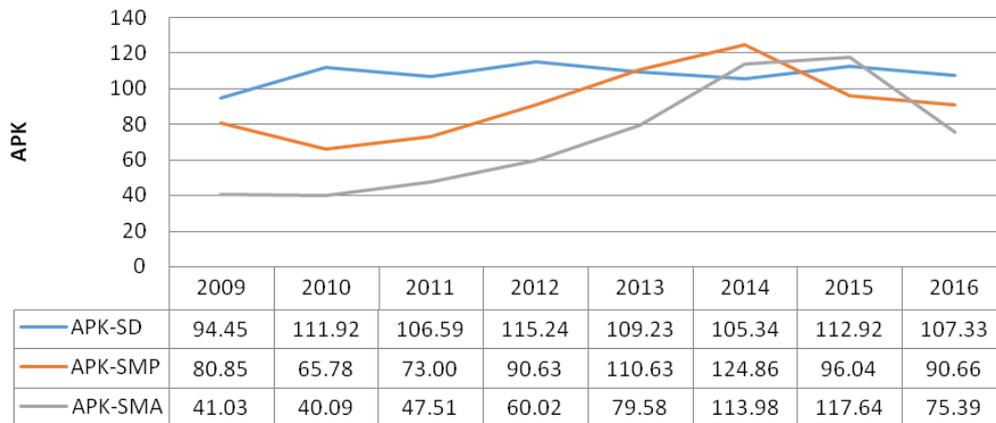
Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah durasi rata-rata tahun penduduk mencapai jenjang pendidikan formal tertinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia semakin baik. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010-2016 capaian RLS mengalami kenaikan dari 6,37 tahun pada 2015 menjadi 6,41 tahun pada 2016 atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas VII. Meskipun demikian, capaiannya masih di bawah capaian RLS Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun berdampak positif bagi peningkatan pendidikan penduduk Kabupaten Cirebon.



Gambar 4.18 Capaian Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)

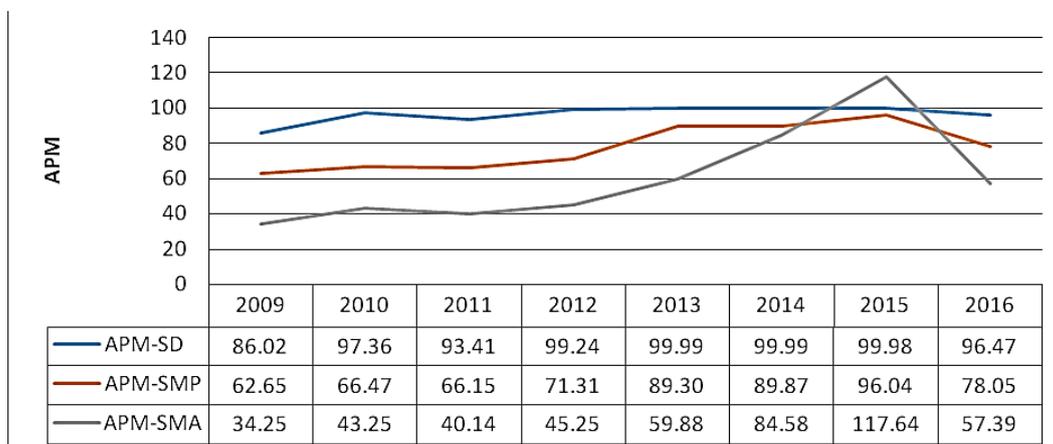
Namun demikian, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa keberlangsungan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga perlu adanya komitmen dan dukungan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika kebijakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD dan menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi aspek sosial dan budaya di lingkungan masyarakat tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan, maka

peningkatan jenjang pendidikan masyarakat kurang optimal. Kendala yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat antara lain bahwa anak lebih difungsikan untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, anak tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensinya, angka partisipasi murni semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan



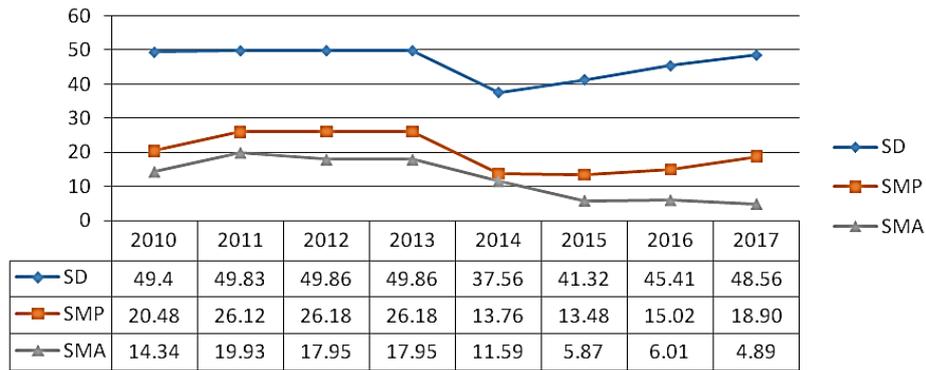
Gambar 4.19 Capaian Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016)

Berdasarkan data BPS tahun 2009-2016, APM pada setiap jenjang pendidikan semakin meningkat. Pada tahun 2009, APM jenjang SD sebesar 86,02% menjadi 96,47% pada tahun 2016. Pada tahun 2009, APM jenjang SMP sebesar 62, 65% meningkat menjadi 78,05% pada tahun 2015. Pada 2009, APM jenjang SMA sebesar 34,25% meningkat menjadi 57,39% pada tahun 2015.



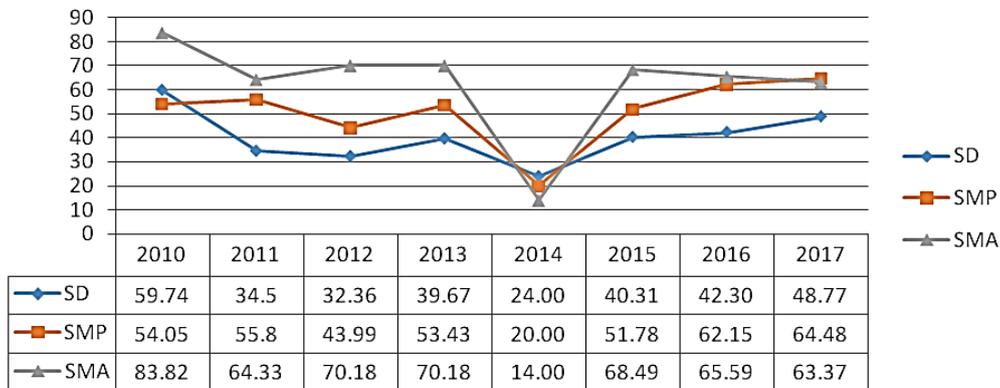
Gambar 4.20 Capaian Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016)

Adapun rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 angkanya berfluktuatif, penurunan kualitas rasio sekolah terdapat pada jenjang SMA yang pada tahun 2017 angka nya semakin kecil menjadi 4,89 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA. Untuk tingkat SD, rasio sekolah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 45,41 menjadi 48,56 sekolah per 10.000 penduduk usia SD.



Gambar 4.21 Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (2010-2014)

Untuk rasio guru per murid jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelas, capaian angka-angka pada tabel dibawah ini.



Gambar 4.22 Capaian Rasio Guru Terhadap Murid (2010-2014)

4.3.2.5 Aspek Penguasaan Teknologi

Sumber daya teknologi ditentukan oleh jumlah dan kualitas institusi pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi. Institusi pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban berorientasi teknologi. Dengan demikian, kualitas sumber daya teknologi ditentukan oleh keberhasilan institusi pendidikan dalam melatih sumber daya manusianya. Berikut adalah jumlah institusi pendidikan di Kabupaten Cirebon dalam kurun dua tahun terakhir dari level sekolah dasar hingga sekolah menengah atas:

Tabel 4.21 Data Institusi Kependidikan Kabupaten Cirebon

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid (Ribuan Orang)		Jumlah Guru (Ribuan Orang)		Rasio Murid-Guru	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SD	923	925	118	199	5,2	8,8	22,7	22,6
Madrasah Ibtidaiyah	156	156	27	27	1,8	1,7	15	15,9
SMP	186	191	45	78	2,6	4,1	17	19
Madrasah Tsanawiyah	120	120	33	33	2,7	2,7	12,2	12,2
SMA	45	47	18	23	1,2	1,2	15	19
SMK	107	108	36	50	2,4	2,4	15	20,9

Adapun untuk pendidikan level universitas, sumber daya teknologi di Kabupaten Cirebon bisa memanfaatkan berbagai universitas unggulan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat terdapat empat perguruan tinggi negeri (PTN) besar yang memiliki sejumlah pusat penelitian, yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjajaran. PTN-PTN tersebut memiliki fokus dengan kekhasan penelitian masing-masing. Adapun universitas dan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah:

Tabel 4.22 Universitas dan Sekolah Tinggi di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Universitas	Jenis Sekolah & Perguruan Tinggi
1.	IAIN Syekh Nurjati	PTN
2.	Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati)	PTS
3.	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)	PTS
4.	Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)	PTS
5.	Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon (UNU)	PTS
6.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'Had Aly	Sekolah Tinggi
7.	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Invada	Sekolah Tinggi
8.	Sekolah Tinggi YPIB Cirebon	Sekolah Tinggi
9.	STIKES Cirebon	Sekolah Tinggi
10.	STIKES Mahardika Cirebon	Sekolah Tinggi
11.	STMIK CIC	Sekolah Tinggi
12.	STMIK IKMI Cirebon	Sekolah Tinggi
13.	Politeknik Kesehatan Yakesbi	Politeknik
14.	Akademi Analisis Kesehatan An-Nasher	Akademi
15.	Akademi Bank Yasmi, Cirebon	Akademi
16.	Akademi Keperawatan Dharma Husada	Akademi
17.	Akademi Keperawatan Muhammadiyah	Akademi
18.	Akademi Keperawatan Buntet Pesantren	Akademi
19.	Akademi Maritim Cirebon	Akademi
20.	Akademi Maritim Suaka Bahari	Akademi
21.	Akademi Pariwisata Yasmi	Akademi
22.	Akademi Perdagangan Widya Dharma	Akademi
23.	AMIK Bumi Nusantara	Akademi
24.	ASM Bumi Nusantara	Akademi

Pengembangan sumber daya teknologi juga didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki pemerintah. Dengan mengandalkan strategi *technology push* dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, industri dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik atau bahkan membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat. Tabel berikut berisikan sub-unit pengembangan, balai besar penelitian, dan balai penelitian yang berada di Jawa Barat, yang memiliki potensi kolaborasi dengan Kabupaten Cirebon untuk pengembangan sumber daya teknologinya.

Tabel 4.23 Balai Penelitian Pemerintah di Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Balai	Lokasi
1.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Bandung
2.	Sub Unit Pengembangan IKM Persepatuan	Bandung
3.	Sub Unit Pengembangan TPT	Majalaya
4.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Sukabumi
5.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Bogor
6.	Sub Unit Pengembangan IKM Perakayuan	Sumedang
7.	Sub Unit Pengembangan Penyamakan Kulit	Garut
8.	Sub Unit Pengembangan Kerajinan	Tasikmalaya
9.	Sub Unit Pengembangan Rotan	Cirebon
10.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian	Bogor
11.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin	Bandung
12.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil	Bandung
13.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik	Bandung
14.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa	Bandung
15.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	Lembang
16.	Balai Penelitian Hortikultura	Lembang
17.	Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	Cikampek
18.	Balai Penelitian Ternak	Bogor
19.	Balai Penelitian Veteriner	Bogor
20.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Lembang
21.	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Bogor
22.	Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan	Bogor
23.	Balai Penelitian Tanaman Padi	Cikampek
24.	Balai Penelitian Tanah dan Agroklimat	Bogor
25.	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian	Bogor
26.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Bogor
27.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri	Bogor

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

4.3.2.6 Aspek Keuangan

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon. Misi BPPT adalah untuk mencapai “Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat tahun 2019. Adapun misinya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan dan meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal.

Sumber daya pembiayaan yang tersedia dapat direpresentasikan oleh jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari suatu daerah. Jumlah penanaman modal yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 4.24 Rincian Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon

No	Mode Penanaman Modal	Tahun 2016	Tahun 2017
1	PMA	7	9
2	PMDN	526	529
Total		533	538

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Jumlah perizinan yang dilayani BPPT sampai saat ini mencapai 37 jenis perizinan dan jumlah perizinan yang telah diterbitkan tahun 2016 berjumlah 9.151SK perizinan dan tahun 2017 berjumlah 8.789 SK perizinan. Nilai total investasi yang telah ditanamkan di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sebesar Rp. 698.246.329.548,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 846.160.215.950,00. Jumlah peningkatan investasi dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 adalah sebesar Rp 147 Miliar.

Untuk tingkat pelayanan perizinan di BPPT dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2016 menjadi 81,71 dan tahun 2017 menjadi 81,24 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor.

Nilai investasi tahun 2016 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan prosentase investasinya yang mencapai 57,98% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor industri pengolahan 29,71% dan diikuti oleh sektor real estate sebesar 4,06%.

Tabel 4.25 Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Cirebon (Proyeksi)

No	Indikator Iklim Investasi	Tahun		% Naik/(Turun)
		2016	2017	
1.	Perda Perizinan	9	9	0
2.	Penerbitan Perizinan	9.151	8.789	(3,96)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	81,71	81,24	(0,58)
4.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	4	4	0
5.	Retribusi perizinan (jutaan)	7.460,17	7.216,67	(3,26)
6.	Nilai Investasi (Jutaan)	698.246	846.160	21,18
7.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)			
	Pertanian	238.055	5.338	(2,327)
	Pertambangan	0	0	0
	Industri Pengolahan	187.752	251.435	636,83
	Pengadaan Listrik dan Gas	66.386	400	(659,86)
	Pengadaan Air	1.400	300	(11)
	Bangunan/Konstruksi	29.193	8.672	(205,21)
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	30.395	490.679	4.502,84
	Transportasi dan Pergudangan	49.384	8.155	(412,29)
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.700	2.670	(0,3)
	Informasi dan Komunikasi	6.346	14.131	77,85
	Jasa Keuangan	300	350	0,5
	Real Estate	60.225	34.400	(258,25)
	Jasa Perusahaan	0	8.700	87
	Jasa Pendidikan	9.100	11.539	24,39
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.270	6.506	(47,64)
	Jasa Lainnya	5.740	2.882	(28,58)

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan sebesar Rp.7.216.670.595,-. Jumlahnya berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp. 7.460.171.318,-. Jenis-jenis retribusi perizinan yang diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO), izin trayek, izin usaha perikanan.

Sektor yang nilai investasinya meningkat di tahun 2017 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan peningkatan 4.502,84%. Adapun sektor yang mengalami penurunan investasi adalah sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan jasa lainnya.

4.3.3 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 65,544,656.80 atau naik sebesar Rp. 20,082,717.50 dari tahun 2018. Nilai PDRB ini selalu meningkat dari tahun 2015. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 33,723,897.20 atau naik sebesar Rp. 1,563,785.80 dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampe dengan tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Tabel 4.26 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,708,696.50	6,339,473.40	6,612,585.40	7,168,887.20	7,476,527.80
B	Pertambangan dan Penggalian	537,137.70	527,989.10	517,407.10	532,939.40	520,610.50
C	Industri Pengolahan	7,612,342.90	8,321,347.20	8,903,176.00	9,521,940.70	10,008,476.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,289.40	69,693.90	86,440.30	102,524.90	118,888.50
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,463.40	30,189.60	35,868.90	40,886.30	46,933.40
F	Konstruksi	4,228,249.90	4,498,753.00	4,817,135.70	5,264,542.30	5,783,085.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,839,375.70	6,146,252.80	6,608,835.20	7,067,680.60	7,592,614.70
H	Transportasi dan Pergudangan	2,835,580.90	3,131,582.60	3,432,642.20	3,751,418.10	4,175,481.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,241,906.40	1,330,941.20	1,484,463.40	1,556,478.40	1,714,274.90
J	Informasi dan Komunikasi	806,878.80	893,196.30	988,956.50	1,063,949.80	1,122,896.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,212,558.00	1,383,017.60	1,527,545.00	1,686,423.40	1,900,601.40
L	Real Estat	791,055.40	838,145.30	930,497.30	1,022,421.90	1,130,748.30
M,N	Jasa Perusahaan	267,883.30	295,546.30	329,473.70	362,649.20	444,920.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,161,579.90	1,229,691.50	1,298,859.40	1,396,795.80	1,502,244.40
P	Jasa Pendidikan	1,643,578.70	1,806,006.90	2,092,991.40	2,416,186.10	2,841,709.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	648,317.70	733,827.90	814,490.50	896,511.70	988,753.10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,114,765.80	1,265,117.70	1,437,918.10	1,609,703.50	18,175,888.30
Produk Domestik Regional Bruto		35,734,660.40	38,840,772.30	41,919,286.10	45,461,939.30	65,544,656.80

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

**Tabel 4.27 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019
(Juta Rupiah)**

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,112,437.90	4,360,550.00	4,426,987.70	4,526,469.20	4,487,076.30
B	Pertambangan dan Penggalian	429,908.50	419,365.20	420,748.60	431,174.90	416,880.00
C	Industri Pengolahan	5,689,437.00	6,020,185.20	6,325,533.60	6,651,078.70	6,754,590.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,516.10	47,424.90	51,708.80	52,999.70	56,761.30
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22,399.70	23,582.90	25,400.10	26,569.10	28,362.00
F	Konstruksi	3,361,642.10	3,527,201.20	3,679,254.60	3,936,183.80	4,181,874.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,486,817.70	4,647,956.90	4,853,022.40	5,010,804.60	5,249,185.40
H	Transportasi dan Pergudangan	2,022,859.40	2,172,361.60	2,310,399.20	2,446,409.60	2,683,458.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,009,223.10	1,049,024.00	1,129,847.30	1,160,826.30	1,225,903.60
J	Informasi dan Komunikasi	784,048.00	866,988.20	950,047.60	1,035,692.20	1,103,908.40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	967,279.00	1,061,760.20	1,113,883.10	1,192,733.10	1,297,662.90
L	Real Estat	621,763.60	649,873.80	713,116.50	775,727.30	847,610.70
M,N	Jasa Perusahaan	227,430.10	247,828.20	271,119.60	294,349.70	321,659.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831,800.80	849,610.40	853,013.30	870,708.10	903,402.40
P	Jasa Pendidikan	1,400,599.10	1,488,636.80	1,630,471.50	1,757,892.60	1,984,683.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	565,619.90	615,279.90	663,085.10	711,632.70	794,031.30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,018,473.00	1,101,682.70	1,205,666.80	1,278,859.80	1,386,847.40
Produk Domestik Regional Bruto		27,596,255.00	29,149,312.10	30,623,305.80	32,160,111.40	33,723,897.20

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.3.4 Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri

4.3.4.1 Kondisi Jaringan Listrik

Layanan dan jaringan listrik di Kabupaten Cirebon dilayani oleh PT. PLN (Persero) area Cirebon. Pelanggan PT. PLN terdiri dari 6 (enam) jenis pelanggan, yaitu: sosial, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan multiguna, total jumlah pelanggan mencapai 4.421.848. lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28 Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	KWh	Rp/KWh
1	Sosial	94.725	16.586.685	10.814.069.794
2	Rumah Tangga	4.182.804	480.096.085	288.257.577.968
3	Bisnis	112.249	54.822.386	66.347.577.968
4	Industri	7.183	534.431.901	427.131.944.876
5	Pemerintah	17.507	16.362.739	17.652.260.002
6	Multiguna	7.380	17.879.857	24.903.748.549
Jumlah		4.421.848	1.120.179.653	835.107.179.157

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2015

4.3.4.2 Kondisi Jaringan Air Minum

Pada tahun 2016, PDAM Kabupaten Cirebon mampu mendongkrak nilai penjualannya disamping jumlah pelanggan yang terus meningkat. Total pelanggan yang terdaftar di PDAM Kabupaten Cirebon sebanyak 38.513 pelanggan (kategori rumah tempat tinggal), dengan wilayah pelayanan sebanyak 146 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.29 Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa Terlayani	Pelanggan
1	Waled	6	555
2	Pasaleman	-	-
3	Ciledug	1	109
4	Pabuaran	2	12
5	Losari	8	258
6	Pabedilan	-	-
7	Babakan	3	34
8	Gebang	6	270
9	Karangsembung	3	10
10	Karangwereng	-	-
11	Iemahabang	1	295
12	Susukan Lebak	-	-
13	Sedong	-	-
14	Astanajapura	-	-
15	Pangenan	-	-
16	Mundu	-	-
17	Beber	6	2,155
18	Greged	1	191
19	Talun	6	2,983
20	Sumber	5	2,694
21	Dukupuntang	3	164
22	Palimanan	8	570
23	Plumbon	2	555
24	Depok	4	320
25	Weru	-	-
26	Plered	2	59
27	Tengah Tani	1	44
28	Kedawung	-	-
29	Gunungjati	14	2,404
30	Kapetakan	10	3,625
31	Suranenggala	9	1,412
32	Klangenan	3	727
33	Jamblang	4	653
34	Arjawinangun	7	5,202
35	Panguragan	9	4,895
36	Ciwaringin	5	1,193
37	Gempol	4	1,725
38	Susukan	-	-
39	Gegesik	12	4,887
40	Kaliwedi	1	512
Jumlah		146	38,513

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

4.3.4.3 Kondisi Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan limbah di wilayah Kabupaten Cirebon masih bercampur dengan sistem pembuangan air hujan. Dimana pembuangan air limbah biasanya disebut dengan *sistem rioolering* dan berbeda dengan sistem pembuangan air hujan yang disebut dengan sistem Drainase, sehingga penanganan sistem pembuangan air limbah di wilayah perencanaan merupakan kombinasi antara *rioolering* dengan sistem *drainase*.

4.3.4.4 Kondisi Jaringan Drainase

Pada umumnya sistem jaringan drainase wilayah Kabupaten Cirebon merupakan sistem drainase tercampur. Pada saat ini air limpasan hujan dan air limbah domestik masyarakat dialirkan dalam satu saluran (tercampur) dan juga sistem drainase di wilayah Kabupaten Cirebon masih mengandalkan jaringan drainase alam yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir di wilayah perencanaan.

Dengan bertambahnya luas lahan yang dipergunakan sebagai lahan untuk membangun perumahan, industri, sarana dan prasarana, maka daya serap tanah semakin berkurang untuk menahan air hujan, dimana ketinggian muka air dan debit sungai cepat terpengaruh oleh jumlah intensitas hujan.

Hal tersebut mengakibatkan daya tampung sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung aliran air yang pada akhirnya daerah-daerah rendah yang dilalui oleh aliran sungai atau aliran saluran drainase akan terkena luapan yang mengakibatkan terjadi genangan dan banjir, selain itu ada juga beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan banjir di wilayah perencanaan yaitu :

- ❑ Pendangkalan saluran akibat endapan lumpur yang berkepanjangan, sehingga akan memperkecil penampang saluran. Dari hal tersebut air yang dapat dialirkan melalui saluran menjadi berkurang, dan akibatnya air menjadi meluap keluar badan saluran akhirnya terjadilah banjir;
- ❑ Terjadi sedimentasi dan hambatan sampah pada sebagian besar saluran drainase yang ada. Sehingga aliran airnya terhambat pada musim hujan;
- ❑ Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah hulu sungai, sehingga aliran permukaan “ Run Off “ yang terjadi semuanya masuk ke sungai dan tidak dapat meresap ke dalam tanah.

4.3.4.5 Kondisi Sistem Persampahan

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 baru meliputi 27 Kecamatan dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari setiap Kecamatan baru terlayani kurang lebih 8%-21% yaitu lokasi yang terletak dipingir jalan, daerah perkotaan, pasar, perusahaan, industri dan lain-lain. Daerah-daerah pelayanan persampahan meliputi Kecamatan Gegesik, Arjawinangun, Palimanan, Klangeran, Plumbon, Dukupuntang, Weru, Sumber, Astanajapura, Cirebon Utara, Gunungjati, Mundu, Lemahabang, Karangsembung, Losari, Ciledug, Babakan, Pangenan, Tengah tani, Pabuaran, Gebang, Jamblang, Gempol, Kedawung, Talun dan Depok.

Total volume timbunan sampah dan tingkat pelayanan persampahan yang baru terlayani 17,5 % - 70 % diantaranya : Perumahan, Pemukiman, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar, Industri, Hotel, Restoran, Perusahaan, Kantor dan sebagainya dan sebagainya. Pola pengelolaan sampah yang berkembang saat ini di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Sistem individual langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* dengan mendatangi sumber sampah, dimana sampah tersebut akan diangkut dengan menggunakan truk biasa atau dump truk.

2. Sistem individual tak langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak serta truk kecil dan sampah yang ada ditampung di tempat penyimpanan sementara yang berupa container kapasitas 6 m³, dan kemudian sampah yang terkumpul tersebut dipindahkan ke TPA
3. Sistem komunal yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah dan dibuang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sebagai tempat penampungannya berupa container, kemudian di buang ke TPA. Selain itu dilakukan penanganan secara langsung oleh para penghasil sampah, yaitu dengan dibakar atau ditimbun pada lahan-lahan kosong.

4.4 Perkembangan Pemanfaatan Ruang KPI di Kabupaten Cirebon

4.4.1 Kecenderungan Perkembangan Kegiatan Industri

Sejumlah kegiatan sektor perindustrian berkembang di Kabupaten Cirebon baik sejak lama secara tradisional maupun mengikuti arah kebijakan dan perkembangan regional yang ada. Sub-sektor industri yang berkembang antara lain pengolahan ikan, garam, rotan, pakan ternak, perawatan kapal, bahan galian non logam, hingga industri pengolahan makanan dan tekstil dalam skema industri kecil dan menengah (SIKM)

4.4.1.1 Industri Pengolahan Ikan

Kabupaten Cirebon memiliki potensi industri pengolahan ikan yang sangat tinggi, mengingat Kabupaten Cirebon memiliki garis pantai yang relatif panjang. Walaupun demikian, potensi tersebut belum termaksimalkan akibat belum dioptimalkannya PPI yang telah ada, di antaranya PPI Gebang. Alasan utama PPI Gebang belum dapat dioptimalkan adalah karena adanya sedimentasi sehingga perahu nelayan tidak bisa berlabuh.

Industri pengolahan ikan sangat bergantung pada jaminan konsistensi pasokan bahan baku. Hal tersebut sulit untuk dicapai karena kegiatan nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca di perairan utara. Selain itu, saat ini terdapat kecenderungan penurunan hasil penangkapan ikan.

Ketidakpastian pasokan ikan untuk bahan baku industri dapat disiasati dengan ditumbuhkannya daerah-daerah budidaya ikan laut (*offshore aquaculture*) maupun penangkaran ikan tawar. Budidaya ikan laut dan penangkaran ikan tawar lebih dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan cuaca dibandingkan dengan penangkapan ikan laut. Dengan demikian terdapat kaitan antara sumber bahan baku dan industri pengolahan ikan.

Industri besar pengolahan ikan masih mengandalkan bahan baku impor karena hanya sedikit tangkapan nelayan lokal yang memenuhi persyaratan. Harus ada sinergitas antara nelayan dan industri agar penyerapan ikan sepenuhnya didapat dari lokal dengan demikian terdapat penambahan nilai ekonomi bagi nelayan.

Saat ini industri pengolahan ikan yang ada di kab Cirebon di antaranya adalah industri pengolahan ikan asin, PT Suritani Pemuka, dan PT Sumber Laut Bengindo. Khusus untuk industri pengolahan ikan asin, salah satu yang menjadi penghambat pertumbuhan adalah tidak stabilnya harga garam dan cuaca untuk melakukan pengeringan.

4.4.1.2 Industri garam

Seperti industri pengolahan ikan, industri garam di Kab. Cirebon memiliki potensi yang sangat tinggi karena garis pantai yang panjang. Di sisi lain, kebutuhan akan garam di dalam negeri sangat tinggi. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam di tahun 2018 diperkirakan sebanyak 4,5 juta ton, dengan perincian: kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton dan kebutuhan garam konsumsi sekitar 800.000 ton. Sayangnya, dari angka tersebut, garam produksi dalam negeri hanya mampu memasok ke industri sebesar 1,6 juta ton.

Pertumbuhan industri garam di Kab. Cirebon belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri garam adalah tidak stabilnya harga jual. Pada musim kemarau, cuaca sangat memungkinkan untuk melakukan penguapan sehingga produksi garam sedang pada puncak-puncaknya. Puncak produksi garam yang terjadi serentak menyebabkan harga garam turun drastis sekitar Rp. 800 per kg. Hal ini diperparah dengan keadaan kebanyakan petani yang tidak memiliki gudang sehingga tidak bisa menyimpan garam lalu menjualnya pada saat harga kembali normal (musim hujan).

Harga jual yang rendah salah satunya diakibatkan dari rendahnya kualitas garam yang dihasilkan. Walaupun kini terdapat teknologi ulir filtrasi, kebanyakan petani garam masih melakukan produksi garam dengan teknik tradisional. Hal ini sangat disayangkan mengingat teknologi ulir filtrasi dapat meningkatkan kandungan NaCl menjadi di atas 97%.

Selain dengan menunggu harga garam menjadi stabil kembali, peningkatan harga jual garam dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan nilai ekonomis garam. Hal itu dilakukan dengan cara memproduksi produk turunan garam seperti air britten dan garam spa.

Di sisi lain, pada musim hujan harga garam akan meningkat drastis hingga sampai Rp 2500 per kg. Hal tersebut akan membuat industri pengolahan garam terseok-seok. Bahan baku yang mahal akan mengurangi profit dan akan menghambat laju produksi industri pengolahan garam. Fluktuasi harga garam perlu diredam terlebih lagi yang menikmati tingginya harga bahan baku garam bukanlah petani garam.

Lahan tambak garam terluas di Kabupaten Cirebon ada di Kecamatan Pangenan (di Desa Rawaurip dan Desa Bendungan). Dengan luas lahan lebih dari seribu hektar, Kecamatan Pangenan menjadi salah satu wilayah penghasil garam rakyat (krosok) terbesar di Cirebon. Jika dijumlah maka hasil pengolahan garam rakyat lumayan banyak dan diprediksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Cirebon.

4.4.1.3 Industri Bahan Galian Non Logam

Industri bahan galian non logam seperti batu alam, keramik, dan bata merah merupakan salah satu komoditas andalan Kab. Cirebon. Walaupun demikian terdapat beberapa keadaan yang dapat dioptimalkan, di antaranya adalah pengendalian limbah industri.

Limbah industri yang sudah cukup mengganggu masyarakat adalah limbah industri batu alam. Limbah tersebut terbuang ke sungai di mana sungai tersebut merupakan salah satu mata air persawahan dan dijadikan lahan tambak perikanan tawar. Perusahaan industri batu alam perlu dikelompokkan di sebuah kawasan dimana pada kawasan tersebut tersedia pengolahan limbah terpadu. Saat ini pemerintah Kabupaten sudah menyediakan lahan 1 ha untuk relokasi 60-70 industri batu alam di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang. Selain itu industri batu alam berada juga di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber.

Industri keramik dan batu bata hampir setiap tahun mengalami fluktuasi permintaan, harga, dan kemampuan produksi. Beruntung, pada musim kemarau ketika kemampuan produksi batu bata dan keramik sedang pada puncaknya, permintaan terhadap kedua komoditi. Selain itu pengelolaan limbah menjadi masalah penghambat tumbuhnya industri keramik dan batu bata. Oleh karena itu pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) plus rumah produksi pemanfaatan limbah batu alam (produk bata ringan) di Desa Cipanas.

Di Kabupaten Cirebon terdapat dua kompleks pabrik semen milik PT Indocement Tunggal Prakasa di Palimanan. Pabrik ini sudah berdiri di Gunung kapur Kromong dari tahun 1984 dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

4.4.1.4 Industri Rotan

Bukan rahasia lagi bahwa industri rotan merupakan industri unggulan kab. Cirebon. Industri tersebut sudah mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya. Saat ini industri rotan terancam dari rendahnya regenerasi pengrajin rotan. Anak muda sangat sedikit yang mau berusaha di bidang industri rotan.

Ketersediaan bahan baku juga menjadi kendala bagi tumbuhnya industri rotan. Pemerintah Kabupaten telah berhasil menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah pemda lain untuk memastikan jaminan bahan baku rotan selalu tersedia. Selain itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan baku rotan mentah, Walaupun demikian, masih saja banyak oknum yang masih mengekspor bahan baku rotan mentah dengan dalih yang diekspornya adalah produk rotan setengah jadi.

Saat ini teknologi pengolahan rotan pun dapat terbilang masih minim. Hal tersebut berbeda dengan keadaan industri rotan di Tiongkok. Rencana pemindahan pabrik rotan Tiongkok ke Kab. Cirebon harus dimanfaatkan untuk melakukan transfer teknologi kepada industri rotan yang sudah ada. Salah satunya adalah pusat industri rotan Cirebon yang terletak di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Pusat industri tersebut direncanakan akan menjadi desa wisata rotan.

4.4.1.5 Industri Pakan Ternak

Industri Pakan Ternak Kab. Cirebon dimotori oleh pabrikan besar. Diantara pabrikan tersebut adalah pabrikan besar milik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Sido Agung Agro Prima. Kedua pabrik tersebut menelan investasi sebesar 40 juta USD untuk pabrik milik PT Charoen Pokphand Indonesia dan 650 miliar IDR untuk pabrik milik PT Sido Agung Agro Prima.

Pabrik pakan ternak milik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk resmi beroperasi sejak Januari 2014 dengan kapasitas produksi 20.000 ton pakan ternak per bulan. Lokasi pabrik tersebut berada di jalur pantura, di dekat pintu keluar tol Palimanan-Kanci, Kabupaten Cirebon.

Pabrik milik PT Sido Agung Agro Prima memiliki luas 40 ribu meter persegi. Adapun areal pemasaran dari pabrik ini meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pabrik ini berlokasi di Jl. Raya Cirebon - Losari KM. 16 Desa Rawa Urip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.

Kedua pabrik tersebut masih mengandalkan impor jagung untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Hal ini dapat menjadi kesempatan emas bagi petani jagung di sekitar Cirebon untuk menjual hasil taninya ke pabrik tersebut. Dengan demikian perekonomian petani pun dapat terangkat.

4.4.1.6 Industri Tekstil

Industri tekstil Kab. Cirebon dimotori oleh PT. Embee Plumbon Tekstil dan PT. Plumbon International Textil. Kedua perusahaan tersebut memiliki pabrik yang berada di Kec. Plumbon, Kab. Cirebon dekat pintu Tol Kanci-Palimanan. Yang menjadi sorotan masyarakat terhadap pabrik tekstil tersebut adalah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak terjadi hanya sekali. Dengan demikian K3 di pabrik tekstil perlu ditingkatkan.

4.4.1.7 Industri Perawatan Kapal

Industri Perawatan Kapal di Kab. Cirebon sesungguhnya belum terlalu berkembang. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat potensi industri ini untuk tumbuh sangat tinggi sekali. Diterapkannya asas cabotage – yang mewajibkan muatan domestik diangkut kapal dalam negeri – secara otomatis menggenjot pertumbuhan kapal di dalam negeri. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi potensi bisnis perawatan kapal (docking) di Indonesia.. Berdasarkan data Kemenhub, pertumbuhan jumlah kapal nasional sejak Mei 2005 hingga Desember 2015 naik hingga 167% atau menjadi 16.142 unit kapal.

Ceruk pasar perawatan kapal itu rupanya dilirik beberapa galangan kapal yang berbasis di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya, PT Dok Bahari Nusantara, yang telah membangun fasilitas drydock di kawasan Pelabuhan Cirebon yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Selain membangun kapal baru, PT Dok Bahari Nusantara juga mengerjakan service dan perawatan. Banyak kapal yang perawatan dan service-nya dilakukan oleh PT Dok Bahari Nusantara seperti kapal-kapal tongkang dan kapal milik Pertamina (Persero). Sudiding berharap mendapat kepercayaan pemerintah untuk melakukan perawatan kapal ternak yang home base-nya di Pelabuhan Cirebon setelah menyelesaikan pengiriman dari NTT ke Jakarta. PT Gamatara Trans Ocean Shipyard melihat juga banyaknya permintaan kapal yang ingin melakukan perawatan. Dalam lima tahun terakhir, kapal yang masuk dok terus meningkat hingga 90 persen. Dengan luasan 21.585 meter persegi yang dimiliki, PT Gamatara Trans Ocean Shipyard mampu melakukan perawatan 60 kapal per tahun. Luas area tersebut belum memadai untuk menampung permintaan kapal yang membutuhkan perawatan.

4.4.1.8 Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat sedang mengupayakan adanya sentra-sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, meubel, konveksi, dan usaha lainnya. Adapun komoditi yang mempunyai sentra di Kabupaten Cirebon adalah kerajinan rotan, batik, pakaian jadi, meubelair kayu, batu alam, sandal karet, makanan ringan, emping melinjo dan kerajinan kulit kerang. Sentra dari masing masing komoditi tertera pada Tabel 4.30 .

Tabel 4.30 Sentra IKM Kab. Cirebon

Komoditas	Lokasi Sentra	Komoditas	Lokasi Sentra
Kerajinan Rotan	Kec. Weru	Sandal Karet	Kec. Plumbon
	Kec. Plumbon		Kec. Plered
	Kec. Depok	Makanan Ringan	Kec. Weru
	Kec. Plered		Kec. Kedawung
	Kec. Palimanan		Kec. Tengah Tani
Meubelair Kayu	Kec. Plered		Kec. Plumbon
	Kec. Weru	Emping Melinjo	Kec. Kedawung
	Kec. Depok		Kec. Ciwaringin
	Kec. Dukupuntang		Kec. Gunung Jati



Komoditas	Lokasi Sentra	Komoditas	Lokasi Sentra
Batu Alam	Kec. Palimanan	Kerajinan Kulit Kerang	Kec. Tengah Tani
	Kec. Depok		Kec. Weru
	Kec. Gempol	Pakaian Jadi	Kec. Arjawinangun
	Kec. Dukupuntang		Kec. Sumber
Batik	Kec. Plered		Kec. Weru
	Kec. Tengah Tani	Kec. Susukan	
	Kec. Ciwaringin		

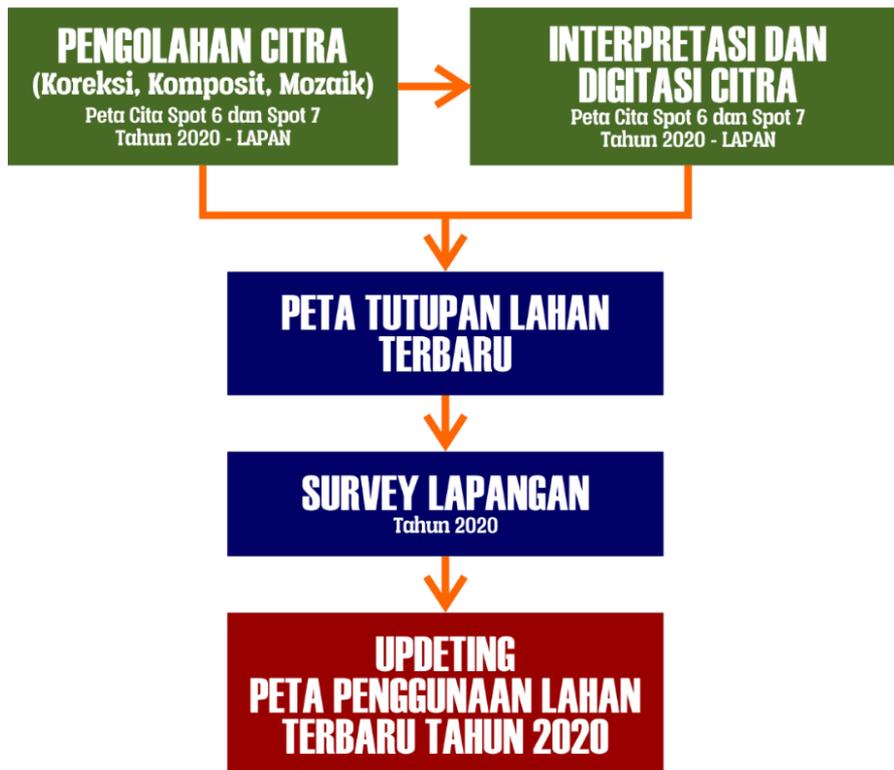
Sumber : Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cirebon, 2020

4.4.2 Penggunaan Lahan Eksisting untuk Kegiatan Industri

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan eksisting di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, penggunaan lahan terbagi menjadi 44 klasifikasi penggunaan lahan. Total luas lahan mencapai 106.996,93 Ha. Luas lahan terbesar adalah sawah dengan luas mencapai 52.066,98 Ha, atau sekitar 48,66% dari total luas lahan Kabupaten Cirebon. Adapun dasar penentuan/mekanisme Updeting Penggunaan lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan Peta Citra
2. Interpretasi Dan Pengolahan Peta Citra
3. Survey Lapangan

Peta citra yang digunakan adalah peta citra spot 6 dan spot 7 tahun 2020 yang bersumber dari LAPAN (Lembaga Penelitian Nasional).



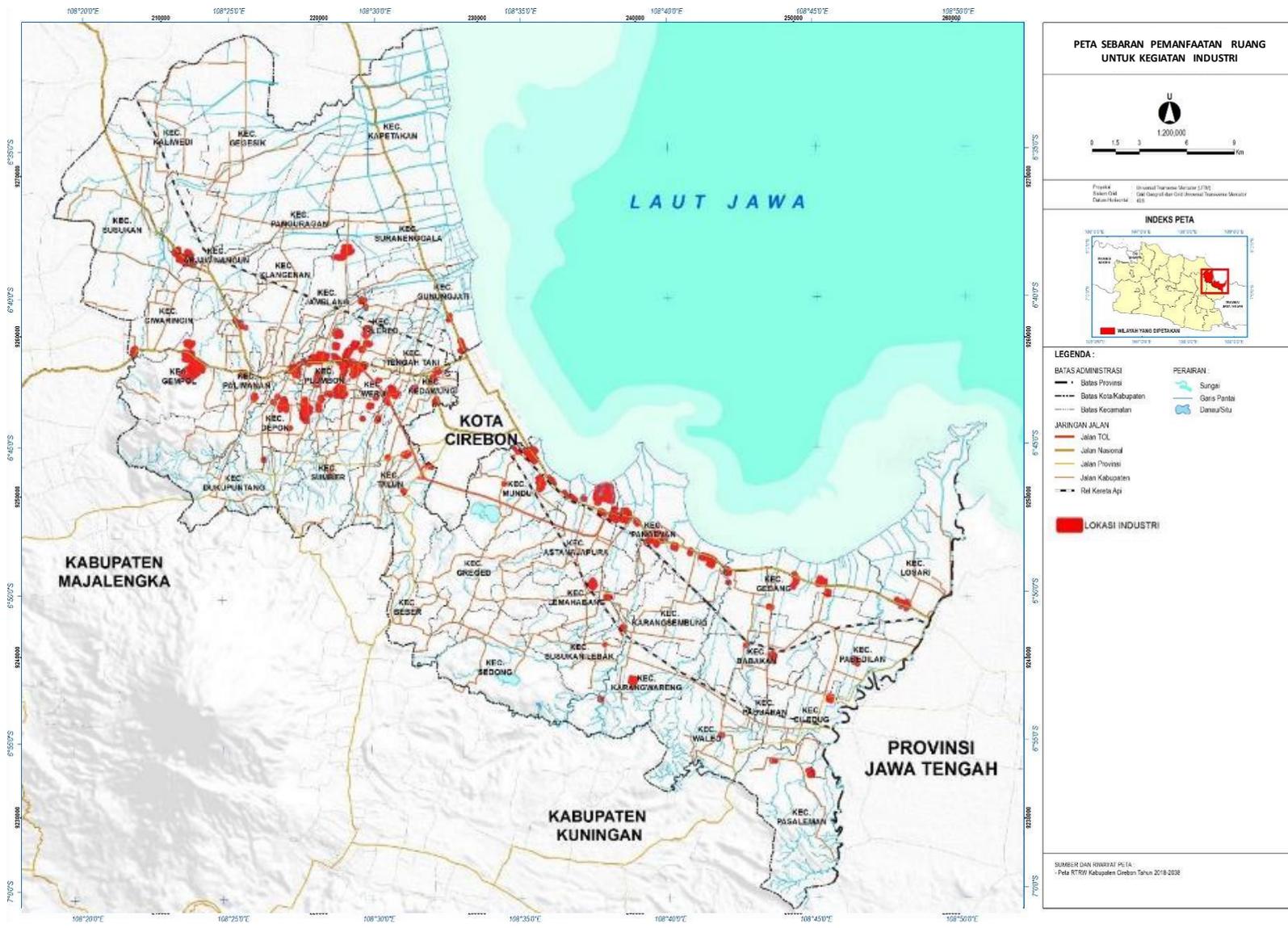
Gambar 4.23 Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Perkembangan kawasan industri di Kab. Cirebon relatif tersebar di wilayah yang dilalui Jaringan Jalan Utama Kabupaten (Jalan Kolektor maupun Arteri). Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Industri di Kab.Cirebon pada tahun 2021 ini tercatat 1.480,21 Ha atau baru termanfaatkan 10,38% dari alokasi ruang KPI. Artinya, masih ada sisa potensi lahan 9.021,31 Ha untuk pengembangan KPI.

Tabel 4.31 Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bangunan Industri	941.32	0.88
2	Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	103.60	0.10
3	Bangunan Perkantoran	163.32	0.15
4	Bangunan Permukiman Desa	9,986.70	9.33
5	Bangunan Permukiman Kota	8,163.87	7.63
6	Danau Alami	33.00	0.03
7	Gardu Induk	0.69	0.00
8	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	115.51	0.11
9	Hutan Rakyat	4,614.06	4.31
10	Instalasi TNI (AD / AL / AU)	25.41	0.02
11	Jaringan Jalan	358.03	0.33
12	Kebun Campuran	6,278.82	5.87
13	Kolam Ikan Air Tawar	5.92	0.01
14	Lahan Terbuka Lain	150.10	0.14
15	Landas Pacu (runway) dan Taxiway	3.87	0.00
16	Lapangan	60.80	0.06
17	Lembaga Masyarakat / Penjara	8.01	0.01
18	Padang Golf	63.53	0.06
19	Padang Rumput	45.64	0.04
20	Pariwisata / Seni / Budaya / Olah Raga Lainnya	2.46	0.00
21	Pekarangan	486.06	0.45
22	Pemakaman	151.37	0.14
23	Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	435.30	0.41
24	Perkebunan / Kebun	5,877.64	5.49
25	PLTU	56.65	0.05
26	Ruang Terbuka Hijau	3.91	0.00
27	Sarana Kesehatan	72.54	0.07
28	Sarana Olahraga	16.72	0.02
29	Sarana Pelayanan umum	59.87	0.06
30	Sarana Pendidikan	516.92	0.48
31	Sarana Peribadatan	70.39	0.07
32	Sarana Sosial	0.07	0.00
33	Sarana Transportasi	2.95	0.00
34	Sawah	52,066.98	48.66
35	Semak Belukar	2,830.68	2.65
36	Sempadan Sungai	5.29	0.00
37	Situs Purbakala	0.18	0.00
38	Stasiun Kereta Api	2.88	0.00
39	Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	18.57	0.02
40	Sungai	1,035.12	0.97
41	Tambak Garam	9,548.15	8.92
42	Tegalan / Ladang	2,396.45	2.24
43	Waduk Irigasi	63.52	0.06
44	Waduk Multiguna	154.10	0.14
Jumlah		106,996.93	100.00

Sumber : Peta Citra Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2020 dan Survey Lapangan Tahun 2020



Gambar 4.25 Peta Penmanfaatan Lahan untuk Kegiatan Industri di Kabupaten Cirebon, 2021

4.4.3 Isu Perkembangan Lahan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon

Sejumlah isu yang mengemuka terkait perkembangan pemanfaatan lahan industri di Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil kajian lapangan yang meliputi diskusi penggalian informasi dengan stakeholders perindustrian, baik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon selaku regulator maupun dari masyarakat dan sejumlah kalangan dunia usaha. Beberapa isu yang berkembang antara lain:

- Peruntukan industri genteng merah dan industri penunjang pariwisata di Kecamatan Ciwaringin. Pada kenyataannya menjadi Kawasan peruntukan industri besar dan industri manufaktur.
- Terdapat potensi pengembangan industri yang mendukung pertanian namun belum tertuang dalam RTRW, khususnya terdapat di Kecamatan Susukan Lebak.
- Berkembangnya industri di Kecamatan Karangwareng, sementara arahan RTRW adalah kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Adanya keinginan untuk mengembangkan industri menengah (manufaktur, rotan, makanan dan mebeleur) di Kecamatan Arjawinangun.
- Adanya peluang investasi di Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin untuk mengembangkan industri.
- Adanya rencana pengembangan industri besar di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang.
- Adanya rencana pengembangan industri (KI) di Kecamatan Losari, yang mengalami penentangan dari masyarakat setempat karena berkaitan dengan keberadaan / posisi kawasan industri yang bersinggungan dengan lahan permukiman masyarakat yang telah ada.



Gambar 4.26 Sejumlah Kegiatan Industri yang Berkembang pada wilayah KPI dan sekitarnya di salah satu Wilayah Sampel bagian Utara Kabupaten Cirebon



**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

5

ANALISIS POTENSI dan KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON



5.1 Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan Eksisting

Sejak ditetapkan dalam Perda No.7 tahun 2018, RTRW Kabupaten Cirebon telah menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon selama ini. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas ruang, yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah, sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal).

Evaluasi Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon merupakan salah satu upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang peruntukan industri di wilayah Kabupaten Cirebon. Data yang menjadi benchmark dalam pelaksanaan evaluasi adalah peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon 2018 dengan peta tutupan lahan Kabupaten Cirebon 2020. Selain itu, dilakukan pula observasi lapangan pada wilayah-wilayah tertentu untuk melihat perkembangan pemanfaatan lahan yang mengarah pada penggunaan ruang, apakah selaras dengan fungsi KPI yang masih memperbolehkan bentuk-bentuk kegiatan tertentu, atau justru ada kegiatan yang sebetulnya sudah berkembang dan kurang selaras dengan rencana pengembangan kawasan sebagai peruntukan industri.

Berdasarkan interpretasi peta tutupan lahan tahun 2020, teridentifikasi jenis tutupan lahan pada lokasi yang direncanakan sebagai KPI :

- Hutan mangrove sekunder
- Hutan rakyat
- Bangunan permukiman kota
- Bangunan permukiman desa
- Perdagangan & jasa
- Penambangan bukan situ
- Bangunan industri
- Bangunan perkantoran
- Sarana peribadatan
- Sarana pendidikan
- Sarana Kesehatan
- Stasiun pompa bahan bakar umum
- Jaringan jalan
- Kebun campuran
- Kolam ikan air tawar
- Lahan terbuka lain
- Pekarangan
- Pemakaman
- Perkebunan/ kebun
- Sawah
- Semak belukar
- Tambak garam
- Tegalan/ladang
- Instalasi TNI (AD/AL/AU)
- PLTU
- Waduk
- Sungai

5.1.1 Simpangan Pola Ruang

Simpangan rencana pola ruang adalah gambaran mengenai kecenderungan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang/rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting yang ada pada lokasi tersebut. Adapun rencana pola ruang yang dimaksud adalah kawasan peruntukan industri dengan luas 10.066,22 Ha.

Tabel 5.1 Luas Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 Menurut Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri (Ha)
1	Kecamatan Arjawinangun	496.79
2	Kecamatan Astanajapura	950.27
3	Kecamatan Babakan	8.43
4	Kecamatan Beber	-
5	Kecamatan Ciledug	342.81
6	Kecamatan Ciwaringin	232.29
7	Kecamatan Depok	42.52
8	Kecamatan Dukupuntang	0.35
9	Kecamatan Gebang	1,062.37
10	Kecamatan Gempol	420.80
11	Kecamatan Greged	500.70
12	Kecamatan Gunungjati	8.34
13	Kecamatan Jamblang	15.76
14	Kecamatan Kaliwedi	7.13
15	Kecamatan Kapetakan	599.29
16	Kecamatan Karangsembung	6.34
17	Kecamatan Karangwareng	-
18	Kecamatan Kedawung	23.23
19	Kecamatan Lemahabang	123.70
20	Kecamatan Losari	406.68
21	Kecamatan Mundu	1,051.13
22	Kecamatan Pabedilan	938.20
23	Kecamatan Palimanan	386.20
24	Kecamatan Pangenan	1,412.24
25	Kecamatan Pasaleman	-
26	Kecamatan Plered	34.60
27	Kecamatan Plumbon	135.31
28	Kecamatan Sedong	-
29	Kecamatan Sumber	1.04
30	Kecamatan Susukan	812.51
31	Kecamatan Susukan Lebak	-
32	Kecamatan Talun	6.29
33	Kecamatan Waled	0.28
34	Kecamatan Weru	40.64
Grand Total		10,066.22

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Hasil evaluasi simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri dan pertambangan berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020

No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	675.24
2	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	1.69
3	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	5.48
4	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	141.83
5	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	74.10
6	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	13.04
7	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	423.45
8	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	2.78
9	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	50.04
10	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	380.45
11	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam IKan Air Tawar	3.14
12	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	0.01
13	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	96.86
14	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	3.47
15	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	9.73
16	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	727.67
17	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	55.56
18	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	0.13
19	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	13.29
20	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	0.14
21	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	5,160.61
22	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	128.31
23	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	0.43
24	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	1.07
25	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	1,861.28
26	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	234.70
27	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	1.72
Grand Total		10.049,46

Sumber : Hasil Kajian dan Analisis, 2021

Sedangkan untuk simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting tahun 2020 berdsarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3 Simpangan Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
1	KECAMATAN ARJAWINANGUN	480,69
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	16,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	2,85
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	34,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	1,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	6,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	23,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	10,30
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	368,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	4,55
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	29,09
2	KECAMATAN ASTANAJAPURA	888,76
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	102,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	42,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	3,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	5,79
	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	2,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	5,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	69,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,47
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	61,51
	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	55,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	381,08
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,74
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	217,66
3	KECAMATAN BABAKAN	8,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	7,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,87
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	0,13
4	KECAMATAN CILEDUG	342,81
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,19
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	1,63
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	2,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	8,64
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	19,15
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	29,24



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	8,81
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	154,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	2,07
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	84,30
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	0,23
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	25,91
5	KECAMATAN CIWARINGIN	232,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	10,75
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	15,46
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	54,41
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	53,71
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	1,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,90
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	94,48
6	KECAMATAN DEPOK	42,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	40,50
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	2,02
7	KECAMATAN DUKUPUNTANG	0,35
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	0,35
8	KECAMATAN GEBANG	1.062,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,57
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	12,45
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	3,44
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	17,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	918,39
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	102,40
9	KECAMATAN GEMPOL	420,79
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	99,44
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	14,67
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	66,59
	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	9,73
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	96,92
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	49,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	46,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	36,22
10	KECAMATAN GREGED	500,70
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	363,22



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	1,91
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	6,77
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	127,76
11	KECAMATAN GUNUNGJATI	8,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,31
12	KECAMATAN JAMBLANG	15,76
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	15,76
13	KECAMATAN KALIWEDI	7,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	6,10
14	KECAMATAN KAPETAKAN	599,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	153,70
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	445,59
15	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	6,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,34
16	KECAMATAN KEDAWUNG	23,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	22,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,23
17	KECAMATAN LEMAHABANG	123,69
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	12,57
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	106,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	4,32
18	KECAMATAN LOSARI	406,68
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	1,85
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	2,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	0,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	243,89
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	158,41
19	KECAMATAN MUNDU	1.051,15
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	13,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	44,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	60,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	2,87



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	43,16
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	17,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	5,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	753,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,05
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	90,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	8,07
	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	1,72
20	KECAMATAN PABEDILAN	938,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	4,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	0,55
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	2,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	39,93
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	2,12
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	66,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	795,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	24,37
21	KECAMATAN PALIMANAN	386,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	14,67
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,37
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	10,12
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	9,40
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,66
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	130,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	0,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	140,71
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	65,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	0,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	12,24
22	KECAMATAN PANGENAN	1.412,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	66,26



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	2,87
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	7,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	35,92
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam Ikan Air Tawar	3,14
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	55,80
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	390,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	3,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	847,14
23	KECAMATAN PLERED	34,59
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	31,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	3,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,02
24	KECAMATAN PLUMBON	135,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	134,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,18
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	0,19
25	KECAMATAN SUMBER	1,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	1,04
26	KECAMATAN SUSUKAN	812,50
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	10,88
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	4,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	14,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,62
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,80
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	5,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	773,82
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,46
27	KECAMATAN TALUN	6,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,17
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	0,12
28	KECAMATAN WALED	0,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	0,28
29	KECAMATAN WERU	40,63
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	39,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,94
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	0,14
Grand Total		10.049,46

Sumber : Hasil Kajian dan Analisis, 2020

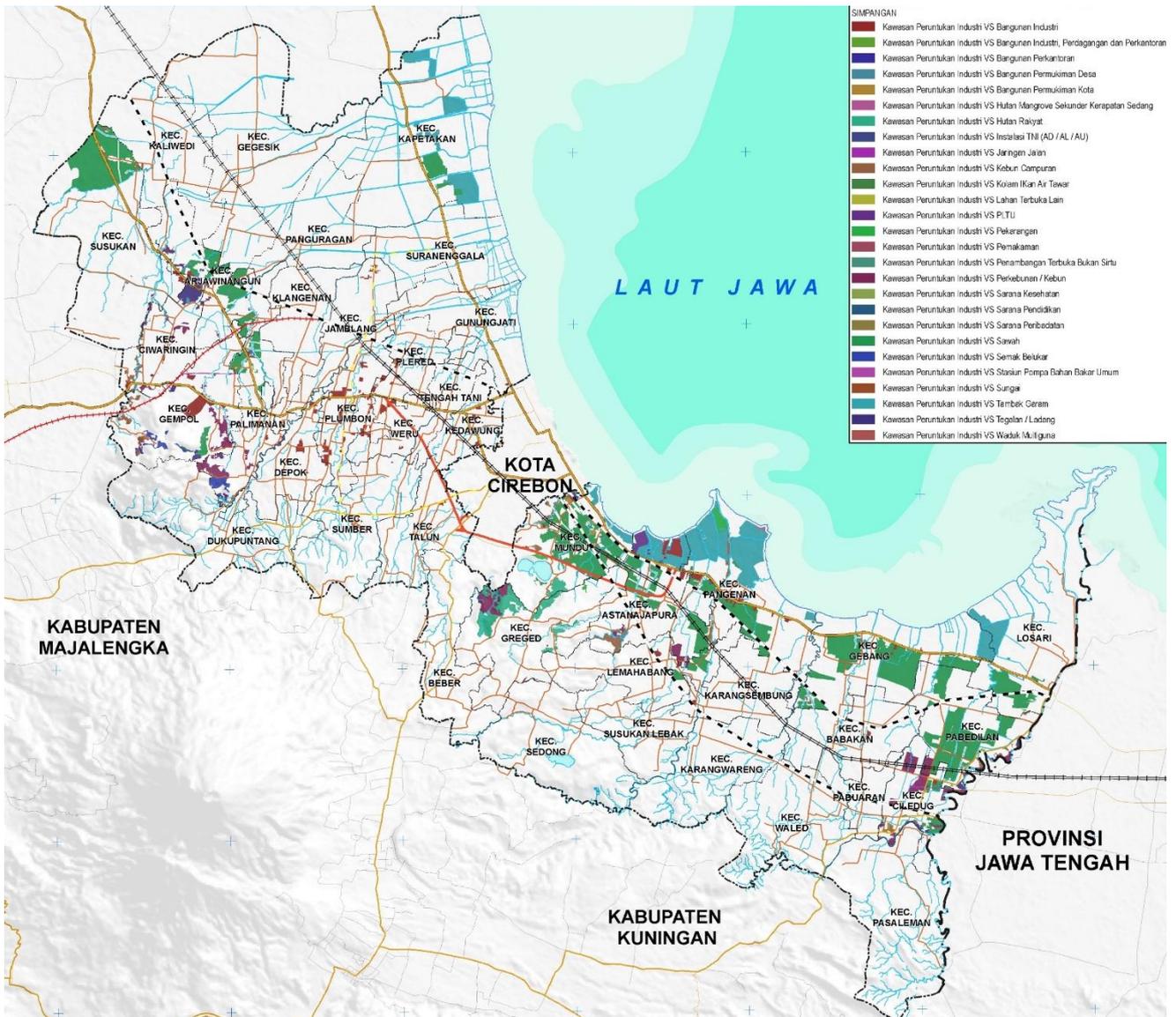
5.1.2 Kompatibilitas dan Kesesuaian Pola Ruang

Kompatibilitas pemanfaatan ruang antara kegiatan fungsional dan arahan rencana pola ruang untuk KPI menjadi salah satu ukuran terhadap kebutuhan evaluasi ruang KPI Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil overlay rencana pola ruang dengan pola landuse eksisting, teridentifikasi luas rencana KPI yang kompatibel dengan pola landuse mencapai 9.320,01 atau 92,59% sedangkan yang tidak kompatibel ada 746,22 Ha atau 7,41% dari total luas KPI.

Tabel 5.4 Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI

No	Rencana Pola Ruang KPI VS Eksisting <i>Landuse</i>	Keterangan	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	Kompatibel	675,24	6,71
2	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	Kompatibel	1,69	0,02
3	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	Tidak Kompatibel	5,48	0,05
4	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	Tidak Kompatibel	141,83	1,41
5	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	Tidak Kompatibel	74,10	0,74
6	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	Tidak Kompatibel	13,04	0,13
7	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	Tidak Kompatibel	423,45	4,21
8	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	Tidak Kompatibel	2,78	0,03
9	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	Kompatibel	50,04	0,50
10	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	Kompatibel	380,45	3,78
11	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam Ikan Air Tawar	Kompatibel	3,14	0,03
12	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	Kompatibel	0,01	0,00
13	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	Kompatibel	96,86	0,96
14	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	Tidak Kompatibel	3,47	0,03
15	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	Tidak Kompatibel	9,73	0,10
16	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	Kompatibel	727,67	7,23
17	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	Tidak Kompatibel	55,56	0,55
18	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	Tidak Kompatibel	0,13	0,00
19	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	Tidak Kompatibel	13,29	0,13
20	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	Tidak Kompatibel	0,14	0,00
21	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	Kompatibel	5.160,61	51,27
22	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	Kompatibel	128,31	1,27
23	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	Tidak Kompatibel	0,43	0,00
24	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	Tidak Kompatibel	1,07	0,01
25	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	Kompatibel	1.861,28	18,49
26	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	Kompatibel	234,70	2,33
27	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	Tidak Kompatibel	1,72	0,02
Grand Total			10.066,22	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 5.1 Peta Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

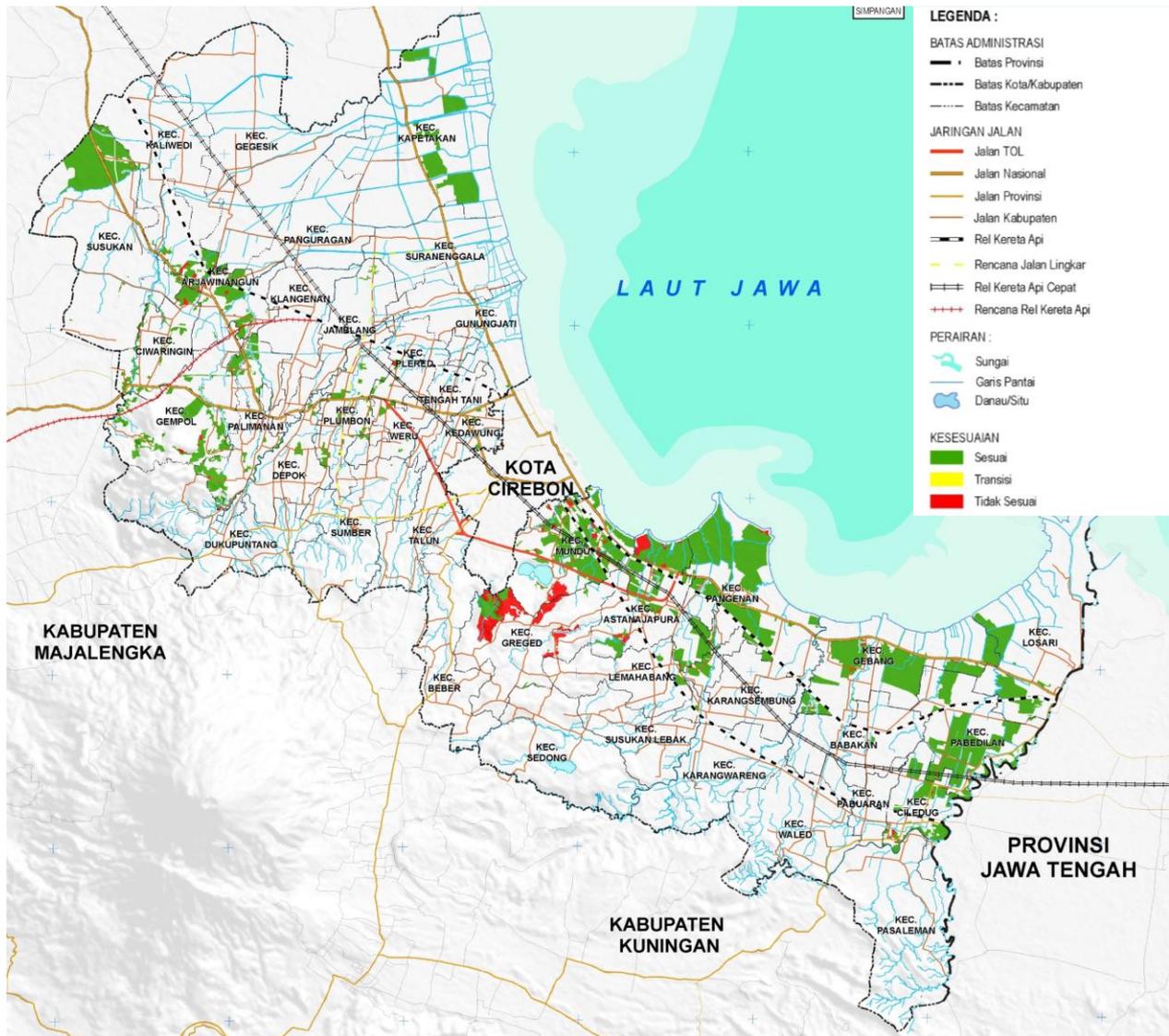
Berdasarkan hasil kajian lebih jauh, kesesuaian pemanfaatan ruang selain melalui tutupan lahan juga diobservasi langsung dalam proses ground truth survey pada wilayah-wilayah yang dirasa perlu mengingat dinamika ruang maupun kebutuhan pengamatan yang lebih jelas untuk memperkuat interpretasi peta citra yang ada. Dari hasil analisis lanjutan terhadap simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting, maka didapat klasifikasi kesesuaian rencana pola ruang peruntukan industri dan pertambangan terhadap pola penggunaan lahan eksisting yaitu :

1. Sesuai; Rencana pola ruang peruntukan kawasan pertanian, hutan produksi dan hutan rakyat sesuai dengan lokasi penggunaan lahan eksisting yang ada pada saat ini maupun kecenderungan perkembangan penggunaan lahan kedepannya.
2. Tidak Sesuai; Ketidak kesesuaian rencana pola ruang peruntukan kawasan pertanian, hutan produksi dan hutan rakyat terhadap lokasi penggunaan lahan eksisting yang ada pada saat ini maupun kecenderungan perkembangan penggunaan lahan kedepannya.

Tabel 5.5 Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI

No	Kecamatan	Kesesuaian Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting (Ha)		Jumlah (Ha)
		Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	
1	KECAMATAN ARJAWINANGUN	449,61	47,18	496,79
2	KECAMATAN ASTANAJAPURA	840,58	109,69	950,27
3	KECAMATAN BABAKAN	7,56	0,87	8,43
4	KECAMATAN BEBER	-	-	-
5	KECAMATAN CILEDUG	328,2	14,61	342,81
6	KECAMATAN CIWARINGIN	216,83	15,46	232,29
7	KECAMATAN DEPOK	42,52	-	42,52
8	KECAMATAN DUKUPUNTANG	0,35	-	0,35
9	KECAMATAN GEBANG	1.049,92	12,45	1.062,37
10	KECAMATAN GEMPOL	419,52	1,28	420,80
11	KECAMATAN GREGED	136,44	364,27	500,71
12	KECAMATAN GUNUNGJATI	8,03	0,31	8,34
13	KECAMATAN JAMBLANG	15,76	-	15,76
14	KECAMATAN KALIWEDI	6,1	1,03	7,13
15	KECAMATAN KAPETAKAN	599,29	-	599,29
16	KECAMATAN KARANGSEMBUN	6,34	-	6,34
17	KECAMATAN KARANGWARENG	-	-	-
18	KECAMATAN KEDAWUNG	22,79	0,44	23,23
19	KECAMATAN LEMAHABANG	123	0,7	123,70
20	KECAMATAN LOSARI	406,44	0,24	406,68
21	KECAMATAN MUNDU	932,4	118,73	1.051,13
22	KECAMATAN PABEDILAN	932,72	5,48	938,20
23	KECAMATAN PALIMANAN	364,88	21,31	386,19
24	KECAMATAN PANGENAN	1.402,12	10,12	1.412,24
25	KECAMATAN PASALEMAN	-	-	-
26	KECAMATAN PLERED	31,04	3,55	34,59
27	KECAMATAN PLUMBON	135,13	0,18	135,31
28	KECAMATAN SEDONG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	1,04	-	1,04
30	KECAMATAN SUSUKAN	808,39	4,12	812,51
31	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	-	-	-
32	KECAMATAN TALUN	6,29	-	6,29
33	KECAMATAN WALED	0,28	-	0,28
34	KECAMATAN WERU	40,47	0,16	40,63
Jumlah		9.334,04	732,18	10.066,22

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 5.2 Peta Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berikut catatan hasil analisis kesesuaian tutupan lahan terhadap pola ruang KPI:

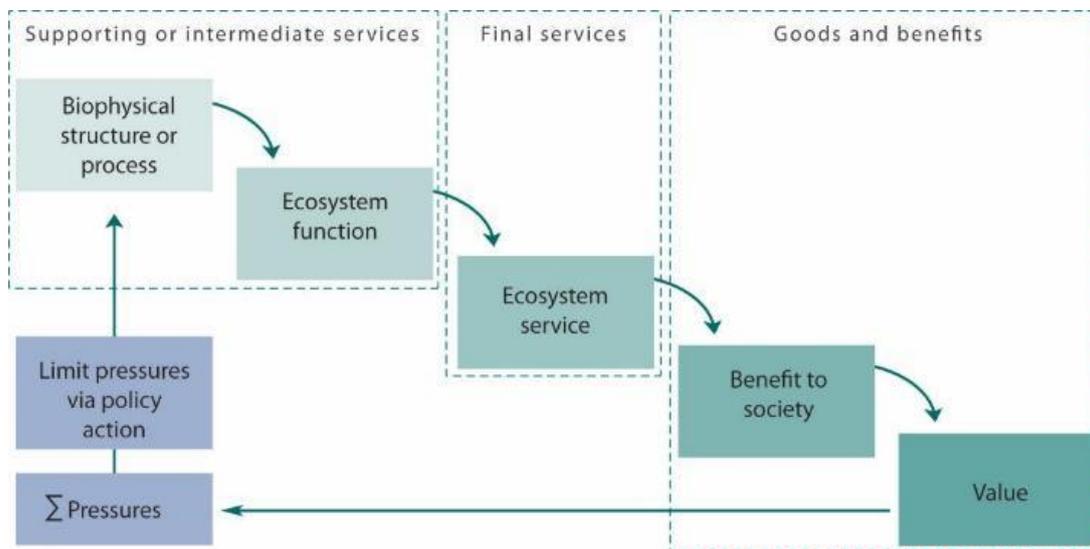
- Luas rencana KPI yang sesuai dengan pola landuse mencapai 9.334,04 atau 92,73% dari total luas KPI
- Luas rencana KPI yang tidak sesuai dengan pola landuse 732,18 Ha atau 7,27% dari total luas KPI
- Wilayah dengan tingkat Kesesuaian tinggi ada di Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Pabedilan, dan Mundu

5.2 Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Daya Dukung Lahan (DDL) dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Terkait analisis DDL, digunakan informasi berdasarkan Penutup Lahan yang merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 76452010, dimana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landcover/landused based proxy*)

5.2.1 Pendekatan Jasa Ekosistem dalam Analisis DDL

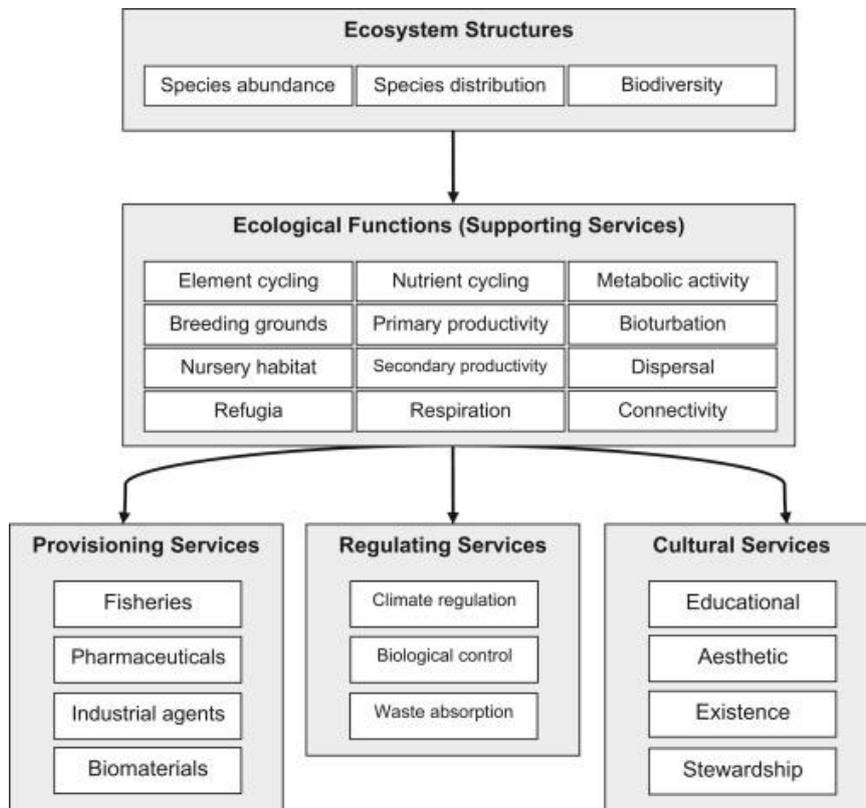
Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikroorganisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005).



Gambar 5.3 Prinsip Jasa Ekosistem dalam Memberi Keuntungan pada Manusia dan Risiko Eksploitasinya (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem ini dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual

dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005).



Gambar 5.4 Klasifikasi Jasa Ekosistem bagi Kehidupan Manusia (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa pendukung (supporting), dan jasa kultural (cultural), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Sistem Klasifikasi Jasa Ekosistem

No.	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Defenisi Operasional
A. Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air Bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (fiber)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (fuel)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
B. Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon



No.	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Defenisi Operasional
2	Pengaturan tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
C.	<i>Fungsi Budaya (Cultural)</i>	
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang punya nilai sentimental
3	Rekreasi dan ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
5	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
6	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
D.	<i>Fungsi Pendukung (Supporting)</i>	
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (nutrient)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005

Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu landscape based proxy dan landcover/landused based proxy, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

5.2.2 Hasil Analisis DDL Pembangunan KPI dalam Pendekatan Jasa Ekosistem Lingkungan

Analisis Daya Dukung Lahan berbasis jasa ekosistem yang ditampilkan dengan peta arahan KPI Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengidentifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diukur dengan menggunakan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam Millenium Ecosystem Assessment – United Nation. Diasumsikan bahwa semakin

tinggi jasa ekosistem maka semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/landuse) sebagai penaksir atau proxy. Berikut uraian dari hasil analisis DDL berbasis Jasa Ekosistem tersebut.

5.2.2.1 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

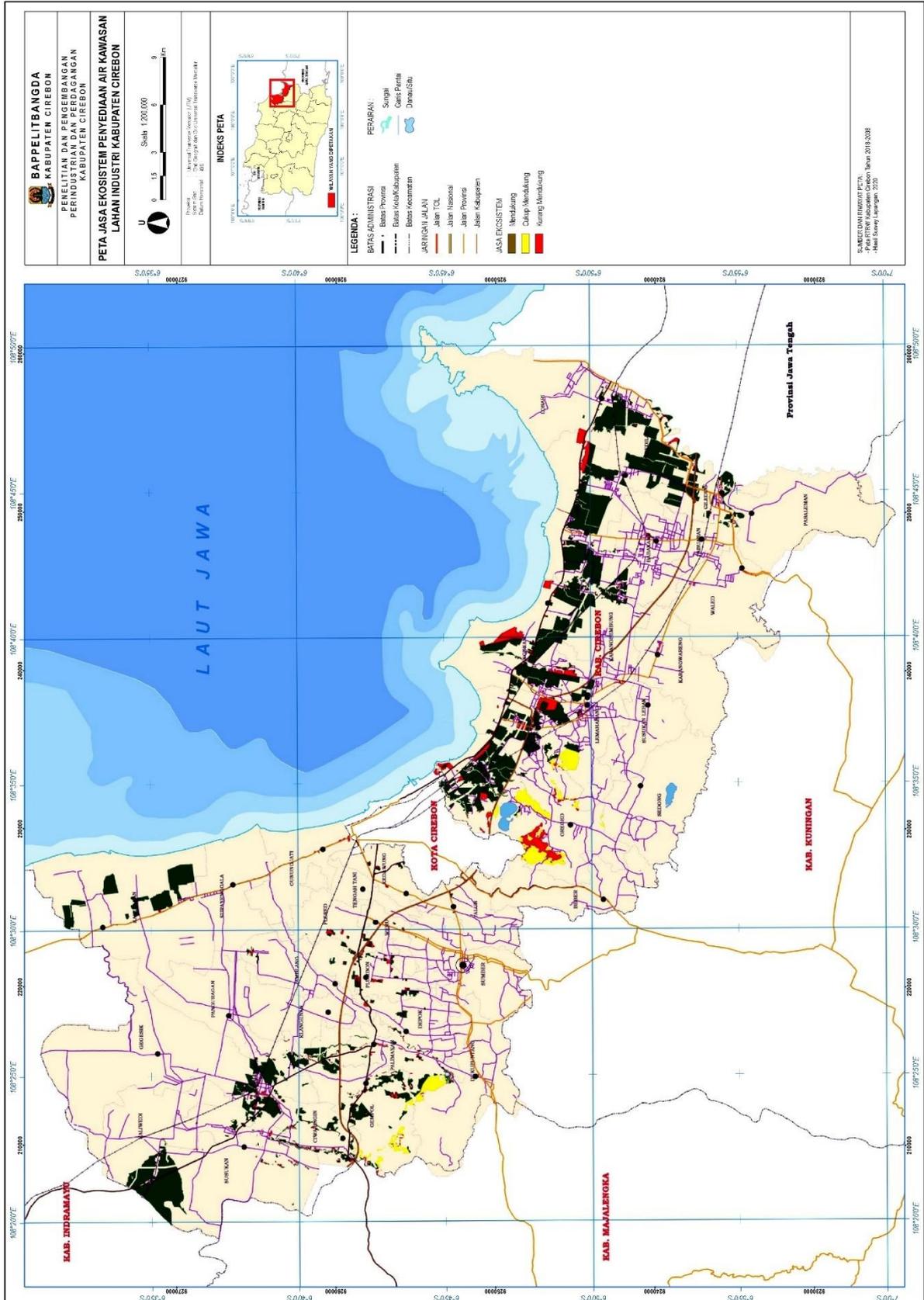
Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun air tanah. Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Cirebon ada yang dapat memberikan manfaat berupa penyediaan air bersih dengan baik maupun tidak. **Semakin tinggi ketersediaan air maka semakin tinggi daya dukung lahan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri.** Sebaliknya, **semakin sedikit ketersediaan air maka semakin rendah daya dukung lahannya.**

Berdasarkan **ketersediaan air** tersebut, **maka sebagian besar lahan (82.5%) mempunyai daya dukung tinggi atau mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri.** Sebagian besar lahan yang memiliki daya dukung tinggi terletak pada ekoregion Dataran Fluvial. Material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal merupakan komposisi material yang memiliki permeabilitas tinggi, sehingga membentuk akuifer yang potensial. Dukungan morfologi datar hingga cekung pada ekoregion ini membentuk reservoir tanah atau cekungan hidrogeologi. Hal ini yang menjadikan Ekoregion Dataran Fluvial berpotensi sebagai sumber penyedia air bersih. Di lain pihak, karakteristik ekoregion ini pada umumnya merupakan wadah bagi pengembangan kegiatan perkotaan, dalam hal ini kegiatan industri, sehingga patut diwaspadai kemunculan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan industri, komersil dan permukiman; konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara. Demikian pula dengan perkembangan lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah dapat memicu terjadinya banjir kota pada musim penghujan.

Tabel 5.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Air Bersih

Jasa Ekosistem Penyediaan Air	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	6.613,02	Ketersediaan Air Sangat Tinggi & Tinggi (mendukung Pengembangan KPI)
Tinggi	1.637,92	
Sedang	781,81	Ketersediaan Air Sedang (terbatas untuk Pengembangan KPI)
Rendah	0,08	Ketersediaan Air Sangat Rendah & Rendah (tidak mendukung Pengembangan KPI)
Sangat Rendah	967,34	

Sumber: Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, 2020



Gambar 5.5 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.2 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Fungsi penyediaan pangan didukung oleh potensi wilayah sebagai sumber penghasil pangan Untuk mendukung KPI diperlukan lahan dengan potensi sumber pangan yang rendah, bergantung pada:

- Jenis lapisan tanah
- Tutupan lahan non produktif atau lahan perkotaan

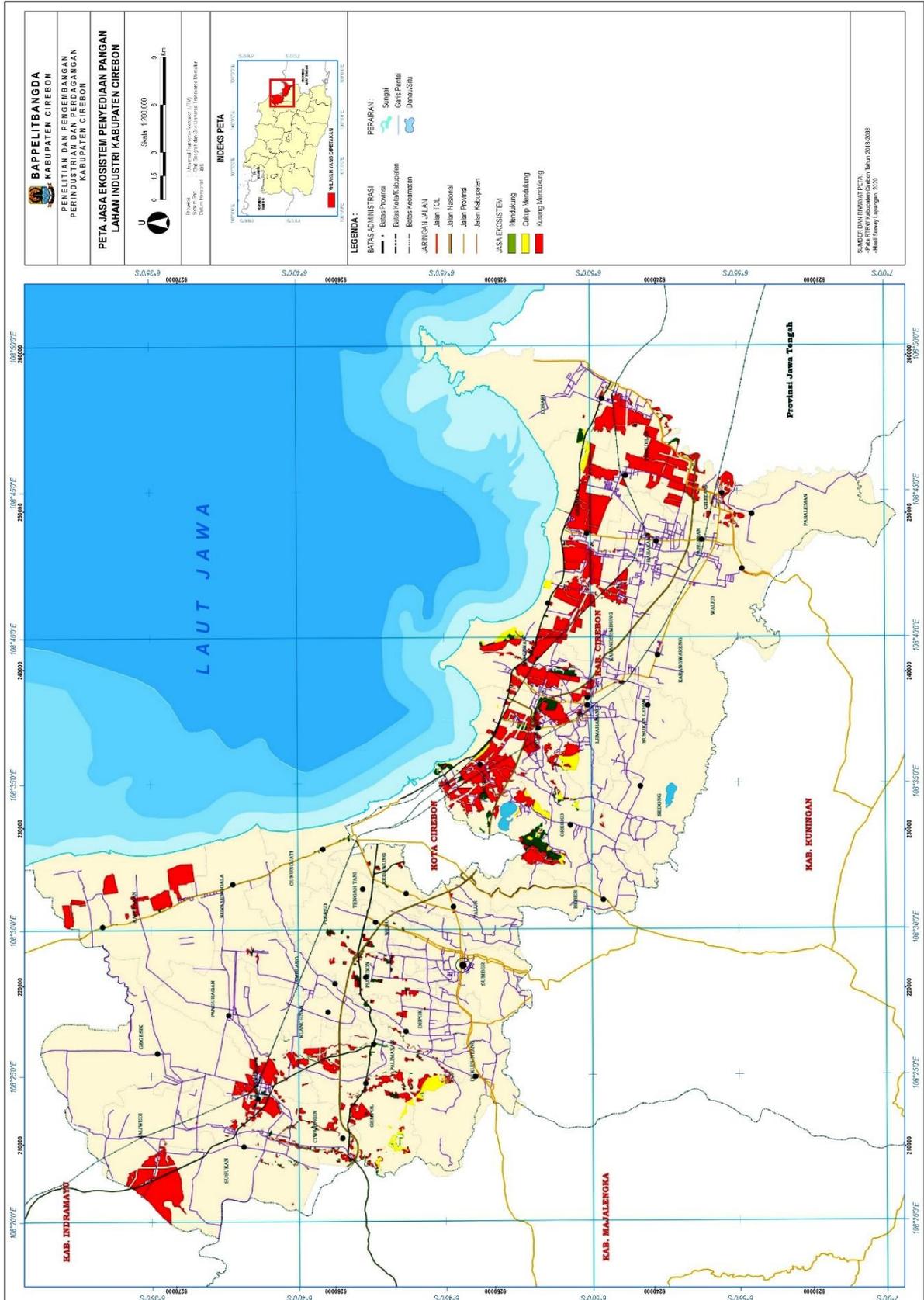
Secara ekologis, lahan yang mempunyai daya dukung tinggi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang berpotensi rendah sebagai sumber penghasil pangan. Sebaliknya, lahan yang mempunyai daya dukung rendah adalah lahan yang berpotensi tinggi sebagai penghasil pangan.

Tabel 5.8 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pangan

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Tinggi	934,03	Penghasil pangan potensial (tidak mendukung KPI)
Sedang	638,59	Penghasil pangan sedang (cukup mendukung KPI)
Rendah	744,9	Penghasil pangan rendah/sangat rendah (mendukung KPI)
Sangat Rendah	8,30	

Sebagian besar lahan yang merupakan penghasil pangan sangat tinggi dan tinggi terletak pada satuan ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air melimpah sehingga produktivitas pertanian pangan sangat tinggi. Bentanglahan ini secara hidrogeomorfologi berfungsi sebagai daerah pencadangan airtanah (*storage groundwater*) serta daerah penurapan airtanah (*discharge area*) yang berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang potensial dan penyebaran luas.

Di lain pihak, karakteristik ekoregion ini pada umumnya merupakan wadah bagi pengembangan permukiman perkotaan, dalam hal ini kawasan industri, sehingga patut diwaspadai kemunculan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan industri, komersil dan permukiman; konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara; yang bergantung kepada tingkat perkembangan wilayahnya. Demikian pula dengan perkembangan lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah dapat memicu terjadinya banjir pada musim penghujan.



Gambar 5.6 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di KPI Kabupaten Cirebon

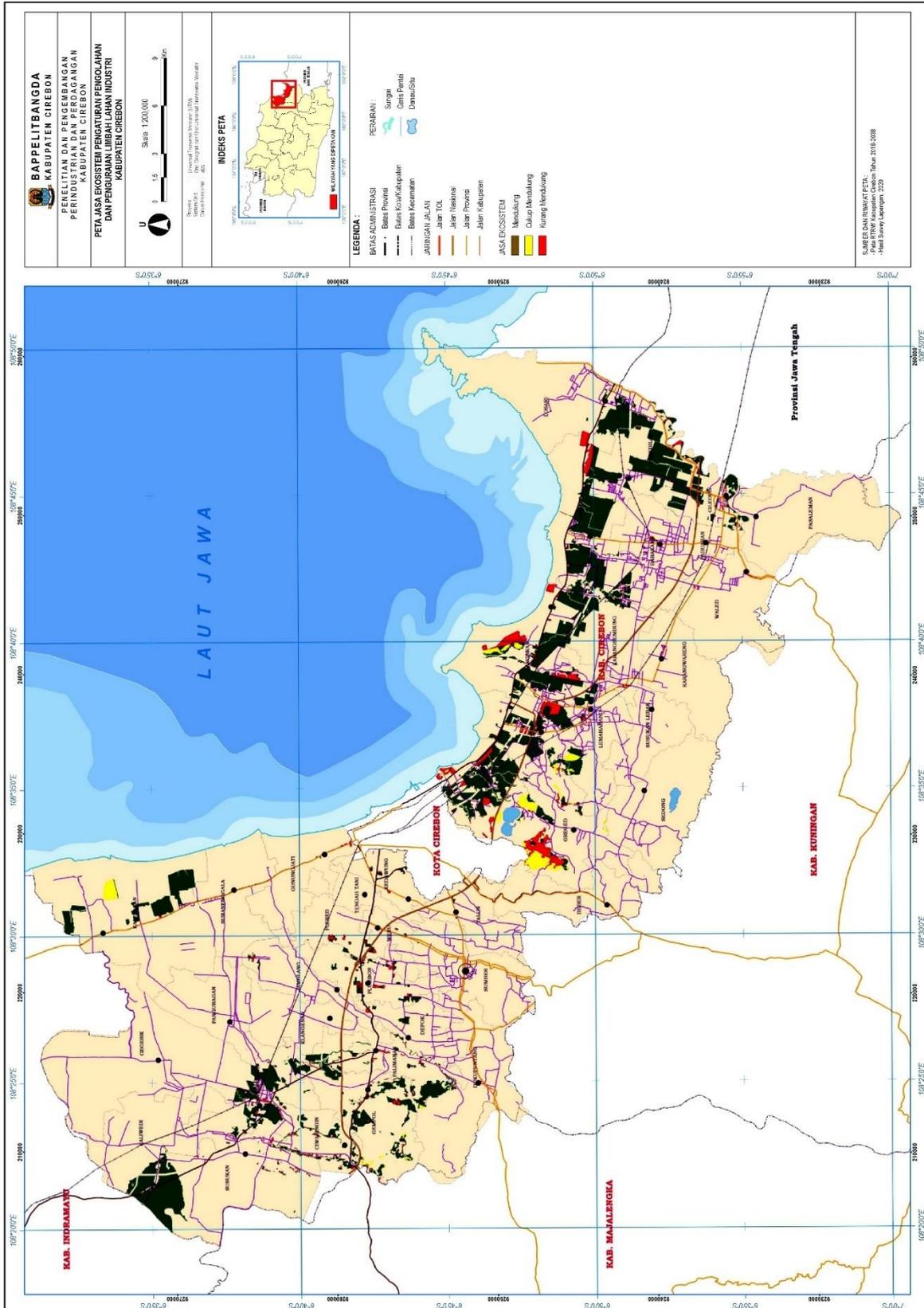
5.2.2.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah terkait dengan sejauh mana kapasitas lokasi dalam menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah. Secara umum lahan yang mampu menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Lahan yang mempunyai daya tampung tinggi adalah lahan yang mampu mengolah dan mengurai limbah dengan baik (sangat mendukung). Sebaliknya, lahan yang mempunyai daya tampung rendah adalah lahan yang berkemampuan rendah dalam mengolah dan mengurai limbah (kurang mendukung).

Tabel 5.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan, Pengolahan, dan Penguraian Limbah

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	411.11	Kemampuan lahan dalam menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah sangat tinggi dan tinggi
Tinggi	8.092.15	
Sedang	529.57	Terbatas dalam mendukung kegiatan industri
Rendah	959.04	Kurang mendukung pengembangan KPI
Sangat Rendah	8.30	

Berdasarkan kemampuan pengolahan dan penguraian limbah tersebut tersebut, sebagian besar lahan (82.03%) mempunyai daya dukung tinggi atau mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi dalam mengolah dan mengurai limbah terletak pada satuan ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekoregion sebagai discharge area (daerah lepasan air), dimana limbah yang meresap ke dalam tanah akan muncul ke permukaan tanah secara alami atau mengikuti aliran sungai. Oleh sebab itu karakteristik lahan alamiah sedapat mungkin perlu dipertahankan sehingga akan membantu proses pengolahan limbah yang sangat besar dari aktivitas industri



Gambar 5.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

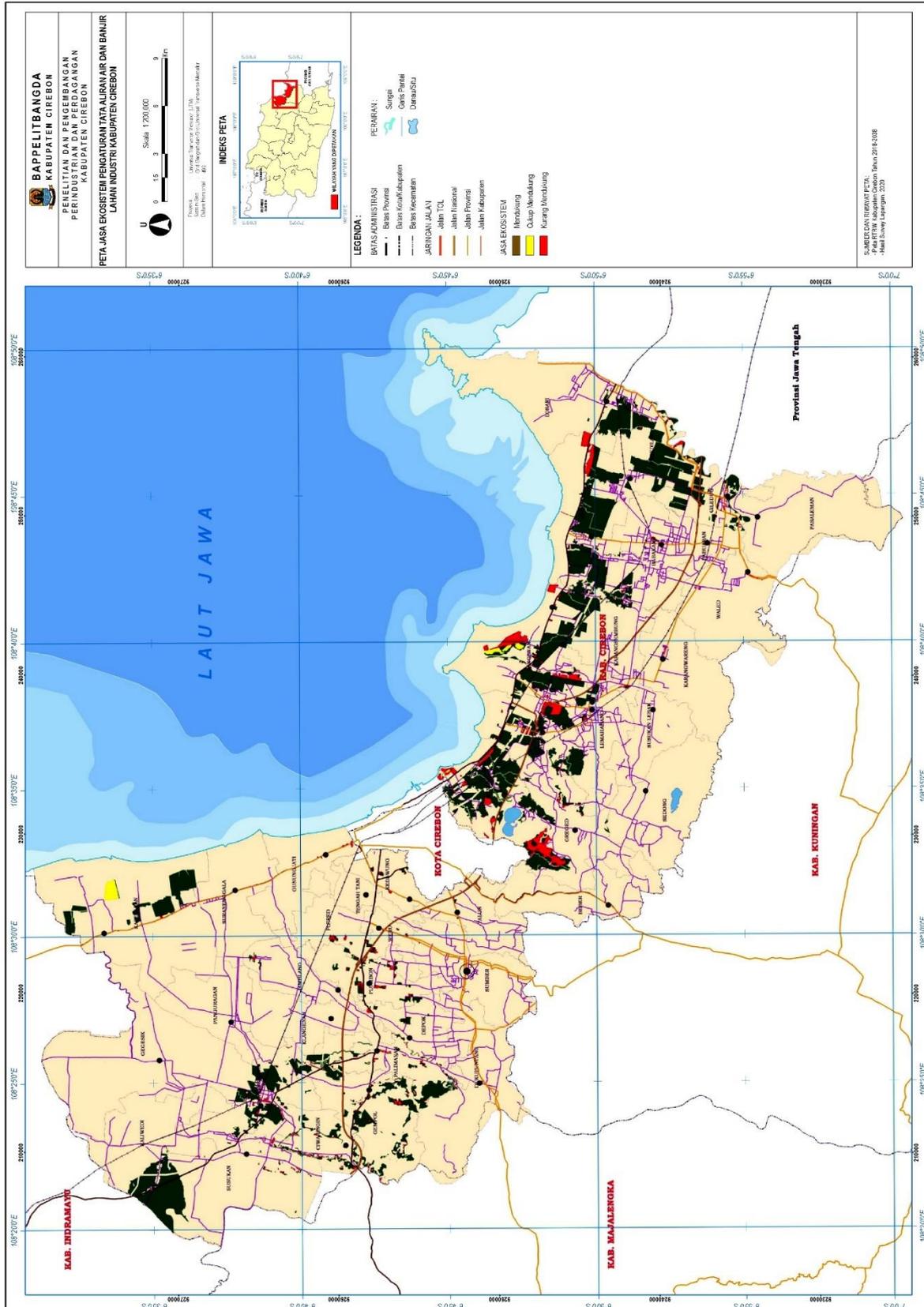
Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Secara ekologis, kawasan peruntukan industri selayaknya tidak ditempatkan pada lahan yang mempunyai pengaturan tata air dan banjir yang rendah (kurang mendukung) dan sangat rendah (sangat tidak mendukung).

Tabel 5.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	8.286.31	Kemampuan lahan dalam mengatur aliran air dan limpasan hujan sangat tinggi dan tinggi
Tinggi	590.88	
Sedang	154.74	Berpotensi terjadinya genangan
Rendah	897.80	Kurang mendukung pengembangan KPI (risiko genangan)
Sangat Rendah	70.45	

Berdasarkan kemampuan pengaturan tata air dan banjir tersebut, maka **sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri (88.77%)**. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi dalam pengaturan tata air terletak pada ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh morfologi berupa dataran berrelief datar dengan kemiringan lereng 3-8% yang masih memungkinkan pengaliran limpasan air hujan secara relatif lancar sehingga meminimalisir penggenangan air.

Namun demikian, perlu diwaspadai kecenderungan perkembangan wilayah yang pesat memicu konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah sehingga dapat memicu terjadinya banjir pada musim penghujan. Potensi meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, juga berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir, drainase buruk, lingkungan kumuh, pencemaran, dan kesehatan masyarakat buruk. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya terkait pengendalian banjir, diantaranya melalui penyediaan ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan *green infrastructure* lainnya pada kawasan peruntukan industri.



Gambar 5.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.5 Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

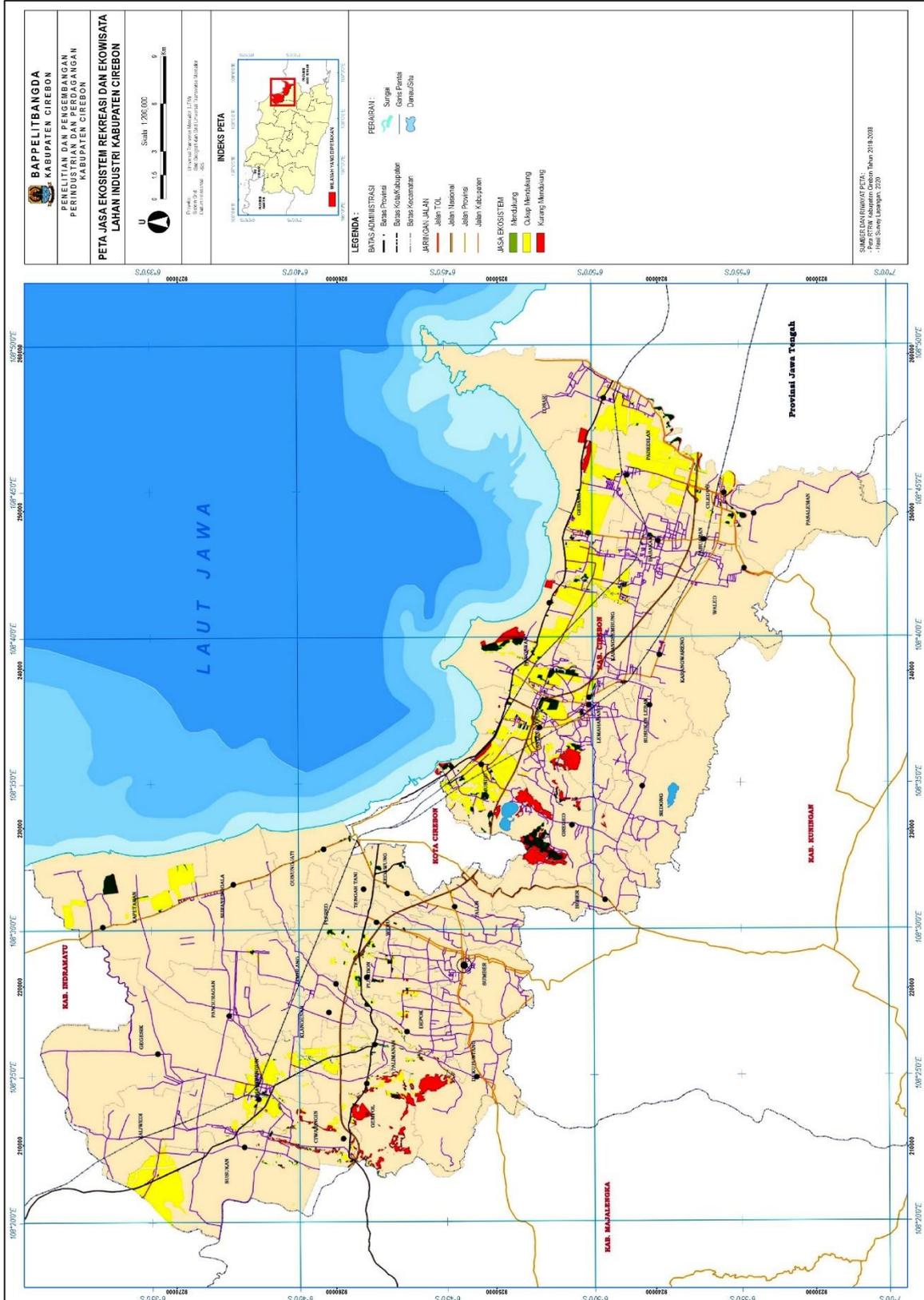
Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk dan variasi bentang alam, keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Secara ekonomi, daya tarik alam ini menjadi sumber pendapatan daerah dan devisa negara yang besar.

Berdasarkan prinsip ekologi, kawasan peruntukan industri selayaknya tidak berada dalam ekosistem yang mempunyai fungsi rekreasi dan ekowisata tinggi. Dengan demikian, **lahan yang sangat tidak mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang sangat kaya akan fitur lansekap dan keunikan alam.** Sebaliknya, **lahan yang mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang miskin akan fitur lansekap dan keunikan alam.**

Tabel 5.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	284.78	Kekayaan akan fitur lansekap dan keunikan alami sangat tinggi dan tinggi (kurang mendukung)
Tinggi	638.20	
Sedang	745.05	Fitur lansekap dan keunikan alami cukup baik
Rendah	8.291.38	Rendah atau tiadanya kekayaan fitur lansekap dan keunikan alam (sangat mendukung))
Sangat Rendah	40.77	

Berdasarkan kemampuan fungsi rekreasi dan ekowisata tersebut, maka **sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri (82.32%)**. Sebagian besar lahan yang mendukung bagi pengembangan kawasan peruntukan industri terletak pada Dataran Fluvial. Adapun lahan yang kurang mendukung terletak pada ekoregion Dataran Pantai, Kaki Gunungapi dan Dataran Kaki Gunungapi. Hal ini disebabkan karakteristik lahan yang mendukung pengembangan wisata minat khusus alam pegunungan yang didukung oleh pemanfaatan lahan produktif, seperti hutan produksi dan perkebunan (untuk ekoregion Kaki dan Dataran Gunungapi) dan hutan mangrove di Dataran Pantai. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian kawasan peruntukan industri yang berdampak minim terhadap keberadaan kawasan lindung dan budidaya, diantaranya melalui penerapan *eco industry* di Kabupaten Cirebon.



Gambar 5.9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata di KPI Kabupaten Cirebon

Daya dukung dan daya tampung kawasan peruntukan industri untuk masing-masing kecamatan dilakukan dengan menyandingkan jasa ekosistem berdasarkan luasan dominan dan proyeksi neraca air yang pada akhirnya menghasilkan arahan pengembangan kawasan peruntukan industri untuk masing-masing kecamatan. Penjelasan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Ciledug, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun Kecamatan Ciledug mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi akan mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan Kecamatan Ciledug diarahkan pada pengembangan kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Losari, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Pabedilan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Gebang, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Gebang diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Astanajapura, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Astanajapura diarahkan pada kawasan industri

berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.

- Kecamatan Pangenan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Mundu, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Mundu diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Greged, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) diprediksi akan mengalami defisit air. Adapun jasa ekosistem penyedia pangan, fungsi rekreasi dan ekowisata serta biodiversitas kurang mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri jasa berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, konservasi air (hemat air, daur ulang air), pengelolaan limbah, dan dapat memanfaatkan fungsi rekreasi dan ekowisata serta konservasi keanekaragaman hayati.
- Kecamatan Palimanan, mempunyai daya dukung tinggi dari jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, pemurnian air, serta fungsi rekreasi dan ekowisata. Jasa ekosistem lain yang cukup menunjang adalah pengaturan iklim dan biodiversitas. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi berpotensi mengalami defisit air pada tahun 2031. Arah pengembangan Kecamatan Palimanan ditujukan bagi kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Kapetakan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi

mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.

- Kecamatan Arjawinangun, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, dan pemurnian air untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan iklim, serta penyedia air juga cukup mendukung walaupun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Ciwaringin, mempunyai daya dukung tinggi dari jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, pemurnian air, fungsi rekreasi dan ekowisata. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi diprediksi mengalami defisit air pada tahun 2031. Jasa ekosistem lain yang cukup menunjang adalah pengaturan iklim dan biodiversitas. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi berpotensi mengalami defisit air pada tahun 2031. Arahkan pengembangan Kecamatan Ciwaringin ditujukan bagi kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Gempol, mempunyai daya dukung tinggi dari hampir seluruh jasa ekosistem, kecuali jasa ekosistem penyedia pangan dan jasa ekosistem biodiversitas. Arahkan pengembangan kecamatan ditujukan pada kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati.
- Kecamatan Susukan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Susukan diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah

Tabel 5.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Jasa Ekosistem dengan Luasan Dominan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Proyeksi Neraca Air 2031	Jasa Ekosistem								Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	
			Penyedia Air Bersih	Penyedia Pangan	Pengolah dan Pengurai Limbah	Pemelihara Kualitas Udara	Pengaturan Iklim	Pengaturan Tata Air dan Banjir	Pemurnian Air	Fungsi Rekreasi dan Ekowisata		Bio-diversitas
1	Ciledug	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
2	Losari	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
3	Pabedilan	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
4	Gebang	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
5	Astanajapura	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
6	Pangenan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
7	Mundu	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
8	Greged	Defisit										Industri jasa berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, konservasi air (hemat air, daur ulang air), pengelolaan limbah, dan dapat memanfaatkan fungsi rekreasi dan ekowisata serta konservasi keanekaragaman hayati
9	Palimanan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
10	Kapetakan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
11	Arjawinangun	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
12	Ciwaringin	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
13	Gempol	Surplus										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati
14	Susukan	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah

Keterangan:

- Sangat Mendukung
- Cukup Mendukung
- Kurang Mendukung

5.3 Catatan Progres Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan ini sudah mendekati tahap akhir dimana akan dilakukan sejumlah perumusan terhadap hasil pendataan dan analisis yang diuraikan dalam Laporan Antara ini. Sejumlah catatan terkait progres kegiatan dapat disampaikan sebagaimana berikut.

5.3.1 Catatan terkait Hasil Kajian Kebijakan Internal Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Sejumlah catatan yang perlu digarisbawahi terkait kebijakan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon berdasarkan arah kebijakan internal daerah adalah:

- ❖ **Kawasan Peruntukan Industri** telah ditetapkan seluas **10 ribu Hektar** yang terdiri atas **Kawasan peruntukan industri menengah dan besar, Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro, Kawasan peruntukan industri agro dan Kawasan Industri.**
- ❖ Kawasan peruntukan **industri menengah dan besar** serta **Kawasan industri**
 - Pengembangannya mengacu pada Permenindustri yang ada (areal khusus)
 - Potensi penggerak wilayah → perlu antisipasi aspek lingkungan, pola ruang, dan aspek sosial, infrastruktur, kelembagaan, dll.
- ❖ Kawasan peruntukan **industri kecil dan mikro** berada di dalam Kawasan Permukiman
 - Memerlukan pengaturan kegiatan dalam Regulasi Penataan Ruang
 - Perlu melihat aspek kesesuaian lahan batasan kegiatan
 - Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Zonasi dalam Rencana Tata Ruang
- ❖ Kawasan peruntukan **industri agro**
 - Potensi pendorong pengembangan wilayah dalam konsep *indigenous development*
 - Meliputi wilayah Kecamatan Sedong, Greged, Lemahabang, Pasaleman dan Astanajapura.

5.3.2 Catatan terkait Hasil Kajian Kebijakan Regional yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan KPI Kabupaten Cirebon

Catatan terkait dengan arah kebijakan pengembangan regional yang berpengaruh terhadap dinamika pengembangan sektor industri dan pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Cirebon perlu menjadi perhatian dalam perumusan konsepsi rekomendasi yang akan dihasilkan dari studi ini. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

- ❖ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2018 – 2038 dan Draft RTRW Provinsi Jawa Barat (termasuk konsep pengembangan kawasan Rebana)
- ❖ Strategi pembangunan industri Jawa Barat berfokus pada penguatan penyediaan bahan baku, penguatan proses, penguatan output dan distribusi (logistik) serta penguatan faktor pendukung.
- ❖ Industri Unggulan Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Cirebon:
 1. industri pengolahan ikan
 2. industri furniture kayu dan rotan
 3. perawatan kapal
 4. suplemen pakan ternak dan *aqua culture*
 5. komponen berbasis kayu (*wood working, laminated dan finger joint*)
 6. industri bahan galian non logam (semen dan keramik)
- ❖ **Tidak seluruh wilayah KPI** Kab.Cirebon menjadi **prioritas** Nasional maupun Provinsi

5.3.3 Potensi Pengembangan KPI terkait Kebijakan Sektor Industri, Kebijakan Regional, dan Daya Saing Wilayah Kabupaten Cirebon

Terkait dengan arah kebijakan regional, baik untuk sektor industri maupun untuk arah pengembangan wilayah secara umum yang berpengaruh terhadap wilayah Timur Jawa Barat, khususnya wilayah Kabupaten Cirebon, maka terdapat sejumlah peluang pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon yang perlu ditangkap bersamaan dengan pemahaman akan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon. Catatan potensi pengembangan KPI sebagai berikut:

- ❖ **Peluang pengembangan industri terkait arah kebijakan nasional dan regional**
 - ✓ RIPPIN 2015-2035 → sektor prioritas dan penetapan kedalam WPPI-2
 - ✓ RPIP Jabar 2018 → sektor prioritas dan pengembangan /relokasi industri ke WPPI-2
 - ✓ RTRWP Jabar → pengendalian WP Utara Prov.Jawa Barat dan mendorong segitiga WP Timur Prov.Jawa Barat
- ❖ **Keunggulan komparatif wilayah**
 - ✓ UMK dibawah rata-rata Provinsi
 - ✓ Potensi lahan bagi pengembangan fungsi industri
 - ✓ Potensi sektor unggulan yang sudah terbukti
- ❖ **Posisi strategis dan konektivitas wilayah**
 - ✓ Tol Cipali, BIJB, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Losarang, Pelabuhan Cirebon Rencana Tol Patimban, Tol Cisumdawu
 - ✓ Rencana Akses Kereta Tj.Sari – BIJB- Arjawinangun, Rencana Akses Kereta Patimban

Tabel 5.13 Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Cirebon dengan Daerah Lain dan Regional Jawa Barat, 2019

	JABAR	Kab. Subang	Kab. Indramayu	Kab. Majalengka	Kab. Cirebon
UMK (Rp.)	2,73 jt.	2,73 jt.	2,12 jt.	1,79 jt.	2,02jt.

Sumber: Pengolahan Data Dinas BMDPR Provinsi Jabar, 2019
(Ket: Tertinggi di Jabar Rp. Rp 4,23 Jt, Terendah Rp. 1,69 Jt)

5.3.4 Kebutuhan Tindak Lanjut Kegiatan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis serta sejumlah progres kegiatan di atas, selanjutnya diperlukan upaya penyelesaian studi berkaitan dengan target akhir studi untuk menghasilkan sintesa strategi dan rekomendasi bagi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Sejumlah kebutuhan tindak lanjut yang akan tertuang dalam materi Laporan Akhir antara lain:

- Rekomendasi ruang/lahan bagi Kawasan Peruntukan Industri, berdasarkan pertimbangan daya dukung lahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang bagi KPI;
- Arah pengembangan industri sesuai dengan arah kebijakan pengembangan industri regional yang perlu ditangkap sekaligus diantisipasi;
- Arah pengembangan industri untuk sub-sektor yang belum menjadi fokus pengembangan regional sehingga perlu didorong dan dikembangkan secara optimal oleh daerah;
- Rekomendasi strategi pengembangan KPI Kabupaten Cirebon yang dapat menangkap peluang sekaligus memaksimalkan potensi daerah untuk sektor industri baik skala besar maupun menengah dan mikro/industri kecil.



KATA PENGANTAR



Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan diharapkan bisa menjadi masukan bagi proses revisi RTRW Kabupaten Cirebon terutama didalam pola ruang Kawasan Peruntukan Industri serta bisa diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon yang telah disusun sebelumnya.

Sesuai dengan lingkup kegiatan, salah satu produk dari kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan adalah buku laporan akhir, yang terdiri dari muatan substansi sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kajian literatur dan peraturan perundangan tentang Kawasan Peruntukan Industri

Bab 3 Kajian kebijakan dan program pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan KPI Kabupaten Cirebon

Bab 4 Analisis perkembangan industri dan pemanfaatan ruang KPI Kabupaten Cirebon

Bab 5 Analisis potensi dan kebutuhan ruang bagi pengembangan KPI

Bab 6 Rumusan Kebutuhan Pengembangan KPI

Bab 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Buku laporan akhir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten Cirebon. Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap kegiatan ini.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan	1-3
1.3 Ruang Lingkup	1-3
1.3.1 Lingkup Kegiatan	1-3
1.3.2 Lingkup Wilayah	1-4
1.4 Landasaan Hukum	1-6
1.5 Metodologi dan Rencana Kerja	1-6
1.5.1 Pendekatan dan Metodologi Pekerjaan	1-7
1.5.2 Rencana Kerja	1-8
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	1-10
BAB 2 KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	
2.1 Pemahaman Dasar Kawasan Peruntukan Industri	2-2
2.1.1 Peristilahan Pokok dalam Perindustrian	2-2
2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah dalam Perindustrian	2-2
2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	2-4
2.3 Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terkait Pengembangan Sektor Industri di Daerah	2-5
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri	2-7

2.4.1	Pembangunan Kawasan Industri.....	2-7
2.4.2	Infrastruktur Kawasan Industri	2-8
2.5	Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri	2-8
2.6	Pengaruh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri	2-10
2.6.1	Urusan bidang Perindustrian dalam UUCK	2-10
2.6.2	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.....	2-12
2.6.3	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.....	2-12

BAB 3 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON

3.1	Kajian Program Pembangunan Industri terkait Penetapan KPI.....	3-2
3.1.1	Program Pembangunan Industri Nasional.....	3-2
3.1.2	Program Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat	3-6
3.1.3	Program Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon.....	3-7
3.1.3.1	Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon	3-8
3.1.3.2	Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota/Kabupaten.....	3-8
3.1.3.3	Pengembangan Perwilayahan Industri	3-11
3.1.3.4	Pembangunan Sumber Daya Industri	3-15
3.1.3.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3-17
3.1.3.6	Pemberdayaan Industri	3-18
3.2	Kajian Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang terkait KPI Kabupaten Cirebon.....	3-20
3.2.1	Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan 2021.....	3-20
3.2.2	Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Kawasan Rebana	3-25
3.2.2.1	Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Wilayah Ciayumajakuning	3-25
3.2.2.2	Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana.....	3-29
3.2.3	KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon.....	3-33
3.2.3.1	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang.....	3-33
3.2.3.2	Rencana Struktur Ruang	3-35
3.2.3.3	Rencana Pola Ruang.....	3-39

BAB 4 ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON

4.1	Gambaran Umum Wilayah Studi.....	4-2
4.1.1	Letak Geografis dan Administrasi	4-2
4.1.2	Kondisi Topografi	4-3
4.1.3	Kondisi Morfologi Wilayah	4-5
4.1.4	Kondisi Hidrologi	4-11
4.1.5	Kondisi Air Tanah.....	4-13
4.1.6	Potensi Bencana Alam	4-16
4.2	Kondisi Kependudukan	4-20
4.2.1	Jumlah Penduduk	4-20

4.2.2	Kepadatan Penduduk	4-20
4.2.3	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan.....	4-24
4.3	Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB	4-25
4.3.1	Kondisi Sektor Industri	4-25
4.3.2	Sumber Daya Industri.....	4-26
4.3.2.1	Sumber Daya Alam	4-26
4.3.2.2	Sumber Daya Perhutanan	4-30
4.3.2.3	Sumber Daya Air	4-30
4.3.2.4	Sumber Daya Manusia.....	4-34
4.3.2.5	Aspek Penguasaan Teknologi.....	4-38
4.3.2.6	Aspek Keuangan	4-40
4.3.3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.....	4-42
4.3.4	Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri.....	4-43
4.3.4.1	Kondisi Jaringan Listrik.....	4-43
4.3.4.2	Kondisi Jaringan Air Minum	4-44
4.3.4.3	Kondisi Jaringan Air Limbah.....	4-45
4.3.4.4	Kondisi Jaringan Drainase	4-45
4.3.4.5	Kondisi Sistem Persampahan	4-45
4.4	Perkembangan Pemanfaatan Ruang KPI di Kabupaten Cirebon	4-46
4.4.1	Kecenderungan Perkembangan Kegiatan Industri	4-46
4.4.1.1	Industri Pengolahan Ikan.....	4-46
4.4.1.2	Industri garam	4-47
4.4.1.3	Industri Bahan Galian Non Logam.....	4-47
4.4.1.4	Industri Rotan	4-48
4.4.1.5	Industri Pakan Ternak	4-48
4.4.1.6	Industri Tekstil.....	4-49
4.4.1.7	Industri Perawatan Kapal	4-49
4.4.1.8	Sentra Industri Kecil dan Menengah	4-49
4.4.2	Penggunaan Lahan Eksisting untuk Kegiatan Industri	4-50
4.4.3	Isu Perkembangan Lahan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon.....	4-54

BAB 5 ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI

5.1	Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan Eksisting.....	5-2
5.1.1	Simpangan Pola Ruang	5-3
5.1.2	Kompatabilitas dan Kesesuaian Pola Ruang	5-10
5.2	Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	5-14
5.2.1	Pendekatan Jasa Ekosistem dalam Analisis DDL	5-14
5.2.2	Hasil Analisis DDL Pembangunan KPI dalam Pendekatan Jasa Ekosistem Lingkungan.....	5-16
5.2.2.1	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	5-17
5.2.2.2	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	5-19
5.2.2.3	Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah	5-21
5.2.2.4	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir.....	5-23
5.2.2.5	Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata.....	5-25

BAB 6 RUMUSAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KPI

6.1	Potensi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pengembangan KPI	6-2
6.1.1	Potensi (Kekuatan/Strength).....	6-2
6.1.2	Masalah (Kelemahan/Weakness)	6-10
6.1.3	Peluang (Opportunity)	6-14
6.1.4	Tantangan/ Ancaman (Threats).....	6-20

6.2	Analisis SWOT terkait Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-22
6.2.1	Uraian Faktor SWOT	6-22
6.2.2	Sintesa SWOT dan Perumusan Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon	6-24
6.3	Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon	6-26
6.3.1	Tujuan, dan Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-26
6.3.2	Strategi Pencapaian Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon	6-27

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STUDI

7.1	Kesimpulan	7-2
7.2	Rekomendasi.....	7-4

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	1-4
Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri.....	2-5
Tabel 2.2	Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri.....	2-15
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035.....	3-4
Tabel 3.2	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)	3-4
Tabel 3.3	Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI.....	3-5
Tabel 3.4	Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi di Wilayah Kabupaten Cirebon	3-7
Tabel 3.5	Program Sektorl Pengembangan Industri Fokus	3-9
Tabel 3.6	Industri yang Didorong per Koridor	3-12
Tabel 3.7	Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	3-12
Tabel 3.8	Program Pengembangan Sentra IKM.....	3-15
Tabel 3.9	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	3-15
Tabel 3.10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri.....	3-17
Tabel 3.11	Program Pemberdayaan Industri.....	3-18
Tabel 3.12	Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.....	3-19
Tabel 3.13	Arahan Fungsi Kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Klaster Industri di Kawasan Cirebon – Patimban – Kertajati.....	3-22
Tabel 3.14	Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi	3-23
Tabel 3.15	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah.....	3-26
Tabel 3.16	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Wilayah	3-27
Tabel 3.17	Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon	3-36
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017	4-2
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah.....	4-3
Tabel 4.3	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	4-4

Tabel 4.4	Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan	4-6
Tabel 4.5	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon.....	4-12
Tabel 4.6	Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon	4-13
Tabel 4.7	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon.....	4-16
Tabel 4.8	Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.....	4-17
Tabel 4.9	Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon	4-18
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019.....	4-21
Tabel 4.11	Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019	4-22
Tabel 4.12	Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon.....	4-24
Tabel 4.13	Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	4-25
Tabel 4.14	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018.....	4-26
Tabel 4.15	Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon.....	4-26
Tabel 4.16	Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Ruminansia) Kabupaten Cirebon.....	4-28
Tabel 4.17	Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Unggas) Kabupaten Cirebon	4-28
Tabel 4.18	Data Statistika Terkait Industri Pertambangan Non-Logam (Batu Alam).....	4-30
Tabel 4.19	Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon.....	4-34
Tabel 4.20	Rincian Kependudukan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon (2012-2017)	4-34
Tabel 4.21	Data Institusi Kependidikan Kabupaten Cirebon.....	4-38
Tabel 4.22	Universitas dan Sekolah Tinggi di Kabupaten Cirebon.....	4-39
Tabel 4.23	Balai Penelitian Pemerintah di Provinsi Jawa Barat	4-40
Tabel 4.24	Rincian Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon	4-41
Tabel 4.25	Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Cirebon (Proyeksi)	4-41
Tabel 4.26	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah).....	4-42
Tabel 4.27	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah).....	4-43
Tabel 4.28	Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-43
Tabel 4.29	Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....	4-44
Tabel 4.30	Sentra IKM Kab. Cirebon	4-49
Tabel 4.31	Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020	4-51
Tabel 5.1	Luas Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 Menurut Wilayah Kecamatan.....	5-3
Tabel 5.2	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020	5-4
Tabel 5.3	Simpangan Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdsarkan Wilayah Kecamatan	5-5
Tabel 5.4	Kompatabilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI.....	5-10

Tabel 5.5	Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI.....	5-12
Tabel 5.6	Sistem Klasifikasi Jasa Ekosistem.....	5-15
Tabel 5.7	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Air Bersih	5-17
Tabel 5.8	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pangan.....	5-19
Tabel 5.9	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan, Pengolahan, dan Penguraian Limbah	5-21
Tabel 5.10	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir	5-23
Tabel 5.11	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata	5-25
Tabel 5.12	Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Jasa Ekosistem dengan Luasan Dominan di Kabupaten Cirebon.....	5-30
Tabel 6.1	Sejumlah Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Cirebon.....	6-2
Tabel 6.2	Perbandingan kebutuhan air dan ketersediaan air di kawasan peruntukan industri Kabupaten Cirebon.....	6-3
Tabel 6.3	Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Cirebon dengan UMR Jawa Barat dan UMK Daerah Sekitarnya	6-5
Tabel 6.4	Wilayah Cirebon sebagai Salah Satu Penggerak Utama (Prime Mover) Pengembangan Wilayah Industri Nasional dalam RIPIN 2015-2035.....	6-14
Tabel 6.5	Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat untuk Wilayah Kabupaten Cirebon	6-15
Tabel 6.6	Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi di Jawa Barat Bagian Timur	6-16
Tabel 6.7	Rencana Pengembangan Transportasi Provinsi Jawa Barat yang Terhubung Langsung dengan Wilayah Kabupaten Cirebon	6-18
Tabel 6.8	Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Cirebon berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	6-19
Tabel 6.9	Arahan Pengembangan Industri pada Masing-masing Kecamatan Potensial Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.....	6-28

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon	1-5
Gambar 1.2	Penjabaran Sasaran Pekerjaan sebagai Kerangka Pikir Studi yang Memperlihatkan Kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan	1-7
Gambar 1.3	Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1-9
Gambar 2.1	Ilustrasi Kawasan Peruntukan Industri	2-2
Gambar 2.2	Pola Pikir Perwilayahan Industri	2-3
Gambar 2.2	Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri	2-4
Gambar 3.1	Kedudukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dalam Skema Pembangunan Industri Nasional	3-2
Gambar 3.2	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)	3-3
Gambar 3.3	Peta Arahan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan Dokumen RPIK	3-14
Gambar 3.4	Infrastruktur Strategis Pendorong Perkembangan Kawasan Timur Jawa Barat	3-20
Gambar 3.5	Rencana Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Cirebon	3-21
Gambar 3.6	Arah Pengembangan Wilayah Metropolitan Cirebon	3-25
Gambar 3.7	Pengembangan Peran Wilayah Timur Jawa Barat	3-26
Gambar 3.8	Peta Arahan KPI Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat	3-28
Gambar 3.9	Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana	3-29
Gambar 3.10	Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan Rebana	3-30
Gambar 3.11	Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA	3-30
Gambar 3.12	Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Rebana	3-32
Gambar 3.13	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon	3-38
Gambar 3.14	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon	3-40
Gambar 3.15	Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon	3-41
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	4-7
Gambar 4.2	Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon	4-8
Gambar 4.3	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon	4-9
Gambar 4.4	Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon	4-10
Gambar 4.5	Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon	4-14
Gambar 4.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon	4-15
Gambar 4.7	Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon	4-19

Gambar 4.8	Peta Jumlah Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-27
Gambar 4.9	Peta Jumlah Pohon Mangga per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-27
Gambar 4.10	Persebaran Domba dan Kambing per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015.....	4-29
Gambar 4.11	Persebaran Ayam Buras per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015	4-29
Gambar 4.12	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Cirebon	4-31
Gambar 4.13	Peta Kondisi Air Tanah di Kabupaten Cirebon.....	4-31
Gambar 4.14	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah di Zona Mundu	4-32
Gambar 4.15	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Arjawinangun	4-33
Gambar 4.16	Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Plumbon.....	4-33
Gambar 4.17	Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016).....	4-36
Gambar 4.18	Capaian Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)	4-36
Gambar 4.19	Capaian Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016).....	4-37
Gambar 4.20	Capaian Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016).....	4-37
Gambar 4.21	Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (2010-2014)	4-38
Gambar 4.22	Capaian Rasio Guru Terhadap Murid (2010-2014)	4-38
Gambar 4.23	Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020	4-50
Gambar 4.24	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Cirebon berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2020	4-52
Gambar 4.25	Peta Penmanfaatan Lahan untuk Kegiatan Industri di Kabupaten Cirebon, 2021	4-53
Gambar 4.26	Sejumlah Kegiatan Industri yang Berkembang pada wilayah KPI dan sekitarnya di salah satu Wilayah Sampel bagian Utara Kabupaten Cirebon.....	4-54
Gambar 5.1	Peta Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	5-11
Gambar 5.2	Peta Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	5-13
Gambar 5.3	Prinsip Jasa Ekosistem dalam Memberi Keuntungan pada Manusia dan Risiko Eksploitasinya (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)	5-14
Gambar 5.4	Klasifikasi Jasa Ekosistem bagi Kehidupan Manusia (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005).....	5-15
Gambar 5.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di KPI Kabupaten Cirebon	5-18
Gambar 5.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di KPI Kabupaten Cirebon	5-20
Gambar 5.7	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-22
Gambar 5.8	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-24
Gambar 5.9	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata di KPI Kabupaten Cirebon.....	5-26
Gambar 6.1	Peta Potensi SDA yang Dapat Mendukung Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-3
Gambar 6.2	Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Batik pada KPI Kabupaten Cirebon.....	6-8
Gambar 6.3	Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Rotan pada KPI Kabupaten Cirebon	6-8
Gambar 6.4	Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Pengolahan Makanan pada KPI Kabupaten Cirebon.....	6-9

Gambar 6.5	Salah Satu Contoh Konflik Pengembangan Lahan KPI di Kecamatan Losari karena Perkembangan Permukiman dan Aktivitas Penduduk yang Sudah Sejak Lama Berada di Lokasi Terpilih Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon dan KPI Rebana di Cirebon.....	6-10
Gambar 6.6	Mangroove di Pesisir Laut Kabupaten Cirebon, umumnya berjenis Api-api (<i>Avicennia marina</i>) dan Bakau (<i>Rhizophora mucronata</i>)	6-11
Gambar 6.7	Sebaran Mangroove yang Masih Tersisa dan Dalam Proses Rehabilitasi di Pesisir Kabupaten Cirebon, Berpotensi Konflik dengan Arah Pengembangan KPI	6-12
Gambar 6.8	Arahan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang Mendorong Perkembangan Pertumbuhan Jabar bagian Timur (PKN Cirebon)	6-17
Gambar 6.9	Konsep Pengembangan Metropolitan Rebana	6-18
Gambar 6.10	Arahan Pengembangan Jaringan Transportasi Untuk Mempermudah Akses ke Wilayah Timur Provinsi Jawa Barat – Terkait dengan Kebijakan Pengembangan Metropolitan / Kawasan Ekonomi Rebana	6-19
Gambar 6.11	Luasan dan Pembagian Cluster Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Penunjang Kawasan Ekonomi Rebana Provinsi Jawa Barat.....	6-20
Gambar 6.12	Lokasi Simpul Transportasi Regional di Daerah-Daerah Sekitar Kabupaten Cirebon yang Memberi Kemudahan dan Keunggulan Posisi dan Akses dibanding Kabupaten Cirebon	6-21
Gambar 6.13	Matriks SWOT Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-22
Gambar 6.14	Output Analisis SWOT / Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-25
Gambar 6.15	Rumusan Isu Utama dalam Upaya Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-26
Gambar 6.16	Reformulasi Tujuan dan Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-27
Gambar 6.17	Peta Rekomendasi Lahan/Pola Ruang bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.....	6-29
Gambar 6.18	Peta Rekomendasi Pola Ruang bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenis Industri Besar dan Menengah.....	6-30
Gambar 6.19	Pengembangan Industri Lokal Yang Saling Terkait Melalui Kluster Industri.....	6-32
Gambar 6.20	Penguatan Linkage / Integrasi Lintas Sektor	6-32
Gambar 6.21	Konsep Pengembangan Sektor Unggulan dengan Kolaborasi dan Keterpaduan Lintas Sektor Ekonomi dan Industri	6-33
Gambar 6.22	Rumusan Pengembangan SDM Sektor Industri.....	6-34
Gambar 7.1	Rekomendasi Ruang bagi Lahan Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.....	7-4
Gambar 7.2	Rekomendasi Skenario Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.....	7-7



**LAPORAN PENDAHULUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, Kabupaten Cirebon, yang termasuk Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning sebagai gerbang timur Jawa Barat, diarahkan dengan fokus pengembangan pada sektor industri. Di WP Ciayumajakuning, Kabupaten dan Kota Cirebon memiliki peran sebagai Pusat Kawasan Nasional (PKN), untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sementara pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), wilayah Cirebon dan sekitarnya masuk sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) bersama-sama dengan Indramayu dan Majalengka, yang akan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi pada Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Jawa. Pada WPPI tersebut, Kabupaten Cirebon dan Kertajati aerocity akan menjadi zona pertumbuhan industri.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon selama ini mempunyai beberapa produk unggulan sesuai dengan Kompetensi Inti Industri Daerah, antara lain mebel dan kerajinan rotan, mebel dan kerajinan kayu, konveksi, batu alam, dan batik. Industri mebel dan kerajinan rotan selama ini menjadi primadona, dan masih tetap akan menjadi produk unggulan fokus di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur akan mampu membuka peluang yang besar bagi jenis-jenis industri lain pada masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPIK merupakan perencanaan pembangunan industri di tingkat kabupaten/kota, yang disusun dengan memperhatikan berbagai hal, antara lain rencana pembangunan industri di tingkat provinsi dan nasional, RPJPD, RTRW, potensi sumber daya industri daerah, daya dukung lingkungan, serta proyeksi penyerapan tenaga kerja dan lahan industri.

Di dalam strategi dan program pembangunan industri di Kabupaten Cirebon, dimaksudkan untuk mengintegrasikan pendekatan dan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif. Program-program indikatif tersebut diantaranya adalah program pengembangan industri unggulan, program pengembangan perwilayahan industri yang meliputi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, selanjutnya program pembangunan sumber daya industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri serta program pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) luasnya berkisar pada 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang terdiri atas KPI menengah dan besar; KPI kecil dan mikro, KPI Agro, dan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah industri dan wilayah-wilayah lain dalam suatu daerah yang dapat menyangkut kepentingan industri, maka Perda RTRW juga sudah menentukan berbagai daerah sebagai Kawasan Peruntukan dengan luas yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan peruntukannya.

Dalam perjalanannya, Perda RTRW Kabupaten Cirebon ini mengalami proses evaluasi karena adanya sejumlah perkembangan yang diakibatkan oleh dinamika pembangunan maupun arah kebijakan nasional maupun regional yang semakin mempengaruhi arah pemanfaatan ruang di wilayah

Kabupaten Cirebon. Dari sektor perindustrian sendiri terdapat perkembangan yang terjadi seiring dengan pemberlakuan peraturan/perundangan baru yang dilandasi semangat investasi sebagaimana Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta sejumlah turunannya yang sedang disiapkan hingga saat ini. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda Kabupaten Cirebon merasa perlu diadakannya upaya kajian terhadap alokasi KPI di Kabupaten Cirebon sesuai dengan amanah dari RIPK Kabupaten Cirebon yang telah disusun, dikaitkan dengan dinamika perkembangan kebijakan yang terjadi baik dari aspek tata ruang maupun aspek sektoral, sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian penetapan Kawasan Peruntukan Industri yang dapat menjadi masukan bagi arah perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon.

1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk memperoleh informasi dan materi bagi perumusan kebijakan dan informasi mengenai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Teridentifikasinya keterkaitan antara program pembangunan industri dengan penetapan KPI dan realisasi pemanfaatan ruangnya di Kabupaten Cirebon;
- b. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan terkait pengembangan pemanfaatan lahan KPI yang masih tersedia;
- c. Terrumuskannya arahan strategis bagi upaya penetapan KPI yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Cirebon.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pada pekerjaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini, secara sinergis antara kegiatan diskusi dan penyusunan substansi, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- A. Rapat Koordinasi Pengembangan Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- B. Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon):
 1. Persiapan / perumusan instrumen penelitian
 2. Pengumpulan data
 3. Analisis dan Pembahasan
 4. Penyusunan Laporan

Adapun lingkup substansi yang akan dikembangkan didalam penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi kondisi eksisting dan potensi KPI yang tersedia di Kabupaten Cirebon;
2. Analisis kesesuaian arah kebijakan / program pembangunan industri dengan lokasi dan potensi KPI yang ada;
3. Analisis kebutuhan penyesuaian penetapan KPI berdasarkan arah kebijakan dan dinamika pembangunan;
4. Perumusan rekomendasi kebijakan pembentukan kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Cirebon

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan berada di Kabupaten Cirebon. Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6° 30' 58" - 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" - 108° 50' 03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 990,36 km² (99.036 Ha), yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 km² (54 km x 1,85 km).

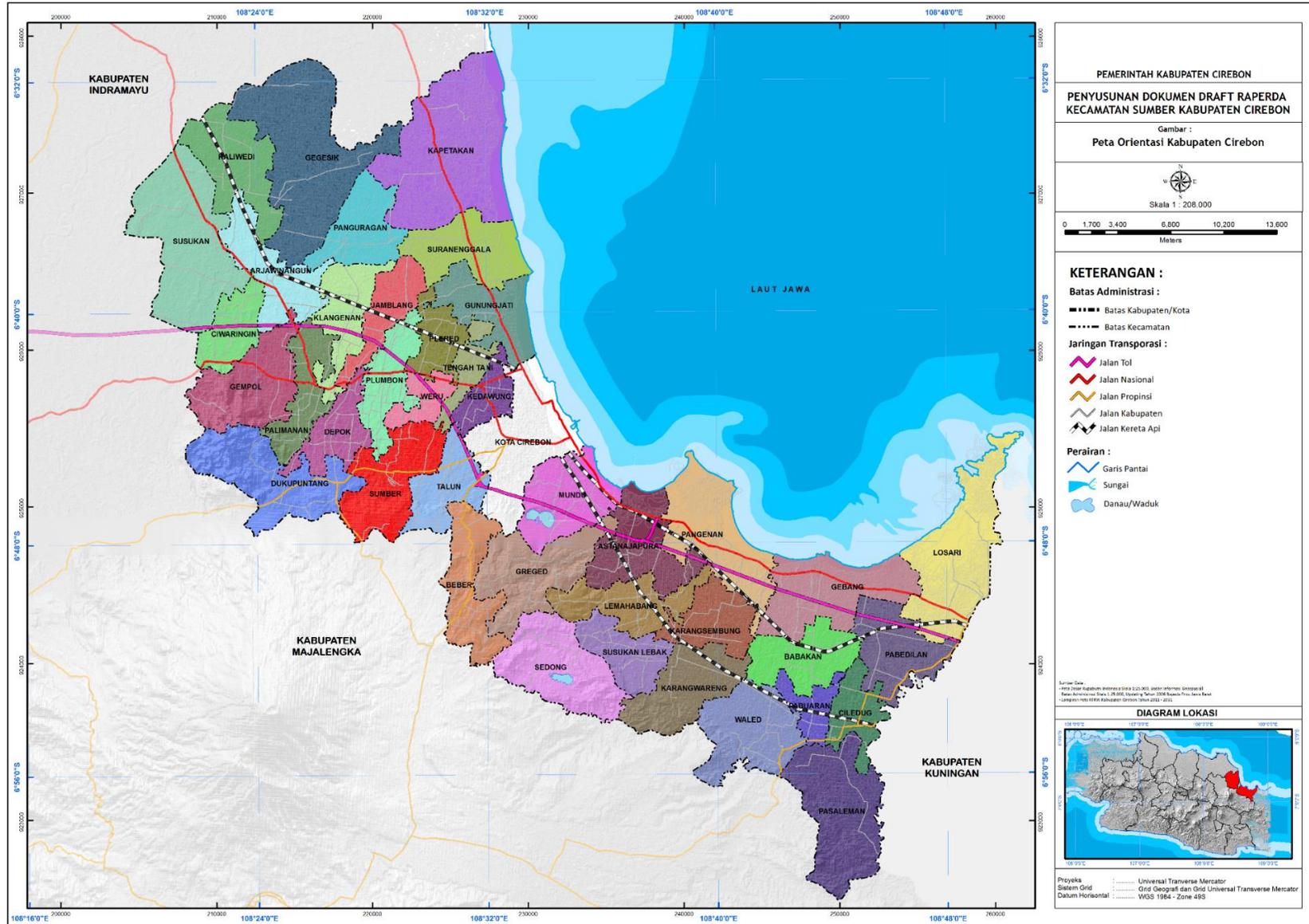
Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Pangenan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Cirebon



1.4 Landasaan Hukum

Rujukan/dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah 8 tahun 2018 mengenai Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.

1.5 Metodologi dan Rencana Kerja

Metodologi dan rencana kerja memuat rencana tahapan pelaksanaan yang dirinci kedalam lingkup pada setiap tahapan kegiatan dan didistribusikan kedalam kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Program Kerja disusun sesuai dengan pertimbangan:

- Lingkup kegiatan dalam KAK
- Kerangka pikir studi
- Pendekatan dan Metodologi Kegiatan
- Waktu dan Keluaran dari Setiap Pentahapan Pekerjaan

Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, terdapat tiga hal yang menjadi lingkup kebutuhan berkaitan dengan sasaran pekerjaan yang menjadi dasar pemikiran kebutuhan pekerjaan, yaitu:

1. Upaya untuk mengidentifikasi program pembangunan industri dan penetapan ruang KPI serta realisasi pemanfaatannya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebutuhan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon dan rekomendasi terkait lainnya.
2. Upaya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan terkait pengembangan KPI maupun kebutuhan pemanfaatan lahan KPI, serta
3. Perumusan rekomendasi yang memuat arahan strategis dalam penetapan dan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon.

Kerangka pikir di atas dijabarkan kedalam penggambaran konseptual studi sebagaimana matriks berikut:



Gambar 1.2 Penjabaran Sasaran Pekerjaan sebagai Kerangka Pikir Studi yang Memperlihatkan Kebutuhan Pelaksanaan Pekerjaan

1.5.1 Pendekatan dan Metodologi Pekerjaan

Beberapa pendekatan disusun berdasarkan karakteristik kegiatan dan kebutuhannya. Pendekatan-pendekatan teknis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan, dimana kerangka strategi pelaksanaan yang dijabarkan dalam metodologi teknis dan rencana kerja selanjutnya akan mengacu pada kerangka pikir dan pendekatan pekerjaan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terdapat berbagai kegiatan yang memerlukan penanganan berbeda, sesuai dengan karakteristik kegiatan dan sasaran antara (*milestone*) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pendekatan umum yang akan digunakan dalam penanganan pekerjaan ini dikelompokkan kedalam karakteristik kebutuhan penanganan kegiatan, yaitu:

- Pendekatan terhadap kegiatan pengumpulan data & informasi, dilakukan dengan pendekatan Eksploratif yang bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna perumusan konsep penanganan.

Adapun metode eksplorasi disesuaikan dengan kebutuhan, yang terdiri atas:

- Eksplorasi data dan informasi dalam proses Pengumpulan Data & Informasi
- Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dengan metode studi dokumenter dan metode kualitatif dengan mensintesa pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan kawasan industri yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan.
- Metode preskriptif dalam perumusan kebutuhan pengembangan kawasan, yang dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan.. Dengan metode preskriptif ini, studi tidak hanya terfokus pada analisa kondisi

eksisting, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi pemanfaatan suatu konsepsi penanganan atau kebijakan.

- Pendekatan terhadap kegiatan identifikasi dan analisis / kajian materi & permasalahan serta kebutuhan penanganan yang menjadi rekomendasi studi. Pendekatan ini dilakukan melalui:
 - Pendekatan kesesuaian ekologis, dengan metode analisis daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem. Dalam metode ini, semakin tinggi nilai jasa ekosistem akan menyebabkan semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape based proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - Pendekatan sintesa dan perumusan konsep rekomendasi melalui metode *incremental-strategis* yang memiliki karakteristik pendekatan dengan metode ini antara lain:
 - Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata.
 - Bersifat jangka pendek dan menengah
 - Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategis
 - Mempertimbangkan eksternalitas
 - Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat *incremental-strategis*.

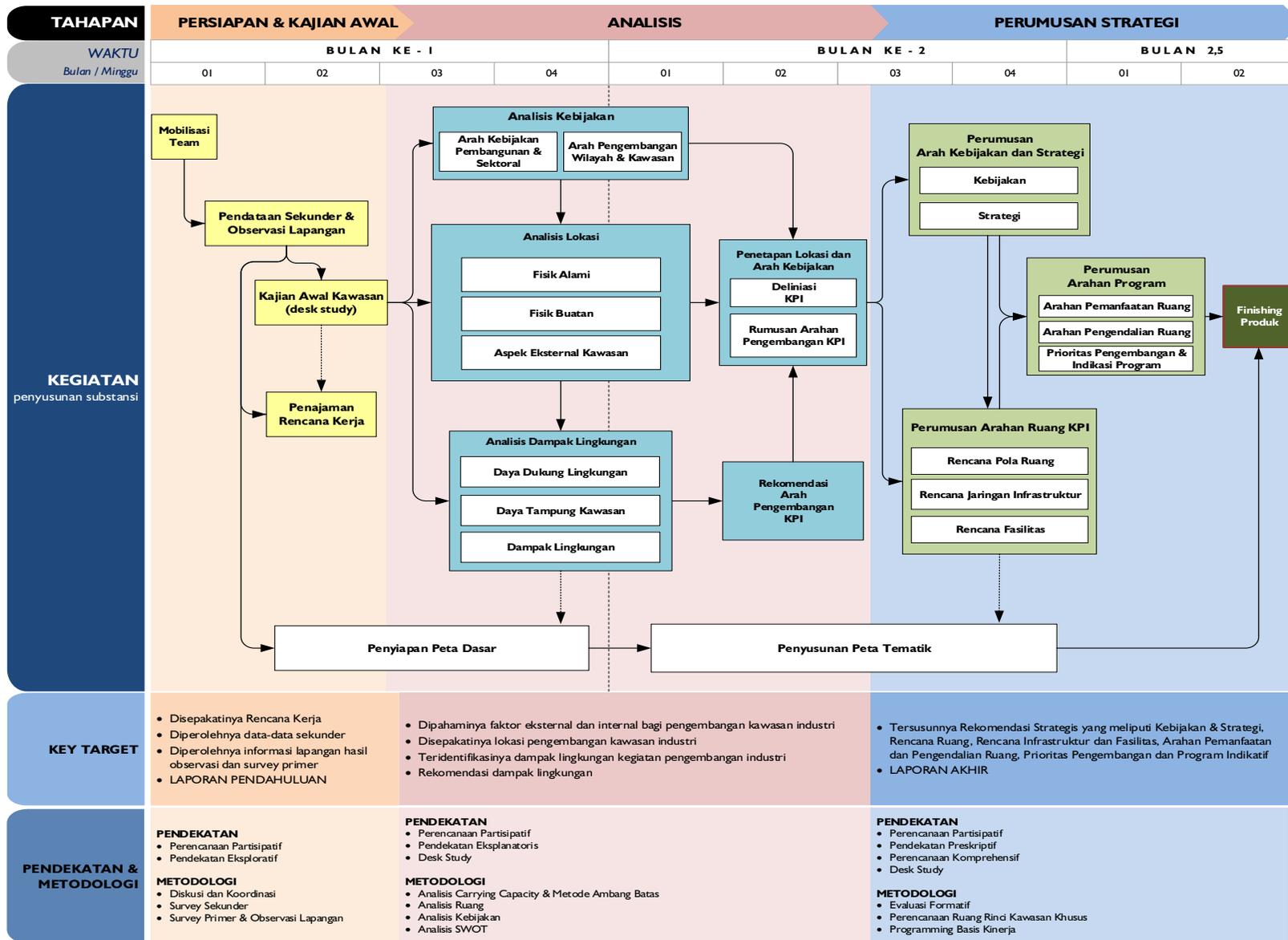
1.5.2 Rencana Kerja

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka program kerja yang disusun sinergis dengan metodologi dan pendekatan penanganan pekerjaan akan mengarahkan pada rencana pelaksanaan yang dibagi kedalam tiga tahapan utama pengerjaan, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan dan Kajian Awal
- (2) Tahap Analisis
- (3) Tahap Perumusan Rekomendasi Pengembangan KPI

Masing-masing tahapan pekerjaan tersebut memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan secara terstruktur dan adanya sasaran-sasaran antara (*milestones*) yang menjadi acuan bagi pencapaian kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di tahap berikut dari setiap pekerjaan.

Secara lebih jelas, program kerja yang terintegrasi dengan pendekatan dan metodologi pekerjaan dapat dicermati pada Bagan / Diagram Rencana Kerja dan Metodologi di halaman berikut ini.



Gambar 1.3 Metodologi dan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan akhir kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon ini akan disajikan dalam 7 (tujuh) bab sebagaimana dimaksud secara berurutan dijelaskan sebagai berikut.

01 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai penjelasan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sub kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari atas penjelasan mengenai : latar belakang pelaksanaan kegiatan; tujuan, dan sasaran pekerjaan; ruang lingkup pekerjaan; dasar hukum; dan sistematika penyajian laporan.

02 KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kajian literatur dan perundangan yang terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri, diantaranya : Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri, nomenklatur dan arahan yang terkait dengan pengembangan sektor industri, serta dinamika perkembangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang berpengaruh terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri.

03 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisikan amanat-amanat kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon serta program-program pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan KPI di Kabupaten Cirebon, baik itu di tingkat Nasional, regional (Provinsi Jawa Barat), maupun kebijakan dan program di tingkat Kabupaten Cirebon.

04 ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisikan mengenai hasil kajian terhadap Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB serta kecenderungan perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon

05 ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI

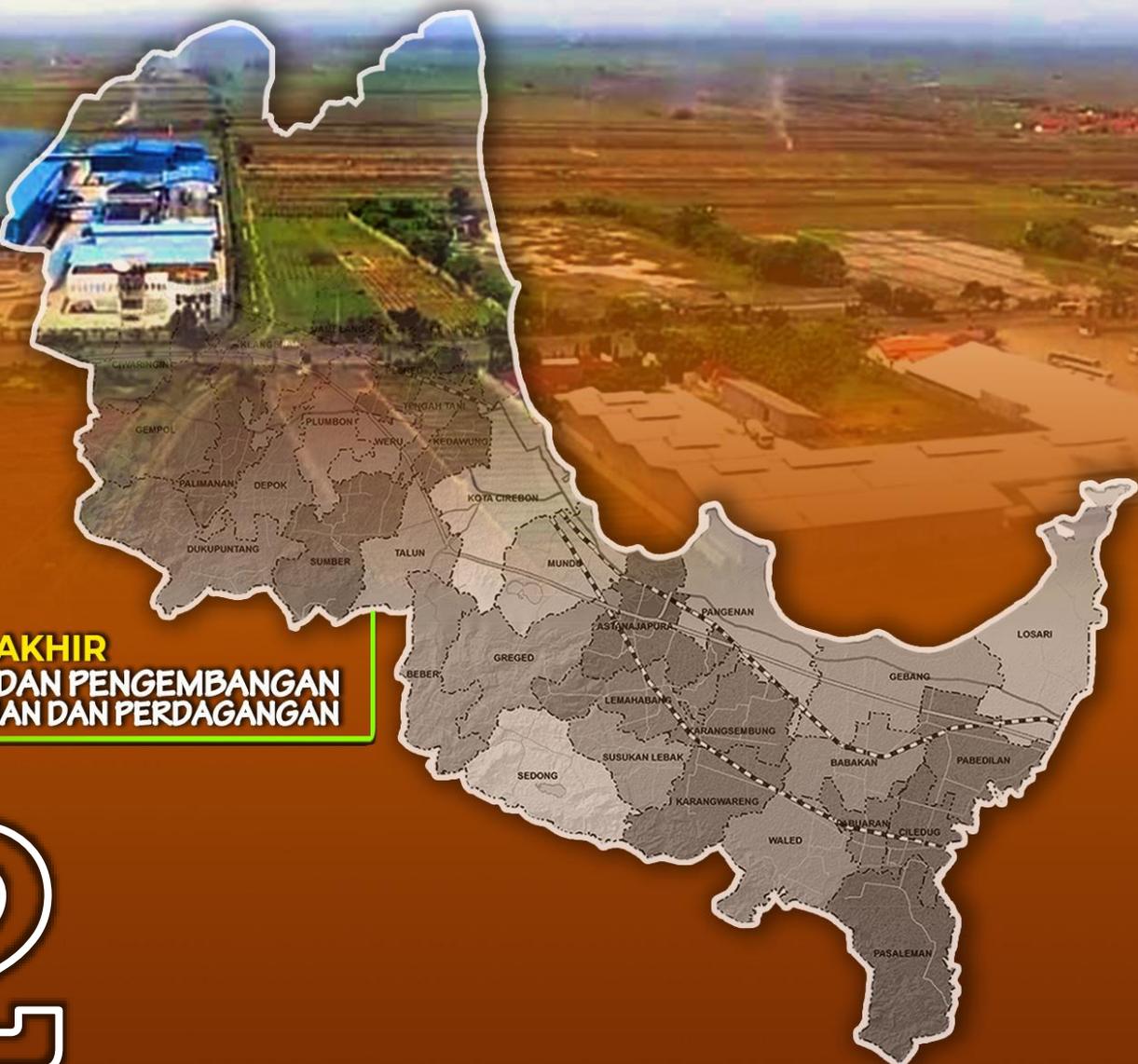
Bab ini berisikan penjelasan hasil kajian mengenai : (1) Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan eksisting, dan (2) Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.

06 RUMUSAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KPI

Hasil dari identifikasi dan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, kemudian menghasilkan rumusan kebutuhan pengembangan KPI, yang meliputi : Potensi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pengembangan KPI, Analisis SWOT terkait Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon, Rumusan Tujuan dan Sasaran Pengembangan KPI, serta Strategi Pencapaian Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.

07 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan hasil akhir dari seluruh kajian yang dirangkum dalam bahasan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2

KAJIAN LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

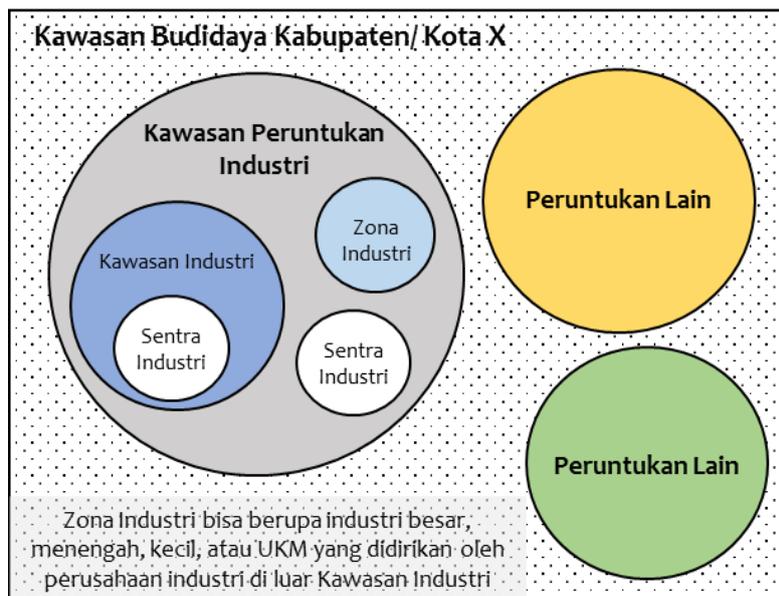


2.1 Pemahaman Dasar Kawasan Peruntukan Industri

2.1.1 Peristilahan Pokok dalam Perindustrian

Dalam memahami Kawasan Peruntukan Industri (KPI), perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu sejumlah peristilahan dan pengertian nomenklatur yang digunakan dalam bidang perindustrian. Beberapa istilah pokok yang akan sering ditemui dalam studi ini antara lain:

- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah, melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat, serta ditetapkan dengan deliniasi atau batas yang tidak terkait dengan batas secara administratif.



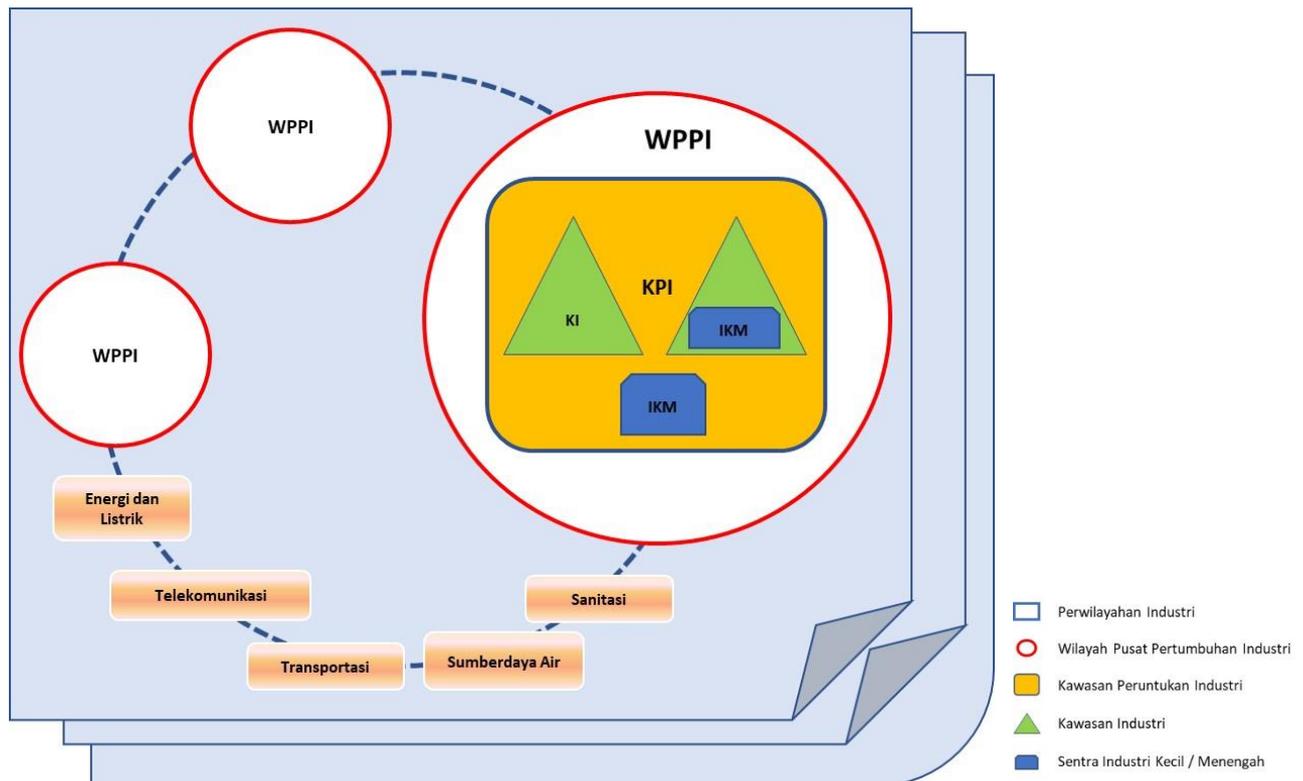
Gambar 2.1 Ilustrasi Kawasan Peruntukan Industri

2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah dalam Perindustrian

Bagi suatu wilayah, industri memiliki peran vital dan strategis bagi peningkatan ekonomi. Keberadaan industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang pada akhirnya mendorong pencapaian tujuan nasional berupa kesejahteraan masyarakat. Karenanya, sangat penting untuk mengelola industri agar bisa menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan 22 wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) yang mencakup 21 provinsi dan 86 kabupaten/kota. Penetapan tersebut didasari beberapa faktor yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan WPPI ini berbasis pada pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah, penguatan infrastruktur industri, dan

konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitar. Penetapan wilayah pengembangan industri juga sejalan dengan amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melakukan percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Salah satu kriteria dalam penetapan suatu daerah menjadi WPPI adalah keberadaan potensi sumber daya alam, sehingga masing-masing WPPI memiliki industri prioritas yang akan dikembangkan. Pemahaman mengenai pola pikir perwilayahan dalam sektor industri dapat dipahami dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Pola Pikir Perwilayahan Industri

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami adanya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dapat terdiri dari sejumlah zona kegiatan industri serta Kawasan Industri yang memiliki pengelolaan tersendiri. Perlu ditekankan bahwa industri berbeda dari kawasan industri. Kawasan industri dibentuk dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan barang industri dalam negeri serta untuk ekspor. Di Indonesia, kawasan industri dianggap perlu diadakan dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan kawasan industri dan perusahaan kawasan industri ini diatur melalui peraturan khusus demi agar industri dapat berjalan secara produktif dan efisien

Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri adalah:

- Kawasan Peruntukan Industri merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri)
- Lokasi KPI harus dinilai dari sisi infrastruktur, sumberdaya dan tenaga kerja.



Gambar 2.3 Posisi Kegiatan Industri dalam Kawasan Peruntukan Industri

Keterangan :

IK = Industri Kecil ; IM = Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan baku khusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus

2.2 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Studi Kawasan Peruntukan Industri ini dilakukan tidak terlepas dari kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan bidang industri yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan dilakukan agar desentralisasi pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai.

Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional. Urusan-urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke pusat melalui propinsi. Kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten/kota bagi kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang mencakup lintas kabupaten atau kota dan atau bersifat strategis propinsi cukup dibahas ditingkat propinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas propinsi dan atau bersifat kepentingan nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat nasional

Didalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 13 ayat (3), Perindustrian dikategorikan sebagai Urusan Pemerintahan Pilihan. Di dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam bidang industri, sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Industri

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana induk pembangunan industri Provinsi.	Penetapan rencana induk pembangunan industri Kabupaten/Kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ industri yang berdampak besar pada lingkungan; ▪ industri minuman beralkohol; dan ▪ industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ industri yang berdampak besar pada lingkungan; ▪ industri minuman beralkohol; dan ▪ industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi.	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. d. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IUI Besar dan Izin perluasannya; dan ▪ IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas 	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IUI Kecil dan Izin Perluasannya; ▪ IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan ▪ IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

2.3 Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terkait Pengembangan Sektor Industri di Daerah

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Industri di daerah diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya, diantaranya dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi serta memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah melalui perwilayahan Industri.
5. Perwilayahan Industri dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. Peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
6. Perwilayahan Industri dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. pembangunan Kawasan Industri.

Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat di dalam Pasal 11, yaitu :

- 1) Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- 2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- 3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan serta dukung lingkungan.
- 4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Daerah dalam Bidang Industri, yang terangkum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM Industri
 - Penyusunan RPIK, RPJMD Urusan Industri, RKPDI Industri
2. Perizinan
 - Penerbitan IUI Kecil dan IUI menengah, Izin Perluasan Industri, IUKI dan Izin Perluasan IUKI
3. Pembangunan SDM Industri
 - Melakukan pemetaan kebutuhan SDM industri lokal kabupaten/kota
 - Penyelenggaraan pemagangan SMK di industri kecil dan menengah
4. Pemberdayaan Industri
 - Menetapkan IKM Unggulan berdasarkan RPIK

- Penguatan kelembagaan IKM: Bantuan dan bimbingan teknis sentra dan IKM Kabupaten/Kota
- 5. Pembangunan Sarana/Prasarana Industri (Lahan)
 - Penetapan Kawasan Peruntukan Industri berkoordinasi dengan provinsi
 - Menyediakan lahan industri untuk Kawasan Industri
- 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Pemerintah kota/kabupaten dapat melakukan penjaminan resiko atas pemanfaatan teknologi industri di daerahnya yang dikembangkan di dalam negeri
 - Melakukan pengawasan pemanfaatan teknologi industri kecil dan menengah
 - Melaksanakan fasilitasi : kerjasama litbang teknologi di bidang industri, promosi alih teknologi, lembaga litbang/perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi
- 7. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - Membina proses pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan teknologi produk unggulan Kabupaten / Kota
 - Promosi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi untuk produk unggulan
 - Konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual Industri kecil menengah
 - Fasilitasi promosi produk industri kecil dan menengah Kab/Kota melalui pameran dalam negeri Kab/Kota
- 8. Sistem Informasi Industri Nasional
 - Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi industri
 - Pemantauan dan pengawasan kepatuhan untuk perusahaan yang ijinnya dikeluarkan oleh daerah.

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

2.4.1 Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk :

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Tata cara pembangunan Kawasan Industri meliputi :

- a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia;
- b. Badan usaha sebagaimana dapat berbentuk :
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - Koperasi; atau
 - Perseroan Terbatas.
- c. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;
- d. Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;

- e. Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri paling sedikit memuat :
 - (1). Pemilihan Lokasi;
 - (2). Perizinan;
 - (3). Pengadaan Tanah;
 - (4). Pematangan Tanah;
 - (5). Pembangunan Infrastruktur; dan
 - (6). Pengelolaan.

2.4.2 Infrastruktur Kawasan Industri

Infrastruktur Kawasan Industri, meliputi :

- a. Infrastruktur Industri, meliputi :
 - (1). Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 - (2). Jaringan Telekomunikasi;
 - (3). Jaringan Sumber Daya Air dan Jaminan Pasokan Air Baku;
 - (4). Sanitasi;
 - (5). Jaringan Transportasi.
- b. Infrastruktur Penunjang, meliputi :
 - (1). Perumahan;
 - (2). Pendidikan dan Pelatihan;
 - (3). Penelitian dan Pengembangan;
 - (4). Kesehatan;
 - (5). Pemadam Kebakaran; dan
 - (6). Tempat Pembuangan Sampah.
- c. Infrastruktur Dasar, meliputi :
 - (1). Instalasi Pengolahan Air Baku;
 - (2). Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - (3). Saluran Drainase;
 - (4). Instalasi Penerangan Jalan; dan
 - (5). Jaringan Jalan.

2.5 Peraturan Menteri Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Permenperin No. 40/2016 merupakan pengganti dari Permenperin Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, sebagai pedoman bagi pelaku usaha kawasan industri, pelaku usaha industri, Pemerintah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun Kawasan Industri. Dalam Permenperin No. 40/2016 terdapat 4 bahasan penting mengenai konsepsi dasar, persiapan, pembangunan dan pengelolaan dalam membangun kawasan industri. Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dan panduan

bagi aparatatur Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Industri. Sedangkan tujuannya adalah agar Kawasan Industri dibangun sesuai dengan tata ruang, didukung dengan infrastruktur, efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga pada gilirannya mampu menarik investasi bagi pengembangan industri dan mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri mencakup:

1. Tahap persiapan, meliputi kelayakan lokasi, penyusunan dokumen, dan pengurusan perizinan;
2. Tahap pembangunan, meliputi pembebasan lahan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED);
3. Tahap pengelolaan, mencakup kelembagaan, sistem manajemen, pelaksanaan tata tertib Kawasan Industri, pelayanan kepada tenant, pemasaran, pengembangan usaha, pengelolaan lingkungan, kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penyusunan data Kawasan Industri.

Dalam pembangunan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk Kawasan Industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan salah satu syarat bagi perizinan Kawasan Industri.

2. Ketersediaan Infrastruktur Industri

Pembangunan suatu Kawasan Industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan infrastruktur industri yang memadai. Dalam upaya mengembangkan suatu Kawasan Industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b. tersedianya sumber energi (gas, listrik, dan lain-lain) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kepastian pasokan;
- c. tersedianya sumber air sebagai air baku industri dan air minum baik yang bersumber dari air permukaan atau air tanah; dan
- d. tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data.

3. Ramah Lingkungan

Dalam pembangunan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri. Aspek efisiensi dimaksud antara lain meliputi efisiensi dalam aspek lokasi dan infrastruktur serta aspek pelayanan. Bagi tenant akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik yang dilengkapi dengan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing tenant tersebut. Sedangkan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri.

5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan suatu Kawasan Industri sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan

berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat, tindakan anarkis, dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri di dalam Kawasan Industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, Pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) untuk mendapatkan perlakuan khusus.

6. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6 Pengaruh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Perkembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Undang-Undang ini disusun menggunakan teknik Omnibus Law. Pengesahan Undang-Undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta memangkas rumitnya perizinan yang dianggap selama ini sebagai salah satu hambatan utama dalam investasi.

Omnibus Law menurut Firman Freaddy Busroh sebagai mana yang dikutip oleh Antoni Putra (2020) adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. metode penyusunan hukum Omnibus Law ini biasa digunakan negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Kanada dan Inggris. Konsep Omnibus Law merupakan jalan keluar dari tumpang tindih aturan dan ketidakpastian Hukum yang terdapat dalam produk hukum yang ada saat ini. Jika hambatan proses regulasi tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundangundangan yang sering berhenti di tengah pembahasan atau tidak sesuai dengan jadwal.

Pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan tuntutan jaman. Apalagi peraturan saat ini sangat gemuk yang mencapai 42 Ribu aturan yang terdiri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Begitu banyak peraturan menimbulkan problematika tersendiri bukan saja mengenai jumlahnya yang sangat banyak tetapi juga materi muatannya yang tumpang tindih.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui teknik Omnibus Law merupakan sebuah pembaruan yang patut diapresiasi namun bukan berarti tak terdapat kritikan di dalamnya. Kritikan bukan saja tertuju pada proses pembentukan yang terkesan sangat terburu-buru dan penuh dengan unsur politik tetapi juga materi muatan yang terkesan mementingkan investasi dan kepentingan para pengusaha saja. Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi.

2.6.1 Urusan bidang Perindustrian dalam UUCK

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah mengubah kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perizinan Industri, dimana perubahan tersebut menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dalam perizinan kegiatan industri kepada

pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut saat ini konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah *agency model* di mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hanya menjadi pelaksana kewenangan pusat. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap kesempatan pemerintah daerah dalam ikut serta melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan mengenai daerahnya. Selain itu hapusnya kewenangan perizinan industri juga menimbulkan kekhawatiran akan turunnya pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat karena hilangnya sumber pendapatan.

Perizinan industri sebagai kewenangan membutuhkan suatu dasar dalam pelaksanaannya. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri terdapat dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan mengenai kewenangan perindustrian daerah hanya sebatas pengaturan norma umum di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian berdasarkan kewenangan konkuren. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang mengatur khusus mengenai perindustrian menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang perindustrian. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha industri yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014. PP ini memuat tentang Perizinan, Klasifikasi Usaha dan Izin Usaha, pembagian kewenangan, tata cara penerbitan izin dan izin lainnya yang berkenaan dengan izin industri. Dalam Pasal 2 Ayat (3) kegiatan perindustrian diklasifikasikan menjadi tiga yaitu industri kecil, industri menengah, industri besar.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan Izin Usaha Industri dapat dilihat dalam Pasal 11 dan 12. Dalam Pasal 11 menerangkan bahwa Gubernur berwenang memberikan IUI besar selain yang menjadi kewenangan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 12 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada di pada Kabupaten/Kota. Selain itu baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala instansi pemerintahan di masing-masing tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan satu pintu.

Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah membawa konsekuensi baru dalam urusan pemerintah daerah konkuren khususnya mengenai kewenangan perizinan industri. Pembaharuan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut akan berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri dan beralih kepada konsep sentralisasi yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Pada Pasal 101 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat” memiliki arti bahwa hanya pemerintah pusat yang berhak dan berwenang dalam menerbitkan izin industri. Ketentuan tersebut telah menutup ruang otonomi daerah dalam perizinan industri di mana yang sebelumnya pemerintah daerah Provinsi dapat mengeluarkan izin industri besar yang bukan kewenangan menteri dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan IUI menengah dan kecil kini semuanya beralih kepada pemerintah pusat. Sebenarnya langkah penyeragaman peraturan perindustrian yang dilakukan pemerintah pusat patut diapresiasi, karena pemerintah beralih dengan diseragamkannya peraturan perizinan akan membuat Investor tertarik menanamkan modal di Indonesia yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyakbanyaknya. Namun ternyata penyeragaman hukum yang dilakukan pemerintah pusat dengan cara menarik kembali kewenangan daerah dalam perizinan malah menimbulkan permasalahan. Di satu sisi membuka lapangan pekerjaan disisi lainya mendegradasi kewenangan pemerintah daerah. Memang berdasarkan

segi ekonomi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut berbanding terbalik dalam segi otonomi daerah yang menandakan kemunduran sistem dan kembali pada konsep sentralisasi.

Selain dicabutnya kewenangan pemberian izin industri, ternyata berdasarkan perubahan Pasal 117 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap izin industri dan izin kawasan industri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Padahal secara logika pemerintah daerah sebagai pihak lebih mengetahui kondisi langsung di daerahnya seharusnya memiliki kewenangan tersebut karena berkaitan dengan kecepatan dan efisien.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan sektor perindustrian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi.
- Adanya komitmen dalam menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri melalui kemudahan penyediaan bahan baku → melalui pembatasan ekspor bahan baku, kemudahan impor bahan baku, maupun pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan serta membangun industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam
- Adanya perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan Industri melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri

2.6.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian merupakan turunan langsung dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- Industri Strategis;
- Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan
- Tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi. Adanya komitmen dalam menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri melalui kemudahan penyediaan bahan baku → melalui pembatasan ekspor bahan baku, kemudahan impor bahan baku, maupun pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan serta membangun industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam. Adanya perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan Industri melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

2.6.3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai kriteria. Dengan begitu diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia

lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak sekitar 50 persen ada di pulau Jawa-Bali. Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 Kawasan Industri (KI), total luasnya mencapai 53 ribu hektare. Langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Penetapan KPI seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI.

Dalam upaya menindaklanjuti percepatan pembangunan dan pengembangan perindustrian tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di dalam wilayahnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kriteria teknis Kawasan Peruntukan Industri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KPI ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri; tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berwenang menetapkan kriteria teknis KPI. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan infrastruktur Industri di dalam KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kawasan peruntukan industri diarahkan di setiap kabupaten/kota, baik berupa kawasan industri, sentra industri kecil menengah, maupun perusahaan-perusahaan industri. Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, suatu lokasi harus memiliki beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Pertama, kondisi lahan. Kawasan industri harus memperhatikan kondisi lahan dari aspek bencana, dan topografi. Pada kriteria ini, kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di atas 15 persen. Kedua, status lahan. Kawasan peruntukan industri memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek petanahan dan penataan ruang. Kawasan peruntukan industri tidak boleh berada di lahan penguasaan adat, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan tidak berada di kawasan lindung. Ketiga, luas lahan. Kawasan peruntukan industri memehuni ketentuan luas lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, aksesibilitas. Kawasan industri mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. Aksesibilitas ini mempertimbangkan beberapa jalur transportasi, seperti transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api. Selain itu jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama, jalur transportasi laut yang dengan dengan pelabuhan untuk wilayah pesisir, atak jalur transportasi udara. Kelima, kawasan peruntukan industri terdapat sumber air baku. Sumber air baku ini meliputi air permukaan, dan air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, dan olahan air limbah industri. Keenam, terdapat pembuangan air limbah. Kriteria ini meliputi laut, air permukaan atau aplikasi ke tanah. Selain memenuhi enam kriteria teknis, pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan, ketersediaan jaringan telekomunikasi, kepadatan permukiman dan kesesuaian dengan rencana pembangun industri daerah.

Prinsip penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, yaitu sebagai berikut :

1. Acuan penetapan KPI dalam rencana tata ruang
 - Penetapan KPI harus dijadikan acuan dalam rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR, serta RTR kawasan strategis, apabila Pemerintah menetapkan kegiatan Industri sebagai kegiatan strategis.



- Penetapan KPI memperhatikan keharmonisan peruntukan ruang (pola ruang) dengan kawasan sekitarnya dan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya.
2. Tidak berada di kawasan rawan bencana risiko tinggi
3. Kesesuaian dengan rencana pembangunan Industri
 - Dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
 - Termasuk dalam penentuan skala Industri (besar, menengah, atau kecil).
4. Kemudahan penyediaan infrastruktur Industri
 - Penetapan KPI memerlukan dukungan kemudahan penyediaan infrastruktur Industri yang memadai baik rencana maupun eksisting, antara lain: lahan industri, aksesibilitas memadai, jaringan dan sumber air sebagai air baku, tersedianya badan air penerima limbah Industri yang telah diolah, sumber energi, dan sistem dan jaringan telekomunikasi.
5. Kenyamanan, keamanan, dan kemudahan berusaha
 - Jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan
 - Jaminan kemudahan dalam berusaha juga diperlukan, seperti kemudahan dalam berinvestasi dan perizinan.
6. Kondisi Lahan (daya dukung, kerawanan bencana, topografi)
7. Status dan Pola Guna Lahan (bukan lahan adat, LP2B, maupun kawasan lindung)
8. Luas Lahan (mengacu PP No.142/2015 tentang Kawasan Industri)
 - dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan Industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau
 - dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang peruntukannya untuk Industri kecil dan Industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.
9. Aksesibilitas tinggi
 - Keberadaan sistem jaringan transportasi yang didukung dengan simpul/hub perhubungan
 - Jalur transportasi merupakan jalur regional atau jalur utama yang tidak mengganggu/terganggu pergerakan lokal
10. Sumber Air Baku (ketersediaan air permukaan, pemanfaatan jaringan air bersih PDAM atau kerjasama/fasilitasi jaringan air bersih industri, dan pemanfaatan air limbah industri/reuse)
11. Tempat Pembuangan Air Limbah
 - Sesuai dengan Permen LHK No.102/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah
 - Izin Pembuangan Air Limbah dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
 - Ada proses pengolahan dan jaringan air limbah
 - Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen kajian pembuangan air limbah
 - Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah komunal dan memperoleh pendapatan dari pengolahan air limbah tersebut.
12. Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri
 - Ketersediaan Jaringan Energi dan Kelistrikan;
 - Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi;
 - Kepadatan Permukiman;
 - Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Tabel 2.2 Pertimbangan lain dalam penetapan Kawasan Peruntukan Industri

No	Pertimbangan Lain	Keterangan
1	Jaringan energi dan kelistrikan	Alokasi KPI berdasarkan rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti dengan penyediaan jaringan energi dan listrik dengan pasokan daya dan tegangan yang stabil, serta mampu memwadahi kegiatan Industri di kawasan tersebut.
2	Jaringan telekomunikasi	Penyediaan jaringan telekomunikasi berupa sistem kabel dan nirkabel untuk distribusi produk dan pengembangan usaha dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan KPI.
3	Kepadatan permukiman	KPI harus mempertimbangkan dampak negatif yang minimal bagi masyarakat. Untuk itu, KPI sebaiknya memiliki kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang.
4	Kesesuaian dengan rencana pembangunan industri daerah	a. Pengembangan Industri sebaiknya didasarkan pada potensi dan karakteristik daerah serta visi misi kepala daerah yang bersangkutan. b. Pemerintah Daerah perlu berpedoman pada RPIP dan RPIK dalam menentukan jenis Industri yang akan dikembangkan, termasuk dalam menentukan kemungkinan mengembangkan Industri kecil, Industri menengah, atau Industri besar. c. Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis aspek ekonomi.

Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah yang masih dalam proses penyusunan dan penetapan KPI di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. KPI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat pada saat peninjauan kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM **PEMBANGUNAN yang DAPAT MEMPENGARUHI** **PERKEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON**



3.1 Kajian Program Pembangunan Industri terkait Penetapan KPI

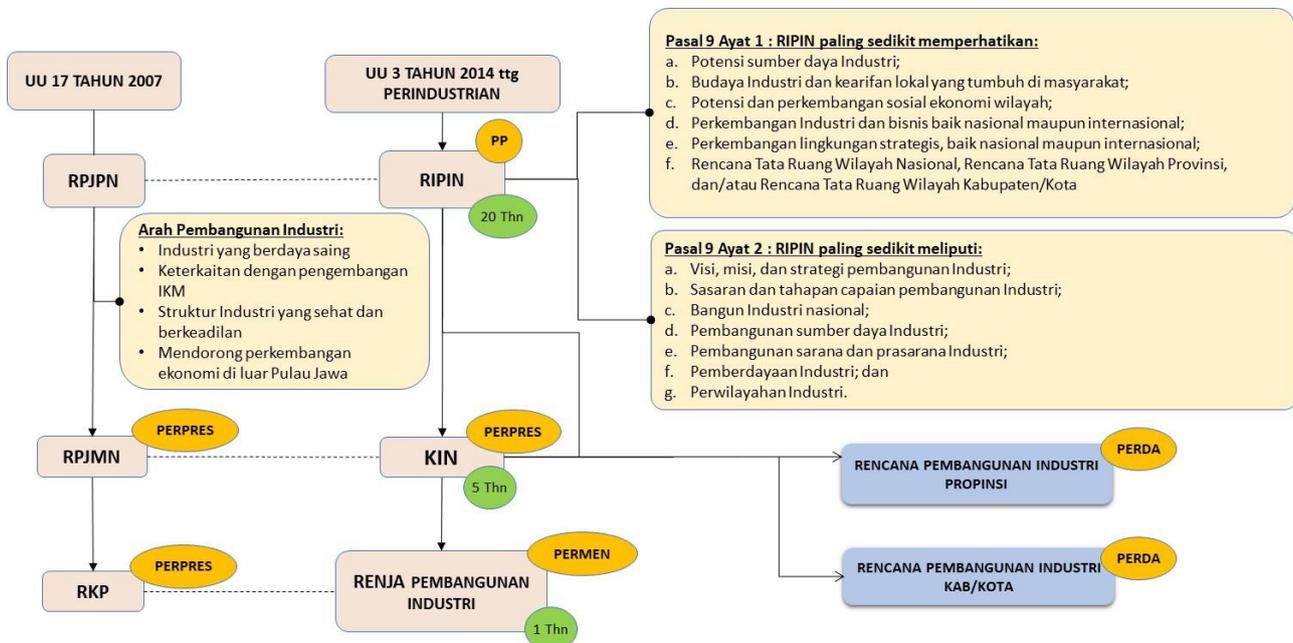
3.1.1 Program Pembangunan Industri Nasional

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

- Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam skema Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan amanat dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Secara skematis bisa dilihat pada gambar berikut ini.

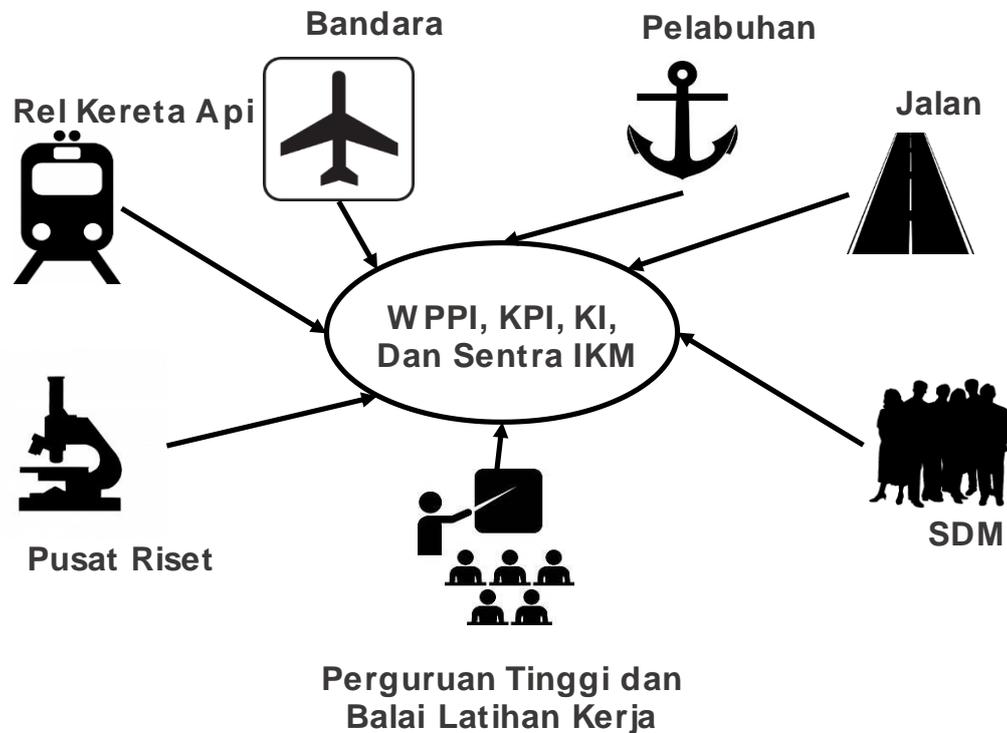


Gambar 3.1 Kedudukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dalam Skema Pembangunan Industri Nasional

Penetapan Industri Prioritas yang termasuk dalam Industri Andalan, Industri Pendukung, dan Industri Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 telah ditetapkan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah, melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat, serta ditetapkan dengan deliniasi atau batas yang tidak terkait dengan batas secara administratif.



Gambar 3.2 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun yaitu 2015-2035. Pelaksanaan RIPIN 2015-2035 melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam RIPIN, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam RIPIN dijabarkan juga mengenai sasaran, strategi dan tahapan pembangunan industri nasional. Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 - 2035

No	Indikator Pembangunan Industri	satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produksi industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	jumlah tenaga kerja disektor industri	Juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23	20,0
7	Nilai investasi sektor industri	Rp. Triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Dalam konteks perwilayahan, untuk mencapai percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka berdasarkan RIPIN secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Tabel 3.2 Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
I	Papua	1	Papua
II	Papua Barat	2	Papua Barat
III	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku	3	Sulawesi Utara
		4	Gorontalo
		5	Sulawesi Tengah
		6	Sulawesi Tenggara
		7	Maluku
		8	Maluku Utara
IV	Sulawesi Bagian Selatan	9	Sulawesi Barat
		10	Sulawesi Selatan
V	Kalimantan Bagian Timur	11	Kalimantan Utara
		12	Kalimantan Timur
VI	Kalimantan Bagian Barat	13	Kalimantan Barat
		14	Kalimantan Tengah
		15	Kalimantan Selatan
VII	Bali dan Nusa Tenggara	16	Bali
		17	Nusa Tenggara Barat
		18	Nusa Tenggara Timur
VIII	Sumatera Bagian Utara	19	Nanggroe Aceh Darussalam
		20	Sumatera Utara
		21	Sumatera Barat
		22	Riau
		23	Kep. Riau

No	Wilayah Pengembangan Industri (WPI)		Provinsi
IX	Sumatera Bagian Selatan	24	Jambi
		25	Bengkulu
		26	Bangka Belitung
		27	Sumatera Selatan
		28	Lampung
X	Jawa	29	Banten
		30	Jawa Barat
		31	DKI Jakarta
		32	DI Yogyakarta
		33	Jawa Tengah
		34	Jawa Timur

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dimana Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar pulau jawa;
4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5. Kualitas dan kuantitas sdm;
6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
7. Memiliki potensi sumber daya air industri;
8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur - Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitunb-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi	Sulawei Tengah
6	Kendari-Konawe-konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali	Sulawei Tenggara dan Sulawesi Tengah
7	Makasar-maros-Gowa-Takalar-Jenepono-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-Sambas-Bengkayang	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru	Kalimantan Selatan
10	Samarinda-Balikpapan, dan Kutai Kartanegara- Bontang-Kutai Timur	Kalimantan Timur
11	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara



No	Lokasi Kabupaten/ Kota	Provinsi
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie-Bireun-Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli SerdangBedagai-Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin-Muaraenim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Sumber : PP No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN

3.1.2 Program Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat tahun 2018 – 2038.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2 digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40% (empat puluh persen);
2. meningkatnya industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatnya peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional;
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

Dalam dokumen ini dituliskan arahan-arahan pengembangan industri di Jawa Barat, termasuk di antaranya strategi pembangunan industri Jawa Barat yaitu dengan berfokus pada penguatan penyediaan bahan baku, penguatan proses, penguatan output dan distribusi (logistik) serta penguatan faktor pendukung.

Selain itu, dalam dokumen tersebut disebutkan juga berbagai jenis industri unggulan dari daerah-daerah yang ada di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon. Industri unggulan Kabupaten Cirebon tersebut diantaranya adalah:

1. industri pengolahan ikan
2. industri furniture kayu dan rotan
3. perawatan kapal
4. suplemen pakan ternak dan aqua culture
5. komponen berbasis kayu (wood working, laminated dan finger joint)
6. industri bahan galian non logam (semen dan keramik)

Tabel 3.4 Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi di Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Keterangan
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan	Aneka olahan ikan dan hasil laut lainnya (termasuk minyak ikan, suplemen, dan pangan fungsional lainnya.)
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Furniture kayu dan rotan; • Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu
3	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan	Perawatan kapal
4	Industri Hulu Agro	Industri Pakan	Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aqua culture</i>
		Industri Barang dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated, and finger joint</i>), • serat bambu untuk tekstil, • <i>wood moulding products</i>
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Bahan Galian Non-Logam	

Sumber : Peraturan Daerah. No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2038

3.1.3 Program Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat tahun 2018 - 2038, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2039. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kabupaten Cirebon.

Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengukuhkan diri sebagai provinsi industri yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada saat ini, industri di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri di wilayah Jawa Barat bagian barat-utara serta sekitar metropolitan Bandung. Namun pada masa mendatang, berbagai faktor (UMK, lahan, regulasi, dsb.) membuat daya tarik industri di kawasan-kawasan tersebut menurun. Sementara itu, wilayah Jawa Barat timur-utara, termasuk Kabupaten Cirebon, akan muncul menjadi kekuatan industri baru yang menarik, dengan faktor sumber daya industri yang atraktif serta pembangunan infrastruktur industri yang terus dilakukan.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon selama ini mempunyai beberapa produk unggulan sesuai dengan Kompetensi Inti Industri Daerah, antara lain mebel dan kerajinan rotan, mebel dan kerajinan kayu, konveksi, batu alam, dan batik. Industri mebel dan kerajinan rotan selama ini menjadi primadona, dan masih tetap akan menjadi produk unggulan fokus di Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur akan mampu membuka peluang yang besar bagi jenis-jenis industri lain pada masa mendatang.

3.1.3.1 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah dan pembangunan industri daerah, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2018-2038 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kontribusi industri pengolahan pada ekonomi Kabupaten Cirebon;
2. meningkatkan industri bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan;
3. meningkatkan peran industri dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional;
4. meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan;
5. meningkatkan nilai ekspor dan substitusi impor produk industri pengolahan.

3.1.3.2 Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota/Kabupaten

Penetapan industri unggulan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan RPIK dengan perencanaan pembangunan yang terkait, antara lain RPIP Jawa Barat, Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), dan rencana pembangunan Kabupaten Cirebon.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2016-2035 telah menetapkan sekian banyak industri sebagai industri unggulan provinsi dalam jangka panjang. Selain itu, RPIP juga telah mengalokasikan pengembangan industri-industri tersebut pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat, di mana Kabupaten Cirebon dialokasikan pengembangan industri-industri berikut:

1. Industri pengolahan ikan
2. Industri furnitur dan barang lainnya dari kayu
 - Furnitur kayu dan rotan
 - Kerajinan dengan bahan baku limbah industri
3. Industri perawatan kapal
4. Industri pakan
5. Industri barang dari kayu
 - Komponen berbasis kayu (*wood working*)
6. Industri bahan galian non-logam

Sementara itu, terdapat beberapa komoditas unggulan yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Cirebon, yaitu:

- Kerajinan/mebeler dari rotan, kayu, bambu.
- Makanan ringan (emping melinjo, kue gapit, krupuk kulit, tape ketan, dan sebagainya)
- Batu alam
- Sandal
- Batik
- Konveksi (pakaian jadi)
- Kerajinan (kulit kerang, tikar adem, ban bekas, dan sebagainya)
- Olahan tanah liat (gerabah/keramik, genteng, batu bata merah)
- Pengolahan ikan
- Garam olahan

Di antara komoditas-komoditas tersebut, mebel dan kerajinan rotan menjadi komoditas unggulan Kabupaten Cirebon dan telah ditetapkan sebagai Produk Unggulan Fokus.

Dari penetapan industri secara top-down dari RPIP Jawa Barat dan komoditas-komoditas unggulan yang menjadi potensi industri bottom-up, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan potensi pengembangan industri, maka lima sektor industri diusulkan untuk menjadi fokus pengembangan industri Kabupaten Cirebon pada 20 tahun mendatang. Kelima fokus pengembangan industri tersebut adalah:

1. **Industri furnitur dan kerajinan rotan**
2. **Industri garam olahan**
3. **Industri pendukung pertanian**
4. **Industri perawatan kapal**
5. **Industri pengolahan ikan**

Program-program sektoral yang dapat dilakukan terkait dengan fokus pengembangan industri tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Program Sektoral Pengembangan Industri Fokus

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
Industri Furnitur dan Kerajinan Rotan				
1	Ketersediaan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri rotan untuk identifikasi ketersediaan dan potensi bahan baku ▪ Kerja sama pasokan bahan baku dengan daerah penghasil rotan ▪ Memastikan regulasi larangan ekspor bahan mentah 	Menjalin kerjasama transfer teknologi pemrosesan bahan baku dengan pemasok untuk efisiensi biaya logistik.	Kerja sama pasokan bahan baku untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
2	Teknologi desain dan produksi	Peningkatan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer, termasuk eksplorasi teknologi pencetakan 3D untuk peningkatan kapabilitas desain	Penguasaan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer, termasuk teknologi pencetakan 3D untuk peningkatan kapabilitas desain	Penguasaan penggunaan teknologi desain berbantuan komputer hingga menumbuhkan unit-unit usaha jasa industri yang berfokus pada desain produk rotan
3	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi potensi pemasaran produk-produk baru ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Pengembangan infrastruktur basis data pemasaran rotan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi dan pendekatan langsung pada negara-negara pasar potensial ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam hal intelijen pasar untuk prediksi tren industri rotan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi dan pendekatan langsung pada negara-negara pasar potensial ▪ Peningkatan partisipasi dalam ekspo, forum promosi, dan <i>e-marketplace</i> ▪ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam hal intelijen pasar untuk prediksi tren industri rotan
Industri Garam Olahan				
1	Ketersediaan bahan baku	Pemetaan kondisi dan potensi lahan industri garam olahan Mendorong regulasi untuk melindungi ketersediaan lahan berkualitas	Mendorong regulasi untuk menjaga kualitas air laut dari pencemaran	Mendorong regulasi untuk melindungi ketersediaan lahan berkualitas dan kualitas air laut dari pencemaran
2	Teknologi produksi	Adopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi hingga dapat memenuhi spesifikasi garam industri 	Penguasaan pengembangan teknologi produksi untuk mendukung industri garam olahan maju (garam industri & farmasi) dengan

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiasi pola kerja sama dengan lembaga penelitian untuk peningkatan teknologi produksi 	kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian
3	Distribusi dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi industri pengguna garam olahan Perencanaan dan pembuatan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong upaya untuk menarik industri-industri pengguna garam olahan ▪ Pembuatan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) ▪ Eksplorasi bentuk bentuk pemasaran baru untuk meningkatkan minat calon konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pengembangan kawasan terintegrasi: penghasil dan pengguna garam olahan ▪ Pembuatan dan pemeliharaan fasilitas untuk membantu menarik dan menyimpan hasil produksi (jalan produksi, gudang, dsb) ▪ Eksplorasi bentuk bentuk pemasaran baru untuk meningkatkan minat calon konsumen
4	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pembentukan kelompok atau koperasi petani garam ▪ Merancang kebijakan insentif untuk meningkatkan partisipasi petani garam pada kelompok atau koperasi petani garam ▪ Mendorong kerja sama antara kelompok atau koperasi petani dengan perusahaan fintech berbasis pertanian untuk peningkatan akses permodalan ▪ Mengkaji pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri garam olahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran kelompok atau koperasi petani garam dalam kegiatan pemberian modal dan pembelian garam ▪ Peningkatan akses modal kelompok atau koperasi petani garam melalui kerjasama dengan fintech ▪ Mendorong pembentukan BUMD industri garam olahan sebagai pihak integrator kelompok atau koperasi petani garam. 	Meningkatkan kapasitas dan peran BUMD dalam hal ketersediaan bahan baku, teknologi produksi, distribusi pemasaran, pemodalana, dan stabilitas harga
Industri Pendukung Pertanian (Perawatan dan Pembuatan Alat/Mesin Pertanian)				
1	Perencanaan kebutuhan dan kapasitas	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian	Pemetaan kondisi dan potensi industri pendukung pertanian
2	Teknologi produksi	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan alsintan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan alsintan ▪ Peningkatan kemampuan rekayasa alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan pengembangan teknologi perawatan alsintan dan rekayasa pengembangan alsintan
3	Sumber daya manusia	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru
4	Pembentukan sentra IKM	Membentuk sentra IKM percontohan	Mendorong pengembangan sentra-sentra-IKM pendukung pertanian di kecamatan-kecamatan	Mendorong pengembangan sentra-sentra IKM pendukung pertanian di kecamatan-kecamatan untuk menjadi sentra mandiri
Industri Perawatan Kapal				
1	Perencanaan kebutuhan dan kapasitas	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal	Pemetaan kondisi dan potensi industri perawatan kapal

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
2	Teknologi produksi	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan kapal	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk perawatan kapal	Penguasaan pengembangan teknologi perawatan kapal
3	Sumber daya manusia	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru	Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha dan pekerja baru
Industri Pengolahan Ikan				
1	Ketersediaan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri pengolahan ikan ▪ Penyediaan fasilitas pengantaran dan penyimpanan ikan bersama.
2	Teknologi produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - Adopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produksi ▪ Inisiasi pola kerja sama dengan lembaga penelitian untuk peningkatan teknologi produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan pengembangan teknologi produksi untuk mendukung industri pengolahan ikan maju dengan kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian
3	Distribusi dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan pasar untuk identifikasi dan eksplorasi industri pengolahan ikan 	Diversifikasi produk	Diversifikasi produk

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.3 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri dari : Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sentra IKM.

A. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI)

Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) luasnya berkisar pada 10.000 (sepuluh ribu) hektar yang terdiri atas KPI menengah dan besar; KPI kecil dan mikro, KPI Agro, dan Kawasan Industri.

Adapun KPI menengah dan besar meliputi kecamatan-kecamatan berikut:

1. Sususukan
2. Gempol
3. Ciwaringin
4. Arjawinangun
5. Kapetakan
6. Palimanan
7. Plumbon
8. Depok
9. Greged
10. Mundu
11. Pangenan
12. Astanajapura

13. Gebang
14. Pabedilan
15. Losari
16. Ciledug

Keduapuluh empat kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 4 buah koridor yaitu: (1) koridor wilayah utara, koridor wilayah barat, koridor wilayah tengah, dan koridor wilayah timur yang tergambar pada Gambar IV-1. Keempat koridor tersebut memiliki karakteristik dan geostrategis yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan pembangunan industri di keempat koridor tersebut akan berbeda menyesuaikan keadaan yang ada. Sebagai contoh, pembangunan industri di koridor barat harus mempertimbangkan rencana pertumbuhan industri berbasis teknologi tinggi atau elektronik di Majalengka dan kehadiran bandara BIJB. Koridor utara dan timur memiliki garis pantai yang panjang sehingga harus dimanfaatkan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan industri. Di sisi lain koridor wilayah tengah bersinggungan dengan Kota Cirebon. Dengan demikian industri yang dikembangkan di koridor tengah adalah jenis industri yang ramah lingkungan dan padat karya untuk menghindari konflik sosial. Selain itu, koridor wilayah tengah memiliki garis pantai sehingga industri pengolahan hasil laut dan garam dapat dikembangkan pada wilayah ini. Jenis industri yang didorong untuk dikembangkan pada setiap koridor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Industri yang Didorong per Koridor

Koridor	Industri yang didorong	Koridor	Industri yang didorong
Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri bahan galian non logam ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri komponen ▪ Industri tekstil ▪ Industri pakan ▪ Industri komponen 	Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri barang dari kayu
Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri garam olahan ▪ Industri pengolahan ikan ▪ Industri perkapalan 	Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu ▪ Industri furniture dan barang lainnya dari kayu ▪ Industri garam olahan ▪ Industri pengolahan ikan ▪ Industri perkapalan

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

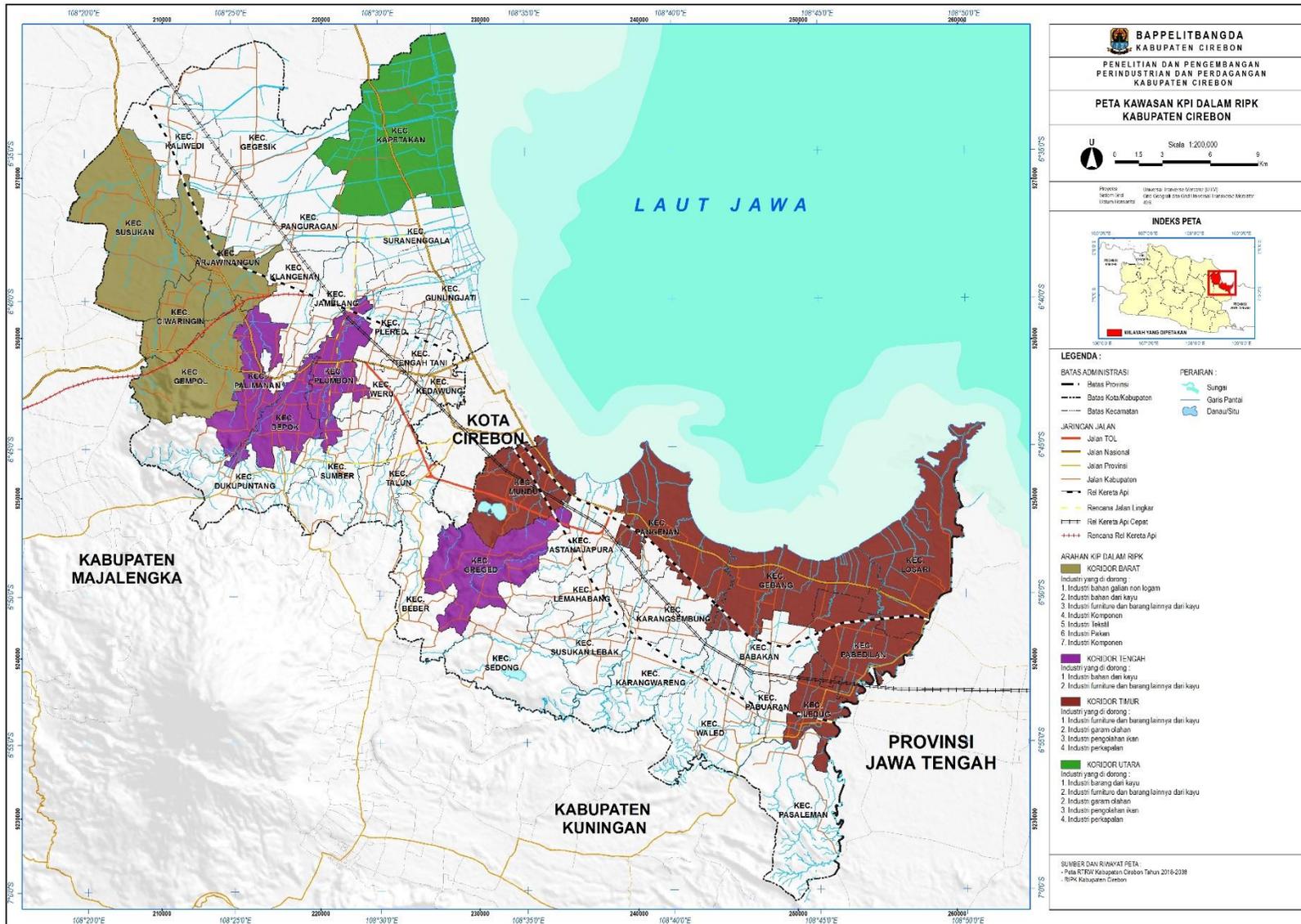
Tabel 3.7 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

No	Tema Program	Tahun		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
1	Perencanaan pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada pasokan bahan baku dan pemasaran ▪ Perencanaan pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi ▪ Perencanaan dan Pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi ▪ Perencanaan dan Pengembangan Potensi Industri Kabupaten Cirebon
2	Koordinasi perwilayahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, rencana penyediaan energi, rencana penyediaan SDM dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan dan penyediaan bahan baku industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dalam penyediaan bahan baku industri



No	Tema Program	Tahun		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
3	Pembangunan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan kawasan industri ▪ Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan investor kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung rencana pembangunan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung rencana pembangunan kawasan industri
4	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan detail pembangunan infrastruktur transportasi, energi ▪ Penanganan limbah dalam dan antar kawasan industri / kawasan peruntukan industri, ▪ Pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait, ▪ Pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait
5	Pengawasan dan Pengembangan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; ▪ Pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; ▪ Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri
6	Promosi investasi industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing, ▪ Pembangunan brand awareness produk hasil industri Kabupaten Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038



Gambar 3.3 Peta Arahan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan Dokumen RPIK

B. Sentra IKM

Salah satu sasaran pembangunan industri adalah pengembangan minimal satu Sentra Industri Kecil dan Menengah pada setiap kecamatan. Sebagian besar program pengembangan Sentra IKM akan dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait perindustrian pada Kabupaten/Kota. Program terkait pengembangan Sentra IKM ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Program Pengembangan Sentra IKM

No	Tema Program	Tahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
1	Sentra IKM kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan ▪ Pemetaan potensi IKM kecamatan ▪ Penyusunan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur ▪ Pembangunan sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Pembinaan dan penguatan sentra
2	Sentra IKM unggulan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan sentra yang telah ada ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Penetapan sentra unggulan ▪ Pembentukan kelembagaan sentra IKM ▪ Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai kemudahan untuk pengusahan di dalam sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan penguatan sentra ▪ Penambahan kapasitas sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan pengembangan sentra IKM unggulan menjadi sentra IKM berbasis industri 4.0 (kolaborasi)
3	Sentra IKM rotan berbasis industri 4.0 (kolaborasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan potensi pembangunan ▪ Penyusunan rencana ▪ Pembentukan kelembagaan ▪ Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai kemudahan untuk pengusahan di dalam sentra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan tanah ▪ Pembangunan infrastruktur ▪ Pembangunan Sentra ▪ Pembinaan dan penguatan sentra ▪ Pelaksanaan program inkubator untuk pengusaha muda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi keberjalanan sentra ▪ Penguatan kolaborasi dengan sentra IKM berbasis industri 4.0 lainnya

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan industri perlu juga memperhatikan faktor-faktor sumber daya industri, yang mencakup sumber daya alam; sumber daya manusia industri; sumber daya teknologi, inovasi, kreativitas; serta pembiayaan. Program-program yang terkait sumber daya industri terangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Program Pengembangan Sumber Daya Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
Pengembangan Sumber Daya Alam				
1	Penentuan lokasi tepat guna suplai bahan mentah industri	Pemetaan jenis, jumlah, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Perencanaan penyediaan sumber daya alam dan penjalinan kerjasama dengan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut	Evaluasi berkala terkait rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam



No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024-2029	2029-2039
2	Perancangan teknologi transportasi bahan mentah industri	Kajian awal jaringan transportasi untuk distribusi sumber daya alam	Implementasi rancangan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam	Evaluasi dan perbaikan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam
3	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan	Kajian lingkungan (AMDAL) terkait sumber daya alam yang digunakan untuk setiap sektor industri unggulan	Sinkronisasi hasil kajian dengan implementasi rancangan teknologi transportasi dan penyaluran sumber daya alam	Evaluasi berkala untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				
1	Pengembangan akademi komunitas (D-1) untuk menghasilkan SDM tepat guna	Kajian antara ketersediaan dan kebutuhan kompetensi lembaga pendidikan saat ini	Penyediaan pelatih dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk lembaga pendidikan atau akademi komunitas	Evaluasi penyerapan angkatan kerja di industri dan penyesuaian kebutuhan kompetensi secara berkala
2	Pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri	Pemberian diklat untuk aparatur perindustrian dan dinas terkait, serta pelaku industri unggulan	Pemberian diklat untuk pelaku industri secara umum, termasuk diantaranya IKM	Pengawasan dan survey berkala terhadap kompetensi pelaku industri dengan kebutuhan industri terkini di pasar
Pengembangan Sumber Daya Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas				
1	Adaptasi teknologi baru melalui sinergi dan program kerjasama litbang dengan balai-balai industri dan lembaga riset	Kajian potensi teknologi baru untuk tingkatkan daya saing kompetitif industri	Melakukan implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant pada sektor industri unggulan	Implementasi pengembangan teknologi baru atau pendukung di sektor industri non-unggulan
2	Pengembangan sentra industri virtual berbasis internet	Pendataan dan validasi pelaku industri terkait, serta pembentukan sistem sentra industri virtual	Pemberian dukungan promosi, pemasaran produk inovatif, konsultasi, serta pelatihan teknologi dan desain pada sentra industri virtual	Evaluasi berkala terhadap keberjalanan sentra industri virtual, serta penyesuaian bentuk kerja sama antara pemerintah dan sentra industri virtual
Pengembangan Sumber Daya Pembiayaan				
1	Pengembangan lembaga pembiayaan industri melalui cara konvensional	Penambahan akses pembiayaan murah bagi IKM dan pelaku industri unggulan, melalui kerja sama dengan penanam modal (asing maupun lokal)	Inisiasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha Ultra-Mikro (Skema Kementerian Keuangan)	Upaya pemerataan pembiayaan industri untuk seluruh sektor, termasuk industri non-unggulan
2	Pengembangan moda pembiayaan non-konvensional berbasis financial technology (fintech)	Kajian regulasi pembiayaan non-konvensional dengan dinas terkait, seperti BKPM	Pembentukan konsep program pembiayaan non-konvensional untuk pelaku industri, serta inisiasi program secara bertahap	Evaluasi dan pengembangan moda pembiayaan non-konvensional secara menyeluruh pada sektor industri

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri mencakup aspek energi, limbah industri, transportasi, sistem informasi industri, dan infrastruktur penunjang standarisasi industri. Program-program terkait pengembangan sarana dan prasarana industri dirangkum pada tabel berikut ini

Tabel 3.10 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
Energi				
1	Pengembangan Energi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan perencanaan kebutuhan kelistrikan terkait industri Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Gardu Induk Pembangunan jaringan transmisi listrik Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan energi listrik baru dan terbarukan Pembangunan gardu induk Pembangunan jaringan transmisi listrik Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri
2	Pengembangan Energi Gas Alam	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan perencanaan kebutuhan gas alam untuk industri; Pemeliharaan jaringan gas alam industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan industri; Pembangunan stasiun pompa gas alam; Pemeliharaan jaringan gas alam industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan peruntukan industri; Pembangunan stasiun pompa gas alam; Pemeliharaan jaringan gas alam industri
Pengolahan Limbah Industri				
1	Pembangunan Sarana Pengolahan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan pengolahan limbah di dalam dan di luar kawasan industri; Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; pemeliharaan sarana pengolahan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri; pemeliharaan sarana pengolahan limbah
2	Regulasi Pengolahan limbah industri	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi lingkungan hidup; Pengembangan sistem pemantauan lingkungan hidup; Penetapan peraturan mengenai lingkungan hidup; pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri
Transportasi				
1	Pembangunan infrastruktur jalan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Pemetaan kebutuhan infrastruktur jalan terkait pembangunan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Pembangunan akses jalan menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur jalan; Perluasan akses jalan seiring bertambahnya volume kegiatan industri
2	Pembangunan Infrastruktur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pemetaan kebutuhan infrastruktur kereta api terkait pembangunan kawasan industri; 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri; Perluasan dan penambahan terminal peti kemas kereta api

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2024	2024 - 2029	2029 - 2039
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal peti kemas kereta api terpadu di Waruduwur 		
3	Optimalisasi Pelabuhan Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; pemetaan kebutuhan industri atas penggunaan pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan Cirebon
Sistem Informasi Industri				
1	Pengembangan Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan Industri mikro, kecil, menengah dan besar; pengembangan sistem informasi industri internal 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan kegiatan Industri secara lengkap (bahan baku, produksi, penjualan, sumber daya, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi industri Kabupaten Cirebon yang dapat diakses publik; Pemanfaatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan program pengembangan
Standarisasi Industri				
1	Pengembangan standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lab uji 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga penilaian

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.1.3.6 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri mencakup Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kerjasama internasional, pemberdayaan industri hijau, serta pemberdayaan IKM. Program pengembangan dan pemberdayaan IKM secara umum terdapat pada program yang disusun terkait industri unggulan, perwilayahan industri, sumberdaya industri, sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri yang tidak dinyatakan secara spesifik untuk industri besar. Program-program terkait pengembangan sarana dan prasarana industri dirangkum pada Tabel 3.11. Sedangkan program-program yang spesifik terkait dengan pemberdayaan IKM dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Program Pemberdayaan Industri

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
1	Peningkatan Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan penggunaan produk Kab. Cirebon pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Kab. Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan potensi barang impor yang dapat disubstitusi oleh PDN 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi PDN substitusi barang impor
2	Kerjasama International dalam Bidang Industri	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pasar internasional produk industri Kab. Cirebon melalui keikutsertaan dalam promosi internasional Membangun jaringan kerjasama Mendukung promosi investasi global untuk pengembangan industri di Kab. Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Kab. Cirebon untuk ikut aktif Mengembangkan konsep kolaborasi industri global (Industry 4.0) 	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan dan meningkatkan kemampuan (quality, cost, delivery) industri komponen dan jasa industri di Kab. Cirebon agar mampu berkontribusi pada jaringan rantai pasok global

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
3	Pemberdayaan Industri Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung peningkatan kompetensi auditor SIH di Kab. Cirebon Penyiapan dan pelaksanaan program 3R (reduce, reuse, recycle) pada industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kab. Cirebon Pembuatan kebijakan pemberian berbagai kemudahan bagi industri yang telah memenuhi standar hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program 3R dan pelaksanaan kebijakan industri hijau pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kab. Cirebon

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

Tabel 3.12 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2038
1	IKM dalam sentra	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku, kompetensi kerja, permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan teknologi tepat guna, pemasaran, dan peralatan produksi bersama Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM dengan industri besar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sertifikasi, peningkatan kualitas, desain, pemasaran, dan tanggung jawab lingkungan untuk memenuhi pasar ekspor
2	IKM unggulan di luar sentra	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi berbagai kemudahan yang didapatkan di dalam sentra Mendorong IKM untuk bergabung dalam sentra iKM Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kompetensi kerja dan permodalan
3	IKM non unggulan di luar sentra	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong IKM untuk bergabung dalam sentra IKM kecamatan Pemetaan rantai nilai dari komoditi yang ada untuk program hilirisasi Perencanaan dan inisiasi hilirisasi dari komoditi pilihan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses bahan baku, kompetensi kerja, permodalan Mendorong hilirisasi dari komoditi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM dengan industri besar Penguatan hilirisasi dari komoditi yang ada

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2019-2038

3.2 Kajian Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang terkait KPI Kabupaten Cirebon

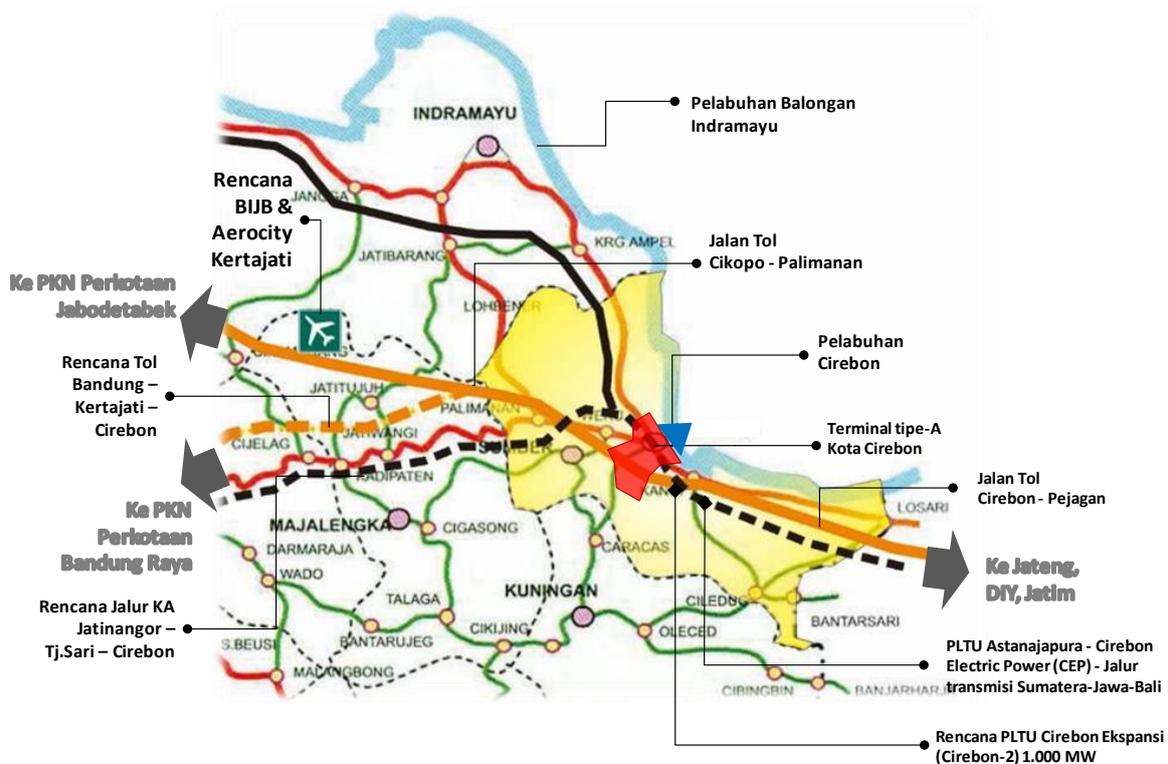
Beberapa dinamika perubahan kebijakan tata ruang wilayah yang akan berpengaruh terhadap penetapan KPI di Kabupaten Cirebon, diantaranya : (1) Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021; (2) Revisi RTRWP dan Arahan Pengembangan Kawasan Rebana; (3) KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon

3.2.1 Arahan Pengembangan Wilayah PKN Cirebon dan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan 2021

Kebijakan yang memicu perkembangan investasi dan kegiatan perkotaan di koridor Cirebon-Patimban Kertajati Majalengka :

- ☉ Kebijakan perwilayahan industri melalui pengembangan WPPI (RIPIN 2015-2035)
- ☉ Proyek Strategis Nasional : Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol
- ☉ RTRWN : PKN Cirebon, PKW Indramayu, Kawasan Andalan Purwasuka dan Ciayumajaking
- ☉ Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Kemudahan Perijinan dan Investasi

Implikasi dari kebijakan nasional tersebut belum diantisipasi dalam konsep perubahan ruang baik struktur dan pola ruangnya



Gambar 3.4 Infrastruktur Strategis Pendorong Perkembangan Kawasan Timur Jawa Barat

Pengembangan Pelabuhan di Kabupaten Cirebon merupakan infrastruktur strategis yang menjadi salah satu pemicu perkembangan sektor industri di Kabupaten Cirebon. Rencana Pengembangan

Pelabuhan sebagai Hub Perhubungan penunjang Produksi dan Distribusi Industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, beberapa rencana pengembangan Pelabuhan yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, yaitu :

1. Pelabuhan Cirebon
 - hierarki: Pelabuhan Pengumpul (PP)
 - fungsi: angkutan laut dalam negeri; tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang; angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
2. Pelabuhan Muara Gebang, Astanajapura, Bondet, Gebangmekar, Kejawanan
 - Hierarki: Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL)
 - Fungsi : angkutan penumpang dan barang antar kabupaten/kota atau antar kecamatan; pengumpan terhadap pelabuhan pengumpul; moda transportasi untuk mendukung kehidupan masyarakat; tidak dilalui jalur laut reguler.



Gambar 3.5 Rencana Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Cirebon

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan nomor 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Berdasarkan Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tahun 2021, terdapat beberapa arahan fungsi kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Kluster Industri di Kawasan Cirebon – Patimban – Kertajati, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Arahan Fungsi Kawasan untuk Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan dan Kluster Industri di Kawasan Cirebon - Patimban - Kertajati

KAWASAN	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	PUSAT PELAYANAN	TEMA	FUNGSI
KABUPATEN CIREBON					
KPI Cirebon	KPI	Ciledug	Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Pengembangan Kawasan Industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsultasi, pengolahan hotmix dan beton
		Lemahabang			
		Mundu			
		Greged			
		Astanajapura			
		Pangenan			
		Karangsembung			
		Gebang			
		Babakan			
		Losari			
Pabedilan					
Mertasinga	SIKM	Gunungjati	SIKM	SIKM Pangan	Olahan Kerang dan Rajungan
Trusmi Kulon	SIKM	Plered	SIKM	SIKM Sandang	Batik Tulis dan Cap
Tegalbugug	SIKM	Arjawinangun	SIKM	SIKM Sandang	Konveksi
Rawaurip	SIKM	Pangenan	SIKM	SIKM Kimia	Garam Krosok
Tegalwangi	SIKM	Weru	SIKM	SIKM Furniture	Meubel Rotan
Gempol	SIKM	Gempol	SIKM	SIKM Galian Bukan Logam	Kapur Tohor
Bobos	SIKM	Dukupuntang	SIKM	SIKM Galian Bukan Logam	Batu Alam
Sumber	Kawasan Perkotaan	Sumber	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan vokasi, kesehatan
Arjawinangun	Kawasan Perkotaan	Arjawinangun	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan
Palimanan	Kawasan Perkotaan	Palimanan	PKL	Kawasan Perkotaan	Pusat perdagangan, jasa keuangan, perumahan
Galmantro	Kawasan Perdesaan	Weru	Pusat Kaperdes - Desa Tegalwangi	Kampung Wisata Rotan	Penghasil kerajinan rotan dan meubelair
Gempol	Kawasan Perdesaan	Gempol	Pusat Kaperdes - Desa Cikeusal	Agrowisata	Penghasil komoditas utama buah-buahan dan Jamur

Sumber : Lampiran Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021

Di dalam Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tahun 2021, terdapat Rencana aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi.

Kebijakan dan strategi utama yang mendasari program rencana aksi adalah :

1. Mengembangkan KPI, Kota Baru, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan
2. Mengembangkan sistem rantai logistik terintegrasi antara industri besar dan IKM

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi

NO	PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN										KEMENTERIAN/ LEMBAGA	SUMBER DANA	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Pembangunan Interchange Akses Tol Cipali (Subang KM109 - Patimban)	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
2	Pembangunan Jalan Tol Cipali - Palasah - Jatibarang	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
3	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - Aerocity	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
4	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian Perhubungan	APBN
5	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
6	Peningkatan kelas Jalan Sarengseng - Pabuaran	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
7	Peningkatan kelas Jalan Cipeundeuy - Pabuaran	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
8	Peningkatan status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional	Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang												Kementerian PUPR	APBN
9	Peningkatan Jalan Conggeang - Ujungjaya	Kec. Conggeang, Kec. Ujungjaya												Kementerian PUPR	APBN
10	Peningkatan Jalan Ujungjaya - Palasah	Kec. Ujungjaya												Kementerian PUPR	APBN
11	Peningkatan Ruas Jalan Cisumur-Nanggerang/ Kab Subang	Kab.Sumedang,Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
12	Peningkatan Jalan Burujul - Sanca	Kab.Sumedang,Kab. Indramayu												Kementerian PUPR	APBN
13	Peningkatan Jalan Lebaksiuh - Kadu	Kab.Sumedang,Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
14	Pembangunan Ruas Jalan Cijurey-Darmawangi	Kab.Sumedang,Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
15	Pelebaran jalan kabupaten (pusakanagara - patimban)	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
16	Peningkatan kelas Jalan Pusakanagara - Tanjung	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
17	Peningkatan kelas Jalan Kamarung - Tanjung	Kab. Subang												Kementerian PUPR	APBN
18	Pembangunan Jalan Jatitujuh - Ligung	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN
19	Pelebaran Jalan Cigasong - Maja	Kab. Majalengka												Kementerian PUPR	APBN



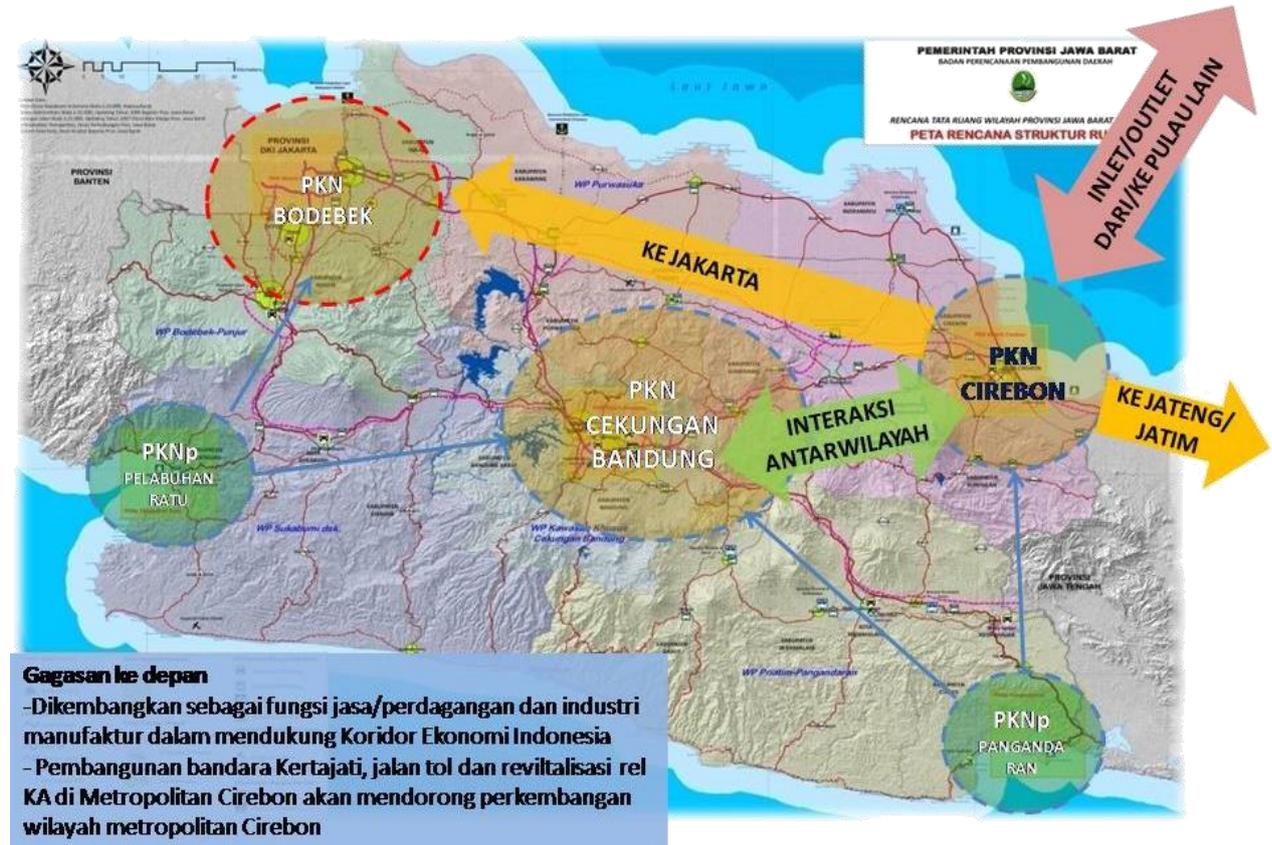
NO	PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN										KEMENTERIAN/ LEMBAGA	SUMBER DANA	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
20	Pembangunan Rel KA Rancaekek - Tanjungsari - Akses Bandara Kertajati	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
21	Reaktivasi Rel KA (Kota Cirebon - Kadipaten Kab. Majalengka)	Kab. Cirebon, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
22	Pembangunan Rel KA Subang - Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang												Kementerian Perhubungan	APBN
23	Pembangunan Rel KA (Jatibarang - Kertajati) Kab. Indramayu	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
24	Pembangunan Rel KA Subang-Kertajati	Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian Perhubungan	APBN
25	Pembangunan SMK dan Sekolah Tinggi Maritim dan Logistik	Kec Pusakanagara, Kab. Subang												Kemen. Pendidikan dan Kebudayaan	APBN
26	Pembangunan gardu induk Patimban, Cibogo, Sukamandi-Haurgeulis, Indramayu, Kadipaten	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
27	Pembangunan SUTT	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
28	Pembangunan pembangkit listrik	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	APBN
29	Pembangunan Rumah Susun Pekerja	13 KPI												Kementerian PUPR	APBN
30	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang.												Kementerian PUPR	APBN
31	Pembangunan waduk untuk mendukung air baku kegiatan industri	Cipunagara, Kab. Subang; Sadawarna, Kab. Subang; Kadumalik, Kab. Majalengka; Cilame; Cipanas, Kab. Sumedang												Kementerian PUPR	APBN
32	Pengembangan IPLT	13 KPI												Kementerian PUPR	APBN
33	Peningkatan Skema Pembiayaan HAKI, Modal Ventura, dan Hibah untuk industri kreatif	Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu												Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN
34	Penyelenggaraan event business meeting dan promosi Kawasan	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka												Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN

Sumber : Lampiran Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021

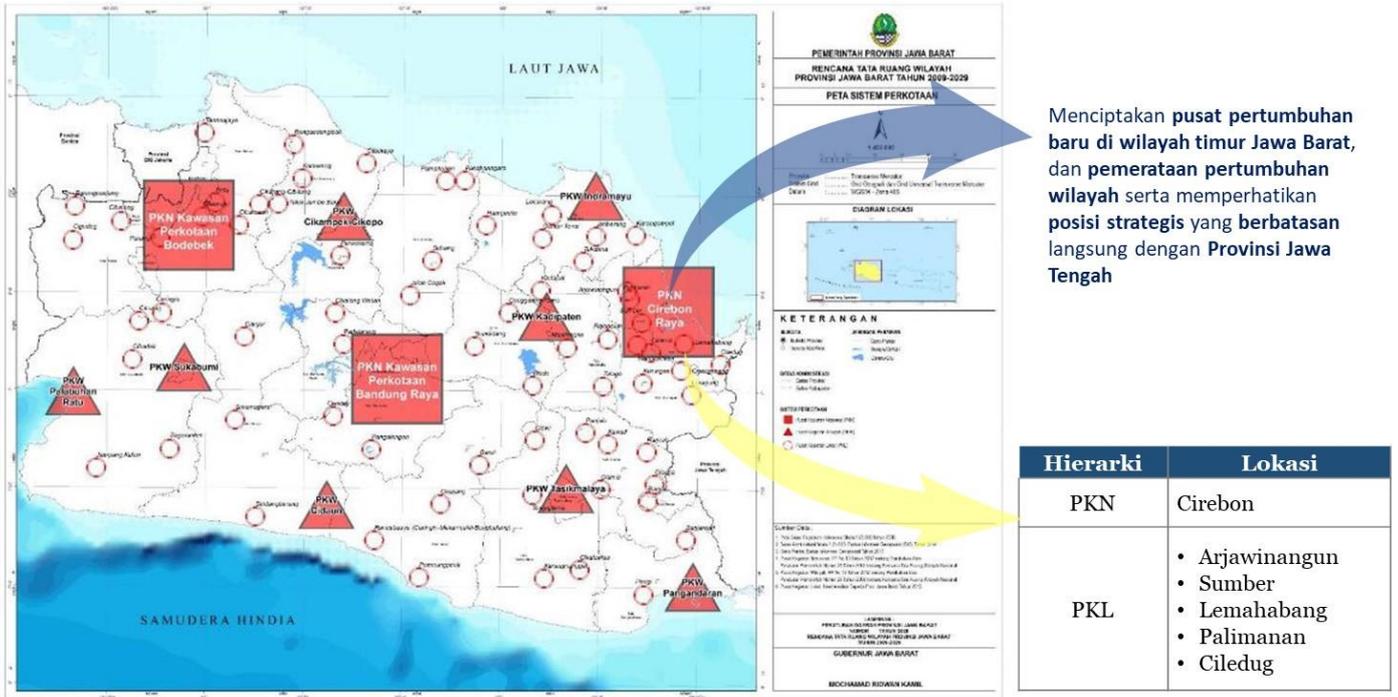
3.2.2 Revisi RTRWP dan Arah Pengembangan Kawasan Rebana

3.2.2.1 Revisi RTRWP dan Arah Pengembangan Wilayah Ciayumajakuning

Revisi RTRW membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kawasan Peruntukan Industri pada khususnya. Salah satu point penting dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon yaitu adanya upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Jawa Barat, dan pemerataan pertumbuhan wilayah serta memperhatikan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.6 Arah Pengembangan Wilayah Metropolitan Cirebon



Gambar 3.7 Pengembangan Peran Wilayah Timur Jawa Barat

Beberapa prinsip akomodasi Kawasan Peruntukan Industri di dalam Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. RTRW Provinsi Jawa Barat mengakomodir seluruh kebijakan yang berfungsi lindung maupun budidaya.
2. Rencana Pola Ruang Provinsi mengutamakan daya dukung lingkungan sebagai informasi bagi penyusun Kebijakan, dan penerapan Pembangunan yang Berkelanjutan.
3. Luas KPI pada Rencana Pola Ruang Provinsi yang clear dari fungsi lindung (Kawasan Hutan, Rawan Bencana, Resapan Air, Perlindungan Geologi, KP2B) : 86,531,6 Ha
4. Untuk deliniasi KPI yang tidak ditetapkan dalam RTRW Provinsi diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan menerapkan Ketentuan Zonasi terkait fungsinya.
5. Luas usulan KPI Kabupaten/Kota yang tumpang tindih dengan peruntukan lain:

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari dukungan infrastruktur. Beberapa arahan kebijakan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah Jawa Barat berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah

No	Jenis Prasarana / Sarana	Lokasi	Keterangan
1	Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Cirebon	
2	Jalur KA Antar Kota	Bandung – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon	
3	Jalur KA Perkotaan	Kadipaten – Cirebon	
4	Pelabuhan Sungai	Kabupaten Cirebon	Sesuai dengan Kepmenhub 432/2017 tentang RIPN
5	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten Cirebon	

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat

Pengembangan sistem jaringan transportasi mempermudah konektivitas wilayah untuk perolehan bahan baku maupun untuk distribusi hasil produksi serta menjadi Peluang pengembangan industri pengolahan dan IKM.

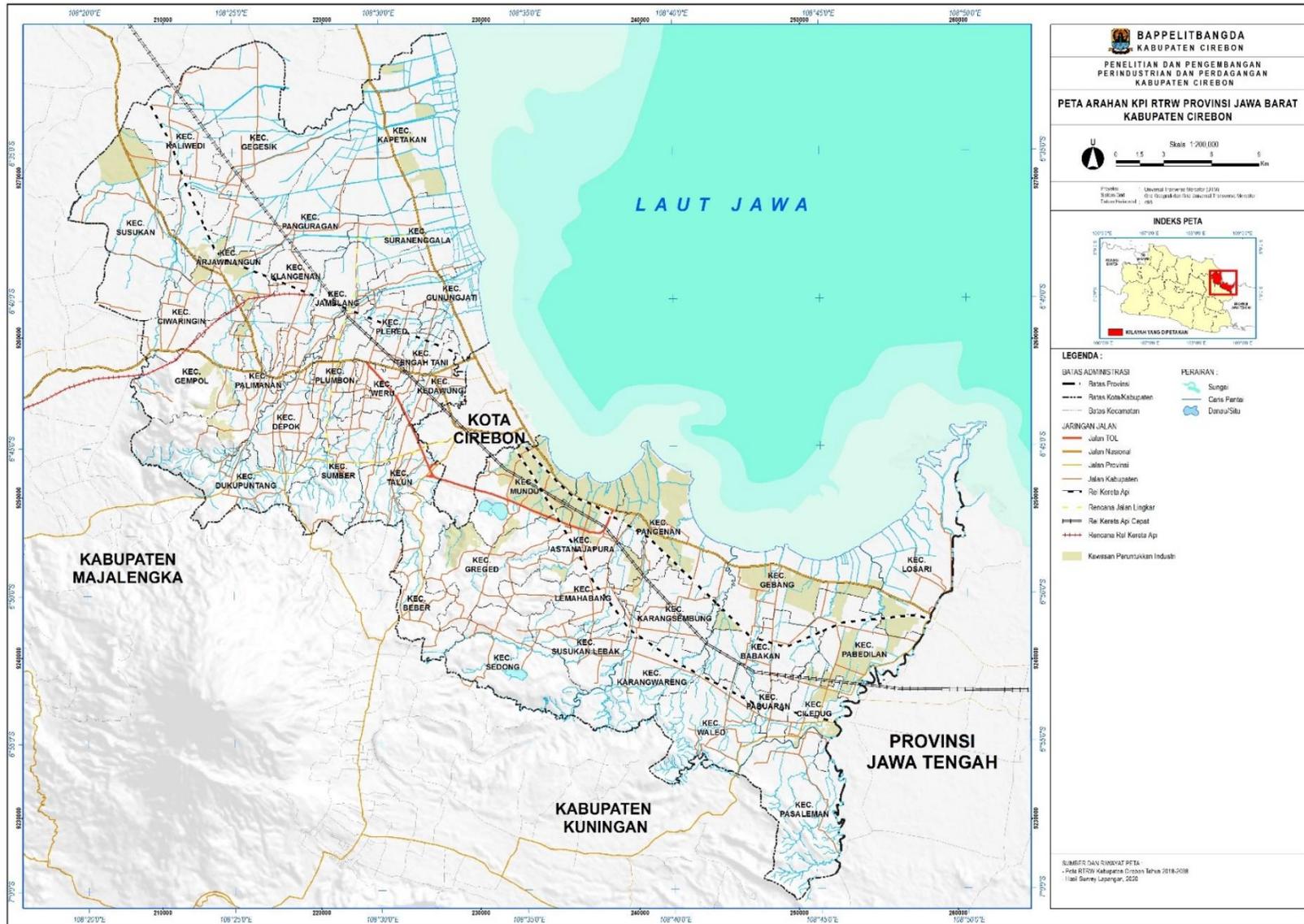
Beberapa arahan pengembangan infrastruktur wilayah lainnya berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.16 Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Wilayah

No	Sistem Infrastruktur Wilayah	Jenis Jaringan Infrastruktur	Lokasi / Keterangan
1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pipa minyak Jaringan pipa gas Sumur gas 	Kab. Cirebon
2	Pembangkit Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 	
3	Jaringan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Embung 	
		<ul style="list-style-type: none"> Air Tanah Dalam (CAT) 	<ul style="list-style-type: none"> CAT Sumber-Cirebon CAT Lintas Provinsi Tegal-Brebes
4	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede) 	Kab. Cirebon - Kab. Kuningan
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> SPALD Ciayumajakuning 	Kec. Gunungjati (PSP)
6	Sistem Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Cirebon Solid Waste Treatment Plant (PSP) Kec. Gempol dan Kec. Ciwaringin

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat

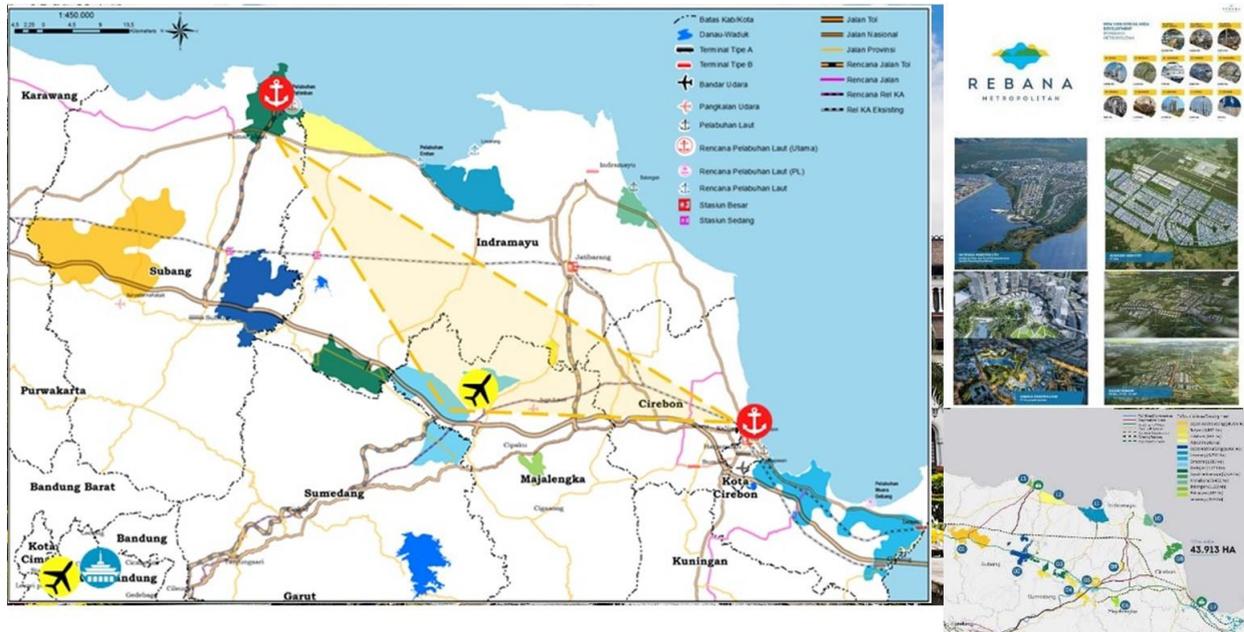
Pada peta berikut ini diperlihatkan arahan lokasi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon berdasarkan revisi RTRW Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.8 Peta Arahan KPI Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat

3.2.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana

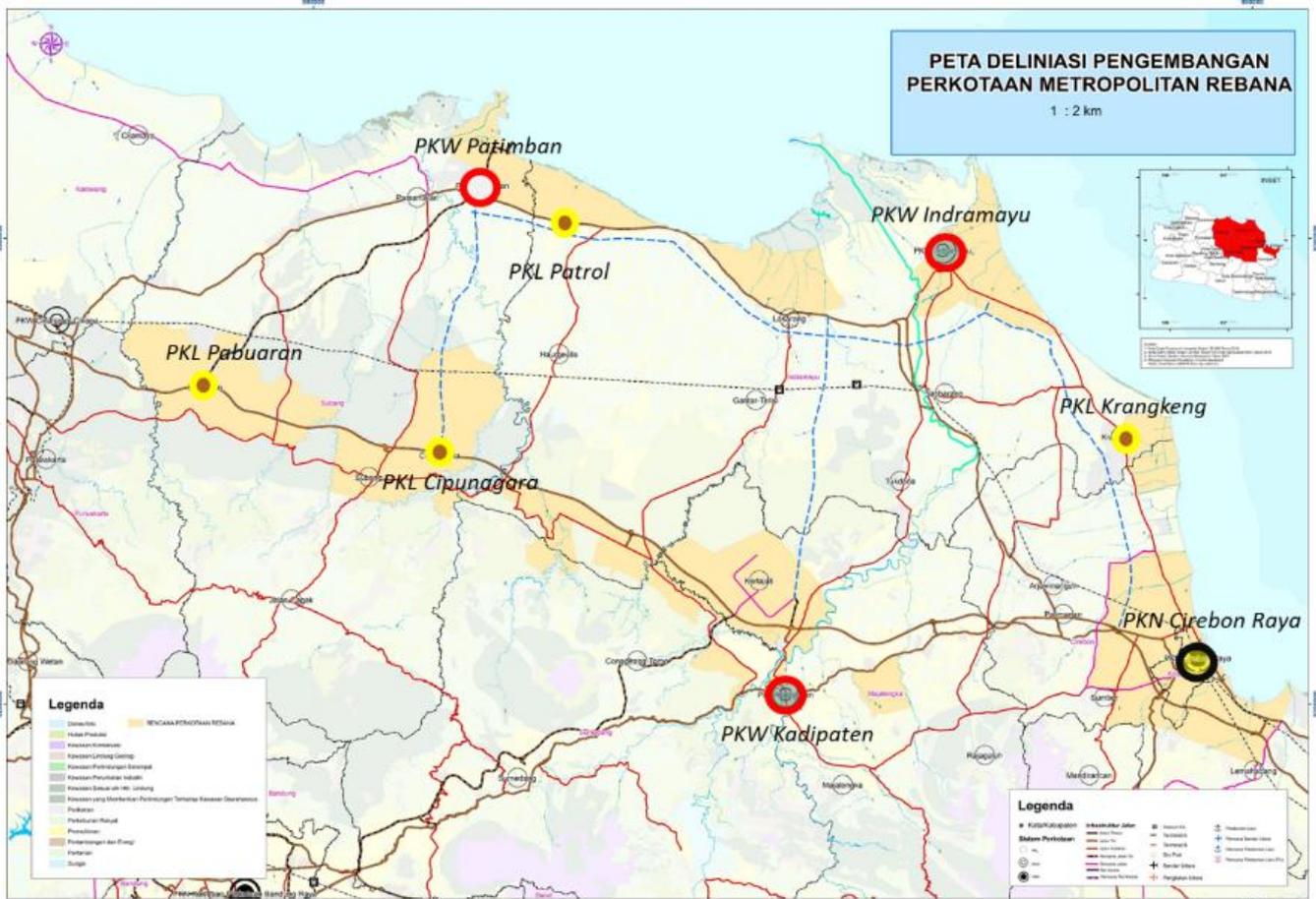
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon Patimban Kertajati, Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan pinggiran perkotaan di Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.



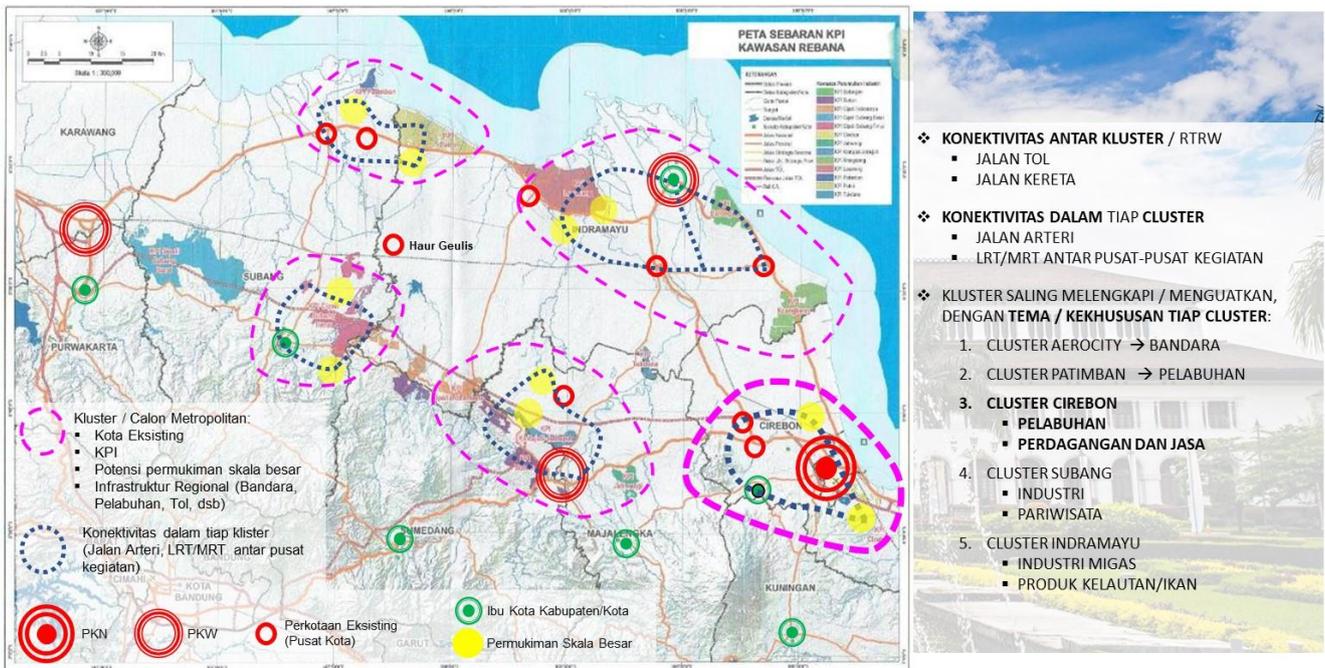
Gambar 3.9 Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun konsep pengembangan kawasan Metropolitan Rebana agar pengembangan kawasan berbasis industri tidak sporadis dan memiliki tema ecoindustry, serta menata pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ke dalam Pengembangan Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat mengadopsi Konsep *Multi-Nodal*, dimana Kota Cirebon sebagai Kota Inti (*City-centered*), Kawasan Patimban dan Kertajati sebagai Simpul Kawasan Perkotaan (*Urban-Nodes*) yang terhubung oleh infrastruktur, serta terhubung pula dengan Kawasan perkotaan lain yang koheren dan terintegrasi.”





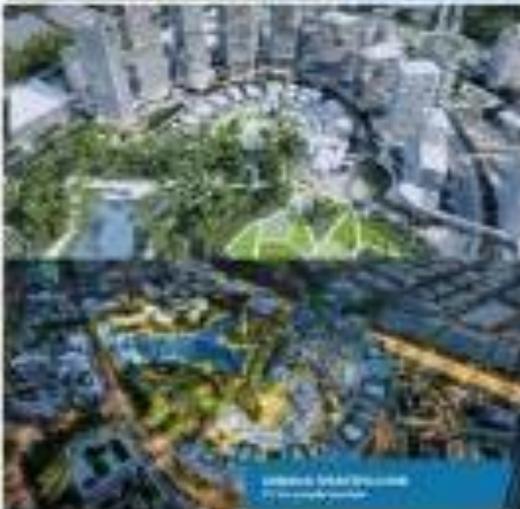
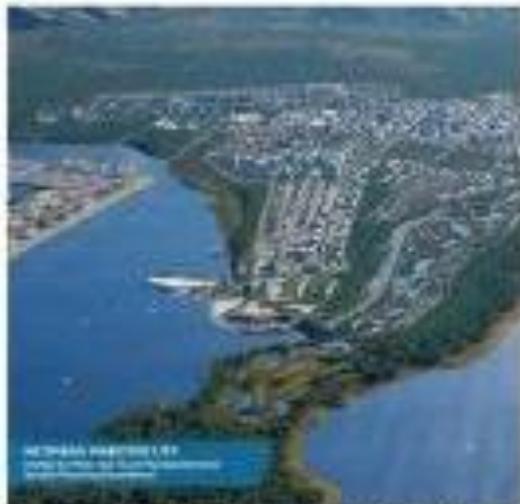
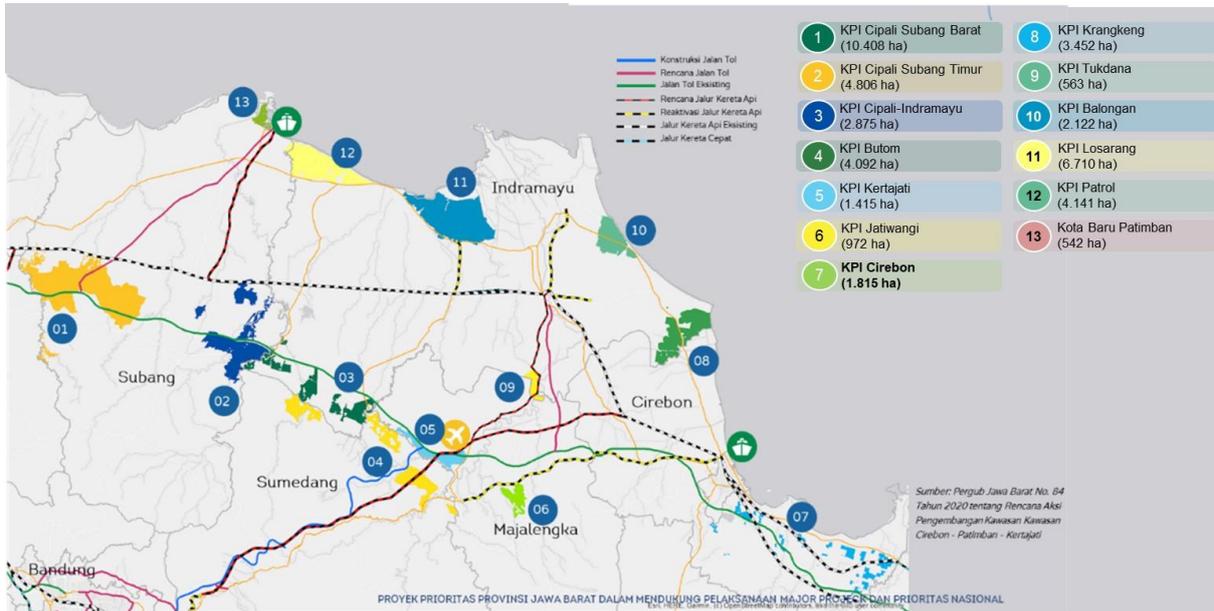
Gambar 3.10 Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan Rebana

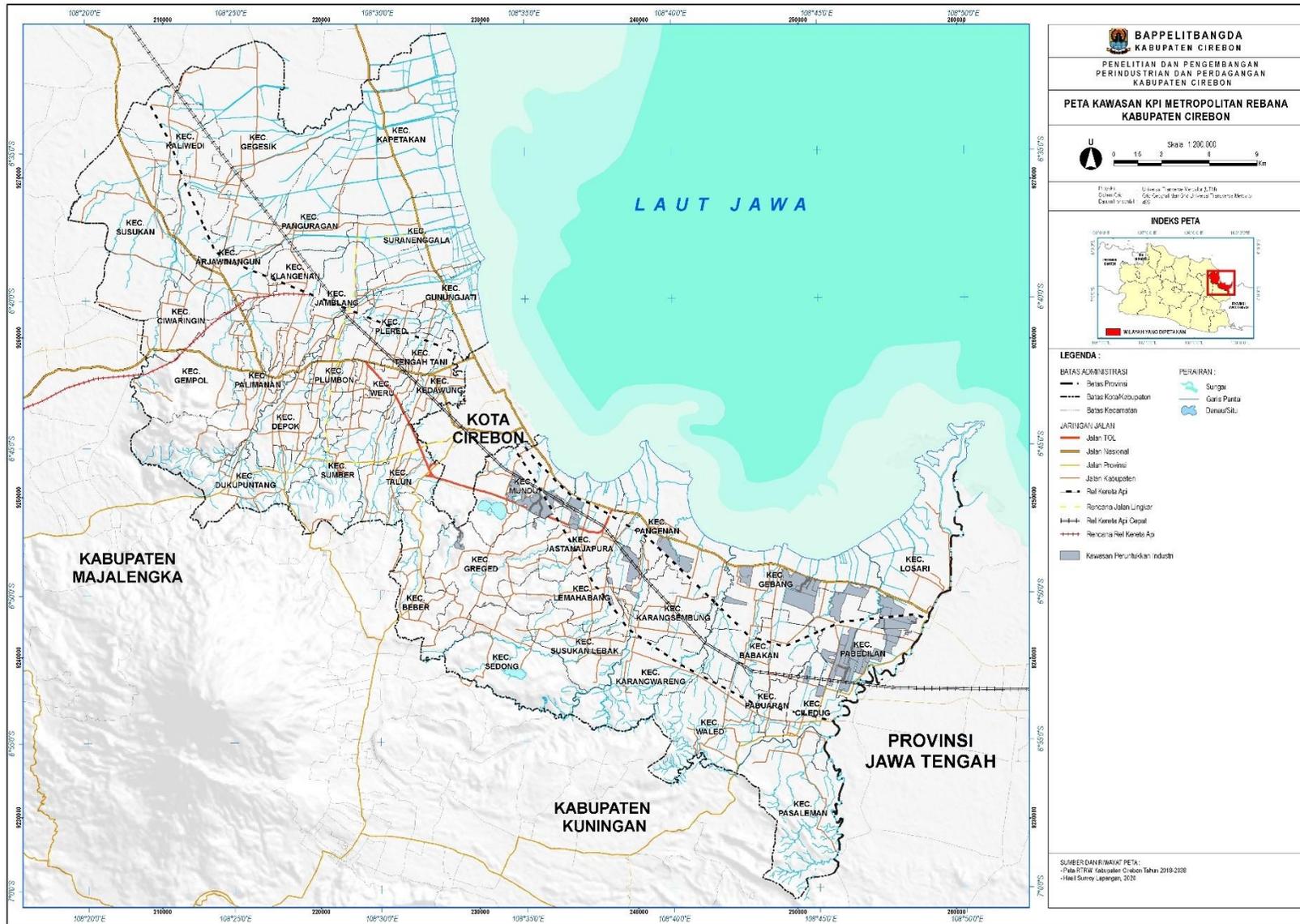


Gambar 3.11 Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA



Rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dalam Kawasan Metropolitan Rebana, dialokasikan sebesar 43.913 Ha yang tersebar di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Cirebon dengan alokasi luas sebesar 1.815 Ha.





Gambar 3.12 Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Rebana

3.2.3 KPI dalam RTRW Kabupaten Cirebon

RTRW Kabupaten Cirebon telah dimutakhirkan melalui proses Peninjauan Kembali (PK) dan telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018.

3.2.3.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.
3. Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi:
 - a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
4. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian.

6. Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.
7. Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
8. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
9. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
 - b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.
10. Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.
11. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
 - c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.
12. Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
13. Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan; dan
 - b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.
14. Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.
15. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2.3.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Selengkapnya rencana Sistem Kota di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut

Tabel 3.17 Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Cirebon

No	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Fungsi Utama dan Penunjang
PKL CILEDUG				
1	PKL	Ciledug (Pusat)	1,325	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Losari (Sub Pusat)	3,907	Fungsi Penunjang: Perikanan, Perdagangan hasil pertanian, Industri, Pergudangan, Pelabuhan Intra Seluler, Perumahan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pariwisata, Pertambangan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Babakan	2,193	
4	PPL	Pabuaran	0,895	
5	PPL	Waled	2,846	
6	PPL	Pabedilan	2,408	
7	PPL	Gebang	3,168	
8	PPL	Pasaleman	3,211	
TOTAL LUAS PKL			19,953	
PKL LEMAH ABANG				
1	PKL	Lemahabang (Pusat)	2,149	Fungsi Utama: Industri Manufaktur
2	PKLp	Astanajapura (Sub Pusat)	2,547	Fungsi Penunjang: Industri, Pertanian, Perumahan, Pariwisata, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pertambangan, Pendidikan Kejuruan, Industri Hasil Hutan, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Karangsembung	1,514	
4	PPL	Pangenan	3,054	
5	PPL	Sedong	3,102	
6	PPL	Susukan Lebak	1,874	
7	PPL	Mundu	2,558	
8	PPL	Karangwareng	2,312	
TOTAL LUAS PKL			19,110	
PKL SUMBER				
1	PKL	Sumber (Pusat)	2,565	Fungsi Utama: Pemerintahan, Perdagangan, Jasa
2	PKLp	Weru (Sub Pusat)	0,919	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pendidikan Tinggi, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perikanan Budidaya, Pelayanan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kejuruan, Pertambangan, Fungsi PKN
3	PPK	Kedawung	0,958	
4	PPL	Greged	2,992	
5	PPL	Plered	1,134	
6	PPL	Tengah tani	0,897	
7	PPL	Talun	2,121	
8	PPL	Beber	2,325	
9	PPL	Gunungjati	1,7	
TOTAL LUAS PKL			15,611	
PKL PALIMANAN				
1	PKL	Palimanan (Pusat)	1,718	Fungsi Utama: Industri
2	PKLp	Plumbon (Sub Pusat)	1,819	Fungsi Penunjang: Perumahan, Pariwisata, Agrowisata, Pertanian, Industri Batualam, Pertambangan, Perikanan Budidaya, Pendidikan Kejuruan, Pelayanan Sosial Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Klangenan	2,057	
4	PPL	Jamblang	1,776	
5	PPL	Gempol	3,073	
6	PPL	Depok	1,555	
7	PPL	Dukupuntang	3,64	
TOTAL LUAS PKL			15,638	
PKL ARJAWINANGUN				
1	PKL	Arjawinangun (Pusat)	2,411	Fungsi Utama: Pertanian
2	PKLp	Kapetakan (Sub Pusat)	6,02	Fungsi Penunjang : Perikanan Tangkap, dan Budidaya, Agrowisata, Industri, Pendidikan Tinggi, Pelayanan Sosial-Ekonomi, Penunjang Fungsi PKN
3	PPK	Gegesik	6,038	
4	PPL	Kaliwedi	2,782	
5	PPL	Susukan	5,01	
6	PPL	Panguragan	2,031	
7	PPL	Suranenggala	2,653	
8	PPL	Ciwaringin	1,779	
TOTAL LUAS PKL			28,724	
KABUPATEN CIREBON			99,036	

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Fungsi utama dan penunjang untuk PKL Sumber yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi. Dalam rencana sistem jaringan prasarana RTRW Kabupaten Cirebon terkait Kecamatan Sumber meliputi :

- Pengoptimalan jalan Kolektor Primer 2 (KP2) ruas Sumber - Majalengka, ruas Sumber - Kalitanjung, ruas Plered - Sumber dan ruas Sumber - Mandirancan.
- Peningkatan terminal penumpang Tipe-B di Kecamatan Sumber;
- Rencana jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi :
 - ✓ Sumber - Sindangjawa - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Sendang - Wanasaba - Wanguntara - Gubang;
 - ✓ Sumber - Plered (Terminal Weru);
 - ✓ Sumber - Pamijahan - Karangmulya - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kramat;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Plumbon;
 - ✓ Sumber - Kenanga - Karangwangi - Keduanan - Sidapurna - Jamblang;
 - ✓ Sumber - Cisaat - Mandala - Cikalahang - Pasar Kramat;
 - ✓ Sumber - Bode - Karangsari - Marikangen - Karangasem - Plumbon;
- Rencana jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Kecamatan Sumber.

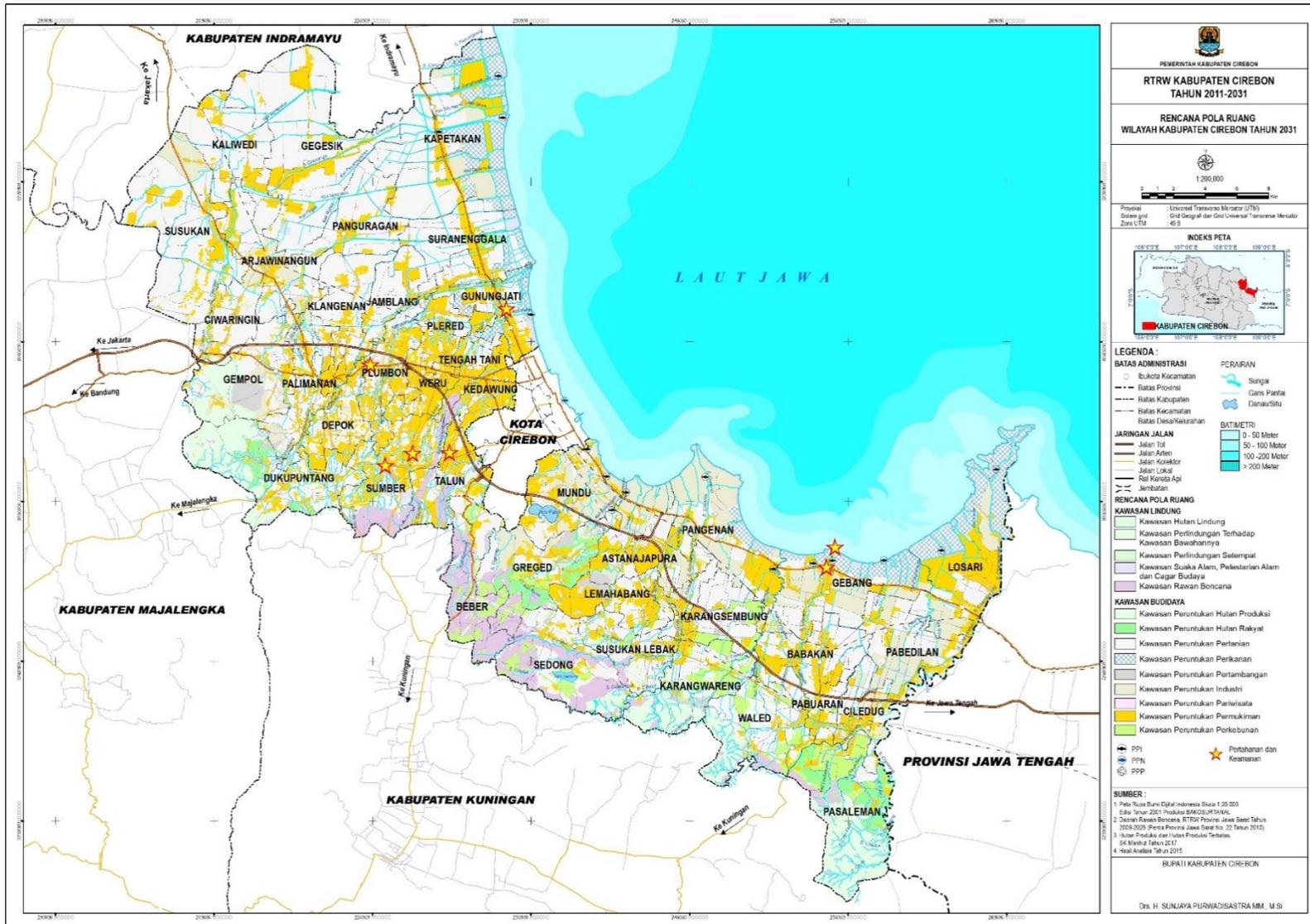


Gambar 3.13 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

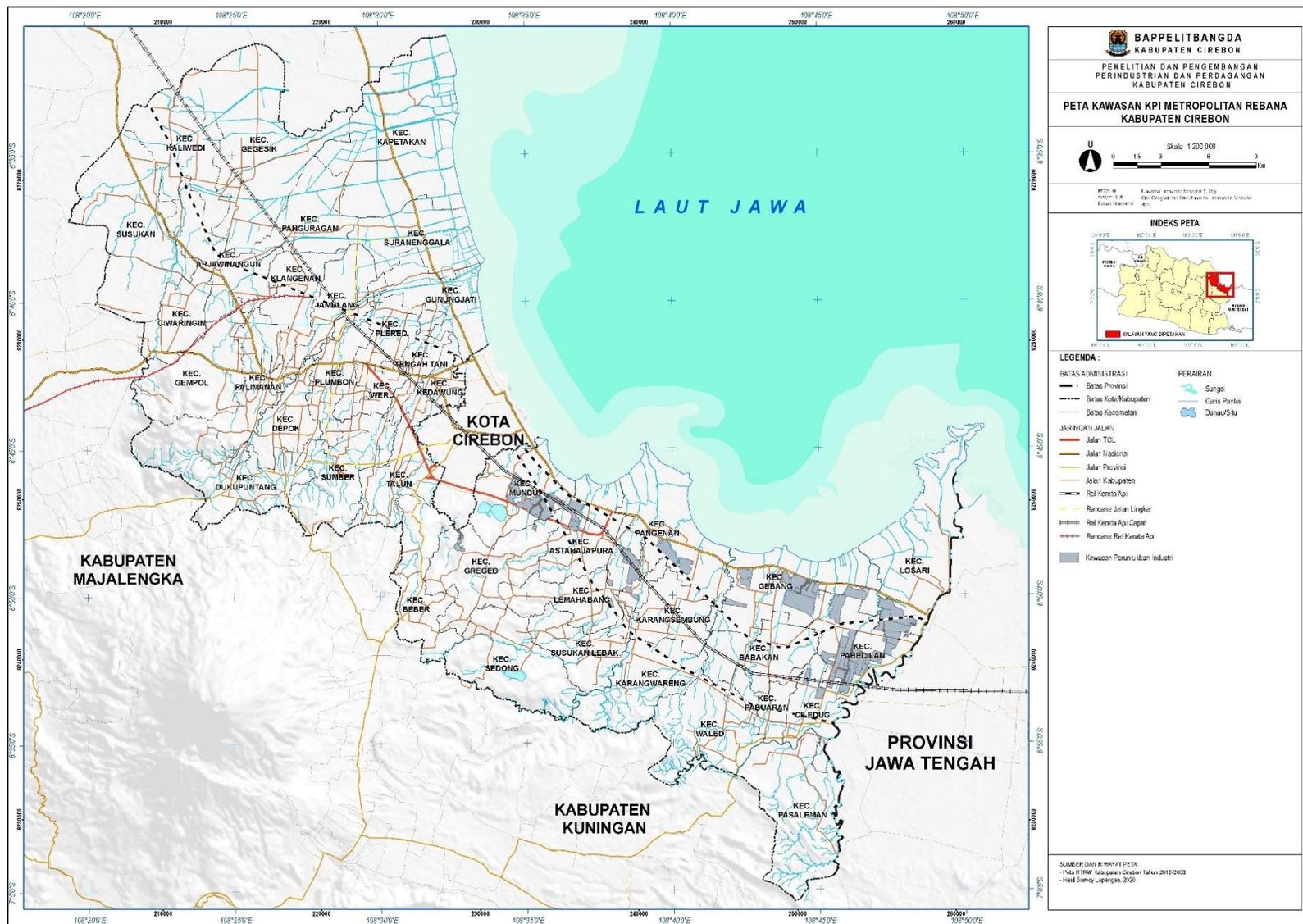
3.2.3.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon meliputi :

- Rencana kawasan lindung meliputi :
 - ✓ Rencana kawasan sempadan sungai kurang lebih 20 (duapuluh) hektar.
 - ✓ Kawasan mata air berada di Desa Sidawangi seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
 - ✓ Ruang Terbuka Hijau Publik 20% (dua perseratus) terdiri atas :
 - RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - taman kota;
 - hutan kota; dan
 - sabuk hijau (green belt)
 - RTH jalur hijau jalan terdiri atas :
 - pulau jalan dan median jalan;
 - jalur pejalan kaki; dan
 - ruang di bawah jalan layang.
 - RTH fungsi tertentu terdiri atas :
 - RTH sempadan rel kereta api;
 - jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - RTH sempadan sungai;
 - RTH sempadan pantai;
 - RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - lapangan olahraga; dan
 - pemakaman.
 - ✓ Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu di Desa Sidawangi.
 - ✓ Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.
 - ✓ Taman suaka margasatwa kera Plangon (Desa Babakan Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar).
- Rencana kawasan budidaya meliputi :
 - ✓ Hutan produksi terbatas (HPT) dikelola oleh KPH Kuningan dan KPH Majalengka, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan hutan rakyat di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kecamatan Sumber seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - ✓ Kawasan peruntukan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman tahunan, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumber.
 - ✓ kawasan permukiman perkotaan yang menjadi PKL
 - ✓ Kawasan Militer Angkatan Darat.
 - ✓ Kawasan peruntukan Pendidikan Tinggi.
 - ✓ Kawasan peruntukan rumah sakit.



Gambar 3.14 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon



Gambar 3.15 Peta Arahan KPI Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4

ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI dan PEMANFAATAN RUANG KPI KABUPATEN CIREBON



4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada 6°30'58"–7°00' 24" Lintang Selatan dan 108°19'30"–108°50'03" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai wilayah seluas ± 990,36 km², yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan.

Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Cirebon mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil. Berdasarkan hal tersebut maka luas perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 399.6 km² (54 km x 4 mil x 1.85 km).

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa;
- ❑ Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan;
- ❑ Sebelah Barat : kabupaten Majalengka ;
- ❑ Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan Berdasarkan Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Waled	28.46	2.91	12	-
2	Pasaleman	32.11	3.29	7	-
3	Ciledug	13.25	1.36	10	-
4	Pabuaran	8.95	0.92	7	-
5	Losari	39.07	4.00	10	-
6	Pabedilan	24.08	2.47	13	-
7	Babakan	21.93	2.25	14	-
8	Gebang	31.68	3.24	13	-
9	Karangsembung	15.14	1.55	8	-
10	Karangwareng	23.12	2.37	9	-
11	Lemahabang	21.49	2.20	13	-
12	Susukan Lebak	18.74	1.92	13	-
13	Sedong	31.02	3.18	10	-
14	Astanajapura	25.47	2.61	11	-
15	Panganan	30.54	3.13	9	-
16	Mundu	25.58	2.62	12	-
17	Beber	23.25	2.38	10	-
18	Greged	29.92	3.06	10	-
19	Talun	21.21	2.17	11	-
20	Sumber	25.65	2.63	2	12
21	Dukupuntang	36.40	3.73	13	-
22	Palimanan	17.18	1.76	12	-
23	Plumbon	18.19	1.86	15	-
24	Depok	15.55	1.59	12	-
25	Weru	9.19	0.94	9	-
26	Plered	11.34	1.16	10	-
27	Tengah Tani	8.97	0.92	8	-



No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
28	Kedawung	9.58	0.98	8	-
29	Gunungjati	20.55	2.10	15	-
30	Kapetakan	60.20	6.17	9	-
31	Suranenggala	22.98	2.32	9	-
32	Klangenan	20.57	2.11	9	-
33	Jamblang	17.76	1.82	8	-
34	Arjawinangun	24.11	2.47	11	-
35	Panguragan	20.31	2.08	9	-
36	Ciwaringin	17.79	1.82	8	-
37	Gempol	30.73	3.15	8	-
38	Susukan	50.1	5.13	12	-
39	Gegesik	60.38	6.18	14	-
40	Kaliwedi	27.82	2.85	9	-
Kabupaten Cirebon		990.36	100.00	412	12

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.2 Kondisi Topografi

Ketinggian di Kabupaten Cirebon terdapat 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 83.826,31 Ha;
2. Wilayah dengan ketinggian > 25-100 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 6.691,54 Ha;
3. Wilayah dengan ketinggian > 100-200 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 10.055,01 Ha;
4. Wilayah dengan ketinggian > 200-300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 5.365,78 Ha;
5. Wilayah dengan ketinggian >300 mdpl tersebar dengan luas kurang lebih 3.264,15 Ha.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Ketinggian Tanah

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.654,84	133,65	102,59	0	0	2.891,08
3	Babakan	2.218,13	0	0	0	0	2.218,13
4	Beber	0	72,17	1.133,61	1.346,35	2.462,53	5.014,66
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.867,64	44,21	9,69	0	0	1.921,54
7	Depok	1.308,67	329,61	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	12,26	1.244,81	1.200,07	608,1	516,94	3.582,18
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	1.600,25	338,23	953,17	192,79	12,55	3.096,99
12	Greged	351,25	339,74	1.459,25	1.024,58	46,49	3.221,31
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,88	0	0	0	0	1.658,88
15	Kaliwedi	2.871,12	0	0	0	0	2.871,12
16	Kapetakan	6.660,36	0	0	0	0	6.660,36
17	Karangsembung	1.881,81	0	0	0	0	1.881,81
18	Karangwareng	2.082,85	1,33	649,38	0	0	2.733,56
19	Kedawung	1.117,38	0	0	0	0	1.117,38
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	2.042,44
21	Emahabang	1.162,49	390,13	706,14	6,14	0	2.264,90

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)					Jumlah
		0-25	> 25 -100	> 100 -200	> 200 -300	> 300	
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	2.441,69	272,28	25,46	0	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,23	0	0	0	0	957,23
26	Palimanan	1.506,23	247,73	154,53	3,38	0	1.911,87
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,91	0	0	0	0	2.199,91
29	Pasaleman	2.409,59	906,02	168,83	0	0	3.484,44
30	Plered	1.322,93	0	0	0	0	1.322,93
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	234,71	290,2	1.373,94	1.544,48	225,63	3.668,96
33	Sumber	1.030,22	583,55	775,43	585,39	0	2.974,59
34	Suranenggala	2.574,75	0	0	0	0	2.574,75
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	626,83	396,05	781,95	0	0	1.804,83
37	Talun	657,77	654,98	560,96	54,58	0	1.928,29
38	Tengah Tani	976,18	0	0	0	0	976,18
39	Waled	2.514,81	446,84	0	0	0	2.961,65
40	Weru	911	0	0	0	0	911,00
Kabupaten Cirebon		83.826,51	6.691,53	10.055,00	5.365,79	3.264,14	109.202,97

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kemiringan lereng di Kabupaten Cirebon terdiri dari 6 (enam) kelas, yaitu: 0-3 %, >3-8 %, > 8-15 %, >15-25 %, 25-40 % dan > 40%. Dominasi kemiringan paling luas adalah 0-3 % mencapai 87.961,65 Ha, sedangkan kelas kemiringan > 40 % 91,15 Ha hanya terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Dukupuntang 1.350,25 Ha, Kecamatan Gempol 59,74 Ha dan Kecamatan Palimanan 31,41 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
1	Arjawinangun	2.429,04	0	0	0	0	0	2.429,04
2	Astanajapura	2.512,62	378,47	0	0	0	0	2.891,09
3	Babakan	2.218,15	0	0	0	0	0	2.218,15
4	Beber	104,52	441,16	866,41	489,63	650,4	0	2.552,12
5	Ciledug	1.460,93	0	0	0	0	0	1.460,93
6	Ciwaringin	1.921,54	0	0	0	0	0	1.921,54
7	Depok	1.638,28	0	0	0	0	0	1.638,28
8	Dukupuntang	1.733,02	114,45	98,01	0	286,45	1.350,25	3.582,19
9	Gebang	3.544,22	0	0	0	0	0	3.544,22
10	Gegesik	6.409,90	0	0	0	0	0	6.409,90
11	Gempol	2.548,92	0	0	0	488,32	59,74	3.096,99
12	Greged	886,19	758,63	417,4	913,8	245,28	0	3.221,30
13	Gunungjati	2.245,55	0	0	0	0	0	2.245,55
14	Jamblang	1.658,89	0	0	0	0	0	1.658,89
15	Kaliwedi	2.871,13	0	0	0	0	0	2.871,13
16	Kapetakan	6.660,37	0	0	0	0	0	6.660,37
17	Karangsembung	1.877,26	0	0	4,54	0	0	1.881,80
18	Karangwareng	1.447,92	539,37	251,42	410,57	84,26	0	2.733,54
19	Kedawung	1.073,72	0	43,65	0	0	0	1.117,37
20	Klangenan	2.042,44	0	0	0	0	0	2.042,44

No.	Kecamatan	Kemiringan (%)						Jumlah
		0-3%	> 3-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
21	Lemahabang	1.129,82	749,89	13,94	371,25	0	0	2.264,90
22	Losari	4.582,04	0	0	0	0	0	4.582,04
23	Mundu	1.597,17	787,73	0	275,33	79,2	0	2.739,43
24	Pabedilan	2.533,41	0	0	0	0	0	2.533,41
25	Pabuaran	957,24	0	0	0	0	0	957,24
26	Palimanan	1.859,86	0	0	0	20,61	31,41	1.911,88
27	Pangenan	3.576,07	0	0	0	0	0	3.576,07
28	Panguragan	2.199,90	0	0	0	0	0	2.199,90
29	Pasaleman	2.805,16	0	0	570,69	108,6	0	3.484,45
30	Plered	1.322,90	0	0	0	0	0	1.322,90
31	Plumbon	1.903,34	0	0	0	0	0	1.903,34
32	Sedong	14,06	434,47	1.478,44	598,69	917,65	0	3.443,31
33	Sumber	2.604,63	168,99	200,97	0	0	0	2.974,60
34	Suranenggala	2.574,74	0	0	0	0	0	2.574,74
35	Susukan	5.287,79	0	0	0	0	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	469,41	275,64	448,47	219,88	391,43	0	1.804,83
37	Talun	688,55	812,44	264,26	104,37	58,64	0	1.928,26
38	Tengah Tani	910,88	0	65,32	0	0	0	976,2
39	Waled	2.804,04	0	0	157,6	0	0	2.961,64
40	Weru	856,03	0	55	0	0	0	911,03
Kabupaten Cirebon		87.961,65	5.461,24	4.203,29	4.116,35	3.330,84	91,15	106.514,80

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.3 Kondisi Morfologi Wilayah

Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Cirebon terdiri dari satuan morfologi dataran dan satuan morfologi pegunungan dan perbukitan. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, serta membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Sedangkan satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar atau sedikit bergelombang.

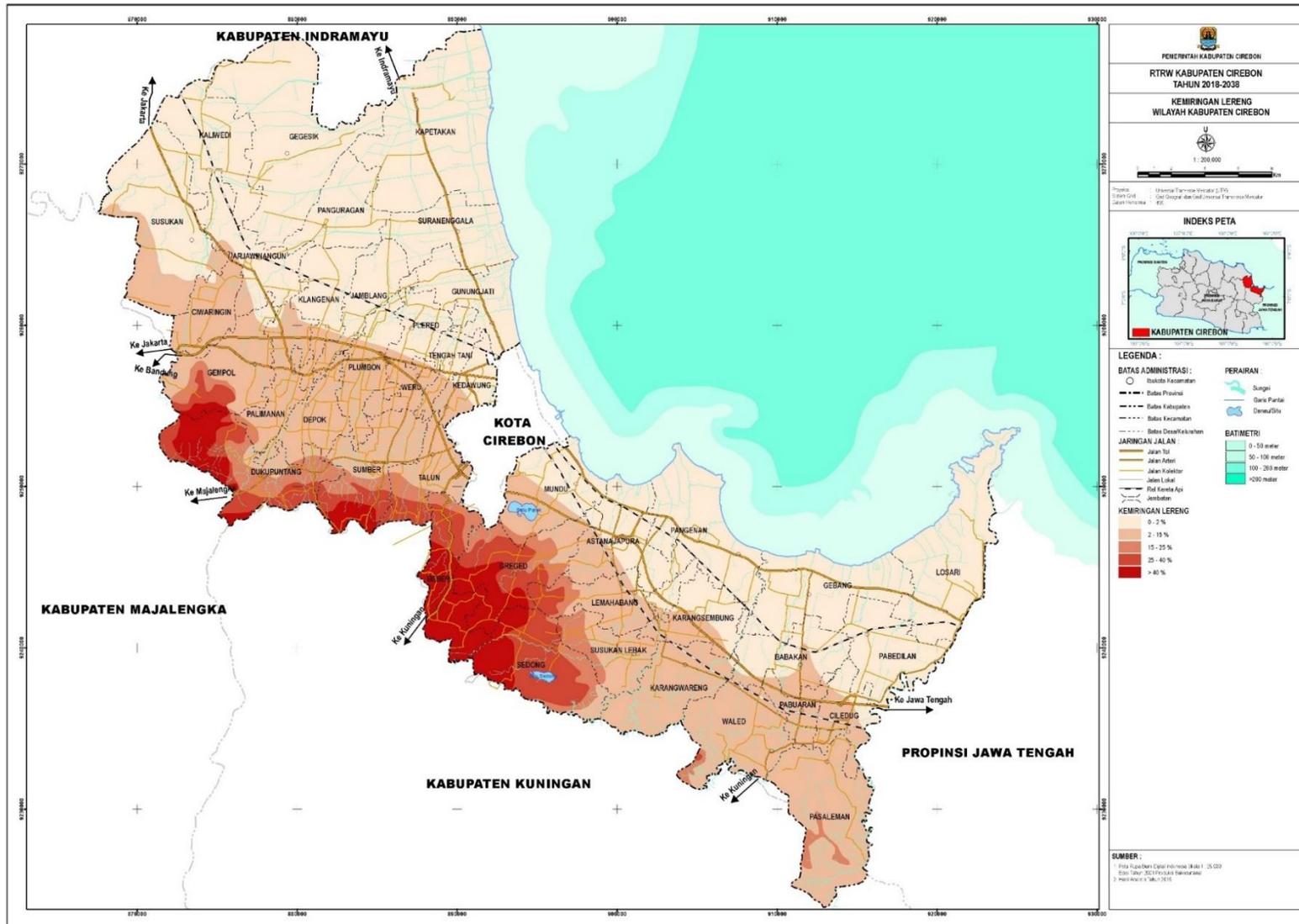
Secara lebih rinci satuan morfologi di wilayah Kabupaten Cirebon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Sub satuan morfologi datar adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relief datar dengan kisaran kelas lereng 0-2%;
- Sub satuan morfologi datar dan sedikit bergelombang dengan kisaran kelas lereng lebih dari 2-15%;
- Sub satuan morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 15-25% dan memperlihatkan relief halus;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar lebih dari 25-40% dan memperlihatkan relief sedang;
- Sub satuan morfologi pegunungan dan pegunungan terjal dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

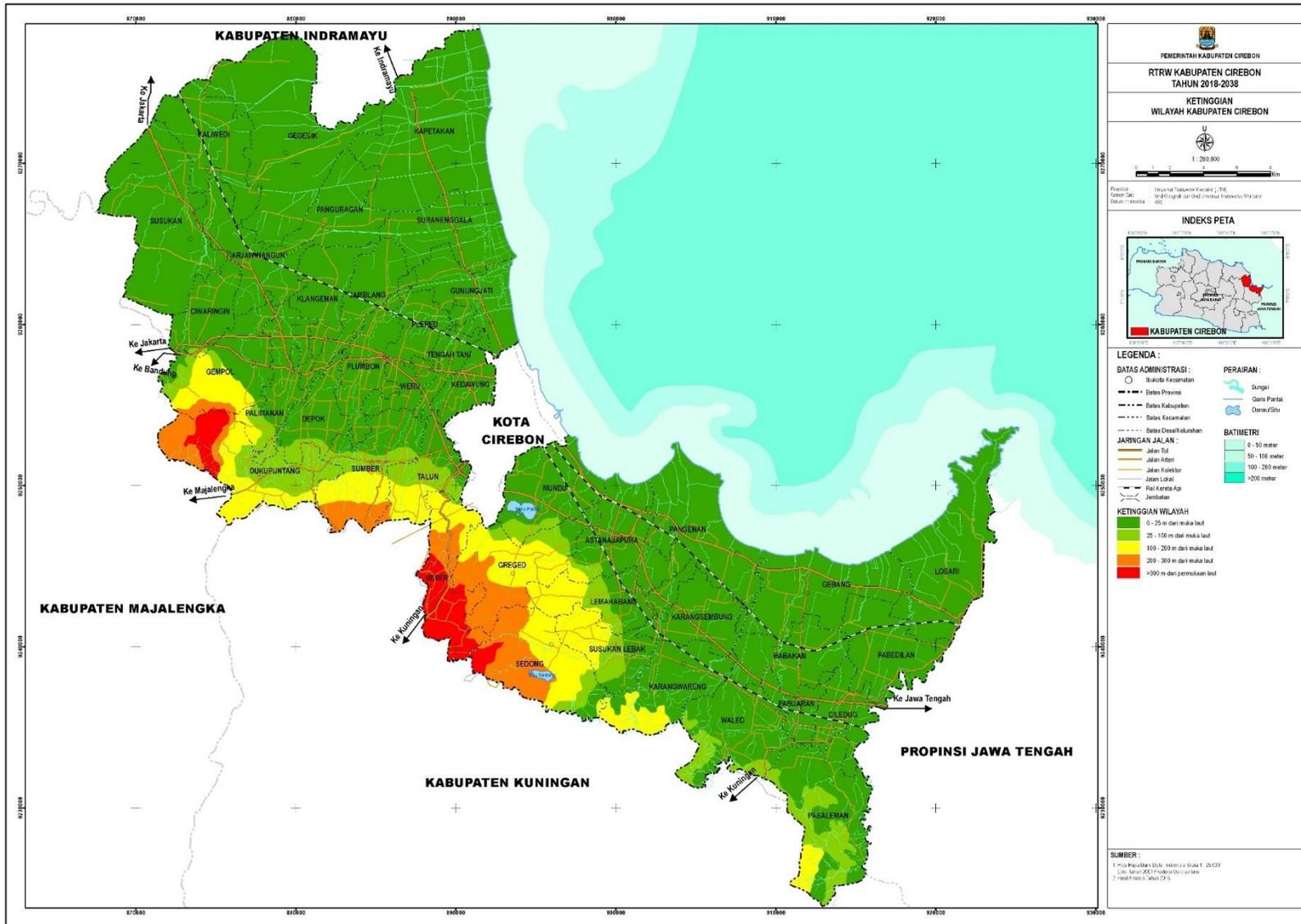
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Mofologi Kawasan

No.	Kecamatan	Jenis Morfologi			Jumlah
		Bukit/Perbukitan	Datar	Gunung/Pegunungan dan Bukit	
1	Arjawinangun	0	2429	0	2.429,04
2	Astanajapura	0	2891	0	2.891,09
3	Babakan	0	2218	0	2.218,15
4	Beber	490	1412	650	2.552,12
5	Ciledug	0	1461	0	1.460,93
6	Ciwaringin	0	1922	0	1.921,54
7	Depok	0	1638	0	1.638,28
8	Dukupuntang	0	1945	1637	3.582,19
9	Gebang	0	3544	0	3.544,22
10	Gegesik	0	6410	0	6.409,90
11	Gempol	0	2549	548	3.096,99
12	Greged	914	2062	245	3.220,55
13	Gunungjati	0	2246	0	2.245,55
14	Jamblang	0	1659	0	1.658,89
15	Kaliwedi	0	2871	0	2.871,13
16	Kapetakan	0	6660	0	6.660,37
17	Karangsembung	5	1877	0	1.881,80
18	Karangwareng	411	2239	4	2.733,54
19	Kedawung	0	1117	0	1.117,37
20	Klangenan	0	2042	0	2.042,44
21	Lemahabang	371	1894	0	2.264,90
22	Losari	0	4582	0	4.582,04
23	Mundu	275	2385	79	2.739,43
24	Pabedilan	0	2533	0	2.533,41
25	Pabuaran	0	957	0	957,24
26	Palimanan	0	1860	52	1.911,88
27	Pangenan	0	3576	0	3.576,07
28	Panguragan	0	2200	0	2.199,90
29	Pasaleman	571	2805	109	3.484,45
30	Plered	0	1323	0	1.322,90
31	Plumbon	0	1903	0	1.903,34
32	Sedong	599	1927	918	3.443,31
33	Sumber	0	2975	0	2.974,60
34	Suranenggala	0	2575	0	2.574,74
35	Susukan	0	5288	0	5.287,79
36	Susukan Lebak	22	1194	391	1.804,83
37	Talun	104	1765	59	1.928,26
38	Tengah Tani	0	976	0	976,2
39	Waled	158	2804	0	2.961,64
40	Weru	0	911	0	911,03
Kabupaten Cirebon		3.918,14	97.625,71	4.692,18	106.514,05

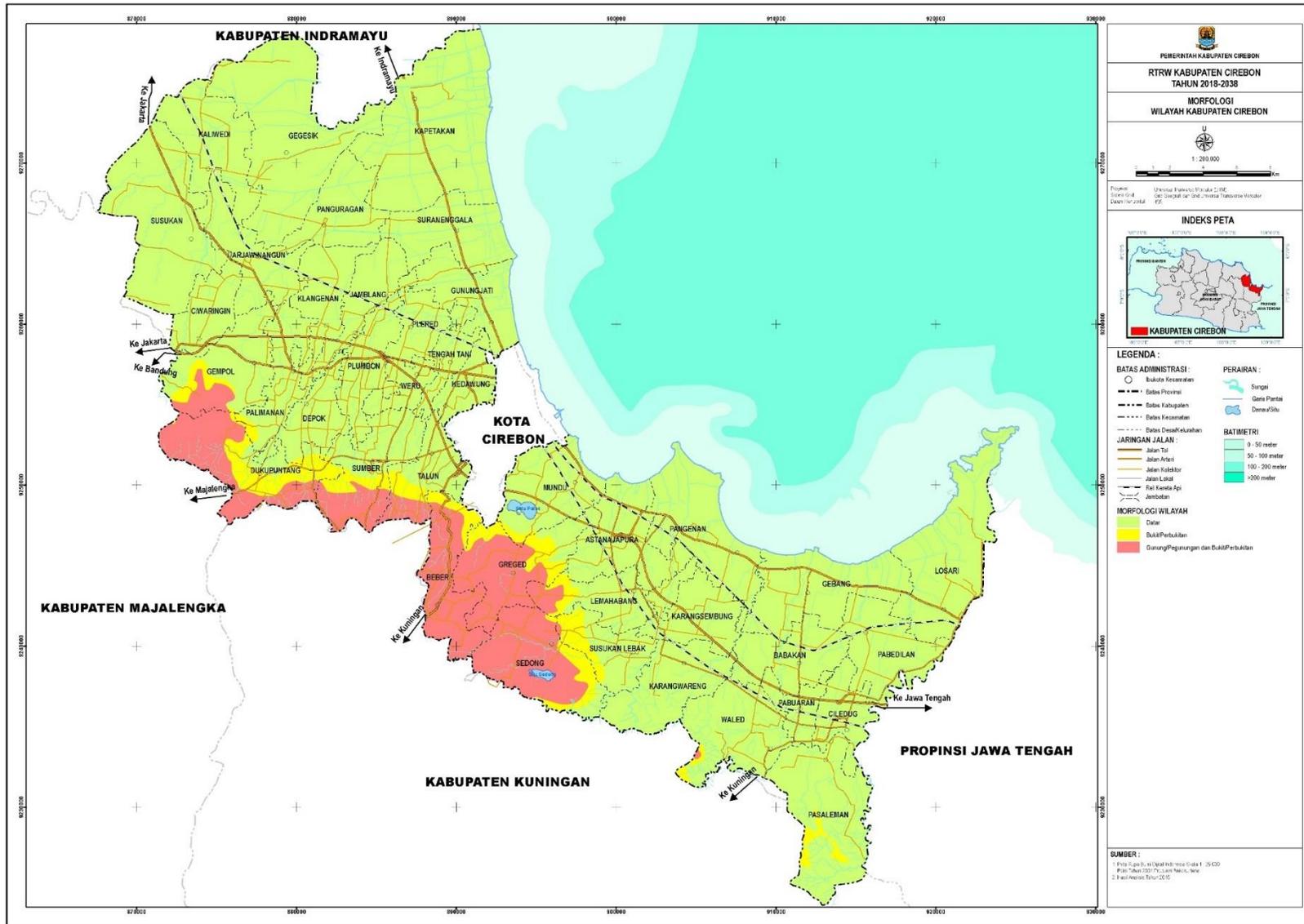
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 4.2 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.3 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.4 Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cirebon

4.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Cirebon meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Untuk wilayah sungai, Kabupaten Cirebon memiliki 1 (satu) buah Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Selain itu juga Kabupaten Cirebon memiliki 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dengan luas sebesar 1.312 Km².

DAS Cisanggarung memiliki beberapa Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam beberapa kewenangan baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pembagian wewenang DI tersebut sebagai berikut :

1. DI dengan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi: Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanisi.
2. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :
 - a. DI Rentang seluas ± 20.632 Ha;
 - b. DI Ciwaringan seluas ±1.103 Ha;
 - c. DI Seuseupan seluas ± 3.865 Ha dan
 - d. DI Cikeusik seluas ±6.903 Ha.
3. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. DI Walahar seluas ±1.292 Ha;
 - b. DI Jamblang seluas ± 2.164 Ha;
 - c. DI Cipager seluas ± 1.056 Ha;
 - d. DI Setupatok seluas ±1.408 Ha;
 - e. DI Paniis Lebak seluas ± 332 Ha;
 - f. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 - g. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 - h. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 - i. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 - j. DI Katiga seluas ± 662 Ha; dan
 - k. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha.
4. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
 - a. DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 - b. DI Soka seluas ± 282 Ha;
 - c. DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
 - d. DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 - e. DI Keputon seluas ± 446 Ha;
 - f. DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
 - g. DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
 - h. DI Agung seluas ± 711 Ha;
 - i. DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
 - j. DI Panongan seluas ± 952 Ha dan
 - k. DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

Tabel 4.5 Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13	Gunungjati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
Kabupaten Cirebon		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	106.514,18

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah danau/ situ yaitu : Setu Patok di Kecamatan Mundu seluas 175 Ha dengan kapasitas tampung 13.790.000 m³ dan Setu Sedong di Kecamatan Sedong seluas 19,67 Ha dengan kapasitas tampung 1.850.000 m³.

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 (empat puluh empat) titik yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sedangkan jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

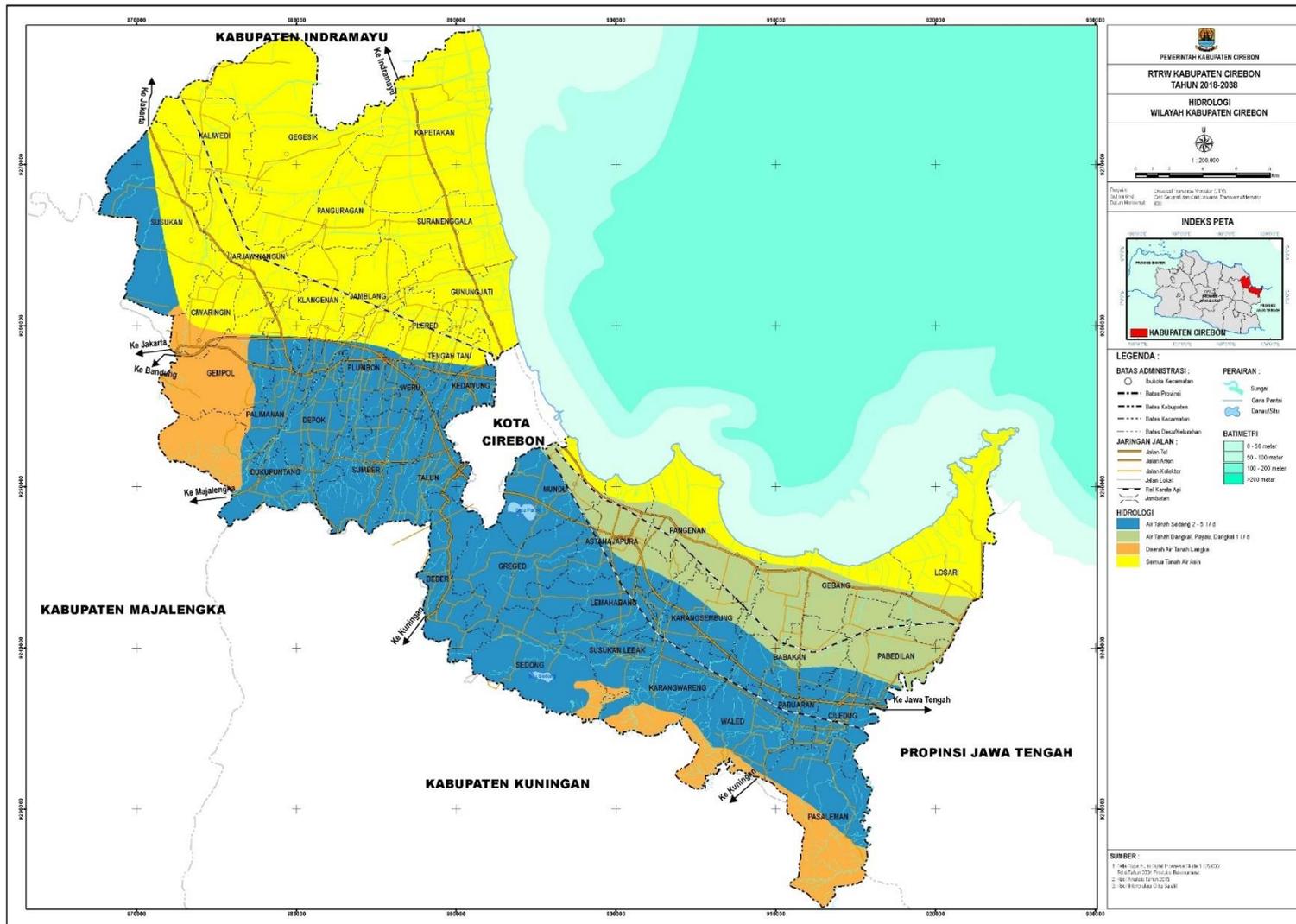
Tabel 4.6 Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	4	1. Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2. Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3. Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4. Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
2	Palimanan	1	1. Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1. Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 2. Mata air Balonggede di Desa Cipinang 3. Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1. Mata air Bakam di Desa Greged 2. Mata air Umbar di Desa Nanggela 3. Mata air Cilengceng di Desa Nanggela 4. Mata air Mandiangin di Desa Durajaya 5. Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6. Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7. Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1. Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2. Mata air Cidahu di Desa Belawa 3. Mata air Ciloa di Desa Belawa 4. Mata air Kegambulan di Desa Belawa; 5. Mata air Cikondang di Desa Wangkelang; 6. Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang; 7. Mata air Pesantren di Desa Pasawahan; 8. Mata air Cibirung di Desa Pasawahan; 9. Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan; 10. Mata air Sindang Pancuran di Desa Sindanglaut; 11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut; 12. Mata air Cibansari di Desa Cipeujeuh; 13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon; 14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;
6	Sedong	1	1. Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1. Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem; 2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem 3. Mata air Gunung Cibulut di Desa Ciuyah 4. Mata air Balong di Desa Ciuyah 5. Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman;	2	1. Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang 2. Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1. Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1. Mata air Krandon di Desa Krandon 2. Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	3	1. Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2. Mata air Seureuh Beureun di Desa Sidawangi 3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

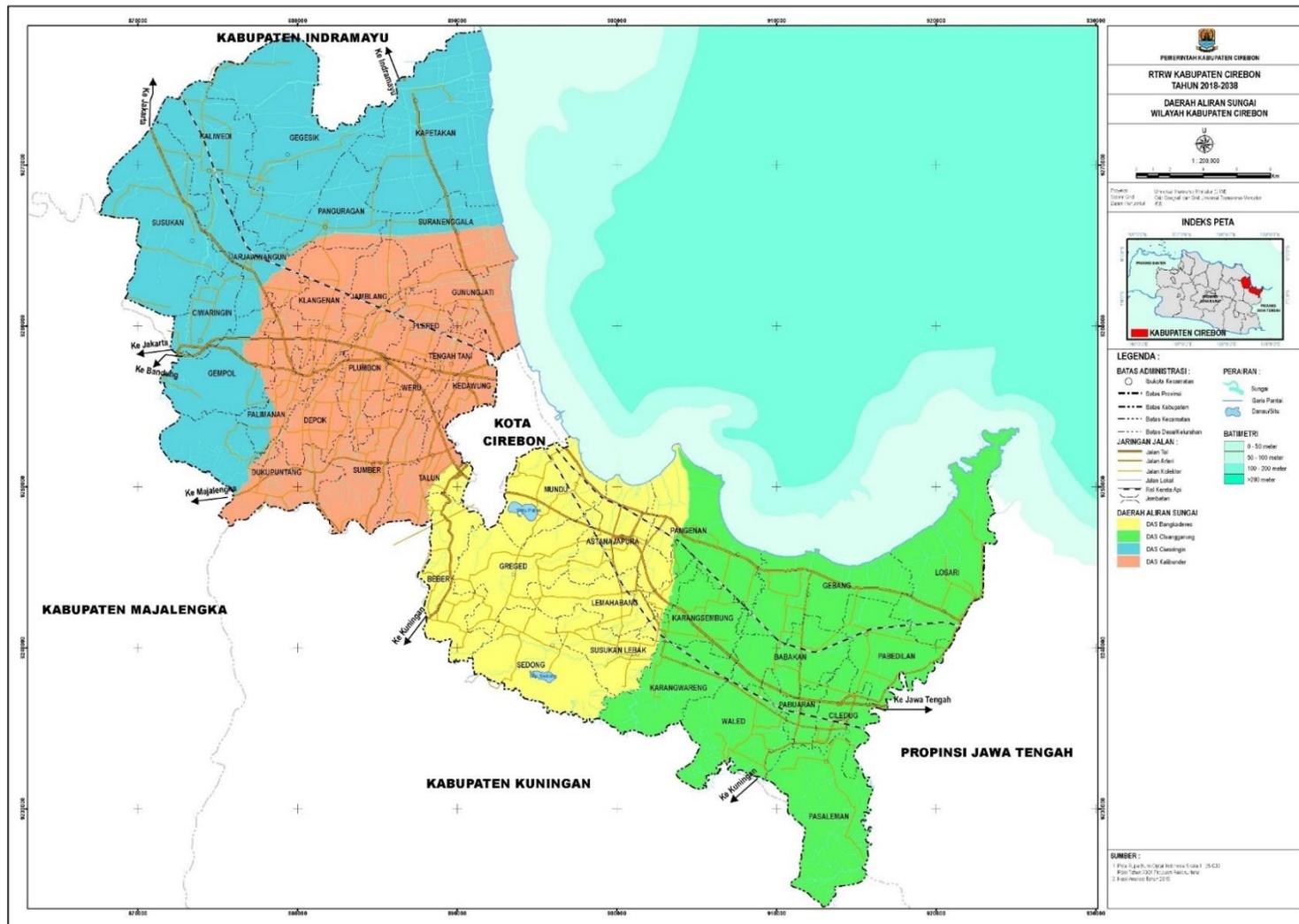
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.1.5 Kondisi Air Tanah

Kondisi air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) daerah/ wilayah, yaitu : daerah air tanah asin, daerah air tanah dangkal, daerah air tanah sedang, dan daerah air tanah langka.



Gambar 4.5 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon



Gambar 4.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Cirebon

4.1.6 Potensi Bencana Alam

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana buatan (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8	Dukupuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23
16	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
40	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

1. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, antara lain: kekeringan, banjir, longsor dan angin puting beliung.

- Rawan Bencana Kekeringan, meliputi 30 kecamatan.
- Rawan Bencana Banjir, meliputi 21 kecamatan.
- Rawan Bencana Longsor, meliputi 6 kecamatan.
- Rawan Bencana Angin Puting Beliung, meliputi 7 kecamatan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Jenis dan Jumlah Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1	Waled	√	-	√	-
2	Pasaleman	-	√	-	-
3	Ciledug	√	√	-	-
4	Pabuaran	-	-	-	√
5	Losari	√	√	-	√
6	Pabedilan	√	√	-	-
7	Babakan	-	√	-	-
8	Gebang	√	√	-	-
9	Karangsembung	√	-	-	√
10	Karangwareng	-	-	-	-
11	Lemahabang	√	√	-	-
12	Susukan Lebak	√	-	-	-
13	Sedong	√	-	√	-
14	Astanajapura	√	√	-	√
15	Pangenan	√	√	-	-
16	Mundu	√	√	-	-
17	Beber	√	-	√	-
18	Greged	-	-	√	-
19	Talun	-	-	-	-
20	Sumber	√	-	√	-
21	Dukupuntang	-	-	√	-
22	Palimanan	√	-	-	√
23	Plumbon	√	√	-	-
24	Depok	√	-	-	-
25	Weru	√	-	-	-
26	Plered	√	√	-	-
27	Tengah Tani	√	√	-	-
28	Kedawung	√	-	-	-
29	Gunungjati	-	√	-	-
30	Kapetakan	√	√	-	-
31	Suranenggala	√	√	-	-
32	Klangenan	√	-	-	-
33	Jamblang	-	-	-	√
34	Arjawinangun	√	√	-	-
35	Pangurangan	√	√	-	-
36	Ciwaringin	√	-	-	-
37	Gempol	-	-	-	-
38	Susukan	√	√	-	-
39	Gegesik	√	√	-	√
40	Kaliwedi	√	√	-	-

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

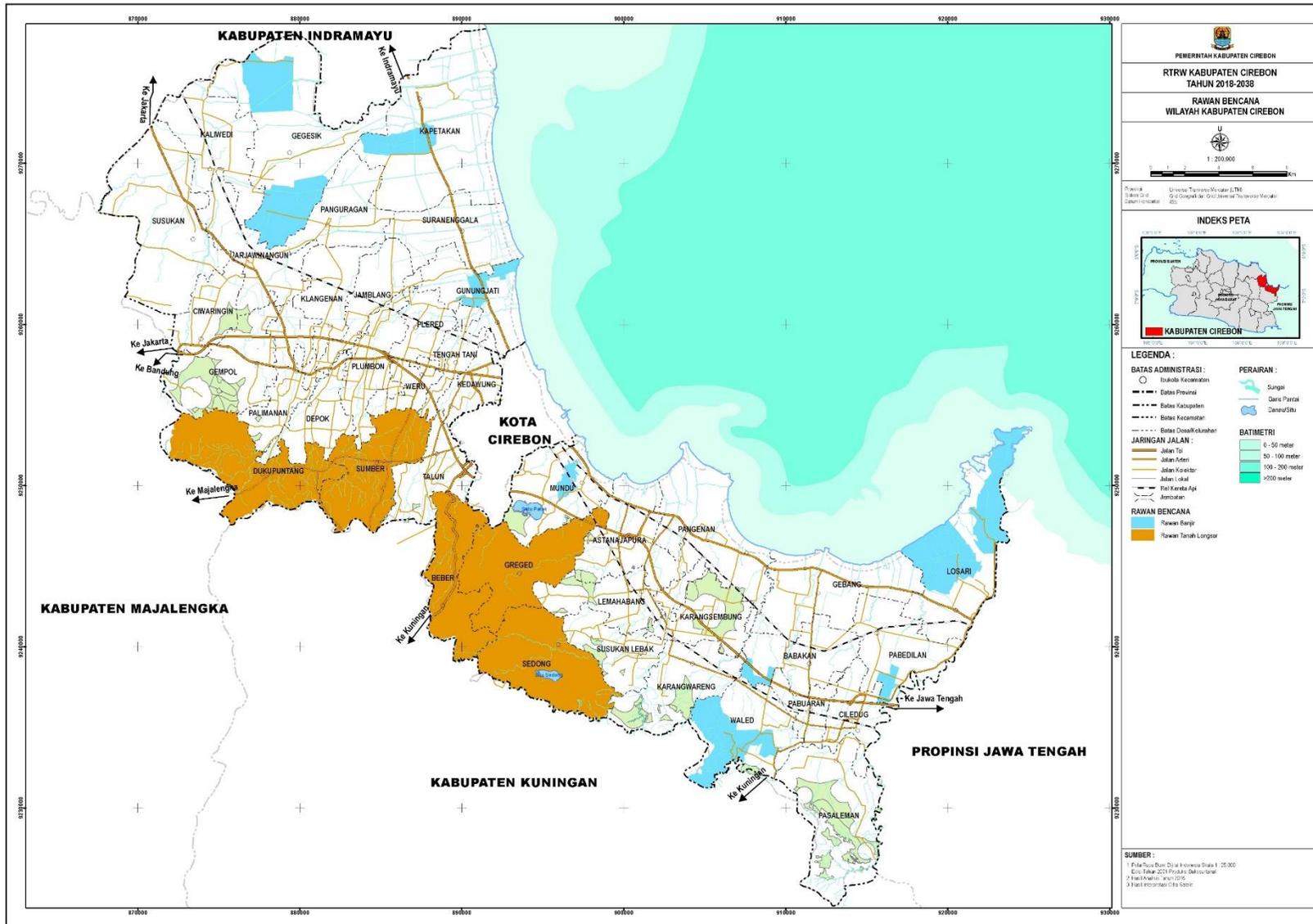
2. Bencana Kebakaran

Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Resiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038



Gambar 4.7 Peta Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Cirebon

4.2 Kondisi Kependudukan

4.2.1 Jumlah Penduduk

Selama periode 2010 - 2019 jumlah penduduk mengalami peningkatan. Tahun 2010 berjumlah 1.992.318 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2.189.785 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2019 mencapai 197.467 jiwa., dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,06%.

Jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Sumber mencapai 90.891 jiwa, hal ini menunjukkan salah satu fungsi penunjang PKL Sumber yang diarahkan menjadi kawasan perumahan yang dapat menampung jumlah penduduk yang tinggi.

Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Karangwereng dengan jumlah 28.151 jiwa, sedikitnya jumlah penduduk ini bisa menggambarkan bahwa Kecamatan Karangwereng berada di selatan yang sangat jauh, sehingga sulit menarik orang untuk berdomisili. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

4.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon selama periode 2010 - 2019 mengalami peningkatan dari 2.012 jiwa/Km² menjadi 2.211 jiwa/Km², atau bertambah 199 jiwa/Km².

Pada tahun 2019, kecamatan dengan kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Weru dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 7.459 jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di kecamatan Paseleman dengan jumlah kepadatan 837 jiwa/Km².

Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	52,073	52,659	51,024	51,659	51,770	52,108	50,837	52,551	54,014	54,407
2	Pasaleman	24,690	24,968	24,248	24,968	25,044	24,836	25,920	26,214	26,793	26,886
3	Ciledug	41,704	42,174	41,166	42,174	43,826	45,169	43,971	44,198	44,555	44,501
4	Pabuaran	33,321	33,696	33,045	33,696	34,479	33,804	34,777	34,775	35,445	35,558
5	Losari	53,499	54,101	53,841	54,101	56,692	59,441	57,340	57,250	59,673	60,160
6	Pabedilan	50,902	51,475	50,125	50,475	50,973	53,650	49,711	51,685	55,978	56,397
7	Babakan	61,618	62,312	61,102	62,312	63,365	67,437	64,540	64,589	68,993	69,636
8	Gebang	55,964	56,605	57,605	58,205	60,483	59,477	61,942	60,899	65,027	65,233
9	Karangsembung	33,066	34,450	34,450	35,150	36,218	36,593	34,694	35,375	36,397	36,625
10	Karangwereng	23,267	23,563	23,760	24,563	25,657	26,525	27,018	27,563	28,159	28,151
11	Iemahabang	49,186	50,751	49,231	49,751	50,354	51,078	50,822	51,616	53,214	54,116
12	Susukan Lebak	35,598	36,010	36,830	37,010	36,728	37,703	38,478	39,176	40,203	40,359
13	Sedong	36,990	37,429	38,224	39,429	37,893	39,051	37,970	39,118	40,660	40,824
14	Astanajapura	73,894	73,737	75,423	75,737	76,471	76,869	71,609	73,589	73,478	74,785
15	Pangenan	42,522	42,001	42,781	43,001	38,925	40,817	42,261	42,664	44,597	44,459
16	Mundu	66,772	70,591	72,890	73,591	67,097	67,933	68,629	70,523	71,732	71,761
17	Beber	35,114	35,820	36,521	37,421	38,699	39,503	39,556	40,414	40,516	41,279
18	Greged	40,504	50,073	50,988	51,073	50,091	49,684	51,955	53,234	53,269	53,975
19	Talun	59,120	59,819	60,046	60,819	61,756	62,358	62,895	64,574	65,198	65,854
20	Sumber	80,058	80,959	81,129	82,959	84,575	85,587	86,981	88,701	89,192	90,891
21	Dukupuntang	59,684	60,356	59,856	60,356	59,893	60,309	60,255	61,629	62,656	62,951
22	Palimanan	54,990	55,609	54,108	55,609	59,368	60,169	59,871	59,783	60,899	61,600
23	Plumbon	72,599	73,416	73,012	73,416	70,498	73,560	73,849	75,229	78,259	80,062
24	Depok	56,436	57,071	56,908	57,071	58,778	57,449	60,185	61,078	62,272	63,474
25	Weru	63,498	64,213	63,983	64,213	62,825	63,536	65,229	66,597	66,909	68,546
26	Plered	49,218	50,523	50,980	51,092	48,049	48,433	49,875	51,197	52,132	53,176
27	Tengah Tani	39,931	40,381	39,962	40,381	40,609	39,385	40,620	41,529	41,884	42,590
28	Kedawung	54,552	57,245	62,245	62,245	60,344	54,748	56,172	57,060	57,980	58,687
29	Gunungjati	72,050	72,918	73,828	74,710	73,415	74,801	76,239	76,353	78,319	79,307
30	Kapetakan	51,026	51,601	51,240	51,601	47,469	47,130	51,338	52,412	56,036	57,574
31	Suranenggala	40,925	41,386	41,125	41,386	41,099	39,720	41,152	41,257	43,471	44,607
32	Klangenan	50,460	51,028	50,818	51,028	48,472	47,276	48,356	49,620	51,417	52,676

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
33	Jamblang	34,848	35,240	34,180	35,240	36,815	37,093	37,178	37,255	38,035	38,643
34	Arjawinangun	62,114	61,785	62,423	62,813	66,226	63,979	65,508	65,703	67,780	68,891
35	Panguragan	40,162	41,637	37,637	38,427	40,794	39,597	40,171	41,091	42,570	42,626
36	Ciwaringin	34,683	36,107	33,708	34,107	35,633	34,276	35,391	35,152	36,821	37,328
37	Gempol	42,784	43,266	40,986	41,266	42,115	41,566	43,190	43,638	44,831	45,757
38	Susukan	61,635	62,329	59,929	60,329	61,948	60,189	60,855	60,715	64,382	65,682
39	Gegesik	65,980	66,823	65,589	66,289	67,454	66,259	66,792	66,101	68,979	69,260
40	Kaliwedi	34,881	35,284	35,846	36,996	37,353	37,980	38,467	38,792	39,851	40,491
Jumlah		1,992,318	2,031,411	2,022,792	2,046,669	2,050,253	2,057,078	2,072,599	2,100,899	2,162,576	2,189,785

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Tabel 4.11 Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 - 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waled	28.46	1,830	1,850	1,793	1,815	1,819	1,831	1,786	1,846	1,898	1,912
2	Pasaleman	32.11	769	778	755	778	780	773	807	816	834	837
3	Ciledug	13.25	3,147	3,183	3,107	3,183	3,308	3,409	3,319	3,336	3,363	3,359
4	Pabuaran	8.95	3,723	3,765	3,692	3,765	3,852	3,777	3,886	3,885	3,960	3,973
5	Losari	39.07	1,369	1,385	1,378	1,385	1,451	1,521	1,468	1,465	1,527	1,540
6	Pabedilan	24.08	2,114	2,138	2,082	2,096	2,117	2,228	2,064	2,146	2,325	2,342
7	Babakan	21.93	2,810	2,841	2,786	2,841	2,889	3,075	2,943	2,945	3,146	3,175
8	Gebang	31.68	1,767	1,787	1,818	1,837	1,909	1,877	1,955	1,922	2,053	2,059
9	Karangsembung	15.14	2,184	2,275	2,275	2,322	2,392	2,417	2,292	2,337	2,404	2,419
10	Karangwereng	23.12	1,006	1,019	1,028	1,062	1,110	1,147	1,169	1,192	1,218	1,218
11	Iemahabang	21.49	2,289	2,362	2,291	2,315	2,343	2,377	2,365	2,402	2,476	2,518
12	Susukan Lebak	18.74	1,900	1,922	1,965	1,975	1,960	2,012	2,053	2,091	2,145	2,154
13	Sedong	31.02	1,192	1,207	1,232	1,271	1,222	1,259	1,224	1,261	1,311	1,316
14	Astanajapura	25.47	2,901	2,895	2,961	2,974	3,002	3,018	2,812	2,889	2,885	2,936
15	Pangenan	30.54	1,392	1,375	1,401	1,408	1,275	1,337	1,384	1,397	1,460	1,456
16	Mundu	25.58	2,610	2,760	2,849	2,877	2,623	2,656	2,683	2,757	2,804	2,805
17	Beber	23.25	1,510	1,541	1,571	1,610	1,664	1,699	1,701	1,738	1,743	1,775

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Greged	29.92	1,354	1,674	1,704	1,707	1,674	1,661	1,736	1,779	1,780	1,804
19	Talun	21.21	2,787	2,820	2,831	2,867	2,912	2,940	2,965	3,045	3,074	3,105
20	Sumber	25.65	3,121	3,156	3,163	3,234	3,297	3,337	3,391	3,458	3,477	3,544
21	Dukupuntang	36.40	1,640	1,658	1,644	1,658	1,645	1,657	1,655	1,693	1,721	1,729
22	Palimanan	17.18	3,201	3,237	3,149	3,237	3,456	3,502	3,485	3,480	3,545	3,586
23	Plumbon	18.19	3,991	4,036	4,014	4,036	3,876	4,044	4,060	4,136	4,302	4,401
24	Depok	15.55	3,629	3,670	3,660	3,670	3,780	3,694	3,870	3,928	4,005	4,082
25	Weru	9.19	6,909	6,987	6,962	6,987	6,836	6,914	7,098	7,247	7,281	7,459
26	Plered	11.34	4,340	4,455	4,496	4,505	4,237	4,271	4,398	4,515	4,597	4,689
27	Tengah Tani	8.97	4,452	4,502	4,455	4,502	4,527	4,391	4,528	4,630	4,669	4,748
28	Kedawung	9.58	5,694	5,975	6,497	6,497	6,299	5,715	5,863	5,956	6,052	6,126
29	Gunungjati	20.55	3,506	3,548	3,593	3,636	3,573	3,640	3,710	3,715	3,811	3,859
30	Kapetakan	60.20	848	857	851	857	789	783	853	871	931	956
31	Suranenggala	22.98	1,781	1,801	1,790	1,801	1,788	1,728	1,791	1,795	1,892	1,941
32	Klangenan	20.57	2,453	2,481	2,470	2,481	2,356	2,298	2,351	2,412	2,500	2,561
33	Jamblang	17.76	1,962	1,984	1,925	1,984	2,073	2,089	2,093	2,098	2,142	2,176
34	Arjawinangun	24.11	2,576	2,563	2,589	2,605	2,747	2,654	2,717	2,725	2,811	2,857
35	Panguragan	20.31	1,977	2,050	1,853	1,892	2,009	1,950	1,978	2,023	2,096	2,099
36	Ciwaringin	17.79	1,950	2,030	1,895	1,917	2,003	1,927	1,989	1,976	2,070	2,098
37	Gempol	30.73	1,392	1,408	1,334	1,343	1,370	1,353	1,405	1,420	1,459	1,489
38	Susukan	50.10	1,230	1,244	1,196	1,204	1,236	1,201	1,215	1,212	1,285	1,311
39	Gegesik	60.38	1,093	1,107	1,086	1,098	1,117	1,097	1,106	1,095	1,142	1,147
40	Kaliwedi	27.82	1,254	1,268	1,288	1,330	1,343	1,365	1,383	1,394	1,432	1,455
Jumlah		990.36	2,012	2,051	2,042	2,067	2,070	2,077	2,093	2,121	2,184	2,211

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.2.3 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Salah satu pertimbangan untuk menentukan Kawasan Perkotaan adalah jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat tipologi Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Kawasan Metropolitan jumlah penduduk 1.000.000 Jiwa;
2. Kawasan Perkotaan Besar jumlah penduduk 500.000 jiwa;
3. Kawasan Perkotaan Sedang jumlah penduduk 100.000 - 500.000 jiwa;
4. Kawasan Perkotaan Kecil jumlah penduduk 50.000 -100.000 jiwa.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat diketahui bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk kedalam kriteria Kawasan Perkotaan terdapat 26 kecamatan dengan klasifikasi Kawasan Perkotaan Kecil.

Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan didominasi oleh penduduk perkotaan mencapai 71,20% atau mencapai 1.559.101 jiwa, sedangkan proporsi penduduk perdesaan 28,80% atau mencapai 630.684 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Komposisi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
1	Waled	54,407	Perkotaan Kecil
2	Pasaleman	26,886	Perdesaan
3	Ciledug	44,501	Perdesaan
4	Pabuaran	35,558	Perdesaan
5	Losari	60,160	Perkotaan Kecil
6	Pabedilan	56,397	Perkotaan Kecil
7	Babakan	69,636	Perkotaan Kecil
8	Gebang	65,233	Perkotaan Kecil
9	Karangsembung	36,625	Perdesaan
10	Karangwereng	28,151	Perdesaan
11	lemahabang	54,116	Perkotaan Kecil
12	Susukan Lebak	40,359	Perdesaan
13	Sedong	40,824	Perdesaan
14	Astanajapura	74,785	Perkotaan Kecil
15	Pangenan	44,459	Perdesaan
16	Mundu	71,761	Perkotaan Kecil
17	Beber	41,279	Perdesaan
18	Greged	53,975	Perkotaan Kecil
19	Talun	65,854	Perkotaan Kecil
20	Sumber	90,891	Perkotaan Kecil
21	Dukupuntang	62,951	Perkotaan Kecil
22	Palimanan	61,600	Perkotaan Kecil
23	Plumbon	80,062	Perkotaan Kecil
24	Depok	63,474	Perkotaan Kecil
25	Weru	68,546	Perkotaan Kecil
26	Plered	53,176	Perkotaan Kecil
27	Tengah Tani	42,590	Perdesaan
28	Kedawung	58,687	Perkotaan Kecil
29	Gunungjati	79,307	Perkotaan Kecil



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Tipe Kawasan Perkotaan
30	Kapetakan	57,574	Perkotaan Kecil
31	Suranenggala	44,607	Perdesaan
32	Klangenan	52,676	Perkotaan Kecil
33	Jamblang	38,643	Perdesaan
34	Arjawinangun	68,891	Perkotaan Kecil
35	Panguragan	42,626	Perdesaan
36	Ciwaringin	37,328	Perdesaan
37	Gempol	45,757	Perdesaan
38	Susukan	65,682	Perkotaan Kecil
39	Gegesik	69,260	Perkotaan Kecil
40	Kaliwedi	40,491	Perdesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

4.3 Kondisi Sektor Perindustrian dan Kontribusinya dalam PDRB

4.3.1 Kondisi Sektor Industri

Jumlah perusahaan sektor industri kecil di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mencapai 5.209 unit. Untuk jenis industri di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 9 jenis komoditi unggulan, diantaranya : kerajinan rotan, meubeul kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	1,370	1,382	1,398	1,408
2	Meubeul Kayu	1,252	1,253	1,255	1,257
3	Emping Melinjo	158	166	166	166
4	Roti Dan Makanan Ringan	571	770	775	782
5	Batu Alam	344	347	347	347
6	Sandal Karet	21	22	22	22
7	Batik	565	593	593	593
8	Konveksi	610	625	626	626
9	Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8
Jumlah		4,899	5,166	5,190	5,209

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun 2018 mencapai 94.422 jiwa, dengan jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat pada sektor komoditi industri meubeul/kerajinan rotan dengan jumlah tenaga kerja 60.887 jiwa.

Tabel 4.14 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2018

No	Komoditi Unggulan	Jumlah (Unit)			
		2015	2016	2017	2018
1	Meubeul/ Kerajinan Rotan	59,712	59,763	60,455	60,887
2	Meubeul Kayu	7,552	7,558	7,570	7,582
3	Emping Melinjo	1,309	1,374	1,374	1,374
4	Roti Dan Makanan Ringan	6,095	7,314	8,327	8,625
5	Batu Alam	2,051	2,072	2,072	2,072
6	Sandal Karet	230	235	235	235
7	Batik	4,515	4,628	4,628	4,628
8	Konveksi	6,054	6,054	6,221	6,221
9	Kerajinan Kulit Kerang	770	780	780	780
Jumlah		90,303	91,794	93,679	94,422

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Tahun 2020

4.3.2 Sumber Daya Industri

4.3.2.1 Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan

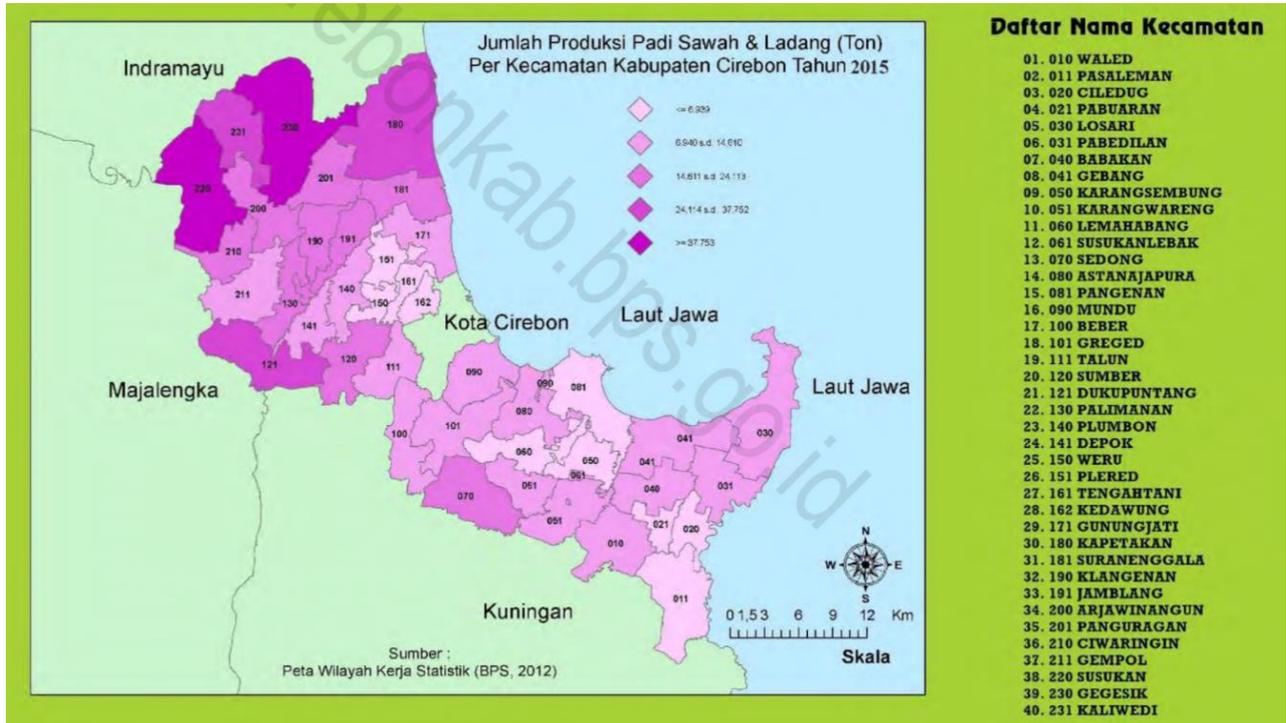
Sektor pertanian dan perkebunan yang menghasilkan tanaman pangan merupakan salah satu sumber daya kompetitif dari Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BPS Tahun 2016, sektor pertanian dan perkebunan berkontribusi pada 15% Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDBR) Kabupaten Cirebon. Sumber daya pertanian dan perkebunan meliputi tanaman bahan makanan (padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan), sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penyumbang terbesar produksi padi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi produsen padi terbesar ketiga skala nasional. Adapun komoditas pertanian dan perkebunan Kabupaten Cirebon lainnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon

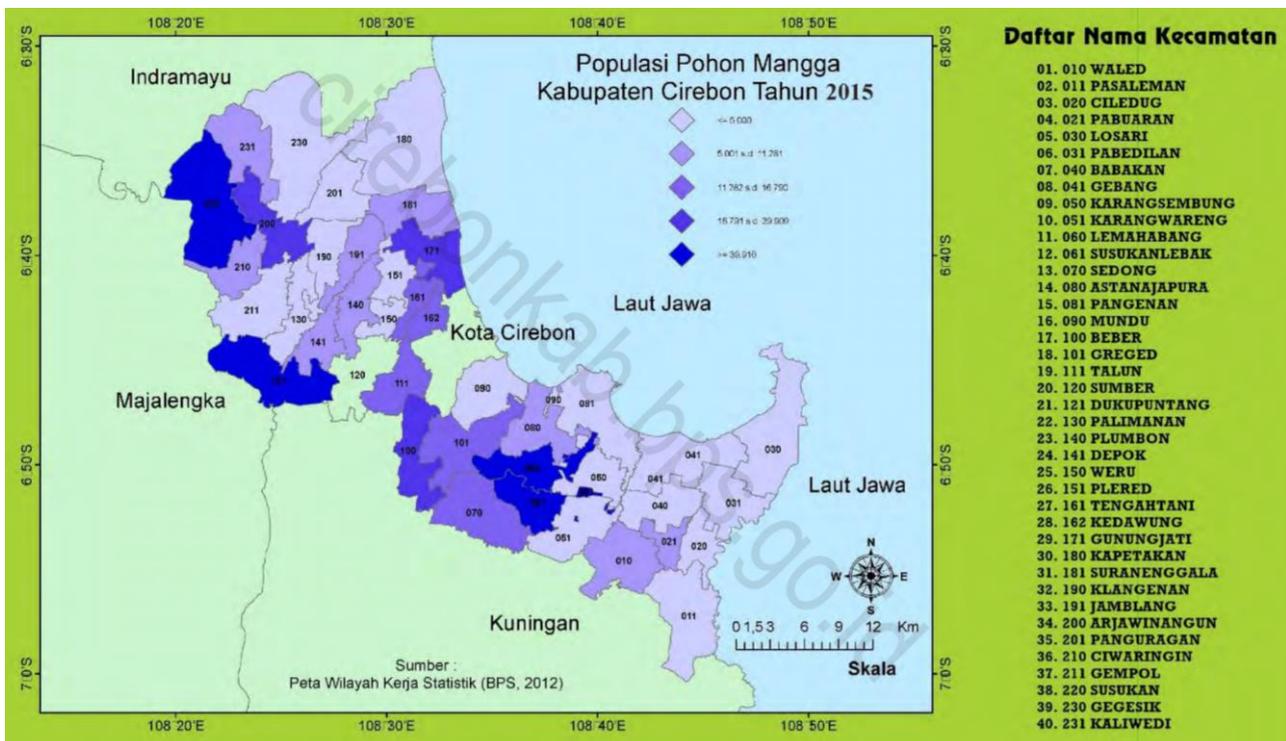
Komoditas	Potensi Luas Tanam (Ha)		Produksi Tahunan (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017*	2016	2017*	
Padi	89.104	87.058	607.65		Gegesik, Kapetakan, Susukan, Klangeran, Arjawinangun, Sumber, Ciwaringin, Dukupuntang, Palimanan, Suranenggala, Susukan, Panguragan dan Kaliwedi
Kacang Hijau	2.384	2.384	2.532		Waled, Ciwaringin, Babakan, Susukan, Arjawinangun, Gempol, Palimanan dan Pasaleman
Bawang Merah	3.669	4.141	4.048	3.837	Waled, Pabuaran, Babakan, Gebang, Pabedilan, Pangenan, Losari dan Ciledug
Cabe Besar	694	630	6.502	552	Waled, Losari, Subang, Pangenan, Gempol, Susukan, Pasaleman, Ciledug dan Pabedilan
Mangga	8.587		31.086	38.417	Sedong, Beber, Greged, Susukan Lebak, Lemahabang, Dukupuntang, dan Sumber
Jambu Biji	660		1.599		Panguragan, Ciwaringin, Gegesik, Klangeran dan Suranenggala
Tebu	4.911	4.911	23.117	23.117	Sumber, Dukupuntang, Palimanan, Susukan, Jamblang Plumbon, Klangeran dan Gempol

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan sumber daya pertanian dan perkebunan masing – masing. Persebaran per kecamatan dari beberapa komoditas tanaman pangan, yaitu padi, mangga, dan jambu biji, dapat diamati pada tiga gambar berikut:



Gambar 4.8 Peta Jumlah Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015



Gambar 4.9 Peta Jumlah Pohon Mangga per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

b. Sumber Daya Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari Kabupaten Cirebon. Ada dua jenis komoditas utama sektor peternakan Kabupaten Cirebon: hewan ruminansia berupa sapi, domba, kerbau, dan hewan unggas berupa sapi dan ayam. Ringkasan produksi komoditas peternakan ruminansia dan unggas di Kabupaten Cirebon disajikan pada dua tabel berikut:

Tabel 4.16 Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Ruminansia) Kabupaten Cirebon

Komoditas	Populasi (Ekor)		Produksi Daging (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017	2016	2017	
Sapi	3.748	7.187	3.980		Gunungjati, Mundu, Babakan, Gegesik, Waled, Karangsembung, Losari, Beber, Talun, Gempol, Sumber, Klangeran, Sedong, Dukupuntang, Pabedilan, Ciwaringin, Depok, Plumbon, Ciledug, Gebang, Karangwareng, Plered, Arjawinangun, Beber, Kapetakan
Domba	277.498	280.024	3.026		
Kerbau	3.907	3.808	33		

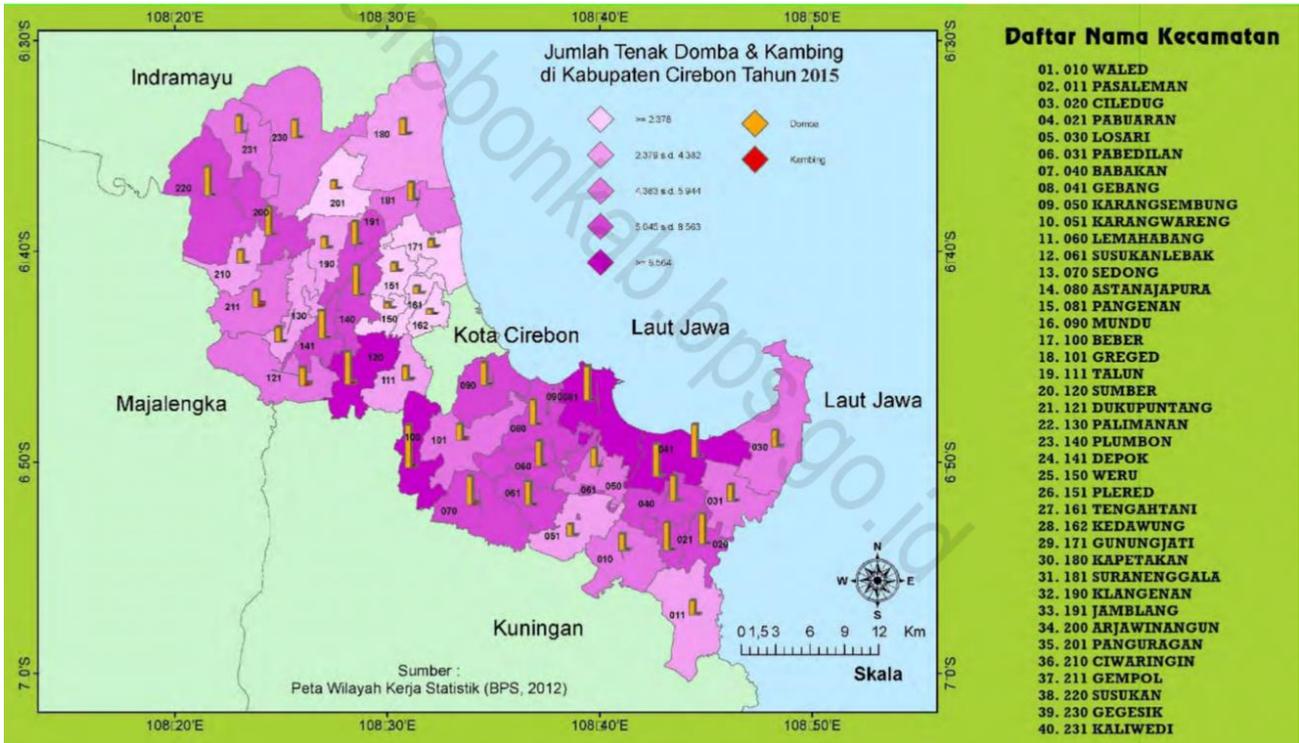
Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Tabel 4.17 Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Unggas) Kabupaten Cirebon

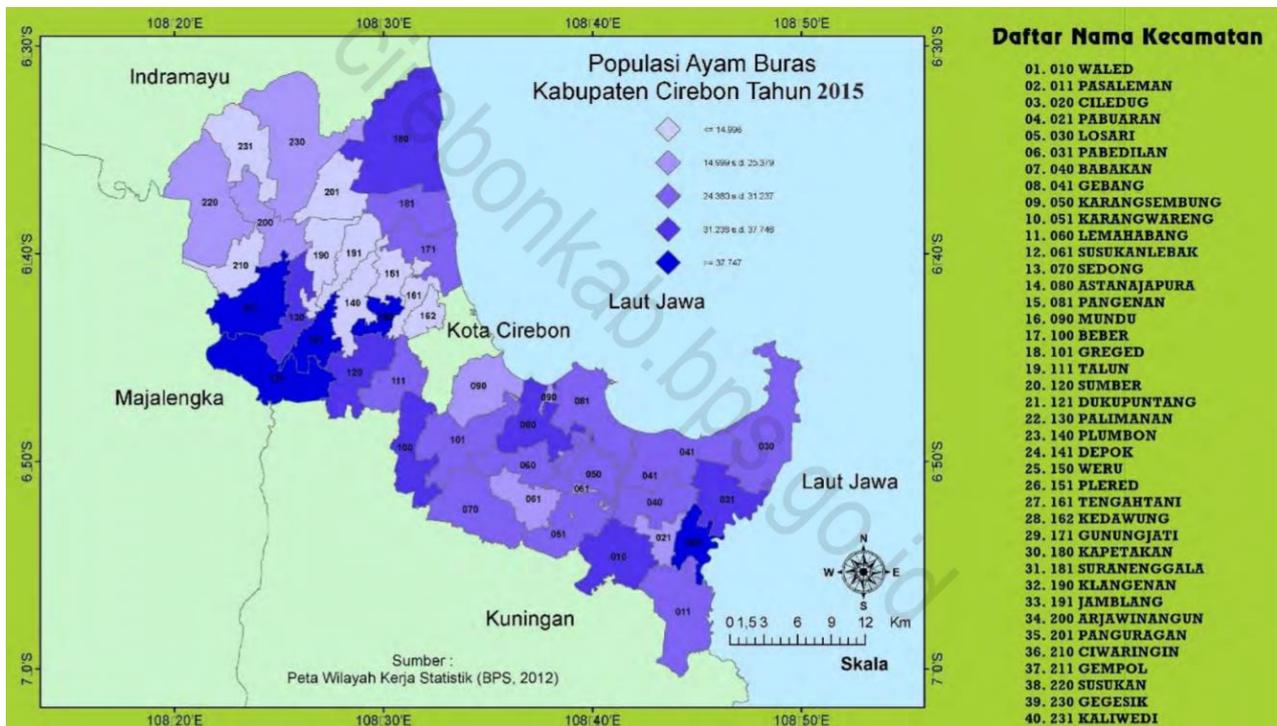
Komoditas	Populasi (Ribuan Ekor)		Produksi Daging (Ton)		Produksi Telur (Ton)		Kecamatan Unggulan
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Itik	436	442	273		2.851		Kecamatan Kapetakan, Gebang, Losari, Panguragan, Gunungjati, dan Susukan
Ayam Pedaging	2.374	2.385	11.438		NA		
Ayam Petelur	91	81	NA		1.007		
Ayam Buras	1.158	1.174	NA		710		

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Selain data agregat, sumber daya peternakan dapat dilihat persebarannya berdasarkan lokasi. Peta persebaran sumber daya peternakan (ruminansia dan unggas) per kecamatan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015 dapat diamati pada dua gambar berikut:



Gambar 4.10 Persebaran Domba dan Kambing per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015



Gambar 4.11 Persebaran Ayam Buras per Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

c. Sumber Daya Pertambangan

Industri pertambangan di Kabupaten Cirebon didominasi oleh industri batu alam, yang merupakan industri pertambangan non-logam. Hal ini dikarenakan banyaknya pengrajin dan industri batu alam dengan skala UKM. Seiring kenaikan pertumbuhan industri properti di Indonesia, industri batu alam di wilayah Cirebon pun diprediksi ikut tumbuh. Banyaknya sumber bahan baku industri batu alam yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya turut meningkatkan daya saing sektor industri tersebut. Beberapa varian batu alam yang menjadi komoditas utama industri ini adalah batu andesit, batu palimanan, batu templek, dan batu candi.

Tabel 4.18 Data Statistika Terkait Industri Pertambangan Non-Logam (Batu Alam)

Aspek Sumber Daya	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tenaga Kerja	2.010	2.051	2.072	2.072
Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	11,2	11,2	11,3	11,3
Kapasitas Produksi (Ribu Ton)	5,1	5,1	5,2	5,2
Nilai Produksi (Milyar Rupiah)	173,6	181	182,8	182,8

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

4.3.2.2 Sumber Daya Perhutanan

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya perhutanan, berupa kayu, yang dapat menjadi pasokan untuk sektor industri mebel kayu, yang produksi tahunannya mencapai Rp 51 miliar pada tahun 2016. Sumber daya perhutanan memiliki potensi lahan tanam pada lahan kritis seluas 5.008 Ha dan lahan tumpang sari (tanaman bawah tegakan) seluas 4.280 Ha pada tahun 2015. Produksi tanaman hutan dengan jumlah 4.087 m³ terdiri dari Kayu Jati 1995 m³, Kayu Mahoni 1102 m³, dan kayu lain-lain (campuran) 969 m³. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu Kecamatan Dukupuntang, Sedong, Gempol, Waled, Pasaleman, Karangwareng, SusukanLebak, Greged, Beber, Astanajapura.

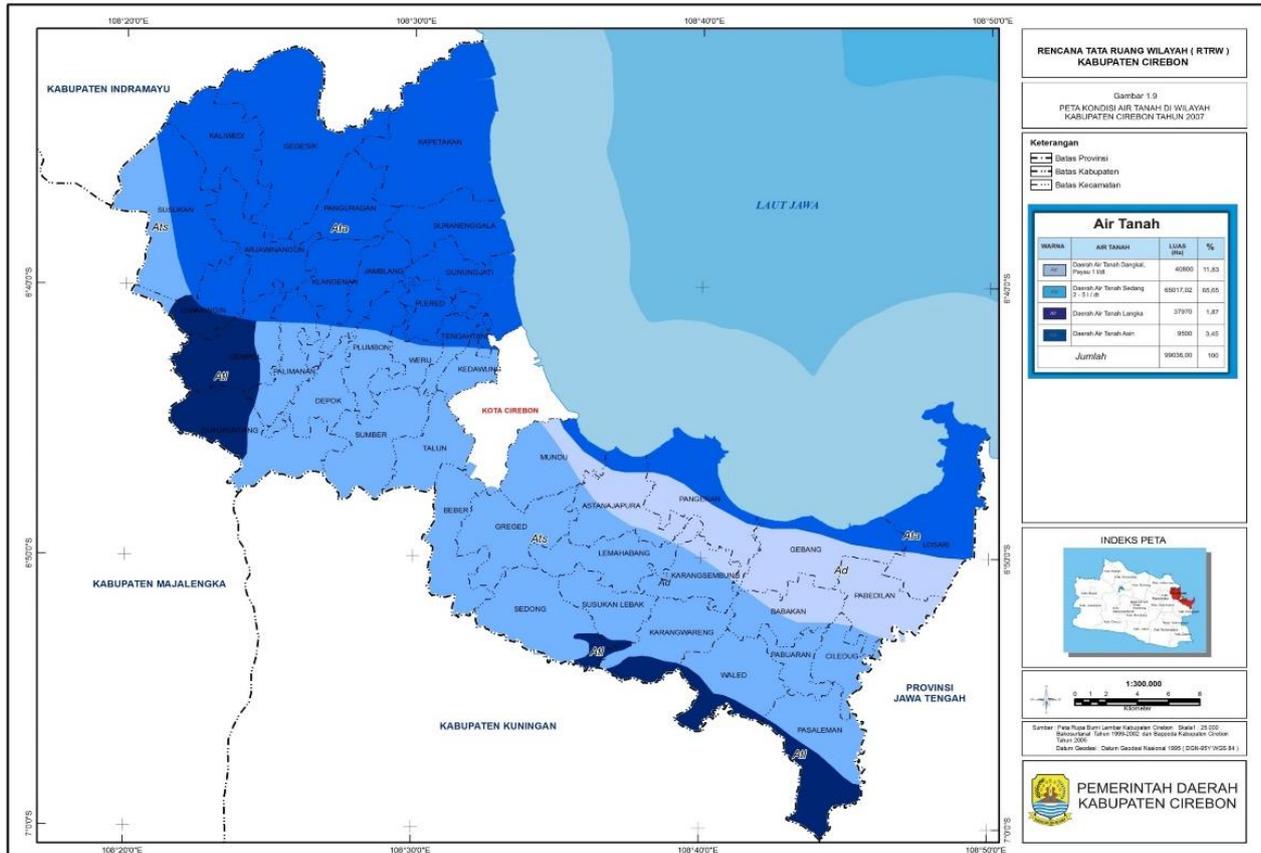
Pengembangan sumber daya perhutanan di Kabupaten Cirebon didukung oleh beberapa faktor agroklimat seperti tersedianya industri pengolahan hasil kehutanan, luasnya ketersediaan daya dukung lahan, dan meningkatnya kebutuhan bahan baku industri berbasis komoditas perhutanan. Dikarenakan faktor - faktor tersebut, harga hasil hutan kayu cenderung stabil sehingga iklim industri cukup menarik. Lalu ada pula kemungkinan diversifikasi produksi dengan komoditas lain seperti kehutanan-perkebunan dan kehutanan-tanaman pangan.

4.3.2.3 Sumber Daya Air

Sumber-sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai besar seperti Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan Sungai Jamblang. Selain itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian selatan. Sungai-sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir. Dalam menganalisa sumber daya air, kondisi air tanah seperti salinitas, ketersediaan, dan kedalaman, pun perlu diperhitungkan. Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 menunjukkan peta DAS dan kondisi air tanah di Kabupaten Cirebon.



Gambar 4.12 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Cirebon

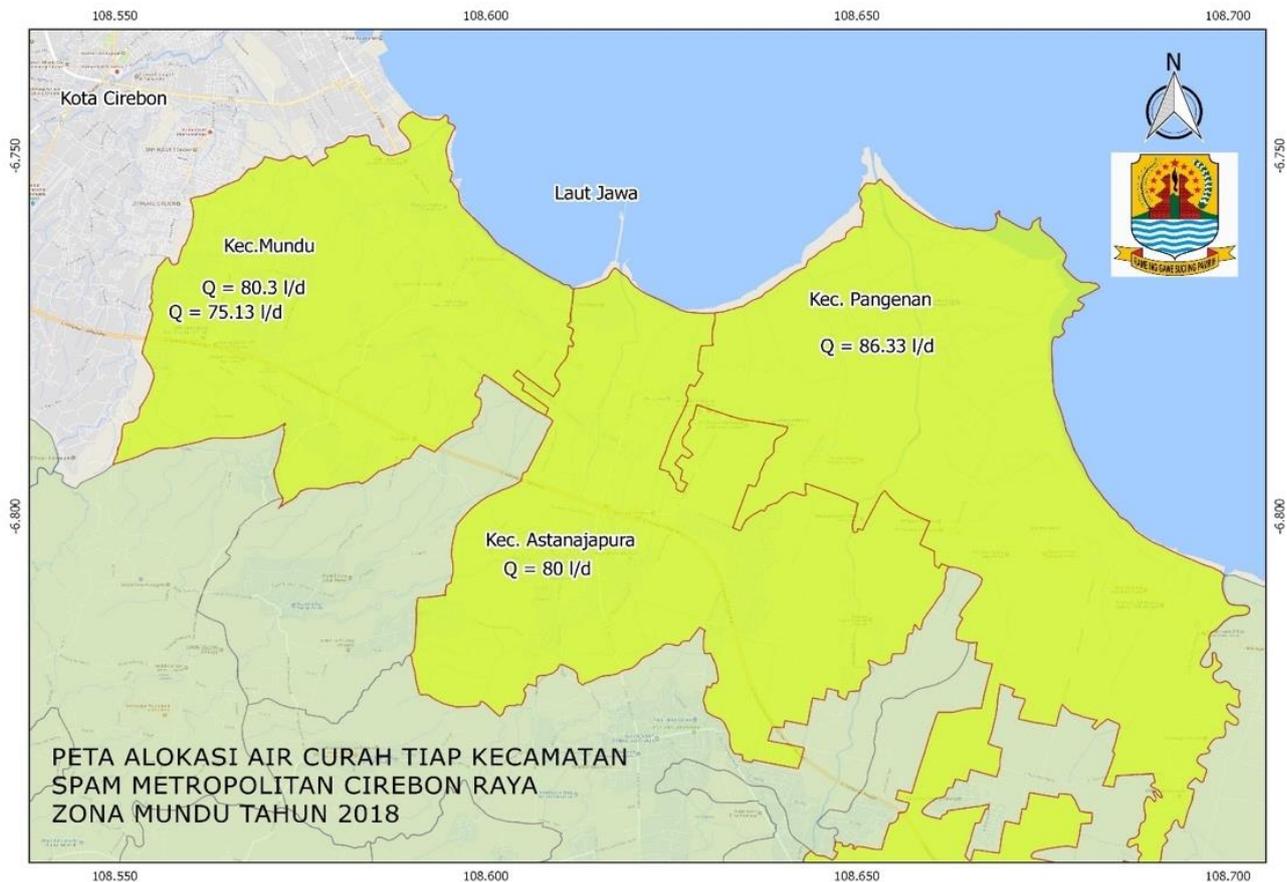


Gambar 4.13 Peta Kondisi Air Tanah di Kabupaten Cirebon

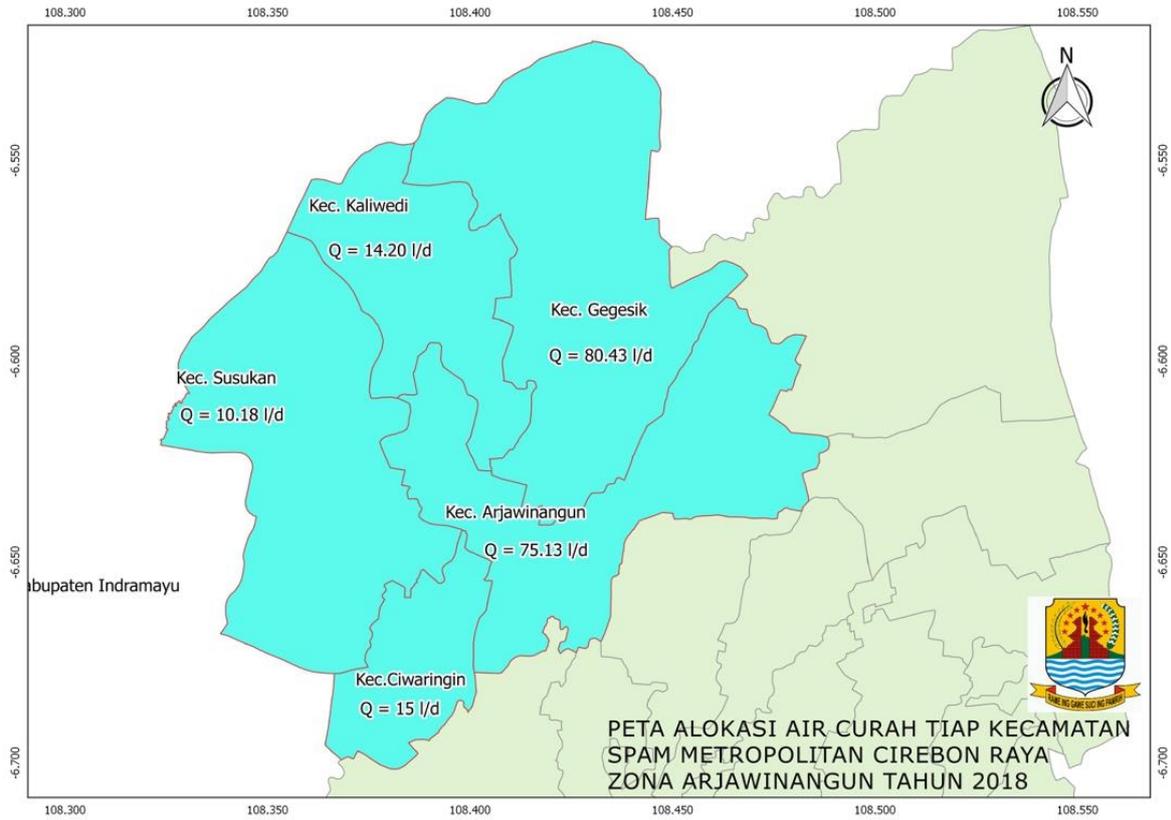
Sumber daya air disalurkan kepada warga dan pengguna melalui dua cara, yaitu PDAM dan irigasi. Pengguna PDAM adalah jenis pelanggan rumah tangga dengan persentasenya mencapai 96,37% atau sebanyak 32.254 rumah tangga. Pelanggan kedua terbanyak berjenis sosial yang mencapai 1,45% atau sebanyak 484 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit adalah dari jenis industri dengan persentase sebesar 0,01% atau sebanyak 2 pelanggan.

Pengaliran air melalui irigasi di Kabupaten Cirebon dibagi menjadi 2 jenis: teknis dan non-teknis (Sederhana). Jalur irigasi teknis, baik primer maupun sekunder, yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 70 kilometer, sedangkan yang dalam kondisi rusak ringan/berat adalah sepanjang 11 kilometer. Untuk jalur non-teknis, saluran irigasi dalam kondisi baik ada sepanjang 29 kilometer, sedangkan yang berada dalam kondisi rusak ringan/berat sepanjang 7 kilometer. Jalur irigasi di Kabupaten Cirebon diatur oleh 85 unit bangunan irigasi dan menyokong operasional sawah seluas 10.103 Hektar.

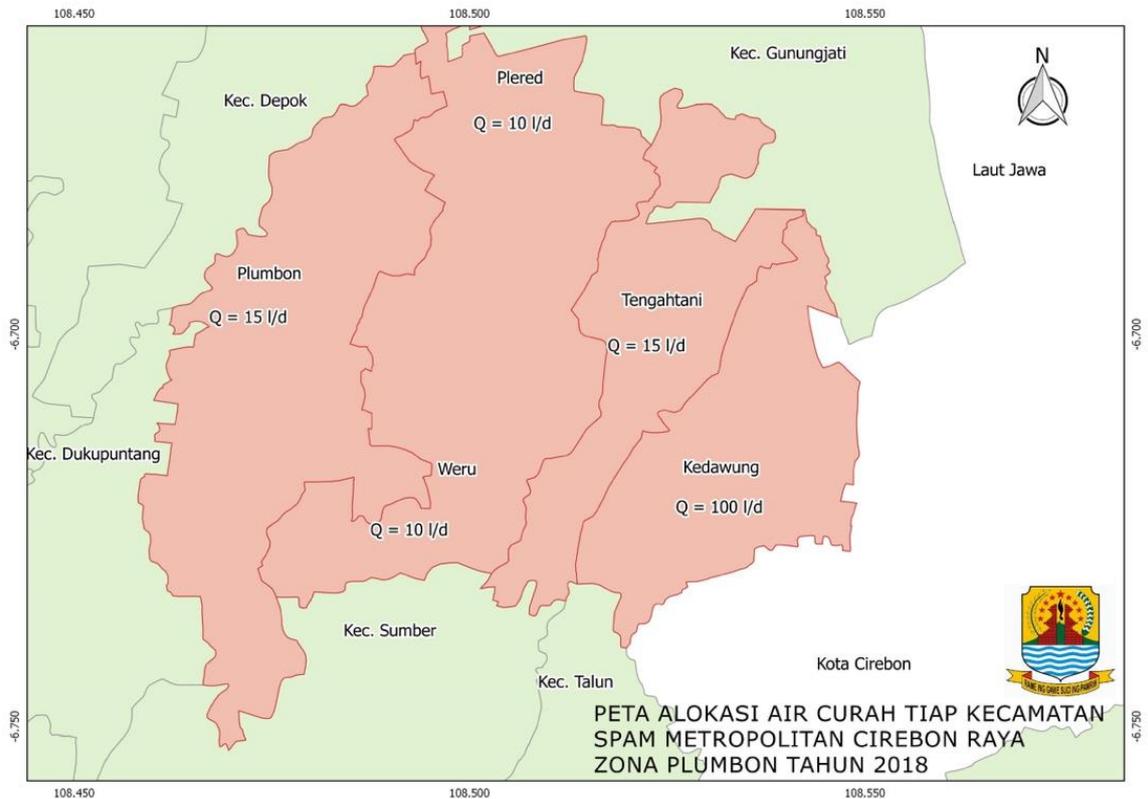
Kabupaten Cirebon sedang menyusun rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibagi menjadi 3 zonasi: Mundu, Arjawinangun, dan Plumbon. Peta ketersediaan air curah di tiap kecamatan yang dibagi per tiga zonasi SPAM tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.14 hingga Gambar 4.16.



Gambar 4.14 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah di Zona Mundu



Gambar 4.15 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Arjawinangun



Gambar 4.16 Peta Lokasi Ketersediaan Air Curah Zona Plumbon

Perhitungan alokasi kebutuhan air per kecamatan (dibagi per tiap zonasi), diambil dari Kajian SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Zonasi	Proyeksi Kebutuhan Air s/d 2034	Alokasi Kebutuhan Air	Total Kebutuhan per Zona
1	Mundu	Mundu	153 L/det	135 L/det	320 L/det
2	Pangenan	Mundu	89 L/det	80 L/det	
3	Astanajapura	Mundu	122 L/det	105 L/det	
4	Plumbon	Plumbon	120 L/det	105 L/det	435 L/det
5	Weru	Plumbon	111 L/det	95 L/det	
6	Plered	Plumbon	86 L/det	75 L/det	
7	Tengahtani	Plumbon	62 L/det	55 L/det	
8	Kedawung	Plumbon	118 L/det	105 L/det	
9	Arjawinangun	Arjawinangun	L/det	L/det	L/det
10	Ciwaringin	Arjawinangun	L/det	L/det	
11	Gegesik	Arjawinangun	L/det	L/det	
12	Kaliwedi	Arjawinangun	L/det	L/det	
13	Susukan	Arjawinangun	L/det	L/det	

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Berdasarkan tabel alokasi kebutuhan air dan data air curah yang tersedia, jelas bahwa pada kondisi sekarang hanya sekitar 30% kebutuhan air yang mampu dipenuhi di Kabupaten Cirebon. Untuk mengatasi isu tersebut, sedang dilakukan studi kelayakan untuk mensuplai sisa kebutuhan air dari Bendungan Jatigede, dengan debit sebesar 900 liter/detik yang akan sepenuhnya beroperasi pada tahun 2030. Kajian pemenuhan kebutuhan air dari Bendungan Jatigede ini diperlukan karena kondisi air tanah Kabupaten Cirebon sendiri dinilai kurang layak untuk konsumsi harian. Berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, air tanah di Kabupaten Cirebon masih bersifat payau sampai dengan kedalaman 150 meter. Maka dari itu, perancangan SPAM Jatigede ini diharapkan mampu menyelesaikan isu tersebut.

4.3.2.4 Sumber Daya Manusia

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 2.226.001 jiwa dengan sebaran penduduk yang tidak merata di wilayahnya. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling besar adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk 88.255 jiwa, sedangkan kecamatan yang penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk sebesar 28.501 orang. Rincian kependudukan Kabupaten Cirebon per Kecamatan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Rincian Kependudukan per Kecamatan di Kabupaten Cirebon (2012-2017)

No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Waled	58.158	59.771	57 885	58.428	54.034
2.	Pasaleman	28.217	28.610	27 465	28.501	26.954
3.	Ciledug	45.644	45.735	46 454	45.508	45.445
4.	Pabuaran	37.280	37.834	38 218	35.919	35.757
5.	Losari	63.266	64.041	61 034	60.687	58.866
6.	Pabedilan	60.970	60.970	56 404	61.314	53.144



No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
7.	Babakan	76.699	73.055	69 154	72.461	66.412
8.	Gebang	64.357	65.363	63 912	65.171	62.618
9.	Karangsembung	37.786	37.538	38 105	37.962	36.373
10.	Karangwareng	31.044	30.607	29 267	30.849	28.341
11.	Lemahabang	54.979	54.678	57 114	55.046	53.073
12.	Susukan Lebak	40.804	40.804	41 026	41.719	40.282
13.	Sedong	43.760	44.465	43 397	44.626	40.222
14.	Astanajapura	79.468	79.732	84 297	79.573	75.666
15.	Pangenan	44.897	45.065	49 529	45.090	43.868
16.	Mundu	73.499	74.352	83 766	73.715	72.513
17.	Beber	41.498	43.595	40 108	41.559	41.555
18.	Greged	57.706	57.501	57 609	61.211	54.736
19.	Talun	70.219	71.019	72 709	69.409	66.397
20.	Sumber	86.062	86.605	91 181	88.255	91.204
21.	Dukupuntang	63.145	64.793	68 483	64.887	63.368
22.	Palimanan	62.873	63.420	61 894	62.282	61.470
23.	Plumbon	78.303	76.605	82 186	74.999	77.352
24.	Depok	65.533	66.734	62 992	64.474	62.802
25.	Weru	63.927	64.451	71 749	63.900	68.477
26.	Plered	56.196	56.346	57 561	51.115	52.642
27.	Tengah Tani	40.686	41.553	45 495	39.021	58.670
28.	Kedawung	66.916	67.572	70 204	56.462	42.701
29.	Gunung Jati	85.210	85.537	88 035	75.737	78.508
30.	Kapetakan	59.362	62.212	56 805	57.882	53.891
31.	Suranenggala	47.197	47.416	45 318	44.422	42.421
32.	Klangenan	52.119	50.207	56 541	54.382	51.020
33.	Jamblang	41.636	40.636	38 779	38.801	38.307
34.	Arjawinangun	70.170	71.759	70 151	63.055	67.557
35.	Panguragan	51.356	52.313	47 305	47.215	42.251
36.	Ciwaringin	40.711	41.200	43 533	34.281	36.144
37.	Gempol	47.704	47.993	48 506	46.795	44.870
38.	Susukan	75.640	77.811	68 862	69.779	62.429
39.	Gegesik	81.428	81.822	77 099	77.115	67.967
40.	Kaliwedi	43.086	44.882	39 675	42.394	39.270
Jumlah			2.289.511	2.306.602	2.245.895	2.159.577

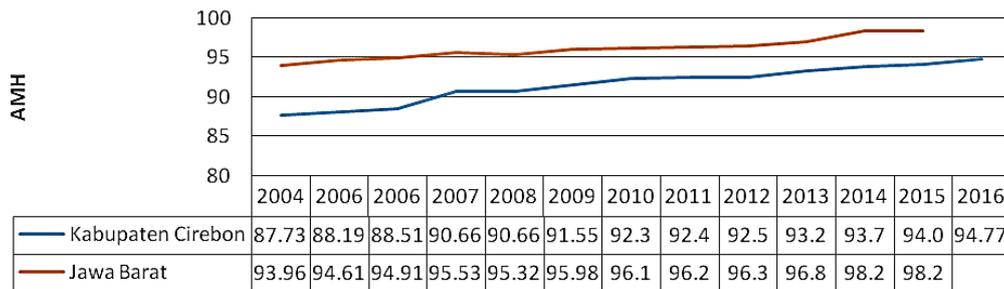
Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan kenaikan dengan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) antara tahun 2010 dan 2017 sebesar 0,98% per tahun.

Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian pendidikan, atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Merujuk pada indikator IPM, bidang pendidikan memiliki dua indikator utama yaitu Angka Melek Huruf (AMH) atau tingkat literasi dan Rata-Rata Lama Sekolah

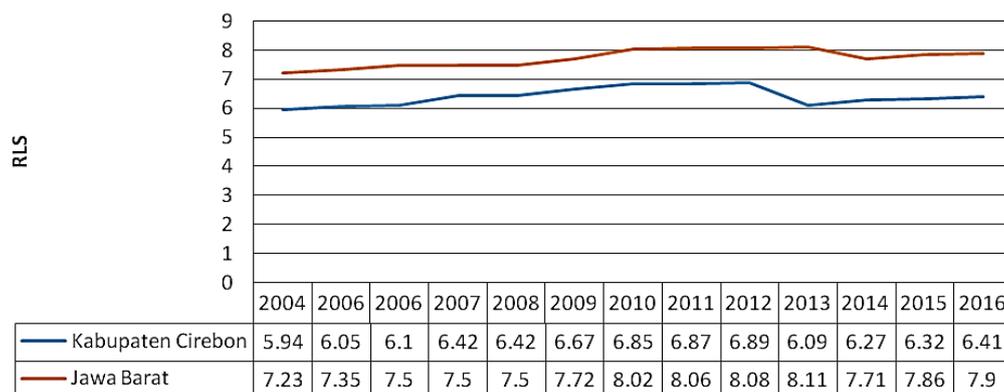
(RLS). Indikator AMH menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam mewujudkan kapasitas sumber daya manusia berkualitas. Berdasarkan data BPS pada kurun waktu tahun 2010-2016, capaian AMH masyarakat Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010, capaian AMH sebesar 87,73% dan pada tahun 2016 angkanya mencapai 94,77%. Hal ini berarti masih menyisakan 5,33% penduduk usia 15 tahun keatas yang masih berstatus buta huruf. Peningkatan capaian AMH menjadi hasil dari dukung berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada upaya pemberantasan buta huruf. Namun demikian, capaian AMH Kabupaten Cirebon masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4.17 Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)

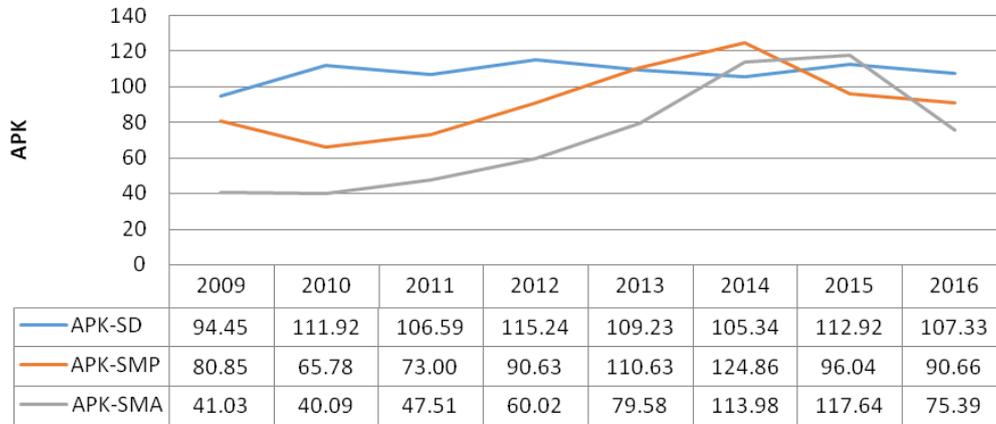
Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah durasi rata-rata tahun penduduk mencapai jenjang pendidikan formal tertinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia semakin baik. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010-2016 capaian RLS mengalami kenaikan dari 6,37 tahun pada 2015 menjadi 6,41 tahun pada 2016 atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas VII. Meskipun demikian, capaiannya masih di bawah capaian RLS Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun berdampak positif bagi peningkatan pendidikan penduduk Kabupaten Cirebon.



Gambar 4.18 Capaian Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2004-2016)

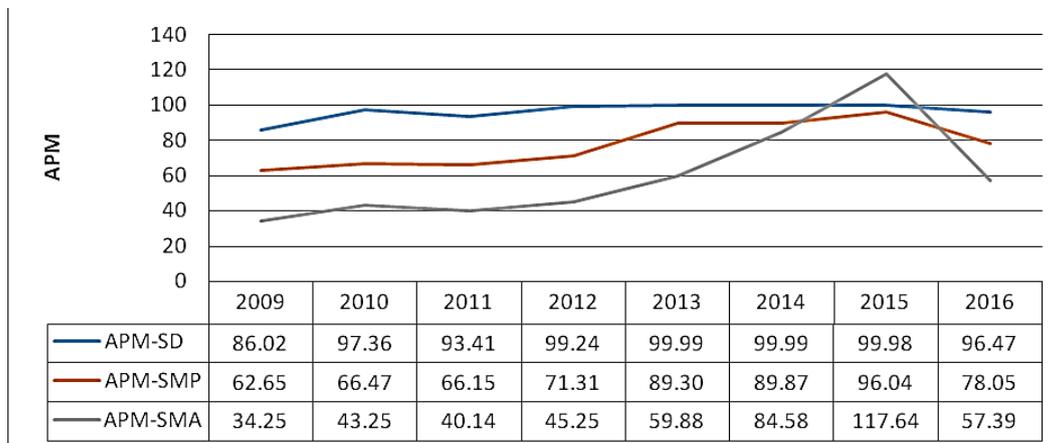
Namun demikian, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa keberlangsungan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga perlu adanya komitmen dan dukungan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika kebijakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD dan menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi aspek sosial dan budaya di lingkungan masyarakat tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan, maka

peningkatan jenjang pendidikan masyarakat kurang optimal. Kendala yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat antara lain bahwa anak lebih difungsikan untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, anak tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensinya, angka partisipasi murni semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan



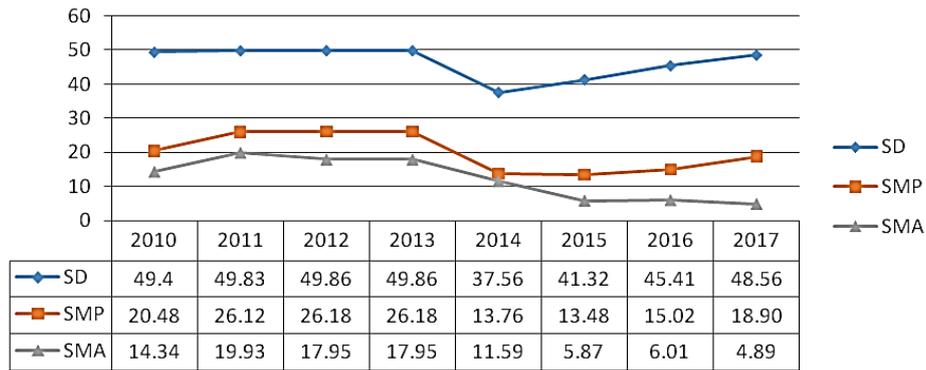
Gambar 4.19 Capaian Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016)

Berdasarkan data BPS tahun 2009-2016, APM pada setiap jenjang pendidikan semakin meningkat. Pada tahun 2009, APM jenjang SD sebesar 86,02% menjadi 96,47% pada tahun 2016. Pada tahun 2009, APM jenjang SMP sebesar 62, 65% meningkat menjadi 78,05% pada tahun 2015. Pada 2009, APM jenjang SMA sebesar 34,25% meningkat menjadi 57,39% pada tahun 2015.



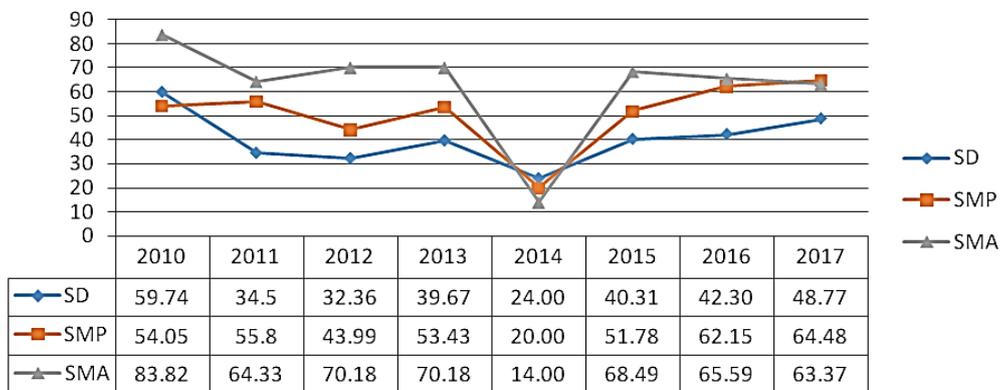
Gambar 4.20 Capaian Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP, dan SMA (2009-2016)

Adapun rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 angkanya berfluktuatif, penurunan kualitas rasio sekolah terdapat pada jenjang SMA yang pada tahun 2017 angka nya semakin kecil menjadi 4,89 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah SMA. Untuk tingkat SD, rasio sekolah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 45,41 menjadi 48,56 sekolah per 10.000 penduduk usia SD.



Gambar 4.21 Capaian Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (2010-2014)

Untuk rasio guru per murid jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelas, capaian angka-angka pada tabel dibawah ini.



Gambar 4.22 Capaian Rasio Guru Terhadap Murid (2010-2014)

4.3.2.5 Aspek Penguasaan Teknologi

Sumber daya teknologi ditentukan oleh jumlah dan kualitas institusi pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi. Institusi pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban berorientasi teknologi. Dengan demikian, kualitas sumber daya teknologi ditentukan oleh keberhasilan institusi pendidikan dalam melatih sumber daya manusianya. Berikut adalah jumlah institusi pendidikan di Kabupaten Cirebon dalam kurun dua tahun terakhir dari level sekolah dasar hingga sekolah menengah atas:

Tabel 4.21 Data Institusi Kependidikan Kabupaten Cirebon

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid (Ribuan Orang)		Jumlah Guru (Ribuan Orang)		Rasio Murid-Guru	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SD	923	925	118	199	5,2	8,8	22,7	22,6
Madrasah Ibtidaiyah	156	156	27	27	1,8	1,7	15	15,9
SMP	186	191	45	78	2,6	4,1	17	19
Madrasah Tsanawiyah	120	120	33	33	2,7	2,7	12,2	12,2
SMA	45	47	18	23	1,2	1,2	15	19
SMK	107	108	36	50	2,4	2,4	15	20,9

Adapun untuk pendidikan level universitas, sumber daya teknologi di Kabupaten Cirebon bisa memanfaatkan berbagai universitas unggulan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat terdapat empat perguruan tinggi negeri (PTN) besar yang memiliki sejumlah pusat penelitian, yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjajaran. PTN-PTN tersebut memiliki fokus dengan kekhasan penelitian masing-masing. Adapun universitas dan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah:

Tabel 4.22 Universitas dan Sekolah Tinggi di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Universitas	Jenis Sekolah & Perguruan Tinggi
1.	IAIN Syekh Nurjati	PTN
2.	Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati)	PTS
3.	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)	PTS
4.	Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)	PTS
5.	Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon (UNU)	PTS
6.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'Had Aly	Sekolah Tinggi
7.	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Invada	Sekolah Tinggi
8.	Sekolah Tinggi YPIB Cirebon	Sekolah Tinggi
9.	STIKES Cirebon	Sekolah Tinggi
10.	STIKES Mahardika Cirebon	Sekolah Tinggi
11.	STMIK CIC	Sekolah Tinggi
12.	STMIK IKMI Cirebon	Sekolah Tinggi
13.	Politeknik Kesehatan Yakesbi	Politeknik
14.	Akademi Analisis Kesehatan An-Nasher	Akademi
15.	Akademi Bank Yasmi, Cirebon	Akademi
16.	Akademi Keperawatan Dharma Husada	Akademi
17.	Akademi Keperawatan Muhammadiyah	Akademi
18.	Akademi Keperawatan Buntet Pesantren	Akademi
19.	Akademi Maritim Cirebon	Akademi
20.	Akademi Maritim Suaka Bahari	Akademi
21.	Akademi Pariwisata Yasmi	Akademi
22.	Akademi Perdagangan Widya Dharma	Akademi
23.	AMIK Bumi Nusantara	Akademi
24.	ASM Bumi Nusantara	Akademi

Pengembangan sumber daya teknologi juga didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki pemerintah. Dengan mengandalkan strategi *technology push* dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, industri dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik atau bahkan membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat. Tabel berikut berisikan sub-unit pengembangan, balai besar penelitian, dan balai penelitian yang berada di Jawa Barat, yang memiliki potensi kolaborasi dengan Kabupaten Cirebon untuk pengembangan sumber daya teknologinya.

Tabel 4.23 Balai Penelitian Pemerintah di Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Balai	Lokasi
1.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Bandung
2.	Sub Unit Pengembangan IKM Persepatuan	Bandung
3.	Sub Unit Pengembangan TPT	Majalaya
4.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Sukabumi
5.	Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Bogor
6.	Sub Unit Pengembangan IKM Perakayuan	Sumedang
7.	Sub Unit Pengembangan Penyamakan Kulit	Garut
8.	Sub Unit Pengembangan Kerajinan	Tasikmalaya
9.	Sub Unit Pengembangan Rotan	Cirebon
10.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian	Bogor
11.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin	Bandung
12.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil	Bandung
13.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik	Bandung
14.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa	Bandung
15.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	Lembang
16.	Balai Penelitian Hortikultura	Lembang
17.	Balai Penelitian Perikanan Air Tawar	Cikampek
18.	Balai Penelitian Ternak	Bogor
19.	Balai Penelitian Veteriner	Bogor
20.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Lembang
21.	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Bogor
22.	Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan	Bogor
23.	Balai Penelitian Tanaman Padi	Cikampek
24.	Balai Penelitian Tanah dan Agroklimat	Bogor
25.	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian	Bogor
26.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Bogor
27.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri	Bogor

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

4.3.2.6 Aspek Keuangan

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon. Misi BPPT adalah untuk mencapai “Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat tahun 2019. Adapun misinya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan dan meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal.

Sumber daya pembiayaan yang tersedia dapat direpresentasikan oleh jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari suatu daerah. Jumlah penanaman modal yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 4.24 Rincian Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon

No	Mode Penanaman Modal	Tahun 2016	Tahun 2017
1	PMA	7	9
2	PMDN	526	529
Total		533	538

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Jumlah perizinan yang dilayani BPPT sampai saat ini mencapai 37 jenis perizinan dan jumlah perizinan yang telah diterbitkan tahun 2016 berjumlah 9.151SK perizinan dan tahun 2017 berjumlah 8.789 SK perizinan. Nilai total investasi yang telah ditanamkan di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sebesar Rp. 698.246.329.548,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 846.160.215.950,00. Jumlah peningkatan investasi dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 adalah sebesar Rp 147 Miliar.

Untuk tingkat pelayanan perizinan di BPPT dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2016 menjadi 81,71 dan tahun 2017 menjadi 81,24 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor.

Nilai investasi tahun 2016 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan prosentase investasinya yang mencapai 57,98% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor industri pengolahan 29,71% dan diikuti oleh sektor real estate sebesar 4,06%.

Tabel 4.25 Indikator Iklim Investasi di Kabupaten Cirebon (Proyeksi)

No	Indikator Iklim Investasi	Tahun		% Naik/(Turun)
		2016	2017	
1.	Perda Perizinan	9	9	0
2.	Penerbitan Perizinan	9.151	8.789	(3,96)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	81,71	81,24	(0,58)
4.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	4	4	0
5.	Retribusi perizinan (jutaan)	7.460,17	7.216,67	(3,26)
6.	Nilai Investasi (Jutaan)	698.246	846.160	21,18
7.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)			
	Pertanian	238.055	5.338	(2,327)
	Pertambangan	0	0	0
	Industri Pengolahan	187.752	251.435	636,83
	Pengadaan Listrik dan Gas	66.386	400	(659,86)
	Pengadaan Air	1.400	300	(11)
	Bangunan/Konstruksi	29.193	8.672	(205,21)
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	30.395	490.679	4.502,84
	Transportasi dan Pergudangan	49.384	8.155	(412,29)
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.700	2.670	(0,3)
	Informasi dan Komunikasi	6.346	14.131	77,85
	Jasa Keuangan	300	350	0,5
	Real Estate	60.225	34.400	(258,25)
	Jasa Perusahaan	0	8.700	87
	Jasa Pendidikan	9.100	11.539	24,39
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.270	6.506	(47,64)
	Jasa Lainnya	5.740	2.882	(28,58)

Sumber: Pengolahan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Cirebon, 2020

Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan sebesar Rp.7.216.670.595,-. Jumlahnya berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp. 7.460.171.318,-. Jenis-jenis retribusi perizinan yang diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO), izin trayek, izin usaha perikanan.

Sektor yang nilai investasinya meningkat di tahun 2017 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan peningkatan 4.502,84%. Adapun sektor yang mengalami penurunan investasi adalah sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan jasa lainnya.

4.3.3 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 65,544,656.80 atau naik sebesar Rp. 20,082,717.50 dari tahun 2018. Nilai PDRB ini selalu meningkat dari tahun 2015. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 33,723,897.20 atau naik sebesar Rp. 1,563,785.80 dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampe dengan tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.

Tabel 4.26 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,708,696.50	6,339,473.40	6,612,585.40	7,168,887.20	7,476,527.80
B	Pertambangan dan Penggalian	537,137.70	527,989.10	517,407.10	532,939.40	520,610.50
C	Industri Pengolahan	7,612,342.90	8,321,347.20	8,903,176.00	9,521,940.70	10,008,476.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,289.40	69,693.90	86,440.30	102,524.90	118,888.50
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,463.40	30,189.60	35,868.90	40,886.30	46,933.40
F	Konstruksi	4,228,249.90	4,498,753.00	4,817,135.70	5,264,542.30	5,783,085.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,839,375.70	6,146,252.80	6,608,835.20	7,067,680.60	7,592,614.70
H	Transportasi dan Pergudangan	2,835,580.90	3,131,582.60	3,432,642.20	3,751,418.10	4,175,481.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,241,906.40	1,330,941.20	1,484,463.40	1,556,478.40	1,714,274.90
J	Informasi dan Komunikasi	806,878.80	893,196.30	988,956.50	1,063,949.80	1,122,896.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,212,558.00	1,383,017.60	1,527,545.00	1,686,423.40	1,900,601.40
L	Real Estat	791,055.40	838,145.30	930,497.30	1,022,421.90	1,130,748.30
M,N	Jasa Perusahaan	267,883.30	295,546.30	329,473.70	362,649.20	444,920.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,161,579.90	1,229,691.50	1,298,859.40	1,396,795.80	1,502,244.40
P	Jasa Pendidikan	1,643,578.70	1,806,006.90	2,092,991.40	2,416,186.10	2,841,709.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	648,317.70	733,827.90	814,490.50	896,511.70	988,753.10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,114,765.80	1,265,117.70	1,437,918.10	1,609,703.50	18,175,888.30
Produk Domestik Regional Bruto		35,734,660.40	38,840,772.30	41,919,286.10	45,461,939.30	65,544,656.80

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

**Tabel 4.27 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019
(Juta Rupiah)**

Katagori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,112,437.90	4,360,550.00	4,426,987.70	4,526,469.20	4,487,076.30
B	Pertambangan dan Penggalian	429,908.50	419,365.20	420,748.60	431,174.90	416,880.00
C	Industri Pengolahan	5,689,437.00	6,020,185.20	6,325,533.60	6,651,078.70	6,754,590.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,516.10	47,424.90	51,708.80	52,999.70	56,761.30
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22,399.70	23,582.90	25,400.10	26,569.10	28,362.00
F	Konstruksi	3,361,642.10	3,527,201.20	3,679,254.60	3,936,183.80	4,181,874.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,486,817.70	4,647,956.90	4,853,022.40	5,010,804.60	5,249,185.40
H	Transportasi dan Pergudangan	2,022,859.40	2,172,361.60	2,310,399.20	2,446,409.60	2,683,458.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,009,223.10	1,049,024.00	1,129,847.30	1,160,826.30	1,225,903.60
J	Informasi dan Komunikasi	784,048.00	866,988.20	950,047.60	1,035,692.20	1,103,908.40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	967,279.00	1,061,760.20	1,113,883.10	1,192,733.10	1,297,662.90
L	Real Estat	621,763.60	649,873.80	713,116.50	775,727.30	847,610.70
M,N	Jasa Perusahaan	227,430.10	247,828.20	271,119.60	294,349.70	321,659.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831,800.80	849,610.40	853,013.30	870,708.10	903,402.40
P	Jasa Pendidikan	1,400,599.10	1,488,636.80	1,630,471.50	1,757,892.60	1,984,683.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	565,619.90	615,279.90	663,085.10	711,632.70	794,031.30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,018,473.00	1,101,682.70	1,205,666.80	1,278,859.80	1,386,847.40
Produk Domestik Regional Bruto		27,596,255.00	29,149,312.10	30,623,305.80	32,160,111.40	33,723,897.20

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.3.4 Kondisi Jaringan Prasarana Pendukung Industri

4.3.4.1 Kondisi Jaringan Listrik

Layanan dan jaringan listrik di Kabupaten Cirebon dilayani oleh PT. PLN (Persero) area Cirebon. Pelanggan PT. PLN terdiri dari 6 (enam) jenis pelanggan, yaitu: sosial, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan multiguna, total jumlah pelanggan mencapai 4.421.848. lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28 Jumlah dan Jenis Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

No.	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	KWh	Rp/KWh
1	Sosial	94.725	16.586.685	10.814.069.794
2	Rumah Tangga	4.182.804	480.096.085	288.257.577.968
3	Bisnis	112.249	54.822.386	66.347.577.968
4	Industri	7.183	534.431.901	427.131.944.876
5	Pemerintah	17.507	16.362.739	17.652.260.002
6	Multiguna	7.380	17.879.857	24.903.748.549
Jumlah		4.421.848	1.120.179.653	835.107.179.157

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2015

4.3.4.2 Kondisi Jaringan Air Minum

Pada tahun 2016, PDAM Kabupaten Cirebon mampu mendongkrak nilai penjualannya disamping jumlah pelanggan yang terus meningkat. Total pelanggan yang terdaftar di PDAM Kabupaten Cirebon sebanyak 38.513 pelanggan (kategori rumah tempat tinggal), dengan wilayah pelayanan sebanyak 146 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.29 Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa Terlayani	Pelanggan
1	Waled	6	555
2	Pasaleman	-	-
3	Ciledug	1	109
4	Pabuaran	2	12
5	Losari	8	258
6	Pabedilan	-	-
7	Babakan	3	34
8	Gebang	6	270
9	Karangsembung	3	10
10	Karangwereng	-	-
11	Iemahabang	1	295
12	Susukan Lebak	-	-
13	Sedong	-	-
14	Astanajapura	-	-
15	Pangenan	-	-
16	Mundu	-	-
17	Beber	6	2,155
18	Greged	1	191
19	Talun	6	2,983
20	Sumber	5	2,694
21	Dukupuntang	3	164
22	Palimanan	8	570
23	Plumbon	2	555
24	Depok	4	320
25	Weru	-	-
26	Plered	2	59
27	Tengah Tani	1	44
28	Kedawung	-	-
29	Gunungjati	14	2,404
30	Kapetakan	10	3,625
31	Suranenggala	9	1,412
32	Klangenan	3	727
33	Jamblang	4	653
34	Arjawinangun	7	5,202
35	Panguragan	9	4,895
36	Ciwaringin	5	1,193
37	Gempol	4	1,725
38	Susukan	-	-
39	Gegesik	12	4,887
40	Kaliwedi	1	512
Jumlah		146	38,513

Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

4.3.4.3 Kondisi Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan limbah di wilayah Kabupaten Cirebon masih bercampur dengan sistem pembuangan air hujan. Dimana pembuangan air limbah biasanya disebut dengan *sistem rioolering* dan berbeda dengan sistem pembuangan air hujan yang disebut dengan sistem Drainase, sehingga penanganan sistem pembuangan air limbah di wilayah perencanaan merupakan kombinasi antara *rioolering* dengan sistem *drainase*.

4.3.4.4 Kondisi Jaringan Drainase

Pada umumnya sistem jaringan drainase wilayah Kabupaten Cirebon merupakan sistem drainase tercampur. Pada saat ini air limpasan hujan dan air limbah domestik masyarakat dialirkan dalam satu saluran (tercampur) dan juga sistem drainase di wilayah Kabupaten Cirebon masih mengandalkan jaringan drainase alam yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir di wilayah perencanaan.

Dengan bertambahnya luas lahan yang dipergunakan sebagai lahan untuk membangun perumahan, industri, sarana dan prasarana, maka daya serap tanah semakin berkurang untuk menahan air hujan, dimana ketinggian muka air dan debit sungai cepat terpengaruh oleh jumlah intensitas hujan.

Hal tersebut mengakibatkan daya tampung sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung aliran air yang pada akhirnya daerah-daerah rendah yang dilalui oleh aliran sungai atau aliran saluran drainase akan terkena luapan yang mengakibatkan terjadi genangan dan banjir, selain itu ada juga beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan banjir di wilayah perencanaan yaitu :

- ❑ Pendangkalan saluran akibat endapan lumpur yang berkepanjangan, sehingga akan memperkecil penampang saluran. Dari hal tersebut air yang dapat dialirkan melalui saluran menjadi berkurang, dan akibatnya air menjadi meluap keluar badan saluran akhirnya terjadilah banjir;
- ❑ Terjadi sedimentasi dan hambatan sampah pada sebagian besar saluran drainase yang ada. Sehingga aliran airnya terhambat pada musim hujan;
- ❑ Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah hulu sungai, sehingga aliran permukaan “ Run Off “ yang terjadi semuanya masuk ke sungai dan tidak dapat meresap ke dalam tanah.

4.3.4.5 Kondisi Sistem Persampahan

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 baru meliputi 27 Kecamatan dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari setiap Kecamatan baru terlayani kurang lebih 8%-21% yaitu lokasi yang terletak dipinggir jalan, daerah perkotaan, pasar, perusahaan, industri dan lain-lain. Daerah-daerah pelayanan persampahan meliputi Kecamatan Gegesik, Arjawinangun, Palimanan, Klangeran, Plumbon, Dukupuntang, Weru, Sumber, Astanajapura, Cirebon Utara, Gunungjati, Mundu, Lemahabang, Karangsembung, Losari, Ciledug, Babakan, Pangenan, Tengah tani, Pabuaran, Gebang, Jamblang, Gempol, Kedawung, Talun dan Depok.

Total volume timbunan sampah dan tingkat pelayanan persampahan yang baru terlayani 17,5 % - 70 % diantaranya : Perumahan, Pemukiman, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar, Industri, Hotel, Restoran, Perusahaan, Kantor dan sebagainya dan sebagainya. Pola pengelolaan sampah yang berkembang saat ini di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Sistem individual langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* dengan mendatangi sumber sampah, dimana sampah tersebut akan diangkut dengan menggunakan truk biasa atau dump truk.

2. Sistem individual tak langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan secara *door to door* yang dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak serta truk kecil dan sampah yang ada ditampung di tempat penyimpanan sementara yang berupa container kapasitas 6 m³, dan kemudian sampah yang terkumpul tersebut dipindahkan ke TPA
3. Sistem komunal yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah dan dibuang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sebagai tempat penampungannya berupa container, kemudian di buang ke TPA. Selain itu dilakukan penanganan secara langsung oleh para penghasil sampah, yaitu dengan dibakar atau ditimbun pada lahan-lahan kosong.

4.4 Perkembangan Pemanfaatan Ruang KPI di Kabupaten Cirebon

4.4.1 Kecenderungan Perkembangan Kegiatan Industri

Sejumlah kegiatan sektor perindustrian berkembang di Kabupaten Cirebon baik sejak lama secara tradisional maupun mengikuti arah kebijakan dan perkembangan regional yang ada. Sub-sektor industri yang berkembang antara lain pengolahan ikan, garam, rotan, pakan ternak, perawatan kapal, bahan galian non logam, hingga industri pengolahan makanan dan tekstil dalam skema industri kecil dan menengah (SIKM)

4.4.1.1 Industri Pengolahan Ikan

Kabupaten Cirebon memiliki potensi industri pengolahan ikan yang sangat tinggi, mengingat Kabupaten Cirebon memiliki garis pantai yang relatif panjang. Walaupun demikian, potensi tersebut belum termaksimalkan akibat belum dioptimalkannya PPI yang telah ada, di antaranya PPI Gebang. Alasan utama PPI Gebang belum dapat dioptimalkan adalah karena adanya sedimentasi sehingga perahu nelayan tidak bisa berlabuh.

Industri pengolahan ikan sangat bergantung pada jaminan konsistensi pasokan bahan baku. Hal tersebut sulit untuk dicapai karena kegiatan nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca di perairan utara. Selain itu, saat ini terdapat kecenderungan penurunan hasil penangkapan ikan.

Ketidakpastian pasokan ikan untuk bahan baku industri dapat disiasati dengan ditumbuhkannya daerah-daerah budidaya ikan laut (*offshore aquaculture*) maupun penangkaran ikan tawar. Budidaya ikan laut dan penangkaran ikan tawar lebih dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan cuaca dibandingkan dengan penangkapan ikan laut. Dengan demikian terdapat kaitan antara sumber bahan baku dan industri pengolahan ikan.

Industri besar pengolahan ikan masih mengandalkan bahan baku impor karena hanya sedikit tangkapan nelayan lokal yang memenuhi persyaratan. Harus ada sinergitas antara nelayan dan industri agar penyerapan ikan sepenuhnya didapat dari lokal dengan demikian terdapat penambahan nilai ekonomi bagi nelayan.

Saat ini industri pengolahan ikan yang ada di kab Cirebon di antaranya adalah industri pengolahan ikan asin, PT Suritani Pemuka, dan PT Sumber Laut Bengindo. Khusus untuk industri pengolahan ikan asin, salah satu yang menjadi penghambat pertumbuhan adalah tidak stabilnya harga garam dan cuaca untuk melakukan pengeringan.

4.4.1.2 Industri garam

Seperti industri pengolahan ikan, industri garam di Kab. Cirebon memiliki potensi yang sangat tinggi karena garis pantai yang panjang. Di sisi lain, kebutuhan akan garam di dalam negeri sangat tinggi. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam di tahun 2018 diperkirakan sebanyak 4,5 juta ton, dengan perincian: kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton dan kebutuhan garam konsumsi sekitar 800.000 ton. Sayangnya, dari angka tersebut, garam produksi dalam negeri hanya mampu memasok ke industri sebesar 1,6 juta ton.

Pertumbuhan industri garam di Kab. Cirebon belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri garam adalah tidak stabilnya harga jual. Pada musim kemarau, cuaca sangat memungkinkan untuk melakukan penguapan sehingga produksi garam sedang pada puncak-puncaknya. Puncak produksi garam yang terjadi serentak menyebabkan harga garam turun drastis sekitar Rp. 800 per kg. Hal ini diperparah dengan keadaan kebanyakan petani yang tidak memiliki gudang sehingga tidak bisa menyimpan garam lalu menjualnya pada saat harga kembali normal (musim hujan).

Harga jual yang rendah salah satunya diakibatkan dari rendahnya kualitas garam yang dihasilkan. Walaupun kini terdapat teknologi ulir filtrasi, kebanyakan petani garam masih melakukan produksi garam dengan teknik tradisional. Hal ini sangat disayangkan mengingat teknologi ulir filtrasi dapat meningkatkan kandungan NaCl menjadi di atas 97%.

Selain dengan menunggu harga garam menjadi stabil kembali, peningkatan harga jual garam dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan nilai ekonomis garam. Hal itu dilakukan dengan cara memproduksi produk turunan garam seperti air bidden dan garam spa.

Di sisi lain, pada musim hujan harga garam akan meningkat drastis hingga sampai Rp 2500 per kg. Hal tersebut akan membuat industri pengolahan garam terseok-seok. Bahan baku yang mahal akan mengurangi profit dan akan menghambat laju produksi industri pengolahan garam. Fluktuasi harga garam perlu diredam terlebih lagi yang menikmati tingginya harga bahan baku garam bukanlah petani garam.

Lahan tambak garam terluas di Kabupaten Cirebon ada di Kecamatan Pangenan (di Desa Rawaurip dan Desa Bendungan). Dengan luas lahan lebih dari seribu hektar, Kecamatan Pangenan menjadi salah satu wilayah penghasil garam rakyat (krosok) terbesar di Cirebon. Jika dijumlah maka hasil pengolahan garam rakyat lumayan banyak dan diprediksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Cirebon.

4.4.1.3 Industri Bahan Galian Non Logam

Industri bahan galian non logam seperti batu alam, keramik, dan bata merah merupakan salah satu komoditas andalan Kab. Cirebon. Walaupun demikian terdapat beberapa keadaan yang dapat dioptimalkan, di antaranya adalah pengendalian limbah industri.

Limbah industri yang sudah cukup mengganggu masyarakat adalah limbah industri batu alam. Limbah tersebut terbuang ke sungai di mana sungai tersebut merupakan salah satu mata air persawahan dan dijadikan lahan tambak perikanan tawar. Perusahaan industri batu alam perlu dikelompokkan di sebuah kawasan dimana pada kawasan tersebut tersedia pengolahan limbah terpadu. Saat ini pemerintah Kabupaten sudah menyediakan lahan 1 ha untuk relokasi 60-70 industri batu alam di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang. Selain itu industri batu alam berada juga di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber.

Industri keramik dan batu bata hampir setiap tahun mengalami fluktuasi permintaan, harga, dan kemampuan produksi. Beruntung, pada musim kemarau ketika kemampuan produksi batu bata dan keramik sedang pada puncaknya, permintaan terhadap kedua komoditi. Selain itu pengelolaan limbah menjadi masalah penghambat tumbuhnya industri keramik dan batu bata. Oleh karena itu pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) plus rumah produksi pemanfaatan limbah batu alam (produk bata ringan) di Desa Cipanas.

Di Kabupaten Cirebon terdapat dua kompleks pabrik semen milik PT Indocement Tunggal Prakasa di Palimanan. Pabrik ini sudah berdiri di Gunung kapur Kromong dari tahun 1984 dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

4.4.1.4 Industri Rotan

Bukan rahasia lagi bahwa industri rotan merupakan industri unggulan kab. Cirebon. Industri tersebut sudah mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya. Saat ini industri rotan terancam dari rendahnya regenerasi pengrajin rotan. Anak muda sangat sedikit yang mau berusaha di bidang industri rotan.

Ketersediaan bahan baku juga menjadi kendala bagi tumbuhnya industri rotan. Pemerintah Kabupaten telah berhasil menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah pemda lain untuk memastikan jaminan bahan baku rotan selalu tersedia. Selain itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan baku rotan mentah, Walaupun demikian, masih saja banyak oknum yang masih mengekspor bahan baku rotan mentah dengan dalih yang diekspornya adalah produk rotan setengah jadi.

Saat ini teknologi pengolahan rotan pun dapat terbilang masih minim. Hal tersebut berbeda dengan keadaan industri rotan di Tiongkok. Rencana pemindahan pabrik rotan Tiongkok ke Kab. Cirebon harus dimanfaatkan untuk melakukan transfer teknologi kepada industri rotan yang sudah ada. Salah satunya adalah pusat industri rotan Cirebon yang terletak di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Pusat industri tersebut direncanakan akan menjadi desa wisata rotan.

4.4.1.5 Industri Pakan Ternak

Industri Pakan Ternak Kab. Cirebon dimotori oleh pabrikan besar. Diantara pabrikan tersebut adalah pabrikan besar milik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Sido Agung Agro Prima. Kedua pabrik tersebut menelan investasi sebesar 40 juta USD untuk pabrik milik PT Charoen Pokphand Indonesia dan 650 miliar IDR untuk pabrik milik PT Sido Agung Agro Prima.

Pabrik pakan ternak milik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk resmi beroperasi sejak Januari 2014 dengan kapasitas produksi 20.000 ton pakan ternak per bulan. Lokasi pabrik tersebut berada di jalur pantura, di dekat pintu keluar tol Palimanan-Kanci, Kabupaten Cirebon.

Pabrik milik PT Sido Agung Agro Prima memiliki luas 40 ribu meter persegi. Adapun areal pemasaran dari pabrik ini meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pabrik ini berlokasi di Jl. Raya Cirebon - Losari KM. 16 Desa Rawa Urip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.

Kedua pabrik tersebut masih mengandalkan impor jagung untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Hal ini dapat menjadi kesempatan emas bagi petani jagung di sekitar Cirebon untuk menjual hasil taninya ke pabrik tersebut. Dengan demikian perekonomian petani pun dapat terangkat.

4.4.1.6 Industri Tekstil

Industri tekstil Kab. Cirebon dimotori oleh PT. Embee Plumbon Tekstil dan PT. Plumbon International Textil. Kedua perusahaan tersebut memiliki pabrik yang berada di Kec. Plumbon, Kab. Cirebon dekat pintu Tol Kanci-Palimanan. Yang menjadi sorotan masyarakat terhadap pabrik tekstil tersebut adalah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak terjadi hanya sekali. Dengan demikian K3 di pabrik tekstil perlu ditingkatkan.

4.4.1.7 Industri Perawatan Kapal

Industri Perawatan Kapal di Kab. Cirebon sesungguhnya belum terlalu berkembang. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat potensi industri ini untuk tumbuh sangat tinggi sekali. Diterapkannya asas cabotage - yang mewajibkan muatan domestik diangkut kapal dalam negeri - secara otomatis menggenjot pertumbuhan kapal di dalam negeri. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi potensi bisnis perawatan kapal (docking) di Indonesia.. Berdasarkan data Kemenhub, pertumbuhan jumlah kapal nasional sejak Mei 2005 hingga Desember 2015 naik hingga 167% atau menjadi 16.142 unit kapal.

Ceruk pasar perawatan kapal itu rupanya dilirik beberapa galangan kapal yang berbasis di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya, PT Dok Bahari Nusantara, yang telah membangun fasilitas drydock di kawasan Pelabuhan Cirebon yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Selain membangun kapal baru, PT Dok Bahari Nusantara juga mengerjakan service dan perawatan. Banyak kapal yang perawatan dan service-nya dilakukan oleh PT Dok Bahari Nusantara seperti kapal-kapal tongkang dan kapal milik Pertamina (Persero). Sudiding berharap mendapat kepercayaan pemerintah untuk melakukan perawatan kapal ternak yang home base-nya di Pelabuhan Cirebon setelah menyelesaikan pengiriman dari NTT ke Jakarta. PT Gamatara Trans Ocean Shipyard melihat juga banyaknya permintaan kapal yang ingin melakukan perawatan. Dalam lima tahun terakhir, kapal yang masuk dok terus meningkat hingga 90 persen. Dengan luasan 21.585 meter persegi yang dimiliki, PT Gamatara Trans Ocean Shipyard mampu melakukan perawatan 60 kapal per tahun. Luas area tersebut belum memadai untuk menampung permintaan kapal yang membutuhkan perawatan.

4.4.1.8 Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat sedang mengupayakan adanya sentra-sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, meubel, konveksi, dan usaha lainnya. Adapun komoditi yang mempunyai sentra di Kabupaten Cirebon adalah kerajinan rotan, batik, pakaian jadi, meubelair kayu, batu alam, sandal karet, makanan ringan, emping melinjo dan kerajinan kulit kerang. Sentra dari masing masing komoditi tertera pada Tabel 4.30 .

Tabel 4.30 Sentra IKM Kab. Cirebon

Komoditas	Lokasi Sentra	Komoditas	Lokasi Sentra
Kerajinan Rotan	Kec. Weru	Sandal Karet	Kec. Plumbon
	Kec. Plumbon		Kec. Plered
	Kec. Depok	Makanan Ringan	Kec. Weru
	Kec. Plered		Kec. Kedawung
	Kec. Palimanan		Kec. Tengah Tani
Meubelair Kayu	Kec. Plered		Kec. Plumbon
	Kec. Weru	Emping Melinjo	Kec. Kedawung
	Kec. Depok		Kec. Ciwaringin
	Kec. Dukupuntang		Kec. Gunung Jati



Komoditas	Lokasi Sentra	Komoditas	Lokasi Sentra
Batu Alam	Kec. Palimanan	Kerajinan Kulit Kerang	Kec. Tengah Tani
	Kec. Depok		Kec. Weru
	Kec. Gempol	Pakaian Jadi	Kec. Arjawinangun
	Kec. Dukupuntang		Kec. Sumber
Batik	Kec. Plered		Kec. Weru
	Kec. Tengah Tani	Kec. Susukan	
	Kec. Ciwaringin		

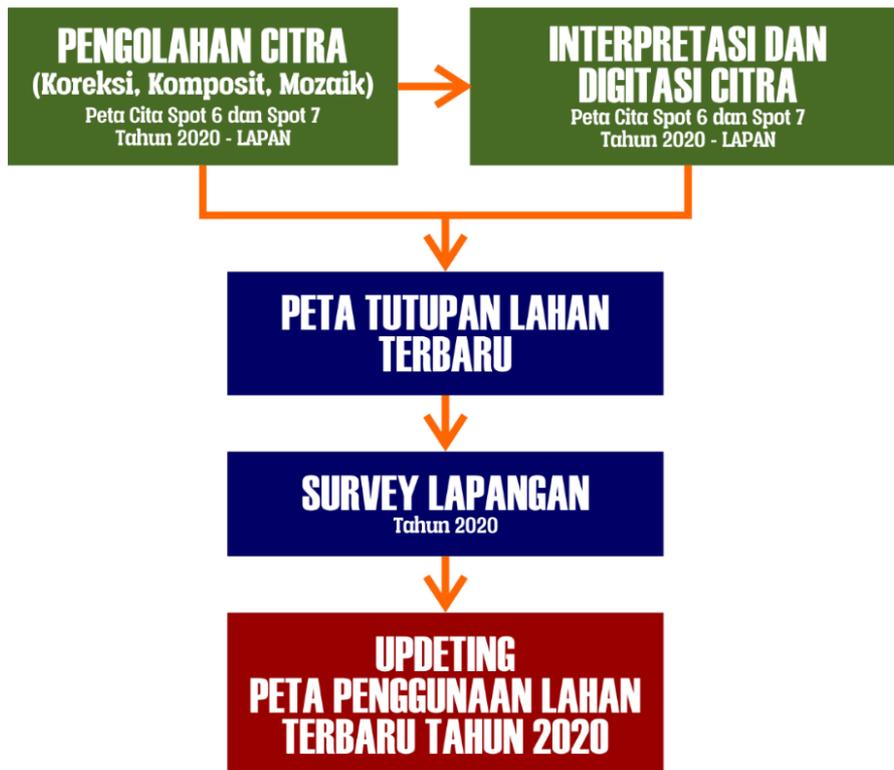
Sumber : Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cirebon, 2020

4.4.2 Penggunaan Lahan Eksisting untuk Kegiatan Industri

Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan eksisting di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, penggunaan lahan terbagi menjadi 44 klasifikasi penggunaan lahan. Total luas lahan mencapai 106.996,93 Ha. Luas lahan terbesar adalah sawah dengan luas mencapai 52.066,98 Ha, atau sekitar 48,66% dari total luas lahan Kabupaten Cirebon. Adapun dasar penentuan/mekanisme Updeting Penggunaan lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan Peta Citra
2. Interpretasi Dan Pengolahan Peta Citra
3. Survey Lapangan

Peta citra yang digunakan adalah peta citra spot 6 dan spot 7 tahun 2020 yang bersumber dari LAPAN (Lembaga Penelitian Nasional).



Gambar 4.23 Skema Mekanisme Updeting Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Perkembangan kawasan industri di Kab. Cirebon relatif tersebar di wilayah yang dilalui Jaringan Jalan Utama Kabupaten (Jalan Kolektor maupun Arteri). Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Industri di Kab.Cirebon pada tahun 2021 ini tercatat 1.480,21 Ha atau baru termanfaatkan 10,38% dari alokasi ruang KPI. Artinya, masih ada sisa potensi lahan 9.021,31 Ha untuk pengembangan KPI.

Tabel 4.31 Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bangunan Industri	941.32	0.88
2	Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	103.60	0.10
3	Bangunan Perkantoran	163.32	0.15
4	Bangunan Permukiman Desa	9,986.70	9.33
5	Bangunan Permukiman Kota	8,163.87	7.63
6	Danau Alami	33.00	0.03
7	Gardu Induk	0.69	0.00
8	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	115.51	0.11
9	Hutan Rakyat	4,614.06	4.31
10	Instalasi TNI (AD / AL / AU)	25.41	0.02
11	Jaringan Jalan	358.03	0.33
12	Kebun Campuran	6,278.82	5.87
13	Kolam Ikan Air Tawar	5.92	0.01
14	Lahan Terbuka Lain	150.10	0.14
15	Landas Pacu (runway) dan Taxiway	3.87	0.00
16	Lapangan	60.80	0.06
17	Lembaga Masyarakat / Penjara	8.01	0.01
18	Padang Golf	63.53	0.06
19	Padang Rumput	45.64	0.04
20	Pariwisata / Seni / Budaya / Olah Raga Lainnya	2.46	0.00
21	Pekarangan	486.06	0.45
22	Pemakaman	151.37	0.14
23	Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	435.30	0.41
24	Perkebunan / Kebun	5,877.64	5.49
25	PLTU	56.65	0.05
26	Ruang Terbuka Hijau	3.91	0.00
27	Sarana Kesehatan	72.54	0.07
28	Sarana Olahraga	16.72	0.02
29	Sarana Pelayanan umum	59.87	0.06
30	Sarana Pendidikan	516.92	0.48
31	Sarana Peribadatan	70.39	0.07
32	Sarana Sosial	0.07	0.00
33	Sarana Transportasi	2.95	0.00
34	Sawah	52,066.98	48.66
35	Semak Belukar	2,830.68	2.65
36	Sempadan Sungai	5.29	0.00
37	Situs Purbakala	0.18	0.00
38	Stasiun Kereta Api	2.88	0.00
39	Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	18.57	0.02
40	Sungai	1,035.12	0.97
41	Tambak Garam	9,548.15	8.92
42	Tegalan / Ladang	2,396.45	2.24
43	Waduk Irigasi	63.52	0.06
44	Waduk Multiguna	154.10	0.14
Jumlah		106,996.93	100.00

Sumber : Peta Citra Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2020 dan Survey Lapangan Tahun 2020

4.4.3 Isu Perkembangan Lahan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon

Sejumlah isu yang mengemuka terkait perkembangan pemanfaatan lahan industri di Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil kajian lapangan yang meliputi diskusi penggalian informasi dengan stakeholders perindustrian, baik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon selaku regulator maupun dari masyarakat dan sejumlah kalangan dunia usaha. Beberapa isu yang berkembang antara lain:

- Peruntukan industri genteng merah dan industri penunjang pariwisata di Kecamatan Ciwaringin. Pada kenyataannya menjadi Kawasan peruntukan industri besar dan industri manufaktur.
- Terdapat potensi pengembangan industri yang mendukung pertanian namun belum tertuang dalam RTRW, khususnya terdapat di Kecamatan Susukan Lebak.
- Berkembangnya industri di Kecamatan Karangwareng, sementara arahan RTRW adalah kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Adanya keinginan untuk mengembangkan industri menengah (manufaktur, rotan, makanan dan mebeleur) di Kecamatan Arjawinangun.
- Adanya peluang investasi di Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin untuk mengembangkan industri.
- Adanya rencana pengembangan industri besar di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang.
- Adanya rencana pengembangan industri (KI) di Kecamatan Losari, yang mengalami penentangan dari masyarakat setempat karena berkaitan dengan keberadaan / posisi kawasan industri yang bersinggungan dengan lahan permukiman masyarakat yang telah ada.



Gambar 4.26 Sejumlah Kegiatan Industri yang Berkembang pada wilayah KPI dan sekitarnya di salah satu Wilayah Sampel bagian Utara Kabupaten Cirebon



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5

ANALISIS POTENSI dan KEBUTUHAN RUANG BAGI PENGEMBANGAN KPI KABUPATEN CIREBON



5.1 Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang KPI dengan Penggunaan Lahan Eksisting

Sejak ditetapkan dalam Perda No.7 tahun 2018, RTRW Kabupaten Cirebon telah menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon selama ini. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas ruang, yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah, sekaligus ketidakraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal).

Evaluasi Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Cirebon merupakan salah satu upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang peruntukan industri di wilayah Kabupaten Cirebon. Data yang menjadi benchmark dalam pelaksanaan evaluasi adalah peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon 2018 dengan peta tutupan lahan Kabupaten Cirebon 2020. Selain itu, dilakukan pula observasi lapangan pada wilayah-wilayah tertentu untuk melihat perkembangan pemanfaatan lahan yang mengarah pada penggunaan ruang, apakah selaras dengan fungsi KPI yang masih memperbolehkan bentuk-bentuk kegiatan tertentu, atau justru ada kegiatan yang sebetulnya sudah berkembang dan kurang selaras dengan rencana pengembangan kawasan sebagai peruntukan industri.

Berdasarkan interpretasi peta tutupan lahan tahun 2020, teridentifikasi jenis tutupan lahan pada lokasi yang direncanakan sebagai KPI :

- Hutan mangrove sekunder
- Hutan rakyat
- Bangunan permukiman kota
- Bangunan permukiman desa
- Perdagangan & jasa
- Penambangan bukan situ
- Bangunan industri
- Bangunan perkantoran
- Sarana peribadatan
- Sarana pendidikan
- Sarana Kesehatan
- Stasiun pompa bahan bakar umum
- Jaringan jalan
- Kebun campuran
- Kolam ikan air tawar
- Lahan terbuka lain
- Pekarangan
- Pemakaman
- Perkebunan/ kebun
- Sawah
- Semak belukar
- Tambak garam
- Tegalan/ladang
- Instalasi TNI (AD/AL/AU)
- PLTU
- Waduk
- Sungai

5.1.1 Simpangan Pola Ruang

Simpangan rencana pola ruang adalah gambaran mengenai kecenderungan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang/rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting yang ada pada lokasi tersebut. Adapun rencana pola ruang yang dimaksud adalah kawasan peruntukan industri dengan luas 10.066,22 Ha.

Tabel 5.1 Luas Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 Menurut Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri (Ha)
1	Kecamatan Arjawinangun	496.79
2	Kecamatan Astanajapura	950.27
3	Kecamatan Babakan	8.43
4	Kecamatan Beber	-
5	Kecamatan Ciledug	342.81
6	Kecamatan Ciwaringin	232.29
7	Kecamatan Depok	42.52
8	Kecamatan Dukupuntang	0.35
9	Kecamatan Gebang	1,062.37
10	Kecamatan Gempol	420.80
11	Kecamatan Greged	500.70
12	Kecamatan Gunungjati	8.34
13	Kecamatan Jamblang	15.76
14	Kecamatan Kaliwedi	7.13
15	Kecamatan Kapetakan	599.29
16	Kecamatan Karangsembung	6.34
17	Kecamatan Karangwareng	-
18	Kecamatan Kedawung	23.23
19	Kecamatan Lemahabang	123.70
20	Kecamatan Losari	406.68
21	Kecamatan Mundu	1,051.13
22	Kecamatan Pabedilan	938.20
23	Kecamatan Palimanan	386.20
24	Kecamatan Pangenan	1,412.24
25	Kecamatan Pasaleman	-
26	Kecamatan Plered	34.60
27	Kecamatan Plumbon	135.31
28	Kecamatan Sedong	-
29	Kecamatan Sumber	1.04
30	Kecamatan Susukan	812.51
31	Kecamatan Susukan Lebak	-
32	Kecamatan Talun	6.29
33	Kecamatan Waled	0.28
34	Kecamatan Weru	40.64
Grand Total		10,066.22

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038

Hasil evaluasi simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri dan pertambangan berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020

No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	675.24
2	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	1.69
3	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	5.48
4	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	141.83
5	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	74.10
6	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	13.04
7	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	423.45
8	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	2.78
9	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	50.04
10	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	380.45
11	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam IKan Air Tawar	3.14
12	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	0.01
13	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	96.86
14	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	3.47
15	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	9.73
16	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	727.67
17	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	55.56
18	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	0.13
19	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	13.29
20	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	0.14
21	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	5,160.61
22	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	128.31
23	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	0.43
24	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	1.07
25	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	1,861.28
26	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	234.70
27	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	1.72
Grand Total		10.049,46

Sumber : Hasil Kajian dan Analisis, 2021

Sedangkan untuk simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting tahun 2020 berdsarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3 Simpangan Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri dan Pertambangan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Terhadap Pola Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
1	KECAMATAN ARJAWINANGUN	480,69
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	16,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	2,85
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	34,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	1,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	6,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	23,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	10,30
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	368,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	4,55
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	29,09
2	KECAMATAN ASTANAJAPURA	888,76
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	102,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	42,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	3,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	5,79
	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	2,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	5,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	69,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,47
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	61,51
	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	55,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	381,08
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,74
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	217,66
3	KECAMATAN BABAKAN	8,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	7,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,87
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	0,13
4	KECAMATAN CILEDUG	342,81
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,19
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	1,63
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	2,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	8,64
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	19,15
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	29,24



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	8,81
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	154,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	2,07
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	84,30
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	0,23
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	25,91
5	KECAMATAN CIWARINGIN	232,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	10,75
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	15,46
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	54,41
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	53,71
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	1,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,90
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	94,48
6	KECAMATAN DEPOK	42,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	40,50
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	2,02
7	KECAMATAN DUKUPUNTANG	0,35
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	0,35
8	KECAMATAN GEBANG	1.062,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,57
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	12,45
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	3,44
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	17,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	918,39
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	102,40
9	KECAMATAN GEMPOL	420,79
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	99,44
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	14,67
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	66,59
	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	9,73
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	96,92
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	49,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	46,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	36,22
10	KECAMATAN GREGED	500,70
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	363,22



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	1,91
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	6,77
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	127,76
11	KECAMATAN GUNUNGJATI	8,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,31
12	KECAMATAN JAMBLANG	15,76
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	15,76
13	KECAMATAN KALIWEDI	7,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	1,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	6,10
14	KECAMATAN KAPETAKAN	599,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	153,70
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	445,59
15	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	6,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,34
16	KECAMATAN KEDAWUNG	23,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	22,56
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,23
17	KECAMATAN LEMAHABANG	123,69
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	12,57
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	106,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	4,32
18	KECAMATAN LOSARI	406,68
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	1,85
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	2,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	0,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	243,89
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	158,41
19	KECAMATAN MUNDU	1.051,15
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	8,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	13,60
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	44,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	60,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	2,87



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	43,16
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	17,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	5,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,38
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	753,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,05
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	90,10
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	8,07
	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	1,72
20	KECAMATAN PABEDILAN	938,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	4,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	0,55
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	2,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	39,93
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	2,12
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	66,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,01
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	795,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,27
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	24,37
21	KECAMATAN PALIMANAN	386,20
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	14,67
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,03
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	0,37
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	10,12
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	9,40
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,66
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	130,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	0,13
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,52
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	140,71
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	65,86
	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	0,43
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	0,00
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	12,24
22	KECAMATAN PANGENAN	1.412,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	66,26



No	Simpangan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2020 Berdasarkan Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	2,87
	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	7,25
	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	0,32
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	35,92
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam Ikan Air Tawar	3,14
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	55,80
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	390,21
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	3,34
	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	847,14
23	KECAMATAN PLERED	34,59
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	31,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	3,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	0,02
24	KECAMATAN PLUMBON	135,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	134,22
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,72
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,18
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	0,19
25	KECAMATAN SUMBER	1,04
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	1,04
26	KECAMATAN SUSUKAN	812,50
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	10,88
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	4,78
	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	14,83
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	0,62
	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	0,80
	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	5,31
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	773,82
	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	1,46
27	KECAMATAN TALUN	6,29
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	6,17
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	0,12
28	KECAMATAN WALED	0,28
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	0,28
29	KECAMATAN WERU	40,63
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	39,53
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	0,94
	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	0,02
	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	0,14
Grand Total		10.049,46

Sumber : Hasil Kajian dan Analisis, 2020

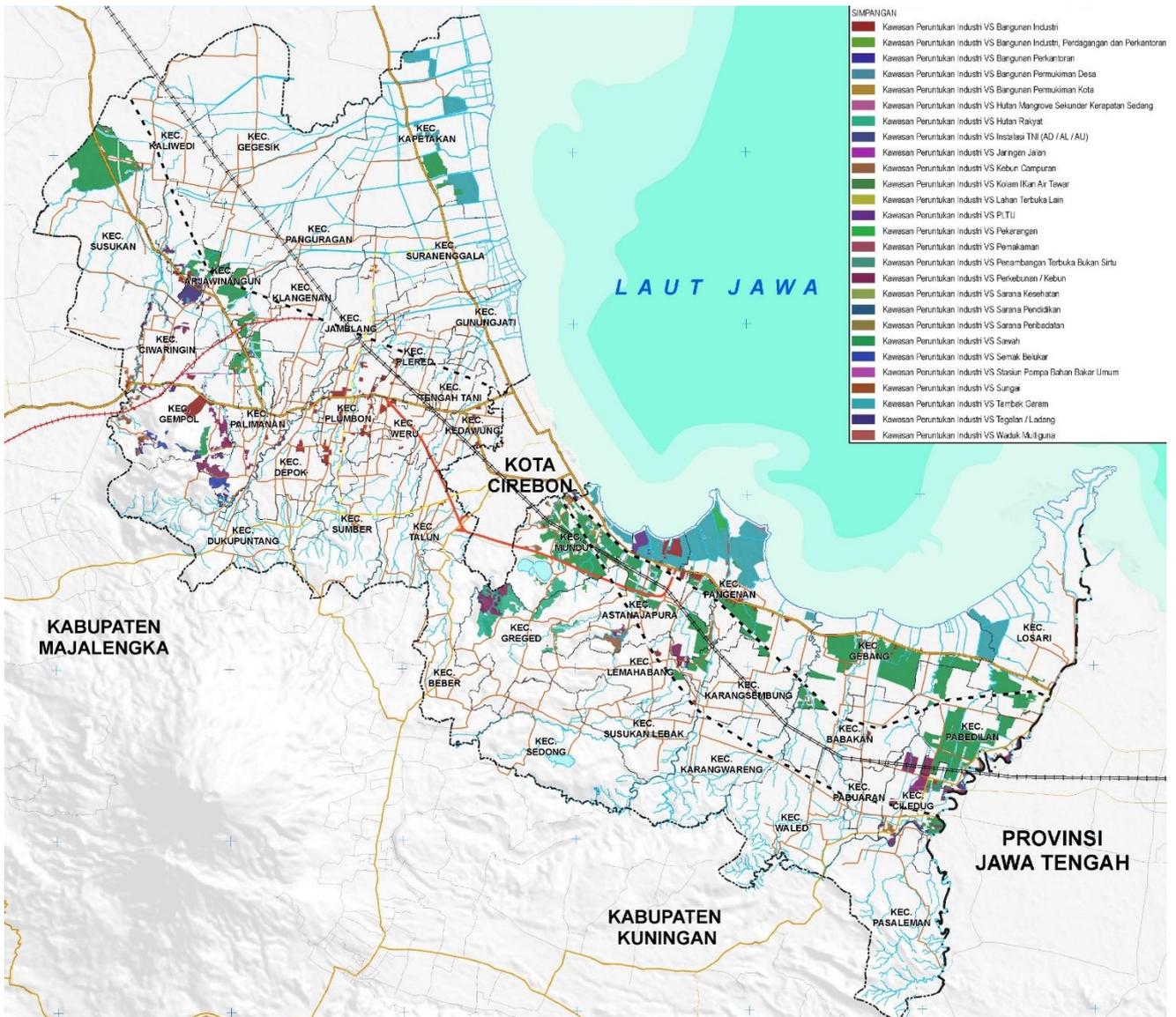
5.1.2 Kompatibilitas dan Kesesuaian Pola Ruang

Kompatibilitas pemanfaatan ruang antara kegiatan fungsional dan arahan rencana pola ruang untuk KPI menjadi salah satu ukuran terhadap kebutuhan evaluasi ruang KPI Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil overlay rencana pola ruang dengan pola landuse eksisting, teridentifikasi luas rencana KPI yang kompatibel dengan pola landuse mencapai 9.320,01 atau 92,59% sedangkan yang tidak kompatibel ada 746,22 Ha atau 7,41% dari total luas KPI.

Tabel 5.4 Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI

No	Rencana Pola Ruang KPI VS Eksisting <i>Landuse</i>	Keterangan	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri	Kompatibel	675,24	6,71
2	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	Kompatibel	1,69	0,02
3	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Perkantoran	Tidak Kompatibel	5,48	0,05
4	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Desa	Tidak Kompatibel	141,83	1,41
5	Kawasan Peruntukan Industri VS Bangunan Permukiman Kota	Tidak Kompatibel	74,10	0,74
6	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	Tidak Kompatibel	13,04	0,13
7	Kawasan Peruntukan Industri VS Hutan Rakyat	Tidak Kompatibel	423,45	4,21
8	Kawasan Peruntukan Industri VS Instalasi TNI (AD / AL / AU)	Tidak Kompatibel	2,78	0,03
9	Kawasan Peruntukan Industri VS Jaringan Jalan	Kompatibel	50,04	0,50
10	Kawasan Peruntukan Industri VS Kebun Campuran	Kompatibel	380,45	3,78
11	Kawasan Peruntukan Industri VS Kolam Ikan Air Tawar	Kompatibel	3,14	0,03
12	Kawasan Peruntukan Industri VS Lahan Terbuka Lain	Kompatibel	0,01	0,00
13	Kawasan Peruntukan Industri VS Pekarangan	Kompatibel	96,86	0,96
14	Kawasan Peruntukan Industri VS Pemakaman	Tidak Kompatibel	3,47	0,03
15	Kawasan Peruntukan Industri VS Penambangan Terbuka Bukan Sirtu	Tidak Kompatibel	9,73	0,10
16	Kawasan Peruntukan Industri VS Perkebunan / Kebun	Kompatibel	727,67	7,23
17	Kawasan Peruntukan Industri VS PLTU	Tidak Kompatibel	55,56	0,55
18	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Kesehatan	Tidak Kompatibel	0,13	0,00
19	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Pendidikan	Tidak Kompatibel	13,29	0,13
20	Kawasan Peruntukan Industri VS Sarana Peribadatan	Tidak Kompatibel	0,14	0,00
21	Kawasan Peruntukan Industri VS Sawah	Kompatibel	5.160,61	51,27
22	Kawasan Peruntukan Industri VS Semak Belukar	Kompatibel	128,31	1,27
23	Kawasan Peruntukan Industri VS Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	Tidak Kompatibel	0,43	0,00
24	Kawasan Peruntukan Industri VS Sungai	Tidak Kompatibel	1,07	0,01
25	Kawasan Peruntukan Industri VS Tambak Garam	Kompatibel	1.861,28	18,49
26	Kawasan Peruntukan Industri VS Tegalan / Ladang	Kompatibel	234,70	2,33
27	Kawasan Peruntukan Industri VS Waduk Multiguna	Tidak Kompatibel	1,72	0,02
Grand Total			10.066,22	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 5.1 Peta Kompatibilitas Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

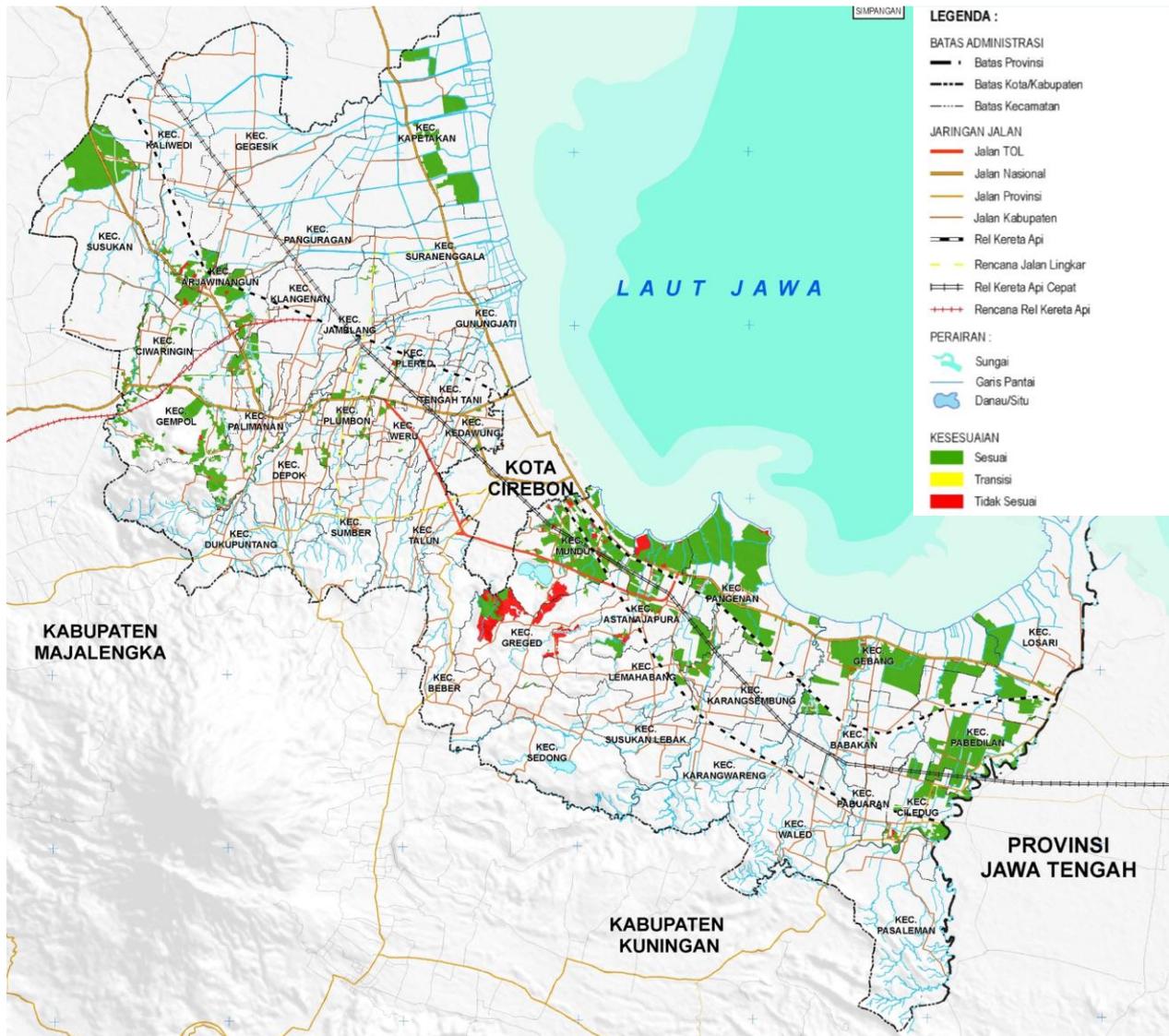
Berdasarkan hasil kajian lebih jauh, kesesuaian pemanfaatan ruang selain melalui tutupan lahan juga diobservasi langsung dalam proses ground truth survey pada wilayah-wilayah yang dirasa perlu mengingat dinamika ruang maupun kebutuhan pengamatan yang lebih jelas untuk memperkuat interpretasi peta citra yang ada. Dari hasil analisis lanjutan terhadap simpangan rencana pola ruang peruntukan kawasan industri RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 terhadap pola penggunaan lahan eksisting, maka didapat klasifikasi kesesuaian rencana pola ruang peruntukan industri dan pertambangan terhadap pola penggunaan lahan eksisting yaitu :

1. Sesuai; Rencana pola ruang peruntukan kawasan pertanian, hutan produksi dan hutan rakyat sesuai dengan lokasi penggunaan lahan eksisting yang ada pada saat ini maupun kecenderungan perkembangan penggunaan lahan kedepannya.
2. Tidak Sesuai; Ketidak kesesuaian rencana pola ruang peruntukan kawasan pertanian, hutan produksi dan hutan rakyat terhadap lokasi penggunaan lahan eksisting yang ada pada saat ini maupun kecenderungan perkembangan penggunaan lahan kedepannya.

Tabel 5.5 Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI

No	Kecamatan	Kesesuaian Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting (Ha)		Jumlah (Ha)
		Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	
1	KECAMATAN ARJAWINANGUN	449,61	47,18	496,79
2	KECAMATAN ASTANAJAPURA	840,58	109,69	950,27
3	KECAMATAN BABAKAN	7,56	0,87	8,43
4	KECAMATAN BEBER	-	-	-
5	KECAMATAN CILEDUG	328,2	14,61	342,81
6	KECAMATAN CIWARINGIN	216,83	15,46	232,29
7	KECAMATAN DEPOK	42,52	-	42,52
8	KECAMATAN DUKUPUNTANG	0,35	-	0,35
9	KECAMATAN GEBANG	1.049,92	12,45	1.062,37
10	KECAMATAN GEMPOL	419,52	1,28	420,80
11	KECAMATAN GREGED	136,44	364,27	500,71
12	KECAMATAN GUNUNGJATI	8,03	0,31	8,34
13	KECAMATAN JAMBLANG	15,76	-	15,76
14	KECAMATAN KALIWEDI	6,1	1,03	7,13
15	KECAMATAN KAPETAKAN	599,29	-	599,29
16	KECAMATAN KARANGSEMBUN	6,34	-	6,34
17	KECAMATAN KARANGWARENG	-	-	-
18	KECAMATAN KEDAWUNG	22,79	0,44	23,23
19	KECAMATAN LEMAHABANG	123	0,7	123,70
20	KECAMATAN LOSARI	406,44	0,24	406,68
21	KECAMATAN MUNDU	932,4	118,73	1.051,13
22	KECAMATAN PABEDILAN	932,72	5,48	938,20
23	KECAMATAN PALIMANAN	364,88	21,31	386,19
24	KECAMATAN PANGENAN	1.402,12	10,12	1.412,24
25	KECAMATAN PASALEMAN	-	-	-
26	KECAMATAN PLERED	31,04	3,55	34,59
27	KECAMATAN PLUMBON	135,13	0,18	135,31
28	KECAMATAN SEDONG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	1,04	-	1,04
30	KECAMATAN SUSUKAN	808,39	4,12	812,51
31	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	-	-	-
32	KECAMATAN TALUN	6,29	-	6,29
33	KECAMATAN WALED	0,28	-	0,28
34	KECAMATAN WERU	40,47	0,16	40,63
Jumlah		9.334,04	732,18	10.066,22

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 5.2 Peta Kesesuaian Tutupan Lahan terhadap Pola Ruang KPI (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berikut catatan hasil analisis kesesuaian tutupan lahan terhadap pola ruang KPI:

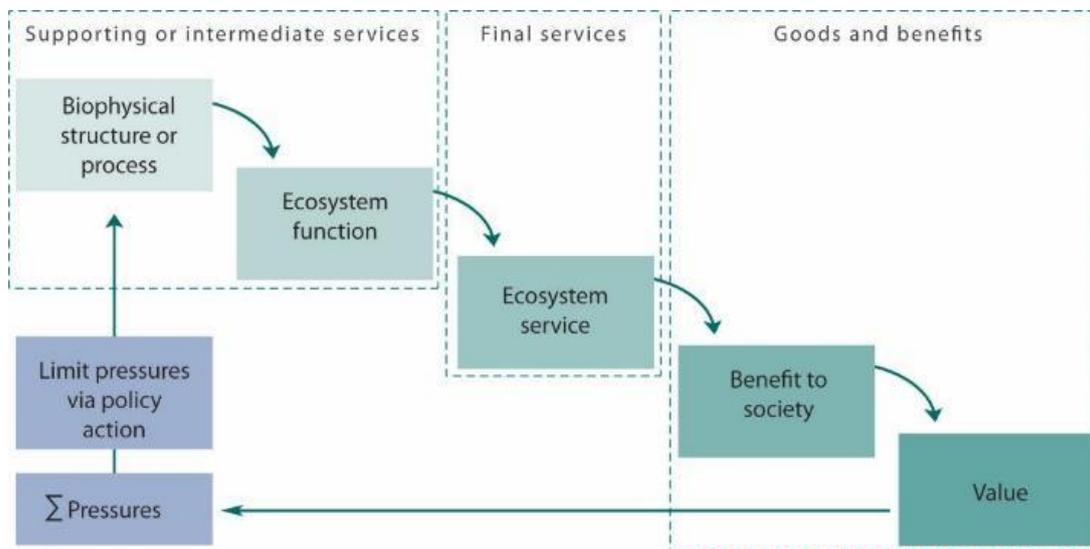
- Luas rencana KPI yang sesuai dengan pola landuse mencapai 9.334,04 atau 92,73% dari total luas KPI
- Luas rencana KPI yang tidak sesuai dengan pola landuse 732,18 Ha atau 7,27% dari total luas KPI
- Wilayah dengan tingkat Kesesuaian tinggi ada di Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Pabedilan, dan Mundu

5.2 Analisis Daya Dukung Lahan bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Daya Dukung Lahan (DDL) dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Terkait analisis DDL, digunakan informasi berdasarkan Penutup Lahan yang merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 76452010, dimana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau proxy jasa ekosistem (*landcover/landused based proxy*)

5.2.1 Pendekatan Jasa Ekosistem dalam Analisis DDL

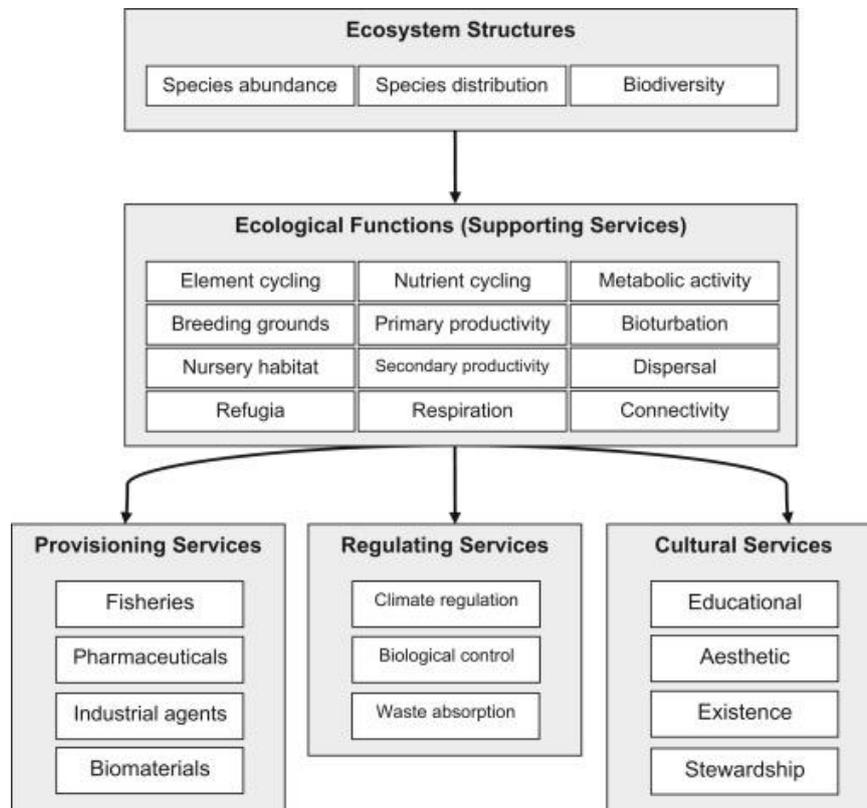
Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikroorganisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005).



Gambar 5.3 Prinsip Jasa Ekosistem dalam Memberi Keuntungan pada Manusia dan Risiko Eksploitasinya (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem ini dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual

dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005).



Gambar 5.4 Klasifikasi Jasa Ekosistem bagi Kehidupan Manusia (Sumber Gambar: Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa pendukung (supporting), dan jasa kultural (cultural), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Sistem Klasifikasi Jasa Ekosistem

No.	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Defenisi Operasional
A. Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air Bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (fiber)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (fuel)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
B. Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon



No.	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Defenisi Operasional
2	Pengaturan tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendalihama dan penyakit
C.	<i>Fungsi Budaya (Cultural)</i>	
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang punya nilai sentimental
3	Rekreasi dan ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
5	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
6	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
D.	<i>Fungsi Pendukung (Supporting)</i>	
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (nutrient)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005

Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu landscape based proxy dan landcover/landused based proxy, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

5.2.2 Hasil Analisis DDL Pembangunan KPI dalam Pendekatan Jasa Ekosistem Lingkungan

Analisis Daya Dukung Lahan berbasis jasa ekosistem yang ditampilkan dengan peta arahan KPI Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengidentifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diukur dengan menggunakan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam Millenium Ecosystem Assessment – United Nation. Diasumsikan bahwa semakin

tinggi jasa ekosistem maka semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/landuse) sebagai penaksir atau proxy. Berikut uraian dari hasil analisis DDL berbasis Jasa Ekosistem tersebut.

5.2.2.1 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

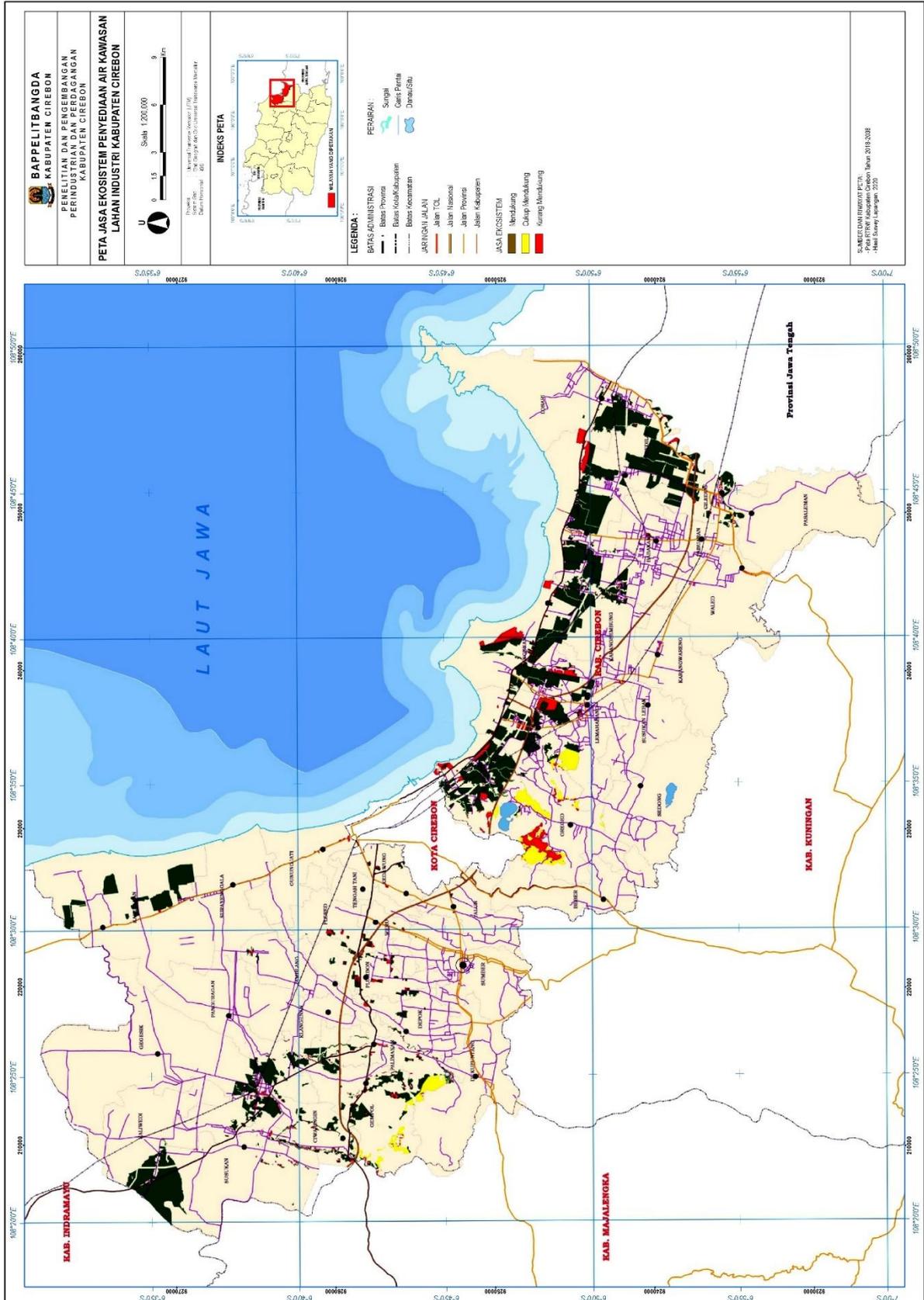
Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun air tanah. Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Cirebon ada yang dapat memberikan manfaat berupa penyediaan air bersih dengan baik maupun tidak. **Semakin tinggi ketersediaan air maka semakin tinggi daya dukung lahan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri.** Sebaliknya, **semakin sedikit ketersediaan air maka semakin rendah daya dukung lahannya.**

Berdasarkan **ketersediaan air** tersebut, **maka sebagian besar lahan (82.5%) mempunyai daya dukung tinggi atau mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri.** Sebagian besar lahan yang memiliki daya dukung tinggi terletak pada ekoregion Dataran Fluvial. Material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal merupakan komposisi material yang memiliki permeabilitas tinggi, sehingga membentuk akuifer yang potensial. Dukungan morfologi datar hingga cekung pada ekoregion ini membentuk reservoir tanah atau cekungan hidrogeologi. Hal ini yang menjadikan Ekoregion Dataran Fluvial berpotensi sebagai sumber penyedia air bersih. Di lain pihak, karakteristik ekoregion ini pada umumnya merupakan wadah bagi pengembangan kegiatan perkotaan, dalam hal ini kegiatan industri, sehingga patut diwaspadai kemunculan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan industri, komersil dan permukiman; konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara. Demikian pula dengan perkembangan lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah dapat memicu terjadinya banjir kota pada musim penghujan.

Tabel 5.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Air Bersih

Jasa Ekosistem Penyediaan Air	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	6.613,02	Ketersediaan Air Sangat Tinggi & Tinggi (mendukung Pengembangan KPI)
Tinggi	1.637,92	
Sedang	781,81	Ketersediaan Air Sedang (terbatas untuk Pengembangan KPI)
Rendah	0,08	Ketersediaan Air Sangat Rendah & Rendah (tidak mendukung Pengembangan KPI)
Sangat Rendah	967,34	

Sumber: Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, 2020



Gambar 5.5 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.2 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Fungsi penyediaan pangan didukung oleh potensi wilayah sebagai sumber penghasil pangan Untuk mendukung KPI diperlukan lahan dengan potensi sumber pangan yang rendah, bergantung pada:

- Jenis lapisan tanah
- Tutupan lahan non produktif atau lahan perkotaan

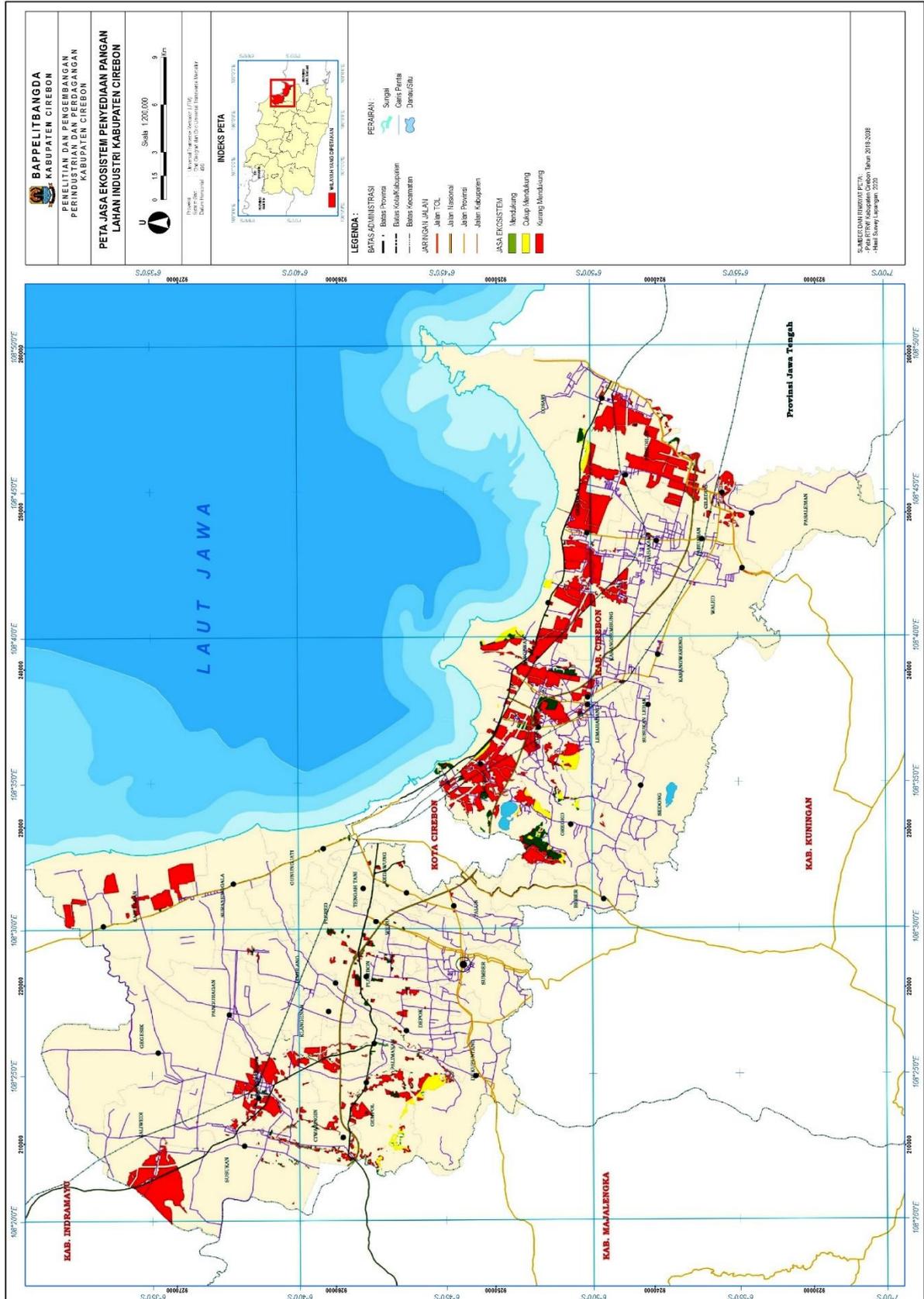
Secara ekologis, lahan yang mempunyai daya dukung tinggi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang berpotensi rendah sebagai sumber penghasil pangan. Sebaliknya, lahan yang mempunyai daya dukung rendah adalah lahan yang berpotensi tinggi sebagai penghasil pangan.

Tabel 5.8 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pangan

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Tinggi	934,03	Penghasil pangan potensial (tidak mendukung KPI)
Sedang	638,59	Penghasil pangan sedang (cukup mendukung KPI)
Rendah	744,9	Penghasil pangan rendah/sangat rendah (mendukung KPI)
Sangat Rendah	8,30	

Sebagian besar lahan yang merupakan penghasil pangan sangat tinggi dan tinggi terletak pada satuan ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air melimpah sehingga produktivitas pertanian pangan sangat tinggi. Bentanglahan ini secara hidrogeomorfologi berfungsi sebagai daerah pencadangan airtanah (*storage groundwater*) serta daerah penurapan airtanah (*discharge area*) yang berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang potensial dan penyebaran luas.

Di lain pihak, karakteristik ekoregion ini pada umumnya merupakan wadah bagi pengembangan permukiman perkotaan, dalam hal ini kawasan industri, sehingga patut diwaspadai kemunculan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan industri, komersil dan permukiman; konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara; yang bergantung kepada tingkat perkembangan wilayahnya. Demikian pula dengan perkembangan lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah dapat memicu terjadinya banjir pada musim penghujan.



Gambar 5.6 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di KPI Kabupaten Cirebon

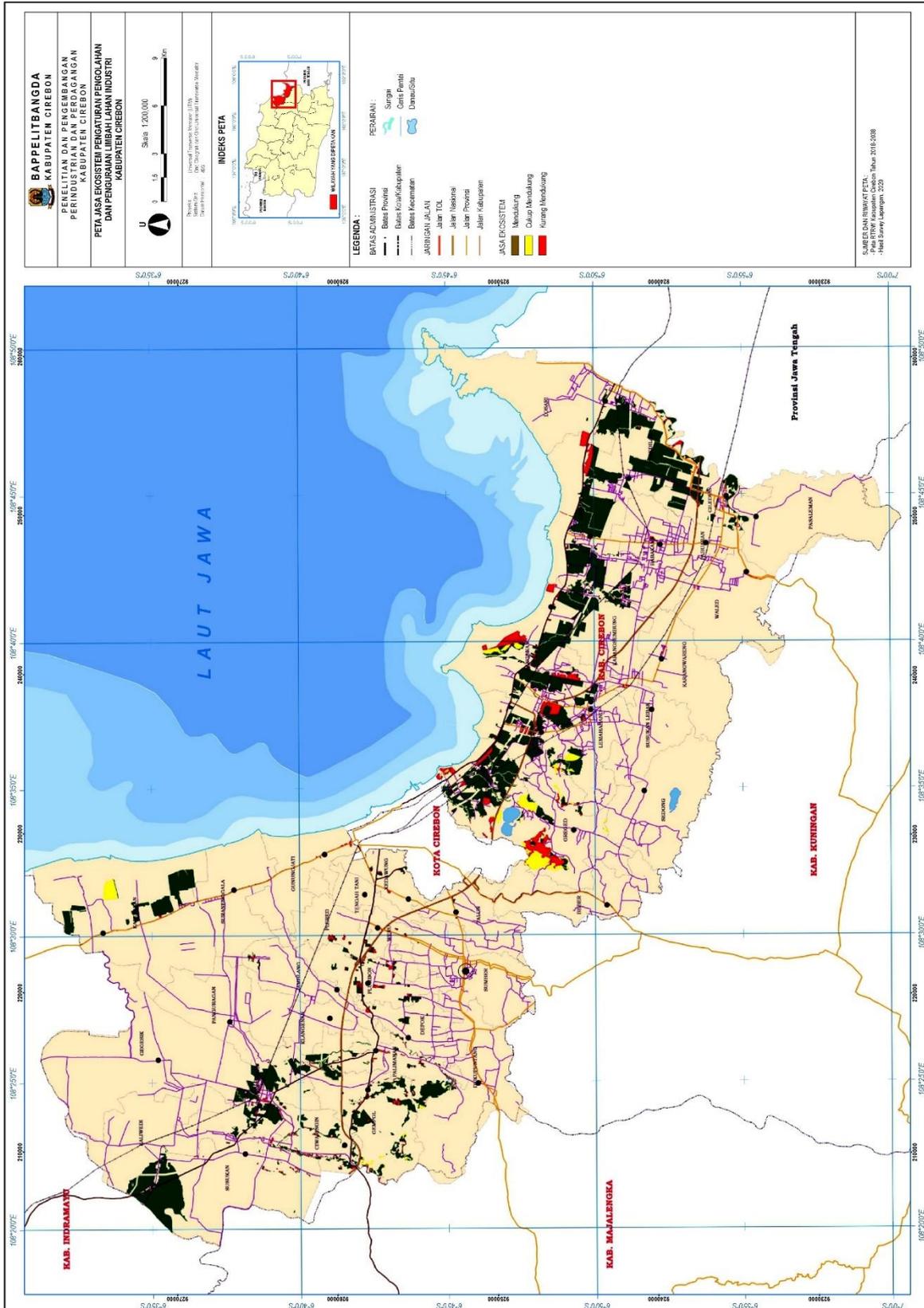
5.2.2.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah terkait dengan sejauh mana kapasitas lokasi dalam menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah. Secara umum lahan yang mampu menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Lahan yang mempunyai daya tampung tinggi adalah lahan yang mampu mengolah dan mengurai limbah dengan baik (sangat mendukung). Sebaliknya, lahan yang mempunyai daya tampung rendah adalah lahan yang berkemampuan rendah dalam mengolah dan mengurai limbah (kurang mendukung).

Tabel 5.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan, Pengolahan, dan Penguraian Limbah

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	411.11	Kemampuan lahan dalam menetralsisir, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah sangat tinggi dan tinggi
Tinggi	8.092.15	
Sedang	529.57	Terbatas dalam mendukung kegiatan industri
Rendah	959.04	Kurang mendukung pengembangan KPI
Sangat Rendah	8.30	

Berdasarkan kemampuan pengolahan dan penguraian limbah tersebut tersebut, sebagian besar lahan (82.03%) mempunyai daya dukung tinggi atau mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi dalam mengolah dan mengurai limbah terletak pada satuan ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekoregion sebagai discharge area (daerah lepasan air), dimana limbah yang meresap ke dalam tanah akan muncul ke permukaan tanah secara alami atau mengikuti aliran sungai. Oleh sebab itu karakteristik lahan alamiah sedapat mungkin perlu dipertahankan sehingga akan membantu proses pengolahan limbah yang sangat besar dari aktivitas industri



Gambar 5.7 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

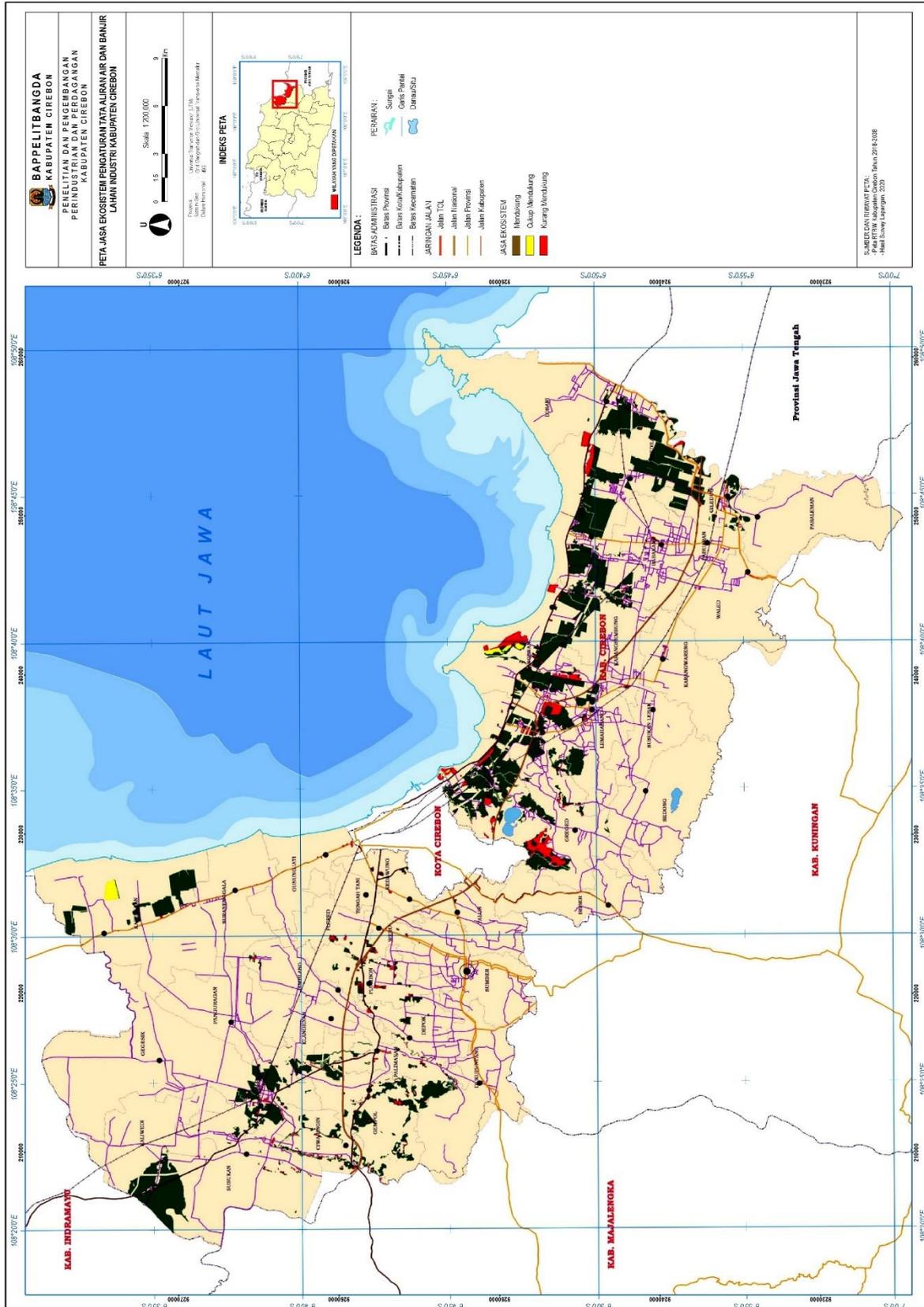
Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Secara ekologis, kawasan peruntukan industri selayaknya tidak ditempatkan pada lahan yang mempunyai pengaturan tata air dan banjir yang rendah (kurang mendukung) dan sangat rendah (sangat tidak mendukung).

Tabel 5.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	8.286.31	Kemampuan lahan dalam mengatur aliran air dan limpasan hujan sangat tinggi dan tinggi
Tinggi	590.88	
Sedang	154.74	Berpotensi terjadinya genangan
Rendah	897.80	Kurang mendukung pengembangan KPI (risiko genangan)
Sangat Rendah	70.45	

Berdasarkan kemampuan pengaturan tata air dan banjir tersebut, maka **sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri (88.77%)**. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi dalam pengaturan tata air terletak pada ekoregion Dataran Fluvial. Hal ini disebabkan oleh morfologi berupa dataran berrelief datar dengan kemiringan lereng 3-8% yang masih memungkinkan pengaliran limpasan air hujan secara relatif lancar sehingga meminimalisir penggenangan air.

Namun demikian, perlu diwaspadai kecenderungan perkembangan wilayah yang pesat memicu konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan terbangun yang menutupi permukaan tanah sehingga dapat memicu terjadinya banjir pada musim penghujan. Potensi meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, juga berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir, drainase buruk, lingkungan kumuh, pencemaran, dan kesehatan masyarakat buruk. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya terkait pengendalian banjir, diantaranya melalui penyediaan ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan *green infrastructure* lainnya pada kawasan peruntukan industri.



Gambar 5.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di KPI Kabupaten Cirebon

5.2.2.5 Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk dan variasi bentang alam, keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Secara ekonomi, daya tarik alam ini menjadi sumber pendapatan daerah dan devisa negara yang besar.

Berdasarkan prinsip ekologi, kawasan peruntukan industri selayaknya tidak berada dalam ekosistem yang mempunyai fungsi rekreasi dan ekowisata tinggi. Dengan demikian, **lahan yang sangat tidak mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang sangat kaya akan fitur lansekap dan keunikan alam.** Sebaliknya, **lahan yang mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri adalah lahan yang miskin akan fitur lansekap dan keunikan alam.**

Tabel 5.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri dilihat dari Jasa Ekosistem Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Jasa Ekosistem Pangan	Luas (Ha)	Interpretasi Daya Dukung
Sangat Tinggi	284.78	Kekayaan akan fitur lansekap dan keunikan alami sangat tinggi dan tinggi (kurang mendukung)
Tinggi	638.20	
Sedang	745.05	Fitur lansekap dan keunikan alami cukup baik
Rendah	8.291.38	Rendah atau tiadanya kekayaan fitur lansekap dan keunikan alam (sangat mendukung))
Sangat Rendah	40.77	

Berdasarkan kemampuan fungsi rekreasi dan ekowisata tersebut, maka **sebagian besar lahan sangat mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri (82.32%)**. Sebagian besar lahan yang mendukung bagi pengembangan kawasan peruntukan industri terletak pada Dataran Fluvial. Adapun lahan yang kurang mendukung terletak pada ekoregion Dataran Pantai, Kaki Gunungapi dan Dataran Kaki Gunungapi. Hal ini disebabkan karakteristik lahan yang mendukung pengembangan wisata minat khusus alam pegunungan yang didukung oleh pemanfaatan lahan produktif, seperti hutan produksi dan perkebunan (untuk ekoregion Kaki dan Dataran Gunungapi) dan hutan mangrove di Dataran Pantai. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian kawasan peruntukan industri yang berdampak minim terhadap keberadaan kawasan lindung dan budidaya, diantaranya melalui penerapan *eco industry* di Kabupaten Cirebon.

Daya dukung dan daya tampung kawasan peruntukan industri untuk masing-masing kecamatan dilakukan dengan menyandingkan jasa ekosistem berdasarkan luasan dominan dan proyeksi neraca air yang pada akhirnya menghasilkan arahan pengembangan kawasan peruntukan industri untuk masing-masing kecamatan. Penjelasan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Ciledug, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun Kecamatan Ciledug mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi akan mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan Kecamatan Ciledug diarahkan pada pengembangan kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Losari, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Pabedilan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Gebang, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Gebang diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Astanajapura, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Astanajapura diarahkan pada kawasan industri

berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.

- Kecamatan Pangenan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Mundu, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Mundu diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Greged, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) diprediksi akan mengalami defisit air. Adapun jasa ekosistem penyedia pangan, fungsi rekreasi dan ekowisata serta biodiversitas kurang mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri jasa berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, konservasi air (hemat air, daur ulang air), pengelolaan limbah, dan dapat memanfaatkan fungsi rekreasi dan ekowisata serta konservasi keanekaragaman hayati.
- Kecamatan Palimanan, mempunyai daya dukung tinggi dari jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, pemurnian air, serta fungsi rekreasi dan ekowisata. Jasa ekosistem lain yang cukup menunjang adalah pengaturan iklim dan biodiversitas. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi berpotensi mengalami defisit air pada tahun 2031. Arahkan pengembangan Kecamatan Palimanan ditujukan bagi kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Kapetakan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata sehingga sangat mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas juga cukup mendukung. Walaupun kecamatan ini mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih, namun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi

mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.

- Kecamatan Arjawinangun, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, dan pemurnian air untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri. Jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan iklim, serta penyedia air juga cukup mendukung walaupun pada akhir tahun proyeksi (tahun 2031) berpotensi mengalami defisit air. Dengan demikian pengembangan kecamatan diarahkan pada kawasan industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Ciwaringin, mempunyai daya dukung tinggi dari jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pemelihara kualitas udara, pengaturan tata air dan banjir, pemurnian air, fungsi rekreasi dan ekowisata. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi diprediksi mengalami defisit air pada tahun 2031. Jasa ekosistem lain yang cukup menunjang adalah pengaturan iklim dan biodiversitas. Khusus untuk jasa ekosistem penyedia air bersih, walaupun sangat mendukung untuk kawasan peruntukan industri akan tetapi berpotensi mengalami defisit air pada tahun 2031. Arahkan pengembangan Kecamatan Ciwaringin ditujukan bagi kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah.
- Kecamatan Gempol, mempunyai daya dukung tinggi dari hampir seluruh jasa ekosistem, kecuali jasa ekosistem penyedia pangan dan jasa ekosistem biodiversitas. Arahkan pengembangan kecamatan ditujukan pada kawasan peruntukan Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati.
- Kecamatan Susukan, mempunyai daya dukung tinggi dari segi jasa ekosistem penyedia air bersih serta surplus air bersih berdasarkan hasil neraca air pada tahun 2031. Keberadaan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah, pengaturan tata air dan banjir, serta rekreasi dan ekowisata juga sangat mendukung. Begitu pula dengan jasa ekosistem pemelihara kualitas udara, pengaturan iklim, pemurnian air dan biodiversitas yang cukup mendukung untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Berdasarkan hasil daya dukung dan daya tampung maka pengembangan Kecamatan Susukan diarahkan pada kawasan industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, serta pengelolaan limbah

Tabel 5.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Jasa Ekosistem dengan Luasan Dominan di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Proyeksi Neraca Air 2031	Jasa Ekosistem									Arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
			Penyedia Air Bersih	Penyedia Pangan	Pengolah dan Pengurai Limbah	Pemelihara Kualitas Udara	Pengaturan Iklim	Pengaturan Tata Air dan Banjir	Pemurnian Air	Fungsi Rekreasi dan Ekowisata	Bio-diversitas	
1	Ciledug	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
2	Losari	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
3	Pabedilan	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
4	Gebang	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
5	Astanajapura	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
6	Pangenan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
7	Mundu	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
8	Greged	Defisit										Industri jasa berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, konservasi air (hemat air, daur ulang air), pengelolaan limbah, dan dapat memanfaatkan fungsi rekreasi dan ekowisata serta konservasi keanekaragaman hayati
9	Palimanan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
10	Kapetakan	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
11	Arjawinangun	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
12	Ciwaringin	Defisit										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah
13	Gempol	Surplus										Industri berskala menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati
14	Susukan	Surplus										Industri berskala besar dan menengah yang menerapkan program penurunan emisi GRK, hemat air, pengelolaan limbah

Keterangan:

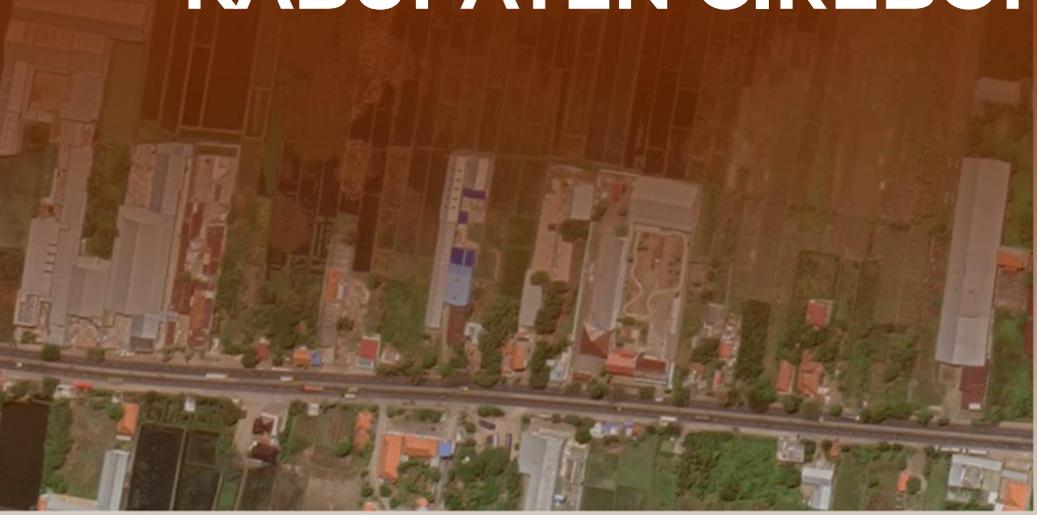
- Sangat Mendukung
- Cukup Mendukung
- Kurang Mendukung



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

6

RUMUSAN KEBUTUHAN **PENGEMBANGAN KPI** **KABUPATEN CIREBON**



6.1 Potensi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pengembangan KPI

Hasil analisis terhadap kebijakan daerah maupun regional dan nasional, pemanfaatan ruang KPI dan kecenderungan perkembangan kegiatan industri, serta kesesuaian pola ruang dan daya dukung lahan bagi pengembangan KPI, sebagaimana dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya dikembangkan menjadi input bagi proses sintesa yang dapat menggambarkan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Bagian ini menjabarkan sejumlah aspek internal (potensi dan permasalahan) maupun aspek eksternal (peluang dan tantangan) yang menjadi dasar perumusan kebutuhan pengembangan KPI tersebut.

6.1.1 Potensi (Kekuatan/*Strength*)

Sejumlah kekuatan internal yang berasal dari sumber daya yang dapat mendukung pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon telah teridentifikasi dari hasil analisis sebelumnya. Beberapa kekuatan tersebut menjadi modal potensial bagi pengembangan KPI, sebagaimana dijelaskan berikut.

6.1.1.1 Dukungan Fisik Lingkungan dan Sumber Daya Alami

Potensi fisik lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu faktor kekuatan dalam upaya pengembangan KPI Kabupaten Cirebon. Beberapa bentuk potensi fisik dan sumber daya ini antara lain:

a. Potensi lahan pengembangan KPI

Lahan bagi pengembangan KPI relatif tersedia cukup luas sesuai hasil kajian daya dukung lahan. Selain itu, untuk menjadi pemasok bahan baku industri, sejumlah lahan produktif juga menjadi potensi bagi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

b. Potensi sumber daya air

Potensi sumber daya air didukung dengan keberadaan sejumlah sumber air baku yang didukung kondisi fisik dan hidrologi kawasan.

Tabel 6.1 Sejumlah Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Cirebon

NO	POTENSI	JUMLAH	VOLUME
1	Waduk	2 Buah	6 Juta m ³
2	Embung	9 Buah	0,80 Juta m ³
3	Bendung Karet	6 Buah	2,230 Juta m ³
4	Bendung Bantu/Suplesi	266 Buah	
5	Sungai		
	a. Sungai Lintas Provinsi	1 Buah	-
	b. Sungai Lintas Kab/Kota	16 Buah	-
	c. Sungai Dlm Kabupaten	37 Buah	-
6	Pantai dan Muara	54 Buah	-
7	Air tanah		
8	Mataair	44 Buah	

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2021

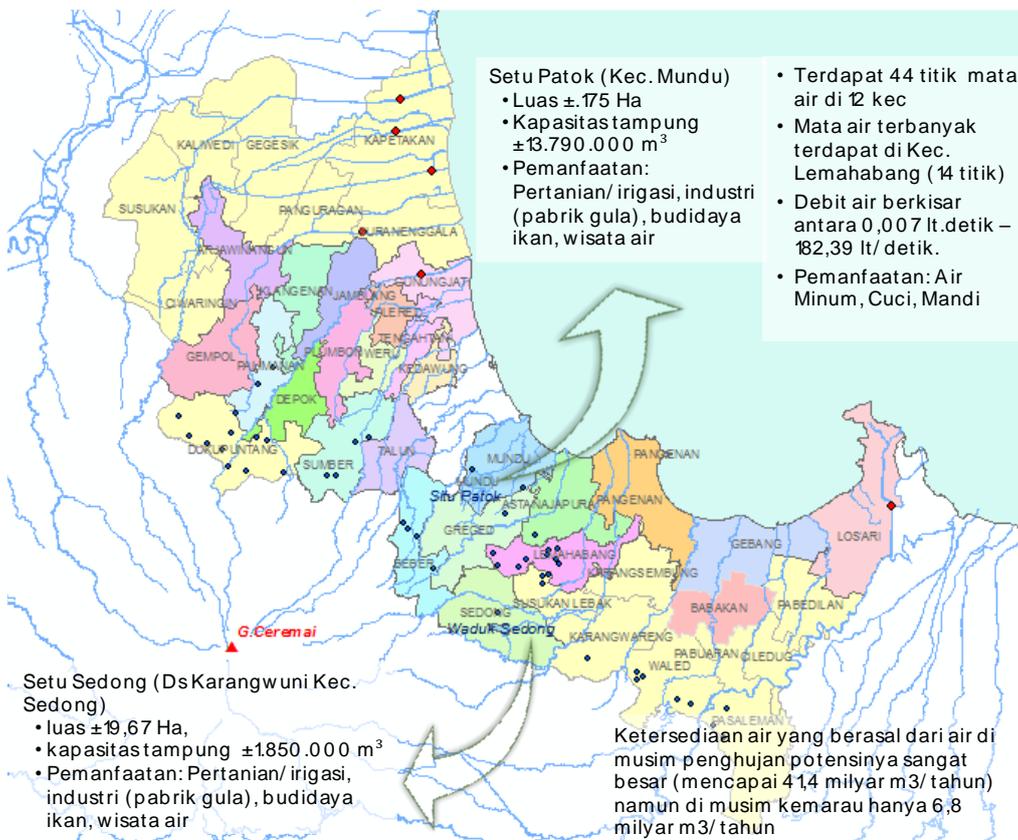
Hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (2018) memperlihatkan bahwa perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air di kawasan peruntukan industri Kabupaten Cirebon menunjukkan hasil yang bervariasi. Kondisi defisit atau krisis air akan dihadapi oleh sebagian besar kecamatan pada tahun 2031, yaitu Kecamatan Ciledug, Losari, Pangenan, Greged, Palimanan, Kapetakan, Arjawinangun, dan Ciwaringin. Defisit air terbesar akan terjadi di Kecamatan Losari, yaitu sebesar 3,601,906 m³/tahun. Sebaliknya, Kecamatan Pabedilan, Gebang, Astanajapura, Gempol, dan Susukan masih mempunyai ketersediaan air yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan industri dan kegiatan sehari-hari penduduk. Surplus terbesar terdapat di Kecamatan Gebang yaitu 5,015,153 m³/tahun.

Tabel 6.2 Perbandingan kebutuhan air dan ketersediaan air di kawasan peruntukan industri Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	DA	SA	Gap	Keterangan
		Tahun 2031			
1	Ciledug	9,552,430	7,747,740	-1,804,690	Defisit
2	Losari	11,349,646	7,747,740	-3,601,906	Defisit
3	Pabedilan	18,161,236	22,136,400	3,975,164	Surplus
4	Gebang	21,548,527	26,563,680	5,015,153	Surplus
5	Astanajapura	20,094,538	22,136,400	2,041,862	Surplus
6	Pangenan	22,243,178	22,136,400	-106,778	Defisit
7	Mundu	19,849,032	22,136,400	2,287,368	Surplus
8	Greged	13,837,614	11,068,200	-2,769,414	Defisit
9	Palimanan	11,620,355	11,068,200	-552,155	Defisit
10	Kapetakan	9,635,704	7,747,740	-1,887,964	Defisit
11	Arjawinangun	9,860,720	11,068,200	1,207,480	Defisit
12	Ciwaringin	11,284,409	11,068,200	-216,209	Defisit
13	Gempol	14,848,850	16,602,300	1,753,450	Surplus
14	Susukan	19,440,108	22,136,400	2,696,292	Surplus
	Total	213,326,347	221,364,000	8,037,653	Surplus

Sumber: Dinas LH Kab.Cirebon, 2018

Apabila diakumulasikan, secara keseluruhan status daya dukung air di kawasan peruntukan industri masih menunjukkan nilai surplus, disebabkan ketersediaan air yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan air.



Gambar 6.1 Peta Potensi SDA yang Dapat Mendukung Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

6.1.1.2 Potensi SDM

Pada proses pembangunan ekonomi, sumber daya manusia mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan pembangunan tersebut. Manusia bukan hanya dijadikan sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain kapasitas sumber daya manusia, adanya lingkungan sosial budaya memberikan pengaruh terhadap karakteristik dan kapasitas sumber daya manusia. Terlebih dalam menangkap peluang percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Melihat dari piramida penduduk Kabupaten Cirebon, mayoritas penduduk pada usia produktif. Hal ini dapat menjadi peluang bagi ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Melihat dari laju pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk cenderung fluktuatif karena sering adanya pemekaran namun pola kecenderungannya terus meningkat. Tren pertumbuhan penduduk positif dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon Tengah lebih tinggi sehingga penduduk cenderung terkonsentrasi di tengah.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja dari segi kuantitas. Hanya saja secara umum keterampilan yang dimiliki masyarakat masih belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Cirebon masih berada dalam tahap sebagai operator, belum bisa menjadi aktor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sendiri.

Jenis industri mikro, kecil dan menengah yang berkembang menurut data sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon tahun 2019 antara lain pengolahan makanan, batik, konveksi, mebel, batu alam, mainan dan terompet, dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi ke lapangan dan wawancara ke beberapa pengusaha industri di sentra industri mikro dan kecil, industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Keterampilan diperoleh secara turun menurun dan otodidak
- Mayoritas masih menggunakan teknologi sederhana
- Masih bersifat subsisten, kebanyakan belum memiliki rencana bisnis dan berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan usahanya, merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja
- Pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, belum mampu mengembangkan inovasi maupun diversifikasi produk. Mereka akan membuat produk yang berbeda hanya apabila ada permintaan khusus dari pembeli.
- Memiliki keterbatasan modal

Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Cirebon masih bersifat subsisten, dimana masih tergantung kepada sektor primer. Kebanyakan para pengusaha belum memiliki rencana bisnis dan berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, para pengusaha juga belum sepenuhnya mampu mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk,

Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah di hampir semua kecamatan masih di bawah 9 tahun yang berarti penduduk tidak menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau paling tidak sudah pernah mengenyam pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama setingkat SMP kelas 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah antara lain disebabkan faktor ekonomi, motivasi dan dukungan orang tua, masih adanya nilai-nilai di masyarakat yang skeptis terhadap pendidikan (SAPPK ITB, 2016).

Faktor lain yang dapat menjadi keunggulan komparatif Kabupaten Cirebon adalah UMK yang realtif rendah dibanding daerah pesaingnya. Meskipun bukan yang terendah, namun Kabupaten Cirebon

memiliki UMK yang lebih rendah dari UMR Provinsi Jawa Barat dan beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Ciayumajakuning yang menjadi wilayah ‘pesaing’ dalam menyediakan tenaga kerja sektor industri.

Tabel 6.3 Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Cirebon dengan UMR Jawa Barat dan UMK Daerah Sekitarnya

	JABAR	Kab. Subang	Kab. Indramayu	Kab. Majalengka	Kab. Cirebon
UMK (Rp.)	2,73 jt.	2,73 jt.	2,12 jt.	1,79 jt.	2,02jt.

Sumber: Pengolahan Data Dinas BLMR Provinsi Jabar, 2019
(Ket: Tertinggi Jabar Rp. Rp 4,23 Jt, Terendah Rp. 1,69 Jt)

Sebagai potensi ketenagakerjaan bidang industri, Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang cukup luas. Masyarakat Kabupaten Cirebon merupakan masyarakat multikultural yang terdiri atas lebih dari dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan karakteristik dengan didorong oleh latar belakang sejarah, kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan asing. Merujuk pada pengertian masyarakat multikultural, dapat kita lihat bahwa masyarakat multikultural merupakan bentuk keanekaragaman kelompok yang dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu. Menurut Pierre L. Van den Berghe (1987), ada beberapa karakteristik masyarakat multikultural, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain.
- Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
- Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- Secara relatif seringkali mengalami konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.
- Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
- Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Penggolongan masyarakat yang multikultural ini sekaligus menunjukkan adanya berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

6.1.1.3 Potensi Lahan untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan analisis potensi lahan untuk pengembangan KPI, diketahui bahwa luasan yang sesuai secara kompatibilitas peruntukan serta didukung oleh aspek daya dukung lahan berbasis jasa ekosistem mencapai 9.320,01 Ha. Dari luasan ini, wilayah yang sudah terbangun sebagai kegiatan industri adalah 1.480,21 Ha atau sekitar 15,88% dari total luasan lahan potensial pengembangan KPI. Artinya, masih terdapat sekitar 84% atau 7.839,8 Ha lahan yang potensial bagi pengembangan KPI.

Mengacu pada kebutuhan pengembangan Kawasan Industri (KI) dengan minimum hamparan 50Ha, maka beberapa lokasi memiliki lahan yang dapat mendukung pengembangan KI, diantaranya:

- Kecamatan Pangenan;
- Kecamatan Gebang;
- Kecamatan Pabedilan;
- Kecamatan Mundu;
- Kecamatan Arjawinangun; dan

- Kecamatan Kapetakan

Kabupaten Cirebon telah memiliki Kawasan Industri yang dikelola oleh PT Prasadha Inti Jaya yang terletak di daerah yang meliputi Desa Karangasem, Desa Karangmulya, Desa Kedungsana dan Desa Gombang di daerah Kecamatan Plumbon. Kawasan tersebut telah mulai konstruksi sejak tahun 2012 dengan luas sebesar 83.1 Ha. Namun, harga sewa dari Kawasan Industri tersebut masih relatif mahal sehingga pemanfaatannya oleh para pelaku industri juga diindikasikan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum optimal karena saat awal pengembangannya, keunggulan komparatif belum terlalu terlihat karena infrastruktur perhubungan saat itu belum berkembang seperti saat ini.

Wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagaimana di atas juga tergolong cocok dijadikan pengembangan Kawasan Industri karena dukungan aspek seperti:

- Bentang lahan minimum untuk pengembangan Kawasan Industri
- Fisik lahan yang mendukung pengembangan industri skala besar
- Akses jaringan jalan yang lebih mudah diakses karena lokasinya yang dilalui kelas Jalan Nasional maupun berdekatan dengan Jalan Nasional

Dengan potensi yang ada, harga lahan pun masih relatif lebih murah dari wilayah yang sudah berkembang di WPPI I Jabar bagian Barat (Bodebek), sehingga keunggulan komparatif ini menjadi semakin jelas.

6.1.1.4 Potensi sektor unggulan yang sudah terbukti

Kabupaten Cirebon telah lama dikenal sebagai wilayah penghasil produk industri kecil dan menengah yang berkembang sejak lama. Setelah masa otonomi daerah pun, wilayah ini menggeliat dan berkembang dengan sub-sektor industri yang lebih besar, dimana target distribusinya bahkan sudah mencapai ekspor luar negeri. Mayoritas industri unggul yang terdapat di Kabupaten Cirebon ialah industri pengolahan. Beberapa potensi sektor unggulan yang sudah terbukti diakui dan masih bertahan di Kabupaten Cirebon diantaranya:

- Industri meubel kayu dan rotan, dimana beberapa produk bahkan melibatkan PMA (Penanaman Modal Asing) dan adanya ekspor ke luar wilayah dan luar negeri;
- Industri pakan ternak dengan PMA yang melakukan kegiatan distribusi skala internasional;
- Industri pengolahan makanan, umumnya dijual ke kota-kota besar namun ada beberapa yang melakukan ekspor ke wilayah Timur Tengah;
- Industri pengolahan hasil perikanan, umumnya dijual ke kota-kota besar dan wilayah sekitarnya sebagai bahan dasar yang akan diolah lebih lanjut.

a. Industri yang Dikenal namun Potensi Pengungkit Pembangunannya Relatif Rendah

Meskipun sebelumnya telah dikenal sebagai wilayah industri batu alam dan industri semen, namun pada kenyataannya kedua industri tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, khususnya pada dekade terakhir ini. Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan keduanya dirasa cukup memberatkan dibandingkan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Cirebon. Untuk industri semen, pendorong utamanya adalah keberadaan PT. Indocement (investasi Jerman) di Kecamatan Gempol. Investasi industri ini sebenarnya memberikan dampak positif karena adanya kegiatan CSR di bidang fisik (infrastruktur) dan sosial (pelatihan dan pembinaan) meskipun belum maksimal karena secara



makro tidak memberikan kontribusi besar kepada Kab. Cirebon. Selain itu, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yakni dilakukannya pengerukan sumber daya alam (kapur) secara terus menerus dan limbah yang mengganggu lingkungan dan masyarakat, baik pada kesuburan lahan pertanian, kualitas air dan udara. Di beberapa wilayah seperti Kab. Bandung Barat, pabrik semen telah ditutup karena besarnya kerusakan lingkungan yang terjadi. Kondisi tersebut yang harus diantisipasi Kab. Cirebon.

Industri lainnya yang sempat cukup dikenal di Kabupaten Cirebon adalah industri batu alam yang berada di Kecamatan Palimanan. Secara jangka panjang, industri ini masih kurang berkembang karena hanya masih sekedar mengolah secara sederhana hasil tambang batu alam yang sudah ada. Sehingga rantai industri batu alam saat ini berada pada kegiatan hilir, karena telah ada pengolahan batu alam hasil tambang yang dibentuk menjadi lempengan batu sebagai dekorasi rumah ataupun batu nisan. Bahan baku yang digunakan, yaitu batu alam, bukan dari Kabupaten Cirebon, tetapi dari Kecamatan Gunung Patok, Kabupaten Majalengka. Artinya, ada keterkaitan antar industri walaupun bahan baku harus impor dari wilayah lain. Akan tetapi, terdapat permasalahan sulitnya dalam memperoleh bahan baku batu alam tersebut sehingga industri ini masih bergantung dengan wilayah lain, yaitu Kabupaten Cirebon dalam hal penyediaan bahan baku.



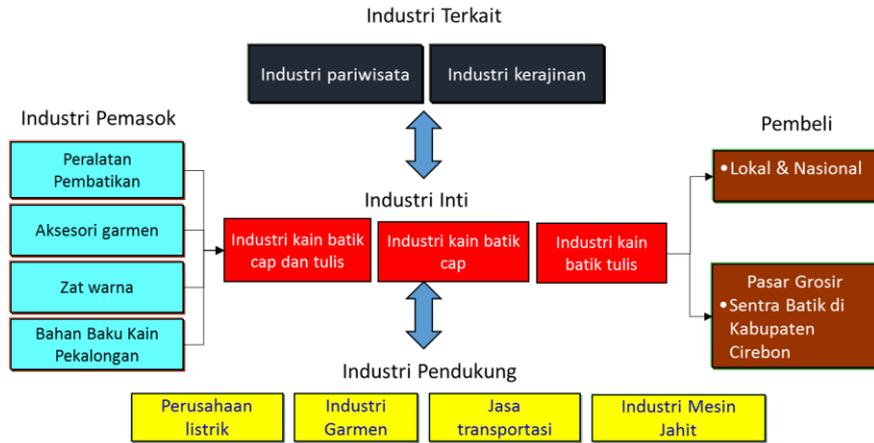
b. Industri yang Berkembang dan Semakin Dikenal serta Potensial Sebagai Pengungkit Ekonomi

Nilai investasi industri di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa investasi terbesar adalah pada komoditas meubel / kerajinan rotan dan meubel kayu. Selain itu komoditas meubel / kerajinan rotan juga menyerap tenaga kerja terbesar. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas meubel/kerajinan rotan memiliki prestasi yang cukup baik di Kabupaten Cirebon. Produksi industri rotan sendiri berkembang di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok dan Palimanan dengan peluang pemasaran dalam negeri dan ekspor ke Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia. Sedangkan meubel kayu memiliki produksi terbesar di Kecamatan Plered, Weru, Plumbon dan Depok dan sudah memiliki pasar di dalam dan luar negeri.

Salah satu industri yang sudah dikenal di Kabupaten Cirebon adalah konveksi dan batik. Industri ini berkembang dan dikenal karena adanya nilai lokal yang digunakan, didukung dengan upaya pemasaran yang cukup gencar, sehingga seiring waktu semakin dikenal dengan ciri khas kecirebonannya.

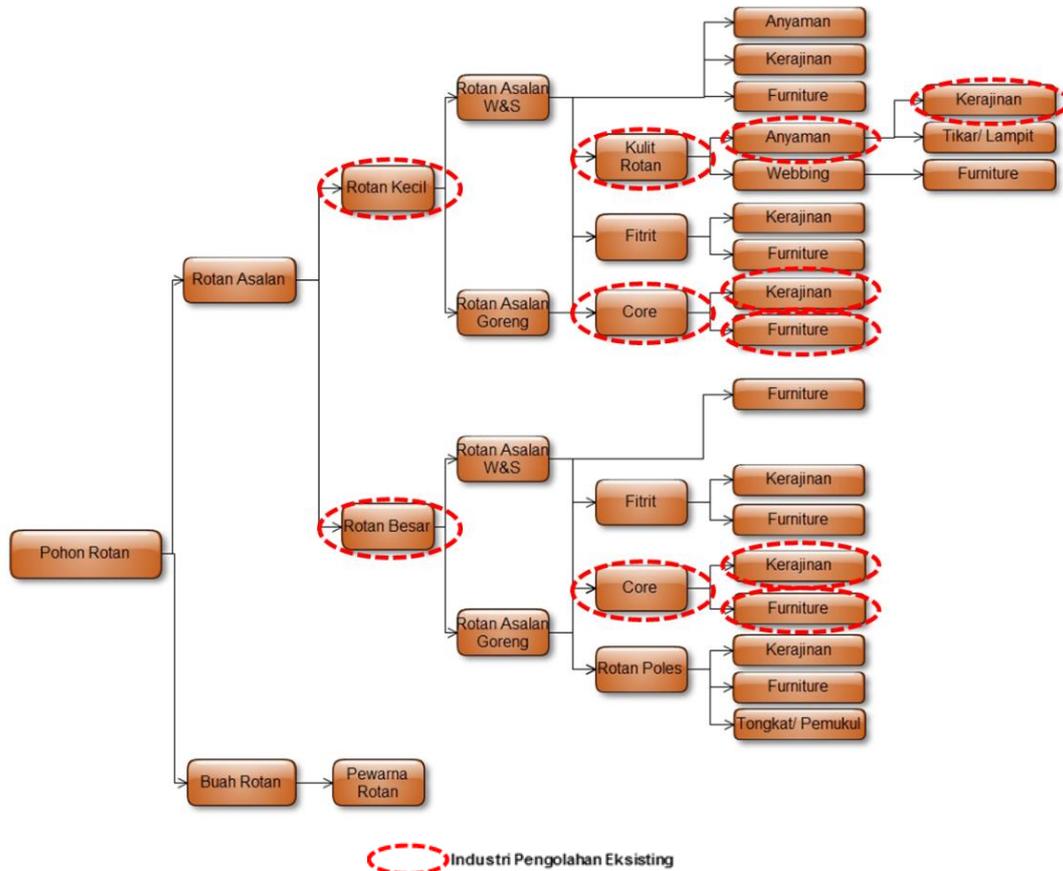
Industri Konveksi berkembang di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber, sedangkan batik berkembang di Desa trusmi Kecamatan Plered dan Desa Kalibaru Kecamatan Kedawung, dan sudah memiliki kawasan batik tersendiri yang cukup terkenal.





Gambar 6.2 Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Batik pada KPI Kabupaten Cirebon

Industri pengolahan di Kabupaten Cirebon beberapa sudah melakukan ekspor ke luar negeri, terutama ekspor hasil mebel rotan yang jumlah ekspornya melesat tinggi meninggalkan jumlah ekspor komoditi lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor mebel rotan terus mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan nasional akan ekspor bahan baku rotan ke luar negeri. Namun, sekarang kebijakan tersebut telah ditiadakan, sehingga industri rotan mulai menggeliat kembali, didukung dengan banyaknya investor asing yang menanamkan sahamnya ke industri rotan di Cirebon, seperti dari Belgia, ia mempunyai perusahaan sendiri di Kabupaten Cirebon yang khusus menangani usaha mebel dari rotan.



Gambar 6.3 Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Rotan pada KPI Kabupaten Cirebon

Satu hal yang perlu dicatat adalah potensi agro industri yang cukup besar, meski belum bisa menjadi pengungkit pembangunan wilayah dalam jangka dekat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang besar di sektor pertanian diantaranya subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, buah-buahan dan sayuran. Akan tetapi berbagai subsektor tersebut dari hasil analisis yang dilihat dari kekuatan bertahan, kekuatan berkembang, kemampuan mengungkit, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan menunjukkan bahwa memang hanya ada beberapa komoditas yang sangat berpotensi, memiliki prestasi dan daya saing yang baik dengan kompetitornya yaitu komoditas bawang merah, kacang hijau, mangga, tebu dan perikanan tangkap. Komoditas-komoditas unggulan sektor pertanian tersebut dari hasil analisis menunjukkan bisa menjadi kekuatan pengungkit untuk percepatan pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan.



Gambar 6.4 Keterkaitan Hulu-Hilir Industri Pengolahan Makanan pada KPI Kabupaten Cirebon

Penelitian dari PWK-ITB (2016-2017) memperlihatkan bahwa komoditas industri pengolahan di Kabupaten Cirebon memiliki kemampuan untuk mengungkit atau mendorong pertumbuhan. Hal tersebut karena semua komoditas industri pengolahan memiliki keterkaitan dengan kegiatan hulu-hilir/ linkage baik bahan baku ataupun bahan setengah jadi yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Cirebon. Dan untuk industri pengolahan yang ada merupakan produk hilir, walaupun juga ada beberapa produk yang belum sampai pada tahap finishing atau penyelesaian seperti industri meubeul.

Dalam analisis kemampuan mengungkit terdapat dua hal yang dilihat, yaitu adanya keterkaitan kegiatan hulu-hilir/ linkage dan proses industri. Ada atau tidaknya linkage pada kegiatan hulu-hilir ditinjau melalui dua hal, yang pertama adanya kegiatan backward, yaitu keterkaitan kebelakang dari komoditas/ industri yang dijadikan bahan baku dan adanya kegiatan forward, yaitu keterkaitan kedepan dari komoditas/ industri yang terkait/ mendekati kegiatan untuk demand akhir. Sedangkan untuk rantai industri hulu-hilir juga ditinjau melalui dua hal. Pertama adalah proses rantai industri panjang, yaitu komoditas industri yang menjadi produk hilir/ akhir. Kedua, proses rantai industri pendek, yaitu ketika komoditas industri masih merupakan produk setengah jadi untuk menjadi bahan tambahan dalam kegiatan industri lainnya.



6.1.2 Masalah (Kelemahan/*Weakness*)

Selain potensi internal, pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon juga mengalami sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi dan dinamika pertumbuhan wilayah yang menimbulkan sejumlah catatan kebutuhan penanganan. Permasalahan ini secara internal dilihat sebagai kelemahan (*weakness*) yang terkait dengan aspek pendukung pengembangan KPI di suatu wilayah. Berikut sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

6.1.2.1 Potensi Konflik Pengembangan Industri dengan Lahan Produktif dan Fungsi Budidaya

Potensi konflik ini terjadi karena adanya sejumlah perkembangan fungsi kegiatan di lahan-lahan yang telah teridentifikasi sebagai zona KPI Kabupaten Cirebon berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2018. Sejumlah potensi konflik dengan lahan budidaya yang telah terjadi antara lain:

- Arah lokasi pengembangan industri besar dan menengah yang masuk dalam KPI Rebana di wilayah Kecamatan Losari yang bersinggungan dengan lahan produktif (sawah dan tambak) serta permukiman
- Arah lokasi industri menengah/ sedang yang mengalami tekanan dari perkembangan fungsi permukiman (perumahan, perdagangan & jasa, dan fungsi pendukung permukiman) di Kecamatan Greded
- Pengembangan industri besar dan menengah yang berhimpitan dengan lokasi permukiman masyarakat khususnya di Kecamatan Losari dan Kecamatan Gebang.
- Arah KPI di wilayah Kecamatan Susukan yang saat ini merupakan Lahan Produktif Persawahan.



Gambar 6.5 Salah Satu Contoh Konflik Pengembangan Lahan KPI di Kecamatan Losari karena Perkembangan Permukiman dan Aktivitas Penduduk yang Sudah Sejak Lama Berada di Lokasi Terpilih Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon dan KPI Rebana di Cirebon.

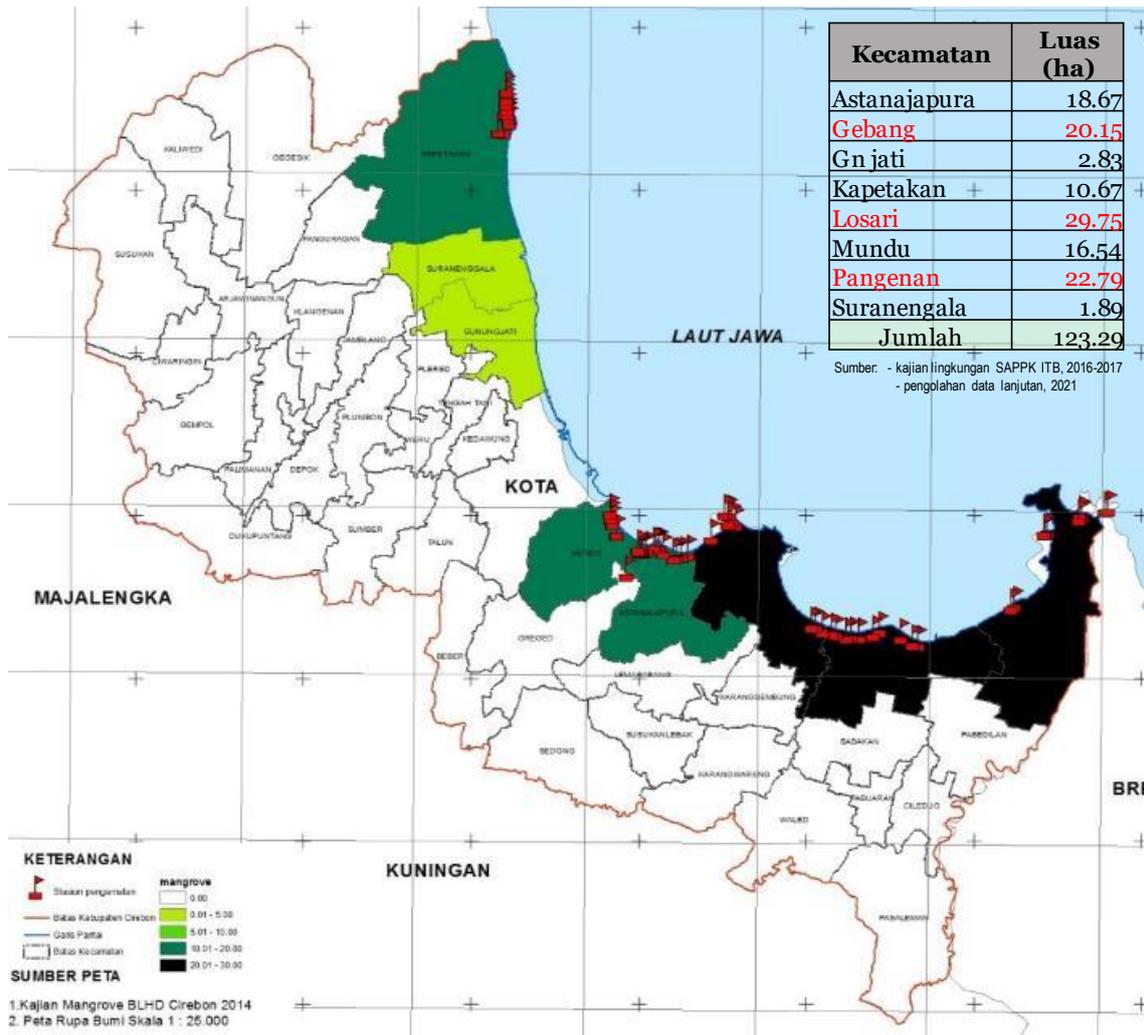
6.1.2.2 Potensi Konflik Pengembangan Industri dengan Lahan Berfungsi Lindung

Sejumlah potensi konflik juga terjadi pada kawasan berfungsi lindung yang sekitarnya diarahkan sebagai KPI. Salah satunya adalah potensi konflik pengembangan KPI di wilayah pesisir yang menjadi wilayah perkembangan dan rehabilitasi hutan *mangroove*. Dari segi perlindungan, ekosistem mangrove memiliki peran yang penting sebagai perisai pantai karena dapat mencegah intrusi air laut ke dalam ekosistem tambak serta dapat meredam gelombang sehingga dapat mempertahankan bentuk dari tambak itu sendiri. Bahkan, beberapa jenis mangrove contohnya dari jenis *Pandanus* sp dapat menyerap limbah (pencemaran) dari logam toksik sehingga dapat menjaga kualitas air. Adapun jenis mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon tidak berbeda dengan yang ada di daerah lain, seperti *Avicennia* sp., *Rhizophora* sp., *Bruguiera* sp., *Nypa* sp. dan lain-lain.



Gambar 6.6 Mangroove di Pesisir Laut Kabupaten Cirebon, umumnya berjenis Api-api (*Avicennia marina*) dan Bakau (*Rhizophora mucronata*)

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (2017) menyatakan bahwa luasan mangroove yang ada hanya sekitar 1.780 ha dengan kondisi rusak 480 ha, kondisi sedang 200 ha, dan rehabilitasi hanya 100 ha. Mangrove ditemukan mendominasi kawasan Losari, Pangenan dan Gebang (BLHD,2014). Sebaran hutan mangrove di pesisir Kabupaten Cirebon terdapat mulai dari Kecamatan Kapetakan hingga Kecamatan Losari. Luas hutan mangrove terbesar di Kecamatan Losari dengan luas 164,30 ha atau 46,53% dari total luas mangrove. Sementara luas hutan mangrove terkecil terdapat di Kecamatan Suranenggela dengan luas 2,60 ha atau 0,74% dari luas total mangrove di Kabupaten Cirebon (Fitriah et al.,2013). Kondisi mangrove yang relatif bagus dengan luasan cukup besar dijumpai di Kecamatan Gebang, Losari, Pangenan, dan Mundu. Berkurangnya areal hutan mangrove di enam kecamatan diakibatkan oleh abrasi pantai dan alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak. Sedangkan penambahan areal hutan mangrove di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Kapetakan merupakan bagian dari upaya rehabilitasi hutan mangrove baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.



Gambar 6.7 Sebaran Mangroove yang Masih Tersisa dan Dalam Proses Rehabilitasi di Pesisir Kabupaten Cirebon, Berpotensi Konflik dengan Arah Pengembangan KPI

Adapun ancaman perkembangan fungsi industri pada KPI terhadap areal mangroove bergantung pada jenis, volume dan daya cemar limbah setiap industri yang berbeda. Potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri di kawasan pesisir akan tergantung pada jenis-jenis dan banyaknya produk yang dihasilkan oleh industri tersebut dan jenis proses produksi yang digunakan. Jumlah limbah cair industri memang tidak sebesar limbah cair domestik dan kegiatan perkotaan, namun limbah dari kegiatan industri umumnya sangat pekat dan mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk itu diperlukan pengolahan limbah industri dalam sebuah instalasi pengolahan limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air.

Selain fungsi industri, pengembangan pelabuhan pendukung dan alur pelayarannya juga berpotensi konflik dengan areal rehabilitasi mangroove dan juga dengan fungsi sempadan pantai yang ada. Berdasarkan penelitian dari Dinas LH Kabupaten Cirebon (2014) dan SAPPK - ITB (2016), teridentifikasi abrasi di Kecamatan Kapetakan dan Suranenggala dengan intensitas yang relatif kecil. Luasan mangrove pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut Losari (29,75 ha), Gebang (20,15 ha), Pangenan (22,79 ha), Astanajapura (18,67 ha), Mundu (16,54 ha), Kapetakan (10,67 ha), Gunungjati (2,83 ha) dan Suranenggala (1,89 ha).

6.1.2.3 Keterbatasan Infrastruktur Pendukung

Sejumlah isu yang terkait dengan masalah infrastruktur pendukung perlu diperhatikan karena berpotensi menjadi penghambat pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Catatan mengenai infrastruktur penunjang kegiatan industri pada KPI di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- Sistem Jaringan Jalan;
 - Keterbatasan dimensi jalan pada ruas jalan tertentu khususnya lokasi industri menengah yang berada di sekitar kawasan permukiman. Kondisi ini menyebabkan adanya hambatan arus pergerakan kendaraan distribusi bahan baku maupun kendaraan distribusi produk seperti rotan, meubel, dan hasil industri pengolahan lainnya.
- Sistem Pengelolaan Limbah
 - Secara umum, Kabupaten Cirebon belum memiliki jaringan air limbah industri yang terpadu dan dikelola dengan baik.
 - Infrastruktur pengelolaan dan pengolahan air limbah dalam bentuk IPAL untuk industri masih terbatas pada industri skala besar yang menyediakan secara privat dan sejumlah prasarana yang disediakan namun belum dikelola secara maksimal. Prasarana IPAL yang tersedia untuk kebutuhan komunal antara lain IPAL Industri Batu Alam yang sempat tidak berfungsi sebelum dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyediaan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah, dan IPAL Industri Batik di wilayah Trusmi dan sekitarnya.
 - Untuk sistem pengolahan limbah padat, juga dirasa masih belum maksimal. Proses pembuangan limbah padat masih mengandalkan sistem open dumping yang sudah kurang sesuai dengan kaidah lingkungan hidup berkelanjutan, dimana upaya pemrosesan melalui pengolahan kembali limbah padat termasuk pemilahannya relatif masih rendah, terutama terkait keterbatasan pemanfaatan teknologi.
- Sistem Penyediaan Air Bersih / Air Baku
 - Permasalahan terkait dengan belum maksimalnya infrastruktur air PDAM untuk pelanggan industri
 - Potensi air bersih di beberapa lokasi terkendala dengan keterbatasan pengelolaan dan distribusi air bersih permukiman dan industri
- Sistem Drainase
 - Drainase Kabupaten Cirebon secara umum masih mengandalkan keberadaan drainase primer berupa jalur sungai/kanal alami dan jalur drainase primer dan sekunder yang berada pada jaringan jalan utama (Arteri). Untuk wilayah-wilayah yang lebih ke dalam kawasan terbangun, drainase cenderung terbatas dan kurang memperhatikan arah aliran air. Akibatnya, beberapa lokasi kegiatan permukiman dan fungsi industri kerap mengalami ancaman genangan pada saat hujan besar.
- Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran
 - Penanggulangan bencana termasuk antisipasi kebakaran dijalankan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Saat ini baru terdapat 10 pos Damkar dan 15 unit mobil pemadam. Jumlah ini tentunya relatif kecil mengingat jangkauan pelayanan bagi KPI yang cukup tersebar serta jumlah unit yang terbatas untuk mengantisipasi bencana.
- *Green Infrastructure* atau penyediaan infrastruktur hijau / berkelanjutan
 - Belum berkembangnya pemanfaatan infrastruktur hijau, ditengarai antara lain akibat lemahnya kesadaran sektor industri, kurangnya promosi pemanfaatan infrastruktur ramah lingkungan, serta lemahnya regulasi yang mengatur masalah penyediaan infrastruktur hijau ini.

6.1.3 Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan potensi eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan KPI Kabupaten Cirebon secara positif. Kemampuan dalam menangkap peluang akan menentukan kemungkinan perkembangan dan keberlanjutan sektor industri potensial di Kabupaten Cirebon. Sejumlah peluang yang dapat menjadi dukungan dan kesempatan yang perlu diadaptasi bagi perumusan kebijakan pengembangan KPI dijelaskan berikut ini.

6.1.3.1 Dukungan Kebijakan dan Arah Pengembangan Sektor Perindustrian

Sejumlah kebijakan pengembangan sektor perindustrian menjadi peluang yang membawa angin segar bagi upaya pengembangan perindustrian di Kabupaten Cirebon. Dukungan arah kebijakan pengembangan sektor perindustrian diantaranya:

a. Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN 2015 - 2035)

Dalam RIPIN 2015-2035, ditetapkan sejumlah sektor prioritas yang akan dikembangkan khususnya di wilayah Jawa Barat yang masuk dalam WPPI-2 di kawasan Ciayumajakuning. Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Ciayumajakuning akan sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan percepatan pengembangan perindustrian tersebut. Salah satu bentuk dukungan kebijakan adalah pengembangan infrastruktur, dukungan penanaman modal, serta berbagai kemudahan lainnya yang perlu ditangkap oleh Kabupaten Cirebon.

Tabel 6.4 Wilayah Cirebon sebagai Salah Satu Penggerak Utama (*Prime Mover*) Pengembangan Wilayah Industri Nasional dalam RIPIN 2015-2035

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
6	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang -Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
11	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai -Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

b. Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP Jabar, 2018)

RPIP Jabar disusun dengan memperhatikan arahan RIPPIN. Karenanya, terdapat penekanan rencana pengembangan sektor prioritas di Jawa Barat dengan strategi relokasi industri dari WPPI-1 di wilayah Barat (Bodebek) ke WPPI-2 di wilayah Timur (Ciayumajakuning). Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan wilayah provinsi Jawa Barat, sekaligus percepatan pertumbuhan wilayah Timur Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6.5 Strategi Penetapan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat untuk Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Keterangan
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan	Aneka olahan ikan dan hasil laut lainnya (termasuk minyak ikan, suplemen, dan pangan fungsional lainnya.)
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> Furniture kayu dan rotan; Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu
3	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan	Perawatan kapal
4	Industri Hulu Agro	Industri Pakan	Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aqua culture</i>
		Industri Barang dari Kayu	<ul style="list-style-type: none"> Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated, and finger joint</i>), serat bambu untuk tekstil, <i>wood moulding products</i>
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Bahan Galian Non-Logam	

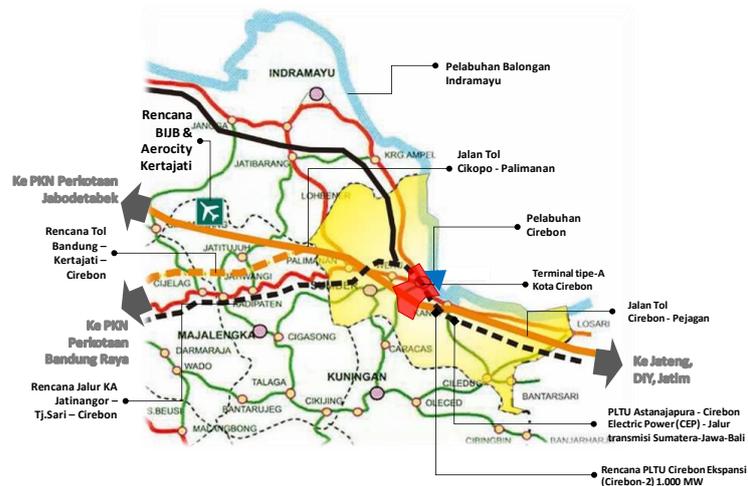
Sumber: Pengolahan Data RPIP Jawa Barat, 2018

6.1.3.2 Dukungan Arah Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Regional

Arah pengembangan regional Jawa Barat, baik dalam kebijakan Nasional maupun kebijakan Provinsi, diarahkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di tiga kutub utama: Metropolitan Bandung Raya (KSN Cekungan Bandung), Metopolitan Bodebek (KSN Jabodetabek), serta Metropolitan Cirebon Raya (KSN Ciayumajakuning). Kebijakan ini diejawantahkan dalam bentuk program-program pengembangan wilayah yang disarikan sebagai berikut:

- Fokus pengembangan wilayah Timur Jawa Barat: Kebijakan pengembangan Metropolitan Cirebon kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam program pengembangan Segitiga Ekonomi REBANA, dikenal juga sebagai Metropolitan Rebana. Kawasan ini terletak di wilayah utara/timur laut Provinsi

Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, serta Kota Cirebon. Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik.



Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan, melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Integrasi yakni mewujudkan sinergi pengembangan kawasan melalui integrasi rantai logistik industri besar, menengah, kecil dan peningkatan konektivitas kawasan untuk integrasi hubungan logistik kawasan industri, kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Rebana juga diproyeksikan sebagai Super Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan kemudahan fiskal maupun non-fiskal, untuk meningkatkan daya saing investasi di kawasan yang didukung kesiapan infrastruktur penunjang. Beberapa pengembangan kawasan industri yang diutamakan di Rebana Metropolitan meliputi area Subang Barat, Indramayu, Kertajati, Jatiwangi, Cirebon, Krangkeng, Tukdana, Balongan, Butom, Losarang, Patrol, serta Patimban.

- Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi; arahan kebijakan ini tertuang dalam Raperpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021. Didalamnya terdapat kebijakan dan strategi utama yang mendasari program rencana aksi yaitu:
 - Mengembangkan KPI, Kota Baru, SIKM, dan sentra produksi di kawasan perdesaan
 - Mengembangkan sistem rantai logistik terintegrasi antara industri besar dan IKM

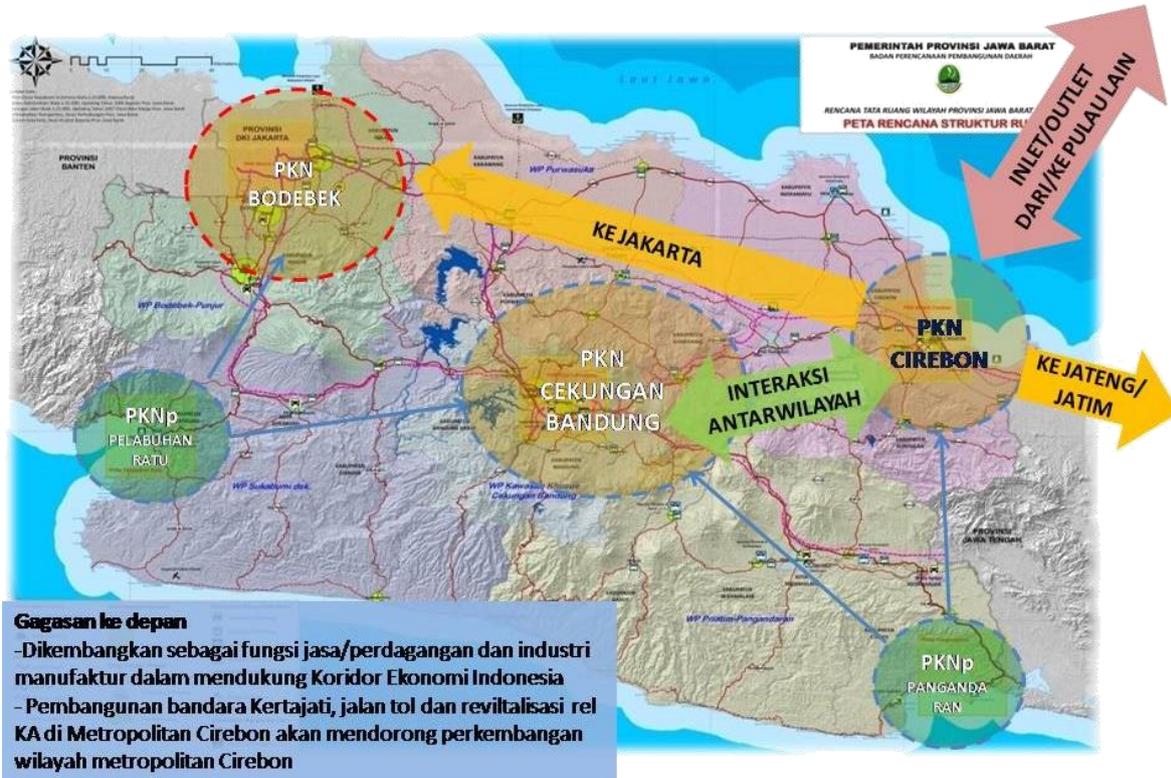
Tabel 6.6 Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi di Jawa Barat Bagian Timur

NO	PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										KEMENTERIAN/ LEMBAGA	SUMBER DANA				
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Pembangunan Interchange Akses Tol Cipali (Subang KM109 - Patimban)	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
2	Pembangunan Jalan Tol Cipali - Palasah - Jatiwangi	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
3	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - Aerocity	Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
4	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Kab. Subang															Kementerian Perhubungan	APBN
5	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
6	Peningkatan kelas Jalan Sarengeng - Pabuaran	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
7	Peningkatan kelas Jalan Cipeunduy - Pabuaran	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
8	Peningkatan status Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional	Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang															Kementerian PUPR	APBN
9	Peningkatan Jalan Conggeang - Ujungjaya	Kec. Conggeang, Kec. Ujungjaya															Kementerian PUPR	APBN
10	Peningkatan Jalan Ujungjaya - Palasah	Kec. Ujungjaya															Kementerian PUPR	APBN
11	Peningkatan Ruas Jalan Cisumur - Nangarang/Kab Subang	Kab. Sumedang, Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
12	Peningkatan Jalan Burujul - Sanca	Kab. Sumedang, Kab. Indramayu															Kementerian PUPR	APBN
13	Peningkatan Jalan Lebaksiuh - Kadu	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
14	Pembangunan Ruas Jalan Cijurey-Darmawang	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
15	Pelebaran jalan kabupaten (pusakanagara - patimban)	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
16	Peningkatan kelas Jalan Pusakanagara - Tanjung	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
17	Peningkatan kelas Jalan Kamarung - Tanjung	Kab. Subang															Kementerian PUPR	APBN
18	Pembangunan Jalan Jatitjuh - Liung	Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
19	Pelebaran Jalan Cigasong - Maia	Kab. Majalengka															Kementerian PUPR	APBN
20	Pembangunan Rel KA Rancaek - Tanjungsari - Akses Bandara Kertajati	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka															Kementerian Perhubungan	APBN
21	Reaktivasi Rel KA (Kota Cirebon - Kadipaten Kab. Majalengka)	Kab. Cirebon, Kab. Majalengka															Kementerian Perhubungan	APBN
22	Pembangunan Rel KA Subang - Akses Pelabuhan Patimban	Kab. Subang															Kementerian Perhubungan	APBN
23	Pembangunan Rel KA (Jatiwangi - Kertajati) Kab. Indramayu	Kab. Indramayu, Kab. Majalengka															Kementerian Perhubungan	APBN
24	Pembangunan Rel KA Subang-Kertajati	Kab. Subang, Kab. Majalengka															Kementerian Perhubungan	APBN
25	Pembangunan SMK dan Sekdah Tinggi Maritim dan Logistik	Kec. Pusakanagara, Kab. Subang															Kemen. Pendidikan dan Kebudayaan	APBN
26	Pembangunan gardu induk Patimban, Cibogo, Sukamand-Haurgeulis, Indramayu, Kadipaten	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka															Kementerian ESDM	APBN
27	Pembangunan SUT	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka															Kementerian ESDM	APBN
28	Pembangunan pembangkit listrik	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka															Kementerian ESDM	APBN
29	Pembangunan Rumah Susun Pekerja	13 KPI															Kementerian PUPR	APBN
30	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang															Kementerian PUPR	APBN
31	Pembangunan waduk untuk mendukung air baku kegiatan industri	Cipunagara, Kab. Subang, Sadawarna, Kab. Subang, Kadumalik, Kab. Majalengka, Cilame, Cipanas, Kab. Sumedang															Kementerian PUPR	APBN
32	Pengembangan IPLT	13 KPI															Kementerian PUPR	APBN
33	Peningkatan Skema Pembiayaan HAKI, Modal Ventura, dan Hibah untuk industri kreatif	Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu															Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN
34	Penyelenggaraan event business meeting dan promosi Kawasan	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Majalengka															Kemen. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBN

Sumber: LAMPIRAN RAPERPRES Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, 2021

- Arahan Tata Ruang dalam RTRWP Jabar; dalam revisi RTRWP Jawa Barat yang masih belangsung hingga tahu 2021 ini, terdapat kebijakan untuk melakukan pengendalian WP Utara Prov. Jawa Barat dan mendorong segitiga WP Timur Prov. Jawa Barat. WP Timur yang dimaksud adalah wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Salah satu program yang mendukung

kebijakan tersebut adalah dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Jawa Barat, dan pemerataan pertumbuhan wilayah serta memperhatikan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah strategis yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



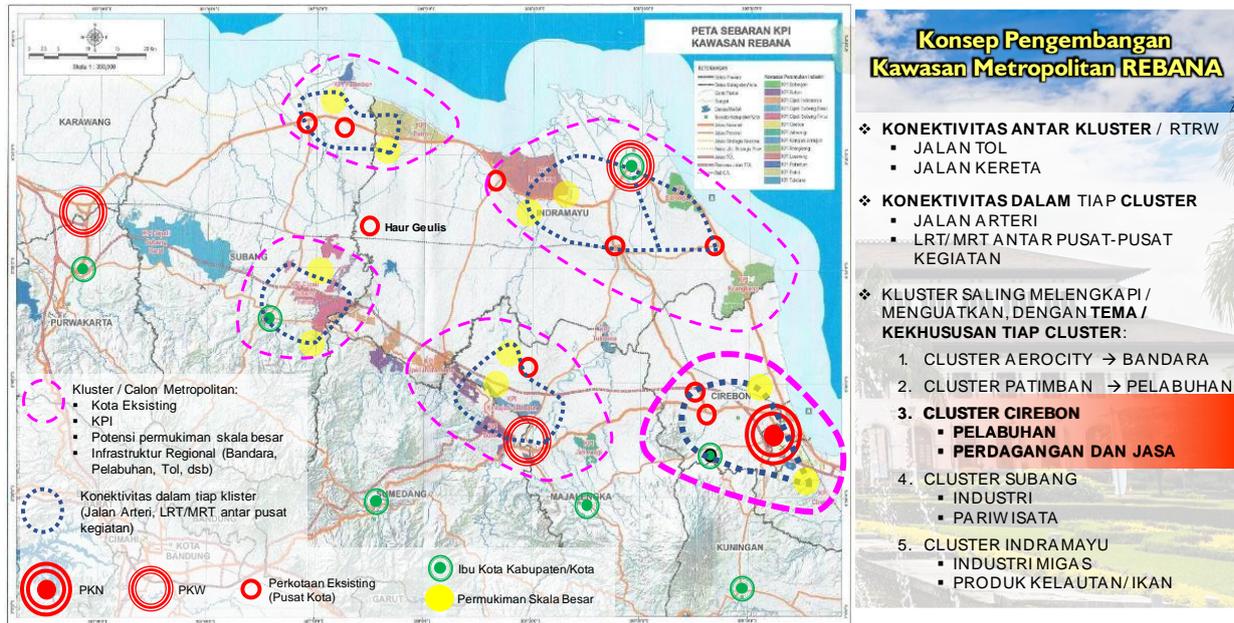
Gambar 6.8 Arahan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang Mendorong Perkembangan Pertumbuhan Jabar bagian Timur (PKN Cirebon)

Implikasi dari arah pengembangan wilayah ini adalah adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan program pemerintah dalam bentuk infrastruktur wilayah, program investasi, termasuk program pengembangan industri skala besar dan menengah maupun kegiatan industri lainnya yang dapat menjadi pendorong pembangunan wilayah Kabupaten Cirebon. Peluang program-program tersebut tentunya perlu ditangkap dan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengantisipasi sekaligus memanfaatkan kemudahan pembangunan yang dapat diperoleh oleh Kabupaten Cirebon, khususnya dalam pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

- Fokus pengembangan kawasan REBANA; Kebijakan ini sesungguhnya merupakan strategi yang diturunkan dari konsep pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam draft Revisi RTRWP Jawa Barat. Untuk percepatan pembangunan, implementasi pengembangan kawasan khusus Rebana ini dituangkan terlebih dahulu kedalam produk resmi kebijakan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 85 tahun 2020.

Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan pinggiran perkotaan di Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa. Pemprov Jabar menyusun konsep pengembangan kawasan

Metropolitan Rebana agar pengembangan kawasan berbasis industri tidak sporadis dan memiliki tema ecoindustry, serta menata pusat –pusat pertumbuhan ekonomi baru ke dalam Pengembangan Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat mengadopsi Konsep Multi-Nodal, dimana Kota Cirebon sebagai Kota Inti (City-centered) , Kawasan Patimban dan Kertajati sebagai Simpul Kawasan Perkotaan (Urban-Nodes) yang terhubung oleh infrastruktur, serta terhubung pula dengan Kawasan perkotaan lain yang koheren dan terintegrasi



Gambar 6.9 Konsep Pengembangan Metropolitan Rebana

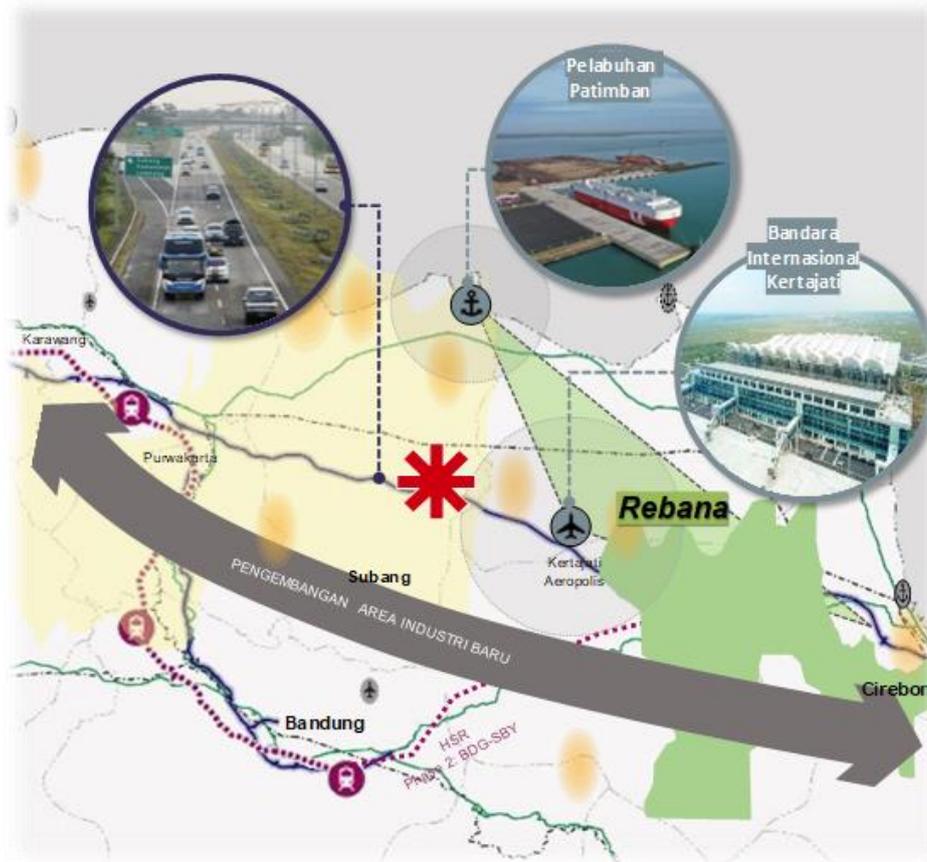
- Peningkatan konektivitas wilayah; kebijakan sektor perhubungan ini berkaitan erat dengan kebijakan penataan ruang Nasional serta Provinsi yang mengarahkan pengembangan Jawa Barat bagian Timur sebagai pendorong ekonomi baru. Sejumlah infrastruktur perhubungan yang disiapkan dan dapat mendukung upaya pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon diantaranya:
 - Jaringan Jalan berupa Jalan Tol Cipali, Tol Cismudawu, dan Rencana Tol Patimban,
 - Simpul perhubungan berupa Bandara Udara (BIJB Kertajati di Majalengka), Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Losarang, dan Pelabuhan Cirebon
 - Rencana Akses Jaringan Rel Kereta Tanjung Sari – BIJB- Arjawinangun serta jalur Kereta Patimban.

Tabel 6.7 Rencana Pengembangan Transportasi Provinsi Jawa Barat yang Terhubung Langsung dengan Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Jenis Prasarana / Sarana	Lokasi	Keterangan
1	Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Cirebon	
2	Jalur KA Antar Kota	Bandung – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon	
3	Jalur KA Perkotaan	Kadipaten – Cirebon	
4	Pelabuhan Sungai	Kabupaten Cirebon	Sesuai dengan Kepmenhub 432/ 2017 tentang RIPN
5	Pelabuhan Pengumpan	Kabupaten Cirebon	

Sumber: Adaptasi Draft Revisi RTRWP Jawa Barat, 2021

Pengembangan sistem jaringan transportasi tersebut tentunya akan mempermudah konektivitas wilayah untuk perolehan bahan baku maupun untuk distribusi hasil produksi. Hal ini menjadi salah satu bentuk peluang positif bagi pengembangan industri pengolahan dan IKM yang menjadi salah satu potensi penggerak industri lokal di Kabupaten Cirebon.



Gambar 6.10 Arahan Pengembangan Jaringan Transportasi Untuk Mempermudah Akses ke Wilayah Timur Provinsi Jawa Barat – Terkait dengan Kebijakan Pengembangan Metropolitan / Kawasan Ekonomi Rebana

Demikian halnya dengan rencana pengembangan jaringan infrastruktur wilayah di Kabupaten Cirebon yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan sumberdaya pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

Tabel 6.8 Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Cirebon berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

No	Sistem Infrastruktur Wilayah	Jenis Jaringan Infrastruktur	Lokasi / Keterangan
1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pipa minyak Jaringan pipa gas Sumur gas 	Kab. Cirebon
2	Pembangkit Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 	
3	Jaringan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Embung Air Tanah Dalam (CAT) 	<ul style="list-style-type: none"> CAT Sumber-Cirebon CAT Lintas Provinsi Tegal-Brebes
4	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede) 	Kab. Cirebon – Kab. Kuningan
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> SPALD Ciayumajakuning 	Kec. Gunungjati (PSP)
6	Sistem Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Cirebon Solid Waste Treatment Plant (PSP) Kec. Gempol dan Kec. Ciwaringin

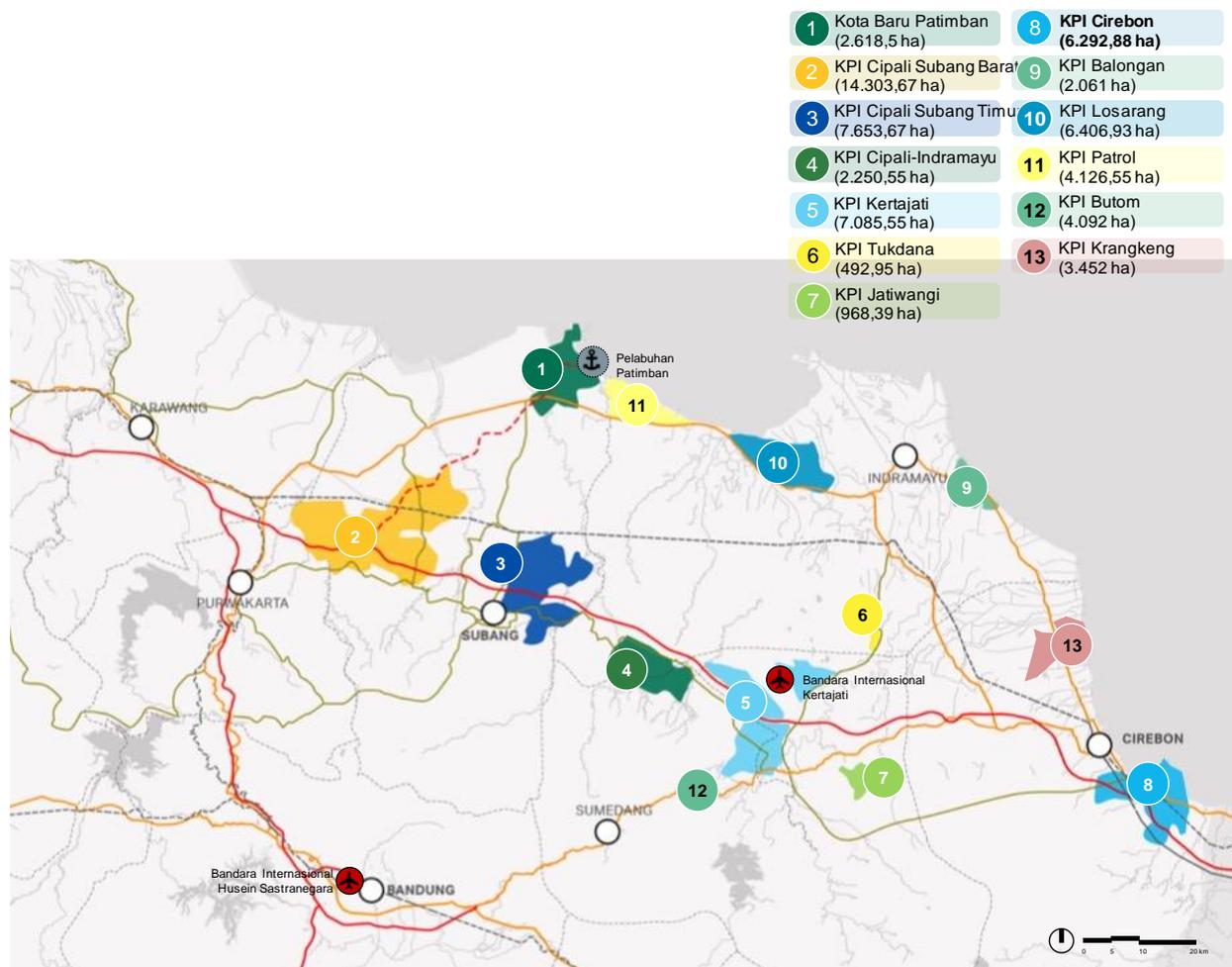
Sumber: Adaptasi Draft Revisi RTRWP Jawa Barat, 2021

6.1.4 Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Tantangan pengembangan KPI berasal dari kondisi eksternal di luar wilayah yang dapat mempengaruhi dinamika perkembangan dan kesempatan dalam meraih peluang pengembangan bagi KPI Kabupaten Cirebon. Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Cirebon dijelaskan berikut.

6.1.4.1 Arah Kebijakan Regional terkait KPI di Kawasan Rebana

Rencana pengembangan KPI Rebana dituangkan dalam Revisi Program Pemanfaatan Ruang pada RTRWP Jawa Barat yang didukung dengan penyiapan Raperpres cepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dalam Pengembangan Kawasan Cirebon-patimban-kertajati. Salah satu catatan penting bahwa dalam ajuan draft awal Raperpres ini, ternyata tidak seluruh areal KPI Kabupaten Cirebon menjadi prioritas dalam Rencana Pengembangan KPI REBANA.

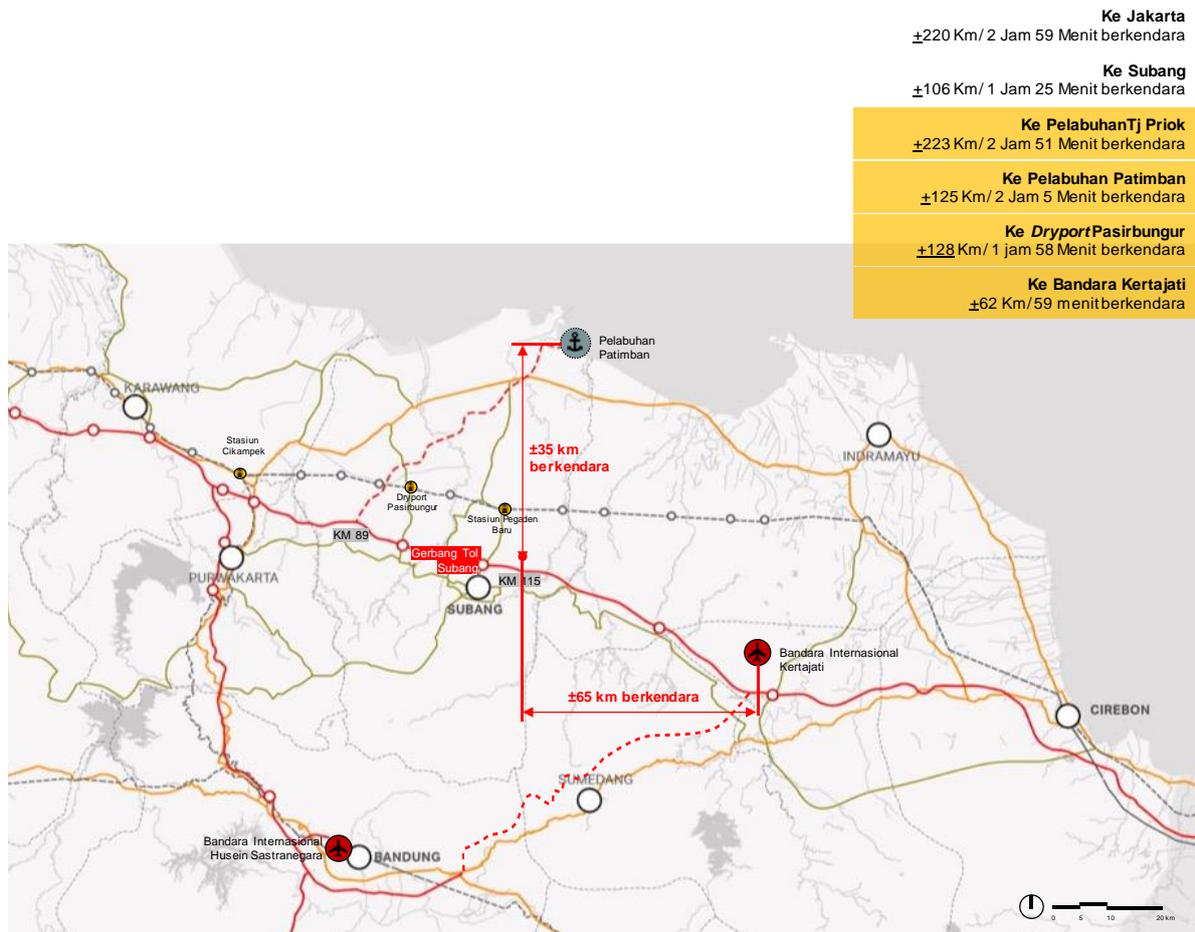


Gambar 6.11 Luasan dan Pembagian Cluster Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Penunjang Kawasan Ekonomi Rebana Provinsi Jawa Barat

Meski usulan pengembangan luasan KPI Kabupaten Cirebon sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun tetap perlu diantisipasi seandainya ada posisi KPI yang tidak termasuk dalam area pengembangan KPI Rebana yang menjadi prioritas regional.

6.1.4.2 Tantangan Potensi Perkembangan Daerah Sekitar Kabupaten Cirebon

Seiring dengan arah kebijakan pengembangan kawasan Rebana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu sudah mengembangkan simpul transportasi regional dalam skala yang cukup besar di wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Majalengka. Pengembangan Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati di Majalengka, dan sejumlah rencana Infrastruktur Regional lainnya tentunya akan memberi nilai tambah bagi Daerah pengembangan infrastruktur tersebut, khususnya dari aspek konektivitas wilayah maupun dari adanya rencana investasi yang dapat mendukung pengembangan dan pemanfaatan simpul transportasi regional tersebut.



Gambar 6.12 Lokasi Simpul Transportasi Regional di Daerah-Daerah Sekitar Kabupaten Cirebon yang Memberi Kemudahan dan Keunggulan Posisi dan Akses dibanding Kabupaten Cirebon

Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri dimana wilayah yang menjadi simpul pengembangan transportasi regional akan memiliki keunggulan komparatif dalam hal kemudahan aksesibilitas dengan pusat perekonomian nasional di Bandung dan Jabodetabek serta terhubung langsung dengan pusat-pusat regional lainnya di luar wilayah Jawa Barat. Karenanya, perlu dicermati bagaimana Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan nilai tambah daerah guna mengimbangi potensi keunggulan wilayah lainnya tersebut. Aspek-aspek potensi internal kawasan perlu dicermati lebih lanjut dalam upaya perbandingan dengan wilayah lain untuk melihat bagaimana Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan nilai keunggulan komparatif yang dimiliki secara lokal (*indigenous development*) sehingga KPI di Kabupaten Cirebon tetap memiliki nilai tawar yang lebih baik untuk mengimbangi kelebihan potensi wilayah lain.

6.2 Analisis SWOT terkait Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/tantangan). Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) adalah berasal dari internal, yaitu hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman/tantangan) adalah hal eksternal di luar wilayah yang mempengaruhi kondisi daerah, yang merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol langsung namun dapat diantisipasi dan dihadapi dengan strategi yang tepat.

Dalam Analisis SWOT, faktor-faktor pembentuk tersebut dapat saling berkaitan, sebagaimana berikut:

- kekuatan (*strengths*), mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada,
- kelemahan (*weaknesses*), dapat mencegah keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada,
- kekuatan (*strengths*), mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan
- kelemahan (*weaknesses*), dapat menimbulkan ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Bagian berikut ini akan menjabarkan hasil analisis SWOT berdasarkan pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang telah diuraikan pada sub-bab di atas.

6.2.1 Uraian Faktor SWOT

Sejumlah faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) diuraikan sebagaimana di bawah ini.

Kekuatan

- Ketersediaan lahan
- Daya Dukung lahan
- Lokasi strategis
- Potensi SDM dari segi upah dan peluang peningkatan kemampuan
- Sektor unggulan yang sudah berkembang
- Potensi infrastruktur energi dan sumberdaya air

Kelemahan

- Konflik pemanfaatan lahan → bisa menjadi kontraproduktif dalam jangka panjang
- Keterbatasan infrastruktur pengelolaan lingkungan
- Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal
- Ketergantungan terhadap sumber bahan baku dari luar wilayah
- Rantai industri masih belum efisien

Peluang

- Arah kebijakan industri dan pengembangan regional yang mendorong pembangunan wilayah timur Jawa Barat
- Kemudahan aksesibilitas melalui penyediaan jaringan perhubungan regional (hub-hub transportasi utama dan jaringan penghubung yang memudahkan distribusi dan komunikasi)
- Pengakuan terhadap produk-produk unggulan wilayah

Tantangan

- Kemudahan aksesibilitas wilayah lain yang bisa memberi kemudahan dan kecepatan akses distribusi dan produksi
- Tidak seluruh areal KPI Kab.Cirebon menjadi prioritas dalam pengembangan KPI regional (konsep REBANA)

Gambar 6.13 Matriks SWOT Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

6.2.1.1 Kekuatan

Kekuatan utama yang menjadi sumberdaya potensial bagi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon adalah:

- ✓ Ketersediaan lahan yang masih cukup luas, dimana pemanfaatan ruang KPI untuk kegiatan industri secara keseluruhan baru mencapai 10,38% dari total KPI tersedia berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2018.
- ✓ Daya Dukung lahan, dimana secara keseluruhan wilayah memiliki kecenderungan untuk mendukung pengembangan KPI pada 80% wilayah peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon.
- ✓ Lokasi strategis, mengingat posisinya yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah, serta dilalui jaringan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan dan perekonomian seperti koridor Jakarta – Cirebon – Semarang.
- ✓ Potensi SDM dari segi upah dan peluang peningkatan kemampuan, dimana secara UMK Kabupaten Cirebon termasuk nomor-2 terendah di wilayah Ciayumajakuning sehingga cukup menarik bagi investor sektor industri. Di sisi lain, keberadaan sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan tinggi menyebabkan kemungkinan potensi SDM Kabupaten Cirebon dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tambahan yang terus berkembang.
- ✓ Sektor unggulan yang sudah berkembang, dimana sejumlah sub-sektor ekonomi industri telah berkembang lama dan dikenal dengan kualitas produk, kemurnian produk, serta kemudahan distribusi produk. Karenanya, sektor-sektor unggulan ekonomi di Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan '*brand*' yang dapat dijadikan modal untuk berkembang.
- ✓ Potensi infrastruktur energi dan sumberdaya air, dimana pembangunan pembangkit listrik yang terhubung dengan sistem pembangkit Jawa-Bali telah mendukung kebutuhan energi listrik bagi industri yang telah berkembang dan akan berkembang, serta adanya potensi sumber daya air yang akan bermanfaat bagi kegiatan industri maupun kegiatan lainnya.

Penjelasan masing-masing pointers di atas telah dijabarkan dalam bagian Potensi pada sub-bab sebelum ini.

6.2.1.2 Kelemahan

Berdasarkan sintesa terhadap aspek negatif yang termuat secara internal wilayah Kabupaten Cirebon, kelemahan utama dalam upaya pengembangan KPI adalah:

- ✓ Konflik pemanfaatan lahan antara KPI dengan kawasan lindung atau kawasan potensial produktif budidaya yang bisa menjadi kontraproduktif dalam jangka panjang;
- ✓ Keterbatasan infrastruktur pengelolaan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan industri dalam jangka panjang;
- ✓ Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, terkait dengan penguasaan teknologi dan keterbatasan inovasi daerah;
- ✓ Ketergantungan terhadap sumber bahan baku dari luar wilayah, termasuk untuk industri yang selama ini menjadi unggulan seperti batu alam, rotan dan meubeul, serta pengolahan makanan dan batik.
- ✓ Rantai industri masih belum efisien, dimana industri kecil dan menengah belum banyak mendongkrak perekonomian masyarakat karena harga produk yang tinggi tidak dinikmati oleh penghasil bahan baku maupun pengolah produk hulu dan hilir karena ketidak efisienan rantai industri ini.

6.2.1.3 Peluang

Sejumlah peluang yang berasal dari eksternal wilayah Kabupaten Cirebon dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mengembangkan perindustrian daerah dengan memanfaatkan intervensi kebijakan maupun arah dinamika industri di luar wilayah yang dapat mendorong / mengungkit perkembangan perindustrian lokal. Peluang tersebut antara lain:

- ✓ Arah kebijakan industri dan pengembangan regional yang mendorong pembangunan wilayah timur Jawa Barat, dimana wilayah Cirebon masih menjadi salah satu primadona utama dengan lokasinya yang strategis sebagai penghubung antar pusat kegiatan dan perbatasan lintas Provinsi.
- ✓ Kemudahan aksesibilitas melalui penyediaan jaringan perhubungan regional, didukung dengan keberadaan hub-hub transportasi utama dan jaringan penghubung yang memudahkan distribusi dan komunikasi dari dan keluar wilayah Kabupaten Cirebon.
- ✓ Pengakuan terhadap produk-produk unggulan wilayah yang telah dikenal sejak lama berdasarkan potensi produk industri yang ada, menyebabkan terjaganya minat dari luar terhadap produk industri di Kabupaten Cirebon, yang dapat menjadi preseden positif bagi pengembangan perindustrian di wilayah ini. Pengakuan pasar juga akan sangat mendukung terjaganya reputasi Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah industri potensial, yang dapat mendorong arah investasi dari luar menuju wilayah ini.

6.2.1.4 Tantangan

Faktor eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Ancaman ini perlu dipandang secara positif sebagai suatu bentuk tantangan terhadap pengembangan KPI, antara lain:

- ✓ Dukungan aksesibilitas wilayah lain yang bisa memberi kemudahan dan kecepatan akses distribusi dan produksi, seperti keberadaan Pelabuhan Patimban yang dapat mendukung pengembangan industri di Kabupaten Subang dan Bandara Kertajati yang mendukung perekonomian Kabupaten Majalengka.
- ✓ Tidak seluruh areal KPI Kab.Cirebon menjadi prioritas dalam pengembangan KPI regional; dalam konsep pengembangan metropolitan REBANA, Cluster KPI Cirebon hanya tercatat sekitar 1800 Ha atau sekitar 20% dari potensi KPI yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Akibatnya, perlu dipikirkan bagaimana pengelolaan terhadap wilayah peruntukan industri lainnya yang tidak masuk dalam perencanaan KPI Rehana. Intervensi Pemerintah Daerah tentunya akan sangat diperlukan agar KPI yang tidak masuk Rehana dapat tetap berkembang dan mengoptimalkan pemanfaatan ruangnya dengan dukungan sumberdaya yang ada, termasuk dukungan infrastruktur penunjang yang disiapkan secara mandiri oleh Kabupaten Cirebon.

6.2.2 Sintesa SWOT dan Perumusan Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Hasil uraian faktor SWOT akan menghasilkan matriks sintesa yang mengkombinasikan faktor internal dengan faktor eksternal, baik dalam memaksimalkan potensi maupun mengatasi kendala. Kombinasi faktor yang menjadi sintesa SWOT terdiri dari:

- Kekuatan – Peluang (*Strength-Opportunities* atau *SO*)
- Kekuatan – Tantangan (*Strength-Threat* atau *ST*)
- Kelemahan – Peluang (*Weakness-Opportunities* atau *WO*)
- Kelemahan – Tantangan (*Weakness-Threat* atau *WT*)

	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan lahan ▪ Daya Dukung lahan ▪ Lokasi strategis ▪ Potensi SDM dari segi upah dan peluang peningkatan kemampuan ▪ Sektor unggulan yang sudah berkembang ▪ Potensi infrastruktur energi dan sumberdaya air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konflik pemanfaatan lahan → bisa menjadi kontraproduktif dalam jangka panjang ▪ Keterbatasan infrastruktur pengelolaan lingkungan ▪ Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal ▪ Ketergantungan terhadap sumber bahan baku dari luar wilayah ▪ Rantai industri masih belum efisien
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arah kebijakan industri dan pengembangan regional yang mendorong pembangunan wilayah timur Jawa Barat ▪ Kemudahan aksesibilitas melalui penyediaan jaringan perhubungan regional (hub-hub transportasi utama dan jaringan penghubung yang memudahkan distribusi dan komunikasi) ▪ Pengakuan terhadap produk-produk unggulan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memanfaatkan keunggulan komparatif aspek lahan dan ketersediaan SDM dalam menangkap peluang pengembangan industri regional ✓ Fokus pada industri unggulan yang sudah berkembang ✓ Memanfaatkan dukungan infrastruktur regional untuk pengembangan industri wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan Kawasan Industri dan fungsi kegiatan KPI lainnya perlu didukung dengan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan yang jelas & transparan ✓ Perlu memaksimalkan dan mencari alternatif bagi linkage produksi (bahan baku – industri pengolahan)
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlunya meningkatkan kualitas SDM lokal untuk menguasai teknologi produksi dan menguasai prinsip kerja sektor industri maju ✓ Menyiapkan rencana pengembangan industri lokal diluar KPI Rebana sebagai bentuk pendorong pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal yang khas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan pusat-pusat produksi bahan baku yang dapat terkoneksi dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai produksi ✓ Melakukan pembenahan infrastruktur untuk memberi nilai tambah industri lokal ✓ Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi terapan

Gambar 6.14 Output Analisis SWOT /Kebutuhan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Berikut uraian dari masing-masing kombinasi faktor yang saling menguatkan atau dapat melemahkan sehingga menimbulkan kebutuhan rumusan strategis pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

6.2.2.1 SO (Kekuatan-Peluang)

Kekuatan yang digunakan dalam menangkap peluang akan menghasilkan sejumlah keunggulan dalam upaya pengembangan KPI. Sintesa kekuatan yang dapat digunakan dalam menangkap peluang untuk memperkuat upaya pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon dijelaskan berikut:

- Memanfaatkan keunggulan komparatif aspek lahan dan ketersediaan SDM dalam menangkap peluang pengembangan industri regional
- Fokus pada industri unggulan yang sudah berkembang
- Memanfaatkan dukungan infrastruktur regional untuk pengembangan industri wilayah

6.2.2.2 ST (Kekuatan-Tantangan)

Kekuatan digunakan dalam menghadapi tantangan atau ancaman terhadap potensi KPI. Dengan memanfaatkan kekuatan internal, diharapkan dapat mereduksi ancaman/tantangan yang dapat menghambat pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Kebutuhan dalam menghadapi tantangan melalui pemanfaatan kekuatan secara strategis adalah:

- Perlunya meningkatkan kualitas SDM lokal untuk menguasai teknologi produksi dan menguasai prinsip kerja sektor industri maju;
- Menyiapkan rencana pengembangan industri lokal diluar KPI Rebana sebagai bentuk pendorong pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal yang khas.

6.2.2.3 WO (Kelemahan-Peluang)

Kelemahan dapat mengurangi potensi pemanfaatan peluang dalam pengembangan KPI. Karenanya, diperlukan sejumlah intervensi untuk mengatasi kelemahan internal agar dapat menjaga kesempatan

untuk menangkap peluang pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Intervensi yang dimaksud antara lain:

- Pengembangan Kawasan Industri dan fungsi kegiatan KPI lainnya perlu didukung dengan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan yang jelas & transparan;
- Perlu memaksimalkan dan mencari alternatif bagi *linkage* produksi (bahan baku - industri pengolahan).

6.2.2.4 WT (Kelemahan-Tantangan)

Kelemahan dapat menghambat upaya pengembangan KPI terutama ketika berhadapan dengan ancaman/tantangan dari luar. Guna mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi kelemahan sekaligus mengantisipasi ancaman/tantangan eksternal, antara lain:

- Mengembangkan pusat-pusat produksi bahan baku yang dapat terkoneksi dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai produksi
- Melakukan pembenahan infrastruktur untuk memberi nilai tambah industri lokal
- Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi terapan

6.3 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

6.3.1 Tujuan, dan Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui sejumlah kebutuhan pengembangan KPI dalam memaksimalkan potensi dan mengatasi kendala pengembangan. Kebutuhan pengembangan KPI secara umum menghasilkan isu utama dalam pengembangan KPI Kabupaten Cirebon yang selanjutnya akan dijawab dalam konsep Tujuan dan Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.

- ❖ Isu utama pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon terkait kebutuhan dalam memperkuat potensi untuk mengatasi permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan pengembangan Industri di Kabupaten Cirebon.



Gambar 6.15 Rumusan Isu Utama dalam Upaya Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

- ❖ Tujuan Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon adalah: Berkembangnya Industri Kabupaten Cirebon yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang pengembangan KPI.
- ❖ Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon merupakan bentuk uraian pencapaian tujuan kedalam milestones/sasaran antara yang menjadi indikator pencapaian tujuan. Sasaran tersebut terdiri dari:
 - Tersedianya lahan pengembangan industri sesuai dengan potensi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon
 - Berkembangnya kegiatan industri yang dapat memanfaatkan potensi sumberdaya secara maksimal
 - Berkembangnya kegiatan industri unggulan yang didukung penguasaan teknologi dan menghasilkan produk bernilai tambah maksimal yang dapat menjadi keunggulan wilayah



Gambar 6.16 Reformulasi Tujuan dan Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

6.3.2 Strategi Pencapaian Sasaran Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tujuan dan sasaran pengembangan KPI, selanjutnya dirumuskan sejumlah strategi untuk pencapaian sasaran pengembangan KPI Kabupaten Cirebon sebagaimana berikut.

6.3.2.1 Strategi Pencapaian Sasaran -1

Sasaran-1 adalah **tersedianya lahan pengembangan industri sesuai dengan potensi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon**. Sasaran ini dapat dicapai melalui penetapan ruang KPI yang mempertimbangkan aspek Daya Dukung Lingkungan dan kesesuaian terhadap dinamika pemanfaatan ruang wilayah. Penyediaan lahan ini tentunya perlu didukung dengan sejumlah regulasi baik dalam penataan ruang, penyiapan aturan zonasi, hingga aturan perizinan pemanfaatan ruang bagi pola ruang peruntukan industri yang sudah ditetapkan.

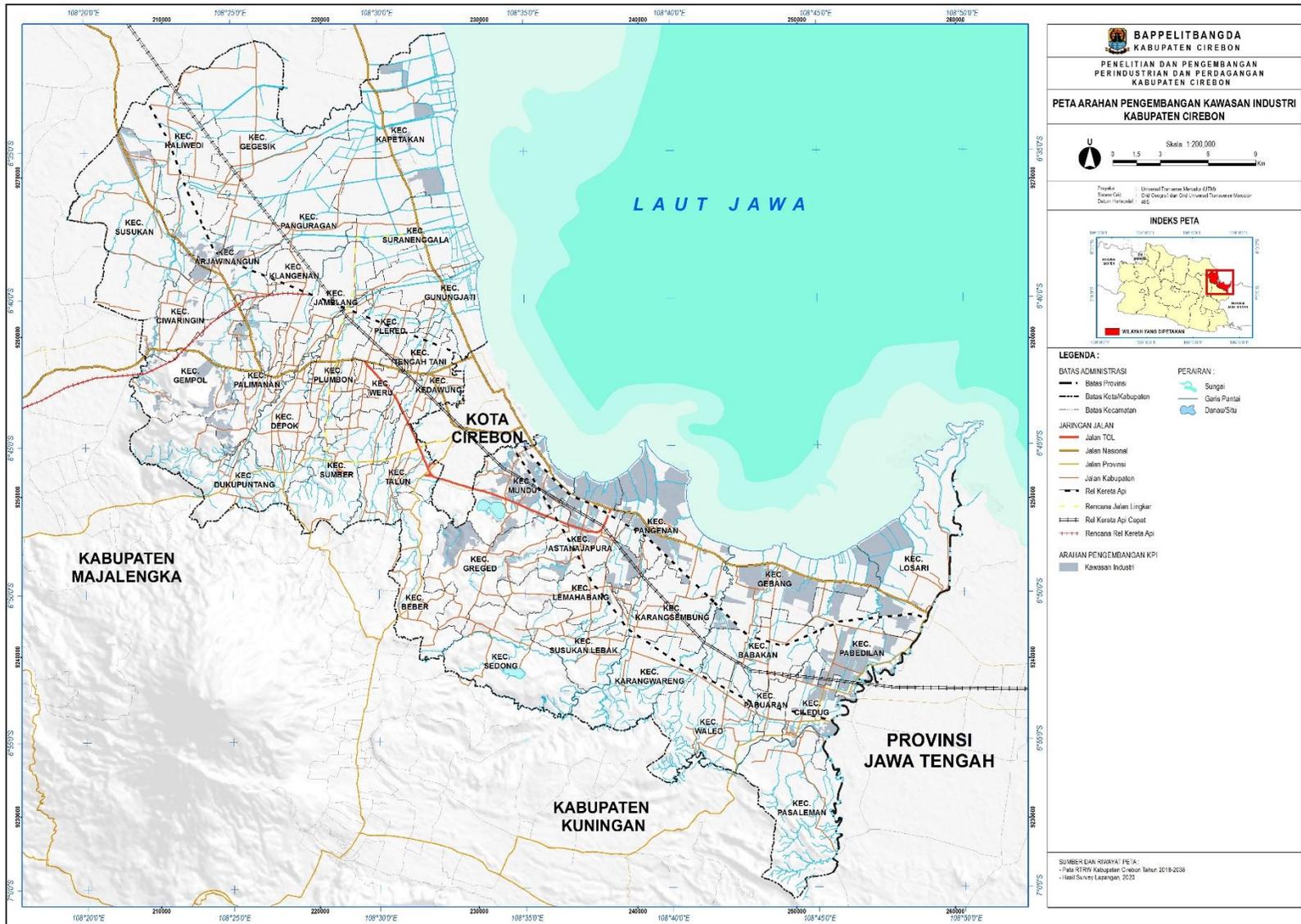
Berdasarkan hasil analisis lanjutan disertai sinkronisasi dengan evaluasi pola ruang RTRW Kabupaten Cirebon, termasuk hasil observasi lapangan yang menghasilkan sejumlah catatan dari ground truth survey dan masukan stakeholders yang ditemui pada saat studi di sejumlah lokasi potensial KPI yang memiliki permasalahan konflik pemanfaatan ruang maupun lokasi potensial yang belum terpetakan,

selanjutnya dihasilkan masukan perbaikan bagi arahan ruang pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon. Arahan ruang ini telah mempertimbangkan adanya lahan produktif sawah, khususnya yang masuk dalam LP2B Kabupaten Cirebon berdasarkan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (2021), serta masukan terkait adanya sejumlah lahan yang sudah kurang produktif sebagai lahan tambak garam atau lahan perkebunan yang ditinggalkan. Hasil kajian kebutuhan dan kesesuaian ruang bagi pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon ditampilkan pada tabel dan peta berikut yang juga memperlihatkan arahan pengembangan ruang dan pemanfaatan lahan bagi peruntukan industri yang tersebar di sejumlah kecamatan.

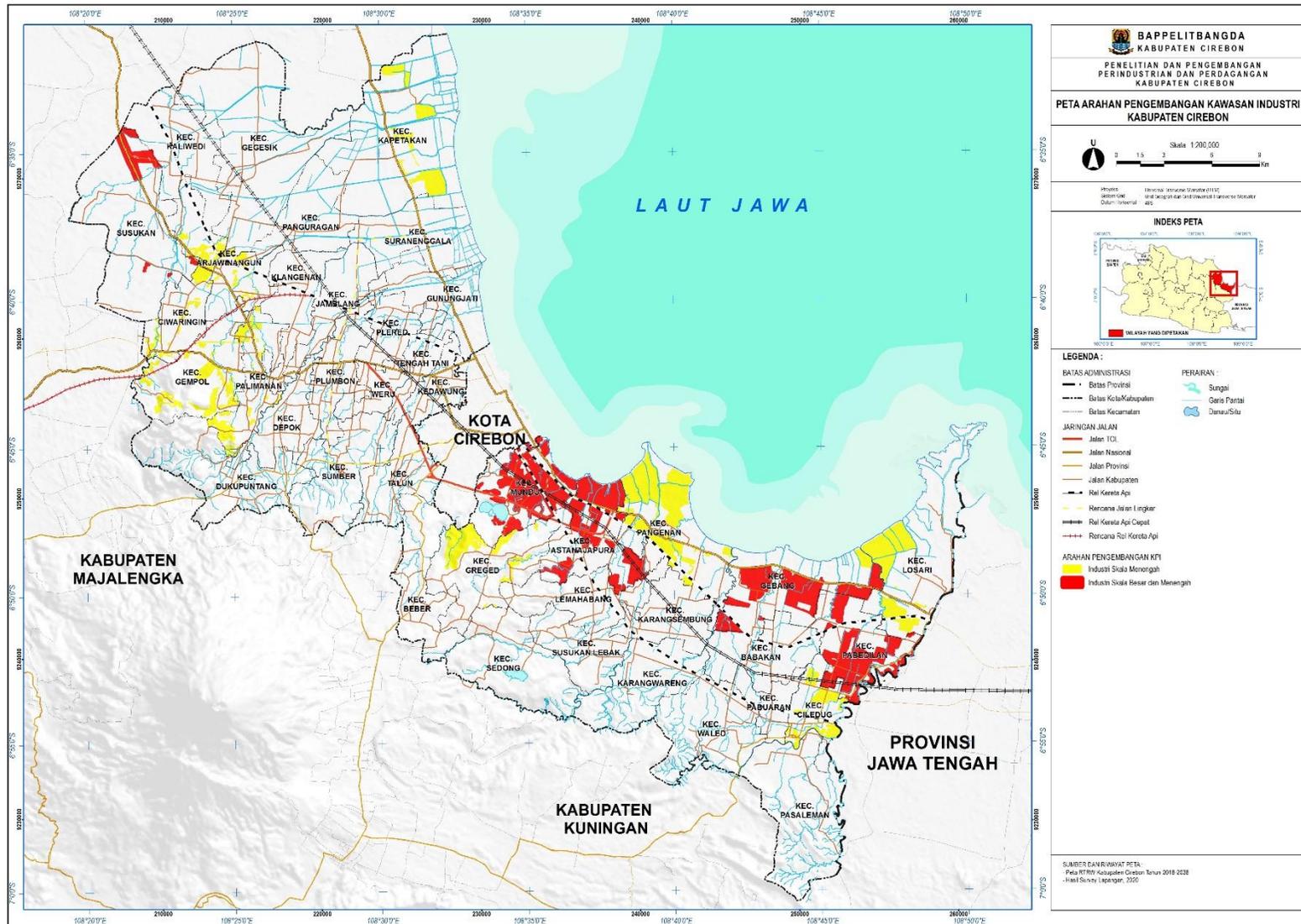
Tabel 6.9 Arahan Pengembangan Industri pada Masing-masing Kecamatan Potensial Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon

No	KECAMATAN	Termasuk KPI REBANA	ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	LUAS (Ha.)
1	Arjawinangun	-	Industri Skala Menengah	305,29
2	Astanajapura	-	Industri Skala Besar dan Menengah	692,07
		KPI REBANA	Industri Skala Besar dan Menengah	257,20
3	Ciledug	-	Industri Skala Menengah	271,52
		KPI REBANA	Industri Skala Menengah	59,34
4	Ciwaringin	-	Industri Skala Menengah	198,47
5	Gebang	-	Industri Skala Besar dan Menengah	442,94
		-	Industri Skala Menengah	72,98
		KPI REBANA	Industri Skala Besar dan Menengah	561,06
6	Gempol	-	Industri Skala Menengah	413,91
7	Greged	-	Industri Skala Menengah	453,29
		KPI REBANA	Industri Skala Menengah	46,41
8	Kapetakan	-	Industri Skala Menengah	490,51
9	Lemahabang	KPI REBANA	Industri Skala Besar dan Menengah	35,02
10	Losari	-	Industri Skala Menengah	530,42
		KPI REBANA	Industri Skala Menengah	237,17
11	Mundu	-	Industri Skala Besar dan Menengah	643,88
		KPI REBANA	Industri Skala Besar dan Menengah	276,82
12	Pabedilan	-	Industri Skala Besar dan Menengah	170,18
		KPI REBANA	Industri Skala Besar dan Menengah	723,46
13	Palimanan	-	Industri Skala Menengah	333,97
14	Pangenan	-	Industri Skala Menengah	1.220,98
		KPI REBANA	Industri Skala Menengah	119,30
15	Susukan	-	Industri Skala Besar dan Menengah	244,61
Total Rekomendasi Luasan KPI Kabupaten Cirebon				8.800,81

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 6.17 Peta Rekomendasi Lahan/Pola Ruang bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon



Gambar 6.18 Peta Rekomendasi Pola Ruang bagi Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenis Industri Besar dan Menengah

6.3.2.2 Strategi Pencapaian Sasaran -2

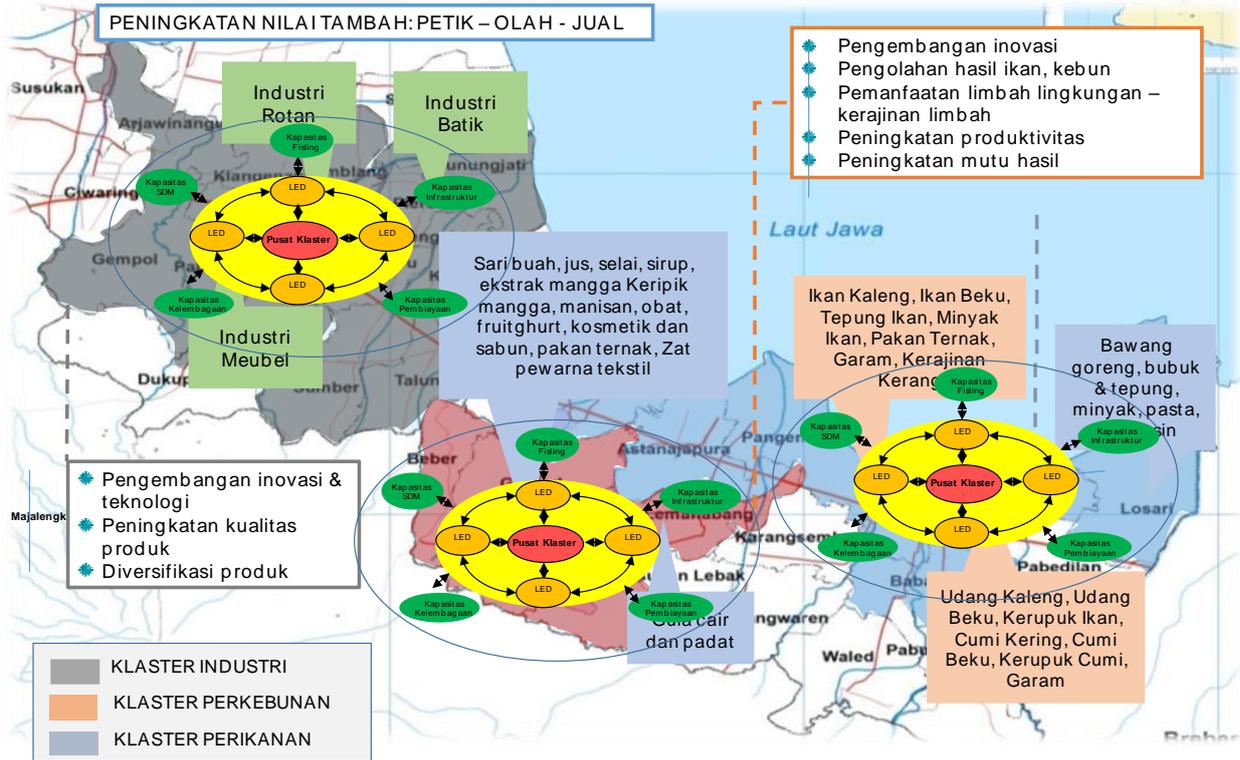
Sasaran-2 adalah **berkembangnya kegiatan industri yang dapat memanfaatkan potensi sumberdaya secara maksimal**. Sasaran ini dapat dicapai melalui sejumlah strategi berikut:

- Pengembangan industri kecil dan menengah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan menstimulasi produktivitas lokal;
- Penguatan linkage industri hulu dan hilir melalui perencanaan pengembangan industri terpadu Kabupaten Cirebon
 - Potensi utama: Agroindustri dan industri perikanan;
 - Adanya peluang kerjasama sektor industri dan sektor terkait lainnya (pariwisata, perdagangan, pertanian/perkebunan, perikanan, dll)
- Peningkatan jaringan jalan dan simpul transportasi guna mendukung konektivitas sumber bahan baku – pusat produksi wilayah;
- Mendorong pengembangan Kluster-kluster Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah pada pusat-pusat produksi dan pengumpul bahan baku
- Pengembangan penelitian dan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi bahan baku;

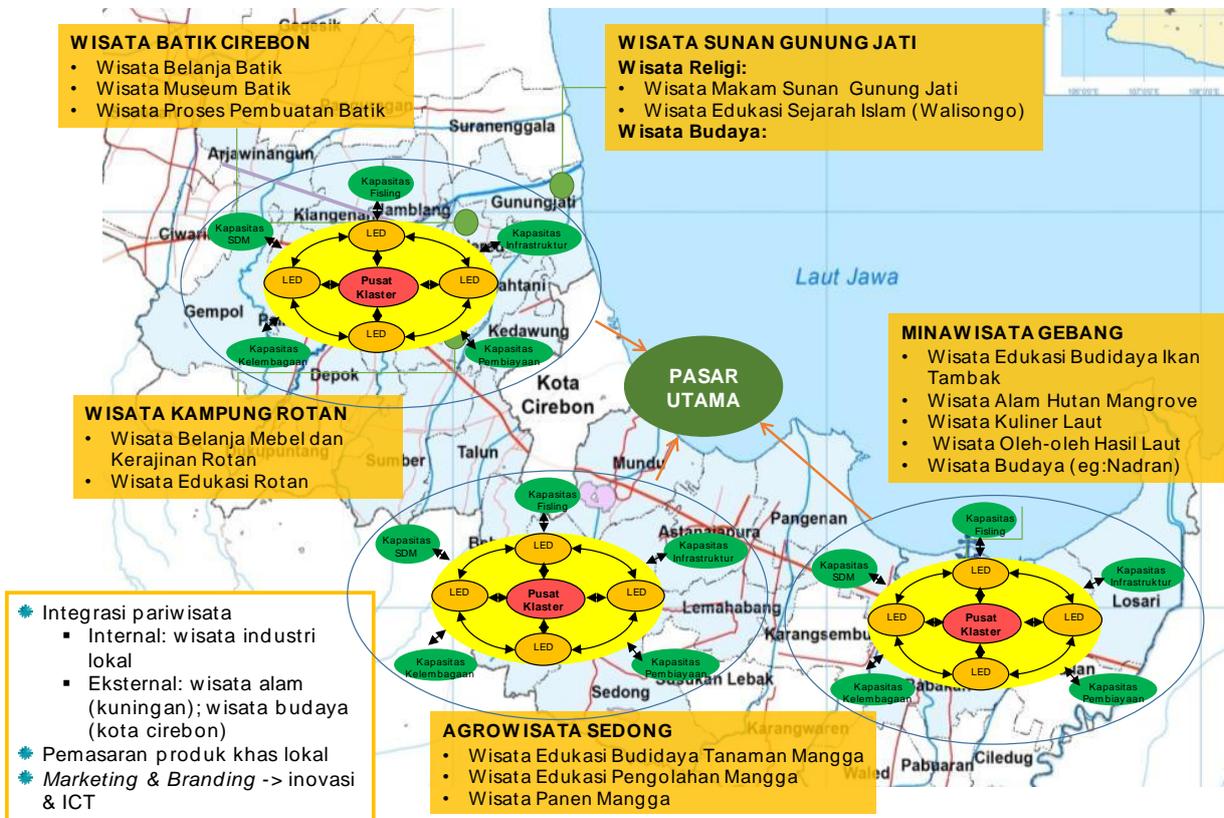
Salah satu konsep pengembangan yang dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui penguatan linkage industri adalah melalui konsep pengembangan kluster industri. Berdasarkan sebaran potensi pengembangan industri di Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kesamaan karakteristik kegiatan ekonomi atau komoditas unggulan yang dihasilkan, seperti kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah sepanjang jalur utara bagian timur Kabupaten Cirebon, yaitu Kecamatan Mundu, Astanajapura, Pangenan, Babakan, Losari dan Gebang, dengan komoditas unggulannya adalah hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi dan garam. Kemudian kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah selatan dan sebagian utara timur Kabupaten Cirebon, seperti Kecamatan Sedong, Beber, Greged, Lemahabang, Astanajapura, Pangenan, Babakan, Gebang dan Losari, dengan komoditas unggulannya adalah hasil perkebunan seperti mangga, tebu dan bawang. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah bagian barat Kabupaten Cirebon, seperti Kecamatan Plumbon, Weru, Depok, dll, komoditas unggulan yang dihasilkan adalah batik, hasil industri rotan dan meubeul.

Akan tetapi, komoditas-komoditas unggulan tersebut, terutama komoditas unggulan perikanan dan perkebunan, masih berorientasi pada petik-jual yang memiliki nilai tambah yang relatif rendah. Karenanya, untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang rantai industri, maka komoditas-komoditas tersebut didorong agar menghasilkan produk hilir. Konsep ini akan memaksimalkan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh kecamatan-kecamatan tersebut menjadi pendorong ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*), dimana akan terbentuk struktur wilayah sebagai pusat produksi (untuk meningkatkan kualitas), pengolahan (diversifikasi), inovasi dan integrasi antar LED di dalam satu kluster.

Sentra pemasaran yang berada di dalam kluster berfungsi sebagai pusat kluster, dimana didalamnya terdapat kegiatan untuk memasarkan hasil produk-produk LED. Di dalamnya terdapat bangunan fisik berupa gudang dan etalase-etalase yang menampilkan hasil produk-produk yang berasal dari LED. Sentra pemasaran juga berfungsi sebagai wadah untuk munculnya inovasi dan teknologi di bidang pemasaran. Konsep LED tersebut dapat dipahami pula melalui penjelasan gambar berikut.



Gambar 6.19 Pengembangan Industri Lokal Yang Saling Terkait Melalui Kluster Industri



Gambar 6.20 Penguatan Linkage / Integrasi Lintas Sektor

6.3.2.3 Strategi Pencapaian Sasaran -3

Sasaran-3 adalah **berkembangnya kegiatan industri unggulan yang didukung penguasaan teknologi dan menghasilkan produk bernilai tambah maksimal yang dapat menjadi keunggulan wilayah**. Upaya untuk mengembangkan industri unggulan ini dapat dicapai melalui strategi berikut:

- Pengembangan penelitian dan penerapan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan produk
- Didukung regulasi dan kerjasama dengan wilayah lain, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk alih teknologi dan peningkatan kapasitas SDM industri
- Penyiapan database industri dan pemanfaatan sistem informasi pengembangan industri daerah
- Mengembangkan koridor industri sesuai potensi jenis industri pada KPI
- Pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan (penerapan konsep *green infrastructure*)

Salah satu bentuk penerapan strategi pengembangan kegiatan industri unggulan adalah dengan melakukan identifikasi dan menentukan aspek produk unggulan dari masing-masing sub-sektor perindustrian, termasuk sektor yang berkaitan dengan bahan baku industri dan pemasaran industri. Dalam konsep ini, akan dilakukan dua langkah pendekatan strategis untuk pencapaian sasaran pengembangan industri unggulan:

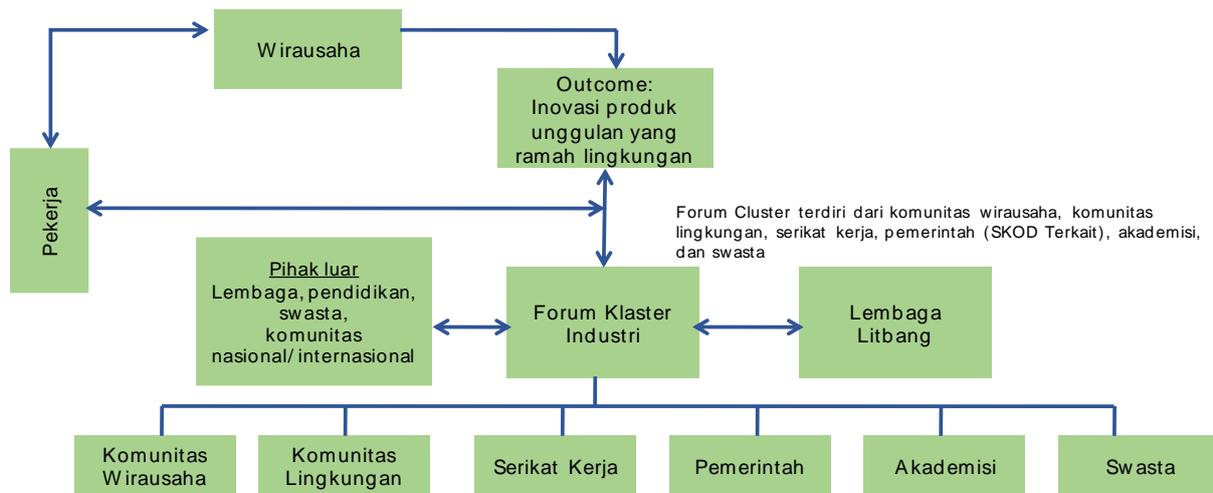
1. Identifikasi keterkaitan antar sub-sektor unggulan, sebagai contoh adalah antara sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku, sektor industri sebagai tahap pengolahan, dan sektor pariwisata sebagai bagian dari proses distribusi sekaligus pengembangan nilai tambah industri.
2. Analisis penentuan komoditas unggulan, dengan pertimbangan keberlanjutan jangka panjang baik dari segi penyediaan sumberdaya dan pertimbangan nilai jasa ekosistem yang tinggi, maupun pertimbangan keberlanjutan sektor industri secara ekonomi sektoral dan wilayah.



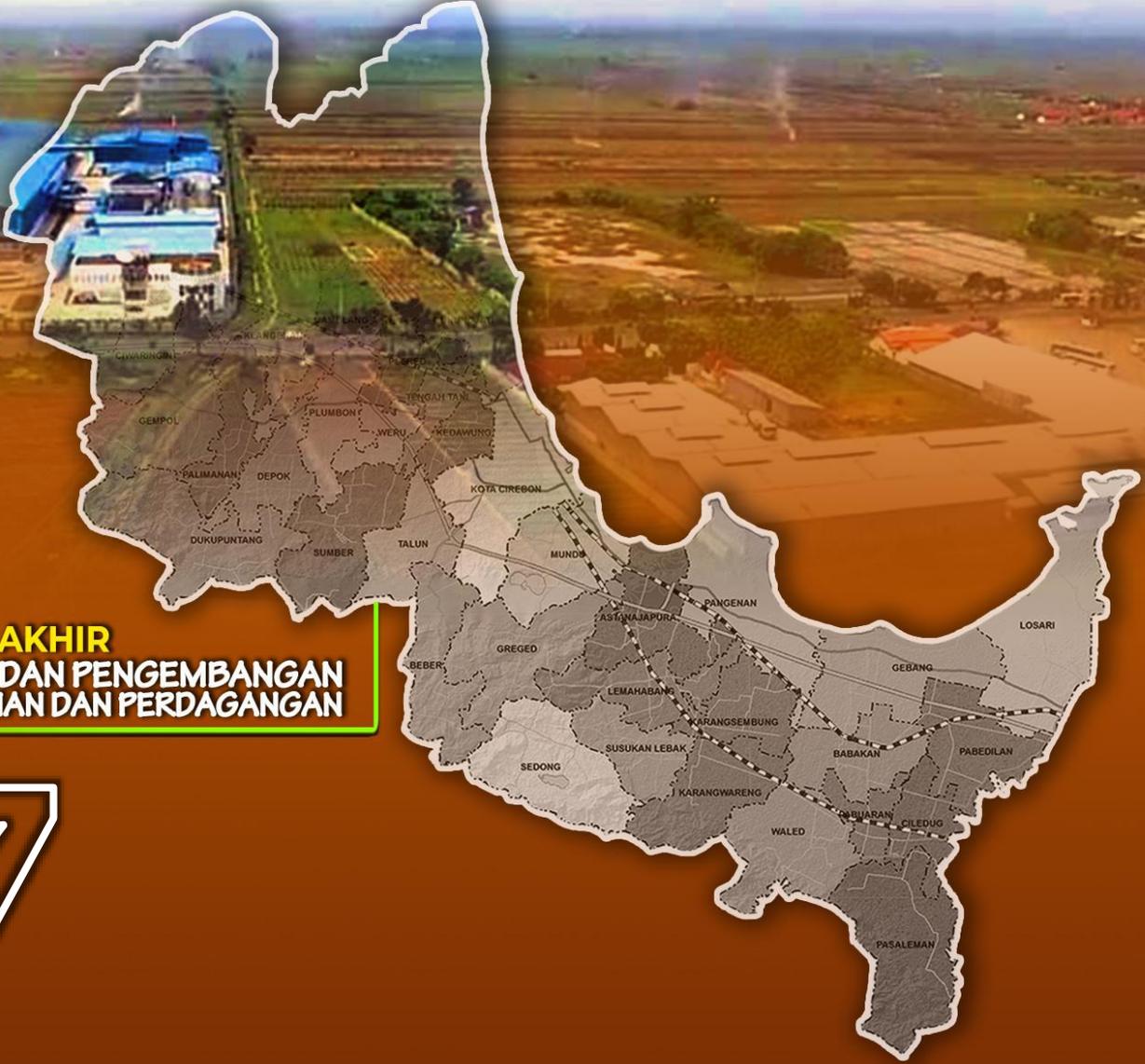
Gambar 6.21 Konsep Pengembangan Sektor Unggulan dengan Kolaborasi dan Keterpaduan Lintas Sektor Ekonomi dan Industri

Rumusan lain yang dapat menjadi bentuk penerapan strategi pencapaian sasaran-3 sebagaimana di atas adalah upaya pengembangan SDM sektor industri. Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan pendekatan pelibatan stakeholders dalam bentuk kerjasama antar pihak. Rencana pengembangan SDM sektor industri dilakukan dengan langkah berikut:

1. Membentuk karakter wirausaha yang sesuai dengan konsep regional cluster, LED, dan *export base*;
2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM berdasarkan klaster industri yang melibatkan berbagai stakeholders sektor perindustrian;
3. Meningkatkan kapasitas SDM yang ramah lingkungan;
4. Melakukan kerjasama dan transfer pengetahuan melalui forum klaster;
5. Mendorong implementasi Penelitian dan Pengembangan melalui forum klaster.



Gambar 6.22 Rumusan Pengembangan SDM Sektor Industri



LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



7.1 Kesimpulan

Hasil kajian terhadap pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon menyajikan sejumlah data dan fakta yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon. Berikut sejumlah kesimpulan yang dapat diambil dan perlu menjadi catatan untuk kebutuhan tindak lanjut pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon.

- ❖ **Potensi pengembangan KPI Kabupaten Cirebon** cukup besar mengingat adanya **Keunggulan Komparatif Wilayah** Kabupaten Cirebon sebagai Pendorong Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), meliputi:
 - UMK dibawah rata-rata Provinsi
 - Potensi lahan bagi pengembangan fungsi industri
 - Potensi sektor unggulan yang sudah terbukti
 - Posisi strategis dan konektivitas wilayah
 - Tol Cipali, BIJB, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Losarang, Pelabuhan Cirebon Rencana Tol Patimban, Tol Cisumdawu
 - Rencana Akses Kereta Tj.Sari - BIJB- Arjawinangun, Rencana Akses Kereta Patimban
- ❖ Sejumlah **permasalahan pengembangan KPI yang perlu diantisipasi**, meliputi:
 - Potensi konflik lahan peruntukan industri dengan lahan budidaya masyarakat, khususnya kawasan permukiman dan lahan budidaya pertanian/perikanan;
 - Potensi konflik lahan peruntukan industri dengan lahan berfungsi lindung yang perlu diantisipasi, khususnya keberadaan kawasan lindung pesisir dan hutan bakau/mangrove di wilayah pesisir Utara yang berdekatan dengan arahan lokasi KPI;
 - Keunggulan komparatif wilayah lain yang menjadi ancaman pengembangan industri seperti keberadaan simpul transportasi di Patimban (Kabupaten Subang) dan Bandara Udara di Majalengka;
 - Ketergantungan sejumlah industri pengolahan terhadap bahan baku yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu dicarikan alternatif supply bahan baku untuk mengantisipasi kondisi-kondisi keterbatasan yang mungkin dialami pada musim-musim tertentu, selain mengantisipasi adanya pesaing industri pengolahan di wilayah lainnya.
- ❖ **Kebijakan Internal** Sebagai Acuan Dasar Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon
 - Kawasan Peruntukan Industri yang semula ditetapkan seluas 10 ribu Hektar dalam RTRW Kabupaten Cirebon, pada studi ini ternyata memiliki kelayakan pengembangan industri total seluas 8.800 Ha.
 - Arah pengembangan industri telah ditetapkan dalam RPIK Kabupaten Cirebon meliputi adanya Kawasan Industri Besar, Menengah, dan Kawasan Industri serta Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).
- ❖ Terkait **jenis-jenis Industri yang dapat dikembangkan** di KPI Kabupaten Cirebon:
 - Kawasan peruntukan industri menengah dan besar serta Kawasan industri
 - Pengembangannya mengacu pada Permenindustri yang ada (areal khusus)

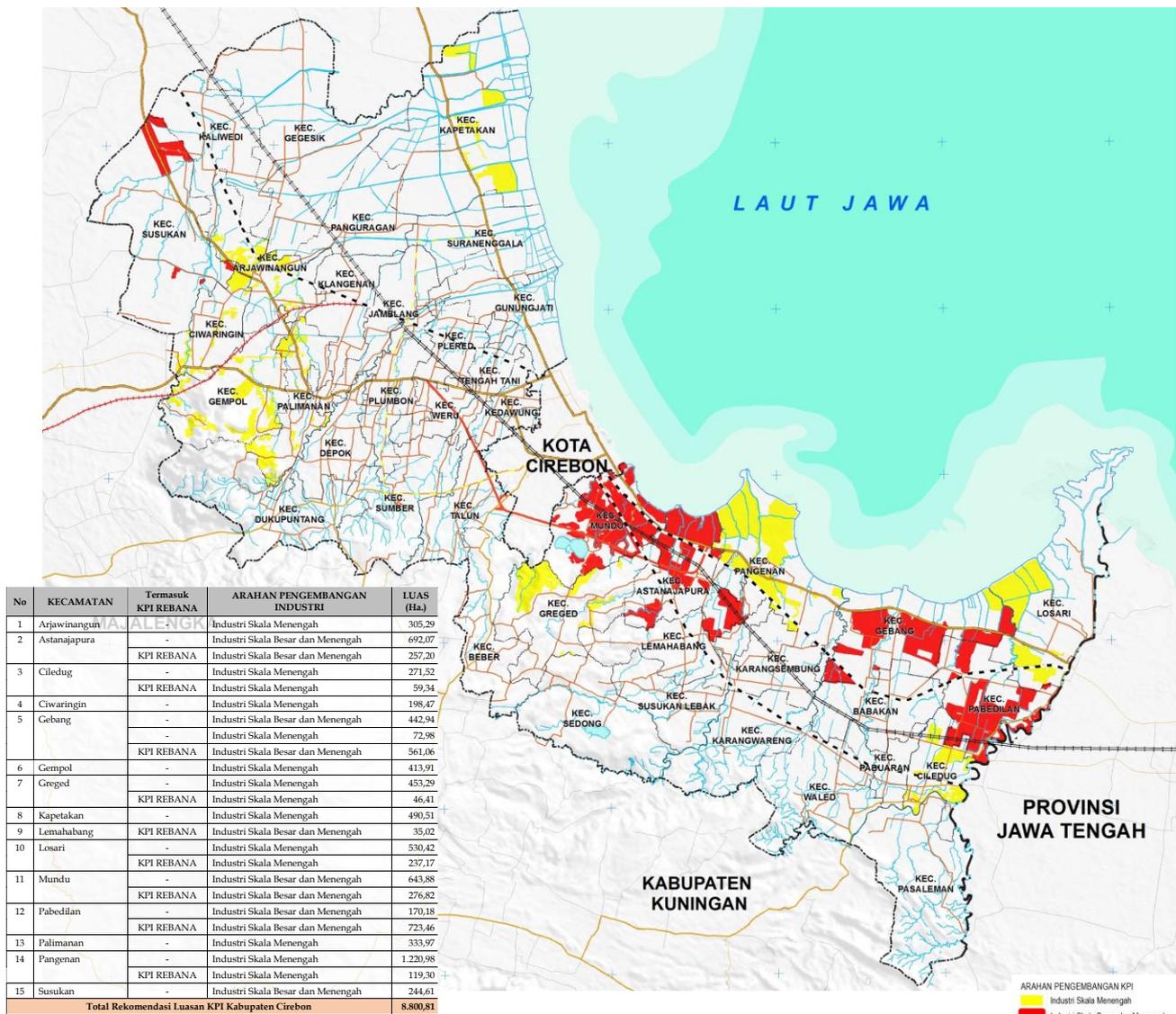


- Merupakan potensi penggerak wilayah sehingga perlu antisipasi aspek lingkungan, pola ruang, dan aspek sosial, infrastruktur, kelembagaan, dll.
- ☉ Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro berada di dalam Kawasan Permukiman
 - Memerlukan pengaturan kegiatan dalam Regulasi Penataan Ruang
 - Perlu melihat aspek kesesuaian lahan batasan kegiatan
 - Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Zonasi dalam Rencana Tata Ruang
- ☉ Kawasan peruntukan industri agro
 - Potensi pendorong pengembangan wilayah dalam konsep indigenous development
 - Meliputi wilayah Kecamatan Sedong, Greged, Lemahabang, Pasaleman dan Astanajapura.
- ❖ Adanya **Kebijakan Sektor dan Regional yang Perlu Diantisipasi** dalam Pengembangan KPI Kabupaten Cirebon, meliputi:
 - ☉ Kebijakan Nasional dan Regional yang akan Berdampak pada pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon:
 - RIPPIN 2015-2035 dengan sektor prioritas dan penetapan kedalam WPPI-2
 - RPIP Jabar 2018 dengan sektor prioritas dan pengembangan /relokasi industri ke WPPI-2
 - Draft RTRWP Jabar yang menekankan adanya upaya untuk mendorong segitiga WP Timur Prov.Jawa Barat, termasuk konsep pengembangan kawasan ekonomi dan metropolitan Rebana yang melibatkan wilayah Kabupaten Cirebon
 - ☉ Strategi pembangunan industri Jawa Barat yang berfokus pada penguatan penyediaan bahan baku, penguatan proses, penguatan output dan distribusi (logistik) serta penguatan faktor pendukung.
 - ☉ Arahan untuk fokus pada Industri Unggulan Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Cirebon yang mencakup:
 - industri pengolahan ikan;
 - industri furniture kayu dan rotan;
 - perawatan kapal;
 - suplemen pakan ternak dan *aqua culture*;
 - komponen berbasis kayu (*wood working, laminated dan finger joint*);
 - industri bahan galian non logam (semen dan keramik).
 - ☉ Tidak seluruh wilayah KPI Kabupaten Cirebon yang kemungkinan akan dimasukkan kedalam KPI Rebana, sehingga diperlukan antisipasi terkait:
 - Penanganan pengelolaan KPI yang tidak termasuk dalam arah pengembangan KPI Rebana
 - Penguatan sektor-sektor industri kecil dan menengah / SIKM agar dapat memiliki daya saing sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat
 - Penyiapan regulasi pengembangan KPI Kabupaten Cirebon yang mempertimbangkan batasan-batasan pembangunan serta keberlanjutan sektor industri secara jangka panjang.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah kesimpulan di atas, selanjutnya disampaikan sejumlah rekomendasi studi sebagaimana berikut:

- ❖ Rekomendasi ruang bagi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Cirebon
 - Terdapat penyesuaian ruang bagi pengembangan KPI dengan dinamika perkembangan lahan yang mempertimbangkan keberadaan sawah produktif (berdasarkan peta LP2B Kabupaten Cirebon), daya dukung lahan sesuai jasa ekosistem industri, pertimbangan kawasan lindung khususnya di wilayah pesisir, serta masukan dari stakeholders khususnya masyarakat di lokasi potensi konflik.
 - Hasil penyesuaian adalah rekomendasi ruang pengembangan KPI seluas 8.800,81 Ha., sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 7.1 Rekomendasi Ruang bagi Lahan Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon

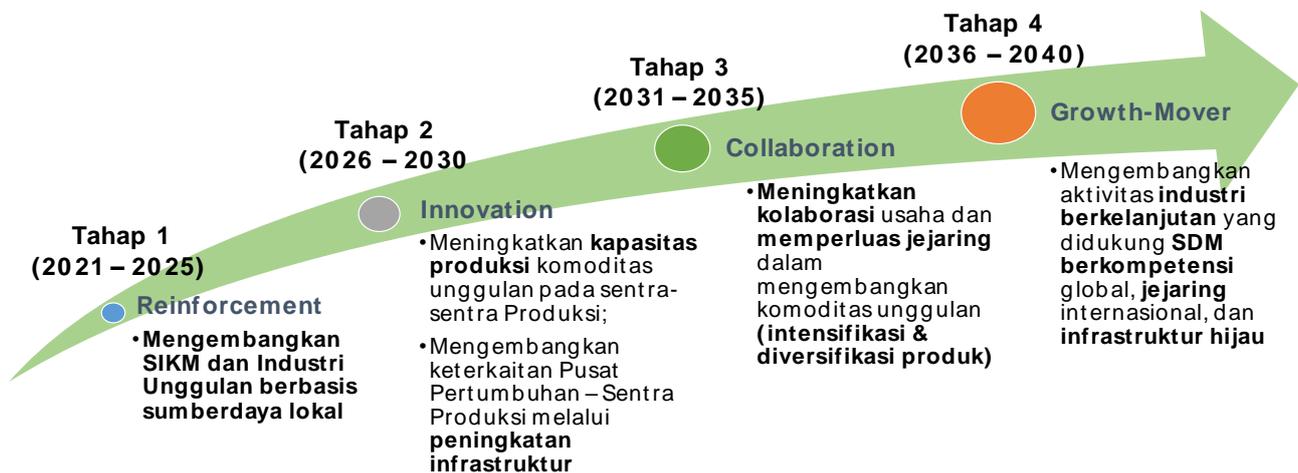
- ❖ Penyiapan infrastruktur pendukung KPI berbasis *green infrastructure*.
 - Sejumlah kendala terkait dengan upaya pengembangan KPI yang terhambat akibat keterbatasan infrastruktur perlu dipersiapkan dengan pemrograman pembangunan infrastruktur yang lebih optimal. Selain sesuai dengan kebutuhan, infrastruktur tersebut perlu memperhatikan syarat pengelolaan lingkungan dan sistem sosial ekonomi secara berkelanjutan.
 - Untuk infrastruktur perhubungan, kebutuhan terkait sistem jaringan jalan perlu diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang dan transportasi wilayah. Sejumlah ruas jalan kolektor yang menjadi jalur distribusi industri perlu mengalami peningkatan kapasitas dalam bentuk pelebaran jalan.
 - Infrastruktur drainase berkaitan dengan kondisi jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, rentan terhadap kemungkinan bahaya banjir, disebabkan kemampuan pengendalian limpasan air yang minim. Oleh karena itu, kawasan peruntukan industri yang berada pada daerah rawan banjir diharapkan dapat dilindungi dengan menerapkan teknologi infrastruktur seperti:
 - Sistem Polder Pengendali Banjir Perkotaan
 - Pelindung Tebing Sungai dengan Bioengineering
 - Geocell sebagai Pelindung Tebing Sungai
 - Pemecah Gelombang Ambang Rendah (PEGAR)
 - Infrastruktur penyediaan air bersih berkaitan dengan kebutuhan akses sumber air baku dan air bersih dalam jangka panjang. Selain mengandalkan sumber air baku yang sudah tersedia di wilayah Kabupaten Cirebon maupun memanfaatkan aliran Waduk Jatigede, diperlukan antisipasi penyediaan air bersih melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang sederhana seperti:
 - Aquifer Storage Recovery (ASR) atau imbuhan buatan dengan sumur berbasis akuifer dan pengembangan bangunan Akuifer Simpanan Air Hujan (ABSAH)
 - Pengembangan Sumur Resapan pada industri skala kecil dan menengah
 - Pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis atau desalinasi air laut menjadi air tawar untuk kebutuhan industri khususnya di wilayah pesisir dan Kawasan Industri
 - Infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan, dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah cair dan limbah padat, antara lain:
 - Ekoteknologi dan Ecotech garden sebagai alternatif pengolahan limbah cair dengan menggunakan tanaman air, yang dalam hal ini menggunakan tanaman hias air
 - Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu yang dapat berfungsi menjadi sumber energi (PLT-Sampah)
 - Pengembangan rumah pengolahan limbah sebagaimana telah diujicobakan pada industri batu alam.
 - Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur hijau dalam pengembangan KPI, berupa sistem jaringan strategis yang direncanakan dan dikelola dari habitat alami, bekerjasama dengan sistem landsekap dan ruang terbuka lain untuk melestarikan nilai-nilai dan fungsi ekosistem agar lebih bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia (Benedict dan McMahon, 2003). Komponen utama infrastruktur hijau mencakup ekosistem alami dan buatan (bangunan) serta lansekap yang membentuk sistem "pusat (hub)" dan "jaringan (link)" yang terdiri atas:

- Jaringan lansekap, meliputi daerah alam yang luas dan dilindungi yang menghubungkan, preservasi, atau kawasan alami dan memberikan ruang yang cukup bagi tanaman dan hewan asli untuk berkembang Jaringan lansekap juga dapat memberikan ruang untuk perlindungan situs bersejarah dan kesempatan untuk rekreasi;
 - Koridor konservasi, meliputi kawasan lindung linier yang tidak begitu luas, seperti sungai dan koridor sungai yang berfungsi sebagai saluran biologi satwa liar dan dapat memberikan kesempatan untuk rekreasi.
 - Jalur hijau, meliputi koridor yang dilindungi dari tanah yang telah diolah untuk konservasi sumber daya dan/atau penggunaan rekreasi;
 - Sabuk Hijau, meliputi tanah alami yang dilindungi atau lahan yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengembangan selain itu juga melestarikan ekosistem asli dan/atau peternakan
 - Ecobelts - buffer yang dapat mengurangi zona ketegangan antara tanah perkotaan dan pedesaan menggunakan serta memberikan manfaat ekologi dan sosial bagi penduduk perkotaan dan pedesaan.
- ❖ Pengembangan Agroindustri terkoneksi dengan sub-sektor ekonomi lainnya (pertanian – industri – pariwisata – perdagangan dan jasa)
- Industri berbasis pertanian dapat menjadi salah satu pendorong ekonomi lokal yang memiliki daya ungkit yang baik dalam jangka panjang apabila dikelola dengan baik;
 - Pertimbangan pengembangan agroindustri dalam studi ini didasari oleh sejumlah faktor seperti:
 - Kebijakan Regional Prov.Jawa Barat yang menetapkan MCR sebagai pusat agroindustri dan agrowisata.
 - Agroindustri memiliki backward dan forward linkage yang paling besar
 - Prestasi sektor pertanian dilihat dari perbandingan dengan Nasional dan Jawa Barat
 - Serapan Tenaga Kerja yang cukup tinggi di bidang pertanian
 - Kontribusi PDRB pertanian masih yang terbesar di Kabupaten Cirebon
- ❖ Skenario Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon
- Skenario pengembangan KPI perlu disusun untuk memperoleh *milestones*/sasaran antara yang terukur untuk setiap periodenya, sehingga capaian pengembangan KPI akan lebih terawasi dan dapat diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan wilayah dan rencana pengembangan sektor industri;
 - Skenario pengembangan KPI dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pengembangan, dimana setiap tahap akan memiliki periode pengembangan selama 5 (lima) tahun;
 - Langkah pentahapan sesuai skenario yang direkomendasikan pada studi ini adalah:
 - Tahap 1 – Penguatan (*Reinforcement*) yang dilakukan dengan mengembangkan industri berbasis lokal berdasarkan industri unggulan tanpa melupakan upaya mengangkat industri kerakyatan yang dapat menjadi pendukung penggerak pembangunan sosial dan ekonomi lokal di tingkat wilayah yang lebih kecil;
 - Tahap 2 – Inovasi, dilakukan dengan upaya pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, serta dukungan regulasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi komoditas unggulan pada

sentra-sentra Produksi, sekaligus mengembangkan keterkaitan Pusat Pertumbuhan dengan Sentra Produksi melalui peningkatan infrastruktur;

- Tahap 3 - Kolaborasi, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama usaha dan memperluas jejaring dalam mengembangkan komoditas unggulan untuk mendorong semakin berkembangnya produk unggulan maupun produk industri lokal (intensifikasi & diversifikasi produk); dan
- Tahap 4 - Penggerak Pertumbuhan, dimana sektor industri diharapkan sudah dapat menjadi penggerak pertumbuhan wilayah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan rekomendasi Tujuan dan Sasaran Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon

TUJUAN : Berkembangnya Industri Kabupaten Cirebon yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang pengembangan KPI



Gambar 7.2 Rekomendasi Skenario Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon

- ❖ Rekomendasi kelembagaan, kerjasama, dan dukungan regulasi untuk pengembangan KPI
 - ➡ Pengembangan industri terpadu memerlukan dukungan lembaga yang akuntabel dan transparan terkait belanja dan bantuan keuangan (Nemes, 2005). Kelembagaan tersebut dapat berupa Unit Pengelola Teknis yang kemudian berkembang menjadi Badan Usaha Daerah (BUMD)
 - ➡ Pembangunan terpadu dengan dukungan kelembagaan sebagaimana di atas dapat bekerja jika sistem pembangunan daerah mencapai tingkat tertentu dari pelembagaan. Untuk itu, diperlukan adanya perlunya penguatan akses Lokal – Pusat yang didukung dengan penguatan ekonomi lokal
 - ➡ Pengembangan keterkaitan industri hulu – hilir:
 - Keterkaitan industri hulu-hilir dipengaruhi oleh aliran (flows) antar wilayah yang melibatkan manusia, produksi, komoditas, pendapatan dan informasi (Douglas, 1998).
 - Proses aliran ini dipengaruhi oleh tiga hal: struktur desa (pusat bahan baku), fungsi dan peran kota (pusat produksi & distribusi), serta intervensi kebijakan.



- Strategi keterpaduan Hulu-Hilir dalam pengembangan industri dapat berhasil jika:
 - Masing-masing sub-sektor dapat memainkan peran dan fungsinya secara optimal
 - Terdapat aliran yang lancar antara desa dan kota dengan didukung adanya intervensi kebijakan yang kuat.

- ❖ Rekomendasi Tindak Lanjut hasil studi:
 - Hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon maupun kebijakan sektoral untuk perindustrian, perdagangan dan jasa, pertanian, maupun perhubungan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menunjang pengembangan KPI
 - Hasil studi perlu ditindaklanjuti dengan sejumlah upaya penajaman strategi untuk komponen-komponen pendukung pengembangan KPI, antara lain:
 - Identifikasi peningkatan status dan kapasitas jaringan jalan sekitar KPI
 - Kajian kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan limbah cair industri
 - Kajian kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan limbah padat dan persampahan pada KPI
 - Kajian kebutuhan pengembangan jaringan sumber daya air penunjang pembangunan KPI
 - Kajian kebutuhan regulasi infrastruktur hijau dalam pengembangan KPI
 - Perencanaan pengembangan agroindustri unggulan di Kabupaten Cirebon
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada KPI
 - Perumusan grand skenario pengembangan industri di Kabupaten Cirebon dan penyusunan update RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon)
 - Kajian kebutuhan dan penyusunan rencana pengembangan kelembagaan pendukung kerjasama pengembangan industri
 - Penyusunan regulasi kerja sama dan pengembangan perindustrian terpadu
 - Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dan basisdata perindustrian
 - Berbagai studi maupun perencanaan yang dapat mendukung upaya pengembangan industri dan pemanfaatan ruang KPI di Kabupaten Cirebon secara optimal.